LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 3 TAHUN 2021

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

TAHUN
2021

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pemberlakuan kebijakan nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta mempertimbangkan kondisi ekonomi makro yang berimplikasi pada pembangunan di Kabupaten Bogor, perlu dilakukan perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan ...

23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

30. Peraturan ...

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
6. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJPN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

15. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
16. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target pembangunan nasional.
19. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
20. Isu-Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
24. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.
25. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
26. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
27. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

28. Program ...

28. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
29. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
30. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
31. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
32. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
33. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian outcome beberapa program.
34. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang, adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

2. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara RKPD Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Daerah ini, maka Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2021 harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Dalam hal terdapat kekosongan pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 dan RKPD Tahun 2025, penyusunan program RKPD mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

3. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 6 September 2021

BUPATI BOGOR,

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 6 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

BURHANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021 NOMOR ..3..

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT : (3/132/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, yang berlaku selama 5 (lima) tahun, dan selaras dengan periode masa bakti kepala daerah dan wakil kepala daerah, sejak dilantik hingga akhir periode kepemimpinan. RPJMD berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

RPJMD merupakan dokumen yang dipedomani dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 merupakan tahapan keempat perencanaan pembangunan jangka menengah berdasarkan periode waktu perencanaan jangka panjang daerah tahun 2005-2025. Pemberlakuan RPJMD Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 telah diterapkan selama 2 tahun, yaitu tahun 2019-2020. Dalam perjalanannya, terdapat kondisi yang mengharuskan terjadinya perubahan peraturan daerah tersebut, yaitu:

1. Adanya perubahan kebijakan nasional yang terkait dengan substansi perencanaan pembangunan daerah;
2. Adanya bencana non alam yaitu pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Perubahan kebijakan nasional yang terkait dengan substansi perencanaan pembangunan daerah berupa:

a. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah yang telah dicantumkan dalam Bab III dokumen RPJMD.
b. Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang mengamanatkan kewajiban seluruh pemerintah daerah untuk menggunakan satu aplikasi perencanaan yang terintegrasi secara nasional, yang meliputi sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya.

c. Pemberlakuan ...

c. Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Aturan ini membakukan penggunaan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah, dan secara otomatis membatalkan nomenklatur program-program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

d. Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang mengamanatkan pengintegrasian substansi RPJMN ke dalam RPJMD dalam rangka mewujudkan sinergi antara kebijakan pusat dan daerah, baik berkaitan dengan sinergi prioritas pembangunan, maupun program-program prioritas nasional.

e. Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan ketentuan pembakuan indikator makro dan indikator pelaksanaan kewenangan wajib dan pilihan sebagai bahan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini berkonsekuensi pada penataan kembali capaian program sebagai representasi pertanggungjawaban kinerja tahunan kepala daerah.

f. Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa salah satu poin penting penilaian indeks pengelolaan keuangan daerah adalah adanya kesesuaian antara perencanaan dengan penganggaran. Salah satu poin yang diukur adalah kesesuaian nomenklatur program serta pagu program dalam RPJMD dengan RKPD, KUA-PPAS, dan APBD.

g. Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan teknis pengelolaan keuangan daerah sebagai implementasi rinci dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terjadinya bencana nonalam yaitu pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada kinerja pembangunan di Kabupaten Bogor merupakan pertimbangan bagi daerah untuk melakukan perubahan RPJMD. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi tersebut menyebabkan terpuruknya kondisi perekonomian daerah yang berdampak signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah dalam mendanai pembangunan. Dengan demikian, Pemerintah Kebupaten Bogor perlu melakukan revisi pada target-target pembangunan sesuai dengan kondisi kemampuan daerah hingga akhir periode tahun 2023.

Secara umum, perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 merupakan suatu keharusan yang perlu dilakukan untuk menata kembali perencanaan dan penganggaran tahunan, baik tingkat daerah maupun perangkat daerah hingga akhir periode tahun 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan pada Ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa rancangan awal RKPD Tahun 2024 dan rancangan awal RKPD Tahun 2025, disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penyusunan perencanaan pembangunan.

RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD untuk tahun 2019 hingga tahun 2023, dengan tahun dasar 2018.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1), Penyusunan RKPD diawali dengan tahapan Rancangan Awal RKPD yang dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana. Dalam hal RPJMD Tahun 2018-2023 habis masa berlaku pada tahun 2023, maka RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan Rancangan teknokratik RPJMD.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rancangan teknokratik diselesaikan paling lambat sebelum penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Dengan demikian, terdapat kekosongan RPJMD untuk penyusunan RKPD Tahun 2024 dan Tahun 2025.

Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 147 ayat (2), disebutkan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi. Adapun pada ayat (3), disebutkan bahwa RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 112

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

DAFTAR GAMBAR ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN..... **I-1**
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-13
1.4 Maksud dan Tujuan I-16
1.5 Sistematika Penulisan I-16

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **II-1**
2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah II-1
2.1.2 Kondisi Topografi II-2
2.1.3 Kondisi Klimatologi II-3
2.1.4 Kondisi Geologi II-5
2.1.5 Kondisi Hidrologi II-7
2.1.6 Kondisi Geografis Lainnya..... II-8
2.1.7 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup II-11
2.1.8 Aspek Demografi II-32
2.1.9 Potensi Pengembangan Wilayah II-38
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-68
2.3 Aspek Pelayanan Umum..... II-98
2.3.1 Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar..... II-98
2.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar..... II-112
2.3.3 Layanan Urusan Pilihan..... II-128
2.4 Aspek Daya Saing Daerah II-133

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH..... **III-1**
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu..... III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD III-2
3.1.2 Neraca Daerah III-9
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu..... III-13

3.2.1 Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah..... III-13
3.2.2 Proporsi Pengunaan Anggaran III-24
3.2.3 Analisis Pembiayaan III-25
3.2.4 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya III-30
3.3 Kerangka Pendanaan..... III-31
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja..... III-31
3.3.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah..... III-40
3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan..... III-41

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan IV-2
4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... IV-2
4.1.2 Aspek Daya Saing Daerah..... IV-4
4.1.3 Aspek Pelayanan Umum..... IV-5
4.2 Isu-Isu Strategis..... IV-20
4.2.1 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 ..... IV-21
4.2.2 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Sekitar..... IV-33
4.2.3 Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan..... IV-60
4.2.4 Isu-Isu Strategis Kabupaten Bogor IV-72

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-1
5.1 Visi..... V-1
5.2 Misi..... V-3
5.3 Tujuan dan Sasaran V-5
5.4 Keterkaitan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 ..... V-10
5.5 Keterkaitan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat serta Visi dan Misi RPJMN..... V-17
5.5.1 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bogor dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat V-17
5.5.2 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bogor dengan Visi dan Misi RPJMN V-18
5.6 Program Pembangunan Daerah V-20

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-1
6.1 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik dan Integratif VI-1
6.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Kesatu VI-13
6.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Kedua VI-15
6.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga VI-17
6.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Keempat VI-19
6.1.5 Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Kelima VI-21
6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pendekatan Spasial..... VI-34
6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Terkait Pembentukan Daerah..... ..... VI-53
6.4 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) VI-55
6.5 Proyek Strategis Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023 ..... VI-56

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH..... VII-1
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan..... VII-1
7.2 Program Perangkat Daerah..... VII-4

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.. VIII-1
8.1 Kinerja Makro Daerah VIII-2
8.2 Kinerja Utama Daerah VIII-10
8.3 Kinerja Utama Perangkat Daerah..... VIII-27

BAB IX PENUTUP IX-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Berdasarkan Kemiringan Lereng II-3

Tabel 2.2 Rata-rata Suhu, Kelembaban Udara, dan Curah serta Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bogor, 2020 .... II-4

Tabel 2.3 Luasan Berdasarkan Jenis Batuan di Kabupaten Bogor II-5

Tabel 2.4 Luasan Berdasarkan Jenis Tanah di Kabupaten Bogor.... II-5

Tabel 2.5 Luas Wilayah Sungai dan DAS II-7

Tabel 2.6 Kejadian Bencana di Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 ..... II-8

Tabel 2.7 Kawasan Rawan Bencana Banjir dan Gunung Api di Kabupaten Bogor II-8

Tabel 2.8 Rawan Bencana Erosi di Kabupaten Bogor..... II-10

Tabel 2.9 DDDTLH Indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kecamatan Tahun 2010 dan Tahun 2020 ..... II-13

Tabel 2.10 Dinamika Tren Perubahan Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kabupaten Bogor per Kecamatan Tahun 2010-2020 ..... II-16

Tabel 2.11 Status DDLH Penyedia Pangan (Tabulasi setiap Kecamatan) II-19

Tabel 2.12 DDDTLH Indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Air Kecamatan Tahun 2010 dan Tahun 2020 ..... II-22

Tabel 2.13 Dinamika Tren Perubahan Jasa Lingkungan Penyedia Air Kabupaten Bogor per Kecamatan Tahun 2010-2020 ..... II-25

Tabel 2.14 Status DDLH Penyedia Air (Tabulasi setiap kecamatan) ..... II- 28

Tabel 2.15 Rincian Cakupan Pelayanan Sistem Penyedia Air Bersih Kabupaten Bogor II-30

Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, *Sex Ratio*, Pertumbuhan Penduduk dan Distribusi Tahun 2020 ..... II-33

Tabel 2.17 Kepadatan Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2020 ..... II-37

Tabel 2.18 Zonasi Arah Pengembangan Komoditas Unggulan Kabupaten Bogor II-39

Tabel 2.19 Komoditas Tanaman Pangan Tahun 2018-2020 ..... II-39
Tabel 2.20 Komoditas Hortikultura Tahun 2018-2020..... II-42
Tabel 2.21 Komoditas Perkebunan Tahun 2018-2020 ..... II-43
Tabel 2.22 Kondisi Pariwisata Kabupaten Bogor Berdasarkan Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2019-2020 ..... II-46
Tabel 2.23 Sebaran Geosite pada Kawasan Pengembangan Geopark di Kabupaten Bogor II-48
Tabel 2.24 Kondisi Koperasi di Kabupaten Bogor Tahun 2020 ..... II-52
Tabel 2.25 Perkembangan Koperasi di Kabupaten Bogor Periode Tahun 2013-2020 ..... II-52
Tabel 2.26 Perkembangan Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Kabupaten Bogor Tahun 2020 ..... II-54
Tabel 2.27 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bogor Menurut Lapangan Usaha dan Skala Usaha Tahun 2019 (Juta Rupiah) II-56
Tabel 2.28 Jumlah Unit Usaha Menurut Skala Usaha dan Lapangan Usaha Tahun 2019 ..... II-57
Tabel 2.29 Pembagian Kluster Komoditas Unggulan Sekunder UMK Unggulan II-59
Tabel 2.30 Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Bogor sampai dengan Tahun 2020 ..... II-60
Tabel 2.31 Rekapitulasi Sarana Perdagangan Pasar Tradisional di Kabupaten Bogor II-60
Tabel 2.32 Rekapitulasi Sarana Perdagangan Pasar Desa di Kabupaten Bogor II-61
Tabel 2.33 Data Minimarket di Kabupaten Bogor II-63
Tabel 2.34 Potensi Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya II-65
Tabel 2.35 Investasi Industri Menengah di Kabupaten Bogor Tahun 2016-2019 ..... II-66
Tabel 2.36 Jumlah Unit Usaha Industri Kecil (Formal) II-66
Tabel 2.37 Jumlah Serapan Tenaga Kerja Industri Kecil (Formal)..... II-67
Tabel 2.38 Jumlah Unit Usaha Industri Menengah (Formal) II-67
Tabel 2.39 Jumlah Serapan Tenaga Usaha Industri Menengah (Formal) II-68

Tabel 2.40 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 Atas Dasar Harga Konstan (Triliun) II-71
Tabel 2.41 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun) II-73
Tabel 2.42 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bogor Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2013-2020 (%) II-75
Tabel 2.43 Inflasi Tahun Kalender Gabungan 7 Kota di Jawa Barat dan Kabupaten Bogor Tahun 2019 (Tahun 2012=100) II-79
Tabel 2.44 Indeks Gini di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 ..... II-81
Tabel 2.45 Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 ..... II-83
Tabel 2.46 Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 ..... II-87
Tabel 2.47 Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 ..... II-88
Tabel 2.48 Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 ..... II-93
Tabel 2.49 Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ..... II-94
Tabel 2.50 Persentase Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018..... II-95
Tabel 2.51 Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 ..... II-96
Tabel 2.52 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 ..... II-97
Tabel 2.53 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2019 ..... II-97
Tabel 2.54 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2018-2020..... II-98
Tabel 2.55 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2018-2020..... II-102

Tabel 2.56 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2020 ..... II-107
Tabel 2.57 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2020 ..... II-108
Tabel 2.58 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2020 ..... II-109
Tabel 2.59 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Sosial Tahun 2018-2020..... II-112
Tabel 2.60 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2020 ..... II-113
Tabel 2.61 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pangan Tahun 2018-2020 ..... II-114
Tabel 2.62 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2020 ..... II-118
Tabel 2.63 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2020 ..... II-119
Tabel 2.64 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Perhubungan Tahun 2018-2020 ..... II-121
Tabel 2.65 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018-2020 ..... II-122
Tabel 2.66 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Penanaman Modal Tahun 2018-2020 ..... II-123
Tabel 2.67 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2018-2020 ..... II-125
Tabel 2.68 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kebudayaan Tahun 2018-2020..... II-126
Tabel 2.69 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Perpustakaan Tahun 2018-2020..... II-127

Tabel 2.70 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pariwisata Tahun 2018-2020 ..... II-128
Tabel 2.71 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pertanian Tahun 2018-2020 ..... II-129
Tabel 2.72 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Perdagangan Tahun 2018-2020 ..... II-132
Tabel 2.73 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Perikanan Tahun 2018-2020 ..... II-132
Tabel 2.74 Rata-rata Pengeluaran Per-Kapita di Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 ..... II-133
Tabel 2.75 Nilai Tukar Petani di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ..... II-134
Tabel 2.76 Gambaran Umum Kinerja Keuangan BUMD Di Kabupaten Bogor II-135
Tabel 2.77 Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2019-2020 ..... II-135
Tabel 2.78 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 ..... II-140
Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 ..... III-5
Tabel 3.2 Neraca Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020..... III-10
Tabel 3.3 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016-2020 ..... III-25
Tabel 3.4 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020..... III-27
Tabel 3.5 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020..... III-28
Tabel 3.6 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 ..... III-29
Tabel 3.7 Rekapitulasi Penerimaan TJSL Perusahaan Kepada Pemerintah Kabupaten Bogor Periode Tahun 2018-2020.. III-30
Tabel 3.8a Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019-2020 ..... III-31

Tabel 3.8b Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023 ..... III-32
Tabel 3.9 Proyeksi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bogor Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2021-2023 ..... III-40
Tabel 3.10 Realisasi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020..... III-42
Tabel 3.11 Realisasi dan Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023 ..... III-43
Tabel 4.1 Strategi dan Kebijakan RPJMD Daerah Sekitar IV-33
Tabel 4.2 Matriks Integrasi KLHS dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 ..... IV-63
Tabel 4.3 Keterkaitan Isu-isu Strategis Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Bogor IV-75
Tabel 4.4 Keterkaitan Isu-isu Strategis Nasional dengan Kabupaten Bogor IV-76
Tabel 5.1 Keterkaitan Isu-isu Strategis Kabupaten Bogor dengan Tujuan dan Sasaran dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 ..... V-5
Tabel 5.2 Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023..... V-7
Tabel 5.3 Keterkaitan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023..... V-15
Tabel 5.4 Keterkaitan Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 dengan Perubahan RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023 ..... V-18
Tabel 5.5 Keterkaitan Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 .... V-19
Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023..... VI-3

Tabel 6.2 Keterkaitan Program Pembangunan Daerah terhadap Visi dan Misi berdasarkan Sasaran dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 ..... VI-23
Tabel 6.3 Harmonisasi Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Strategi dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bogor VI-40
Tabel 6.4 Pembagian Wilayah Pengembangan..... VI-48
Tabel 6.5 Keselarasan Program Prioritas Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 dengan Program Perwujudan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036..... VI-49
Tabel 6.6 Rencana Pemekaran Daerah Kabupaten Bogor..... VI-55
Tabel 6.7 Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2019-2023 ..... VI-56
Tabel 6.8 Rencana Proyek Strategis Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023 ..... VI-56
Tabel 7.1a Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019-2020..... VII-2
Tabel 7.1b Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023 ..... VII-3
Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2019 ..... VII-6
Tabel 7.3 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bogor Tahun 2020 .... VII-86
Tabel 7.4 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023 ..... VII-152
Tabel 8.1 Perbandingan Target IPM Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023 ..... VIII-2
Tabel 8.2 Perbandingan Target Penurunan Angka Kemiskinan Nasional, Jawa Barat, dan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023 ..... VIII-3
Tabel 8.3 Perbandingan Target Angka Pengangguran Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023..... VIII-4

Tabel 8.4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023..... VIII-5
Tabel 8.5 Perbandingan Target Pendapatan Perkapita Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023 ..... VIII-6
Tabel 8.6 Perbandingan Target Pencapaian Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023 ..... VIII-7
Tabel 8.7 Indikator Makro Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 .... VIII-9
Tabel 8.8 Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023..... VIII-11
Tabel 8.9a Realisasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019-2020 ..... VIII-29
Tabel 8.9b Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023..... VIII-44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen I-16
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bogor II-1
Gambar 2.2 Peta Morfologi Kabupaten Bogor II-2
Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Bogor II-3
Gambar 2.4 Peta Curah Hujan Kabupaten Bogor II-4
Gambar 2.5 Peta Geologi Kabupaten Bogor II-6
Gambar 2.6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Bogor II-6
Gambar 2.7 Peta DAS di Kabupaten Bogor..... II-7
Gambar 2.8 Peta Rawan Bencana Banjir dan Gunung Api di Kabupaten Bogor..... II-9
Gambar 2.9 Peta Daerah Peka Erosi di Kabupaten Bogor..... II-11
Gambar 2.10 Peta DDDTLH Indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Tahun 2010 ..... II-15
Gambar 2.11 Peta DDDTLH Indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Tahun 2020 ..... II-15
Gambar 2.12 Peta Perubahan DDDTLH indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kurun Waktu Tahun 2010-2020.... II-16
Gambar 2.13 Peta Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan di Kabupaten Bogor Tahun 2021-2051 ..... II-21
Gambar 2.14 Peta DDDTLH Indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Air Tahun 2010 ..... II-24
Gambar 2.15 Peta DDDTLH Indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Air Tahun 2020 ..... II-24
Gambar 2.16 Peta Perubahan DDDTLH Indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Air Kurun Waktu 2010-2020 ..... II-25
Gambar 2.17 Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Kabupaten Bogor Tahun 2021-2051..... II-30
Gambar 2.18 Cakupan Pelayanan SPAM II-31
Gambar 2.19 Piramida Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Bogor Tahun 2020..... II-34
Gambar 2.20 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan II-38

Gambar 2.21 Sebaran Zonasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Zonasi Industri Kecil II-58
Gambar 2.22 Perkembangan PDRB Kabupaten Bogor II-70
Gambar 2.23 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2013-2020 (%) II-77
Gambar 2.24 Nilai Inflasi Rata-Rata Kabupaten Bogor Tahun 2013-2019 (Jan-Sept) II-78
Gambar 2.25 PDRB per Kapita Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 ..... II-80
Gambar 2.26 Indeks Williamson Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 ..... II-82
Gambar 2.27 Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan Tahun 2013-2020 ..... II-83
Gambar 2.28 Perubahan Metodologi IPM II-85
Gambar 2.29 Perkembangan IPM Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2020 .... II-86
Gambar 2.30 Perkembangan HLS Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2020..... II-89
Gambar 2.31 Perkembangan RLS Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2013-2020 ..... II-90
Gambar 2.32 Perkembangan AHH Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2013-2020 ..... II-91
Gambar 2.33 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Bogor 2013-2020..... II-92
Gambar 6.1 Posisi RPJMD Tahun 2018-2023 dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan Penjabarannya ke RKPD VI-2
Gambar 6.2 Peta Wilayah Pengembangan..... VI-49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Cascading Dinas Pendidikan	1
Lampiran 2	Cascading Dinas Kesehatan	3
Lampiran 3	Cascading Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6
Lampiran 4	Cascading Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	9
Lampiran 5	Cascading Satuan Polisi Pamong Praja	12
Lampiran 6	Cascading Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13
Lampiran 7	Cascading Dinas Pemadam Kebakaran	14
Lampiran 8	Cascading Dinas Sosial	15
Lampiran 9	Cascading Dinas Tenaga Kerja	17
Lampiran 10	Cascading Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19
Lampiran 11	Cascading Dinas Ketahanan Pangan	21
Lampiran 12	Cascading Dinas Lingkungan Hidup	23
Lampiran 13	Cascading Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25
Lampiran 14	Cascading Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27
Lampiran 15	Cascading Dinas Perhubungan	29
Lampiran 16	Cascading Dinas Komunikasi dan Informatika	30
Lampiran 17	Cascading Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	32
Lampiran 18	Cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34
Lampiran 19	Cascading Dinas Pemuda dan Olahraga	35
Lampiran 20	Cascading Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	37
Lampiran 21	Cascading Dinas Arsip dan Perpustakaan	40
Lampiran 22	Cascading Dinas Perikanan dan Peternakan	42
Lampiran 23	Cascading Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	45

Lampiran 24 Cascading Dinas Perdagangan dan Perindustrian 47
Lampiran 25 Cascading Sekretariat Daerah 51
Lampiran 26 Cascading Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 56
Lampiran 27 Cascading Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 57
Lampiran 28 Cascading Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 58
Lampiran 29 Cascading Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 60
Lampiran 30 Cascading Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 61
Lampiran 31 Cascading Inspektorat 63
Lampiran 32 Cascading Kecamatan 64
Lampiran 33 Cascading Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 66

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan daerah jangka menengah yang disusun berdasarkan periode jabatan kepala daerah. Sehubungan dengan berakhirnya periode Bupati Bogor Tahun 2013-2018, telah dilakukan pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 Juni tahun 2018. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah Nomor 240/PL.03.7-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018, telah terpilih Ade Yasin dan Iwan Setiawan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bogor untuk periode tahun 2018-2023, yang kemudian dilantik pada tanggal 30 Desember 2018.

Berdasarkan hasil penyempurnaan antara Rancangan Teknokratik RPJMD dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 berdasarkan tahapan penyusunan RPJMD, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019. Dokumen RPJMD dimaksud memuat visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih yang menjiwai seluruh muatan RPJMD dan harus diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasca 2 (dua) tahun pemberlakuannya, yaitu tahun 2019-2020, terdapat peraturan perundang-undangan baru yang berlaku secara nasional dan mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Bogor tersebut. Perubahan-perubahan aturan tersebut terutama berkaitan dengan penetapan nomenklatur program-program daerah. Selanjutnya, di awal tahun 2020, Indonesia mengalami pandemi Covid-19 yang berdampak besar pada perekonomian nasional dan daerah. Kondisi-kondisi tersebut melandasi perlunya Kabupaten Bogor melakukan perubahan RPJMD sebagai bentuk penyesuaian terhadap penerapan perubahan-perubahan kebijakan nasional di daerah.

Perlunya melakukan perubahan dokumen perencanaan khususnya dokumen RPJMD, telah difasilitasi dalam Pasal 342 Ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD **dapat** dilakukan apabila terjadi perubahan mendasar, yang mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Berdasarkan ketentuan tersebut, Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor dilakukan atas dasar terjadinya perubahan mendasar, dengan 2 (dua) alasan, yaitu 1) perubahan kebijakan nasional serta 2) terjadinya bencana alam dan pandemi Covid-19.

Adapun 2 (dua) alasan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya perubahan pada kebijakan-kebijakan nasional, terutama yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP No. 12 Tahun 2019 ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah;
   b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang mengamanahkan pengintegrasian substansi RPJMN ke dalam RPJMD sehingga terwujud sinergi di antara kebijakan pusat dan daerah, baik berkaitan dengan sinergi prioritas pembangunan, maupun program-program prioritas nasional.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang mengamanahkan kewajiban seluruh pemerintah daerah untuk menggunakan satu aplikasi perencanaan yang terintegrasi secara nasional, yang meliputi sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya.
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Aturan ini membakukan penggunaan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dalam dokumen perencanaan secara nasional. Dengan demikian, di dalam Perubahan RPJMD harus dilakukan pemetaan program sehingga sesuai dengan nomenklatur program yang telah dibakukan pada aturan baru tersebut.
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang mengamanahkan ketentuan pembakuan indikator makro dan indikator pelaksanaan kewenangan wajib dan pilihan sebagai bahan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian, di dalam Perubahan RPJMD dilakukan penataan kembali capaian program sehingga sesuai dengan indikator penilaian kinerja daerah.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanahkan bahwa salah satu poin penting penilaian indeks pengelolaan keuangan daerah adalah adanya kesesuaian antara perencanaan dengan penganggaran dalam hal kesesuaian nomenklatur program serta pagu program dalam RPJMD dengan RKPD, KUA-PPAS, dan APBD.

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanahkan teknis pengelolaan keuangan daerah sebagai implementasi rinci dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Pandemi Covid-19 serta bencana alam di Kabupaten Bogor selama tahun 2020, yang telah menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, terutama sektor sosial dan ekonomi. Hal ini membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat, khususnya dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah, baik tahun 2020, maupun tahun 2021 yang sedang berlangsung tahapan perencanaan pembangunannya. Kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran terutama dibutuhkan untuk penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi akibat bencana alam dan non alam tersebut. Dengan demikian, dibutuhkan penyesuaian terhadap target kinerja pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD awal.

Berkaitan dengan substansi arah pembangunan, dengan tetap mengacu pada pentahapan pembangunan jangka menengah yang tercantum dalam Perubahan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, arah pembangunan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **mengoptimalkan pembangunan daerah di seluruh bidang/urusan pemerintahan.** Hal ini menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan tetap mempertimbangkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan reformasi birokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, Perubahan RPJMD tidak hanya meninjau capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2019-2020, melainkan juga melakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja dan targetnya sehingga sesuai dengan arah pembangunan, termasuk rencana perwujudan Pancakarsa. Penyesuaian ini perlu dilakukan sebagai implikasi dari upaya percepatan penanganan dan pemulihan

ekonomi daerah akibat pandemi Covid-19 serta implementasi kebijakan-kebijakan nasional yang baru.

Berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (4) yang menyebutkan bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah, maka diharapkan konsistensi dan keselarasan antara perencanaan strategis di Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan perencanaan operasional di perangkat daerah dapat tetap terwujud.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6485);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 255);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
32. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunanaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
47. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
48. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
52. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 3);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat pusat, di tingkat Provinsi Jawa Barat, serta daerah kabupaten/kota yang berbatasan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ketentuan terkait hubungan antar dokumen perencanaan adalah Pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada **RPJPD, RTRW dan RPJMN**. Secara *mutatis mutandis*, penyusunan Perubahan RPJMD tetap mengacu pada tata hubungan antar dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) tersebut.

Hubungan antar dokumen tersebut merupakan bentuk dari sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya sebagaimana ketentuan pasal 159-160 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan substansi sebagai berikut :

1. Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dilaksanakan diantaranya dalam penyusunan Perubahan RPJMD.
2. Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dilakukan melalui penelaahan terhadap substansi dokumen perencanaan pembangunan nasional (RPJMN Tahun 2020-2024), dokumen perencanaan pembangunan daerah (Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lain yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam rangka

mewujudkan sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Bogor, serta pembangunan antar daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor.

3. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dilakukan dengan menelaah kebijakan jangka menengah nasional yang menjadi target nasional secara akumulatif, berdampak bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional yang harus didukung oleh daerah, serta harus dipedomani oleh daerah dalam menyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
4. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan menelaah kebijakan Provinsi Jawa Barat yang dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan Jawa Barat dan harus dipedomani oleh Kabupaten Bogor.
5. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap daerah lain yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan.
6. Mempedomani RTRW sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 dalam penyusunan Perubahan RPJMD, dilakukan melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.
7. Mempedomani Perubahan RPJPD dalam penyusunan Perubahan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.
8. Mempedomani RPJMN Tahun 2020-2024 dalam penyusunan Perubahan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi,

arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional, dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

9. Mempedomani RPJMD Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bogor dengan arah serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah sebagaimana tertera dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
10. Memperhatikan RPJMD daerah lain dalam penyusunan Perubahan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah dengan daerah lainnya yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor serta berdampak pada kebijakan yang diambil oleh masing-masing pihak.

Secara umum, disamping adanya kewajiban hubungan antar dokumen perencanaan, baik pusat, provinsi Jawa Barat, maupun dengan daerah lainnya, hubungan antar dokumen perencanaan dalam daerah Kabupaten Bogor juga perlu dilakukan, dimana dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 akan dipedomani dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta dokumen perencanaan perangkat daerah, yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Renstra).

Hubungan antar dokumen disajikan sebagai berikut :

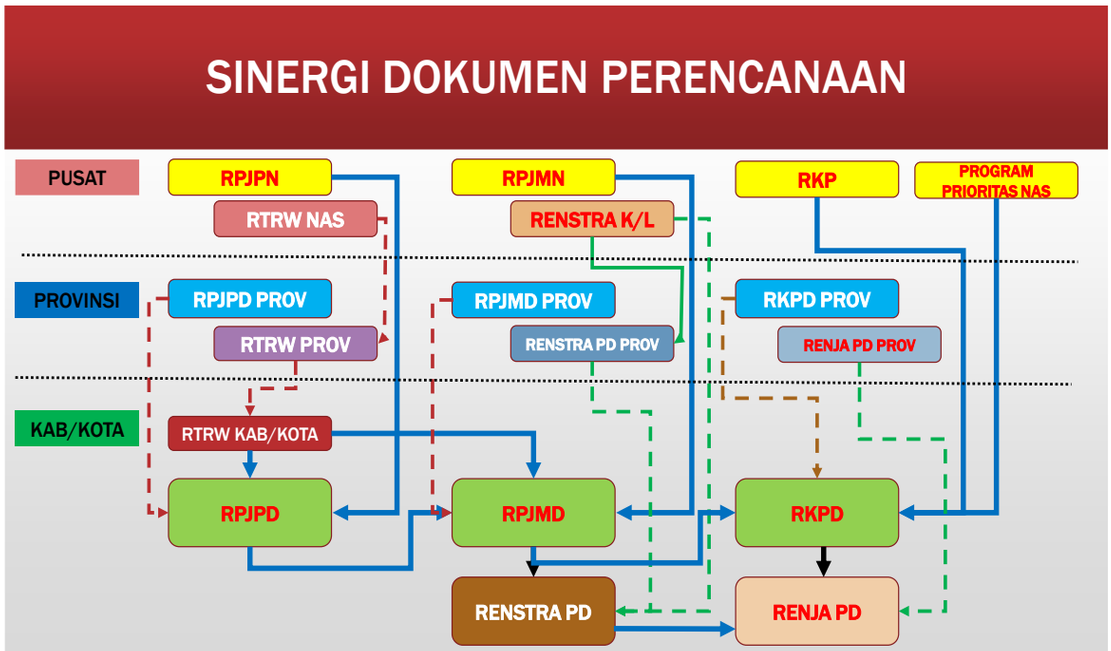

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021

Gambar 1.1

Hubungan Antar Dokumen

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah untuk memberikan arahan bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bogor dengan menyesuaikan terhadap perubahan kebijakan nasional dan perubahan mendasar lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah sebagai :

1. dasar bagi perangkat daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023;
2. pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai dengan akhir periode RPJMD;
3. instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 disusun secara *mutatis mutandis* sebagaimana penyusunan dokumen RPJMD sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan Perubahan RPJMD, meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat permasalahan pembangunan daerah serta isu strategis yang paling prioritas.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menyajikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat tentang strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu, bab ini memuat penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun program pembangunan daerah memuat program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kerangka pendanaan dan program perangkat daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah beserta indikator kinerja dan target dan pagu pendanaannya yang bersifat indikatif.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja daerah berupa gambaran pencapaian indikator makro ekonomi daerah serta ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan IKU perangkat daerah sampai akhir periode RPJMD.

BAB IX. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Bogor secara geografis terletak di antara 16°21' - 107°13' Bujur Timur dan 6°19' - 6°47' Lintang Selatan. Kabupaten Bogor terdiri dari 40 kecamatan dan 435 desa/kelurahan dengan luas wilayah 298.620,26 Ha.

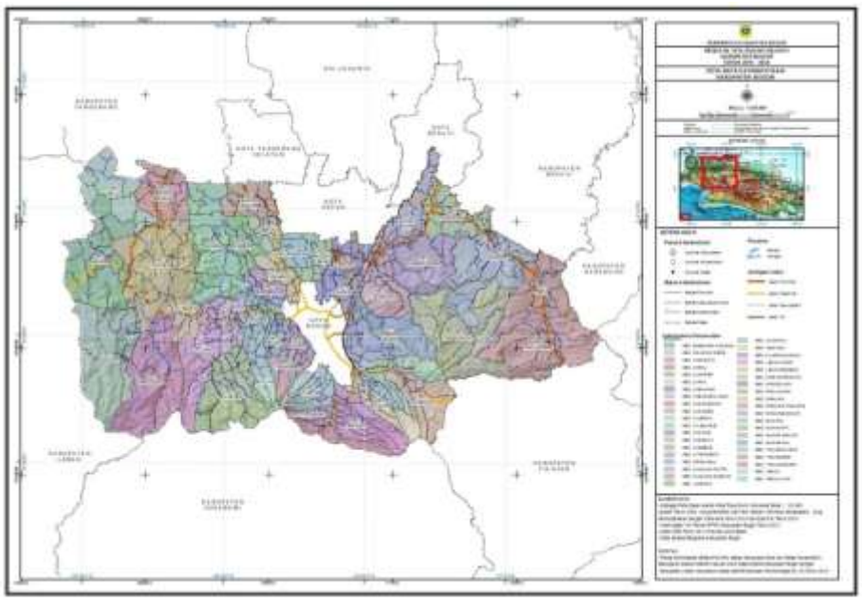

Sumber : RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bogor

Secara administratif, Kabupaten Bogor berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

- sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Provinsi Banten), Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok;
- sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Cianjur;
- sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi;

- sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Lebak (Provinsi Banten);
- sebelah tengah : berbatasan dengan Kota Bogor.

2.1.2. Kondisi Topografi

Secara topografi, Kabupaten Bogor memiliki tipe morfologi wilayah yang bervariasi, dari dataran yang relatif rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan, yaitu sekitar 29,28 persen berada pada ketinggian 15-100 meter di atas permukaan laut (dpl), 42,62 persen berada pada ketinggian 100-500 meter dpl, 19,53 persen berada pada ketinggian 500-1.000 meter dpl, 8,43 persen berada pada ketinggian 1.000-2.000 meter dpl dan 0,22 persen berada pada ketinggian 2.000-2.500 meter dpl.

Selain itu, kondisi morfologi Kabupaten Bogor sebagian besar berupa dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan dengan batuan penyusunnya didominasi oleh hasil letusan gunung, yang terdiri dari andesit, tufa dan basalt. Gabungan batu tersebut termasuk dalam sifat jenis batuan relatif lulus air dimana kemampuannya meresapkan air hujan tergolong besar. Jenis pelapukan batuan ini relatif rawan terhadap gerakan tanah bila mendapatkan siraman curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, jenis tanah penutup didominasi oleh material vulkanik lepas agak peka dan sangat peka terhadap erosi, antara lain Latosol, Aluvial, Regosol, Podsolik dan Andosol. Oleh karena itu, beberapa wilayah rawan terhadap tanah longsor.

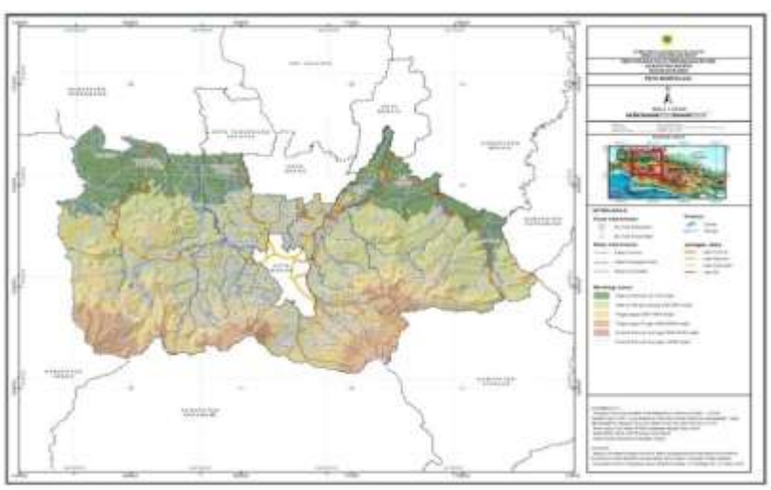

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

Gambar 2.2
Peta Morfologi Kabupaten Bogor

Kemudian mengenai luas berdasarkan kemiringan lereng, bahwa wilayah Kabupaten Bogor berada pada ketinggian lereng yang bervariasi antara 0-8 persen hingga lebih dari 40 persen. Secara keseluruhan, kelas kemiringan 0-8 persen merupakan yang terluas di Kabupaten Bogor yakni 130.320,02 Ha dan yang terkecil pada kelas kemiringan lereng lebih dari 40 persen yakni seluas 9.800,47 Ha. Secara lebih lengkap, data luas Kabupaten Bogor berdasarkan kemiringan lereng disajikan pada tabel dan gambar berikut ini :

Tabel 2.1
Luas Berdasarkan Kemiringan Lereng

No	Kelas Lereng (%)	Persentase	Luas (Ha)
1	0-8	43,64%	130.320,02
2	8-15	23,38%	69.805,94
3	15-25	17,94%	53.580,48
4	25-40	11,76%	35.113,34
5	> 40	3,28%	9.800,47
Total		**100%**	**298.620,26**

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

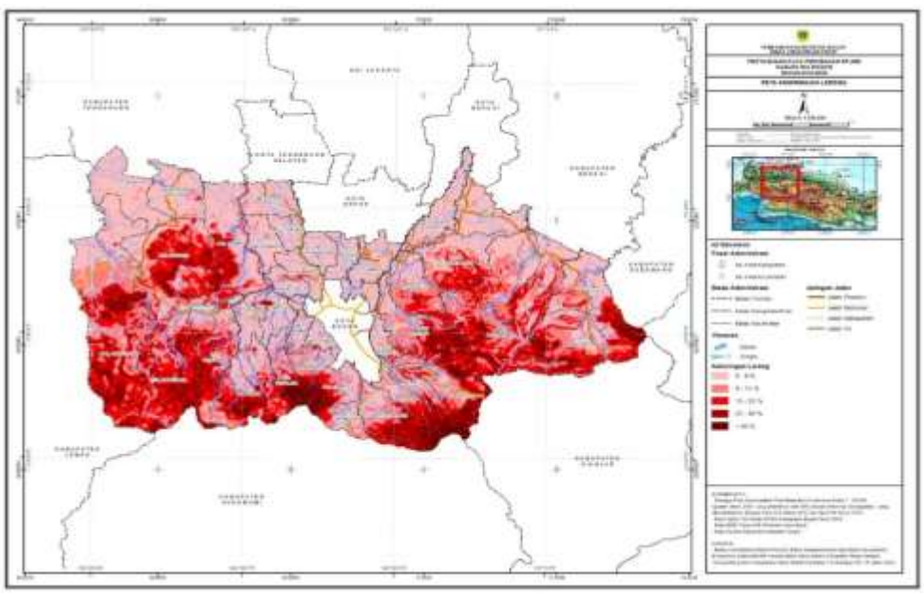

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

Gambar 2.3
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Bogor

2.1.3. Kondisi Klimatologi

Secara klimatologis, wilayah Kabupaten Bogor termasuk iklim tropis sangat basah di bagian selatan dan iklim tropis basah di bagian utara, dengan rata-rata curah hujan tahunan 2.500–5.000 mm/tahun, kecuali di wilayah

bagian utara dan sebagian kecil wilayah timur curah hujan kurang dari 2.500 mm/tahun. Suhu rata-rata di wilayah Kabupaten Bogor adalah 20°- 30°C, dengan rata-rata tahunan sebesar 25°C. Kelembaban udara 70 persen dan kecepatan angin cukup rendah, dengan rata–rata 1,2 m/detik dengan evaporasi di daerah terbuka rata– rata sebesar 146,2 mm/bulan

Tabel 2.2
Rata-rata Suhu, Kelembaban Udara, dan Curah serta Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bogor, 2020

Bulan	Iklim		Kelembaban Udara		Curah Hujan	Hari Hujan
	Min	Rata-rata	Min	Rata-rata		
Januari	21,4	26,2	33,4	86	462	20
Februari	21,5	25,7	33,8	89	469	21
Maret	21,4	26,2	33,4	86	533	21
April	21,3	26,7	33,6	84	378	16
Mei	22,2	26,9	34,1	84	332	13
Juni	22,0	26,7	33,4	83	175	9
Juli	20,4	26,1	33,4	81	112	8
Agustus	19,5	26,5	34,1	78	161	7
September	19,9	26,5	34,4	80	227	12
Oktober	21,2	26,2	33,8	84	410	18
November	21,0	26,6	33,8	83	15	54
Desember	21,4	25,9	33,2	84	233	17
Rata-rata	**21,1**	**26,3**	**33,7**	**83**	**292**	**18**

Sumber : Badan Pusat Statistik

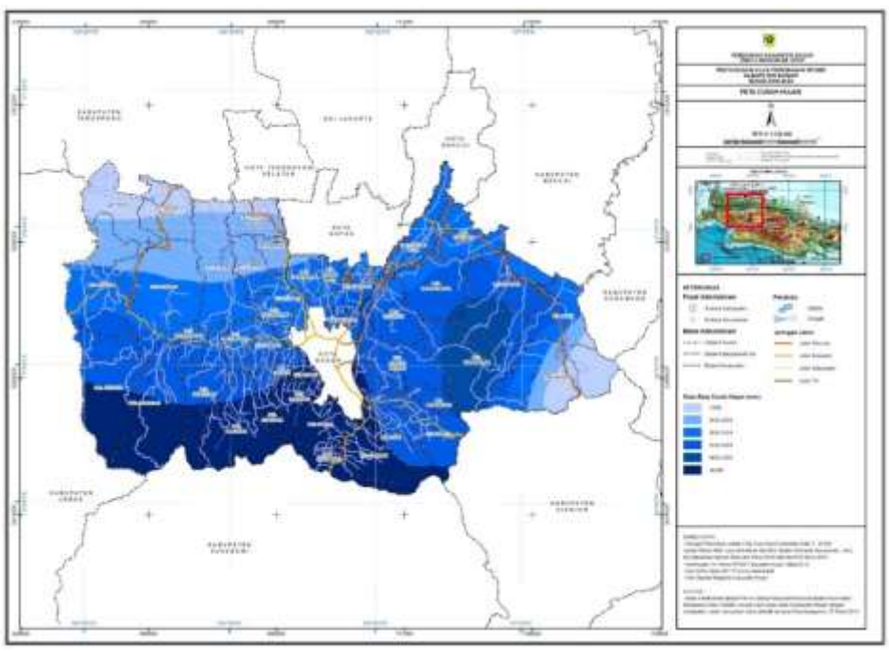

Sumber : *KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023*

Gambar 2.4
Peta Curah Hujan Kabupaten Bogor

2.1.4. Kondisi Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Bogor terdiri dari jenis batuan batu gamping, yaitu intrusi, batuan tersier, endapan permukaan, gunung api muda dan gunung api tua. Jenis batuan gunung api muda merupakan yang terluas di Kabupaten Bogor.

Tabel 2.3
Luasan Berdasarkan Jenis Batuan di Kabupaten Bogor

No	Jenis Batuan	Luas (ha)
1	Batu Gamping	7.223,40
2	Batuan Intrusi	8.615,26
3	Batuan Tersier	19.925,32
4	Endapan Permukaan	71.906,73
5	Gunung Api Muda	141.980,41
6	Gunung Api Tua	48.969,15
Total		298.620,26

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

Selanjutnya, jenis tanah penutup didominasi oleh material vulkanik lepas agak peka dan sangat peka terhadap erosi, antara lain Latosol, Aluvial, Regosol, Podsolik dan Andosol. Oleh karena itu, beberapa wilayah rawan terhadap tanah longsor. Jenis tanah di Kabupaten Bogor terdiri dari 16 jenis yang tersebar di seluruh wilayah. Asosiasi Latosol merah dan latosol coklat kemerahan dengan luas 74.488,48 Ha mendominasi jenis tanah di bagian Utara. Luasan berdasarkan jenis tanah di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Luasan Berdasarkan Jenis Tanah di Kabupaten Bogor

No	Jenis Tanah	Luas (ha)
1	Aluvial	27.915,98
2	Andosol	3.188,24
3	Asosiasi latosol merah latosol coklat kemerahan	74.488,48
4	Asosiasi andosol regosol	3.914,10
5	Asosiasi latosol coklat latosol kekuningan	9.116,70
6	Asosiasi latosol coklat latosol kemerahan	22.175,73
7	Asosiasi latosol coklat regosol	22.311,77
8	Asosiasi podsolik kekuningan hidromof kelabu	1.890,28
9	Gromosol	15.503,31
10	Kompleks latosol merah kekuningan latosol coklat kemerahan dan litosol	45.310,18
11	Kompleks regosol merah kekuningan podsolik merah kekuningan	9.385,37
12	Podsolik merah kekuningan	31.993,87
13	Podsolik kekuningan	11.506,28
14	Podsolik merah	9.890,23

No	Jenis Tanah	Luas (ha)
15	Regosol	7.999,74
16	SNG	2.030,02
Total		**298.620,26**

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

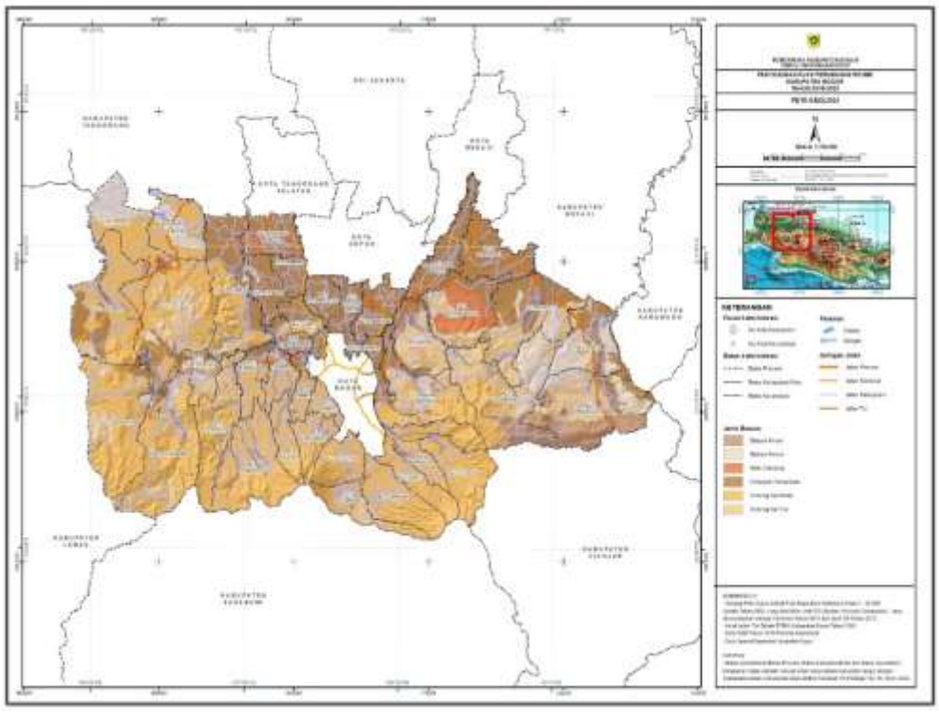

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

Gambar 2.5
Peta Geologi Kabupaten Bogor

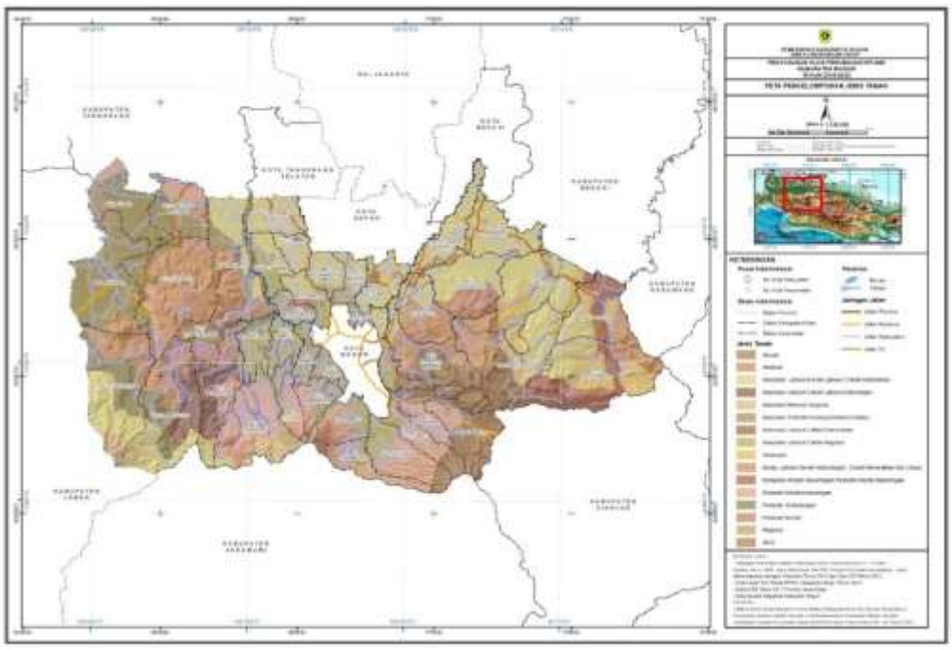

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

Gambar 2.6
Peta Jenis Tanah Kabupaten Bogor

2.1.5. Kondisi Hidrologi

Sedangkan secara hidrologis, wilayah Kabupaten Bogor terbagi ke dalam 9 (sembilan) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu : (1) DAS Cidurian; (2) DAS Cimanceuri; (3) DAS Cisadane; (4) DAS Ciliwung; (5) DAS Cileungsi; (6) DAS Cikarang; (7) DAS Cibeet; (8) DAS Ciberang; (9) DAS Cibeureum. Data mengenai luas wilayah sungai dan DAS disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Luas Wilayah Sungai dan DAS

No	Wilayah Sungai (WS) dan DAS	Luas (ha)
1	**WS Cidanau - Ciujung – Cidurian**	**41.505,98**
	DAS Cibeureum	4.207,46
	DAS Ciberang	8.938,77
	DAS Cidurian	28.359,75
2	**WS Ciliwung – Cisadane**	**197.572,13**
	DAS Cileungsi	38.069,83
	DAS Ciliwung	25.899,88
	DAS Cimanceuri	25.293,48
	DAS Cisadane	108.308,94
3	**WS Citarum**	**59.542,14**
	DAS Cibeet	44.377,92
	DAS Cikarang	15.164,23
Total		**298.620,26**

Sumber : *KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023*

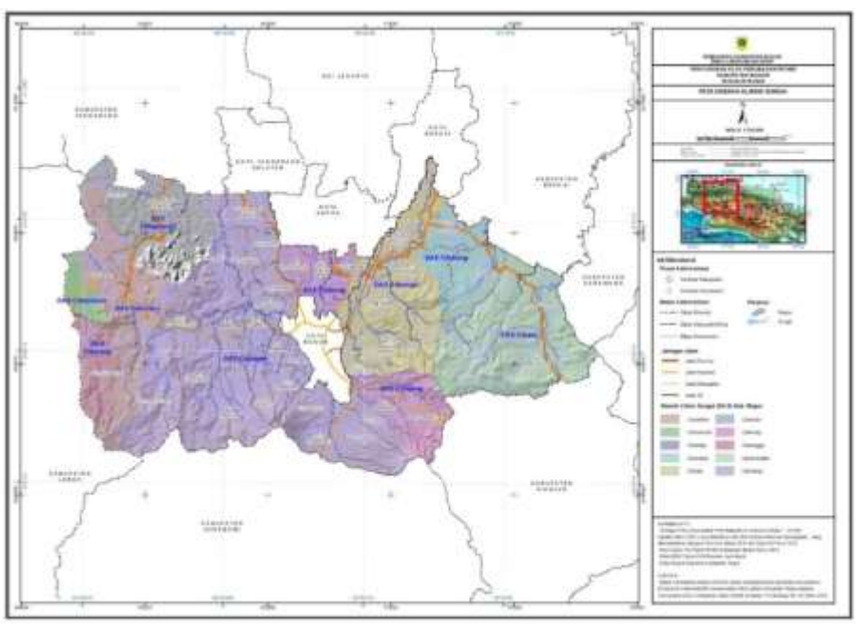

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

Gambar 2.7
Peta DAS di Kabupaten Bogor

2.1.6. Kondisi Geografis Lainnya

Wilayah Kabupaten Bogor yang cukup luas dengan sebagian besar merupakan dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan serta memiliki curah hujan tinggi dan dialiri 6 Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga mengindikasikan sebagai daerah rawan bencana terutama tanah longsor, angin puting beliung dan banjir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terdapat beberapa jenis bencana yaitu : (1) gempa bumi; (2) tsunami; (3) gunung api; (4) banjir; (5) kekeringan; (6) angin kencang; (7) tanah longsor; (8) kebakaran lahan; dan (9) kebakaran hutan. Adapun khusus untuk di Kabupaten Bogor jenis bencana yang berpotensi terjadi antara lain kebakaran, tanah longsor, angin kencang, banjir, dan lain-lain. Hal tersebut sesuai dengan data kejadian bencana di Kabupaten Bogor dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Kejadian Bencana di Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020

Jenis Bencana	2016	2017	2018	2019	2020
Tanah Longsor	180	215	156	212	428
Banjir	51	47	39	51	175
Kebakaran	137	78	76	-	-
Angin Kencang	143	205	188	244	375
Lain-Lain	15	39	175	316	359
Total	**526**	**593**	**634**	**823**	**1.337**

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2020

Selain itu dengan memperhatikan wilayah Kabupaten Bogor yang letak geografi dan topografi lahannya yang labil, sehingga dapat berpotensi menyebabkan rawan terjadinya bencana banjir, gunung api 2 dan erosi. Adapun perkiraan luasan untuk bencana tersebut di Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut.

Tabel 2.7
Kawasan Rawan Bencana Banjir dan Gunung Api di Kabupaten Bogor

No	Rawan Bencana	Luas (ha)
1	Kawasan Bencana Alam Banjir Rendah	212,03
2	Kawasan Bencana Alam Banjir Tinggi	9.192,22
3	Kawasan Gunung Api 2 / Daerah Bahaya	6,90
Total		**9.411,15**

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

Kawasan rawan banjir, banjir adalah bencana alam kedua yang paling sering terjadi di Kabupaten Bogor. Dari peta di bawah, dapat dilihat, daerah yang rawan terkena banjir di Kabupaten Bogor tidaklah banyak, namun hampir semuanya berlokasi di daerah sekitar sungai, atau yang menjadi bagian dari badan sungai. Kecamatan yang tingkat rawan bencana banjirnya tinggi adalah Kecamatan Jasinga, Leuwisadeng, Jonggol, Klapanunggal, Cariu, dan Tanjungsari, serta sedikit bagian Kecamatan Gunung Putri. Sedangkan untuk potensi rawan bencana rendah berada di Kecamatan Leuwiliang.

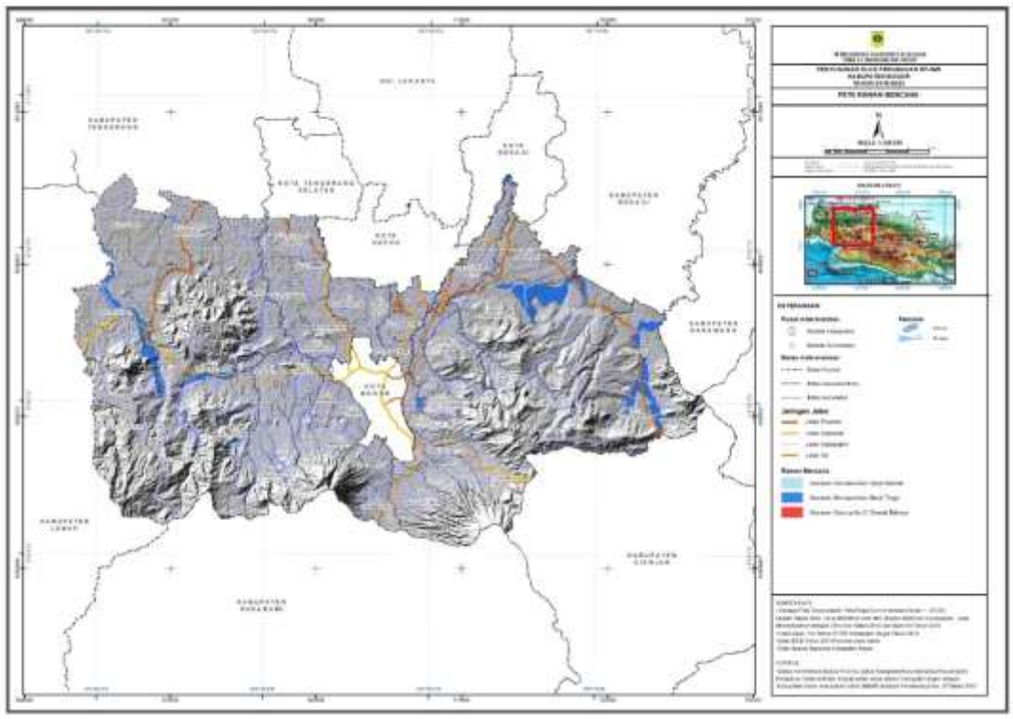

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

Gambar 2.8
Peta Rawan Bencana Banjir dan Gunung Api di Kabupaten Bogor

Kemudian kawasan rawan gempa, Kerentanan tanah atau kerentanan gerakan tanah menunjukkan potensi suatu kawasan mengalami bencana akibat gerakan tanah seperti gempa. Di Kabupaten Bogor, hampir di semua area berpotensi menjadi kawasan rawan gerakan tanah. Beberapa kecamatan yang berpotensi tinggi mengalami gerakan tanah adalah Kecamatan Citeureup, Klapanunggal, Jonggol, Babakan Madang, dan Sukajaya. Sedangkan di wilayah Utara seperti Cibinong, Bojong Gede, Tajurhalang dan Gunung Sindur termasuk yang potensinya sangat rendah.

Adapun kawasan rawan letusan gunung berapi di Kabupaten Bogor terletak di wilayah berikut ini :

1. Gunung Salak di Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tenjolaya dan Kecamatan Pamijahan;
2. Gunung Gede - Pangrango di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Caringin; serta
3. Gunung Halimun di Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Nanggung dan Kecamatan Sukajaya.

Tabel 2.8
Rawan Bencana Erosi di Kabupaten Bogor

No	Kawasan Peka Terhadap Erosi	Luas (ha)
1	Daerah Peka Erosi Rendah	3.677,44
2	Daerah Peka Erosi Sedang	25.347,62
3	Daerah Peka Erosi Tinggi	54.797,33
Total		**83.822,38**

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

Kawasan rawan gerakan tanah, bencana longsor adalah bencana ketiga yang paling sering terjadi di Kabupaten Bogor. Jika dianalisis lebih jauh, tingginya frekuensi kejadian longsor salah satunya diakibatkan oleh topografi lahan di Kabupaten Bogor yang berbukit-bukit, serta rusaknya kawasan perbukitan saat ini karena telah banyak menjadi kawasan terbangun dan pembangunan akses (jalan-jalan arteri), seperti di Kecamatan Ciawi, Cisarua dan Megamendung. Selain itu, banyaknya kawasan tambang di kecamatan tertentu menjadi pemicu lain terjadinya longsor. Pengaruh kawasan tambang ini lebih besar terhadap kejadian erosi, sehingga kebanyakan di kawasan tambang seperti di Kecamatan Cigudeg dan Citeureup menjadi daerah peka erosi tinggi. Potensi bencana longsor dapat terlihat salah satunya dari peta peka erosi berikut.

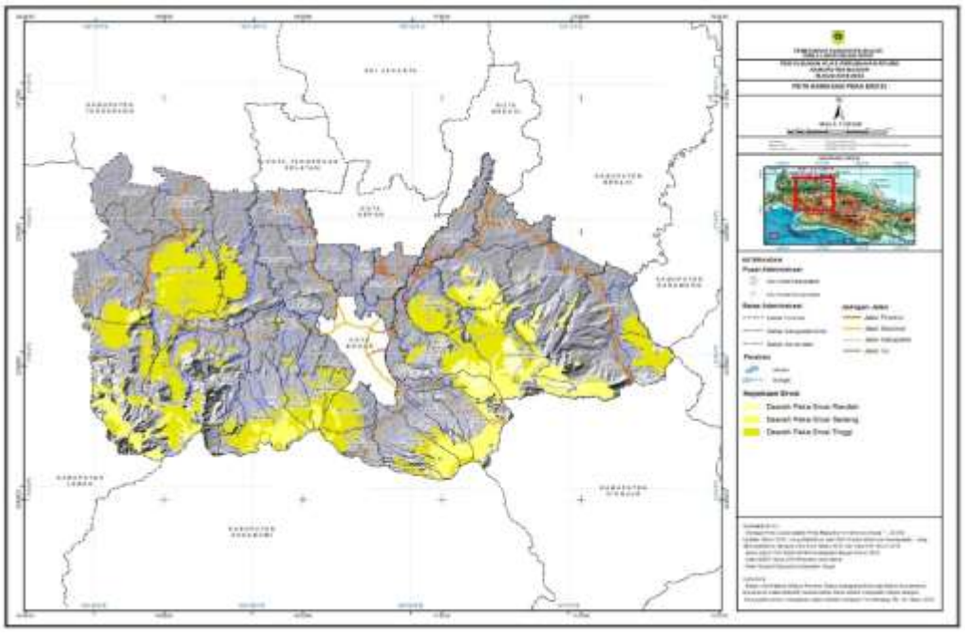

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

Gambar 2.9
Peta Daerah Peka Erosi di Kabupaten Bogor

2.1.7. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Jasa lingkungan hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam dan pelestarian nilai budaya. Penghitungan kinerja jasa lingkungan hidup dilakukan untuk mengetahui *supply* (ketersediaan) dari alam. Untuk mengetahui kinerja jasa lingkungan hidup menggunakan 3 (tiga) parameter yaitu karakteristik bentang alam, tipe vegetasi alami dan penutupan lahan.

Keterangan :

Wba = bobot bentang alam Sba = skor bentang alam Wveg = bobot vegetasi

Sveg = skor vegetasi

Wpl = bobot penutupan lahan Spl = skor penutupan lahan

1. Daya Dukung Penyedia Bahan Pangan

Merujuk pada definisi operasional maka wilayah yang memiliki klasifikasi jasa penyedia pangan tinggi sampai dengan sangat tinggi dapat diartikan sebagai wilayah yang memiliki potensi untuk pengembangan tanaman pangan. Berdasarkan hasil analisis DDDTLH indikatif jasa lingkungan penyedia pangan dapat terlihat bahwa kecamatan-kecamatan

yang memiliki klasifikasi sangat tinggi paling dominan pada tahun 2010, yaitu Kecamatan Pamijahan seluas 5.260 Ha, Kecamatan Jonggol seluas 5.173 Ha, dan Kecamatan Cariu seluas 2.878 Ha. Sedangkan kecamatan-kecamatan yang memiliki kelas sangat tinggi pada tahun 2020 adalah Kecamatan Cibungbulang seluas 5.758 Ha, Kecamatan Tenjolaya Seluas 8.524 Ha, dan Kecamatan Dramaga seluas 3.748 Ha.

Adapun kecamatan yang selama 10 tahun terakhir (2010-2020) mengalami penurunan cukup besar pada kelas sangat tinggi dan tinggi adalah Kecamatan Cigombong seluas 4 Ha, Kecamatan Bojonggede seluas 76 Ha, dan Kecamatan Leuwisadeng seluas 155 Ha, sedangkan Kecamatan yang mengalami peningkatan cukup besar pada kelas sangat tinggi dan tinggi adalah Kecamatan Tenjolaya seluas 6.869 Ha, Kecamatan Ciampea seluas 5.163 Ha, dan Kecamatan Cibungbulang seluas 2.899 Ha.

Tabel 2.9
DDDTLH Indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kecamatan Tahun 2010 dan Tahun 2020

No	Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)			Rendah (Ha)			Sedang (Ha)			Tinggi (Ha)			Sangat Tinggi (Ha)		
		2010	2020	Perubahan	2010	2020	Perubahan	2010	2020	Perubahan	2010	2020	Perubahan	2010	2020	Perubahan
1	Babakanmadang	543	605	62	1,964	5,977	4,013	5,390	14,828	9,437	1,235	3,536	2,301	85	1,771	1,686
2	Bojonggede			-	950	15,098	14,148			-	1,814	5,424	3,610	83	7	- 76
3	Caringin			-	376	1,331	955	5,753	13,049	7,296	1,640	3,968	2,328		33	33
4	Cariu	53	83	30	926	963	37	1,763	3,648	1,886	2,823	6,353	3,530	2,879	2,324	- 554
5	Ciampea			-	601	1,502	901	106	229	123	639	2,329	1,691	1,962	7,126	5,164
6	Ciawi			-	481	1,206	725	3,686	13,201	9,515	532	3,986	3,454		300	300
7	Cibinong			-	2,343	13,893	11,550			-	2,204	1,850	- 354	33	37	4
8	Cibungbulang			-	450	1,179	729	149	1,928	1,779	394	3,036	2,643	2,859	5,759	2,900
9	Cigombong			-	286	1,061	774	3,636	17,322	13,686	813	4,059	3,246	31	26	- 4
10	Cigudeg			-	9,994	12,469	2,475	6,323	18,017	11,694		19	19	1,428	2,551	1,123
11	Cijeruk			-	91	5,075	4,984	2,765	9,123	6,358	1,876	4,903	3,027	0	12	12
12	Cileungsi			-	1,975	10,583	8,608	4,044	1,872	- 2,172	159	390	231	850	2,291	1,441
13	Ciomas			-	733	4,578	3,845	11		- 11	720	2,017	1,297	348	1,742	1,394
14	Cisarua		3	3	853	1,669	815	6,033	16,568	10,535	251	759	508			-
15	Ciseeng			-	225	5,616	5,391	443	2,159	1,716	2,179	4,353	2,175	1,145	2,081	936
16	Citeureup	192	778	586	2,395	16,334	13,939	3,178	7,390	4,212	922	2,001	1,078	195	277	82
17	Dramaga			-	259	5,362	5,103	36	16	- 20	863	2,496	1,633	1,405	3,749	2,344
18	Gunungputri			-	3,180	11,328	8,148	626	730	104	1,758	1,575	- 183	525	152	- 373
19	Gunungsindur			-	207	12,991	12,784	2,456	1,101	- 1,355	1,017	4,653	3,636	1,225	2,284	1,060
20	Jasinga			-	2,505	7,456	4,951	8,991	13,969	4,978	2	68	66	2,343	1,857	- 486
21	Jonggol	32	59	27	3,019	2,219	- 800	3,348	13,599	10,251	1,873	5,539	3,666	5,174	7,287	2,113
22	Kemang			-	749	8,991	8,242	429	1,017	588	1,971	5,769	3,799	245	2,112	1,867
23	Klapanunggal	703	1,214	511	3,620	11,632	8,012	3,851	13,460	9,609	429	733	304	947	2,393	1,447
24	Leuwiliang			-	1,636	14,789	13,153	5,292	9,209	3,917	423	1,715	1,292	1,889	2,221	332
25	Leuwisadeng			-	483	2,781	2,298	2,064	5,635	3,571	314	1,085	771	698	542	- 156
26	Megamendung			-	372	1,755	1,384	5,848	15,491	9,643	33	3,492	3,460		1,569	1,569
27	Nanggung			-	7,673	15,243	7,570	6,726	9,834	3,109	34	817	783	1,359	3,022	1,663
28	Pamijahan			-	564	12,581	12,016	6,629	12,586	5,957	56	1,479	1,422	5,260	7,843	2,582
29	Parung			-	437	11,907	11,470	172		- 172	1,573	4,670	3,097	544	1,948	1,405
30	Parungpanjang			-	1,773	4,820	3,048	3,123	8,037	4,913		46	46	2,183	2,838	655
31	Rancabungur			-	88	510	422	375	1,179	803	1,776	5,922	4,146	19	2,348	2,329

No	Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)			Rendah (Ha)			Sedang (Ha)			Tinggi (Ha)			Sangat Tinggi (Ha)		
		2010	2020	Perubahan	2010	2020	Perubahan	2010	2020	Perubahan	2010	2020	Perubahan	2010	2020	Perubahan
32	Rumpin			-	4,883	11,446	6,563	6,982	10,398	3,416	171	449	278	1,860	2,044	183
33	Sukajaya			-	6,512	12,675	6,163	7,302	12,668	5,365			-	2,734	2,794	59
34	Sukamakmur	19	74	55	2,986	1,806	-1,180	9,580	27,472	17,892	2,001	2,270	268	3,709	3,748	39
35	Sukaraja	268	217	-51	2,841	6,986	4,145	699	2,313	1,613	623	3,152	2,530	2	2,567	2,565
36	Tajurhalang			-	216	11,653	11,437			-	2,656	5,013	2,357	225	56	-169
37	Tamansari			-	435	4,672	4,237	2,200	7,648	5,448	1,140	2,321	1,181	113	1,930	1,817
38	Tanjungsari	100	5	-95	3,540	4,452	912	3,515	11,197	7,682	2,625	4,806	2,182	4,612	1,249	-3,363
39	Tenjo			-	2,402	4,676	2,274	5,423	6,705	1,283		39	39	363	1,305	943
40	Tenjolaya			-	68	753	684	1,820	7,690	5,870	98	2,056	1,958	1,655	8,524	6,869
Total		**1,910**	**3,038**	**1,128**	**75,090**	**282,018**	**206,928**	**130,767**	**311,287**	**180,520**	**39,637**	**109,150**	**69,512**	**50,987**	**92,721**	**41,733**

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

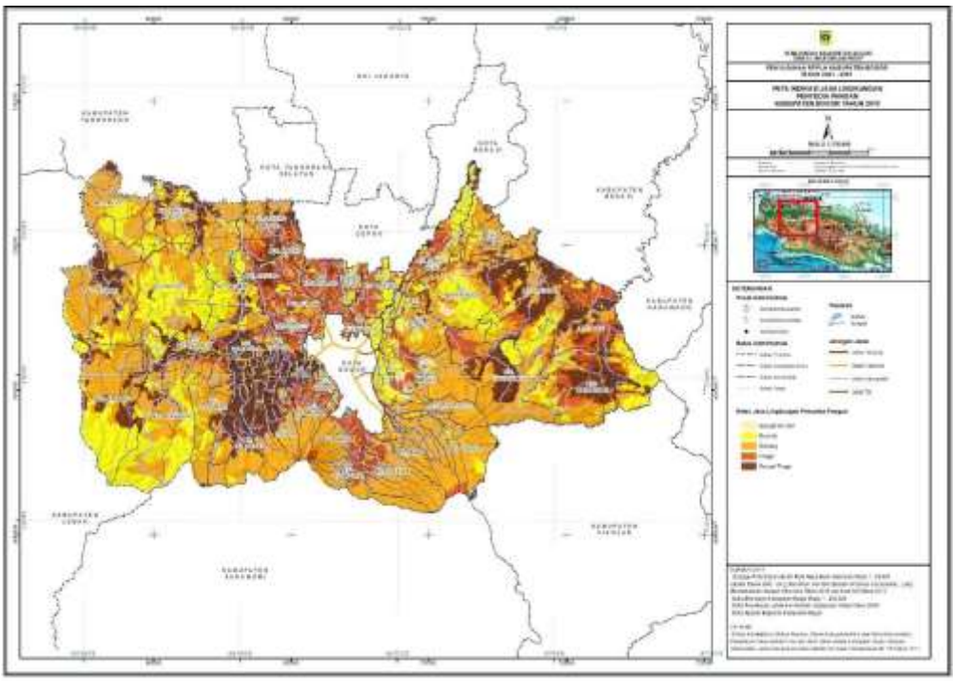

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

Gambar 2.10 Peta DDDTLH Indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Tahun 2010

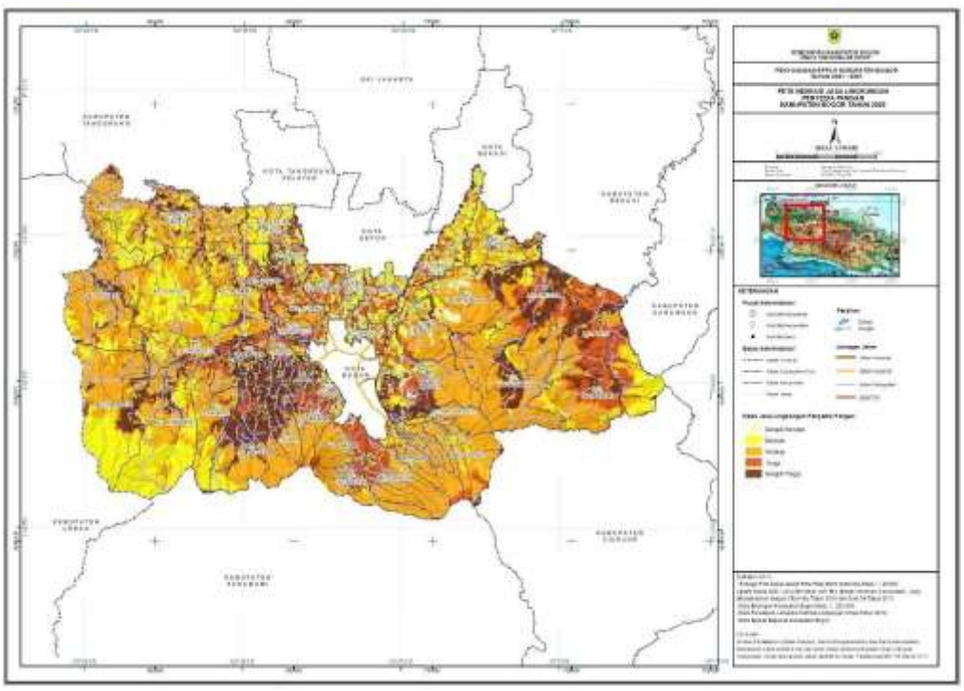

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

Gambar 2.11 Peta DDDTLH Indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Tahun 2020

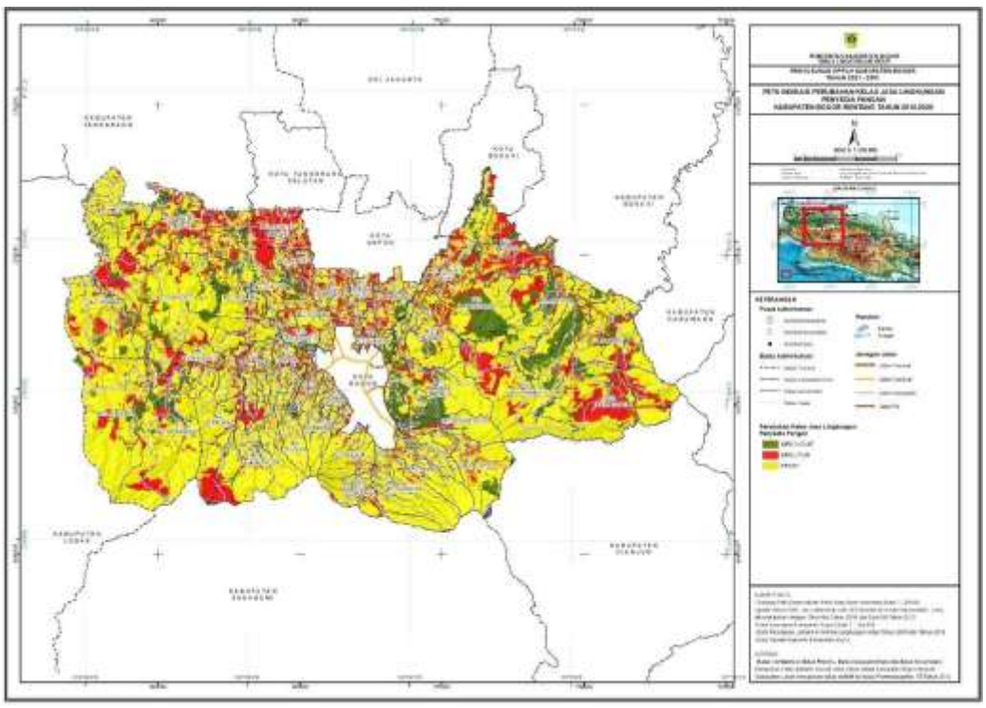

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

Gambar 2.12 Peta Perubahan DDDTLH Indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kurun Waktu Tahun 2010-2020

Selama kurun waktu 1 dekade (2010-2020) terjadi dinamika perubahan DDDTLH indikatif jasa lingkungan penyedia pangan di Kabupaten Bogor. Beberapa Kecamatan yang mengalami peningkatan cukup tinggi, meliputi : Kecamatan Jonggol seluas 3.868 Ha, Kecamatan Klapanunggal seluas 3.246 Ha, dan Kecamatan Cigudeg seluas 2.559 Ha. Sedangkan pada sisi lainnya terdapat beberapa kecamatan yang mengalami penurunan DDDTLH indikatif jasa lingkungan penyedia pangan cukup besar yang meliputi Kecamatan Tenjolaya seluas 221 Ha, Kecamatan Tamansari seluas 335 Ha, dan Kecamatan Sukaraja seluas 409 Ha.

Tabel 2.10 Dinamika Tren Perubahan Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kabupaten Bogor per Kecamatan Tahun 2010-2020

Kecamatan	Meningkat		Menurun		Tetap	
	Luas	%	Luas	%	Luas	%
Babakanmadang	1,945.08	5.58	857.23	1.56	6,414.95	3.07
Bojonggede	21.80	0.06	1,026.31	1.87	1,798.03	0.86
Caringin	67.61	0.19	365.20	0.67	7,335.45	3.51
Cariu	979.72	2.81	1,438.45	2.63	6,025.24	2.89
Ciampea	306.17	0.88	611.36	1.12	2,389.55	1.14
Ciawi	206.91	0.59	362.70	0.66	4,129.23	1.98
Cibinong	379.01	1.09	1,196.01	2.18	3,004.69	1.44
Cibungbulang	288.54	0.83	826.07	1.51	2,737.44	1.31
Cigombong	25.35	0.07	358.31	0.65	4,382.71	2.10

Kecamatan	Meningkat		Menurun		Tetap	
	Luas	%	Luas	%	Luas	%
Cigudeg	2,559.25	7.34	1,846.10	3.37	13,339.79	6.39
Cijeruk	54.34	0.16	381.07	0.70	4,296.04	2.06
Cileungsi	948.52	2.72	2,932.32	5.35	3,147.43	1.51
Ciomas	183.73	0.53	353.41	0.65	1,274.98	0.61
Cisarua	511.65	1.47	765.88	1.40	5,860.48	2.81
Ciseeng	543.38	1.56	1,135.67	2.07	2,313.56	1.11
Citeureup	633.54	1.82	681.64	1.24	5,567.60	2.67
Dramaga	370.25	1.06	628.54	1.15	1,564.85	0.75
Gunungputri	735.71	2.11	1,639.37	2.99	3,713.85	1.78
Gunungsindur	112.53	0.32	3,340.37	6.10	1,451.65	0.70
Jasinga	1,281.89	3.68	3,316.59	6.05	9,243.43	4.43
Jonggol	3,868.60	11.10	1,554.96	2.84	8,021.26	3.84
Kemang	336.05	0.96	690.07	1.26	2,367.74	1.13
Klapanunggal	3,246.93	9.32	1,557.75	2.84	4,744.68	2.27
Leuwiliang	263.34	0.76	1,747.97	3.19	7,228.82	3.46
Leuwisadeng	142.35	0.41	682.44	1.25	2,734.07	1.31
Megamendung	825.15	2.37	451.62	0.82	4,975.44	2.38
Nanggung	1,591.32	4.57	2,476.01	4.52	11,723.95	5.62
Pamijahan	338.07	0.97	2,198.28	4.01	9,973.46	4.78
Parung	400.64	1.15	1,185.62	2.16	1,139.81	0.55
Parungpanjang	1,247.94	3.58	1,952.78	3.56	3,877.82	1.86
Rancabungur	205.37	0.59	769.48	1.40	1,283.67	0.61
Rumpin	2,338.37	6.71	2,668.97	4.87	8,888.51	4.26
Sukajaya	901.36	2.59	1,932.91	3.53	13,714.61	6.57
Sukamakmur	2,437.60	6.99	2,832.86	5.17	13,025.02	6.24
Sukaraja	2,195.16	6.30	409.46	0.75	1,827.91	0.88
Tajurhalang	35.65	0.10	1,211.60	2.21	1,849.93	0.89
Tamansari	180.26	0.52	335.15	0.61	3,373.38	1.62
Tanjungsari	843.25	2.42	4,959.94	9.05	8,588.02	4.11
Tenjo	1,035.49	2.97	889.26	1.62	6,262.29	3.00
Tenjolaya	266.39	0.76	221.01	0.40	3,154.35	1.51
Total	**34,854.25**	**100.00**	**54,790.74**	**100.00**	**208,745.67**	**100.00**

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

2. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Penyedia Pangan

Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten yang menjadi penyokong pangan untuk kesatuan wilayah megapolitan Jabodetabek. Hal ini karena Kabupaten Bogor memiliki bentang lahan yang subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman pangan utama dan hortikultura. Jasa lingkungan penyedia pangan Kabupaten Bogor termasuk ke dalam kategori kelas tinggi sebagai indikator bahwa wilayah atau daerah tersebut memiliki suatu lingkungan dengan daya dukung serta kemampuan dalam menyediakan pangan yang tinggi.

Dari status DDDTLH penyedia pangan (tabulasi setiap kecamatan) dapat terlihat bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Bogor sudah melewati batas ambang. Ketersediaan pangan di Kabupaten Bogor sebanyak 2.792.414.284.778,40 kkal, kebutuhan pangan sebanyak

4.881.865.400.500,00 kkal, selisih ketersediaan pangan sebanyak -2.089.451.115.721,60 kkal, ambang batas penduduk (jiwa) sebanyak 3.558.254 jiwa, dan luas yang belum melampaui seluas 90.326,5 hektar atau 30,25 persen.

Tabel 2.11 Status DDLH Penyedia Pangan (Tabulasi setiap Kecamatan)

No	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (kkal)	Kebutuhan Pangan (kkal)	Selisih Ketersediaan Pangan (kkal)	Ambang Batas Penduduk (jiwa)	Luas Yang Belum Melampaui (%)
1	Babakan Madang	61.940.203.514,10	151.295.091.500,00	-89.354.887.985,90	78.922,00	24,09
2	Bojong Gede	26.774.876.671,80	120.274.708.750,00	-93.499.832.078,20	34.116,00	-
3	Caringin	58.609.696.486,20	84.552.104.000,00	-25.942.407.513,80	74.681,00	37,76
4	Cariu	67.016.154.062,20	144.168.776.750,00	-77.152.622.687,80	85.395,00	7,68
5	Ciampea	41.333.448.011,80	74.748.222.250,00	-33.414.774.238,20	52.672,00	2,57
6	Ciawi	33.975.822.824,50	77.365.363.500,00	-43.389.540.675,50	43.292,00	35,32
7	Cibinong	36.362.324.597,40	163.836.966.000,00	-127.474.641.402,60	46.338,00	-
8	Cibungbulang	49.351.834.713,10	84.138.540.750,00	-34.786.706.036,90	62.888,00	8,53
9	Cigombong	48.940.974.755,30	66.950.946.250,00	-18.009.971.494,70	62.363,00	24,41
10	Cigudeg	143.005.497.186,00	143.063.848.750,00	-58.369.564,00	182.229,00	60,20
11	Cijeruk	40.004.054.144,70	111.294.029.750,00	-71.289.975.605,30	50.974,00	18,21
12	Cileungsi	93.973.228.818,90	184.086.655.000,00	-90.113.426.181,10	119.748,00	7,43
13	Ciomas	15.084.300.926,20	81.945.949.250,00	-66.861.648.323,80	19.221,00	-
14	Cisarua	67.007.907.290,30	87.842.560.750,00	-20.834.653.459,70	85.383,00	43,99
15	Ciseeng	59.954.990.871,00	72.865.607.000,00	-12.910.616.129,00	764,00	33,41
16	Citeureup	38.309.233.962,10	137.667.907.750,00	-99.358.673.787,90	48.809,00	-
17	Dramaga	28.108.113.678,60	75.253.601.250,00	-47.145.487.562,40	35.815,00	-
18	Gunung Putri	59.963.134.719,40	287.558.296.250,00	-227.595.162.030,60	76.412,00	2,36
19	Gunung Sindur	70.282.924.780,50	101.470.529.250,00	-31.187.604.469,50	89.563,00	43,95
20	Jasinga	121.086.098.604,00	141.844.347.250,00	-20.758.248.646,00	154.273,00	47,36
21	Jonggol	125.086.128.919,00	242.452.436.250,00	-117.366.307.331,00	15.939,00	11,06
22	Kemang	36.948.051.897,10	79.829.478.500,00	-42.881.426.602,90	47.081,00	15,29
23	Klapanunggal	82.683.749.807,60	155.427.585.000,00	-72.743.835.192,40	105.373,00	13,16
24	Leuwiliang	78.667.142.783,60	117.105.888.250,00	-38.438.745.466,40	100.247,00	23,25
25	Leuwisadeng	27.019.090.073,50	48.164.816.000,00	-21.145.725.926,50	34.432,00	7,90
26	Megamendung	50.772.769.296,80	86.816.107.750,00	-36.043.338.453,20	64.697,00	39,17
27	Nanggung	126.351.114.526,00	125.275.920.500,00	-1.075.194.026,00	16.101,00	55,12
28	Pamijahan	116.015.851.181,00	178.476.477.250,00	-62.460.626.069,00	147.842,00	22,66

No	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (kkal)	Kebutuhan Pangan (kkal)	Selisih Ketersediaan Pangan (kkal)	Ambang Batas Penduduk (jiwa)	Luas Yang Belum Melampaui (%)
29	Parung	34.546.178.338,60	70.266.515.000,00	-35.720.336.661,40	44.022,00	29,52
30	Parung Panjang	121.528.215.696,00	117.083.130.500,00	4.445.085.196,00	154.865,00	55,64
31	Ranca Bungur	22.310.333.810,20	31.320.942.000,00	-9.010.608.189,80	28.428,00	36,96
32	Rumpin	190.531.175.403,00	169.227.413.750,00	21.303.761.653,00	242.803,00	64,80
33	Sukajaya	127.207.932.728,00	167.459.372.000,00	-40.251.439.272,00	162.096,00	38,51
34	Sukamakmur	131.990.983.573,00	244.448.840.250,00	-112.457.856.677,00	168.176,00	18,20
35	Sukaraja	34.010.417.049,30	170.859.693.750,00	-136.849.276.700,70	43.341,00	-
36	Tajurhalang	38.660.662.839,30	90.289.411.250,00	-51.628.748.410,70	49.264,00	2,74
37	Tamansari	29.525.442.647,50	66.768.099.500,00	-37.242.656.852,50	37.619,00	23,89
38	Tanjungsari	98.092.020.207,80	171.008.796.250,00	-72.916.776.042,20	124.968,00	24,94
39	Tenjo	121.123.219.016,00	98.392.739.750,00	22.730.479.266,00	154.354,00	72,47
40	Tenjolaya	38.259.002.358,00	58.967.684.500,00	-20.708.682.142,00	48.752,00	34,05
	Kab. Bogor	**2.792.414.284.778,40**	**4.881.865.400.500,00**	**-2.089.451.115.721,60**	**3.558.254,00**	**30,25**

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

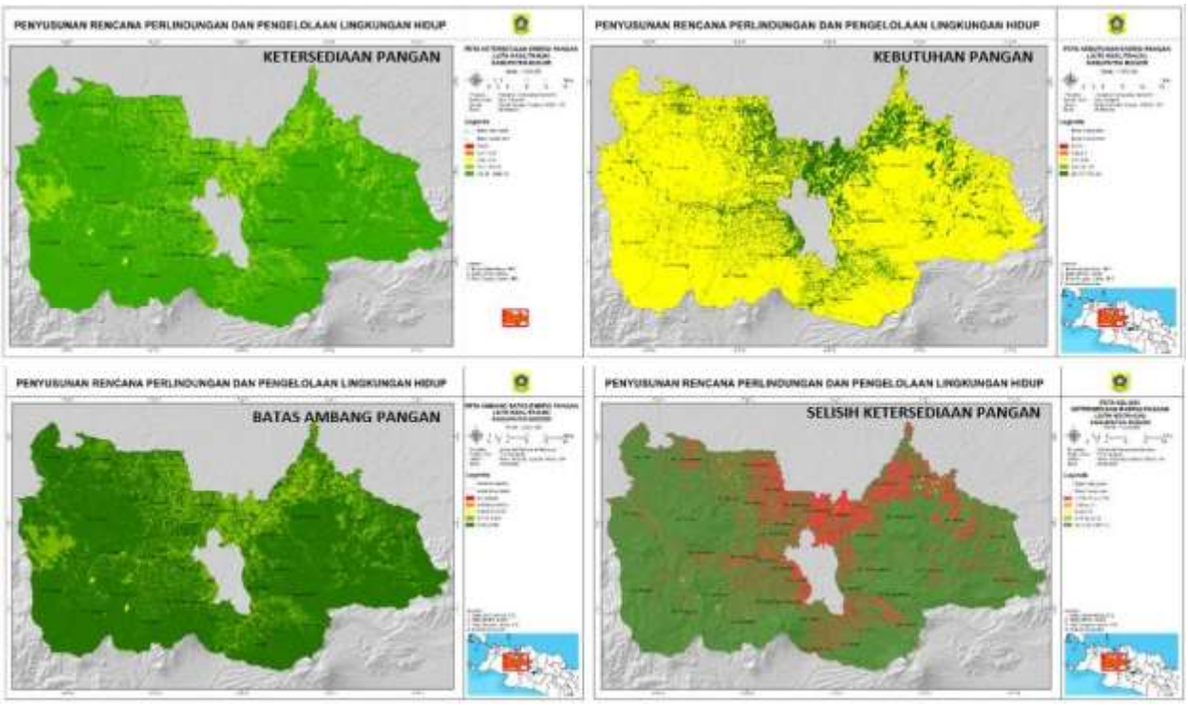

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

Gambar 2.13 Peta Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan di Kabupaten Bogor Tahun 2021 - 2051

3. Daya Dukung Penyedia Air

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga ketersediaannya menjadi penting. Ketersediaan *recharge* area di suatu daerah akan menjaga stabilitas pasokan air, khususnya yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Berdasarkan hasil analisis DDDTLH indikatif jasa lingkungan penyedia air dapat terlihat bahwa kecamatan-kecamatan yang memiliki sangat tinggi paling dominan pada tahun 2010 adalah Kecamatan Rumpin seluas 193 Ha, Kecamatan Cariu seluas 102 Ha, dan Kecamatan Jonggol seluas 90 Ha. Sedangkan kecamatan-kecamatan yang memiliki kelas sangat tinggi pada tahun 2020 adalah Kecamatan Rumpin seluas 514 Ha, Kecamatan Ciseeng seluas 227 Ha, dan Kecamatan Rancabungur seluas 161 Ha. Adapun kecamatan yang selama 10 tahun terakhir (2010-2020) mengalami penurunan cukup besar pada kelas sangat tinggi dan tinggi adalah Kecamatan Citeureup seluas 0 Ha, Kecamatan Parung Seluas 10 Ha, dan Kecamatan Cigombong seluas 21 Ha, sedangkan kecamatan yang mengalami peningkatan cukup besar pada kelas sangat tinggi dan tinggi adalah Kecamatan Rumpin seluas 321 Ha, Kecamatan Ciseeng seluas 188 Ha, dan Kecamatan Rancabungur seluas 135 Ha.

Tabel 2.12 DDDTLH Indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Air Kecamatan Tahun 2010 dan Tahun 2020

No	Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)				Rendah (Ha)		Sedang (Ha)			Tinggi (Ha)			Sangat Tinggi (Ha)		
		2010	2020	Perubahan	2010	2020	Perubahan	2010	2020	Perubahan	2010	2020	Perubahan	2010	2020	Perubahan
1	Babakanmadang	543	605	62	4,660	15,445	10,786	4,010	10,666	6,656	5		- 5			-
2	Bojonggede			-	2,094	16,043	13,949	752	4,479	3,727			-		7	7
3	Caringin			-	376	1,331	955	7,265	16,441	9,177	128	596	468		12	12
4	Cariu	53	83	30	1,620	3,499	1,880	6,668	9,670	3,002			-	103	119	16
5	Ciampea			-	601	1,502	901	2,700	9,632	6,931			-	6	52	46
6	Ciawi			-	487	1,219	732	3,969	16,878	12,910	243	596	353			-
7	Cibinong			-	2,820	14,097	11,277	1,730	1,646	-83			-	30	37	6
8	Cibungbulang			-	453	2,886	2,434	3,327	8,841	5,515			-	72	174	102
9	Cigombong			-	286	1,061	774	4,347	20,889	16,543	100	506	406	33	12	-21
10	Cigudeg			-	10,475	24,380	13,905	7,270	8,657	1,387			-		19	19
11	Cijeruk			-	91	5,075	4,984	4,435	13,547	9,113	206	479	273		12	12
12	Cileungsi			-	6,103	12,651	6,548	925	2,431	1,506			-		54	54
13	Ciomas			-	733	4,578	3,845	1,079	3,759	2,681			-			-
14	Cisarua		10	10	2,105	2,782	677	4,745	15,577	10,832	288	630	342			-
15	Ciseeng			-	556	7,628	7,072	3,398	6,354	2,956			-	39	228	189
16	Citeureup	271	803	532	5,735	23,843	18,109	876	2,133	1,257			-	0		-
17	Dramaga			-	259	5,362	5,103	2,304	6,215	3,911			-		46	46
18	Gunungputri	53	90	37	4,074	12,581	8,507	1,962	1,114	- 848			-			-
19	Gunungsindur			-	2,663	14,691	12,028	2,234	6,206	3,972			-	7	132	125
20	Jasinga			-	11,126	20,763	9,638	2,714	2,519	- 195			-	2	68	66
21	Jonggol	32	59	27	4,224	14,247	10,022	9,098	14,293	5,195	1	3	2	90	100	10
22	Kemang			-	749	9,095	8,346	2,645	8,695	6,050			-		98	98
23	Klapanunggal	790	1,365	575	7,571	25,078	17,507	1,183	2,966	1,784			-	6	23	18
24	Leuwiliang			-	6,530	13,994	7,465	2,655	13,790	11,135			-	56	150	95
25	Leuwisadeng			-	2,547	8,416	5,869	964	1,505	541			-	48	122	74
26	Megamendung			-	2,421	4,470	2,049	3,831	17,838	14,007			-			-
27	Nanggung			-	9,167	14,255	5,088	6,584	14,582	7,998			-	41	80	40
28	Pamijahan			-	2,846	6,699	3,853	9,593	27,402	17,809	49	388	339	22		-22
29	Parung			-	698	12,530	11,832	1,957	5,935	3,979			-	71	60	- 11

No	Kecamatan	Sangat Rendah (Ha)				Rendah (Ha)		Sedang (Ha)			Tinggi (Ha)			Sangat Tinggi (Ha)		
		2010	2020	Perubahan	2010	2020	Perubahan	2010	2020	Perubahan	2010	2020	Perubahan	2010	2020	Perubahan
30	Parungpanjang			-	4,896	12,857	7,961	2,183	2,842	659			-		42	42
31	Rancabungur			-	91	519	429	2,142	9,279	7,137			-	26	161	135
32	Rumpin			-	9,487	15,895	6,407	4,215	7,927	3,712			-	193	514	321
33	Sukajaya			-	8,484	14,376	5,891	8,065	13,761	5,696			-			-
34	Sukamakmur	19	74	55	7,413	18,018	10,605	10,851	17,207	6,356	2	3	1	10	69	59
35	Sukaraja	268	217	- 51	3,285	7,533	4,248	880	7,485	6,606			-			-
36	Tajurhalang			-	885	12,380	11,496	2,185	4,342	2,157			-	27		-27
37	Tamansari			-	435	4,672	4,237	3,353	11,481	8,128	100	418	318			-
38	Tanjungsari	100	5	-95	4,250	8,435	4,185	10,027	13,242	3,215			-	14	28	13
39	Tenjo			-	7,824	11,381	3,556	363	1,305	943			-		39	39
40	Tenjolaya			-	68	753	684	3,512	17,852	14,340	61	418	357			-
Total		**2,129**	**3,311**	**1,182**	**141,187**	**407,021**	**265,835**	**152,994**	**381,386**	**228,392**	**1,183**	**4,035**	**2,852**	**898**	**2,459**	**1,561**

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

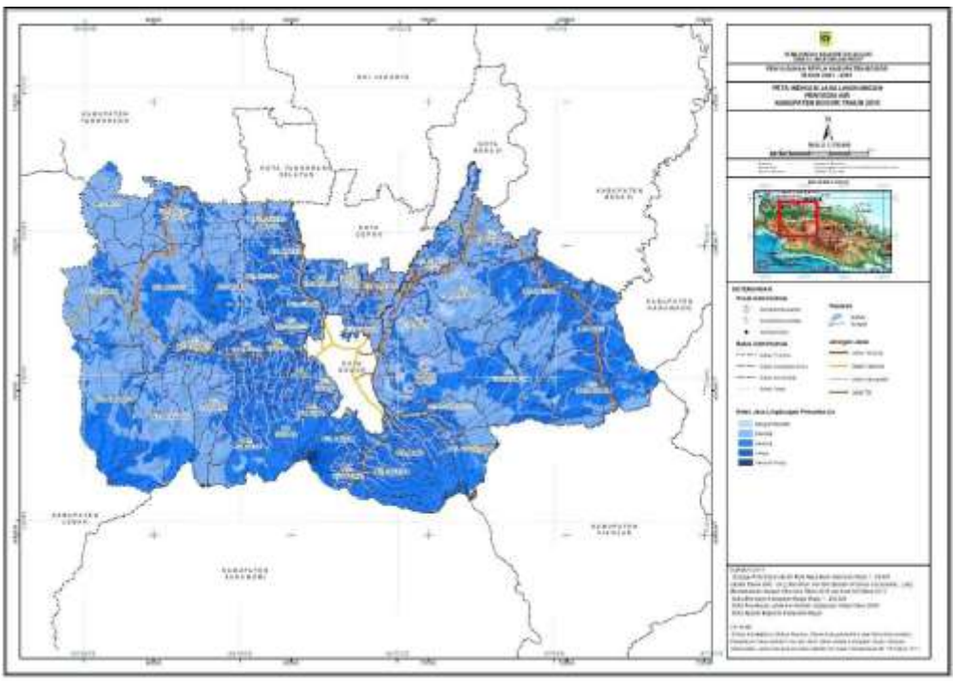

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

Gambar 2.14 Peta DDDTLH Indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Air Tahun 2010

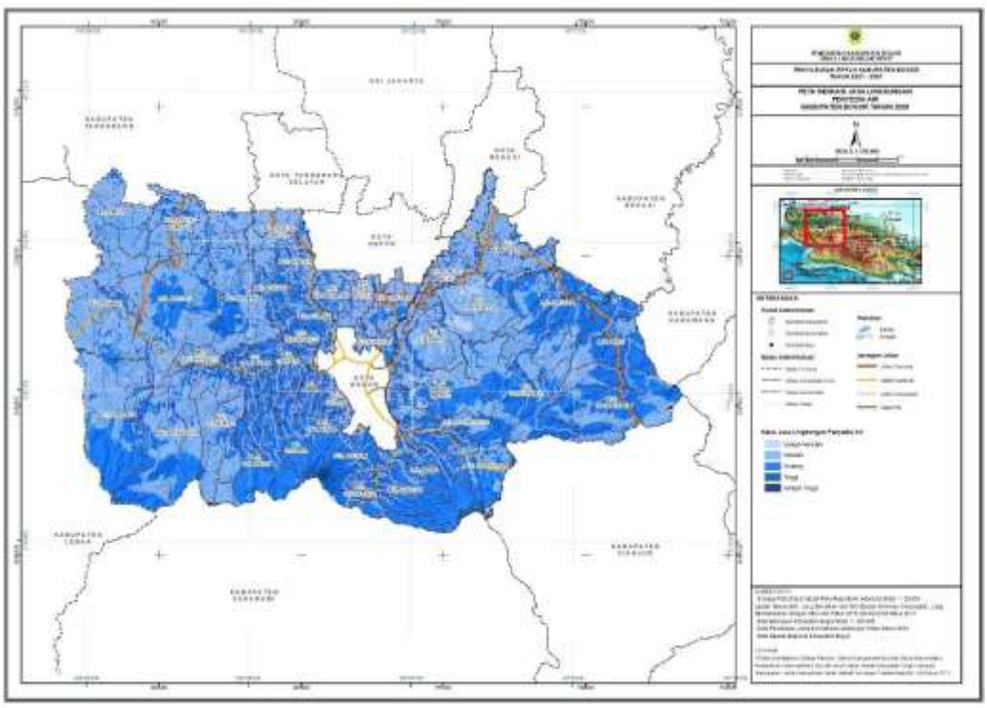

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

Gambar 2.15 Peta DDDTLH Indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Air Tahun 2020

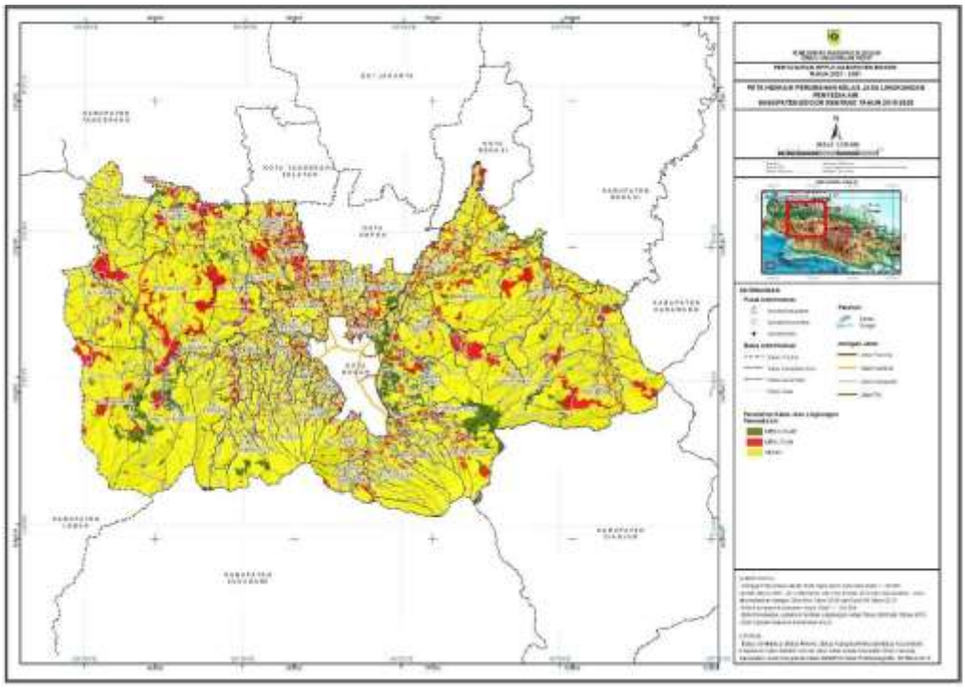

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

Gambar 2.16 Peta Perubahan DDDTLH Indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Air Kurun Waktu Tahun 2010-2020

Selama kurun waktu 1 dekade (2010-2020) terjadi dinamika perubahan DDDTLH indikatif jasa lingkungan penyedia air di Kabupaten Bogor. Beberapa kecamatan yang mengalami peningkatan cukup tinggi meliputi Kecamatan Nanggung seluas 1.816 Ha, Kecamatan Sukaraja seluas 1.665 Ha, dan Kecamatan Babakanmadang seluas 1.330 Ha. Sedangkan pada sisi lainnya terdapat beberapa kecamatan yang mengalami penurunan DDDTLH indikatif jasa lingkungan penyedia air cukup besar yang meliputi Kecamatan Tenjo seluas 68 Ha, Kecamatan Tenjolaya seluas 210 Ha, dan Kecamatan Rancabungur seluas 330 Ha.

Tabel 2.13 Dinamika Tren Perubahan Jasa Lingkungan Penyedia Air Kabupaten Bogor per Kecamatan Tahun 2010-2020

Kecamatan	Meningkat		Menurun		Tetap	
	Luas	%	Luas	%	Luas	%
Babakanmadang	1,330.33	7.47	802.00	2.50	7,084.93	2.85
Bojonggede	10.73	0.06	287.57	0.89	2,547.82	1.03
Caringin	56.01	0.31	365.20	1.14	7,347.06	2.96
Cariu	307.63	1.73	539.86	1.68	7,595.91	3.06
Ciampea	247.83	1.39	437.94	1.36	2,621.30	1.06
Ciawi	39.55	0.22	363.78	1.13	4,295.51	1.73
Cibinong	374.76	2.10	856.45	2.66	3,348.50	1.35

Kecamatan	Meningkat		Menurun		Tetap	
	Luas	%	Luas	%	Luas	%
Cibungbulang	269.75	1.52	413.57	1.29	3,168.73	1.28
Cigombong	16.16	0.09	358.31	1.11	4,391.90	1.77
Cigudeg	590.68	3.32	2,541.89	7.91	14,612.58	5.88
Cijeruk	29.77	0.17	388.02	1.21	4,313.66	1.74
Cileungsi	675.46	3.79	525.54	1.64	5,827.26	2.35
Ciomas	183.07	1.03	350.50	1.09	1,278.55	0.51
Cisarua	600.78	3.37	891.59	2.77	5,645.63	2.27
Ciseeng	107.05	0.60	1,019.76	3.17	2,865.81	1.15
Citeureup	242.87	1.36	352.07	1.10	6,287.84	2.53
Dramaga	141.46	0.79	336.96	1.05	2,085.23	0.84
Gunungputri	17.21	0.10	1,160.48	3.61	4,911.25	1.98
Gunungsindur	29.51	0.17	1,405.01	4.37	3,470.02	1.40
Jasinga	663.12	3.72	1,474.88	4.59	11,703.90	4.71
Jonggol	142.85	0.80	1,292.96	4.02	12,009.01	4.83
Kemang	285.30	1.60	656.16	2.04	2,452.39	0.99
Klapanunggal	384.00	2.16	915.11	2.85	8,250.26	3.32
Leuwiliang	236.67	1.33	690.47	2.15	8,312.98	3.35
Leuwisadeng	90.18	0.51	412.42	1.28	3,056.26	1.23
Megamendung	1,272.85	7.15	436.27	1.36	4,543.09	1.83
Nanggung	1,816.18	10.20	943.89	2.94	13,031.21	5.25
Pamijahan	759.30	4.26	369.97	1.15	11,380.53	4.58
Parung	56.11	0.32	1,024.38	3.19	1,645.57	0.66
Parungpanjang	933.21	5.24	1,232.72	3.84	4,912.61	1.98
Rancabungur	86.20	0.48	330.64	1.03	1,841.68	0.74
Rumpin	946.41	5.32	1,974.18	6.14	10,975.27	4.42
Sukajaya	1,019.68	5.73	1,618.72	5.04	13,910.48	5.60
Sukamakmur	1,039.87	5.84	1,722.41	5.36	15,533.19	6.25
Sukaraja	1,665.75	9.36	356.85	1.11	2,409.93	0.97
Tajurhalang	30.91	0.17	839.58	2.61	2,226.68	0.90
Tamansari	122.91	0.69	332.97	1.04	3,432.91	1.38
Tanjungsari	208.60	1.17	1,841.16	5.73	12,341.45	4.97
Tenjo	723.59	4.06	68.00	0.21	7,395.46	2.98
Tenjolaya	50.04	0.28	210.00	0.65	3,381.72	1.36
TOTAL	**17,804.36**	**100.00**	**32,140.25**	**100.00**	**248,446.05**	**100.00**

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

4. Status DDDTLH Penyedia Air

Surat Keputusan MenLHK No. 297/MenLHK/Setjen/PLA.3/4/2019 tanggal 16 April 2019 disusun dengan pertimbangan bahwa air merupakan sumberdaya alam yang menopang kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya yang perlu dipelihara keberlanjutannya. Kebutuhan akan ketersediaan air merupakan kebutuhan dasar manusia dan mahluk hidup di muka bumi ini. Sehingga daya dukung dan daya tampung yang ditetapkan secara nasional dan diterjemahkan dalam skala kabupaten untuk air.

Air mempunyai fungsi yang sangat vital bagi tanaman. Kekurangan atau kelebihan air akan mengganggu pertumbuhan dan produktivitas tanaman serta berpengaruh pada kemampuan dalam menyediakan jasa

lingkungan hidup salah satunya sebagai penyedia pangan. Keterkaitan pengelolaan air dengan produktivitas pangan dapat dianalisis dari konsep siklus hidrologi. Setiap pemangku kepentingan di Kabupaten Bogor memiliki peran dan tanggung jawab melakukan perlindungan dan pengelolaan air untuk menjamin keberlanjutan fungsi jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air. Ekosistem alam tetap terjaga hingga mempengaruhi ketersediaan sumber pangan bagi manusia.

Air menempati posisi strategis dalam berbagai agenda politik berkaitan dengan frekuensi dan tingkat luasan dampak bencana yang mengancam kehidupan manusia dan peradaban, terutama terkait dengan ketahanan dan kerentanan pangan. Ketersedian air yang cukup dan bersih merupakan tuntutan kebutuhan hidup mendasar. Pentingnya peran air bagi kebutuhan hidup maka pemerintah memiliki tanggung jawab mengatur perlindungan dan pengelolaan air untuk menjamin keberlanjutan ketersediaan air, diantaranya melalui penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional.

Secara agregat, DDDT Air di Pulau Jawa diindikasikan telah terlampaui karena minimnya selisih ketersediaan air di masing-masing wilayah dan kecenderungan kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengaturan air kian menurun tiap tahunnya. Ketersediaan air dari keenam provinsi di Pulau Jawa sebanyak 118.901.282.137 m3/tahun diperkirakan mampu mendukung populasi penduduk paling banyak 148.626.602 jiwa, tanpa mempertimbangkan pembangunan dan perubahan lahan. Proporsi pemanfaatan air di Provinsi Jawa Barat tercatat bahwa 1.196.453,33 Ha (31,81 persen) sudah melampaui dan 2.564.412,74 Ha (68,19 persen) masih belum terlampaui.

Hasil analisis untuk status DDDTLH penyedia air di Kabupaten Bogor tercatat bahwa ketersediaan air sebanyak 2.373.481.483,85 m3, kebutuhan air sebanyak 2.256.573.575,49 m3, selisih ketersediaan air sebanyak 116.907.908,36 m3, ambang batas penduduk sebanyak 7.574.032 jiwa dan luas wilayah yang belum terlampaui seluas 161.244 Ha atau 54,46 persen.

Tabel 2.14 Status DDLH Penyedia Air (Tabulasi setiap kecamatan)

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m3)	Kebutuhan Air (m3)	Selisih Ketersediaan Air (m3)	Ambang Batas Penduduk (jiwa)	Luas Yang Belum Melampaui (%)
1	Babakan Madang	67.541.719,02	75.158.440,51	-7.616.721,49	104.641	61,60
2	Bojong Gede	10.766.728,46	20.931.942,67	-10.165.214,21	35.612	18,35
3	Caringin	19.795.901,47	30.654.362,38	-10.858.460,91	-1.793	34,46
4	Cariu	79.358.203,71	114.060.528,68	-34.720.324,97	-217.931	38,14
5	Ciampea	7.345.680,23	50.675.206,74	-43.329.526,51	-406.248	2,57
6	Ciawi	20.702.141,00	20.018.481,30	683.659,70	106.501	48,00
7	Cibinong	33.093.597,90	27.249.209,72	5.844.388,17	276.424	92,60
8	Cibungbulang	9.445.823,53	64.154.981,46	-54.709.157,93	-525.991	-
9	Cigombong	31.688.832,41	26.812.713,42	4.876.118,98	141.754	32,25
10	Cigudeg	267.030.475,17	86.649.521,14	180.380.954,02	2.270.044	86,26
11	Cijeruk	10.546.740,27	32.295.773,00	-21.749.032,73	-109.902	16,36
12	Cileungsi	59.449.226,26	57.505.131,08	-1.944.095,18	257.076	74,14
13	Ciomas	3.997.931,95	19.606.394,34	-15.608.462,39	-7.623	-
14	Cisarua	71.979.085,05	33.715.580,34	38.363.504,72	5.548	82,64
15	Ciseeng	8.453.384,24	27.990.075,29	-19.536.691,04	-133.267	-
16	Citeureup	43.435.189,96	44.006.642,33	-571.452,37	168.817	66,28
17	Dramaga	5.523.781,57	37.571.764,23	-32.047.982,66	-275.031	-
18	Gunung Putri	52.683.560,90	46.632.615,03	6.050.945,87	436.467	92,19
19	Gunung Sindur	10.350.837,14	39.664.156,86	-29.313.319,73	-209.971	-
20	Jasinga	166.311.654,42	100.091.831,40	66.219.823,02	947.181	91,62
21	Jonggol	113.221.141,45	187.879.920,51	-74.658.779,07	-555.156	23,48
22	Kemang	7.049.553,87	25.673.958,48	-18.624.404,62	-113.832	-
23	Klapanunggal	61.275.727,92	76.588.922,52	-15.313.194,60	20.827	34,24
24	Leuwiliang	22.044.921,06	63.435.658,70	-41.390.737,64	-329.836	11,16
25	Leuwisadeng	6.872.838,26	22.888.775,86	-16.015.937,60	-123.992	5,25
26	Megamendung	46.204.322,53	42.453.947,25	3.750.375,28	154.034	68,92
27	Nanggung	67.940.394,70	69.693.695,97	-1.753.301,27	139.342	46,55
28	Pamijahan	45.437.747,08	89.144.031,89	-43.706.284,81	-278.421	32,82

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m3)	Kebutuhan Air (m3)	Selisih Ketersediaan Air (m3)	Ambang Batas Penduduk (jiwa)	Luas Yang Belum Melampaui (%)
29	Parung	6.145.909,39	17.683.290,40	-11.537.381,01	-43.996	2,96
30	Parung Panjang	183.662.994,88	72.306.315,33	111.356.679,55	1.438.050	100,00
31	Ranca Bungur	4.425.918,60	17.649.268,92	-13.223.350,32	-113.137	-
32	Rumpin	137.514.682,52	94.453.144,48	43.061.538,04	71.404	42,95
33	Sukajaya	191.667.076,43	83.450.243,54	108.216.832,90	1.465.909	96,13
34	Sukamakmur	140.353.396,56	147.202.005,46	-6.848.608,90	232.232	58,61
35	Sukaraja	30.275.157,25	49.547.029,65	-19.271.872,40	-533	45,86
36	Tajurhalang	6.367.946,07	23.029.226,31	-16.661.280,24	-77.785	-
37	Tamansari	8.087.882,41	21.726.863,59	-13.638.981,18	-72.774	23,89
38	Tanjungsari	127.885.115,43	105.335.434,64	22.549.680,79	478.906	76,18
39	Tenjo	179.318.017,17	50.564.937,36	-128.753.079,81	1.615.577	100,00
40	Tenjolaya	8.230.245,63	40.421.552,69	116.907.908,36	-297.442	31,76
	Kab. Bogor	**2.373.481.483,85**	**2.256.573.575,49**	**116.907.908,36**	**7.574.032**	**54,46**

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

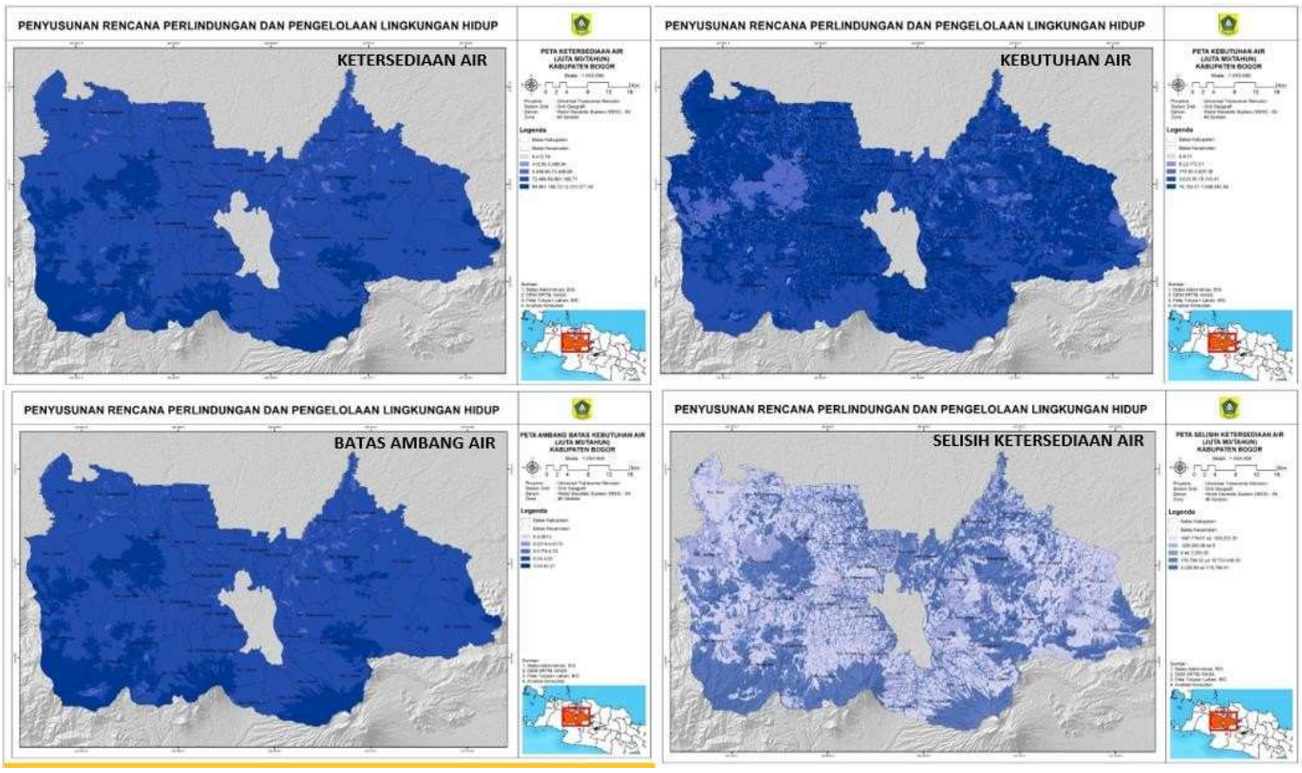

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

Gambar 2.17 Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten Bogor Tahun 2021-2051

Adapun jika ditinjau dari pelayanan SPAM, secara keseluruhan jumlah cakupan pelayanan pada Kabupaten Bogor pada saat ini hanya mencapai 23,10 persen. Sambungan langsung mencapai 150.072 unit dan jumlah penduduk terlayani mencapai 901.432 jiwa. Jumlah kecamatan yang terlayani mencapai 25 Kecamatan.

Tabel 2.15 Rincian Cakupan Pelayanan Sistem Penyedia Air Bersih Kabupaten Bogor

Uraian	Wilayah Terlayani	Jumlah Sambungan (Unit)	Jumlah Penduduk Terlayani (jiwa)	Cakupan Pelayanan (%)	
				Administratif	Pelayanan
Hidran Umum			1.000		
Cabang Leuwiliang	Leuwisadeng, Leuwiliang, Cibungbulang, Ciampea	10.080	60.480	6,5	14,8
Cabang Ciomas	Dramaga, Ciomas	25.830	154.980	56,2	56,2

Uraian	Wilayah Terlayani	Jumlah Sambungan (Unit)	Jumlah Penduduk Terlayani (jiwa)	Cakupan Pelayanan (%)	
				Administratif	Pelayanan
Cabang Kedung halang	Kemang, Sukaraja	15.553	93.318	26,0	50,5
Cabang Parung Panjang	Parung Panjang, Rumpin, Gunung Sindur	13.904	83.424	23,8	28,3
Cabang Cileungsi	Gunung Putri, Cileungsi	28.494	170.964	32,0	38,6
Cabang Ciawi	Cijeruk, Caringin, Ciawi, Megamendung, Cisarua.	7.875	47.250	8,3	9,7
Cabang Cibinong	Tajurhalang, Bojonggede, Cibinong, Citeureup, Babakan Madang	27.449	164.694	23,7	23,7
Cabang Jonggol	Jonggol, Cariu	20.887	125.322	46,4	79,7
Total		**150.072**	**901.432**	**23,1**	**30,9**

Sumber : Business Plan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2022

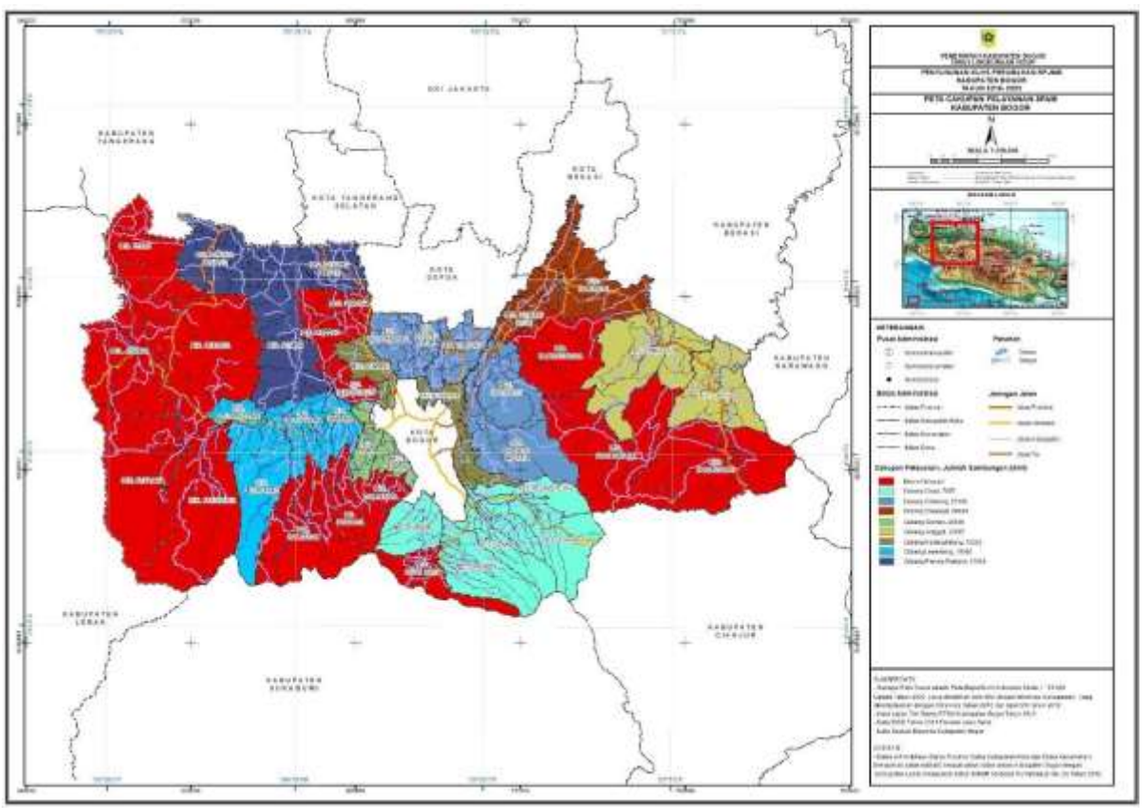

Sumber : Business Plan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2022

Gambar 2.18 Cakupan Pelayanan SPAM

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap Perubahan RPJPD Kabupaten Bogor 2005-2025, berkaitan dengan pangan termuat dalam Misi Ke-4 "Mewujudkan Kabupaten Bogor yang TEGAR BERIMAN (Tertib, Segar, Bersih, Indah, Mandiri, Aman dan Nyaman) dan Berkelanjutan". Misi tersebut diartikan membentuk suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bogor yang maju dan sejahtera yang ditandai dengan terjaminnya ketertiban dan keamanan serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Di samping itu juga termuat dalam sasaran pokok "Terwujudnya Perekonomian Rakyat Yang Maju", yang ditandai dengan :

1. Terwujudnya pengendalian pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan untuk kemajuan perekonomian daerah;
2. Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam serta pelestarian fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan.

2.1.8. Aspek Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2020 mencapai 5.427.068 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 2.789.738 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.637.330 jiwa. Kemudian apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2019 yang mencapai 5.965.410 jiwa maka artinya jumlah penduduk pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,29 persen dibandingkan tahun 2019.

Mengenai data *sex ratio* penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2020 adalah sebesar 105,78. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam setiap 100 orang perempuan terdapat 106 orang laki-laki. Kemudian di setiap kecamatan di Kabupaten Bogor data *sex ratio*-nya menunjukkan angka di atas 100, yang berarti berlaku umum bahwa di seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.

Adapun kondisi demografis Kabupaten Bogor sebagaimana diuraikan di atas secara ringkas disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, Sex Ratio, Pertumbuhan Penduduk dan Distribusi Tahun 2020

No	Kecamatan	2020					
		Laki-laki	Perempuan	L+P	Sex ratio	Pertumbuhan Penduduk (%)	Distribusi
1	Nanggung	51.733	46.759	98.492	110,64	1,6	1,81
2	Leuwiliang	64.463	60.207	124.670	107,07	0,96	2,3
3	Leuwisadeng	40.439	36.943	77.382	109,46	0,89	1,43
4	Pamijahan	81.446	75.667	157.113	107,64	1,61	2,89
5	Cibungbulang	75.653	70.053	145.706	107,99	1,53	2,68
6	Ciampea	86.773	81.586	168.359	106,36	1,36	3,1
7	Tenjolaya	32.994	30.651	63.645	107,64	1,46	1,17
8	Dramaga	56.967	53.407	110.374	106,67	0,92	2,03
9	Rumpin	76.749	69.258	146.007	110,82	1,23	2,69
10	Cigudeg	70.299	63.632	133.931	110,48	1,34	2,47
11	Sukajaya	35.076	31.846	66.922	110,14	1,86	1,23
12	Jasinga	55.330	51.013	106.343	108,46	1,34	1,96
13	Tenjo	38.191	35.081	73.272	108,87	1,04	1,35
14	Parung Panjang	60.999	57.177	118.176	106,68	0,72	2,18
15	Ciomas	86.936	83.550	170.486	104,05	1,34	3,14
16	Tamansari	56.244	52.669	108.913	106,79	1,7	2,01
17	Cijeruk	47.919	43.743	91.662	109,55	1,54	1,69
18	Cigombong	50.332	47.319	97.651	106,37	1,01	1,8
19	Caringin	67.946	63.066	131.012	107,74	1,38	2,41
20	Ciawi	59.297	55.556	114.853	106,73	1,1	2,12
21	Cisarua	66.052	61.044	127.096	108,2	1,21	2,34
22	Megamendung	56.119	51.018	107.137	110	1,01	1,97
23	Sukaraja	105.434	100.889	206.323	104,5	1,76	3,8
24	Babakan Madang	59.438	55.203	114.641	107,67	1,07	2,11
25	Citeureup	109.937	104.731	214.668	104,97	0,79	3,96
26	Cibinong	183.594	179.830	363.424	102,09	1,08	6,7
27	Bojonggede	146.397	141.157	287.554	103,71	1,97	5,3
28	Tajur Halang	62.952	60.502	123.454	104,05	2,41	2,27
29	Kemang	53.556	51.316	104.872	104,37	1,27	0,11
30	Rancabungur	31.244	29.467	60.711	106,03	1,95	1,12
31	Parung	62.813	60.265	123.078	104,23	0,9	2,27
32	Ciseeng	57.262	53.330	110.592	107,37	1,19	2,04
33	Gunung Sindur	64.836	61.998	126.834	104,58	2,1	2,34
34	Sukamakmur	44.648	40.917	85.565	109,12	1,38	1,58
35	Cariu	25.994	25.625	51.619	101,44	1,12	0,95
36	Tanjungsari	29.106	27.921	57.027	104,24	1,32	1,05
37	Jonggol	72.842	70.670	143.512	103,07	1,58	2,64
38	Cileungsi	145.925	142.422	288.347	102,46	1,59	5,31

No	Kecamatan	2020					
		Laki-laki	Perempuan	L+P	Sex ratio	Pertumbuhan Penduduk (%)	Distribusi
39	Klapanunggal	65.393	62.168	127.561	105,19	2,99	2,35
40	Gunung Putri	150.410	147.674	298.084	101,85	-0,39	5,49
KABUPATEN BOGOR		**2.789.665**	**2.637.330**	**5.427.068**	**105,78**	**1,29**	**100**

Sumber : Kabupaten Bogor Dalam Angka 2021, BPS

Bila dicermati data pada tabel di atas diketahui bahwa pertumbuhan penduduk antar kecamatan tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 yang terbesar terdapat di Kecamatan Klapanunggal, Tajurhalang dan Gunungsindur, dengan masing-masing sebesar 2,99 persen, 2,41 persen dan 2,10 persen. Adapun ketiga kecamatan tersebut memiliki pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk rata-rata Kabupaten Bogor yang sebesar 1,29 persen. Sementara itu di Kecamatan Cibinong sebagai ibukota Kabupaten Bogor, pertumbuhan penduduknya mencapai 1,08 persen.

Kemudian mengenai komposisi penduduk di Kabupaten Bogor dapat digambarkan dalam piramida penduduk yang berbentuk limas *(expansive)*. Piramida penduduk berbentuk ini memiliki ciri-ciri sebagian besar berada pada kelompok penduduk muda, kelompok usia tua jumlahnya sedikit, tingkat kelahiran bayi tinggi dan pertumbuhan penduduk tinggi.

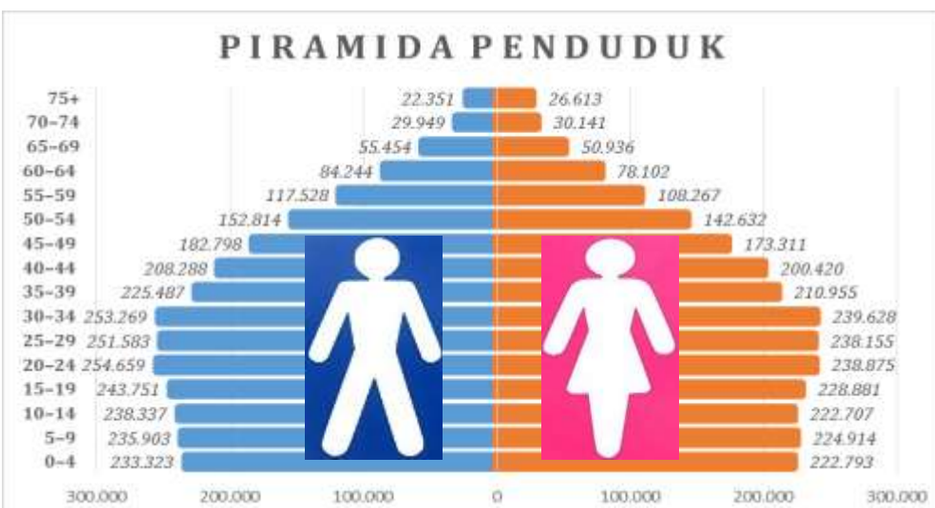

Sumber : Kabupaten Bogor dalam Angka 2021, BPS, diolah

Gambar 2.19
Piramida Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Bogor Tahun 2020

Bila dicermati gambar di atas, piramida penduduk Kabupaten Bogor dapat dikatakan dalam proses transisi. Hal tersebut dikarenakan walaupun piramidanya berbentuk limas *(expansive)*, namun grafiknya berbentuk gemuk di bawah dan di tengah yang cenderung mengerucut di bagian atas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kelahiran di Kabupaten Bogor masih tinggi, dan tingkat kematian di usia muda semakin berkurang.

Kemudian gambaran lain yang dapat divisualisasikan berdasarkan piramida penduduk Kabupaten Bogor di atas, bahwa terdapat kecenderungan komposisi penduduk Kabupaten Bogor di masa depan akan semakin didominasi oleh penduduk usia produktif (kelompok muda). Hal ini diperlihatkan oleh panjang batang piramida untuk kelompok umur 5-9 tahun dan 10-14 tahun yang sedikit lebih panjang dari kelompok umur lainnya, dan batang piramida untuk kelompok umur 60 tahun ke atas yang cukup pendek.

Selanjutnya berdasarkan data pada gambar piramida penduduk di atas diketahui pula bahwa penduduk Kabupaten Bogor sedang mengalami pertumbuhan, dimana tingkat kelahiran, tingkat kematian dan tingkat pertumbuhan penduduk masih tinggi. Hal tersebut digambarkan melalui batang piramida penduduk Kabupaten Bogor yang panjang pada kelompok umur 0-4 tahun dan 5-9 tahun, berbanding terbalik dengan semakin pendeknya batang pada kelompok umur 60 tahun ke atas.

Mengenai komposisi penduduk Kabupaten Bogor, diketahui bahwa komposisinya tergolong “muda”. Hal tersebut dikarenakan penduduk usia 15-64 tahun berjumlah lebih dari 40 persen dari total keseluruhan kelompok umur. Di samping itu, komposisi penduduk Kabupaten Bogor tergolong menuju ke arah penduduk usia produktif. Hal tersebut dikarenakan penduduk usia 15-64 tahun berjumlah lebih dari 60 persen yaitu sebesar 70,64 persen, dan penduduk 0-14 tahun kurang dari 30 persen yaitu sebesar 25,39 persen. Dengan demikian kondisi tersebut tentu dapat berimplikasi terhadap masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor yang akan mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

Pembahasan mengenai penduduk usia produktif dan tidak produktif, tentu sangat erat kaitannya dengan rasio beban ketergantungan *(Burden of Dependency Ratio)*. Rasio beban ketergantungan merupakan perbandingan antara penduduk tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk produktif (berusia 15-64 tahun). Adapun rasio beban

ketergantungan terbagi menjadi dua, yaitu rasio ketergantungan anak yang merupakan perbandingan anak (penduduk usia 0-14 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan rasio ketergantungan lanjut usia yang merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa rasio ketergantungan anak di Kabupaten Bogor pada tahun 2020 sebesar 35,94 persen, dan rasio ketergantungan lanjut usia sebesar 5,62 persen atau secara keseluruhan angka beban ketergantungan Kabupaten Bogor sebesar 41,56 persen (35,94 persen + 5,62 persen). Hal ini dapat diartikan bahwa untuk setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sebanyak 42 penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas).

Selanjutnya mengenai kepadatan penduduk, perlu diketahui bahwa kepadatan penduduk di suatu wilayah dicerminkan melalui banyaknya penduduk tiap satuan luas wilayah dalam Km^2. Luas wilayah yang dimaksud adalah luas wilayah yang dimungkinkan penduduk bermukim atau hanya luas daratan, tidak termasuk laut ataupun perairan seperti sungai, waduk atau setu. Kepadatan penduduk yang tinggi cenderung dapat memperlambat pendapatan per kapita melalui tiga cara, yaitu :

1) memperberat beban penduduk pada lahan;
2) menaikkan barang konsumsi karena kekurangan faktor pendukung untuk menaikkan penawaran;
3) memerosotkan akumulasi modal, karena dengan tambah anggota keluarga biaya meningkat.

Kepadatan penduduk ini jika tidak dikendalikan akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Jhingan (2008) mengemukakan pengaruh buruk kepadatan penduduk yang tinggi terhadap perekonomian yang dalam hal ini pendapatan per kapita. Kondisi ini akan semakin parah apabila persentase anak-anak pada keseluruhan penduduk tinggi, karena anak-anak hanya menghabiskan dan tidak menambah produk, dan jumlah anak yang menjadi tanggungan keluarga lebih besar daripada jumlah mereka yang menghasilkan, sehingga pendapatan per kapita menjadi rendah.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, diketahui bahwa kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor pada tahun 2020 mencapai 2.236 jiwa/Km^2 yang diuraikan secara rinci melalui tabel di bawah ini :

Tabel 2.17
Kepadatan Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2020

No	Kecamatan	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk Per Km^2
1	Nanggung	1,81	618,29
2	Leuwiliang	2,30	1.369,50
3	Leuwisadeng	1,43	2.186,23
4	Pamijahan	2,89	1.258,31
5	Cibungbulang	2,68	3.789,08
6	Ciampea	3,10	5.094,96
7	Tenjolaya	1,17	1.539,12
8	Dramaga	2,03	4.364,42
9	Ciomas	3,14	9.140,85
10	Tamansari	2,01	3.173,43
11	Cijeruk	1,69	1.912,71
12	Cigombong	1,80	1.016,47
13	Caringin	2,41	2.777,83
14	Ciawi	2,12	1.481,06
15	Cisarua	2,34	2.700,11
16	Megamendung	1,97	1.448,36
17	Sukaraja	3,80	3.304,94
18	Babakan Madang	2,11	2.619,84
19	Sukamakmur	1,58	926,24
20	Cariu	0,95	303,33
21	Tanjungsari	1,05	667,54
22	Jonggol	2,64	903,38
23	Cileungsi	5,31	2.162,97
24	Klapanunggal	2,35	1.807,66
25	Gunung Putri	5,49	4.896,70
26	Citeureup	3,96	3.119,72
27	Cibinong	6,70	7.795,79
28	Bojonggede	5,30	10.145,32
29	Tajurhalang	2,27	4.010,59
30	Kemang	1,93	3.119,83
31	Rancabungur	1,12	2.678,58
32	Parung	2,27	4.782,24
33	Ciseeng	2,04	2.678,38
34	Gunung Sindur	2,34	2.568,13
35	Rumpin	2,69	1.066,99
36	Cigudeg	2,47	754,06
37	Sukajaya	1,23	428,49
38	Jasinga	1,96	735,74
39	Tenjo	1,35	880,51
40	Parungpanjang	2,18	1.656,44

Sumber : Kabupaten Bogor Dalam Angka 2021, BPS

2.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah

Analisis pada aspek geografi Kabupaten Bogor dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, mencakup ukuran, struktur, dan distribusi penduduk. Adapun mengenai kerangka pemikiran dalam merumuskan potensi pengembangan wilayah dapat divisualisasikan melalui gambar di bawah ini.

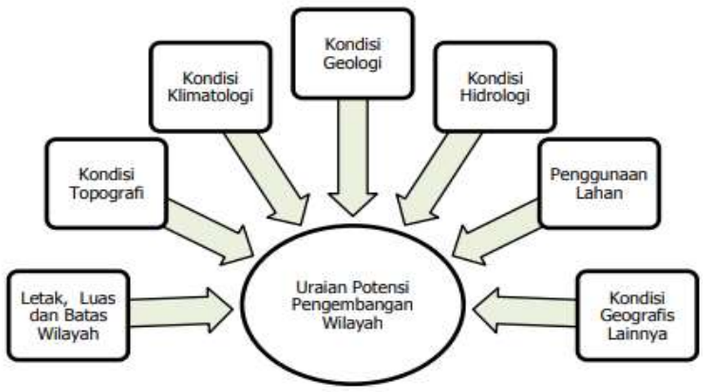

Gambar 2.20
Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, diketahui Kabupaten Bogor memiliki sumberdaya alam yang cukup besar. Salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah pertanian. Selain potensi produksi tanaman pangan, produksi tanaman perkebunan dan produksi perikanan air tawar dapat dilihat dari luasan sawah produktif, perkebunan dan kawasan perikanan. Pemerintah Kabupaten Bogor sangat memperhatikan pengembangan pertanian dan pembangunan perdesaan pada khususnya melalui kebijakan Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan (RP3) yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Pertanian. Berdasarkan peraturan ini pengembangan pertanian dan pembangunan perdesaan di Kabupaten Bogor dibagi dalam beberapa zona sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.18
Zonasi Arah Pengembangan Komoditas Unggulan Kabupaten Bogor

Zona	Kecamatan	Arah Pengembangan
1.	Rumpin, Cigudeg, Parung Panjang, Jasinga, Tenjo	***Agrosilvopastoral***, yaitu pengembangan *agroforestry* yang didukung oleh sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan
2.	Sukajaya, Nanggung, Leuwiliang, Leuwisadeng, Cibungbulang, Pamijahan	***Agroekowisata*** yang didukung oleh sektor pertanian tanaman pangan dan perikanan. Pola pengembangan komoditas strategis: agropolitan dan minapolitan
3.	Ciampea, Tenjolaya, Dramaga, Ciomas	***Industri non-farm*** yang didukung dengan sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan
4.	Tajurhalang, Kemang, Rancabungur, Parung, Ciseeng, Gunung Sindur	**Industri perdesaan dan pengembangan UMKM**, yang tetap berbasiskan pada produk atau komoditas pertanian secara luas serta perikanan berbasis minapolitan
5.	Tamansari, Cijeruk, Cigombong, Caringin	**Diversifikasi pertanian dan agroekowisata**
6.	Ciawi, Cisarua, Megamendung, Sukaraja, Babakan Madang	**Ekowisata** yang dikerjasamakan dengan berbagai pihak dalam rangka membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat
7.	Cileungsi, Klapanunggal, Gunung Putri, Citeureup, Cibinong, Bojonggede	**Pertanian perkotaan dan industri**. Pengembangan *urban agriculture* bertitik tolak pada produk atau komoditas pertanian yang sudah diusahakan oleh warga. Pengembangan industri besar dikaitkan dengan ada rencana pengembangan Cibinong Raya
8.	Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari, Jonggol	**Lumbung pangan** melalui peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemukiman

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2018

Selain meningkatkan produksi, tujuan pengembangan pertanian dan pembangunan perdesaan juga diarahkan agar dilakukan secara efektif dan efisien serta mempunyai daya jual yang tinggi atau mempunyai daya saing yang tinggi sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2010 tentang Peningkatan Daya Saing Produk Kabupaten Bogor. Adapun uraian mengenai komoditas unggulan di setiap kecamatan adalah sebagai berikut :

1) Pertanian Tanaman Pangan

Tabel 2.19
Komoditas Tanaman Pangan Tahun 2018-2020

No	Komoditas	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi Sawah	74.779	506.023	74.779	506.023	86.345	472.678
2	Talas	790	12.690	780	11.487	744	11.165
3	Ubi Jalar	2.914	52.839	2.859	44.688	2.705	48.294
4	Ubi Kayu	4.206	101.276	3.722	91.214	3.758	85.861

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2021

Beberapa potensi yang dimiliki wilayah Kabupaten Bogor untuk dikembangkan pada lapangan usaha pertanian terdiri dari komoditas strategis, yaitu Padi Sawah dan komoditas unggulan tanaman pangan, antara lain : Talas, Ubi Kayu, dan Ubi Jalar. Adapun sentra komoditas strategis Padi Sawah tersebar hampir di 40 (empat puluh) Kecamatan.

Kemudian pengembangan Talas sangat bergantung pada lokasi (spesifik lokasi). Sentra komoditas unggulan talas di Kecamatan Cigombong dengan lokasi pengembangan terdapat di Kecamatan Tamansari, Cijeruk, Dramaga, Caringin, Cibungbulang dan Pamijahan. Varietas talas yang telah dikembangkan adalah Varietas bentul, bulkok, hijau dengan pertimbangan varietas tersebut mempunyai potensi hasil produksi yang cukup tinggi yaitu 50-100 ton/Ha dengan kadar pati 25-31 persen.

Sedangkan untuk varietas yang biasa ditanam oleh petani hanya mampu memproduksi sebesar 20-25 ton/Ha, sehingga peluang terjadinya peningkatan produksi kurang cukup signifikan. Sedangkan sentra komoditas ubi kayu terdapat di Babakan Madang dan Sukaraja dengan lokasi pengembangan terdapat di Kecamatan Cibungbulang, Cibinong, Citeureup dan Sukamakmur.

Komoditas unggulan tanaman pangan lainnya adalah ubi jalar. Jenis yang dikembangkan adalah varietas AC kuning dan AC putih dengan pertimbangan bahwa varietas ini memiliki potensi produktivitas yang relatif tinggi dan tahan terhadap penyakit boleng, dengan lokasi pengembangan terdapat di Kecamatan Tamansari, Ciampea, Tenjolaya, Pamijahan, Cibungbulang, Leuwiliang dan Leuwisadeng. Produksi talas, ubi jalar dan ubi kayu tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena dipengaruhi permintaan pasar, hal ini juga dipengaruhi oleh jenis penggunaan varietas unggul, bantuan sarana produksi (saprodi), dan tindakan pengamanan produksi selama masa panen hingga pasca panen. Belum terbentuk sentra ubi jalar, tetapi akan diarahkan di Kecamatan Ciomas.

Penumbuhan agribisnis komoditas ubi jalar dan ubi kayu telah berhasil meningkatkan nilai ekonomis produk dari umbi segar menjadi tepung halus atau tepung tapioka setelah adanya bimbingan teknis dan

bantuan alat pengolahan dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Dengan kegiatan ini diharapkan para petani dapat meningkatkan nilai tambah dari komoditas sekaligus dapat meningkatkan pendapatan para petani.

2) Pertanian Hortikultura

Beberapa potensi yang dimiliki wilayah Kabupaten Bogor untuk dikembangkan pada lapangan usaha pertanian terutama komoditas unggulan hortikultura, antara lain : jambu biji, pepaya, rambutan, manggis, tanaman obat, tanaman hias dan nanas. Sentra komoditas jambu biji unggulan diarahkan ke Kecamatan Rancabungur dan Dramaga, sedangkan lokasi pengembangan terdapat di Kecamatan Tamansari, Jasinga, Cigombong, Cigudeg dan Pamijahan. Sentra komoditas unggulan tanaman pepaya dikembangkan di Kecamatan Rancabungur. Sedangkan wilayah pengembangan meliputi Kecamatan Caringin, Jasinga, Cigudeg dan Tenjo. Komoditas rambutan banyak dikembangkan di Kecamatan Gunung Putri, Tenjo dan Rumpin.

Komoditas manggis pemasarannya sampai ke mancanegara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, dan ke negara-negara Timur Tengah. Pengembangan manggis telah menggunakan *Standard Operational Procedure (SOP) Good Agricultural Practices* dalam budidayanya. Lokasi sentra komoditas unggulan manggis terdapat di Kecamatan Leuwiliang, Leuwisadeng, Cigudeg, Sukamakmur dan Jasinga, dengan wilayah pengembangannya di Kecamatan Nanggung.

Sentra komoditas unggulan tanaman obat diarahkan di Kecamatan Cileungsi dengan wilayah pengembangan di Kecamatan Gunung Putri, Tenjo, Ciseeng, Nanggung dan Kecamatan Gunung Sindur. Sentra komoditas unggulan tanaman hias diarahkan di Kecamatan Tamansari dengan wilayah pengembangan meliputi Kecamatan Megamendung, Gunung Sindur dan Kecamatan Ciseeng.

Kondisi komoditas Hortikultura Kabupaten Bogor disajikan pada tabel 2.20.

Tabel 2.20

Komoditas Hortikultura Tahun 2018-2020

No	Komoditas	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
1	Jambu Biji	3.520	67.067	1.015	62.907	670	64.226
2	Pepaya	9.207	37.219	16.312	36.488	9.200	24.926
3	Rambutan	2.024	261.191	969	297.589	1.370	91.066
4	Manggis	2.383	96.038	1.936	66.938	1.851	47.022
5	Nanas	13.400	13.561	8.293	20.256	459	17.751
6	Tanaman Obat	353	11.354	251	10.447	391	9.186
7	Tanaman Hias Bunga (Tangkai)	92.086	5.356.319	66.277	5.259.022	133.426	3.902.493
8	Tanaman Hias Daun Indah (Pohon)	70.913	1.097.735	49.865	959.553	113.461	832.099

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2021

3) Perkebunan

Komoditas unggulan perkebunan yang dikelola masyarakat adalah : kopi, karet, pala dan cengkeh. Sentra komoditas unggulan kopi ada di Kecamatan Sukamakmur, Tanjungsari, Pamijahan, Cisarua, Cigombong, Babakan Madang, Megamendung dan Cariu. Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Tanaman karet yang memiliki tingkat pertumbuhan normal siap disadap pada umur 5 tahun dengan masa produksi selama 25-35 tahun. Sentra komoditas unggulan karet adalah Kecamatan Jasinga, wilayah pengembangannya terdapat di Kecamatan Tanjungsari. Sentra komoditas unggulan pala diarahkan di Kecamatan Sukajaya, sedangkan sebagai wilayah pengembangannya adalah Kecamatan Leuwisadeng, Caringin, Cigombong, Ciawi, Cijeruk dan Tamansari. Daging pala banyak digunakan sebagai bahan manisan pala baik kering maupun basah. Selain itu biji pala juga mempunyai potensi ekonomis sebagai rempah-rempah untuk obat dan bumbu dapur. Sentra komoditas unggulan cengkeh diarahkan di Kecamatan Nanggung dengan wilayah pengembangan di Kecamatan Pamijahan, Leuwiliang, Leuwisadeng, Cijeruk, Caringin, dan Cijeruk. Sentra komoditas cengkeh yaitu di Kecamatan Caringin, Cariu, Cigudeg, Cijeruk, Jasinga, Leuwiliang, Leuwisadeng, Nanggung dan Pamijahan.

Kondisi komoditas Perkebunan Kabupaten Bogor disajikan pada tabel 2.21.

Tabel 2.21
Komoditas Perkebunan Tahun 2018-2020

No	Komoditas	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
1	Kopi	6.226,96	3.735,94	6.417,70	3.854,20	7.197,15	4.476,75
2	Karet	939,81	109,08	698,78	86,49	638,41	145,55
3	Pala	1.774,46	490,50	1.829,72	507,73	1.729,11	524
4	Cengkeh	1.876,16	470,56	1.981,37	496,92	1.925,97	657,31

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2021

4) Perikanan

Budidaya perikanan air tawar baik untuk produksi ikan konsumsi, pembibitan maupun ikan hias mampu menjadi tumpuan pemenuhan kebutuhan akan ikan konsumsi, bibit ikan dan ikan hias di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2020 produksi ikan konsumsi sebanyak 118.712 ton dan benih ikan konsumsi sebanyak 5.713.107 RE, dengan komoditas unggulan ikan lele, ikan mas dan ikan gurame. Komoditas ikan lele terutama dikembangkan di Kawasan Minapolitan, meliputi Kecamatan Ciseeng, Parung, Gunung Sindur dan Kemang.

Komoditas ikan mas merupakan unggulan yang dikembangkan di Kecamatan Pamijahan, Cibungbulang dan Leuwiliang. Komoditas gurame merupakan unggulan yang dikembangkan di Dramaga dan Bojonggede, daerah potensial lainnya adalah Kecamatan Parung. Komoditas unggulan lainnya adalah ikan hias air tawar dengan produksi pada tahun 2020 sebesar 315.882,64 RE. Sentra komoditas unggulan ikan hias diarahkan di Kecamatan Cibinong, Ciseeng, dan Ciampea, dengan lokasi pengembangan di Kecamatan Parung.

5) Peternakan

Pada tahun 2020 produksi hasil peternakan sebanyak 354.694 ton, terdiri dari produksi daging sebanyak 189.322 ton, produksi telur sebanyak 144.052 ton, produksi susu sebanyak 20.108 ton. Komoditas unggulan usaha peternakan pada tahun 2020 antara lain sapi perah yang sentranya terletak di Kecamatan Cisarua dan Megamendung, dengan wilayah pengembangan di Kecamatan Pamijahan, Cibungbulang dan

Cijeruk. Pengembangan sapi perah saat ini sudah mampu melakukan diversifikasi produk, selain susu murni diantaranya keju, yoghurt, kefir, permen susu dan bahan makanan lainnya.

Komoditas peternakan lainnya yang dikembangkan sebagai komoditas unggulan tahun 2020 adalah sapi potong dengan populasi sebanyak 19.964 ekor. Sentra komoditas unggulannya terdapat di Kecamatan Jonggol dan Cariu, dengan daerah pengembangannya di Kecamatan Tanjungsari. Konsumsi protein hewani salah satunya didukung oleh produksi daging, susu dan produksi telur. Mengenai komoditas telur yang dominan didukung oleh produksi dari ayam ras petelur dengan populasi ayam ras petelur pada tahun 2020 sebanyak 8.891.302 ekor. Adapun produksi telur di Kabupaten Bogor sebesar 138.860.000 Kg.

6) Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor terpenting dalam pembangunan daerah. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha, penggerak kegiatan ekonomi, sumber pendapatan daerah, daya saing perkekonomian daerah serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kepentingan daerah serta kepentingan nasional.

Pembangunan kepariwisataan harus sesuai dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki, dibutuhkan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian yang terpadu dan terintegrasi dengan sektor pembangunan lainnya yang dilakukan secara terencana dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, Kabupaten Bogor masuk dalam perencanaan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Bogor-Halimun dan sekitarnya dengan 2 (dua) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu KSPN Gunung Gede-Pangrango dan KSPN Gunung Halimun Salak, serta 2 (dua) Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN), yaitu KPPN Bogor-Ciawi dan KPPN Alam Perkotaan Bogor-Depok. Dalam konteks perencanaan Provinsi Jawa Barat sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025, Kabupaten Bogor masuk dalam perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Ekowisata Alam Puncak dan sekitarnya, serta 2 (dua) Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP), yaitu KPPP alam perkotaan Bogor Depok dan sekitarnya, serta KPPP Ekowisata Gunung Halimun Salak-Gede Pangrango dan sekitarnya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bogor Tahun 2020-2025, menetapkan strategi pembangunan perwilayahan pariwisata daerah menjadi 4 (empat) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) dan 3 (tiga) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD), yaitu :

1) KSPD Puncak-Lido dan sekitarnya, dengan cakupan wilayah Kecamatan Ciawi, Megamendung, Cisarua, Caringin, Cijeruk, Cigombong, Taman Sari dan Ciomas, bertema utama wisata alam pegunungan dan rekreasi olahraga serta tema pendukung MICE, budaya dan kuliner;
2) KSPD Halimun-Salak dan sekitarnya, dengan cakupan wilayah Kecamatan Tenjolaya, Leuwiliang, Leuwisadeng, Nanggung, Pamijahan, Sukajaya, Jasinga, bertema utama alam, budaya dan geopark serta tema pendukung edukasi;
3) KSPD Sentul-Cibinong dan sekitarnya, dengan cakupan wilayah Kecamatan Babakan Madang, Sukaraja, Citeureup, Cibinong dan Bojonggede bertema utama wisata olahraga (*Sport*) dan MICE serta tema pendukung rekreasi dan perkotaan;

4) KSPD Sukamakmur-Cariu dan sekitarnya, dengan cakupan wilayah Kecamatan Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari bertema utama wisata alam dan agrowisata, serta tema pendukung wisata minat khusus;
5) KPPD Cileungsi-Jonggol dan sekitarnya, dengan cakupan wilayah Kecamatan Gunung Putri, Cileungsi, Klapanunggal, Jonggol bertema utama perkotaan-rekreasi alam serta tema pendukung wisata religi dan budaya;
6) KPPD Ciseeng-Kemang dan sekitarnya, dengan cakupan wilayah Kecamatan Gunung Sindur, Parung, Ciseeng, Tajur Halang, Kemang, Rancabungur bertema utama minawisata serta tema pendukung perkotaan dan rekreasi;
7) KPPD Dramaga-Cigudeg dan sekitarnya, dengan cakupan wilayah Kecamatan Dramaga, Cigudeg, Ciampea, Cibungbulang, Rumpin, Tenjo, Parung Panjang bertema utama perkotaan dan rekreasi serta tema pendukung geopark.

Pada tabel di bawah ini menyajikan informasi tentang perkembangan pariwisata di Kabupaten Bogor dengan menggambarkan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke potensi wisata di Kabupaten Bogor pada tahun 2019 dan 2020. Dalam data berikut dapat terlihat terjadinya perbedaan yang sangat besar terhadap jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bogor antara tahun 2019 dan 2020 pada saat pandemi Covid-19 mulai melanda dunia yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Bogor. Selain itu khusus untuk hotel tahun 2019 tingkat okupansi mencapai sekitar 4.585.595, sementara pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 55 persen.

Tabel 2.22
Kondisi Pariwisata Kabupaten Bogor Berdasarkan Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2019-2020

NO	URAIAN	Kunjungan Wisatawan	
		2019	2020
1	Daya Tarik Wisata	5.134.990	2.226.767
2	Akomodasi Wisata dan Jumlah Kunjungan	4.585.595	4.476.466
3	Kunjungan Restoran dan Rumah Makan	N/A	2.242.312

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, tahun 2020

7) Pengembangan Geopark

Geopark merupakan konsep pengembangan kawasan yang sederhana dan relatif mudah, murah, fleksibel & efektif dalam melestarikan dan melindungi warisan bumi yang sekaligus dapat menyejahterakan rakyat. Sejak Tahun 2015 Konsep Geopark sudah menjadi program *Unesco*, melalui Jejaring Internasional *Unesco Global Geopark*. Dalam membangun Geopark suatu kawasan memiliki unsur-unsur geologi terkemuka, di dalamnya termasuk mempunyai nilai arkeologi, ekologi dan budaya, pada pengelolaannya masyarakat lokal dan otoritas setempat bekerja sama melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang dikaruniai kekhasan secara geografis. Terdapat 4 gunung yang mengelilingi Kabupaten Bogor yaitu Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Salak dan Gunung Halimun. Selain itu, Kabupaten Bogor berada tidak jauh dari Ibu Kota Negara Republik Indonesia DKI Jakarta. Berdasarkan posisi geografis ini Kabupaten Bogor mempunyai fungsi penting secara regional yaitu : (a) Merupakan salah satu kantung permukiman penduduk Jabodetabek (15 persen penduduk tinggal di Kabupaten Bogor); (b) Penyediaan lahan pertanian sebagai upaya menjaga ketahanan pangan (39 ribu Ha lahan pertanian) dan (c) Perlindungan tata air untuk wilayah sekitarnya.

Hal ini tentunya berdampak pada konsep pengembangan wilayah di Kabupaten Bogor, pada satu sisi terjadi tarik menarik kepentingan pemanfaat wilayah untuk kebutuhan meningkatkan pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat di sisi lain ada kewajiban mempertahankan fungsi kawasan sebagai kawasan perlindungan tata air yang berarti terbatasnya ruang untuk berusaha. Konsep geopark diharapkan dapat menjawab berbagai rencana pengembangan kawasan yang dapat me-*generate* pendapatan daerah tanpa harus kehilangan fungsi perlindungan tata air.

Potensi *geo diversity, bio diversity* dan *cultural diversity* yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor yang dapat dijadikan calon pengembangan kawasan geopark tersaji pada tabel 2.23.

Tabel 2.23
Sebaran Geosite pada Kawasan Pengembangan Geopark di Kabupaten Bogor

NO	KECAMATAN	LUAS (Ha)	GEOSITE		
			GEO HERITAGE	BIO HERITAGE	CULTURAL HERITAGE
1	CIAMPEA	3.304,42	Gunung Kapur Ciampea	-	Kampung wisata Cinangneng
					Kampung Wisata Rumah Joglo
					Cakrawala Nuansa Nirwana
2	JASINGA	14.340,74	Curug Idas	Panorama Pabangbon	Situs Garisul (makam raja-raja Islam)
			Setu Kadongdong	KK Dungus Iwul	Makam Mbah Muhyidin
			Curug Bandung Pangradin	KK Yan Lapa	Situs Mbah Sohib
			Setu Jantungeun	KDHTK Haur Bentes	Situs Gedong Sawah, ds Pamegarsari
			Curug Perang Jugalayaja	Perkebunan Sawit	-
			Sungan Cidurian	Perkebunan Karet	-
3	LEUWILIANG	9.103,30	Curug Lontar	Bukit Bintang	Trek Motorcross
			Curug Cipuraseda	Perkebunan Manggis Rakyat	Situs PLTA Karacak
			Curug Cikoneng/ Muara Tilu	PTPN VIII Cianten	Arung Jeram Cianten
			Curug Lontar	Camping Ground Cianten	Situs Waduk Gunung Bubut
			Curug Cicandra	-	Situs Bendung Cianten
			Curug Cibeureum	-	-
			Air Panas Cipanas	-	-
4	LEUWISADENG	3.539,12	Kawasan Gunung Api Purba	Perkebunan Manggis	Situs Moseleum Van Motman
5	NANGGUNG	16.369,12	Eks Pertambangan bawah tanah Antam	Taman Nasional Gunung Halimun Salak (Pengamatan elang, Pengamatan Oa, Habitat Anggrek Raksasa, Hutan Hujan Tropis, Aneka fauna)	Pendopo Bupati

NO	KECAMATAN	LUAS (Ha)	GEOSITE		
			GEO HERITAGE	BIO HERITAGE	CULTURAL HERITAGE
			Curug Sawer	Perkebunan The Nirmala (Sinas Mas)	Situs Pasir Jambu
			Leuwi Bongbang	Nirmala Rose	Situs Kramat Mbah Kudung
			Setu Nirmala	Agromedika	Situs Kramat Mbah Langgar
			Curug Macan	Persawahan dengan terasering	Kampung Malasari
			-	-	Kampung Malani (Pencak silat, Pertanian)
			-	-	Desa Wisata Malasari
6	PAMIJAHAN	12.486,01	Pemandiaan Air Panas GSE, Kp Ciparay	Wana Wisata Buper Gunung Bunder	Desa Wisata Ciasihan
			Curug Cigamea, Kp Rawa Bogo ds Gunung Sari	Wisata Alam Mustika Manik	Desa Wisata Gunungsari
			Curug Seribu, Kp Rawa lega ds Gunungsari	Wisata Alam Ranggon Hills	Situs Pancuran Tujuh
			Curug Ngumpet, Kp Cimudal ds Gunungsari	-	Situs Kuta Gegelang
			Ekowisata Kawah Ratu	-	Tugu Eyang Cakrabuana
			Curug Batu ampar	-	Desa Wisata Ciasmara
			Curug Ciparay	-	-
			Curug Batu Kursi	-	-
			Curug Saderi	-	-
			Curug Cihurang	-	-
			Curug Pangeran	-	-
			Curug Gua Lumut	-	-
			Sumber air panas Cipanas Karang	-	-
			Gunung Menir	-	-
7	TENJO	8.321,53	-	-	DW Dodol
8	TENJOLAYA	3.681,50	Curug Ciampea (*Green Lagoon*)	Wisata Edukasi dan Konservasi Tanaman Obat Lokal	Aldepos
			Curug Segitiga	-	Desa Wisata Tapos 1
			Curug Dua	-	Desa Wisata Gunung Malang
			Curug Gendang	-	Kawasan Situs Cibalay (Situs Endong Kasang,

NO	KECAMATAN	LUAS (Ha)	GEOSITE		
			GEO HERITAGE	BIO HERITAGE	CULTURAL HERITAGE
					Balai Kambang, Kebon Kopi, Jami Piciing, Batu Bergores, Cipangantehan, Pasir Manggis dan Arca Domas)
			Curug Goong	-	-
			Curug Sawer	-	-
			Curug Cipeteuy	-	-
9	TAMANSARI	3.885,69	Curug Luhur	Rumah Ulat Sutra	Kampung Budaya Sindang Barang
			Curug Nangka	Taman Kupu-kupu	Pura Jagatkarta
			-	Tanaman Hias	Viara SNI
			-	-	Desa Wisata Tamansari
			-	-	Desa Wisata Pasir Eurih
			-	-	Desa Wisata Sukajadi
			-	-	Highland Park Resort
			-	-	Situs Pasir Kramat Calobak
			-	-	Situs Batu Tapak
10	SUKAJAYA	16.090,48	Kampung Teletubies, kiarapandak	Perkebunan Kelapa Sawit	Kampung Adat Urug, desa kiara pandak
			Curug Ciaspa, kiarapandak	Pemandangan Persawahan	Batu Tapak, kiara pandak
			Curug Kembang, Pasirmadang	Pemandangan Sungai Cibadak	Desa Wisata Kiara Sari
			-	-	Pembuatan Gula Kawung
			-	-	Pembuatan Sapu Awis
11	RUMPIN	13.696,17	-	Gunung Munara	Desa Wisata Gobang
			-	-	Kampung Rol Panongan
12	CISEENG	4.129,07	=	Minapolitan	Desa wisata Ciseeng
13	CUGUDEG	17.771,23	Goa Gudawang	Pemandangan Persawahan	Situs Batu Tapak tenjoleat
			Curug Rahong	Pemandangan Perkebunan Sawit, ds cigudeg	Batu Dakon Sumur Tujuh
			Curug Sigeulis, ds wargajaya	Pemandangan Perkebunan Karet, Ds cigudeg	Batu Tapak
			Kawasan pertambangan (karst)	-	DPW Cipining Angklung Gubrag
			Setu Cinyiru	-	-

NO	KECAMATAN	LUAS (Ha)	GEOSITE		
			GEO HERITAGE	BIO HERITAGE	CULTURAL HERITAGE
			Danau Quarry	-	-
14	CIBUNGBULANG	3.845,42	Curug Lembah Pelangi	-	Taman Air Gunung Handeleum
			-	-	Prasasti Ciaruteun
			-	-	Situs Museum Pasir Angin
15	PARUNG		Pemandian Air Panas Tirta Sanita	-	-

Sumber : Dokumen Pengusulan Geopark Pongkor, 2018

Didasarkan pada semangat yang tinggi dari berbagai pihak, Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan langkah strategis untuk menghadirkan konsep geopark di Kabupaten Bogor dengan menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 556/177/Kpts/PerUU/2018 tentang Penetapan Kawasan Geopark Pongkor pada tanggal 26 Maret 2018. Setelah melalui berbagai penilaian persyaratan, pada tanggal 30 November 2018 Geopark Pongkor ditetapkan sebagai Geopark Nasional bersama dengan 8 (delapan) kawasan Geopark Nasional lainnya, yaitu Geopark Silokek, Geopark Sianok, Geopark Maninjau dan Sawahlunto di Sumatera Barat, Geopark Natuna di Kepulauan Riau, Geopark Pongkor di Jawa Barat, Geopark Karangsambung dan Geopark Karangbolong di Jawa Tengah, Geopark Banyuwangi di Jawa Timur dan Geopark Meratus di Kalimantan Selatan. Target berikutnya dari Geopark Pongkor adalah mendapatkan sertifikat *Unesco Global Geopark (UGG),* menyusul empat geopark lain yang sudah lebih dulu berstatus UGG, yaitu Geopark Gunung Batur, Geopark Gunung Sewu, Geopark Ciletuh dan Geopark Gunung Rinjani.

8) Pengembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bogor

Koperasi aktif dan berkualitas adalah koperasi yang memiliki Badan Hukum (Kelembagaan), beraktivitas dan melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun. Pada Tahun 2020, jumlah Koperasi yang tercatat dalam ODS (*online data system*) sebanyak 1.707 koperasi, yang terdiri dari 605 koperasi aktif (35,44 persen) dan 1.102 koperasi tidak aktif (64,56 persen). Koperasi tidak aktif merupakan Koperasi yang sudah berbadan hukum, tetapi tidak ada aktivitas dan jumlah anggota tidak tercatat dalam ODS.

Dari data Koperasi aktif tersebut, tercatat hanya 67 unit atau 11,07 persen yang telah diketahui daftar jumlah anggota koperasinya, yaitu 60.154 orang anggota koperasi, sementara sisanya sebanyak 538 koperasi atau 88,93 persen, belum diketahui jumlah anggota koperasinya dalam ODS. Pada Tahun 2020, jumlah Koperasi Simpan Pinjam sebanyak 231 koperasi dan hanya dua koperasi yang memiliki kantor cabang.

Jumlah modal sendiri koperasi di Kabupaten Bogor tercatat sebesar Rp 161.263.738.719,00, sedangkan modal luar Koperasi sebesar Rp 53.799.101.493,00 dari volume usaha koperasi sebesar Rp 382.319.708.190,00 yang kemudian memberikan sisa hasil usaha koperasi sebesar Rp 12.480.983.388,00. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa besar nilai kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bogor adalah 0,16 persen. Kemudian sisa hasil usaha koperasi selama satu tahun memberikan keuntungan bagi anggota rata-rata sebesar Rp 207.483,85.

Tabel 2.24
Kondisi Koperasi di Kabupaten Bogor Tahun 2020

No.	Kondisi Koperasi	Jumlah
1	Jumlah Koperasi	1.707
2	Jumlah Koperasi Aktif	605
3	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	1.102
4	Jumlah Koperasi Baru	53
5	Jumlah Manager	24
6	Jumlah Anggota	60.154
7	Jumlah Karyawan	430
8	Jumlah Modal Sendiri	161.263.738.719
9	Jumlah Modal Luar	53.799.101.493
10	Jumlah Volume Usaha	382.319.708.190
11	Jumlah SHU	12.480.983.388

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2020

Adapun perkembangan koperasi di Kabupaten Bogor selama periode tahun 2013-2020 disajikan melalui tabel 2.25.

Tabel 2.25
Perkembangan Koperasi di Kabupaten Bogor
Periode Tahun 2013-2020

No.	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nanggung	18	18	17	18	16	18	16	22
2	Leuwiliang	48	50	52	51	52	47	52	51

No.	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	Leuwisadeng	16	16	16	16	16	11	16	11
4	Pamijahan	27	28	27	29	29	23	29	33
5	Cibungbulang	44	44	41	41	41	43	41	46
6	Ciampea	75	18	73	75	75	70	75	82
7	Tenjolaya	18	75	18	18	17	13	17	20
8	Dramaga	44	46	45	46	46	35	46	38
9	Ciomas	60	19	16	62	16	56	16	63
10	Taman Sari	18	23	20	20	20	20	20	23
11	Cijeruk	18	6	3	21	3	21	3	25
12	Cigombong	38	19	20	38	20	39	20	40
13	Caringin	55	16	16	60	16	51	16	53
14	Ciawi	64	37	41	67	38	61	38	63
15	Cisarua	66	62	62	68	64	65	64	73
16	Megamendung	50	19	20	53	20	41	20	45
17	Sukaraja	51	20	21	51	21	56	21	56
18	Babakan Madang	20	38	38	23	38	15	38	20
19	Sukamakmur	12	57	60	14	60	9	60	11
20	Cariu	13	65	67	13	68	11	68	12
21	Tanjungsari	13	67	68	11	68	9	68	11
22	Jonggol	35	50	51	36	53	27	53	34
23	Cileungsi	94	53	52	95	52	80	52	84
24	Klapanunggal	26	21	23	30	26	16	26	22
25	Gunung Putri	88	16	15	94	12	88	12	93
26	Citeureup	87	13	14	94	13	86	13	93
27	Cibinong	217	13	11	210	10	179	10	193
28	Bojonggede	53	34	36	54	37	52	37	59
29	Tajurhalang	22	95	94	24	93	29	93	30
30	Kemang	53	30	29	52	31	49	31	55
31	Rancabungur	9	90	90	10	100	10	100	13
32	Parung	50	88	92	51	90	43	90	45
33	Ciseeng	22	208	212	22	211	24	211	26
34	Gunung Sindur	28	55	54	28	56	26	56	27
35	Rumpin	19	24	23	16	24	21	24	22
36	Cigudeg	22	53	52	20	53	20	53	21
37	Sukajaya	6	9	11	4	10	7	10	11
38	Jasinga	20	50	51	20	51	23	51	23
39	Tenjo	16	21	22	16	20	18	20	20
40	Parung Panjang	37	29	27	38	25	35	25	38
Binaan Provinsi							3		
Binaan Nasional							13		
TOTAL		**1.672**	**1.695**	**1.700**	**1.709**	**1.711**	**1.563**	**1.711**	**1.707**

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2020

Adapun perkembangan koperasi aktif dan tidak aktif pada tahun 2020 disajikan melalui tabel 2.26.

Tabel 2.26
Perkembangan Koperasi Aktif dan Tidak Aktif
di Kabupaten Bogor Tahun 2020

No.	Kecamatan	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	Nanggung	8	14	22
2	Leuwiliang	17	34	51
3	Leuwisadeng	6	5	11
4	Pamijahan	18	15	33
5	Cibungbulang	14	32	46
6	Ciampea	35	47	82
7	Tenjolaya	11	9	20
8	Dramaga	14	24	38
9	Ciomas	17	46	63
10	Tamansari	5	18	23
11	Cijeruk	6	19	25
12	Cigombong	6	34	40
13	Caringin	6	47	53
14	Ciawi	16	47	63
15	Cisarua	14	59	73
16	Megamendung	6	39	45
17	Sukaraja	13	43	56
18	Babakan Madang	12	8	20
19	Sukamakmur	3	8	11
20	Cariu	7	5	12
21	Tanjungsari	6	5	11
22	Jonggol	17	17	34
23	Cileungsi	31	53	84
24	Klapanunggal	18	4	22
25	Gunungputri	37	56	93
26	Citeureup	41	52	93
27	Cibinong	92	101	193
28	Bojonggede	17	42	59
29	Tajurhalang	6	24	30
30	Kemang	31	24	55
31	Rancabungur	10	3	13
32	Parung	12	33	45
33	Ciseeng	3	23	26
34	Gunungsindur	5	22	27
35	Rumpin	5	17	22
36	Cigudeg	11	10	21
37	Sukajaya	4	7	11
38	Jasinga	8	15	23
39	Tenjo	5	15	20
40	Parungpanjang	12	26	38
KABUPATEN BOGOR		**605**	**1.102**	**1.707**

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2020

Berdasarkan data BPS Tahun 2019, jumlah usaha mikro sebanyak 718.337 unit. Namun dari total data tersebut, yang telah terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor hanya sebanyak 329.379 unit pada tahun 2020. Data tersebut secara tidak langsung dapat menggambarkan jumlah usaha mikro yang terdampak akibat pandemi Covid-19 yaitu sebesar 45,85 persen.

Selanjutnya, pada tahun 2020 telah disalurkan bantuan kepada usaha mikro yang terdampak Covid-19 terdiri dari :

a) Bantuan Sosial dari Bupati Bogor terealisasi untuk 1.966 usaha mikro, sebesar Rp 5.000.000,00 per UMKM dengan anggaran total sebesar Rp 9.830.000.000,00.

b) Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia terealisasi untuk 62.329 usaha mikro, sebesar Rp 2.400.000,00 per UMKM dengan anggaran total sebesar Rp 149.589.600.000,00

Jika diakumulasikan, bantuan yang telah disalurkan untuk usaha mikro yang terdampak Covid-19 sebanyak 64.295 usaha mikro, atau sebesar 20 persen dari jumlah usaha mikro terdampak Covid-19 yang terdata, dengan total anggaran sebesar Rp 159.419.600.000,00.

Selain itu, Pemerintah dengan berbagai kebijakannya selalu mendorong usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk terus berkembang dan berkesinambungan. UMKM ini terkonsentrasi pada sektor perdagangan, pangan, olahan pangan, tekstil dan garmen, kayu dan produk kayu, serta produksi mineral non-logam. Kontribusi sektor UMKM dalam PDRB Kabupaten Bogor pada 2018 yaitu sebesar 28,45 persen. Sektor usaha UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia khususnya Kabupaten Bogor, karena dengan sektor ini menyerap banyak tenaga kerja, sehingga dengan majunya sektor usaha UMKM akan dapat mengurangi angka pengangguran. Sejalan dengan langkah pemerintah untuk lebih memberdayakan ekonomi rakyat, keterlibatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam proses pembangunan ekonomi perlu dicermati, mengingat tingkat produktivitas UMKM harus terus dikembangkan disamping usaha besar. Tantangan persaingan yang ketat dalam hal mutu/kualitas maupun jumlah produksi UMKM dibanding dengan barang-barang lain termasuk produk impor/luar Kabupaten Bogor, masih menjadi prioritas dalam memperluas akses pasar di dalam maupun di luar negeri.

Pada tahun 2018 peranan UMKM dalam PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Bogor diprediksi mencapai Rp 63,03 triliun atau berkontribusi sebesar 28,45 persen dari total PDRB Kabupaten Bogor yang

terdiri atas usaha mikro sebesar Rp 17,09 triliun (7,72 persen), usaha kecil sebesar Rp 20,77 triliun (9,38 persen) dan menengah sebesar Rp 25,16 triliun (11,36 persen).

Untuk mendukung PDRB, Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bogor telah melakukan kegiatan fasilitasi bagi para pelaku UMKM dengan memberikan dukungan berupa sewa toko dan sarana penunjangnya, dan saat ini telah memfasilitasi sebanyak 32 E Tals (32 Kecamatan). Disamping itu pula Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bogor telah memfasilitasi kemitraan kepada para UMKM dengan pasar modern (Aeon, PT. Indomarco, PT. Sumber Alfaria dan Ikea). Untuk mendukung sektor pariwisata, Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bogor telah memberikan pula dukungan kepada para pelaku UMKM berupa *Booth Stand* sebanyak 161 unit di 27 lokasi objek wisata yang tersebar di 10 kecamatan (Cisarua, Babakan Madang, Sukamakmur, Tanjungsari, Leuwiliang, Parung Panjang, Nanggung, Cigombong, Sukajaya dan Tamansari) dalam wilayah Kabupaten Bogor.

Tabel 2.27
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bogor Menurut Lapangan Usaha dan Skala Usaha Tahun 2019 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha		Mikro	Kecil	Menengah	Besar	Jumlah	UMKM
I	**SEKTOR PRIMER**	4.271.431	3.751.211	3.807.718	6.059.350	17.889.709	11.830.359
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.075.856	3.255.229	2.961.525	2.058.122	12.350.732	10.292.610
B	Pertambangan dan Penggalian	195.574	495.982	846.193	4.001.228	5.538.977	1.537.749
II	**SEKTOR SEKUNDER**	3.669.516	8.777.980	15.945.909	126.023.179	154.416.584	28.393.404
C	Industri Pengolahan	3.125.459	4.944.739	10.682.527	109.369.491	128.122.216	18.752.725
D	Pengadaan Listrik dan Gas	515	8.194	11.068	348.218	367.995	19.777
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	267	7.932	24.911	246.440	279.550	33.110
F	Konstruksi	543.275	3.817.115	5.227.403	16.059.030	25.646.823	9.587.793
III	**SEKTOR TERSIER**	10.331.687	10.732.552	8.238.623	38.844.337	68.147.199	29.302.862
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.465.699	3.399.321	4.829.947	18.787.635	30.482.601	11.694.966

Lapangan Usaha		Mikro	Kecil	Menengah	Besar	Jumlah	UMKM
H	Transportasi dan Pergudangan	3.977.917	2.879.816	699.831	1.790.127	9.347.691	7.557.564
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	736.372	637.252	1.024.640	4.211.694	6.609.959	2.398.265
J	Informasi dan Komunikasi	1.669.385	1.365.933	311.502	926.024	4.272.843	3.346.820
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	18.904	26.535	50.907	1.204.062	1.300.408	96.346
L	Real Estate	176.417	170.490	83.777	1.592.092	2.022.776	430.684
M,N	Jasa Perusahaan	7.262	9.154	18.545	431.909	466.870	34.961
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	40.149	468.085	232.206	2.785.570	3.526.011	740.441
P	Jasa Pendidikan	73.902	901.088	501.284	3.222.768	4.699.042	1.476.274
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	27.533	102.772	85.244	997.278	1.212.828	215.550
R,S, T,U	Jasa lainnya	138.147	772.106	400.740	2.895.177	4.206.170	1.310.993
Produk Domestik Regional Bruto		**18.272.633**	**23.261.742**	**27.992.249**	**170.926.866**	**240.453.492**	**69.526.625**
Persentase		**7,60**	**9,67**	**11,64**	**71,09**	**100,00**	**28,91**

Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019

Dari total 69,526 triliun kontribusi UMKM terhadap PDRB Kabupaten Bogor, sebesar Rp 11,830 triliun merupakan kontribusi dari sektor primer, Rp 28,393 triliun dari sektor sekunder, dan Rp 29,302 triliun dari sektor tersier. Dengan demikian, berdasarkan persentasenya, peran UMKM sektor tersier memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 42,15 persen dari total PDRB UMKM.

Banyaknya jumlah UMKM menuntut pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan peluang ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka pengangguran sekaligus sebagai upaya peningkatan roda pembangunan ekonomi.

Tabel 2.28
Jumlah Unit Usaha Menurut Skala Usaha dan Lapangan Usaha Tahun 2019

Lapangan Usaha		Mikro 2019	Kecil 2019	Menengah 2019	Besar 2019	Jumlah 2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	132.835	1.961	193	11	135.000

Lapangan Usaha		Mikro 2019	Kecil 2019	Menengah 2019	Besar 2019	Jumlah 2019
B	Pertambangan dan Penggalian	830	50	9	54	943
C	Industri Pengolahan	24.251	3.580	1.615	308	29.754
D	Pengadaan Listrik dan Gas	189	77	8	10	284
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	673	79	45	5	802
F	Konstruksi	18.777	2.913	1.331	152	23.173
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	137.502	10.059	1.081	206	148.848
H	Transportasi dan Pergudangan	61.759	3.338	40	14	65.151
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	61.431	3.029	651	81	65.192
J	Informasi dan Komunikasi	232.466	12.312	330	8	245.116
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.068	172	70	68	1.378
L	Real Estate	14.674	1.596	252	93	16.615
M,N	Jasa Perusahaan	3.363	553	195	209	4.320
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.665	1.006	108	12	8.791
P	Jasa Pendidikan	5.241	660	172	57	6.130
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.347	186	20	19	1.572
R,S,T,U	Jasa lainnya	14.266	1.722	117	56	16.161
Produk Domestik Regional Bruto		**718.337**	**43.293**	**6.237**	**1.363**	**769.230**

Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036, sebagaimana terlihat dalam gambar peta bahwa Sebaran Zonasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Zonasi Industri Kecil tersebar pada Zonasi Peruntukan Ruang Perdesaan (PD) dan Peruntukan Ruang Perkotaan (PP) sebagai berikut :

Sumber : RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036

Gambar 2.21
Sebaran Zonasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Zonasi Industri Kecil

Berdasarkan dokumen pengembangan komoditas UMK unggulan Kecamatan Tahun 2014 dan 2015, bahwa rencana pengembangan UMK unggulan dengan 1). Meningkatkan pengembangan produk UMK, 2). Meningkatkan SDM dan kelembagaan, 3). Meningkatkan pemasaran dan kemitraan dan 4). Meningkatkan sarana dan prasarana UMK.

Tabel 2.29
Pembagian Kluster Komoditas Unggulan Sekunder UMK Unggulan

No.	Kecamatan	Kluster Komoditas Unggulan Sekunder (UMK)
1	Pamijahan, Tenjolaya, Ciawi, Cisarua, Sukaraja, Megamendung, Cigombong, Cigudeg, Tajurhalang, Tenjo, Rumpin, Gunung Sindur, Jonggol, Cariu, Parung, Parung Panjang, Rancabungur.	Aneka Makanan
2	Bojonggede, Cibinong, Dramaga, Cileungsi, Sukamakmur, Babakan Madang	Aneka Minuman
3	Caringin, Cijeruk, Kemang, Ciomas dan Tamansari, Cibungbulang	Alas Kaki
4	Klapanunggal	Kerajinan/Boneka
5	Gunung Putri	Kerajinan/Sangkar Burung
6	Ciampea	Kerajinan/Tas
7	Citeureup	Kerajinan/Logam
8	Jasinga, Tanjungsari	Kerajinan/Kayu
9	Ciseeng, Nanggung	Kerajinan/Logam
10	Sukajaya	Konveksi
11	Leuwisadeng dan Leuwiliang	Bata Merah

Sumber : Dokumen Pengembangan Komoditas UMK Unggulan Kecamatan, Bappeda Tahun 2014 dan 2015

9) Pengembangan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang ikut menyumbang pendapatan atau nilai tambah yang cukup besar terhadap PDRB. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (*output*) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto disini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan

menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

Sarana perdagangan terbagi ke dalam 11 kategori jenis usaha yang menyumbang pendapatan atau nilai tambah yang cukup besar terhadap PDRB. Sampai dengan tahun 2020 telah terbangun beragam sarana perdagangan sebagai berikut :

Tabel 2.30
Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Bogor sampai dengan Tahun 2020

No	Jenis Sarana Perdagangan	Jumlah	Satuan
1	Pasar Tradisional	29	Pasar
2	Pasar Desa	48	Pasar
3	Pusat Perbelanjaan	7	Unit
4	Supermarket	15	Unit
5	Minimarket	988	Unit
6	Agen LPG	70	Agen
7	Pertokoan/Ruko	450	Unit
8	SPBE	19	Unit
9	Kios Distributor Pupuk	10	Unit
10	Pengecer Pupuk	152	Unit
11	SPBU	118	Unit

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2020

Peranan pasar tradisional dan pasar desa dalam mendukung pencapaian PDRB sangat berpengaruh. Demi mendorong gerakan bela beli produk UMKM/IKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai *leading sector* pembangunan pasar mendorong masyarakat untuk berbelanja di pasar. Sampai tahun 2020 telah terbangun 29 unit pasar tradisional di 28 Kecamatan serta 48 unit pasar desa di 27 kecamatan di Kabupaten Bogor.

Tabel 2.31
Rekapitulasi Sarana Perdagangan Pasar Tradisional di Kabupaten Bogor

NO.	URAIAN	LUAS BANGUNAN	LUAS TANAH
1	Pasar Cibinong (Kelurahan Cirimekar)	80,150 m²	10,423 m²
2	Pasar Cileungsi (Desa Cileungsi Kidul)	21,300 m²	29,025 m²
3	Pasar Citeureup I (Desa Citeureup)	10,000 m²	17,000 m²
4	Pasar Citeureup II (Desa Citeureup)	4,760 m²	9,472 m²
5	Pasar Cariu (Desa Cariu)	5,845 m²	11,520 m²
6	Pasar Cisarua (Desa Citeko)	8,000 m²	12,000 m²

NO.	URAIAN	LUAS BANGUNAN	LUAS TANAH
7	Pasar Parungpanjang (Desa Parungpanjang)	10,004 m²	16,038 m²
8	Pasar Leuwiliang (Desa Leuwiliang)	11,466 m²	21,714 m²
9	Pasar Ciomas (Desa Laladon)	998 m²	8,300 m²
10	Pasar Ciawi (Desa Ciawi)	810 m²	1,050 m²
11	Pasar Jasinga (Desa Sipak)	6,728 m²	18,000 m²
12	Pasar Ciampea (Desa Ciampea)	-	6,000 m²
13	Pasar Parung (Desa Waru)	43,677 m²	48,525 m²
14	Pasar Sukaraja (Desa Cijujung)	1,800 m²	4,200 m²
15	Pasar Cigombong (Desa Cigombong)	2,000 m²	4,821 m²
16	Pasar Rumpin (Desa Cicangkal)	7,000 m²	10,918 m²
17	Pasar Bojong Gede (Desa Pabuaran)	3,705 m²	5,500 m²
18	Pasar Cigudeg (Desa Cicopong)	4,025 m²	7,472 m²
19	Pasar Ciseeng (Desa Parigi Mekar)	1,367 m²	8,050 m²
20	Pasar Gunung Sindur (Desa Gunung Sindur)	3,500 m²	4,000 m²
21	Pasar Caringin (Desa Ciderum)	2,200 m²	4,180 m²
22	Pasar Pamijahan (Desa Cimayang)	3,705 m²	5,500 m²
23	Pasar Nanggung (Desa Nanggung)	1,500 m²	5,562 m²
24	Pasar Kemang (Desa Kemang)	1,500 m²	3,000 m²
25	Pasar Leuwisadeng (Desa Leuwisadeng)	1,500 m²	3,000 m²
26	Pasar Tenjo (Desa Tenjo)	1,800 m²	4,429 m²
27	Pasar Cijeruk (Desa Cipelang)	620 m²	5,438 m²
28	Pasar Babakanmadang (Desa Sumurbatu)	765 m²	3,000 m²
29	Pasar Tamansari (Desa Sirnagalih)	620 m²	2,978 m²

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2020

Tabel 2.32
Rekapitulasi Sarana Perdagangan Pasar Desa di Kabupaten Bogor

NO.	NAMA PASAR	DESA	KECAMATAN	LUAS TANAH (m²)
1	Pasar Bojonggede	Bojong	Bojonggede	1.400
2	Pasar Cimanggis	Cimanggis	Bojonggede	-
3	Pasar Ciomas	Ciomas	Ciomas	1.200
4	Pasar Sabtu	Situ Udik	Cibungbulang	1.000
5	Pasar Desa Mampir	Mampir	Cileungsi	1.450
6	Pasar Gandoang	Gandoang	Cileungsi	1.400
7	Pasar Tajur	Tajur	Citeureup	800
8	Pasar Sabtu	Sirnarasa	Tanjungsari	900
9	Pasar Minggu	Selawangi	Tanjungsari	5.000

NO.	NAMA PASAR	DESA	KECAMATAN	LUAS TANAH (m²)
10	Pasar Pamipirin	Tanjungrasa	Tanjungsari	7.000
11	Pasar Rebo	Pasir Tanjung	Tanjungsari	1.650
12	Pasar Caringin	Caringin	Caringin	1.700
13	Pasar Rengasjajar	Rengasjajar	Cigudeg	3.500
14	Pasar Tegalega	Tegalega	Cigudeg	-
15	Pasar Selasa	Ciampea Udik	Ciampea	3.500
16	Pasar Dramaga	Dramaga	Dramaga	1.000
17	Pasar Bojongkulur	Bojongkulur	Gunung Putri	2.950
18	Pasar Wanaherang	Wanaherang	Gunung Putri	2.000
19	Pasar Sukanegara	Sukanegara	Jonggol	4.100
20	Pasar Singasari	Singasari	Jonggol	-
21	Pasar Curug	Curug	Jasinga	500
22	Pasar Bagoang	Bagoang	Jasinga	-
23	Pasar Koleang	Koleang	Jasinga	5.000
24	Pasar Nambo	Nambo	Klapanunggal	700
25	Pasar Cikahuripan	Cikahuripan	Klapanunggal	2.150
26	Pasar Puraseda	Puraseda	Leuwiliang	730
27	Pasar Sadeng Kolot	Sadeng Kolot	Leuwiliang	2.000
28	Pasar Sukamanah	Sukamanah	Megamendung	1.324
29	Pasar Cipayung Girang	Cipayung Girang	Megamendung	3.000
30	Pasar Cibeber	Curug Bitung	Nanggung	8.600
31	Pasar Rebo	Bantar Karet	Nanggung	1.702
32	Pasar Gobang	Gobang	Rumpin	5.000
33	Pasar Kampung Sawah	Kampung Sawah	Rumpin	8.750,94
34	Pasar Bantarjaya	Bantarjaya	Rancabungur	-
35	Pasar Sukamakmur	Sukamakmur	Sukamakmur	3.815
36	Pasar Cikeas	Cikeas	Sukajaya	-
37	Pasar Pasir Madang	Pasir Madang	Sukajaya	2.800
38	Pasar Harkat Jaya	Harkat Jaya	Sukajaya	500
39	Pasar Sipayung	Sipayung	Sukajaya	-
40	Pasar Tajurhalang	Tajurhalang	Tajurhalang	-
41	Pasar Rebo	Bojong	Tenjo	1.000
42	Pasar Tenjo	Tenjo	Tenjo	4.520
43	Pasar Batok	Batok	Tenjo	5.000
44	Pasar Tenjolaya	Tapos 1	Tenjolaya	2.700
45	Pasar Cibitung Tengah	Cibitung Tengah	Tenjolaya	4.000
46	Pasar Ciasmara	Ciasmara	Pamijahan	981
47	Pasar Pamijahan	Pamijahan	Pamijahan	1.000
48	Pasar Jagabaya	Jagabaya	Parung Panjang	1.000

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2020

Dalam rangka menjaga keseimbangan pertumbuhan pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah maupun usaha besar dari perkembangan usaha bidang ritel serta mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh perorangan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan pedagang pasar tradisional dan warung kelontong, perlu dilakukan penghentian sementara izin usaha toko modern untuk usaha minimarket, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 63 tahun 2017 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Usaha Toko Modern untuk Minimarket yang meliputi wilayah 20 kecamatan. Sampai dengan tahun 2020, jumlah minimarket di Kabupaten Bogor adalah sebanyak 988 yang tersebar di 40 kecamatan. Dari jumlah tersebut, terdapat 3 kecamatan yang memiliki jumlah minimarket di atas 100 toko, yaitu Kecamatan Cibinong (112), Cileungsi (104) dan Gunung Putri (111), terdapat 8 kecamatan yang memiliki jumlah minimarket di atas 30 toko dan terdapat 20 kecamatan yang memiliki jumlah minimarket di bawah 10 toko.

Tabel 2.33
Data Minimarket di Kabupaten Bogor

NO.	KECAMATAN	JUMLAH MINIMARKET
1	Babakan Madang	34
2	Bojonggede	72
3	Caringin	21
4	Cariu	9
5	Ciampea	18
6	Ciawi	21
7	Cibinong	112
8	Cibungbulang	17
9	Cigombong	17
10	Cigudeg	14
11	Cijeruk	10
12	Cileungsi	104
13	Ciomas	36
14	Cisarua	19
15	Ciseeng	10
16	Citeureup	36
17	Dramaga	9
18	Gunung Putri	111
19	Gunung Sindur	20

NO.	KECAMATAN	JUMLAH MINIMARKET
20	Jasinga	14
21	Jonggol	38
22	Kemang	20
23	Klapanunggal	23
24	Leuwiliang	13
25	Leuwisadeng	11
26	Megamendung	16
27	Nanggung	6
28	Pamijahan	8
29	Parung	18
30	Parung Panjang	30
31	Rancabungur	7
32	Rumpin	11
33	Sukajaya	2
34	Sukamakmur	4
35	Sukaraja	32
36	Tajurhalang	17
37	Tamansari	15
38	Tanjungsari	7
39	Tenjo	3
40	Tenjolaya	3

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2020

Pada tahun 2020 telah dibangun *rest area* Gunung Mas untuk menampung Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan puncak. Pembangunan *rest area* ini terealisasi atas kesepakatan bersama antara Kementerian PUPR, PT. Perkebunan Nusantara VIII dan Pemerintah Kabupaten Bogor tentang Penataan Kawasan Puncak Kabupaten Bogor untuk Penanganan Kawasan Strategis Nasional dengan Nomor 05/PKS/SJ/2019, 119/18/KB/KS/V/2019, KB/111.5/461/V/2019, dengan luas lahan yang diperuntukan ± 7 Ha dan jumlah kios terbangun sebanyak 448 kios. Pada tahun 2021 pembangunan kios *rest area* dilanjutkan sebanyak 68 kios, sehingga total kios yang ada di *rest area* sebanyak 516 kios.

Selain mengatur sarana perdagangan, pengawasan pupuk bersubsidi juga menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dengan mengawasi alokasi pendistribusian pupuk bersubsidi melalui 11 distributor/agen.

Selain sarana perdagangan, retribusi pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan. UTTP juga memiliki prospek yang dapat diandalkan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor.

Tabel 2.34
Potensi Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya

URAIAN	Potensi			
	QTY		Tarif Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya				
Jenis UTTP Tera/Tera Ulang:				
- Pompa Ukur BBM	1.250	Unit	125.000	156.250.000
- Meter Air	12.000	Unit	6.000	72.000.000
- Meter Arus	80	Unit	175.000	14.000.000
- KWH Meter	1.212.000	Unit	1.400	1.696.800.000
- Timbangan Jembatan	185	Unit	380.000	70.300.000
- Batching Plant	56	Unit	150.000	8.400.000
- Timbangan LPG	278	Unit	50.000	13.900.000
- Timbangan Elektronik	4.500	Unit	78.000	351.000.000
- Timbangan CB	141	Unit	53.000	7.473.000
- Timbangan Bobot Ingsut	167	Unit	27.000	4.509.000
- Timbangan Meja (Non Pasar)	500	Unit	6.000	3.000.000
- Timbangan Pegas	575	Unit	3.500	2.012.500
- Neraca Obat	250	Unit	10.000	2.500.000
- Anak Timbangan Kelas M2/M3	2.775	Unit	800	2.220.000
- Anak Timbangan Kelas M1/F	2.750	Unit	1.300	3.575.000
- Tutsida	35	Unit	700.000	24.500.000
- Timbangan Meja (Pasar)	6.000	Unit	6.000	36.000.000
- Timbangan Cepat	177	Unit	3.500	619.500
- Neraca Emas	80	Unit	10.000	800.000
- Ukuran Panjang	51	Unit	4.000	204.000
- Dacin Logam	176	Unit	2.500	440.000
- Timbangan Ban Berjalan	10	Unit	450.000	4.500.000
Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus				
- Pengujian BDKT	500	Unit	50.000	25.000.000
	1.244.536			**2.500.003.000**

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2020

10) Pengembangan Industri

Dalam mendukung pengembangan industri di Kabupaten Bogor, jumlah investasi pada tahun 2016 – 2019 dapat dilihat pada tabel 2.35.

Tabel 2.35
Investasi Industri Menengah di Kabupaten Bogor Tahun 2016-2019

No	Jenis Industri Menengah	Investasi			
		2016	2017	2018	2019
1	Industri logam	644.645.292.378	676.833.236.603	691.401.055.078	691.401.055.078
2	Industri mesin	164.402.201.200	166.717.549.200	166.717.549.200	166.717.549.200
3	Industri Alat Angkut	151.806.202.583	153.626.202.583	153.626.202.583	153.626.202.583
4	Industri Elektronika	194.694.732.721	197.868.673.721	198.251.263.727	200.251.263.727
5	Industri tekstil dan produk tekstil	281.788.822.015	290.727.474.535	303.254.238.535	308.254.238.535
6	Industri Aneka	25.563.848.000	25.563.848.000	25.563.848.000	27.063.848.000
7	Industri barang dari kulit	23.543.853.000	23.543.853.000	23.543.853.000	23.543.853.000
8	Industri kimia dan barang kimia	356.899.597.602	395.588.208.895	414.630.461.593	414.630.461.593
9	Industri plastik dan barang plastik	402.383.987.308	408.969.441.930	412.390.722.730	412.390.722.730
10	Industri karet dan barang karet	369.618.799.410	369.618.799.410	372.147.699.410	372.147.699.410
11	Industri kertas dan barang kertas	69.637.895.665	76.452.575.915	76.452.575.915	76.452.575.915
12	Industri bahan bangunan dan bahan galian	102.813.324.600	102.813.324.600	102.813.324.600	102.813.324.600
13	Industri agro	1.059.239.573.712	1.081.683.559.873	1.114.835.228.067	1.116.835.228.067
14	Industri hasil hutan	332.553.280.493	335.931.978.758	335.931.978.758	335.931.978.758
JUMLAH		4.179.591.410.687	4.305.938.727.023	4.391.560.001.196	4.406.060.001.196

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, 2019

Industri di Kabupaten Bogor terbagi menjadi dua sektor, yaitu sektor industri kecil dan sektor industri menengah dan besar. Adapun rincian jumlah unit usaha dan serapan tenaga kerja industri kecil dapat dilihat pada tabel 2.36 dan 2.37.

Tabel 2.36
Jumlah Unit Usaha Industri Kecil (Formal)

No	Industri Kecil	Jumlah Unit Usaha						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
1	Industri logam	192	194	194	196	198	198	198
2	Industri mesin	80	80	80	80	80	80	80
3	Industri alat angkut	54	55	56	56	58	58	60

No	Industri Kecil	Jumlah Unit Usaha						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
4	Industri elektronika	15	15	16	16	16	16	16
5	Industri tekstil dan produk tekstil	400	405	405	405	405	405	407
6	Industri aneka	22	32	35	35	35	35	37
7	Industri barang dari kulit	161	161	161	162	162	163	163
8	Industri kimia dan barang kimia	93	93	99	99	102	102	103
9	Industri plastik dan barang plastik	32	35	35	37	37	37	38
10	Industri karet dan barang karet	6	7	7	9	10	10	10
11	Industri kertas dan barang kertas	102	103	103	103	103	103	103
12	Industri bahan bangunan dan dan bahan galian	50	50	51	51	51	51	51
13	Industri agro	394	441	444	449	454	454	458
14	Industri hasil hutan	202	203	205	205	205	205	206
JUMLAH		**1.803**	**1.874**	**1.891**	**1.903**	**1.916**	**1.917**	**1.930**

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2020

Tabel 2.37
Jumlah Serapan Tenaga Kerja Industri Kecil (Formal)

No	Industri Kecil	Serapan Tenaga Kerja					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019*
1	Industri Logam	1.989	1.989	2.008	2.033	2.033	2.033
2	Industri mesin	1.144	1.144	1.144	1.144	1.144	1.144
3	Industri Alat Angkut	538	558	558	588	588	618
4	Industri Elektronika	55	70	70	70	70	70
5	Industri tekstil dan produk tekstil	8.651	8.651	8.651	8.651	8.651	8.731
6	Industri Aneka	246	263	263	263	263	290
7	Industri barang dari kulit	3.556	3.556	3.561	3.561	3.573	3.573
8	Industri kimia dan barang kimia	292	325	325	359	359	389
9	Industri plastik dan barang plastik	156	156	174	174	174	205
10	Industri karet dan barang karet	55	55	69	79	79	79
11	Industri kertas dan barang kertas	223	223	223	223	223	233
12	Industri bahan bangunan dan dan bahan galian	245	250	250	250	250	250
13	Industri agro	3.162	3.173	3.196	3.250	3.250	3.400
14	Industri hasil hutan	1.408	1.425	1.425	3.250	3.250	3.325
JUMLAH		**21.720**	**21.838**	**21.917**	**23.895**	**23.907**	**24.340**

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2020

Adapun rincian jumlah unit usaha dan serapan tenaga kerja industri menengah dapat dilihat pada tabel 2.38 dan 2.39.

Tabel 2.38
Jumlah Unit Usaha Industri Menengah (Formal)

NO	INDUSTRI MENENGAH BESAR	JUMLAH UNIT USAHA					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Industri logam	151	158	161	165	166	167
2	Industri mesin	42	43	43	45	45	45
3	Industri alat angkut	56	58	59	60	60	60

NO	INDUSTRI MENENGAH BESAR	JUMLAH UNIT USAHA					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4	Industri elektronika	34	37	39	40	41	42
5	Industri tekstil dan produk tekstil	104	111	113	116	117	119
6	Industri aneka	13	13	13	13	13	14
7	Industri barang dari kulit	23	23	23	23	23	23
8	Industri kimia dan barang kimia	108	115	119	127	132	132
9	Industri plastik dan barang plastik	78	81	86	87	88	88
10	Industri karet dan barang karet	21	24	24	24	25	25
11	Industri kertas dan barang kertas	25	25	25	26	26	26
12	Industri bahan bangunan dan bahan galian	50	50	54	54	54	54
13	Industri agro	219	240	273	278	281	282
14	Industri hasil hutan	121	121	123	124	124	125
JUMLAH		**1,045**	**1.099**	**1.155**	**1.182**	**1.195**	**1.202**

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2020

Tabel 2.39
Jumlah Serapan Tenaga Usaha Industri Menengah (Formal)

No	Industri Menengah Besar	Jumlah Tenaga Kerja					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Industri Logam	9.738	10.006	10.072	10.307	10.377	10.380
2	Industri mesin	2.594	2.626	2.626	2.661	2.661	2.661
3	Industri Alat Angkut	8.217	8.356	8.474	8.511	8.511	8.511
4	Industri Elektronika	5.822	6.400	6.469	6.484	6.492	6.500
5	Industri tekstil dan produk tekstil	26.759	28.287	28.731	29.298	29.353	29.370
6	Industri Aneka	2.526	2.526	2.526	2.526	2.526	2.528
7	Industri barang dari kulit	2.598	2.619	2.619	2.619	2.619	2.619
8	Industri kimia dan barang kimia	3.234	3.853	4.144	4.446	4.546	4.546
9	Industri plastik dan barang plastik	4.637	4.824	5.410	285	434	434
10	Industri karet dan barang karet	1.749	1.820	1.820	1.820	1.840	1.840
11	Industri kertas dan barang kertas	766	766	766	921	921	921
12	Industri bahan bangunan dan bahan galian	2.756	2.756	2.928	2.928	2.928	2.928
13	Industri agro	14.704	15.748	16.600	16.787	17.048	17.055
14	Industri hasil hutan	8.722	8.722	9.068	9.115	9.115	9.120
JUMLAH		**94,822**	**99.309**	**102.253**	**98.708**	**99.371**	**99.413**

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2020

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan di Kabupaten Bogor adalah melalui pengukuran pencapaian

indikator-indikator yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun komponen-komponen indikator sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- **Pertumbuhan PDRB**

Dalam proses pembangunan wilayah, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu target utama. Sehingga untuk mendukungnya dilakukan perencanaan yang diimplementasikan dalam berbagai bentuk kegiatan yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Oleh karena itu, dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bogor dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

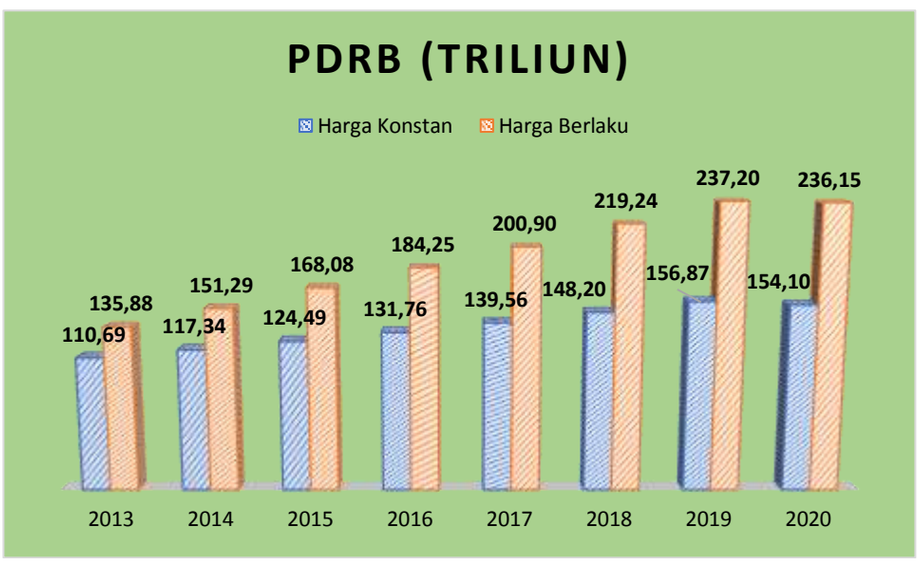

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor

Gambar 2.22
Perkembangan PDRB Kabupaten Bogor

Berdasarkan data yang disajikan pada gambar di atas, diketahui bahwa PDRB Kabupaten Bogor pada periode tahun 2013-2019 selalu mengalami peningkatan, baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Capaian PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2019 meningkat sebesar Rp 17,96 triliun dibandingkan dengan tahun 2018. Sedangkan capaian PDRB atas dasar harga konstan tahun 2019 meningkat sebesar Rp 8,66 triliun dibandingkan dengan tahun 2018.

Diketahui bahwa PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Bogor mencapai Rp 240,45 trilyun, atau mengalami peningkatan sebesar 8,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 221,55 trilyun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 5,36 persen, yaitu dari Rp 148,96 trilyun pada tahun 2018 naik menjadi Rp 156,94 trilyun pada tahun 2019.

Namun khusus untuk tahun 2020, PDRB Kabupaten Bogor baik PDRB atas dasar harga berlaku, maupun atas dasar harga konstan mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi akibat adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan Pemerintah memberlakukan pembatasan aktivitas kegiatan masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional. Adapun capaian PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku sebesar 236,15 triliun rupiah dan capaian PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga konstan sebesar 154,10 triliun rupiah. Hal ini berarti capaian PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku mengalami penurunan sebesar 4,30 triliun rupiah dari tahun sebelumnya, sedangkan capaian PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga konstan mengalami penurunan sebesar 2,84 triliun rupiah dari tahun sebelumnya.

Sebagaimana diketahui bahwa nilai dan kontribusi sektor usaha dalam PDRB terdiri dari 17 (tujuh belas) sektor usaha yang dikelompokkan menjadi tiga sektor, yaitu sektor primer, sekunder dan tersier. Adapun nilai dan kontribusi sektor usaha dalam PDRB di Kabupaten Bogor setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang didominasi oleh kelompok sektor sekunder. Mengenai perkembangan nilai dan kontribusi sektor usaha dalam PDRB atas dasar harga konstan tahun 2013-2020 disajikan secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.40
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 atas Dasar Harga Konstan (Triliun)

No.	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.01	5.43	6.15	5.24	6.40	5.14	6.68	5.07	6.87	4.92	7.03	4.74	7.17	4.57	7.23	4.69
2.	Pertambangan dan Penggalian	3.50	3.16	3.60	3.07	3.58	2.87	3.48	2.64	3.46	2.48	3.54	2.39	3.50	2.23	3.54	2.30
3.	Industri Pengolahan	61.61	55.66	64.79	55.22	68.26	54.84	72.31	54.88	76.16	54.57	80.87	54.57	85.43	54.46	83.27	54.04
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0.21	0.19	0.22	0.19	0.22	0.18	0.24	0.18	0.24	0.17	0.24	0.16	0.25	0.16	0.24	0.15
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.12	0.11	0.13	0.11	0.14	0.11	0.15	0.11	0.16	0.12	0.17	0.12	0.18	0.12	0.20	0.13
6.	Konstruksi	9.22	8.33	10.23	8.71	11.17	8.98	11.84	8.98	13.10	9.39	14.49	9.78	15.61	9.95	14.79	9.60
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.41	13.02	15.14	12.90	15.88	12.76	16.58	12.59	17.33	12.42	18.02	12.16	19.25	12.27	18.42	11.96
8.	Transportasi dan Pergudangan	3.21	2.90	3.47	2.95	3.81	3.06	4.14	3.14	4.46	3.19	4.82	3.25	5.22	3.32	5.15	3.34
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.66	2.41	2.81	2.40	3.04	2.44	3.31	2.51	3.59	2.57	3.84	2.59	4.04	2.57	3.66	2.38
10.	Informasi dan Komunikasi	2.02	1.83	2.39	2.04	2.80	2.25	3.20	2.43	3.58	2.57	3.91	2.64	4.27	2.72	5.59	3.63
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.57	0.51	0.59	0.50	0.63	0.51	0.71	0.54	0.74	0.53	0.79	0.53	0.85	0.54	0.86	0.56
12.	Real Estate	0.91	0.82	0.98	0.83	1.04	0.84	1.10	0.84	1.21	0.87	1.32	0.89	1.45	0.92	1.51	0.98
13.	Jasa Perusahaan	0.22	0.19	0.23	0.20	0.25	0.20	0.27	0.20	0.29	0.21	0.31	0.21	0.34	0.22	0.30	0.20
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.92	1.74	1.93	1.64	2.05	1.65	2.11	1.60	2.21	1.58	2.25	1.52	2.28	1.46	2.24	1.45
15.	Jasa Pendidikan	1.82	1.64	2.14	1.82	2.37	1.90	2.54	1.93	2.76	1.98	2.92	1.97	3.09	1.97	3.31	2.15
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.46	0.42	0.56	0.48	0.65	0.53	0.72	0.55	0.79	0.56	0.85	0.57	0.90	0.58	0.84	0.55
17.	Jasa lainnya	1.82	1.65	1.99	1.70	2.19	1.76	2.38	1.81	2.61	1.87	2.83	1.91	3.05	1.95	2.96	1.92
	PDRB	**110.685**		**117.340**		**124.487**		**131.760**		**139.561**		**148.203**		**156.868**		**154.097**	

Sumber : Kabupaten Bogor Dalam Angka Tahun 2017, 2020 dan 2021, BPS 2021

Kontribusi beberapa sektor dalam PDRB harga konstan berfluktuasi terhadap total PDRB dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Terdapat beberapa sektor yang nilainya tumbuh sepanjang tahun terdiri dari sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan serta Real Estate. Adapun, untuk sektor yang nilainya mengalami penurunan sepanjang tahun terdiri dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik dan gas.

Kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga konstan pada tahun 2020 adalah sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 54,04 persen, sedangkan kontribusi yang terkecil terhadap PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga konstan pada tahun 2020 adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan kontribusi sebesar 0,13 persen.

Selanjutnya, perkembangan nilai dan kontribusi sektor usaha dalam PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2013-2020 disajikan secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 2.41
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 atas Dasar Harga Berlaku (Triliun)

No.	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.46	5.49	8.16	5.39	9.09	5.41	10.08	5.47	10.73	5.34	11.60	5.29	12.47	5.26	12.73	5.39
2.	Pertambangan dan Penggalian	4.11	3.02	4.53	2.99	4.72	2.81	4.74	2.57	4.64	2.31	4.79	2.18	4.78	2.02	5.16	2.19
3.	Industri Pengolahan	75.30	55.41	83.23	55.02	91.99	54.73	100.75	54.68	108.89	54.20	118.67	54.13	128.19	54.04	126.74	53.67
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0.18	0.14	0.21	0.14	0.24	0.15	0.29	0.16	0.33	0.16	0.35	0.16	0.36	0.15	0.35	0.15
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.14	0.10	0.15	0.10	0.17	0.10	0.20	0.11	0.24	0.12	0.27	0.12	0.30	0.13	0.33	0.14
6.	Konstruksi	11.59	8.53	13.86	9.16	15.47	9.20	17.08	9.27	19.54	9.73	22.35	10.19	24.62	10.38	23.46	9.93
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.79	13.83	20.16	13.33	21.85	13.00	23.50	12.75	25.42	12.65	27.02	12.32	29.18	12.30	28.49	12.06
8.	Transportasi dan Pergudangan	4.09	3.01	4.80	3.17	6.01	3.58	6.81	3.70	7.58	3.77	8.33	3.80	9.17	3.86	9.21	3.90
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.40	2.50	3.81	2.52	4.29	2.55	4.83	2.62	5.46	2.72	5.98	2.73	6.49	2.73	6.08	2.58
10.	Informasi dan Komunikasi	2.02	1.49	2.38	1.57	2.79	1.66	3.19	1.73	3.63	1.81	3.86	1.76	4.11	1.73	5.51	2.33
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.66	0.49	0.72	0.48	0.81	0.48	0.95	0.52	1.05	0.52	1.17	0.53	1.31	0.55	1.32	0.56
12.	Real Estate	1.10	0.81	1.21	0.80	1.33	0.79	1.43	0.78	1.60	0.79	1.78	0.81	1.96	0.83	2.07	0.88
13.	Jasa Perusahaan	0.24	0.18	0.27	0.18	0.31	0.18	0.35	0.19	0.38	0.19	0.42	0.19	0.48	0.20	0.44	0.19
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.21	1.62	2.35	1.55	2.72	1.62	2.91	1.58	3.21	1.60	3.45	1.57	3.54	1.49	3.53	1.49
15.	Jasa Pendidikan	2.02	1.48	2.48	1.64	2.86	1.70	3.19	1.73	3.68	1.83	4.26	1.95	4.82	2.03	5.41	2.29
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.52	0.38	0.63	0.41	0.79	0.47	0.91	0.49	1.03	0.51	1.11	0.51	1.21	0.51	1.15	0.49
17.	Jasa lainnya	2.07	1.52	2.35	1.55	2.65	1.58	3.04	1.65	3.48	1.73	3.83	1.75	4.21	1.77	4.16	1.76
	PDRB	**135.882**		**151.285**		**168.081**		**184.25**		**200.898**		**219.24**		**237.2**		**236.147**	

Sumber : Kabupaten Bogor Dalam Angka Tahun 2017, 2020 dan 2021, BPS 2021

Kontribusi beberapa sektor dalam PDRB harga berlaku berfluktuasi terhadap total PDRB dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Namun demikian, masih terdapat beberapa sektor yang nilainya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sektor pengadaan air, sektor limbah dan daur ulang, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi dan sektor jasa pendidikan. sementara itu untuk sektor-sektor yang nilainya mengalami penurunan adalah sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Selanjutnya mengenai laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan sektor usaha, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2013-2020 disajikan secara rinci dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.42
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bogor
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2013-2020 (%)

No.	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	18.76	6.62	9.33	2.40	11.46	3.98	10.94	4.48	6.45	2.82	8.05	2.33	7.54	1.97	2.02	0.80
2.	Pertambangan dan Penggalian	4.83	2.88	10.26	2.88	4.10	-0.72	0.60	-2.80	-2.24	-0.60	3.25	2.56	-0.17	-1.27	8.01	1.11
3.	Industri Pengolahan	9.31	4.36	10.54	5.17	10.52	5.36	9.53	5.93	8.08	5.33	8.98	6.18	8.02	5.64	-1.13	-2.53
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	-2.77	3.92	16.85	7.56	13.80	-0.11	17.96	6.48	14.70	1.79	7.02	0.99	2.81	2.36	-4.50	-4.10
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.91	3.75	4.12	3.25	15.59	9.88	17.10	7.11	19.23	7.72	13.52	5.65	11.99	6.64	10.88	9.11
6.	Konstruksi	21.32	10.85	19.57	10.94	11.64	9.29	10.39	5.93	14.43	10.70	14.38	10.55	10.17	7.72	-4.72	-5.25
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21.93	9.94	7.32	5.04	8.36	4.91	7.56	4.42	8.17	4.52	6.29	3.98	8.00	6.83	-2.37	-4.32
8.	Transportasi dan Pergudangan	24.14	10.80	17.31	8.17	25.25	9.84	13.32	8.73	11.20	7.65	9.99	8.11	10.00	8.24	0.51	-1.30
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16.70	9.50	12.24	5.49	12.65	8.20	12.52	8.72	13.12	8.49	9.41	7.06	8.46	5.11	-6.23	-9.27
10.	Informasi dan Komunikasi	10.64	9.57	17.91	18.38	17.08	17.21	14.38	14.24	13.81	11.82	6.43	9.09	6.47	9.22	34.07	30.92
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	16.56	10.54	9.20	3.74	12.86	7.60	17.04	11.20	10.71	4.87	10.81	7.02	11.96	6.99	1.44	1.25
12.	Real Estate	15.24	5.83	9.75	7.32	9.73	6.48	8.07	6.18	11.47	9.32	11.23	9.63	10.46	9.40	5.50	4.44
13.	Jasa Perusahaan	12.46	8.08	10.78	6.58	13.96	8.15	12.68	8.10	10.91	8.76	9.81	6.53	13.09	9.02	-7.88	-10.90
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.43	-2.12	6.41	0.19	15.97	6.46	6.74	3.05	10.56	4.63	7.24	1.56	2.80	1.70	-0.40	-1.89
15.	Jasa Pendidikan	17.55	10.35	22.86	17.81	15.47	10.66	11.57	7.47	15.28	8.64	15.86	5.79	12.94	5.59	12.38	7.13
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.62	6.68	21.12	20.15	25.96	17.35	15.30	10.10	13.27	9.08	8.18	7.72	8.98	6.56	-5.20	-6.83
17.	Jasa lainnya	10.59	8.03	13.50	9.35	12.77	9.60	14.79	8.85	14.52	9.57	10.03	8.36	9.84	8.04	-1.20	-3.09
	PDRB	**12.93**	**6.14**	**11.34**	**6.01**	**11.10**	**6.09**	**9.62**	**5.84**	**9.04**	**5.92**	**9.13**	**6.19**	**8.19**	**5.85**	**-0.44**	**-1.77**

Sumber : Kabupaten Bogor Dalam Angka Tahun 2016, 2017, 2020 dan 2021, BPS 2021

Sektor usaha yang memiliki proporsi laju pertumbuhan terbesar pada struktur perekonomian Kabupaten Bogor tahun 2020 (berdasarkan harga konstan) adalah Informasi dan Komunikasi. Adapun sektor usaha yang memiliki proporsi laju pertumbuhan terkecil adalah jasa perusahaan.

Laju pertumbuhan ekonomi dengan penerapan SNA 2008 dan tahun dasar 2010, berdasarkan *time series* dari tahun 2013-2020, terlihat bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor berada pada kisaran 5-6 persen. Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang dihasilkan pada tahun 2019 mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif yang ditandai oleh pertumbuhan sebesar 5,85 persen, atau menurun 0,34 persen dari tahun 2018 sebesar 6,19 persen. Namun demikian pertumbuhan tersebut masih di atas capaian LPE Jawa Barat yang hanya mencapai 5,07 persen atau terpaut 0,83 persen, dan capaian LPE Nasional yang hanya mencapai 4,96 persen atau terpaut 0,94 persen.

Khusus tahun 2020, Laju Pertumbuhan Ekonomi mengalami kontraksi yang terjadi secara nasional akibat dari pandemi Covid-19. Adapun capaian LPE Kabupaten Bogor tahun 2020 tercatat sebesar -1,77 persen. Namun demikian capaian LPE Kabupaten Bogor masih di atas capaian LPE Jawa Barat yang hanya mencapai -2,44 persen dan LPE Nasional yang hanya mencapai -2,19 persen.

Mengenai data capaian LPE Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional tahun 2013-2020 sebagaimana dimaksud divisualisasikan melalui gambar berikut.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2.23
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2013-2020 (%)

- **Laju Inflasi**

Inflasi merupakan gambaran kondisi makro perekonomian suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat dan pola investasi. Jika semakin tinggi tingkat inflasi maka daya beli masyarakat akan semakin turun, sehingga investasi pun akan terhambat. Kondisi demikian tentunya dapat berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Laju inflasi Kabupaten Bogor cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tercatat dalam inflasi tahunan Kabupaten Bogor tahun 2011-2019 (Jan-Sept) berada pada kisaran 2 persen sampai dengan 8 persen per tahun. Penjelasan mengenai laju inflasi Kabupaten Bogor yang fluktuatif sebagaimana dimaksud dijabarkan melalui gambar berikut ini :

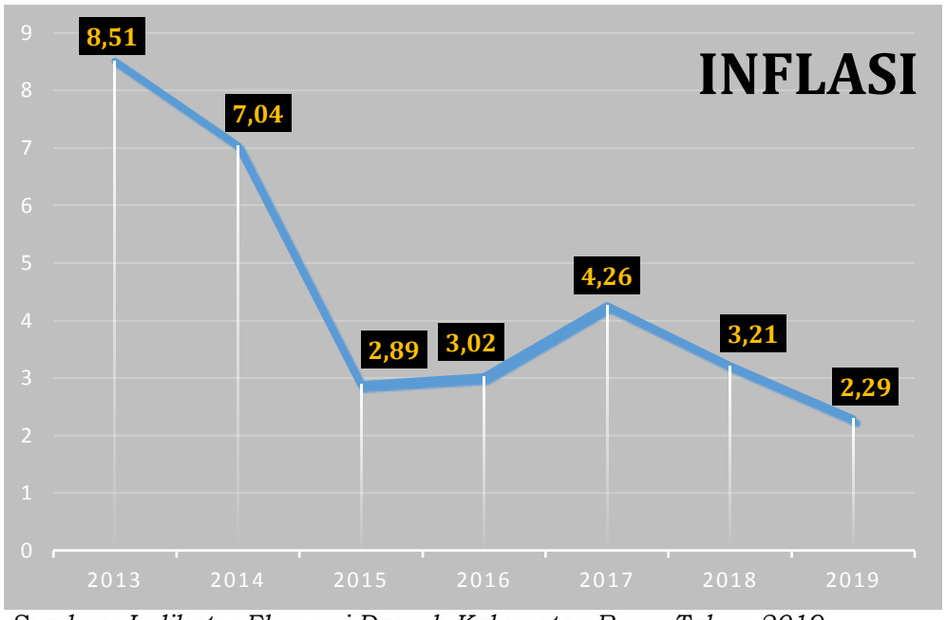

Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019

Gambar 2.24
Nilai Inflasi Rata-rata Kabupaten Bogor Tahun 2013-2019 (Jan-Sept)

Berdasarkan data pada gambar 2.24, diketahui bahwa laju inflasi tertinggi di Kabupaten Bogor terjadi pada tahun 2013 dengan capaian 8,51 persen. Walaupun demikian, nilai tersebut masih digolongkan sebagai inflasi ringan karena masih di bawah 10 persen per tahun. Kemudian pada tahun 2014, inflasi mengalami penurunan menjadi 7,04 persen, dan pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 2,89 persen atau menguat sebesar 4,15 persen. Sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan yang berturut-turut sebesar 3,02 persen dan 4,26 persen. Selanjutnya pada tahun 2018 penurunan mencapai 3,21 persen dan pada tahun 2019 (Jan-Sept) laju inflasi Kabupaten Bogor tercatat kembali mengalami penurunan hingga mencapai 2,29 persen atau menguat 0,92 persen.

Berdasarkan inflasi tahun kalender dari bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2019, diketahui bahwa nilai inflasi Kabupaten Bogor hanya sebesar 2,29 persen. Nilai tersebut lebih rendah daripada nilai inflasi Gabungan 7 (tujuh) kota di Jawa Barat yang mencapai 2,70 persen. Namun jika dibandingkan dengan nilai inflasi nasional yang mencapai 2,20 persen, nilai inflasi Kabupaten Bogor masih lebih tinggi 0,09 persen dari nilai inflasi nasional.

Tabel 2.43
Inflasi Tahun Kalender Gabungan 7 Kota di Jawa Barat dan Kabupaten Bogor Tahun 2019 (Tahun 2012=100)

KOTA INFLASI / KABUPATEN BOGOR	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kota Bogor	0,39	-0,01	0,26	0,76	1,35	2,26	2,41	2,79	2,30
Kota Sukabumi	0,32	0,18	0,22	0,68	1,33	1,7	1,98	1,94	1,75
Kota Bandung	0,09	0,01	0,04	0,47	1,32	1,42	1,98	2,6	2,31
Kota Cirebon	0,20	0,04	0,22	0,49	0,86	1,02	1,26	1,51	1,26
Kota Bekasi	0,67	0,85	0,86	1,20	2,26	2,62	3,27	3,65	3,59
Kota Depok	0,20	0,15	0,39	0,89	1,78	2,91	2,96	3,33	3,07
Kota Tasikmalaya	0,41	0,30	0,33	0,54	1,25	1,54	1,73	1,78	1,39
Kab. Bogor	**0,36**	**-0,01**	**0,49**	**0,73**	**1,34**	**2,28**	**2,37**	**2,73**	**2,29**
Gabungan Jawa Barat	**0,33**	**0,28**	**0,39**	**0,80**	**1,66**	**2,14**	**2,54**	**2,95**	**2,70**
NASIONAL	**0,32**	**0,24**	**0,35**	**0,80**	**1,48**	**2,05**	**2,36**	**2,48**	**2,20**

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019

Jika dilihat data pada tabel di atas, diketahui bahwa inflasi tertinggi di Kabupaten Bogor terjadi pada bulan Agustus yang mencapai 2,73 persen. Kondisi yang sama dialami juga oleh nilai inflasi Gabungan Jawa Barat yang mencapai 2,95 persen dan nilai inflasi Nasional yang mencapai 2,48 persen, sedangkan inflasi terendah di Kabupaten Bogor terjadi pada bulan Februari yaitu deflasi sebesar -0,01 persen. Hal serupa dialami juga oleh nilai inflasi Gabungan Jawa Barat dan Nasional yang masing-masing sebesar 0,28 persen dan 0,24 persen.

- **PDRB per Kapita**

PDRB per kapita merupakan indikator yang paling umum digunakan untuk menggambarkan ukuran standar hidup dan tingkat kemakmuran suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. PDRB per kapita dapat dijadikan pendekatan untuk indikator pendapatan per kapita.

PDRB per kapita merupakan hasil pembagian antara PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per

satu orang penduduk. Angka PDRB per kapita menunjukan angka pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk. Namun demikian, tidak seluruh pendapatan tersebut dinikmati oleh penduduk suatu daerah tetapi ada sebagian yang dibawa oleh penduduk daerah lain.

Penjabaran mengenai pertumbuhan nilai PDRB per kapita Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku dan harga konstan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

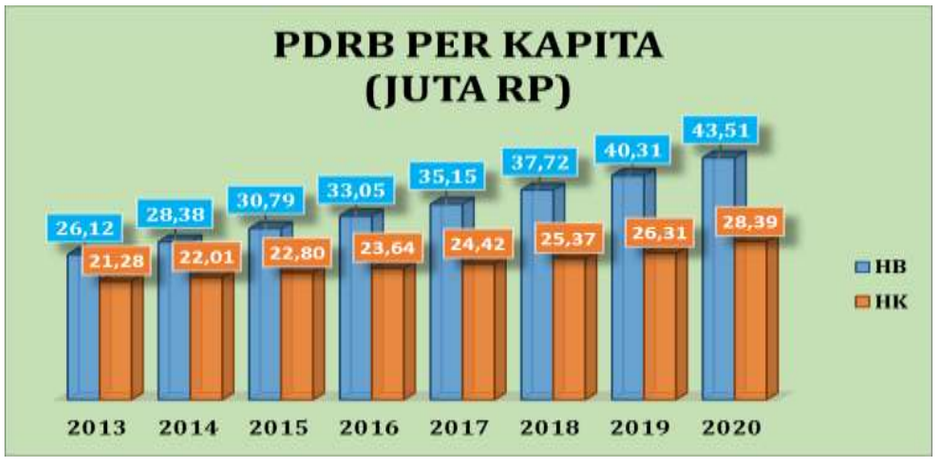

Sumber : Kabupaten Bogor Dalam Angka 2021, diolah

Gambar 2.25
PDRB per Kapita Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020

Berdasarkan data pada gambar di atas, diketahui bahwa PDRB per kapita Kabupaten Bogor tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 mengalami tren yang positif. Adapun untuk PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 indikator ini mengalami peningkatan menjadi 43,51 juta rupiah dan 28,39 juta rupiah untuk harga konstan.

- **Indeks Gini**

Indeks gini merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks gini dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna di mana semua nilai sama. Sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi, yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Adapun data Indeks gini Kabupaten Bogor tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 diuraikan melalui tabel berikut ini.

Tabel 2.44
Indeks Gini di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Gini	0,38	0,39	0,42	0,40	0,38	0,42	0,40	0,38

Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 dan BPS

Perlu diketahui bahwa Indeks gini dengan nilai rasio mencapai 0,40 sudah mendekati titik rawan. Karena jika Indeks gini sudah mencapai nilai rasio 0,50, artinya telah mulai terjadi ketimpangan pendapatan yang dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat memicu terjadinya kerusuhan, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi.

Jika melihat dari proses pembentukan nilai koefisien rasio gini yang membutuhkan waktu yang sangat lama, maka indikator ini tidak dapat ditetapkan menjadi target tahunan. Oleh karena itu, untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh digunakan indikator persentase penduduk di atas garis kemiskinan agar dapat ditetapkan target setiap tahunnya.

- **Indeks Ketimpangan Williamson**

Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar kecamatan yang terjadi pada suatu wilayah, dapat dianalisis dengan mengunakan indeks ketimpangan regional (*regional in equality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson.

- **Rumus Indeks Williamson adalah :**

$$I_w = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 (\frac{f_i}{n})}}{\bar{y}}$$

Dimana:
I_W= nilai indeks Williamson
y_i= PDRB per kapita Kecamatan-i
$\bar{y}$= PDRB per kapita Kabupaten
f_i= Jumlah Penduduk Kecamatan-i
n= Jumlah Penduduk Kabupaten
i = 1,2,3,…,x

- **Kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut :**
  1. Jika nilai I_w menjauhi 0 (nol), menunjukkan bahwa tingkat disparitas regional atau tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi antar kecamatan di Kabupaten Bogor semakin besar (kemerataan antar kecamatan semakin memburuk).
  2. Jika nilai I_w mendekati 0 (nol), menunjukkan bahwa tingkat disparitas regional atau tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi antar kecamatan di Kabupaten Bogor semakin kecil (kemerataan antar kecamatan semakin membaik).

Adapun hasil dari penghitungan rumus di atas diketahui bahwa Indeks Williamson Kabupaten Bogor tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 diuraikan melalui gambar berikut ini.

Sumber : BPS

Gambar 2.26
Indeks Williamson Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020

Berdasarkan data pada gambar di atas, diketahui bahwa nilai Indeks Williamson Kabupaten Bogor dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 berkisar di angka 1. Kondisi demikian menunjukkan tingginya ketidakmerataan pembangunan antar kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa kecamatan yang memiliki kondisi *hyper* PDRB per kapita (di atas PDRB per kapita Kabupaten Bogor dibandingkan daerah lainnya).

Secara makro, kontribusi sektor industri di Kabupaten Bogor menduduki peringkat pertama dalam PDRB dengan nilai distribusi sebesar 53,28 persen. Namun kontribusi PDRB yang sangat besar di sektor tersebut, ternyata tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerjanya yang hanya mampu menyerap 16,05 persen tenaga kerja di Kabupaten Bogor.

Kondisi di atas sangat bertolak belakang jika dibandingkan dengan sektor lain yang padat karya. Sektor ini sangat dominan dalam menyerap tenaga kerja, namun kontribusinya terhadap PDRB daerah kecil. Dua kondisi ini dapat menjadi penyebab utama terjadinya kesenjangan pendapatan atau disparitas pendapatan di Kabupaten Bogor.

Sehubungan dengan nilai PDRB yang tidak terlalu besar pada sektor padat karya, menyebabkan nilai PDRB per kapitanya tidak sebesar apa yang didapat oleh kecamatan yang kontribusi PDRB terbesarnya didominasi melalui sektor industri. Hal inilah yang menyebabkan adanya kesenjangan antar kecamatan di Kabupaten Bogor, yaitu adanya ketidakseimbangan pembangunan yang terjadi antar wilayah.

- **Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan**

Perkembangan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 2.45
Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	9,54	8,91	8,96	8,83	8,57	7,14	6,66	7,69

Sumber : BPS, 2020

Adapun perbandingan persentase penduduk miskin antara Kabupaten Bogor dengan Nasional dan Jawa Barat disajikan pada gambar berikut ini.

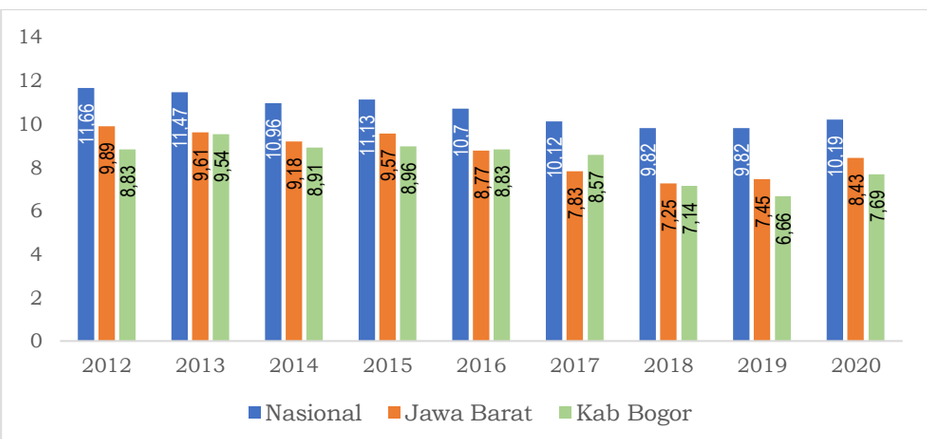

Sumber : BPS dan Hasil Analisis

Gambar 2.27
Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan Tahun 2013-2020

Persentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 di Kabupaten Bogor sebesar 7,69 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian Kabupaten Bogor berada di atas capaian Provinsi Jawa Barat yang mencapai 8,43 persen dan nasional yang mencapai 10,19 persen.

Jika diamati data pada gambar di atas, diketahui bahwa telah terjadi lonjakan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor pada tahun 2013. Pada tahun sebelumnya persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor mencapai 8,83 persen, namun mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 9,54 persen. Kemudian pada tahun berikutnya, persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor cenderung mengalami perkembangan yang positif selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Namun kemudian pada tahun 2020 terjadi kembali kenaikan persentase jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 7,69 persen yang disebabkan adanya pandemi Covid-19.

- **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan manusia di suatu wilayah. Indikator ini menjadi strategis karena merupakan indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan yang bersifat non fisik, sehingga menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan.

Khusus mengenai metode penghitungannya, diketahui bahwa IPM telah mengalami beberapa kali penyempurnaan dalam hal metodologi yang digunakannya seperti yang dijelaskan melalui gambar berikut ini.

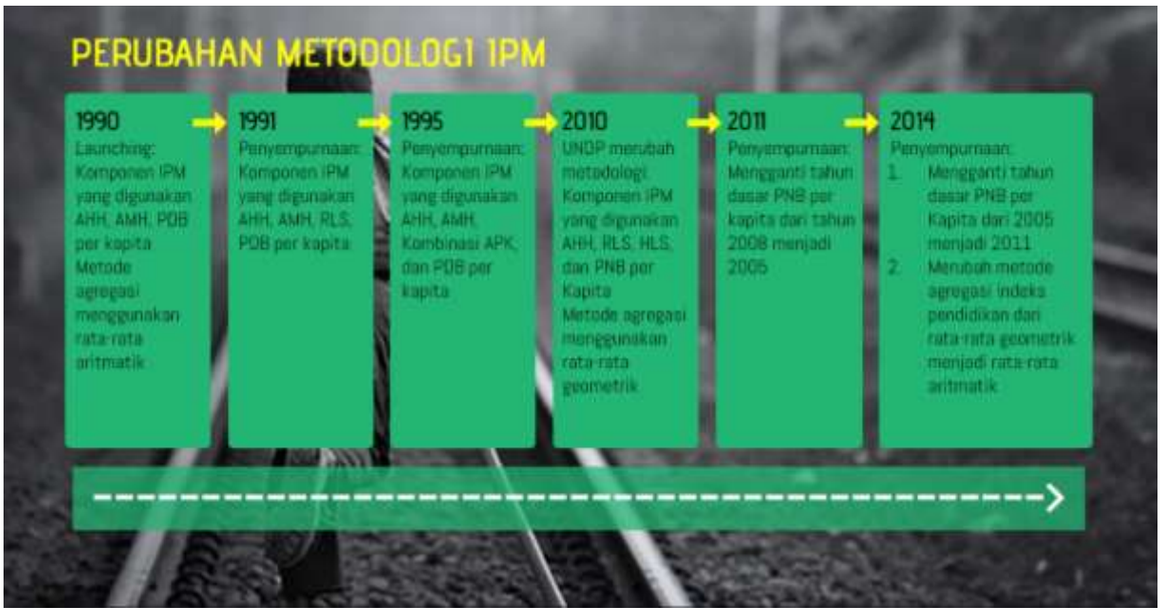

Sumber : Badan Pusat Stistik

Gambar 2.28
Perubahan Metodologi IPM

Adapun alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi IPM yang dilakukan pada tahun 2014 karena beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Seperti Angka Melek Huruf (AMH) yang sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh, karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu dalam hal pencapaiannya, di sebagian besar daerah relatif telah mencapai angka yang tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Adapun Angka Melek Huruf (AMH) pada metode baru ini diganti dengan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang dapat memberikan gambaran yang lebih relevan mengenai tingkat kemajuan pembangunan manusia dalam bidang pendidikan di suatu wilayah.

Selanjutnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang saat ini tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah, sehingga dalam penyempurnaannya diganti oleh Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang dapat lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Kemudian dalam hal penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM yang menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain dinilai tidak

relevan, sehingga dalam metodologi baru ini diganti dengan rumus rata-rata geometrik yang menggambarkan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Mengenai pertumbuhan tingkat capaian IPM Kabupaten Bogor dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Namun jika dibandingkan dengan capaian IPM Jawa Barat dan Nasional, IPM Kabupaten Bogor masih berada di bawah dan belum mampu untuk melampaui capaian dari keduanya.

Mengenai perkembangan IPM Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

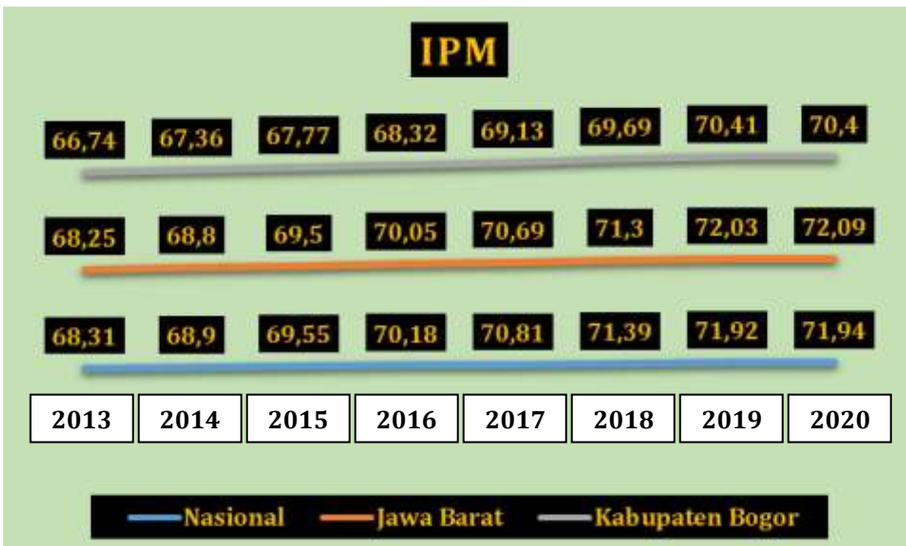

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 2.29
Perkembangan IPM Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2020

Pembangunan manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia. Upaya tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa pembangunan manusia yang baik merupakan kunci bagi tercapainya kemakmuran bangsa. Oleh sebab itu, berbagai program telah dilaksanakan

agar dapat menghasilkan sumberdaya manusia (SDM) Kabupaten Bogor yang berkualitas dan berdaya saing.

Gambaran mengenai keberhasilan program yang dilaksanakan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing dapat diketahui melalui capaian IPM yang terdiri dari beberapa komponen pembentuk IPM. Adapun capaian komponen pembentuk IPM sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Tabel 2.46
Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	**Indeks Pembangunan Manusia (Komposit)**	**66,74**	**67,36**	**67,77**	**68,32**	**69,13**	**69,69**	**70,65**	**70,40**
►	**Komponen IPM terdiri dari :**								
A	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,47	70,49	70,59	70,65	70,70	70,86	71,01	71,17
B	Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk 7 th +	11,68	11,81	11,83	12,05	12,43	12,44	12,47	12,48
C	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk 25 th +	7,40	7,74	7,75	7,83	7,84	7,88	8,29	8,30
D	Pengeluaran per kapita per tahun (Rp ribu)	9.041	9.066	9.368	9.537	9.901	10.323	10.683	10.317

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data pada tabel 2.46, diketahui bahwa capaian IPM Kabupaten Bogor pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,25 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh melemahnya capaian komponen pembentuk IPM, salah satunya adalah capaian komponen kesehatan yaitu AHH sebesar 71,17 tahun atau hanya mengalami kenaikan sebesar 0,16 poin dari tahun sebelumnya.

Kemudian komponen pendidikan yaitu terdiri dari HLS dan RLS dengan masing-masing capaian 12,48 tahun dan 8,30 tahun. Adapun kenaikan keduanya sangat kecil berada dikisaran 0,01 poin dari tahun sebelumnya. Komponen selanjutnya terkait dengan kesejahteraan yaitu pengeluaran per kapita per tahun sebesar Rp 10.317.000. Tercatat bahwa capaian komponen

inilah yang melemah sehingga menyebabkan IPM Kabupaten Bogor mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut merupakan dampak dari pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi Covid-19, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap turunnya pengeluaran per kapita.

- **Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Aspek pendidikan yang menjadi perhatian dalam pembangunan manusia dicerminkan oleh HLS. HLS dihitung dari penduduk usia 7 tahun ke atas. Ini merupakan indikator yang mengukur input dari dimensi pengetahuan. HLS mengasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Tabel 2.47
Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,68	11,81	11,83	12,05	12,43	12,44	12,47	12,48

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data pada tabel 2.47, diketahui bahwa tingkat kenaikan HLS Kabupaten Bogor selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 hanya sebesar 6,85 persen atau 0,80 tahun. Walaupun demikian, setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 0,86 persen atau 0,10 tahun.

Pada tahun 2013 capaian HLS penduduk usia 7 tahun ke atas sebesar 11,68 tahun, artinya bahwa pada tahun tersebut penduduk Kabupaten Bogor berumur 7 tahun yang memasuki sekolah berpeluang harapan lama bersekolah mencapai 11,68 tahun atau setara SMA kelas 10.

Kemudian pada tahun 2020, HLS Kabupaten Bogor mengalami peningkatan menjadi 12,48 tahun atau hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang Diploma I. Sementara itu, meskipun setiap tahunnya HLS Kabupaten Bogor terus meningkat, namun posisinya masih berada di bawah capaian HLS Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal tersebut terjadi, kecuali pada tahun 2017 dengan kondisi capaian HLS

Kabupaten Bogor berada di posisi yang lebih tinggi di atas capaian Provinsi Jawa Barat.

Mengenai tren peningkatan HLS sebagaimana dimaksud jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 2.30
Perkembangan HLS Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2020

- **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**

Komponen pembentuk IPM selain HLS dari sektor pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah.

Melalui ukuran ini diharapkan dapat mengatasi masalah kekurangan estimasi dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tidak mengakomodir kelas tertinggi yang pernah dicapai individu. Akan tetapi, jumlah tahun bersekolah ini belum memperhitungkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi (kelebihan estimasi) atau bahkan terlalu rendah *(underestimate)*.

Berikut ini merupakan data capaian RLS Kabupaten Bogor jika dibandingkan dengan capaian RLS Provinsi Jawa Barat dengan Nasional yang dijelaskan pada gambar berikut ini.

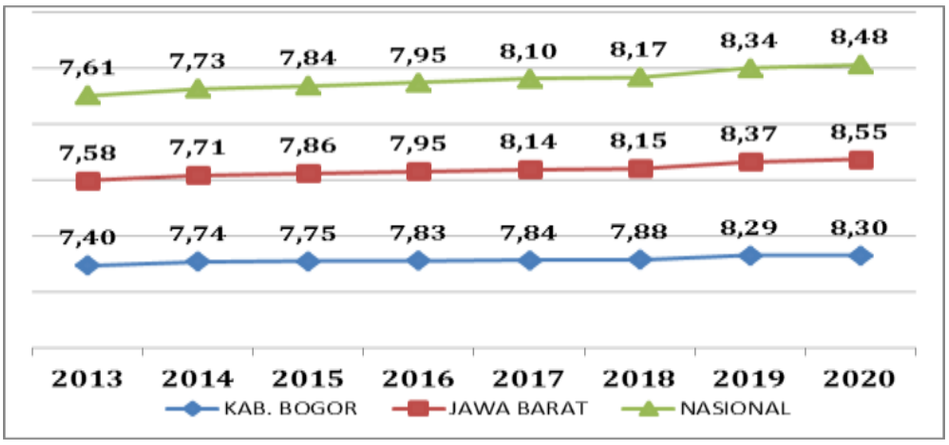

Sumber : BPS, 2020

Gambar 2.31
Perkembangan RLS Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2020

Berdasarkan data pada Gambar 2.31, diketahui bahwa capaian RLS Kabupaten Bogor selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 capaian RLS Kabupaten Bogor sebesar 7,40 tahun, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 8,30 tahun.

Hal tersebut berarti bahwa tingkat capaian RLS Kabupaten Bogor selama periode tersebut sebesar 12,16 persen atau 0,90 tahun, dengan rata-rata capaian sebesar 1,52 persen per tahun. Walaupun hasil dari penghitungan tersebut selalu menunjukkan pertumbuhan lebih dari 0 di setiap tahun, namun posisi capaian RLS Kabupaten Bogor berada di bawah capaian RLS Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Kondisi demikian terjadi, kecuali pada tahun 2014 capaian RLS Kabupaten Bogor berhasil melampaui capaian RLS Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

- **Angka Harapan Hidup (AHH)**

AHH adalah komponen pembentuk IPM dari sektor kesehatan yang merupakan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir (e0) pada suatu tahun tertentu. Perkembangan AHH Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Diketahui bahwa AHH

Kabupaten Bogor pada tahun 2013 sebesar 70,47 tahun. Kemudian secara perlahan meningkat hingga mencapai 71,17 tahun pada tahun 2020.

Meskipun trennya menunjukkan perkembangan yang positif, namun capaian AHH Kabupaten Bogor masih berada di bawah capaian AHH Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Adapun pertumbuhan AHH Kabupaten Bogor jika dibandingkan dengan AHH Provinsi Jawa Barat dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut ini.

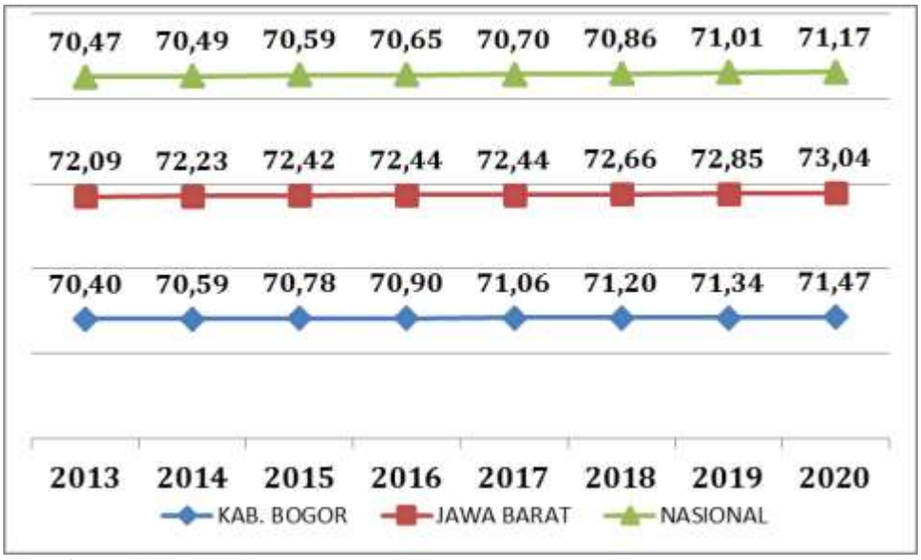

Sumber : BPS, 2021

Gambar 2.32
Perkembangan AHH Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2020

Berdasarkan data pada gambar 2.32, diketahui bahwa peningkatan AHH Kabupaten Bogor selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 sebesar 0,70 tahun atau 0,99 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian AHH Kabupaten Bogor setiap tahunnya sebesar 0,09 tahun.

- **Persentase Balita Gizi Buruk**

Penanganan balita gizi buruk yang merupakan salah satu pelayanan layanan urusan bidang kesehatan salah satunya ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penanganan balita gizi buruk. Hingga tahun 2019, jumlah balita gizi buruk sebanyak 0,017 persen dan terus berkurang mencapai 0,009 persen pada tahun 2020. Adapun perkembangan

kondisi balita gizi buruk di Kabupaten Bogor dalam kurun waktu tahun 2013-2020 disajikan dalam gambar berikut ini.

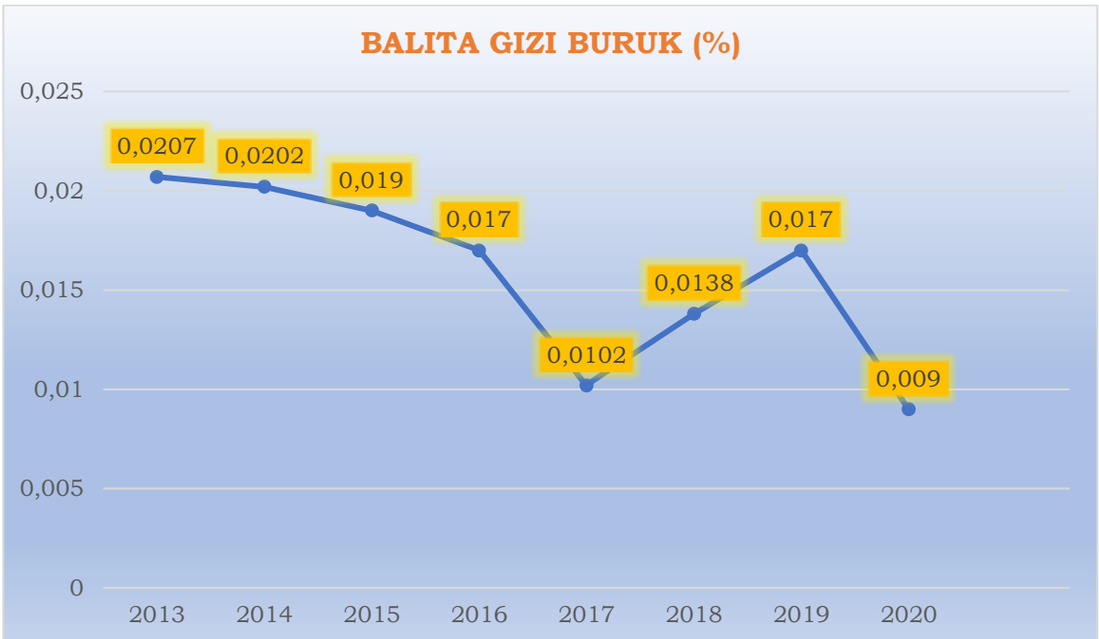

Sumber : LKPJ Kabupaten Bogor Tahun 2020

Gambar 2.33
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Bogor 2013-2020

- **Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panenan atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Indikator ini mengukur jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas per jumlah penduduk usia kerja 15 - 64 tahun. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan suatu daerah menyediakan akses bagi penduduk terhadap lapangan kerja, dan semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut untuk melaksanakan otonomi daerah yang diamanatkan oleh aturan perundang-undangan.

Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor pada tahun 2013-2020 sebagai berikut.

Tabel 2.48
Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	63,60	61,86	60,14	59,75	64,07	62,71	65,42	N/A
2.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,87	7,65	7,48	9,62	9,55	9,75	9,06	14,29

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 dan Badan Pusat Statistik

Capaian TPAK di Kabupaten Bogor mengalami perkembangan yang relatif fluktuatif. Pada tahun 2013 nilai TPAK Kabupaten Bogor sebesar 63,60 persen, namun capaiannya mengalami penurunan sampai dengan tahun 2016 dengan masing-masing capaian sebesar 61,86 tahun pada tahun 2014, kemudian 60,14 persen pada tahun 2015 dan 59,75 persen pada tahun 2016.

Selanjutnya pada tahun 2017, TPAK Kabupaten Bogor mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 64,07 persen, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 62,71 persen. Pada tahun 2019, TPAK Kabupaten Bogor kembali mengalami peningkatan sebesar 65,42 persen.

Mengenai capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bogor, diketahui bahwa perkembangannya relatif sama dengan perkembangan TPAK yang fluktuatif. Berdasarkan data pada tabel di atas, tercatat bahwa pada tahun 2013 TPT Kabupaten Bogor sebesar 7,87 persen, namun pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 berhasil ditekan sehingga mengalami penurunan menjadi 7,65 persen dan 7,48 persen.

Kemudian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, TPT Kabupaten Bogor kembali mengalami peningkatan dan berada pada kisaran angka 9 persen setiap tahunnya. Selanjutnya berdasarkan data proyeksi yang dirilis oleh BPS, bahwa TPT Kabupaten Bogor pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 14,29 persen. Hal tersebut merupakan dampak pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian secara nasional, sehingga akibatnya banyak tenaga kerja di Kabupaten Bogor yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara massal.

- **Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB**

Kabupaten Bogor memiliki potensi pertanian yang cukup besar, hal ini dapat dilihat dari persentase kontribusi sektor pertanian terhadap capaian PDRB Kabupaten Bogor.

Tabel 2.49
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	Dasar	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB (%)	ADH Berlaku	4,10	3,96	3,81	3,82	3,74	3,65
		ADH Konstan	4,54	4,38	4,31	3,57	3.54	3.43

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2018

Persentase kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku pada tahun 2018 mencapai 3,65 persen dan berdasarkan harga konstan mencapai 3,43 persen. Persentase kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bogor pada tahun 2018 baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kontribusi sektor pertanian peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bogor tahun 2013. Pada tahun 2013, persentase kontribusi sektor pertanian peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku mencapai 4,10 persen dan berdasarkan harga konstan mencapai 4,54 persen.

- **Kontribusi Produksi Kelompok Petani**

Persentase kontribusi produksi kelompok petani mengikuti pola persentase kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan). Hal ini disebabkan karena kelompok petani lebih banyak bergerak di bidang tanaman pangan dan palawija.

Tabel 2.50
Persentase Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	Dasar	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	ADH Berlaku	2,54	2,1	3,73	3,82	3,74	3,65
		ADH Konstan	2,66	2,08	4,31	3,57	3,54	3,43

Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2018

Persentase kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku pada tahun 2018 mencapai 3,65 persen dan berdasarkan harga konstan mencapai 3,43 persen. Persentase kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Kabupaten Bogor pada tahun 2018 baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Kabupaten Bogor tahun 2013. Di mana pada tahun 2013 persentase kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku mencapai 2,54 persen dan berdasarkan harga konstan mencapai 2,66 persen.

- **Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB**

Keberhasilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tahun 2019 dalam peningkatan kunjungan wisatawan dari rencana 7.900.000 wisatawan mampu terealisasi sebanyak 9.720.585 wisatawan atau 123,05 persen. Hal tersebut disebabkan oleh bertambahnya objek wisata yang ada di Kabupaten Bogor, namun akibat adanya pandemi Covid-19 realisasi untuk indikator ini mengalami penurunan yang sangat signifikan yang pada tahun 2020 hanya terealisasi sebanyak 4.469.286 wisatawan. Kondisi ini tentu mempengaruhi kontribusi sektor pariwisata, khususnya dalam penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB di Kabupaten Bogor sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.51
Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (%)	2,50	2,52	2,55	2,62	2,72	2,73	2,73	2,58
2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB atas dasar harga konstan (%)	2,41	2,40	2,44	2,51	2,57	2,59	2,57	2,38

Sumber : BPS Kabupaten Bogor, 2021

Pada tahun 2013, kontribusi sektor pariwisata, khususnya penyediaan akomodasi, makan dan minum, terhadap PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku sebesar 2,50 persen dan meningkat pada tahun 2019 angka kontribusinya menjadi 2,75 persen, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2,58 persen.

Sementara persentase sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga konstan pada tahun 2013 sebesar 2,41 persen dan cenderung meningkat sampai tahun 2018 lalu terus menurun sampai tahun 2020, yaitu menjadi 2,38 persen.

- **Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB**

Sektor perdagangan (perdagangan besar dan eceran) mempunyai kontribusi cukup signifikan terhadap perolehan nilai PDRB Kabupaten Bogor, yaitu berkontribusi kedua paling besar setelah sektor perindustrian. Namun demikian, walaupun nilai PDRB sektor perdagangan terus meningkat, apabila dilihat berdasarkan data pada Tabel 2.52, terjadi penurunan persentase sejak tahun 2013 sampai tahun 2020.

Pada tahun 2013 nilai PDRB sektor perdagangan berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 18,79 triliun dan Rp 14,41 triliun atas dasar harga konstan, adapun nilai PDRB Kabupaten Bogor mencapai Rp 135,88 triliun. Dengan demikian, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku tahun 2013 adalah sebesar 13,83 persen dan atas dasar harga konstan sebesar 13,02 persen.

Sementara pada tahun 2020 nilai PDRB sektor perdagangan berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 28,49 triliun dan Rp 18,42 triliun atas dasar harga konstan, adapun nilai PDRB mencapai Rp 236,15 triliun.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku tahun 2020 sebesar 12,06 persen dan atas dasar harga konstan sebesar 11,96 persen.

Tabel 2.52
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap
PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (%)	13,83	13,33	13,00	12,75	12,65	12,32	12,30	12,06
2.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan (%)	13,02	12,90	12,76	12,59	12,42	12,16	12,27	11,96

Sumber : BPS, 2021

- **Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB**

Sebagaimana diketahui bahwa sektor perindustrian di Kabupaten Bogor merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perolehan nilai PDRB Kabupaten Bogor. Berdasarkan data capaian pada tahun 2020, persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku berhasil mencapai 53,67 persen. Kemudian untuk kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan mencapai 54,04 persen. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Bogor selama kurun waktu tahun 2013-2019.

Tabel 2.53
Kontribusi Sektor Industri terhadap
PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2019

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB harga berlaku (%)	55,41	55,02	54,73	54,68	54,20	54,13	54,04	53,67
2.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB harga konstan (%)	55,66	55,22	54,84	54,88	54,57	54,57	54,46	54,04

Sumber: BPS, 2021

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sejak tahun 2017, besaran persentase kontribusi pada sektor ini terus mengalami penurunan baik untuk kontribusinya terhadap PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Gambaran umum kondisi daerah aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

2.3.1. Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Layanan urusan wajib Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdiri dari :

A. Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan dapat dilihat dari indikator kinerja yang terdapat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2018 – 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	poin	43,33	68,58	42,62
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD-MI-Paket A	poin	97,45	138,53	95,87
3.	Angka Putus Sekolah (DO) SD-MI	poin	0,098	0,06	0,30
4.	Nilai rata-rata UN dari SD	poin	74,6	71,06	N/A
5.	Persentase sekolah dasar (SD) yang terakreditasi minimal B	%	78,17	97,40	97,25
6.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP-MTs-Paket B	poin	92,69	227,22	94,51
7.	Angka Putus Sekolah (DO) SMP-MTs	poin	0,273	0,20	0,27
8.	Nilai rata-rata UN dari SMP	poin	49,98	47,66	N/A
9.	Persentase sekolah menengah pertama (SMP) yang terakreditasi minimal B	%	63,72	85,10	88,37
10.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 13-15 Tahun	Poin	867	1.724	736
11.	Guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4	%	82,97	76,90	79,05

Sumber : Dinas Pendidikan, 2021

- **APK PAUD**

APK PAUD adalah jumlah siswa pada jenjang PAUD/TK/RA/penitipan anak dibandingkan dengan jumlah anak pada rentang usia 4-6 tahun. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa APK PAUD di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Bogor menyadari akan pentingnya pendidikan terhadap anak yang dimulai sedini mungkin.

Adapun persentase jumlah siswa PAUD/TK/RA terhadap jumlah anak usia 4-6 tahun di tahun 2018 sebesar 43,33 persen. Kemudian mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 68,58 persen, namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 42,62 persen.

- **APK SD/MI/Paket A**

APK SD/MI/Paket A adalah perbandingan antara jumlah siswa yang masih bersekolah di jenjang SD/MI/Paket A (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Adapun pada tahun 2018 APK SD/MI/Paket A di Kabupaten Bogor sebesar 97,45 poin. Kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 138,53 poin. Namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 95,87 poin

- **Angka Putus Sekolah (DO) SD-MI**

Angka Putus Sekolah (DO) SD-MI adalah persentase siswa yang meninggalkan sekolah sebelum naik tingkat atau lulus pada jenjang SD. Adapun pada tahun 2018 Angka Putus Sekolah (DO) SD-MI di Kabupaten Bogor sebesar 0,098 poin. Kemudian pada tahun 2019 berhasil ditekan menjadi 0,06 poin, namun pada tahun 2020 menjadi 0,30 poin.

- **Nilai Rata-rata UN dari SD**

Nilai Rata-rata UN dari SD adalah jumlah hasil nilai mata pelajaran pada sekolah jenjang SD se-Kabupaten Bogor dibagi dengan jumlah mata pelajaran yang diujikan. Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa Nilai Rata-rata UN dari SD di Kabupaten Bogor selama periode tahun 2018-2019 mengalami penurunan.

Tercatat bahwa Nilai Rata-rata UN dari SD pada tahun 2018 sebesar 74,6 poin, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 71,06 poin. Khusus tahun 2020, sehubungan dengan tidak diselenggarakannya proses belajar mengajar secara tatap muka karena pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan ditiadakannya pula penyelenggaraan UN di semua jenjang pendidikan.

- **Persentase SD yang Terakreditasi Minimal B**

Persentase sekolah jenjang SD yang terakreditasi minimal B adalah persentase dari jumlah sekolah SD yang terakreditasi B dengan jumlah sekolah jenjang SD pada wilayah tertentu. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor serius dalam memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat.

Adapun persentase sekolah jenjang SD yang terakreditasi minimal B pada tahun 2018 sebesar 78,17 persen. Kemudian pada tahun 2019 mengalami lonjakan menjadi 97,40 persen dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 97,25 persen.

- **APK SMP/MTs/Paket B**

APK SMP/MTs/Paket B adalah perbandingan antara jumlah siswa yang masih bersekolah di jenjang SMP (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Adapun pada tahun 2018 APK SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Bogor sebesar 92,69 poin. Kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 227,22 poin, namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 94,51 poin.

- **Angka Putus Sekolah (DO) SMP-MTs**

Angka Putus Sekolah (DO) SMP-MTs adalah persentase siswa yang meninggalkan sekolah sebelum naik tingkat atau lulus pada jenjang SMP. Adapun pada tahun 2018 Angka Putus Sekolah (DO) SMP-MTs di Kabupaten Bogor sebesar 0,273 poin. Kemudian pada tahun 2019 berhasil ditekan menjadi 0,20 poin, namun pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi 0,27 poin.

- **Nilai Rata-rata UN dari SMP**

Nilai Rata-rata UN dari SMP adalah jumlah hasil nilai mata pelajaran pada sekolah jenjang SMP se-Kabupaten Bogor dibagi dengan jumlah mata pelajaran yang diujikan. Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa Nilai Rata-rata UN dari SMP di Kabupaten Bogor selama periode tahun 2018-2019 mengalami penurunan.

Tercatat bahwa Nilai Rata-rata UN dari SMP pada tahun 2018 sebesar 49,98 poin, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 47,66 poin. Penurunan realisasi dari indikator ini disebabkan kurangnya pengetahuan peserta didik tentang soal-soal HOTS *(Higher Order Thinking Skill)* atau soal dengan kemampuan analisis tinggi yang dengan pengembangan model tersebut dapat menghasilkan anak-anak berkemampuan berpikir kritis, keterampilan berkomunikasi baik, berkolaborasi, berpikir kreatif, dan percaya diri, selain itu simulasi UNBK pada sekolah yang menyelenggarakan UNBK belum maksimal.

Khusus tahun 2020, sehubungan dengan tidak diselenggarakannya proses belajar mengajar secara tatap muka karena pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan ditiadakannya pula penyelenggaraan UN di semua jenjang pendidikan.

- **Persentase SMP yang Terakreditasi Minimal B**

Persentase SMP yang terakreditasi minimal B adalah persentase dari jumlah sekolah SMP yang terakreditasi B dengan jumlah sekolah jenjang SMP pada wilayah tertentu. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor serius dalam memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat.

Adapun persentase sekolah jenjang SMP yang terakreditasi minimal B pada tahun 2018 sebesar 63,72 persen. Kemudian pada tahun 2019 mengalami lonjakan menjadi 85,10 persen dan pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi 88,37 persen.

- **APS Penduduk Usia 13-15 tahun**

APS penduduk usia 13-15 tahun adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah 13-15 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Adapun capaian APS penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 sebesar 867 orang. Kemudian pada tahun 2019 mengalami lonjakan menjadi 1.724 orang, namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 736 orang.

- **Guru yang Memenuhi Kualifikasi Akademik S1/D4**

Salah satu komponen penting dalam aspek pelayanan wajib pendidikan adalah adanya peningkatan kualifikasi guru yang akan berdampak positif pada peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 adalah jumlah guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 dibagi jumlah guru pada suatu wilayah tertentu.

Pada tahun 2018, persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi mengajar yang ditandai dengan terpenuhinya latar belakang pendidikan S1/D4 tercatat sebesar 82,97 persen. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 76,90 persen dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 79,05 persen.

B. Kesehatan

Sektor kesehatan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia, sama hal nya dengan sektor pendidikan. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesehatan dapat dilihat dari indikator kinerja pada tabel berikut ini :

Tabel 2.55
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2018 - 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020
1.	Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	87,73	88,87	85,00
2.	Prevalensi Stunting	%	0,329	19,08	12,86
3.	Cakupan Keluarga Bebas Rokok	%	50,08	50,37	52,10
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	78,22	78,72	78,76
5.	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	%	0,871	0,900	0,651

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

- **Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan adalah ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan resmi seperti puskesmas atau rumah sakit. Faktor pendukungnya adalah adanya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas di skala puskesmas, kemudian terdapat ruang tunggu kelahiran dan alat transportasi yang memadai untuk membawa ibu yang akan melahirkan.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini bergerak secara fluktuatif yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tercatat pada tahun 2018 realisasi indikator ini mencapai 87,73 persen, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 88,87 persen. Namun pada tahun 2020 capaian indikator ini kembali mengalami penurunan menjadi 85,00 persen.

Alasan rendahnya capaian indikator ini di Kabupaten Bogor, karena masih tingginya kepercayaan ibu dan keluarga kepada kemampuan paraji dalam membantu proses persalinan. Kemudian alasan lainnya yaitu faktor geografis dan faktor ekonomi, dimana secara geografis wilayah Kabupaten Bogor sangat luas sehingga masih banyak daerah yang berada di luar jangkauan tenaga kesehatan. Selanjutnya mengenai faktor ekonomi tentu alasannya terkait dengan biaya persalinan yang lebih murah jika dilakukan di rumah dibandingkan dengan persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan.

Berdasarkan alasan tersebut, maka dapat disimpulkan solusi atas permasalahan sebagaimana dimaksud, yaitu : (1) perlu adanya kebijakan yang mengatur agar persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan; (2) meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk membantu mensosialisasikan persalinan melalui fasilitas kesehatan; (3) mengoptimalkan pemanfaatan kelas ibu hamil sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman keluarga, khususnya ibu hamil untuk bersalin di fasilitas kesehatan; dan (4) melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada dukun paraji untuk menjadi mitra bidan dalam mendorong ibu hamil agar melakukan proses persalinan di fasilitas kesehatan.

- **Prevalensi Stunting**

Prevalensi stunting merupakan kondisi yang menggambarkan gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis yang berdampak pada pertumbuhannya. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 capaian indikator ini menunjukkan tren yang positif. Tercatat pada tahun 2019 realisasinya sebesar 19,08 persen, kemudian pada tahun 2020 capaiannya berhasil ditekan sebesar 6,22 persen atau menjadi 12,86 persen dengan tingkat capaian sebesar 33,00 persen dari tahun sebelumnya.

Keberhasilan Kabupaten Bogor dalam menekan angka prevalensi stunting tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan melalui dua intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik yang dilakukan oleh sektor kesehatan dalam mengatasi penyebab langsung kekurangan gizi kronis pada anak balita dengan fokus 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai dari ibu hamil sampai dengan anak usia 2 tahun. Kemudian upaya lainnya yaitu intervensi gizi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung kekurangan gizi kronis pada anak balita yang dilakukan di luar sektor kesehatan. Faktor lain yang mendukung upaya tersebut adalah keseriusan dari pemerintah daerah dalam menekan angka prevalensi stunting di Kabupaten Bogor yang komitmennya ditunjukkan melalui penerbitan Instruksi Bupati Nomor 440/884 tentang Intervensi Stunting Terintegrasi dan SK Tim Koordinasi Nomor 44/294/Kpts/per-UU/2019 tentang Pelaksanaan Aksi Integrasi Stunting.

- **Cakupan Keluarga Bebas Rokok**

Cakupan keluarga bebas rokok merupakan indikator yang menggambarkan bahwa seluruh anggota keluarga bebas asap rokok alias tidak merokok sama sekali. Keluarga harus mendapatkan pelayanan untuk berhenti merokok di puskesmas atau fasilitas kesehatan lain yang terdekat. Kemudian melalui terbitnya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bogor, seharusnya ada pula larangan untuk merokok di tempat umum seperti sekolah, tempat ibadah dan perkantoran.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini bergerak secara fluktuatif dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tercatat pada tahun 2018 realisasi indikator ini

mencapai 50,08 persen. Kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 50,37 persen, dan pada tahun 2020 capaian indikator ini kembali mengalami peningkatan 52,10 persen.

Belum optimalnya capaian untuk indikator ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok, serta minimnya tingkat kepedulian masyarakat akan arti pentingnya masalah kesehatan. Kemudian dari segi tenaga kesehatan, masih kurangnya SDM petugas promosi kesehatan di puskesmas yang menjadi salah satu kendala dalam upaya promosi kesehatan tentang bahaya rokok terhadap kesehatan. Selanjutnya dibutuhkan upaya dalam peningkatan kualitas tenaga promosi kesehatan dalam hal advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian target keluarga bebas asap rokok. Upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud diantaranya : (1) perlu adanya kebijakan koordinatif yang mendukung operasionalisasi pembinaan keluarga bebas asap rokok; (2) terlaksananya advokasi terhadap pemerintah, kecamatan dan pihak-pihak lain untuk mendukung pembinaan keluarga bebas asap rokok; (3) terlaksananya sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR), baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan; (4) terselenggaranya kemitraan lingkup kabupaten yang mendukung pembinaan keluarga bebas asap rokok; dan (5) adanya pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di semua tatanan yang terintegrasi secara berjenjang. Sedangkan di tingkat kecamatan upaya yang dilakukan antara lain : (1) terkoordinasinya penerapan kebijakan terkait dengan pembinaan keluarga bebas asap rokok; (2) terlaksananya advokasi dengan camat terkait hasil PHBS, aparat desa dan kelurahan serta pihak-pihak lain untuk mendukung pembinaan PHBS di 7 (tujuh) tatanan; (3) terlaksananya sosialisasi tentang Perda KTR di tingkat desa maupun kelurahan yang ada di wilayah kerja Puskesmas; (4) terselenggaranya kemitraan lingkup kecamatan yang mendukung pembinaan keluarga bebas asap rokok; dan (5) adanya pembinaan PHBS di 7 (tujuh) tatanan yang terintegrasi secara berjenjang.

- **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator yang menggambarkan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tercatat pada tahun 2018 realisasi indikator ini sebesar 78,22 persen, kemudian pada tahun 2019 capaiannya mengalami peningkatan menjadi 78,72 persen. Selanjutnya pada tahun 2020 capaian indikator ini kembali mengalami peningkatan menjadi 78,76 persen. Peningkatan cakupan IKM bidang kesehatan di Kabupaten Bogor ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas layanan kesehatan, baik di fasilitas kesehatan dasar maupun fasilitas kesehatan rujukan.

- **Cakupan Desa/Kelurahan UCI**

Indikator cakupan desa/kelurahan UCI menggambarkan cakupan imunisasi dasar lengkap secara merata pada bayi di seluruh desa/kelurahan. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 capaian indikator ini mengalami penurunan yang signifikan. Tercatat pada tahun 2019 realisasinya mencapai 0,900 persen, namun pada tahun 2020 capaiannya menurun tajam menjadi 0,651 persen. Penurunan capaian indikator ini diakibatkan oleh penyebaran virus Covid-19 yang menyebabkan terhentinya managemen program imunisasi berupa *defaulter tracking* (pencarian anak-anak yang telah mendapat imunisasi dosis pertama atau dapat layanan/akses tetapi tidak datang lagi untuk imunisasi selanjutnya).

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.56
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2018 - 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020
1.	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	%	86,41	83,37	82,12
2.	Persentase cakupan pelayanan infrastruktur penyehatan lingkungan	%	N/A	51,33	51,51
3.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	67,74	66,81	68,94
4.	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	1,90	1,58	1,58

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

- **Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Baik dan Sedang**

Berdasarkan tabel 2.56 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 2018 realisasi indikator ini mencapai 86,41 persen, kemudian pada tahun 2019 dan tahun 2020 capaiannya mengalami penurunan yang masing-masing menjadi sebesar 83,37 persen dan 82,12 persen.

- **Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan**

Berdasarkan tabel 2.56 diketahui bahwa selama periode dua tahun yaitu tahun 2019 dan 2020, capaian indikator persentase cakupan pelayanan infrastruktur penyehatan lingkungan mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2019 realisasinya sebesar 51,33 persen, dan pada tahun 2020 capaian indikator ini mengalami kenaikan menjadi 51,51 persen.

- **Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik**

Berdasarkan tabel 2.56 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik mengalami fluktuasi. Tercatat pada tahun 2018 realisasi indikator ini mencapai 67,74 persen, kemudian pada tahun 2019 capaiannya mengalami penurunan sebesar 66,81 persen, dan tahun 2020 capaiannya mengalami peningkatan sebesar 68,94 persen.

➢ **Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Berdasarkan tabel 2.56 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator persentase luasan ruang terbuka hijau (RTH mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 2018 realisasi indikator ini mencapai 1,90 persen, kemudian pada tahun 2019 dan tahun 2020 capaiannya mengalami penurunan yang masing-masing menjadi sebesar 1,58 persen.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2018 - 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020
1.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	93,61	94,64	94,99
2.	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	0,042	0,060	0,059
3.	Persentase jumlah bidang tanah/lahan terdaftar menjadi tanah/lahan bersertifikat	%	71,95	75,00	78,55

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2021

➢ **Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni**

Indikator ini ditujukan untuk mengukur capaian penyediaan rumah layak huni bagi penduduk Kabupaten Bogor. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2018 realisasi indikator ini mencapai 93,61 persen, kemudian pada tahun 2019 dan tahun 2020 capaiannya mengalami peningkatan yang masing-masing menjadi sebesar 94,64 persen dan 94,99 persen.

➢ **Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh**

Indikator ini ditujukan untuk mengukur luasan lingkungan permukiman kumuh yang diharapkan dapat dikurangi setiap tahunnya. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun

capaian indikator ini cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tercatat pada tahun 2018 realisasinya sebesar 0,042 persen, dan pada tahun 2019 capaian indikator ini mengalami peningkatan menjadi 0,06 persen. Kemudian pada tahun 2020 capaian indikator ini menjadi sebesar 0,059 persen.

- **Persentase Jumlah Bidang Tanah/Lahan Terdaftar Menjadi Tanah/Lahan Bersertifikat**

Indikator ini diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan terkait masih banyaknya tanah milik pemerintah dan masyarakat yang belum bersertifikat. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2018 realisasinya mencapai 71,95 persen, dan pada tahun 2019 capaiannya mengalami peningkatan menjadi 75,00 persen. Selanjutnya pada tahun 2020 capaian indikator ini kembali mengalami peningkatan menjadi 78,55 persen.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	76,52	76,44	76,45
2.	Persentase korban bencana yang selamat	%	N/A	99,98	99,98
3.	Persentase masyarakat yang mendapat rehabilitasi rekonstruksi	%	N/A	88,09	59,23
4.	Persentase kapasitas masyarakat Siap Siaga Kebakaran	%	N/A	9,08	11,49
5.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten dan Perbatasan	%	N/A	51,56	47,69
6.	Persentase inspeksi pengawasan dan proteksi kebakaran	%	N/A	10,00	14,67

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran, 2020

- **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Berdasarkan tabel 2.58 diketahui bahwa capaian indikator nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2018 sebesar 76,52 poin. Kemudian pada tahun 2019 capaian indikator ini mengalami penurunan menjadi 76,44 poin, dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 12,69 persen atau menjadi 76,45 poin.

- **Persentase Korban Bencana Yang Selamat**

Pada tahun 2019 diketahui bahwa capaian indikator persentase korban bencana yang selamat sebesar 99,98 persen. Kemudian pada tahun 2020 capaian indikator ini masih sama dengan capaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 99,98 persen.

- **Persentase Masyarakat yang Mendapat Rehabilitasi Rekonstruksi**

Persentase masyarakat yang mendapat rehabilitasi rekonstruksi adalah membangun kembali perumahan, harta kekayaan, termasuk tanah produktif dan prasarana umum di lokasi atau lahan lain. Dalam proses rehabilitasi dan relokasi kondisi daerah yang baru harus memenuhi syarat seperti kemudahan akses, bebas ancaman bencana banjir dan tanah longsor serta mata pencaharian para korban. Pada tahun 2019 indikator ini dapat terealisasi sebesar 88,09 persen dari target 100 persen. Namun pada tahun 2020 indikator ini hanya mencapai 59,23 persen dari target 100 persen. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa hal antara lain masyarakat yang terdampak bencana telah menerima bantuan dari pihak lain, ketidakinginan masyarakat untuk direlokasi dari lokasi kejadian bencana, dan keterlambatan pengembalian persyaratan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

- **Persentase Kapasitas Masyarakat Siap Siaga Kebakaran**

Persentase kapasitas masyarakat siap siaga kebakaran adalah angka yang menunjukan tingkat kemampuan anggota pemadam yang sudah mengikuti atau melakukan pelatihan baik di Kementerian Dalam Negeri ataupun pelatihan lainnya, dan masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan pemadam kebakaran yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran.

Berdasarkan tabel 2.58 diketahui bahwa pada tahun 2019 capaian indikator ini terealisasi sebesar 9,08 persen. Kemudian pada tahun 2020 naik

menjadi 11,49 persen atau mengalami peningkatan sebesar 26,54 persen dari tahun sebelumnya.

- **Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten dan Perbatasan**

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten dan perbatasan menggambarkan tingkat layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran yang berkaitan dengan *respon time* 15 menit dari jangkauan luas wilayah Kabupaten Bogor.

Berdasarkan data pada tabel 2.58 diketahui bahwa pada tahun 2019 capaian indikator melonjak melebihi target sebesar 23,58 persen atau menjadi 51,56 persen. Kemudian pada tahun 2020 capaian indikator ini kembali berhasil melampaui target sebesar 19,43 persen atau menjadi 47,69 persen.

- **Persentase Inspeksi Pengawasan dan Proteksi Kebakaran**

Persentase inspeksi pengawasan dan proteksi kebakaran menggambarkan tingkat layanan terhadap pengawasan bangunan gedung dan sarana umum. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2019 capaian indikator ini terealisasi sebesar 10,00 persen. Kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 14,67 persen atau mengalami peningkatan sebesar 46,70 persen dari tahun sebelumnya.

F. Sosial

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan bidang urusan sosial tidak terlepas dari permasalahan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Hal ini tampak dari merebaknya kasus-kasus permasalahan sosial, seperti perdagangan manusia *(trafficking)*, penyebaran virus *HIV* dan penyalahgunaan narkoba. Selain itu peran serta masyarakat dalam penanganan permasalahan sosial juga masih terlihat rendah, hal tersebut diakibatkan oleh pola pikir masyarakat yang masih menganggap tabu untuk mengungkap permasalahan sosial yang berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat. Mengenai indikator kinerja dalam bidang urusan sosial sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan Sosial Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020
1.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	N/A	0,42	0,80
2.	Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	16,73	14,75	6,33

Sumber : Dinas Sosial, 2021

- **Persentase PPKS yang Ditangani**

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani menunjukkan berapa persen PPKS yang mendapat penanganan oleh Dinas Sosial. Berdasarkan tabel 2.59 diketahui bahwa pada tahun 2019 capaian indikator ini terealisasi sebesar 0,42 persen, kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 0,80 persen.

- **Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**

Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas PSKS adalah persentase jumlah PSKS yang diberdayakan dan aktif dalam penanganan PPKS dengan jumlah PSKS yang ada dalam naungan Dinas Sosial. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2019 capaian indikator ini terealisasi sebesar 14,75 persen. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 6,33 persen atau turun sebesar 57,05 persen dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan *refocusing* anggaran dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

2.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020
1.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	49,2	12,78	18,26
2.	Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	%	25,00	15,00	10,00
3.	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	N/A	100,00	100,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021

- **Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta**

Indikator ini diperoleh dari hasil pembagian jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta dengan jumlah pekerja di lembaga swasta, yang kemudian hasilnya dipersentasekan dengan cara dikali 100. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2019 capaian indikator ini terealisasi sebesar 12,78 persen. Kemudian pada tahun 2020 capaiannya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 18,26 persen.

- **Persentase Terbentuknya Kecamatan Layak Anak**

Indikator ini diperoleh dari hasil pembagian jumlah kecamatan layak anak dibagi dengan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, yang kemudian hasilnya dipersentasekan dengan cara dikali 100. Diketahui bahwa pada tahun 2019 capaian untuk indikator ini sebesar 15,00 persen. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 10,00 persen.

- **Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu**

Indikator ini diperoleh dari hasil pembagian jumlah laporan kasus anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas unit pelayanan terpadu dengan laporan kasus anak korban kekerasan yang masuk di unit pelayanan terpadu, yang kemudian hasilnya dipersentasekan dengan cara dikali 100. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2019 dan 2020 capaian indikator ini mampu terealisasi sebesar 100 persen.

B. Pangan

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang sangat sensitif dan wajib diperhatikan oleh pemerintah daerah. Jika di suatu daerah terjadi krisis rawan pangan, tentu kondisi tersebut dapat memicu timbulnya permasalahan sosial lainnya. Adapun indikator kinerja dalam bidang urusan pangan di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pangan Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020
1.	Penanganan Desa Rawan Pangan	desa	N/A	19	40
2.	Ketersediaan Energi Per Kapita	%	102,26	104,11	103,90
3.	Ketersediaan Protein Per Kapita	%	143,68	141,70	127,95
4.	Ketersediaan Pangan Utama	%	63,00	43,88	58,00
5.	Skor Angka Kecukupan Energi	%	105,80	107,10	108,60
6.	Skor Angka Kecukupan Protein	%	110,90	115,40	119,51
7.	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	91,00	81,13	74,21
8.	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	%	91,00	85,71	92,86
9.	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	%	95,02	95,70	100,00
10.	Keamanan Pangan Segar yang Diuji	%	N/A	74,30	89,93

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2021

- **Penanganan Desa Rawan Pangan**

Indikator ini merupakan gambaran pencapaian tingkat penanganan pada daerah rawan pangan yang telah berhasil dicapai. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2019 telah ditangani desa rawan pangan di Kabupaten Bogor sebanyak 19 desa. Kemudian pada tahun 2020 penanganan desa rawan pangan di Kabupaten Bogor berhasil meningkat menjadi 40 desa atau naik sebesar 110,53 persen dari tahun sebelumnya.

- **Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita**

Indikator ini merupakan gambaran pencapaian tingkat ketersediaan energi dan protein per kapita yang telah berhasil dicapai. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2019 ketersediaan energi per kapita di Kabupaten Bogor dapat terealisasi sebesar 104,11 persen atau berhasil meningkat sebesar 1,85 persen dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun

2020 indikator ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 103,90 persen.

Selanjutnya untuk ketersediaan protein per kapita di Kabupaten Bogor, diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaiannya mengalami tren yang menurun. Hal tersebut disebabkan penurunan jumlah pangan sebagai sumber protein, baik hewani maupun nabati yang diakibatkan oleh adanya penurunan jumlah produksi dan pasokan pangan sumber protein di Kabupaten Bogor. Tercatat bahwa pada tahun 2018 indikator ini berhasil mencapai 143,68 persen, namun pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan yang masing-masing menjadi 141,70 persen dan 127,95 persen. Namun demikian angka ketersediaan energi dan protein tersebut sudah melebihi standar WNPG (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi), dimana AKE (Angka Kecukupan Konsumsi Kalori/Energi) sebesar 2.400 kkal/kapita/hari dan AKP (Angka Kecukupan Konsumsi Protein) sebesar 63 gram/kapita/hari.

- **Ketersediaan Pangan Utama**

Indikator ini berkaitan dengan perhitungan pencapaian tingkat ketersediaan pangan utama (padi/beras) yang berhasil dicapai. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu produk dalam negeri, pemasokan pangan dan pengelolaan cadangan pangan.

Berdasarkan tabel 2.61 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini cenderung mengalami fluktuasi. Tercatat pada tahun 2018 indikator ini berhasil mencapai 63,00 persen, namun pada tahun 2019 capaiannya mengalami penurunan menjadi 43,88 persen. Kemudian pada tahun 2020 indikator ini kembali mengalami peningkatan menjadi 58,00 persen.

- **Skor Angka Kecukupan Energi**

Indikator ini berkaitan dengan banyaknya asupan makanan yang seimbang dengan pengeluarannya, sesuai dengan susunan dan ukuran tubuh, tingkat kegiatan jasmani dalam keadaan sehat dan mampu menjalankan tugas kehidupan secara ekonomis dalam jangka waktu lama.

Berdasarkan tabel 2.61 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini menunjukkan tren yang positif. Tercatat pada tahun 2018 capaian indikator ini sebesar 105,80 persen. Kemudian pada tahun 2019 dan tahun 2020 capaiannya kembali mengalami peningkatan yang masing-masing menjadi 107,10 persen dan 108,60 persen.

Capaian kinerja tersebut masih termasuk kategori cukup, mengingat pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Bogor masih dominan mengutamakan sumber pangan (karbohidrat, lemak dan protein) sebagai penghasil energi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan daya beli, tingkat pendidikan dan akses keterjangkauan masyarakat di Kabupaten Bogor dalam pemenuhan kebutuhan pangan mereka yang dominan untuk pemenuhan sumber energi.

- **Skor Angka Kecukupan Protein**

Indikator ini berkaitan dengan kecukupan rata-rata zat gizi dalam sehari berdasarkan golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas fisik, genetik dan keadaan fisiologis untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, dengan rata-rata per kapita per hari untuk energi sebesar 2.000 kkal/kapita/hari dan protein sebesar 52 gram/kapita/hari.

Berdasarkan tabel 2.61 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini menunjukkan tren yang positif. Tercatat pada tahun 2018 capaian indikator ini sebesar 110,90 persen. Kemudian pada tahun 2019 dan tahun 2020 capaiannya kembali mengalami peningkatan yang masing-masing menjadi 115,40 persen dan 119,51 persen.

- **Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan**

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan berkaitan dengan perhitungan persentase jumlah sampel pangan aman yang dikonsumsi dengan jumlah total sampel pangan yang diuji. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaiannya mengalami tren yang menurun. Tercatat pada tahun 2018 indikator ini berhasil mencapai 91,00 persen, namun pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan yang masing-masing menjadi 81,13 persen dan 74,21 persen.

Walaupun demikian capaian ini termasuk dalam kategori **"Baik Sekali"**, mengingat Kabupaten Bogor memiliki wilayah yang cukup luas

dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Sementara itu, kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan masih sangat terbatas, baik dari segi penganggaran maupun jumlah sumber daya manusia untuk menangani pengawasan keamanan pangan yang beredar di Kabupaten Bogor. Sehingga dibutuhkan kesadaran masyarakat yang didasari oleh pengetahuan dan kemampuan daya beli dalam pemenuhan pangan yang aman.

- **Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan**

Indikator ini berkaitan dengan perhitungan pencapaian tingkat stabilitas harga dan pasokan pangan yang dicapai. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini bergerak secara fluktuatif, namun cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tercatat pada tahun 2018 realisasi indikator ini mencapai 91,00 persen, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 85,71 persen. Kemudian pada tahun 2020 capaian indikator ini kembali mengalami peningkatan menjadi 92,86 persen.

Selanjutnya, walaupun pada tahun 2019 realisasinya mengalami penurunan, namun capaian kinerjanya termasuk dalam kategori **"Baik Sekali"**. Penurunan kinerja ini dikarenakan pada tahun 2019 telah terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi terhadap 2 (dua) komoditas, yaitu cabai dan bawang putih yang membuat stabiltas harga dan pasokan pangan menjadi tidak stabil.

- **Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah**

Indikator ini berkaitan dengan cadangan pangan pemerintah kabupaten dan desa yang perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan dengan memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat terpenuhi.

Berdasarkan tabel 2.61 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini menunjukkan tren yang positif. Tercatat pada tahun 2018 capaian indikator ini sebesar 95,02 persen. Kemudian pada tahun 2019 dan tahun 2020 capaiannya kembali mengalami peningkatan yang masing-masing menjadi 95,70 persen dan 100,00 persen.

➢ **Keamanan Pangan Segar yang Diuji**

Berdasarkan tabel 2.61 diketahui bahwa selama periode tahun 2019 sampai dengan 2020 capaian indikator ini mengalami kenaikan yang signifikan. Tercatat pada tahun 2019 capaian indikator ini sebesar 74,30 persen. Kemudian pada tahun 2020 capaiannya kembali mengalami peningkatan menjadi 89,93 persen atau naik sebesar 15,63 persen dengan tingkat capaian sebesar 21,04 persen dari tahun sebelumnya.

C. Lingkungan Hidup

Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan lingkungan hidup di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020
1.	Capaian Penanganan Pengelolaan Sampah	%	28,21	19,00	28,73
2.	Indeks Kualitas Udara	poin	62,69	68,40	71,92
3.	Indeks Kualitas Air	poin	47,91	48,37	48,37
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	poin	40,71	39,65	44,97

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

➢ **Capaian Penanganan Pengelolaan Sampah**

Berdasarkan tabel 2.62 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini bergerak secara fluktuatif, dimana pada tahun 2018 realisasi indikator ini mencapai 28,21 persen, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 19,00 persen. Kemudian pada tahun 2020 capaian indikator ini kembali mengalami peningkatan menjadi 28,73 persen.

➢ **Indeks Kualitas Udara**

Berdasarkan tabel 2.62 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tercatat pada tahun 2018 realisasi indikator ini mencapai 62,69 poin dan meningkat lagi mencapai 68,40 pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 capaian indikator ini juga mengalami peningkatan hingga mencapai 71,92 poin.

- **Indeks Kualitas Air**

Berdasarkan tabel 2.62 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2019, namun stagnan pada tahun 2019-2020. Tercatat pada tahun 2018 realisasi indikator ini sebesar 47,91 poin, kemudian meningkat sebanyak 0,46 poin pada tahun 2019 menjadi 48,37 poin. Kemudian pada tahun 2020 capaian indikator ini tidak mengalami perubahan, tetap pada 48,37 poin.

- **Indeks Kualitas Tutupan Lahan**

Berdasarkan tabel 2.62 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini menunjukkan tren yang cukup fluktuatif dimana mengalami penurunan pada tahun 2019 namun kembali naik pada tahun 2020. Tercatat pada tahun 2018 realisasi indikator ini mencapai 40,71 poin, namun pada tahun 2019 realisasinya mengalami penurunan menjadi 39,65 poin. Kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 44,97 poin.

D. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Bogor dapat digambarkan melalui tertibnya administrasi kependudukan. Bentuk tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.63
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020
1.	Cakupan penerbitan KTP	%	100,00	100,00	100,00
2.	Cakupan penerbitan akta kelahiran anak	%	92,23	94,89	80,27
3.	Persentase permohonan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil yang diterbitkan berbasis NIK	%	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

- **Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**

Cakupan penerbitan KTP merupakan hasil persentase yang diperoleh dari jumlah kepemilikan KTP elektronik penduduk Kabupaten Bogor terhadap jumlah wajib KTP penduduk Kabupaten Bogor yang berpedoman pada data konsolidasi bersih Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan data pada tabel 2.63 diketahui bahwa capaian untuk indikator ini selalu berhasil mencapai 100,00 persen selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

- **Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Anak**

Cakupan penerbitan akta kelahiran anak diperoleh dari perhitungan dengan cara membandingkan jumlah penerbitan akta kelahiran anak Kabupaten Bogor dengan jumlah keseluruhan anak lahir di Kabupaten Bogor yang bersumber dari data konsolidasi bersih Kementerian Dalam Negeri semester 2 tahun 2020. Berdasarkan hasil pengolahan data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) akhir bulan Desember 2020, diketahui untuk jumlah kepemilikan akta kelahiran anak terhitung sebanyak 1.339.818 orang, sedangkan jumlah keseluruhan anak di Kabupaten Bogor sebanyak 1.669.236 orang sehingga diperoleh realisasi indikatornya sebesar 80,27 persen, sebagaimana diketahui pada tabel di atas bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator terakhir bergerak secara fluktuatif mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Tercatat pada tahun 2018 realisasi indikator ini berhasil mencapai 92,23 persen, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 94,89 persen. Namun pada tahun 2020 capaian indikator ini kembali mengalami penurunan menjadi 80,27 persen. Hal ini diakibatkan oleh pembatasan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka penanggulangan penyebaran virus Covid-19, serta dampak dari meningkatnya jumlah anak usia 0 – 18 tahun yang menjadi target pencapaian dengan sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dari sebesar 1.296.370 pada tahun 2019 menjadi 1.669.236 di tahun 2020 atau bertambah sebanyak 372.866 jiwa.

- **Persentase Permohonan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang Diterbitkan Berbasis NIK**

Persentase permohonan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil yang diterbitkan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan hasil persentase yang diperoleh dari jumlah permohonan dokumen kependudukan yang diterbitkan berbasis NIK dalam SIAK terhadap jumlah permohonan penerbitan dokumen kependudukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa capaian untuk indikator ini selalu berhasil mencapai 100,00 persen selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

E. Perhubungan

Permasalahan dalam bidang urusan perhubungan di Kabupaten Bogor terjadi akibat pertumbuhan kendaraan yang cukup tinggi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,00 persen per tahun. Hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah panjang ruas jalan yang ada, sehingga jika terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya pada jam sibuk, ditambah dengan adanya hambatan di samping jalan maka akibatnya dapat menyebabkan kemacetan hampir di setiap ruas jalan.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perhubungan memberikan pelayanan dalam bidang urusan perhubungan yang dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Perhubungan Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020
1.	Tingkat kinerja pelayanan lalu lintas (V/C rasio)	poin	0,82	0,82	0,82
2.	Persentase layanan angkutan darat	%	58	65	65

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

- **Tingkat Kinerja Pelayanan Lalu Lintas (V/C rasio)**

Tingkat kinerja pelayanan lalu lintas adalah suatu ketentuan atau ukuran dalam mengukur kualitas perjalanan terhadap gambaran kondisi operasional arus lalu lintas dan pengendara dalam kecepatan, waktu tempuh,

kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Nilai dari tingkat pelayanan akan berubah seiring dengan adanya peningkatan volume lalu lintas di suatu ruas jalan, *level of service* ini dapat dijadikan sebagai suatu parameter terhadap pelayanan pada suatu arus lalu lintas.

Berdasarkan tabel 2.64 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun indikator ini mengalami peningkatan kualitas pelayanan yang ditunjukkan dengan semakin kecilnya capaian dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tercatat pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 V/C rasio stagnan atau tetap berada di posisi yang sama, yaitu sebesar 0,82 persen.

- **Persentase Layanan Angkutan Darat**

Berdasarkan tabel 2.64 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tercatat pada tahun 2018 realisasi indikator ini sebesar 58 persen, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 65 persen. Namun pada tahun 2020 capaian indikator ini stagnan atau tetap berada pada capaian seperti tahun sebelumnya yaitu sebesar 65 persen.

F. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.65
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020
1.	Persentase koperasi aktif dan sehat	%	31,61	35,68	35,44
2.	Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan menjadi Usaha Kecil	unit	N/A	88	20

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 2021

- **Persentase Koperasi Aktif dan Sehat**

Koperasi aktif dan sehat adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun

terakhir melakukan kegiatan usaha. Semakin besar jumlah persentase ini maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi.

Berdasarkan tabel 2.65 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini bergerak secara fluktuatif, namun cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tercatat pada tahun 2018 realisasi indikator ini sebesar 31,61 persen, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 35,68 persen. Namun pada tahun 2020 capaian indikator ini kembali mengalami penurunan menjadi 35,44 persen.

- **Jumlah Usaha Mikro yang Dikembangkan Menjadi Usaha Kecil**

Jumlah usaha mikro yang dikembangkan menjadi usaha kecil adalah angka yang menunjukan jumlah usaha mikro yang dikembangkan menjadi usaha kecil. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, capaian indikator ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tercatat pada tahun 2019 usaha mikro yang dikembangkan menjadi usaha kecil di Kabupaten Bogor sebanyak 88 unit. Namun pada tahun 2020 capaian indikator ini hanya mampu terealisasi sebanyak 20 unit. Kondisi ini terjadi karena masalah keterbatasan anggaran akibat adanya kebijakan *refocusing* anggaran dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

G. Penanaman Modal

Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan penanaman modal di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.66
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Penanaman Modal Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020
1.	Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN :	Triliun Rp	8,69	9,18	9,16
	- PMA	Triliun Rp	5,05	4,76	2,86
	- PMDN	Triliun Rp	3,64	4,41	6,30
2.	Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN :	perusahaan	331	328	357
	- PMA	perusahaan	173	196	150
	- PMDN	perusahaan	158	132	207

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020
3.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/Perusahaan)	rasio	20,00	29,00	10,80
4.	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi PMDN	%	98,4	21,10	42,86
5.	Rata-rata waktu penyelesaian perizinan melalui OPTIMIS (Hari Kerja)	hari	3-10	5	5
6.	Perizinan Non OSS Berstandar ISO	izin	77	43	N/A

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

- **Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN**

Jumlah nilai investasi Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA/PMDN) dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Banyaknya investasi PMDN berskala nasional dengan banyaknya investasi PMA berskala nasional dihitung dari total nilai investasi yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan.

Berdasarkan tabel 2.66 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini bergerak secara fluktuatif, namun cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tercatat pada tahun 2018 realisasi indikator ini sebesar Rp 8,69 triliun dengan kontribusi dari PMA sebesar Rp 5,05 triliun dan PMDN sebesar Rp 3,64 triliun. Kemudian pada tahun 2019 jumlah nilai investasi di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan menjadi Rp 9,18 triliun dengan kontribusi dari PMA sebesar Rp 4,76 triliun dan PMDN sebesar Rp 4,41 triliun. Selanjutnya pada tahun 2020 capaian indikator ini kembali mengalami penurunan menjadi Rp 9,16 triliun dengan kontribusi dari PMA sebesar Rp 2,86 triliun dan PMDN sebesar Rp 6,30 triliun.

- **Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN**

Berdasarkan tabel 2.66 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini bergerak secara fluktuatif, namun cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tercatat jumlah investor bersakala nasional di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 sebanyak 331 perusahaan yang terdiri dari 173 perusahaan PMA dan 158 perusahaan PMDN. Kemudian pada tahun 2019 capaian indikator ini menurun menjadi 328 perusahaan yang terdiri dari 196 perusahaan PMA dan

132 perusahaan PMDN. Selanjutnya pada tahun 2020 tercatat jumlah investor bersakala nasional di Kabupaten Bogor sebanyak 357 perusahaan yang terdiri dari 150 perusahaan PMA dan 207 perusahaan PMDN.

- **Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/Perusahaan)**

Berdasarkan tabel 2.66 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini bergerak secara fluktuatif, namun cenderung mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tercatat rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 sebesar 20,00 orang/perusahaan. Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 9,00 persen menjadi 29,00 orang/perusahaan. Namun indikator ini kembali mengalami penurunan yang signifikan sebesar 18,20 persen dari tahun sebelumnya atau menjadi 10,80 orang/perusahaan pada tahun 2020.

- **Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi PMDN**

Berdasarkan tabel 2.66 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini bergerak secara fluktuatif, namun cenderung mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tercatat bahwa kenaikan/penurunan nilai realisasi investasi PMDN di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 sebesar 98,40 persen. Kemudian mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 21,10 persen pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 indikator ini kembali mengalami kenaikan menjadi 42,86 persen.

H. Pemuda dan Olahraga

Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan pemuda dan olahraga di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.67
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020
1.	Persentase pemuda binaan Dispora yang berwirausaha	%	N/A	2,00	0,98
2.	Jumlah Atlet berpretasi	atlet	N/A	84,00	N/A
3.	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga (GOM, Stadion, *Venue* cabang olahraga dan *Sport Center* Karadenan) yang dibangun	unit	N/A	1,00	N/A

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021

- **Persentase Pemuda Binaan Dispora yang Berwirausaha**

Berdasarkan tabel 2.67 diketahui bahwa capaian indikator ini mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Tercatat bahwa persentase pemuda binaan Dispora yang berwirausaha di Kabupaten Bogor pada tahun 2019 sebesar 2,00 persen. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,98 persen.

- **Jumlah Atlet Berpretasi**

Tercatat bahwa jumlah atlet berpretasi di Kabupaten Bogor pada tahun 2019 sebanyak 84 atlet. Kemudian pada tahun 2020 tidak ada realisasi dikarenakan adanya pembatalan di berbagai *event* akibat dampak pandemi Covid-19.

- **Jumlah Sarana Prasarana Olahraga (GOM, Stadion, *Venue* Cabang Olahraga dan *Sport Center* Karadenan) yang dibangun**

Berdasarkan tabel 2.67 diketahui bahwa jumlah sarana prasarana olahraga (GOM, stadion, *venue* cabang olahraga dan *sport center* karadenan) yang dibangun di Kabupaten Bogor pada tahun 2019 sebanyak 1 unit sarana prasarana olahraga. Kemudian pada tahun 2020 tidak ada realisasi dikarenakan adanya kebijakan *refocusing* anggaran dalam rangka penanggulangan Covid-19.

I. Kebudayaan

Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan kebudayaan di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.68
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kebudayaan Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020
1.	Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	unit	N/A	65	65

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2021

- **Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan**

Berdasarkan tabel 2.68 diketahui bahwa capaian indikator ini tidak mengalami perubahan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Hal ini

dikarenakan kebijakan *refocusing* anggaran akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020, sehingga terbatasnya anggaran dalam mendukung pencapaian indikator tersebut.

J. Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan perpustakaan di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.69
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Perpustakaan Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020
1.	Persentase Pengunjung perpustakaan	%	1,30	1,31	0,68

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2021

➢ Persentase Pengunjung Perpustakaan

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam 1 (satu) tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung.

Persentase pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bogor mengalami fluktuasi selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tercatat bahwa pada tahun 2018 capaian indikator ini sebesar 1,30 persen. Kemudian mengalami peningkatan menjadi 1,31 persen pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 persentase pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bogor mengalami penurunan menjadi 0,68 persen. Faktor penyebab penurunan kinerja sasaran tersebut adalah sama halnya dengan penyebab tidak tercapainya sasaran urusan perpustakaan yaitu kejadian bencana nasional (pandemi covid-19) dan dikeluarkannya kebijakan PSBB baik tingkat pusat maupun daerah pada triwulan II s.d IV tahun 2020, disertai juga

dikeluarkannya kebijakan *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan pandemi tersebut sehingga berdampak pada pembatalan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sehingga target kinerja persentase pengunjung perpustakaan tidak terealisasi.

2.3.3. Layanan Urusan Pilihan

A. Pariwisata

Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan pariwisata di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.70
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pariwisata Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	wisatawan	7.513.209	9.720.585	4.469.286

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2021

- **Jumlah Kunjungan Wisatawan**

Berdasarkan tabel 2.70 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini bergerak secara fluktuatif, namun mengalami penurunan yang drastis dari capaian tahun 2019 ke tahun 2020. Tercatat bahwa jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 sebanyak 7.513.2090 wisatawan. Kemudian mengalami peningkatan menjadi 9.720.585 wisatawan pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 indikator ini mengalami penurunan yang sangat signifikan akibat adanya pandemi Covid-19 sebesar 54,02 persen atau menjadi 4.469.286 wisatawan.

B. Pertanian

Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan pertanian di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.71
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan Pertanian Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020
1.	Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan :				
	- Produksi padi	Ton GKG	545.418	509.119	477.255
	- Produksi palawija	Ton	162.190	150.076	144.424
	- Produksi sayuran	Ton	95.252	115.193	112.493
	- Produksi buah-buahan	Ton	131.369	123.135	106.555
	- Produksi tanaman hias bunga	Tangkai	4.389.308	5.358.377	4.060.663
	- Produksi tanaman hias daun indah	Pohon	527.119	860.298	750.257
	- Produksi tanaman obat	Ton	11.228	10.447	9.539
	- Produksi tanaman perkebunan	Ton	7.939	7.617,61	8.602
2.	Produktivitas padi dan bahan pangan utama lainnya :				
	- Produktivitas padi sawah	ku/ha	63,25	62,70	62,53
	- Produktivitas padi gogo	ku/ha	32,58	33,90	34,36
	- Produktivitas palawija	ku/ha	172,02	171,98	172,91
	- Produktivitas sayuran	ku/ha	116,05	134,39	128,32
3.	Persentase rata-rata nilai tambah tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	N/A	5,00	6,84
4.	Jumlah kelembagaan kelompok tani yang terbentuk	kelompok	0	10	25

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2021

➢ **Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**

Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Bogor mengalami penurunan di beberapa unit produksi seperti yang disajikan pada tabel di atas sebagai berikut :

- Produksi padi adalah jumlah output atau hasil panen padi dari luas lahan tertentu selama satu tahun dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) yang diukur dalam satuan ton. Tercatat bahwa pada tahun 2018 produksi padi sebesar 545.418 ton GKG. Kemudian mengalami penurunan menjadi 509.119 ton GKG pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 produksi padi di Kabupaten Bogor kembali mengalami penurunan menjadi 477.255 ton GKG.
- Produksi palawija adalah jumlah output atau hasil panen palawija dari luas lahan tertentu selama satu tahun yang diukur dalam satuan ton. Tercatat bahwa pada tahun 2018 produksi palawija sebesar 162.190 ton. Kemudian mengalami penurunan menjadi 150.076 ton pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 produksi palawija di Kabupaten Bogor kembali mengalami penurunan menjadi 144.424 ton.

- Produksi sayuran adalah jumlah output atau hasil panen sayuran dari luas lahan tertentu selama satu tahun yang diukur dalam satuan ton. Tercatat bahwa pada tahun 2018 produksi sayuran sebesar 95.252 ton. Kemudian mengalami peningkatan menjadi 115.193 ton pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 produksi sayuran di Kabupaten Bogor kembali mengalami penurunan menjadi 112.493 ton.
- Produksi buah-buahan adalah jumlah output atau hasil panen buah-buahan dari luas lahan tertentu selama satu tahun yang diukur dalam satuan ton. Tercatat bahwa pada tahun 2018 produksi buah-buahan sebesar 131.369 ton. Kemudian mengalami penurunan menjadi 123.135 ton pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 produksi buah-buahan di Kabupaten Bogor kembali mengalami penurunan menjadi 106.555 ton.
- Produksi tanaman hias bunga adalah jumlah output atau hasil panen tanaman hias bunga dari luas lahan tertentu selama satu tahun yang diukur dalam satuan tangkai. Tercatat bahwa pada tahun 2018 produksi tanaman hias bunga sebanyak 4.389.308 tangkai. Kemudian mengalami peningkatan menjadi 5.358.377 tangkai pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 produksi tanaman hias bunga di Kabupaten Bogor kembali mengalami penurunan menjadi 4.060.663 tangkai.
- Produksi tanaman hias daun indah adalah jumlah output atau hasil panen tanaman hias daun indah dari luas lahan tertentu selama satu tahun yang diukur dalam satuan pohon. Tercatat bahwa pada tahun 2018 produksi tanaman hias bunga sebanyak 527.119 pohon. Kemudian mengalami peningkatan menjadi 860.298 pohon pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 produksi tanaman hias bunga di Kabupaten Bogor kembali mengalami penurunan menjadi 750.257 pohon.
- Produksi tanaman obat adalah jumlah output atau hasil panen tanaman obat dari luas lahan tertentu selama satu tahun yang diukur dalam satuan ton. Tercatat bahwa pada tahun 2018 produksi tanaman obat sebanyak 11.228 ton. Kemudian mengalami penurunan menjadi 10.447 ton pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 produksi tanaman obat di Kabupaten Bogor kembali mengalami penurunan menjadi 9.539 ton.

- Produksi tanaman perkebunan adalah jumlah output atau hasil panen tanaman perkebunan dari luas lahan tertentu selama satu tahun yang diukur dalam satuan ton. Tercatat bahwa pada tahun 2018 produksi tanaman perkebunan sebanyak 7.939 ton. Kemudian mengalami penurunan menjadi 7.617,61 ton pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Bogor kembali mengalami peningkatan menjadi 8.602 ton.

➢ **Produktivitas Padi dan Bahan Pangan Utama Lainnya**

- Produktivitas padi sawah adalah produksi padi sawah per satuan luas lahan yang digunakan dalam berusaha tani padi sawah yang diukur dalam satuan Ku/Ha. Tercatat bahwa pada tahun 2018 produktivitas padi sawah sebanyak 63,25 Ku/Ha. Kemudian mengalami penurunan menjadi 62,70 Ku/Ha pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 produktivitas padi sawah di Kabupaten Bogor kembali mengalami penurunan menjadi 62,53 Ku/Ha.
- Produktivitas padi gogo adalah produksi padi gogo per satuan luas lahan yang digunakan dalam berusaha tani padi gogo yang diukur dalam satuan Ku/Ha. Tercatat bahwa pada tahun 2018 produktivitas padi gogo sebanyak 32,58 Ku/Ha. Kemudian mengalami peningkatan menjadi 33,90 Ku/Ha pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 produktivitas padi gogo di Kabupaten Bogor kembali mengalami peningkatan menjadi 34,36 Ku/Ha.
- Produktivitas palawija adalah produksi palawija per satuan luas lahan yang digunakan dalam berusaha tani palawija yang diukur dalam satuan Ku/Ha. Tercatat bahwa pada tahun 2018 produktivitas palawija sebanyak 172,02 Ku/Ha. Kemudian mengalami penurunan menjadi 171,98 Ku/Ha pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 produktivitas palawija di Kabupaten Bogor kembali mengalami peningkatan menjadi 172,91 Ku/Ha.
- Produktivitas sayuran adalah produksi sayuran per satuan luas lahan yang digunakan dalam berusaha tani sayuran yang diukur dalam satuan Ku/Ha. Tercatat bahwa pada tahun 2018 produktivitas sayuran sebanyak 116,05 Ku/Ha. Kemudian mengalami peningkatan menjadi 134,39 Ku/Ha pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 produktivitas sayuran di Kabupaten Bogor kembali mengalami penurunan menjadi 128,32 Ku/Ha.

- **Persentase Rata-rata Nilai Tambah Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**

Tercatat bahwa pada tahun 2019 Persentase rata-rata nilai tambah tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebesar 5,00 persen dan mengalami peningkatan sebesar 1,84 persen menjadi 6,84 persen.

C. Perdagangan

Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan perdagangan di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.72
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Perdagangan Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020
1.	Nilai Tambah Bruto (NTB) Perdagangan	Juta Rp	29.721.902	30.482.601	29.562.426

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor

- **Nilai Tambah Bruto (NTB) Perdagangan**

Nilai Tambah Bruto (NTB) Perdagangan di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 mencapai Rp 29.721.902.000.000. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi Rp 30.482.601.000.000, namun mengalami penurunan menjadi Rp 29.562.426.000.000 pada tahun 2020.

D. Perikanan

Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan perikanan di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.73
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Perikanan Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	2020
1.	Produksi Perikanan	ton	122.131,38	125.134,00	118.711,83
2.	Produksi Peternakan	ton	182.198,04	274.202,62	354.694

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan, 2021

- **Produksi Perikanan**

Produksi perikanan di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 mencapai 122.131,38 ton. Produksi ini mengalami peningkatan menjadi 125.134,00 ton pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 118.711,83 ton.

- **Produksi Peternakan**

Produksi peternakan di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 mencapai 182.198,04 ton. Produksi ini mengalami peningkatan menjadi 274.202,62 ton pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 354.694 ton.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing *(competitiveness)* merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Kondisi daerah Kabupaten Bogor terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

- **Pengeluaran per Kapita**

Indikator rata-rata pengeluaran per kapita sebulan dimaksudkan untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Semakin besar angka pengeluaran rumah tangga akan berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Untuk lebih jelasnya pengeluaran per kapita dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.74
Rata-rata Pengeluaran per Kapita
di Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020

No.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Total pengeluaran konsumsi RT per kapita sebulan (rupiah)	822.801	1.294.758	1.167.888	1.216.394	1.111.824

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

- **Nilai Tukar Petani**

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani.

Tabel 2.75
Nilai Tukar Petani di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Nilai tukar petani (%)	101,37	99,60	101,17	101,32	100,10	103,18

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

Nilai tukar petani (NTP) pada tahun 2013-2018 sangat fluktuatif di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2013, NTP sebesar 101,37 persen dan turun pada tahun 2014 dengan nilai 99,6 persen dan naik lagi pada tahun 2015 menjadi 101,17 persen dan 2016 101,32 persen, pada tahun 2017 sebesar 100,10 persen, dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan lagi sebesar 103,18 persen.

2.5 Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dalam bentuk deviden atau pajak. Di samping itu, keberadaan BUMD menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya visi dan misi daerah serta indikator kinerja utama daerah dalam hal kontribusi target pelaksanaan kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Gambaran umum kinerja keuangan BUMD di Kabupaten Bogor disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.76
Gambaran Umum Kinerja Keuangan BUMD di Kabupaten Bogor

NO	BUMD	REALISASI NILAI INVESTASI (Juta Rp)		REALISASI LABA (Juta Rp)	
		2019	2020	2019	2020
1	Perumda Air Minum Tirta Kahuripan	40.000	-	87.384	92.784
		-	-	-	-
2	Perumda Pasar Tohaga	-	-	149	1.138
3	PT. Prayoga Pertambangan dan Energi	-	-	-	-
4	PT. Sayaga Wisata Bogor	67.840	-	-	(1.498)
		41.787	-	-	-
5	PT. BPRS Bogor Tegar Beriman	-	-	958	3.570
6	PT. LKM Bogor	-	-	1.532	58
7	P.D. BPR LPK Parungpanjang	-	-	619	1.516

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, 2021

Adapun nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah diberikan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.77
Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2019-2020

No	Bumd	Realisasi Nilai Penyertaan Modal (Juta Rupiah)	
		2019	2020
1	Perumda Air Minum Tirta Kahuripan	40.000	-
		-	-
2	Perumda Pasar Tohaga	-	-
3	PT. Prayoga Pertambangan dan Energi	-	-
4	PT. Sayaga Wisata Bogor	67.840	-
		41.787	-
5	PT. BPRS Bogor Tegar Beriman	-	-
6	PT. LKM Bogor	-	-
7	P.D. BPR LPK Parungpanjang	-	-
Jumlah		**149.627**	**-**

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, 2021

2.6 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah secara jelas mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan urusan wajib tersebut dimaksudkan agar daerah dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Terkait hal tersebut, dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengingatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Selain itu, dalam Pasal 298 undang-undang tersebut, mengamanatkan bahwa Belanja Daerah di prioritaskan untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal (SPM) diartikan sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas pencapaian yang dapat diselenggarakan secara bertahap.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas :

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Keenam urusan wajib tersebut kemudian dikelompokan menjadi 6 (enam) Jenis Standar Pelayanan Minimal yang masing-masingnya memiliki muatan materi SPM yang mencakup Jenis, Mutu, dan Penerima Pelayanan Dasar.

Khusus untuk mutu pada setiap jenis pelayanan dasar, telah ditentukan standar teknis masing-masing yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri yang menyelenggarakan masing-masing urusan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Luas wilayah dan banyaknya jumlah penduduk menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjangkau dan menerapkan standar pelayanan minimal bagi masyarakatnya. Namun Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan SPM.

Selain itu, dalam konteks belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor sudah memprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM pada setiap urusan sesuai yang ditentukan. Pemerintah Kabupaten Bogor secara berkelanjutan terus meningkatkan jumlah anggaran belanja untuk penguatan penerapan SPM di Kabupaten Bogor. Hal tersebut dilandasi oleh paradigma dalam penerapan SPM, bahwa bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama, tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal tersebut didasarkan pada prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan. Sasaran Penerapan SPM tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhanan Pelayanan Dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pemerintah Kabupaten Bogor selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas setiap tahapan penerapan SPM di Kabupaten Bogor. Upaya optimalisasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui pembentukan tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor pada pertengahan tahun 2020 dengan fungsi utama mengoordinasikan penerapan SPM di Pemerintah Kabupaten Bogor. Selanjutnya dalam rangka memastikan pencapaian SPM, Pemerintah Kabupaten Bogor secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan setiap jenis SPM yang disusun dalam bentuk Rencana Aksi Penerapan SPM setiap tahun.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa penerapan SPM ditujukan untuk mencapai

target 100 persen dari target dan indikator penerima layanan setiap tahunnya, berikut ini disajikan data penerapan SPM mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 serta capaian pada tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.78.

Tabel 2.78
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Target Capaian	Realisasi		Target			Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
A	**URUSAN PENDIDIKAN**									
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	%	100	100	100	100	100	100	100
B	**URUSAN KESEHATAN**									
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	91,75	86,18	100	100	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	88,87	85,26	100	100	100	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	98,57	91,62	100	100	100	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	97,44	84,21	100	100	100	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	74,10	72,85	100	100	100	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Target Capaian	Realisasi		Target			Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	80,55	60,16	100	100	100	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	52,14	42,27	100	100	100	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	63,24	60,02	100	100	100	100
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	74,27	92,19	100	100	100	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	100	80,10	80,24	100	100	100	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis	Jumlah warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	115,79	37,94	100	100	100	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV).	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	44,55	30,44	100	100	100	100
C	**URUSAN PEKERJAAN UMUM**									
	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	70,84	72,94	100	100	100	100
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	63,48	49,50	100	100	100	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Target Capaian	Realisasi		Target			Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
D	**URUSAN PERUMAHAN RAKYAT**									
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah korban bencana yang Berhak memperoleh rumah layak huni	%	100	99,88	59,23	-	-	-	-
		Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	-	-	100	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	-	-	100	100	100	100
E	**URUSAN TRANTIBUMLINMAS**									
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	%	100	-	-	100	100	100	100
2	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	%	100	86,3	100	100	100	100	100
3	Pelayanan informasi rawan bencana	Pelayanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Target Capaian	Realisasi		Target			Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	98	44,73	100	100	100	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	99,98	99,79	100	100	100	100
6	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	177,48	100	100	100	100	100
F	**URUSAN SOSIAL**									
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	129,6	100	100	100	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	96,5	100	100	100	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	93,93	100	100	100	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	100	100	38,98	100	100	100	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Target Capaian	Realisasi		Target			Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	77,5	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, 2021

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sebagai bentuk implementasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun kinerja keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Dengan kata lain, kinerja keuangan daerah memperlihatkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan keuangan daerah untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan, dimana pencapaian target-target tersebut sekaligus menunjukkan sejauhmana kualitas penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kinerja keuangan daerah dapat menunjukkan beberapa hal, diantaranya :

1. kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah;
2. efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah;
3. sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.

Asas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal-hal yang dikelola dalam APBD berupa pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan

daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, sedangkan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pelaksanaan kinerja keuangan pada 5 (lima) tahun sebelumnya yang dijadikan dasar dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, terbagi atas 3 (tiga) tahun pada periode RPJMD Tahun 2013-2018, yaitu tahun 2016-2018, serta periode RPJMD Tahun 2018-2023, yaitu tahun 2019-2020. Uraian tentang kinerja keuangan lima tahun sebelumnya dijabarkan sebagai berikut :

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Bogor pada kurun waktu lima tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016-2020 masih memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan aturan tersebut, rincian pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

   Pendapatan daerah terdiri atas :

   1. Pendapatan Asli Daerah, yang tersusun dari :
      a. Pajak daerah;
      b. Retribusi daerah;
      c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
      d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
   2. Dana Perimbangan, yang tersusun dari :
      a. Bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak;
      b. Dana Alokasi Umum (DAU);
      c. Dana Alokasi Khusus (DAK).
   3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang tersusun dari :
      a. Pendapatan Hibah;
      b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya;

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri atas :

1. Belanja Langsung, yang tersusun atas :
   a. Belanja pegawai;
   b. Belanja barang dan jasa;
   c. Belanja modal.
2. Belanja Tidak Langsung, yang terdiri atas :
   a. Belanja pegawai;
   b. Belanja bunga;
   c. Belanja subsidi;
   d. Belanja hibah;
   e. Belanja bantuan sosial;
   f. Belanja bagi hasil;
   g. Belanja bantuan keuangan;
   h. Belanja tidak terduga.

c. Pembiayaan Daerah, yang terdiri atas :

1. Penerimaan pembiayaan, yang tersusun atas :
   a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
   b. Penerimaan pinjaman daerah;
   c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
   c. Pencairan dana cadangan;
   d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
   e. Penerimaan piutang daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan, yang tersusun atas :
   a. Pembentukan dana cadangan;
   b. Penanaman modal (investasi) pemerintah daerah;
   c. Pembayaran pokok utang;
   d. Pemberian pinjaman daerah.

Komponen-komponen dalam masing-masing pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dipergunakan sesuai dengan kepentingan daerah, sehingga memungkinkan untuk tidak digunakan seluruhnya.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Bogor lima tahun sebelumnya menjadi dasar penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023. Secara umum, kinerja APBD Tahun 2016-2020 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020

NO	URAIAN PENDAPATAN DAERAH	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	**PENDAPATAN DAERAH**	**5.973.280.685.746,00**	**6.975.053.078.040,35**	**7.300.485.379.647,18**	**8.137.989.873.806,00**	**7.687.179.717.004,00**	5,17
I	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**2.292.175.674.801,00**	**3.041.872.447.905,35**	**2.794.660.740.152,18**	**3.161.165.915.498,00**	**2.810.155.352.282,00**	5,23
1	Hasil Pajak Daerah	1.520.926.774.877,53	1.786.132.725.164,86	1.969.519.761.542,25	2.243.429.745.163,00	1.857.411.776.716,00	4,08
2	Hasil Retribusi Daerah	136.756.227.055,00	150.541.572.101,00	112.776.035.992,00	141.468.140.179,00	128.914.969.533,00	-1,47
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	43.075.638.051,00	44.338.643.608,00	44.287.173.198,00	57.537.749.304,00	67.102.677.276,00	11,72
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	591.417.034.817,47	1.060.859.507.031,49	668.077.769.419,93	718.730.280.852,00	756.725.928.757,00	5,05
II	**DANA PERIMBANGAN**	**2.692.167.023.139,00**	**2.742.839.370.823,00**	**2.818.814.498.138,00**	**3.094.445.817.299,00**	**2.825.931.289.983,00**	1,22
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	267.917.072.219,00	269.361.187.649,00	262.173.257.266,00	315.087.463.197,00	248.356.815.110,00	-1,88
2	Dana Alokasi Umum	1.917.780.234.000,00	1.902.004.175.000,00	1.919.023.527.000,00	2.034.853.421.000,00	1.849.796.843.000,00	-0,90
3	Dana Alokasi Khusus	506.469.716.920,00	571.474.008.174,00	637.617.713.872,00	744.504.933.102,00	727.777.631.873,00	9,49
III	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**988.937.987.806,00**	**1.190.341.259.312,00**	**1.687.010.141.357,00**	**2.048.179.863.661,00**	**2.051.093.074.739,00**	20,01
1	Pendapatan Hibah	2.943.000.000,00	5.498.942.371,00	445.197.858.747,00	459.978.600.000,00	585.034.080.000,00	275,49
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	577.023.348.996,00	659.561.474.226,00	707.218.738.134,00	773.953.465.729,00	726.326.745.171,00	5,92
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	326.384.354.000,00	379.499.169.989,00	419.568.048.852,00	513.482.851.602,00	574.120.558.252,00	15,16
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	82.587.284.810,00	145.781.672.726,00	115.025.495.624,00	114.790.561.426,00	153.891.135.003,00	16,84

NO	URAIAN PENDAPATAN DAERAH	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
6	Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-	-
7	Bonus Produksi	-	-	-	20.172.662.252,00	11.720.556.313,00	-41,90
B	**BELANJA DAERAH**	**6.465.300.553.876,00**	**6.875.742.319.986,00**	**7.305.059.632.892,00**	**7.771.218.179.777,00**	**8.405.493.380.579,00**	6,78
I	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**3.083.375.228.502,00**	**3.135.997.525.254,00**	**3.672.650.462.819,00**	**3.541.262.768.829,00**	**3.894.967.635.559,00**	6,02
1	Belanja Pegawai	2.045.082.450.917,00	1.895.900.242.332,00	2.219.154.498.361,00	2.253.964.864.653,00	2.142.688.581.700,00	1,17
2	Belanja Hibah	108.858.733.000,00	221.563.642.076,00	518.180.271.989,00	240.010.963.536,00	257.143.590.699,00	23,97
3	Belanja Bantuan Sosial	43.245.630.000,00	34.614.400.000,00	22.264.100.000,00	18.933.500.000,00	52.356.765.000,00	4,90
4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	109.557.277.652,00	135.194.512.293,00	158.976.844.270,00	165.801.722.652,00	197.781.683.786,00	15,91
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	763.780.203.283,00	834.111.180.226,00	738.976.413.927,00	852.673.765.914,00	850.963.209.687,00	2,74
6	Belanja Tidak Terduga	12.850.933.650,00	14.613.548.327,00	15.098.334.272,00	9.877.952.074,00	394.033.804.687,00	135,32
II	**BELANJA LANGSUNG**	**3.381.925.325.374,00**	**3.739.744.794.732,00**	**3.632.409.170.073,00**	**4.229.955.410.948,00**	**4.510.525.745.020,00**	7,46
1	Belanja Pegawai	485.321.060.230,00	536.961.880.170,00	371.475.516.071,00	429.357.951.915,00	300.748.722.122,00	-11,28
2	Belanja Barang dan Jasa	1.354.774.042.566,00	1.677.630.861.939,00	1.947.098.241.912,00	2.232.903.738.362,00	2.720.826.752.985,40	19,04
3	Belanja Modal	1.541.830.222.578,00	1.525.152.052.623,00	1.313.835.412.090,00	1.567.693.720.671,00	1.488.950.269.912,60	-0,87
	Surplus / (Defisit)	**(492.019.868.130,00)**	**99.310.758.054,35**	**(4.574.253.244,82)**	**366.771.694.029,00**	**(718.313.663.575,00)**	
C	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**1.184.835.661.274,00**	**585.887.130.027,00**	**850.938.396.379,79**	**738.524.105.134,97**	**1.105.295.799.163,97**	-1,38

NO	URAIAN PENDAPATAN DAERAH	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**1.349.935.661.274,00**	**696.587.130.027,00**	**923.862.211.780,00**	**846.364.143.134,97**	**1.105.295.799.163,97**	-3,92
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.349.935.661.274,00	692.814.027.451,00	685.197.397.350,79	846.364.143.134,97	1.105.295.799.163,97	-3,92
2	Pencarian Dana Cadangan	-	-	218.000.000.000,00	-	-	-
3	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	20.664.814.429,00	-	-	-
4	Penerimaan Hasil Investasi Daerah	-	3.773.102.576,00	-	-	-	-
II	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**165.100.000.000,00**	**110.700.000.000,00**	**72.923.815.400,00**	**107.840.038.000,00**	**-**	-13,24
1	Pembentukan Dana Cadangan	75.000.000.000,00	43.000.000.000,00	-	-	-	-42,67
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	90.100.000.000,00	67.700.000.000,00	72.923.815.400,00	107.840.038.000,00	-	6,17
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	**692.815.793.144,00**	**685.197.888.081,35**	**846.364.143.134,97**	**1.105.295.799.163,97**	**386.982.135.588,97**	**-10,99**

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2016-2020, diolah

A. Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah

Secara umum, pendapatan daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, termasuk Kabupaten Bogor. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020) sebesar 5,17 persen. Kemudian Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan komponen pendapatan yang mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yaitu sebesar 20,01 persen.

Pada komponen pendapatan asli daerah, rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan terbesar berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu sebesar 11,72 persen, dan yang terkecil berasal dari hasil retribusi daerah dengan penurunan rata-rata sebesar -1,47 persen.

Selanjutnya pada komponen dana perimbangan, rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan terbesar berasal dari dana alokasi khusus, yaitu sebesar 9,49 persen. Adapun pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan terbesar dalam kurun waktu lima tahun dikontribusi oleh pendapatan hibah, yaitu sebesar 275,49 persen.

B. Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah

Dalam kurun waktu 2016-2020, belanja daerah cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata 6,78 persen. Dilihat dari masing-masing komponen, rata-rata pertumbuhan belanja daerah tertinggi dikontribusi oleh belanja tidak terduga, yaitu sebesar 135,32 persen. Sedangkan rata-rata pertumbuhan terendah dikontribusi oleh belanja pegawai yang turun hingga mencapai -11,28 persen.

Adapun peningkatan rata-rata pertumbuhan pada komponen biaya tidak terduga terjadi pada tahun 2020. Peningkatan ini terjadi akibat adanya pengalokasian anggaran untuk menangani kebutuhan bidang urusan kesehatan sebagai dampak pandemi

Covid-19. Sementara itu, alokasi belanja modal mengalami penurunan sehingga rata-rata pertumbuhannya -0,87 persen.

C. Kinerja Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri atas komponen penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada kurun waktu 2016-2020, rata-rata pertumbuhan pembiayaan daerah mengalami penurunan menjadi -1,38 persen. Peningkatan penerimaan pembiayaan terutama dikontribusi oleh Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA). Kemudian mengenai komponen pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan terutama untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Pembiayaan daerah diharapkan dapat menutup defisit anggaran, sebagai akibat lebih besarnya rencana belanja daerah dibandingkan dengan target pendapatan daerah.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Bogor serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Kabupaten Bogor dalam kurun waktu tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Neraca Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	**ASET**	**18.687.360.178.967,60**	**21.285.843.792.604,70**	**23.369.459.813.917**	**26.492.593.450.206**	**26.734.682.361.132**	**9,37**
1.1	**ASET LANCAR**	**1.815.233.706.679,29**	**1.813.078.646.277,02**	**2.122.125.036.105**	**2.248.530.959.354**	**1.601.461.375.061**	**-3,08**
1.1.1	**Kas dan Setara Kas**	**701.050.544.113**	**685.672.898.828**	**848.602.931.061**	**1.106.514.405.549**	**387.906.026.577**	**-13,75**
1.1.1.1	Kas Di Kas Daerah	610.071.954.838	618.438.118.704,79	794.568.343.162,97	1.034.841.125.519	296.700.260.387	-13,43
1.1.1.2	Kas Di Bendahara Penerimaan	199.812.232	53.397.500	-	1.625.500	-	-79,89
1.1.1.3	Kas Di Bendahara Pengeluaran	1.409.028	966.713.720	419.946.679	200.945.000	399.339.500	310,30
1.1.1.4	Kas di Bendahara BLUD	14.281.407.090	27.835.391.120,27	31.074.270.207	49.203.180.369	79.952.868.396	41,13
1.1.1.5	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	148.894.191	1.539.896	500.716	-	95.000	-84,11
1.1.1.6	Kas Lainnya Di Bendahara BLUD	-	419.456.872	-	87.412.329	-	-54,35
1.1.1.7	Kas Lainnya Di Bendahara FKTP	7.300.397	616.478	-	-	-	-91,56
1.1.1.8	Kas Lainnya Di BOS	-	-	2.238.287.210	1.131.194.056	923.795.988	-35,76
1.1.1.9	Kas Di FKTP JKN	68.461.022.188	32.083.093.345	17.495.664.789	9.418.777.904	6.303.411.783	-44,92
1.1.1.10	Kas Di BOS	7.878.744.149	5.874.571.192	2.805.918.297	11.630.144.872	3.626.255.523	-17,63
1.1.2	**Piutang Pendapatan**	**1.716.440.605.308**	**1.678.326.770.507**	**1.830.496.204.483**	**1.783.352.467.718**	**1.798.455.605.578**	**1,17**
1.1.2.1	Piutang Pajak	1.233.366.743.517	1.298.963.322.642,66	1.334.701.639.402,45	1.291.478.913.614	1.248.740.838.762	0,25
1.1.2.2	Piutang Retribusi	9.709.611.758	11.026.763.314,80	10.389.929.721,80	10.690.406.566	11.444.656.672	3,34
1.1.2.3	Piutang Denda Pajak	428.643.190.537	338.923.793.246,14	383.872.685.103,94	366.013.788.211	344.323.099.190	-4,29
1.1.2.4	Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	343.402.935,00	-				
1.1.2.5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	44.377.656.560	29.412.891.303	101.531.950.255	115.169.359.326	193.947.010.954	44,59
1.1.3	**Piutang lainnya**	**53.684.373.441**	**94.569.322.811**	**103.794.688.651**	**92.614.282.294**	**53.683.757.850**	**0,00**

No	Uraian	Jumlah (Rp)					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.1.3.1	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000	0,00
1.1.3.2	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	1.246.565.798	1.289.875.798	1.264.369.118	1.245.720.718	1.238.838.994	-0,16
1.1.3.3	Piutang lainnya	52.436.771.643	93.278.411.012,78	102.529.283.533	91.367.525.576	52.443.882.856	0,00
1.1.4	**Penyisihan Piutang**	**-749.877.333.281**	**-778.572.934.098,66**	**-788.317.838.907**	**-820.885.649.623**	**-771.089.283.064**	**0,56**
1.1.5	**Beban Dibayar Dimuka**	**19.691.667**	**16.666.666,67**	**20.000.000**	**117.083.333**	**257.987.087**	**67,29**
1.1.6	**Persediaan**	**93.915.825.430,81**	**133.065.921.563,57**	**127.529.050.818**	**86.818.370.084**	**132.247.281.033**	**7,09**
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**813.754.264.103**	**869.356.445.654,61**	**970.345.037.260**	**1.169.288.907.712**	**1.213.094.736.915**	**8,31**
1.2.1	**Investasi Jangka Panjang Non Permanen**	**4.519.794.443**	**746.691.866,80**	**746.691.867**	**746.691.867**	**-**	**-36,25**
1.2.1.1	Dana Bergulir Gerakan Masyarakat Mandiri	4.519.794.443	746.691.866,80	746.691.867	746.691.867	-	-36,25
1.2.2	**Investasi Jangka Panjang Permanen**	**809.234.469.660**	**868.609.753.787,81**	**969.598.345.393**	**1.168.542.215.845**	**1.213.094.736.915**	**9,62**
1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	809.234.469.660	868.609.753.787,81	969.598.345.393	1.168.542.215.845	1.213.094.736.915	9,62
1.3	**ASET TETAP**	**15.603.984.069.229**	**18.010.518.795.030**	**19.235.817.933.874**	**22.047.105.703.304**	**22.918.595.556.987**	**10,09**
1.3.1	Tanah	8.440.210.220.153	10.279.958.207.750	11.713.554.119.346	13.535.822.153.652	13.610.318.191.803	12,69
1.3.2	Peralatan dan Mesin	1.897.367.672.251	2.049.015.417.261	2.207.651.272.277	2.700.957.347.843	3.293.906.522.526	14,79
1.3.3	Gedung dan Bangunan	4.136.624.123.653	4.466.782.577.235	4.919.131.349.753	5.369.683.272.626	5.698.089.748.307	8,34
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.152.482.843.032	4.739.748.988.455	5.303.984.157.258	5.728.185.070.142	6.273.335.151.975	10,87
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	633.429.270.827	711.596.617.748	318.166.826.567	398.355.303.708	441.451.680.944	-8,63
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	282.203.013.466	220.079.905.731	116.390.484.665	86.447.186.403	177.245.307.312	-10,98
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-1.354.703.610.444	-1.537.170.367.102	-1.608.110.544.867	-1.927.628.071.571	-2.295.630.094.097	14,09
1.3.8	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-792.891.774.849	-868.648.730.880	-984.457.274.986	-1.139.006.892.790	-1.235.304.735.173	11,72
1.3.9	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-1.790.737.688.861	-2.050.843.821.168	-2.750.492.456.140	-2.705.709.666.710	-3.044.816.216.610	14,19
1.4	**DANA CADANGAN**	**175.000.000.000**	**218.000.000.000**	**-**	**-**	**-**	**24,57**
1.4.1	Dana Cadangan	175.000.000.000	218.000.000.000,00	-	-	-	24,57

No	Uraian	Jumlah (Rp)					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.5	**ASET LAINNYA**	**279.388.138.956**	**374.889.905.643**	**1.041.171.806.678**	**1.027.667.879.836**	**1.001.530.692.169**	**37,60**
1.5.1	Barang Inventaris Rusak Berat	54.223.650.010	60.682.626.207	283.449.891.002	-	-	128,64
1.5.2	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	19.961.000.000	19.961.000.000	19.961.000.000	-	-	0,00
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga			-	212.190.369.874	217.034.416.494	2,28
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	13.869.976.566	14.945.416.587	23.894.259.347	26.053.471.847	36.459.593.652	27,33
1.5.5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	-6.938.148.946	-8.874.931.663	-13.075.779.369	-17.092.240.305	-24.469.535.666	37,04
1.5.6	Aset Lain-lain	198.271.661.327	288.175.794.512	726.942.435.698	806.513.628.420	785.329.506.125	41,07
1.5.7	Aset Non Lancar Lainnya			-	2.650.000	18.447.900	596,15
2	**KEWAJIBAN**	**81.436.080.254**	**88.823.908.857**	**219.143.283.772**	**122.803.233.948**	**121.985.121.961**	**10,63**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**81.436.080.254**	**88.823.908.857**	**219.143.283.772**	**122.803.233.948**	**121.985.121.961**	**10,63**
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.300.397	420.073.350	2.238.287.210	1.218.606.385	923.890.988	235,40
2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka	10.108.522.768	11.999.580.966	12.270.636.014	13.335.342.044	12.816.538.654	6,11
2.1.3	Utang Belanja	38.373.414.222	75.610.948.965	203.575.263.739	104.060.802.624	102.817.853.042	27,94
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	32.946.842.867	793.305.576	1.059.096.810	4.188.482.895	5.426.839.276	-36,29
3	**EKUITAS**	**18.605.924.098.714**	**21.197.019.883.748**	**23.150.316.530.144**	**26.369.790.216.258**	**26.612.697.239.171**	**9,36**
3.1	**EKUITAS**	**18.605.924.098.714**	**21.197.019.883.748**	**23.150.316.530.144**	**26.369.790.216.258**	**26.612.697.239.171**	**9,36**
3.1.1	Ekuitas	18.605.924.098.714	20.108.146.431.390	22.508.665.400.002	26.147.190.372.558	27.340.354.196.777	10,10
3.1.2	Surplus/Defisit - LO		1.088.873.452.358	641.651.130.143	222.599.843.700	-727.656.957.606	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**18.687.360.178.968**	**21.285.843.792.605**	**23.369.459.813.917**	**26.492.593.450.206**	**26.734.682.361.132**	**9,37**

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2016-2020, diolah

Aset Pemerintah Kabupaten Bogor selama periode 5 tahun, yaitu dari tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,37 persen. Apabila dirinci untuk masing-masing jenis aset, rata-rata pertumbuhan untuk investasi jangka panjang sebesar 8,31 persen, aset tetap sebesar 10,09 persen, dana cadangan sebesar 24,57 persen dan paling tinggi pada aset lainnya sebesar 37,60 persen. Sedangkan aset lancar cenderung menurun pertumbuhannya sehingga mencapai -3,08 persen.

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bogor selama periode tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan 10,63 persen, yang dikontribusikan dari kewajiban jangka pendek. Sedangkan perkembangan ekuitas Pemerintah Kabupaten Bogor selama Tahun 2016-2020 tumbuh rata-rata sebesar 9,36 persen.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan daerah.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pada Tahun 2016-2018, secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bogor memedomani kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2013-2018, yaitu diarahkan pada "**Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan administrasi pemungutan pendapatan asli daerah (PAD) yang efisien, efektif dan taat pada ketentuan yang berlaku,"** yang dilakukan melalui langkah/upaya pokok, sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
2. Peningkatan pelayanan administrasi pemungutan pendapatan daerah;

3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat di bidang pendapatan daerah.

Adapun kebijakan pendapatan daerah Tahun 2019-2020 memedomani kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, yang diarahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendanai kebutuhan belanja pemerintah daerah, baik melalui belanja langsung 72 Perangkat Daerah yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, maupun melalui belanja tidak langsung yang mengikutsertakan peran aktif pihak-pihak pemangku kepentingan di Kabupaten Bogor. Arah kebijakan dimaksud, ditempuh melalui:

1. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Penyiapan dan penyempurnaan produk hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta penegakan sanksi;
3. Pemutakhiran data potensi dan data piutang pajak daerah;
4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
5. Optimalisasi koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah teknis, pemerintah pusat dan provinsi;
6. Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang bermuara pada penerimaan daerah; dan
7. Peningkatan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak daerah bagi pembangunan.

Khusus untuk kebijakan tahun 2020, dimana terjadi pandemi covid-19, kebijakan pendapatan daerah yang dilakukan belum tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023. Kebijakan ini tercantum dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2020. Kebijakan ini ditetapkan karena terjadi kelesuan penerimaan pajak daerah akibat terdampaknya wajib pajak oleh pandemi Covid-19.

Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang telah dilaksanakan pada periode awal terjadinya pandemi Covid-19 dilakukan dalam bentuk sebagai berikut :

1. Penerapan relaksasi pajak, terutama melalui :
   a. perpanjangan penghapusan sanksi pajak hingga tahun 2019 sampai dengan akhir bulan Agustus 2020;
   b. penerapan flat pengurangan pajak sebesar 10% untuk PBB-P2 mulai 1 Juli-31 Agustus 2020;
   c. pemberian bebas sanksi administrasi terhadap pengusaha hotel, restoran, hiburan dan parkir untuk masa pajak bulan Maret-Juli 2020;
   d. adanya kemudahan pengajuan pengurangan pajak air tanah dan genset bagi pengusaha hotel, restoran dan hiburan hingga 31 Agustus 2020.
2. Tetap melaksanakan kebijakan yang ditempuh hingga akhir tahun 2020, yaitu:
   a. optimalisasi pemeriksaan pajak;
   b. melaksanakan penagihan pajak PBB-P2 secara aktif;
   c. melaksanakan kerjasama dengan kejaksaan dalam penagihan pajak;
   d. pemberian keringanan pajak dengan mencicil denda berdasarkan masa pajak untuk pokok pajak yang sudah terbayar.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah tahun 2016-2018 diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM, dimana dengan mempertimbangkan pencapaian IPM, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan *supra*struktur.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Adapun upaya tersebut antara lain adalah :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Bogor yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
3. Penyusunan belanja kecamatan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
4. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
5. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari volume anggaran APBD tiap tahunnya, dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan penuntasan buta aksara serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis "desa membangun", pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan;

8. Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur hingga di bawah 10 persen, diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;
9. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
10. Guna menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Bogor, pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 42,7 persen, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
11. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
12. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap *(fixed cost)*, insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan *(multi years);*
13. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
    a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja dalam bentuk gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. Mengalokasikan belanja non pegawai seperti belanja subsidi dan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Adapun kebijakan belanja daerah Tahun 2019-2020 diarahkan pada :

1. **Kebijakan belanja langsung :**
   a. Mendorong pengembangan potensi ekonomi wilayah;
   b. Menyelesaikan permasalahan sosial;
   c. Menyiapkan pembangunan tematik integratif, yaitu :
      - Pengembangan Geopark Pongkor;
      - Pengembangan Situ *Front City;*
      - Melanjutkan Pembangunan Poros Tengah-Timur;
      - Pengembangan Pusat Pengobatan Alternatif Tradisional Khususnya Pengobatan Tulang Cimande;
      - Pengembangan Minapolitan;
      - Mendukung pengembangan kekerabatan Kota Baru Publik Maja.
   d. Pemeliharaan optimalisasi aset-aset daerah;
   e. Alokasi DAU Tambahan untuk pemenuhan kebutuhan sarpras lokal dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
   f. Mencapai target Pancakarsa, yaitu Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Maju, Bogor Membangun, dan Bogor Berkeadaban melalui pelaksanaan kewenangan perangkat daerah;
   g. Mendorong terwujudnya Kabupaten Bogor sebagai *'The City of Sport and Tourism"*;
   h. Mendukung penganggaran perangkat daerah dalam memfasilitasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido yang diarahkan untuk pengembangan pariwisata berbasis ekonomi kreatif;
   i. Melaksanakan kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan yang diimplementasikan dalam belanja perangkat daerah;
   j. Mempersiapkan pembentukan Daerah Otonomi Baru dan melakukan penataan daerah.
2. **Kebijakan belanja tidak langsung :**
   a. Memenuhi kebutuhan belanja pegawai, diarahkan untuk :

1) menganggarkan gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;
2) menganggarkan belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD dan PPPK sesuai formasi pegawai yang ditetapkan;
3) menganggarkan belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5 persen (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
4) menganggarkan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
5) menganggarkan penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD;
6) menganggarkan tambahan penghasilan PNSD;
7) menganggarkan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8) menganggarkan Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN melalui DAK Non Fisik.

b. Memenuhi kebutuhan belanja hibah, diarahkan untuk :

1) mendukung pembangunan pendidikan terutama pada peningkatan rata-rata lama sekolah jenjang pendidikan SD dan SMP;

2) pencapaian program prioritas dan menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat (instansi vertikal) yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, kelompok masyarakat/perorangan yang ditetapkan oleh Kepala SKPD atau pejabat yang berwenang, dengan mempertimbangkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

c. Memenuhi kebutuhan belanja bantuan sosial, diarahkan untuk mendukung penanggulangan resiko sosial, baik kepada individu dan/atau keluarga, direncanakan atau tidak direncanakan, serta kelompok masyarakat di bidang kesejahteraan sosial.

d. Memenuhi kebutuhan belanja bagi hasil, dialokasikan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa dari dana bagi hasil yang bersumber dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dibagikan kepada seluruh desa, serta bagi hasil dari pendapatan lainnya kepada kabupaten/kota.

e. Memenuhi kebutuhan belanja bantuan keuangan, dialokasikan untuk :
   1) Mendanai pembangunan desa yang bersifat umum berupa ADD (Alokasi Dana Desa), yang merupakan bagian dari persentase dana perimbangan setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).
   2) Mendanai pembangunan desa dalam bentuk bantuan keuangan kepada beberapa desa yang terkait dengan kompensasi persampahan.
   3) Mendanai pembangunan desa dari dana desa yang bersumber dari APBN, seperti Dana Desa.
   4) Melaksanakan target Pancakarsa yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan desa.
   5) Membantu Partai Politik dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

f. Memenuhi kebutuhan belanja tidak terduga, diarahkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan,

termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Khusus untuk kebijakan belanja daerah tahun 2020, terdapat kebijakan khusus yang belum tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023. Kondisi pandemi Covid-19 menjadikan pemerintah pusat menetapkan kebijakan belanja daerah yang diarahkan untuk belanja tidak terduga. Adapun kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2020 saat terjadi pandemi Covid-19 adalah :

a. *Refocusing* anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan kebijakan nasional;
b. Mengalokasikan tambahan pada biaya tak terduga dalam rangka penanganan pandemi Covid-19;
c. Melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya pemulihan ekonomi daerah yang terdampak pandemi Covid-19.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat melebihi kemampuan pendapatan daerah. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Secara umum, kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2016-2018 dan Tahun 2019-2020 tidak berubah, karena tidak adanya perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh peraturan

perundang-undangan. Adapun kebijakan penerimaan pembiayaan meliputi :

1. Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan SiLPA digunakan untuk membiayai program/kegiatan strategis;
2. Merintis penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian bantuan kepada pemerintah kecamatan. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan meliputi :

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal pada BUMD dan PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, Tbk.;
2. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

Di sisi lain, terdapat kebijakan yang dilakukan sepanjang tahun 2016-2020 untuk meningkatkan perekonomian daerah, khususnya pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan memberikan bantuan kepada masyarakat yang dapat mendorong pengembangan potensi daerah perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan Kabupaten Bogor. Pengembangan tersebut diarahkan melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar di Kabupaten Bogor. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah :

1. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kabupaten Bogor;
2. Kerjasama investasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan pihak swasta atau dengan pihak *government*/pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;
3. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal;
4. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan;
5. Meningkatkan koordinasi program melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
6. Mengarahkan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian, industri pengolahan dan industri manufaktur.

3.2.2 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran Kabupaten Bogor pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan anggaran di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Proporsi realisasi belanja menggambarkan komposisi besaran masing-masing komponen belanja terhadap total anggaran belanja daerah. Secara umum, proporsi belanja dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu belanja aparatur dan belanja non aparatur (belanja publik). Belanja aparatur merupakan belanja yang digunakan untuk membayar kebutuhan gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan resmi lainnya seluruh ASN. Adapun sisanya, yaitu belanja non aparatur (belanja publik) digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan daerah. Proporsi belanja aparatur terhadap total anggaran belanja tahun 2016-2020 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016-2020

Tahun	Total Belanja Untuk Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)	Proporsi Belanja Aparatur (%)
2016	2.530.403.511.147	6.630.400.553.876	38,16
2017	2.432.862.122.502	6.986.442.319.986	34,82
2018	2.590.630.014.432	7.377.983.448.292	35,11
2019	2.683.322.816.568	7.879.058.217.777	34,06
2020	2.443.437.303.822	8.405.493.380.579	29,07

Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020, diolah

Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah pada Tahun 2016-2020, cenderung menurun, bahkan pada 2 (dua) tahun terakhir sangat berkurang secara signifikan dari 34,06 persen menjadi 29,07 persen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proporsi belanja untuk pembangunan semakin besar dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

3.2.3 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Penerimaan pembiayaan daerah merupakan salah satu pos yang diharapkan dapat menutupi defisit belanja daerah serta pengeluaran pembiayaan yang dialokasikan untuk penyertaan modal, pembentukan

dana cadangan dan pembentukan investasi, karena defisit riil APBD berasal dari akumulasi defisit belanja dan pengeluaran pembiayaan.

Defisit yang terjadi akibat terlampauinya pendapatan daerah oleh belanja daerah serta pengeluaran pembiayaan daerah seharusnya dapat ditutupi oleh penerimaan pembiayaan daerah. Adapun kondisi defisit riil dan komponen penutup defisit riil pada Tahun 2016-2020 diuraikan dalam tabel 3.4 dan tabel 3.5.

Berdasarkan data pada Tabel 3.4 dan 3.5 diketahui bahwa penutup defisit riil dari komponen penerimaan pembiayaan daerah mampu menutupi defisit riil yang terjadi. Adapun mengenai realisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 diuraikan pada tabel 3.6.

Tabel 3.4

Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Realisasi Pendapatan Daerah	5.973.280.685.746,00	6.975.053.078.040,35	7.300.485.379.647,18	8.137.989.873.806,00	7.687.179.717.004,00
	Dikurangi Realisasi :					
2	Belanja Daerah	6.465.300.553.876,00	6.875.742.319.986,00	7.305.059.632.892,00	7.771.218.179.777,00	8.405.493.380.579,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	165.100.000.000,00	110.700.000.000,00	72.923.815.400,00	107.840.038.000,00	-
Defisit Riil		**(657.119.868.130,00)**	**(11.389.241.945,65)**	**(77.498.068.644,82)**	**424.733.378.681,00**	**(718.313.663.575,00)**

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020, diolah

Tabel 3.5

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.349.935.661.274,33	692.814.027.451,00	685.197.397.350,79	846.364.143.134,97	1.105.295.799.163,97
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	218.000.000.000,00	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	20.664.814.429,00	-	-
7	Penerimaan Hasil Investasi Daerah	-	3.773.102.576,00	-	-	-

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020, diolah

Tabel 3.6

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	1.349.935.661.274,00	692.814.027.451,00	685.197.397.351,00	846.364.143.134,97	1.105.295.799.163,97
2	Pelampauan Penerimaan PAD	226.352.795.801,00	759.293.940.905,35	319.125.014.152,18	484.800.968.498	347.533.590.731,00
3	Pelampauan Penerimaan dana perimbangan/Pendapatan Transfer	(45.283.173.861,00)	(158.182.147.177,00)	(70.746.145.862,00)	(35.362.550.701,00)	(180.179.244.207,00)
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(24.763.682.194,00)	(455.661.263.688,00)	4.573.985.357,00	28.480.077.009	(276.350.453.034,00)
5	Sisa belanja akibat penghematan atau lainnya	(536.972.545.124,00)	(556.640.835.014,00)	(590.614.127.108,00)	(627.377.304.223,00)	(495.978.241.935,00)

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020, diolah

3.2.4 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

A. Tugas Pembantuan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan khususnya mengenai hal penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tugas Pembantuan dilaksanakan guna menghasilkan kinerja pemerintah yang lebih efektif dan efisien melalui pemberian sebagian urusan pemerintahan pusat kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Desa. Tercatat tidak ditemukan tugas pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Bogor periode tahun 2019-2020 dari Pemerintah Pusat.

B. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Salah satu sumber pendanaan yang mendukung pembangunan di Kabupaten Bogor berasal dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang memiliki wilayah operasional di Kabupaten Bogor. Namun, sumber pendanaan ini tidak menjadi bagian dalam penghitungan APBD Kabupaten Bogor, karena prinsip pelaksanaan TJSL adalah Rp = 0.

Periode RPJMD Tahun 2018-2023, Bupati Bogor mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 978.5/116/Kpts/Per-UU/2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Bogor Periode Tahun 2019-2023 yang bertugas untuk memfasilitasi terlaksananya program/kegiatan yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor melalui program-program perusahaan pelaku TJSL. Pelaksanaan program TJSL Perusahaan di kabupaten Bogor tahun 2019-2023 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Rekapitulasi Penerimaan TJSL Perusahaan Kepada Pemerintah Kabupaten Bogor Periode Tahun 2018-2020

TJSL Perusahaan	2018	2019	2020
Nilai TJSL yang dilaporkan	1.217.547.000	40.841.840.901	34.356.859.398

Sumber : Hasil Analisa, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021

3.3 Kerangka Pendanaan

Berdasarkan kondisi capaian tahun 2016-2020 atau mengacu pada kondisi 5 (lima) tahun sebelumnya, secara umum dapat disimpulkan adanya :

a. trend pertumbuhan pendapatan daerah;
b. trend peningkatan belanja daerah;
c. trend peningkatan defisit belanja yang melampaui kemampuan pendapatan daerah;
d. ketidakpastian dalam pembiayaan daerah, terutama ketersediaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada pencapaian target makro daerah, target-target kinerja utama, dan target kinerja kunci daerah maupun perangkat daerah, mengharuskan dilakukannya perubahan pada proyeksi APBD tahun 2021-2023 dalam hal penyediaan keuangan daerah untuk memenuhi konsep ***Money Follow Program***. Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2021-2023 diuraikan sebagai berikut :

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Pendapatan dan Belanja Daerah kurun waktu tahun 2019-2023 disajikan dalam tabel 3.8a dan 3.8b di bawah ini :

Tabel 3.8a
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2019-2020

NO	URAIAN	JUMLAH REALISASI	
		2019	2020
1	2	3	4
1	**PENDAPATAN DAERAH**		
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**3.161.165.915.498,00**	**2.810.155.352.282,00**
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	2.243.429.745.163,00	1.857.411.776.716,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	141.468.140.179,00	128.914.969.533,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	57.537.749.304,00	67.102.677.276,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	718.730.280.852,00	756.725.928.757,00
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	**3.094.445.817.299,00**	**2.825.931.289.983,00**
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	315.087.463.197,00	248.356.815.110,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	2.034.853.421.000,00	1.849.796.843.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	744.504.933.102,00	727.777.631.873,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**1.882.378.141.009,00**	**2.051.093.074.739,00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	459.978.600.000,00	585.034.080.000,00

NO	URAIAN	JUMLAH REALISASI	
		2019	2020
1	2	3	4
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	773.953.465.729,00	726.326.745.171,00
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	513.482.851.602,00	574.120.558.252,00
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	114.790.561.426,00	153.891.135.003,00
1.3.5	Bonus Produksi	20.172.662.252,00	11.720.556.313,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**8.137.989.873.806,00**	**7.687.179.717.004,00**
2	**BELANJA DAERAH**		
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**3.541.262.768.829,00**	**3.894.967.635.559,00**
2.1.1	Belanja Pegawai	2.253.964.864.653,00	2.142.688.581.700,00
2.1.2	Belanja Hibah	240.010.963.536,00	257.143.590.699,00
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	18.933.500.000,00	52.356.765.000,00
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	165.801.722.652,00	197.781.683.786,00
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	852.673.765.914,00	850.963.209.687,00
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	9.877.952.074,00	394.033.804.687,00
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	**4.229.955.410.948,00**	**4.510.525.745.020,00**
2.2.1	Belanja Pegawai	429.357.951.915,00	300.748.722.122,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.232.903.738.362,00	2.720.826.752.985,40
2.2.3	Belanja Modal	1.567.693.720.671,00	1.488.950.269.912,60
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**7.771.218.179.777,00**	**8.405.493.380.579,00**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**366.771.694.029,00**	**(718.313.663.575,00)**
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**		
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**846.364.143.134,97**	**1.105.295.799.163,97**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	846.364.143.134,97	1.105.295.799.163,97
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**107.840.038.000,00**	
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	107.840.038.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**738.524.105.134,97**	**1.105.295.799.163,97**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**1.105.295.799.163,97**	**386.982.135.588,97**

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Bogor Tahun 2019-2020, diolah

Tabel 3.8b
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2021-2023

NO	URAIAN	TARGET (RP)		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	8.081.129.282.297,00	6.144.172.122.804,00	7.008.103.596.265,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	3.297.695.323.957,00	3.054.110.055.899,00	3.394.647.764.271,00
1.2	Pendapatan Transfer	4.753.203.669.906,00	3.090.062.066.905,00	3.613.455.831.994,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	30.230.288.434	-	-

NO	URAIAN	TARGET (RP)		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
2	BELANJA	8.929.584.350.843,00	8.142.939.011.369,00	7.343.431.474.843,00
2.1	Belanja Operasi	5.467.786.152.026,00	5.019.341.906.657,00	3.586.704.344.900,00
2.2	Belanja Modal	1.947.616.004.807,00	2.106.204.852.853,00	2.391.136.229.933,00
2.3	Belanja Tak Terduga	99.546.052.393,00	90.000.000.768,00	75.000.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	1.414.636.141.617,00	927.392.251.091,00	1.290.590.900.010,00
	Surplus / (Defisit)	-848.455.068.546,00	-1.998.766.888.565,00	-335.327.878.578,00
3	PEMBIAYAAN	386.982.135.600,00	180.959.640.000,00	335.327.878.578,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	386.982.135.600,00	300.000.000.000,00	485.327.878.578,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	119.040.360.000,00	150.000.000.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan	-461.472.932.946,00	-1.817.807.248.565,00	-

Sumber : Bappenda, BPKAD, Bappedalitbang, Hasil Analisa, 2021

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 berdampak pada penerimaan daerah akibat merosotnya aktivitas perekonomian daerah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perpajakan dan retribusi, kebijakan pendapatan daerah di Kabupaten Bogor terutama pada tahun 2020-2023 adalah :

1. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Penyiapan dan penyempurnaan produk hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta penegakan sanksi;
3. Pemutakhiran data potensi dan data piutang pajak daerah;
4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah ;
5. Optimalisasi koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah teknis, pemerintah pusat dan provinsi;
6. Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang bermuara pada penerimaan daerah;
7. Peningkatan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak daerah bagi pembangunan;
8. Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan protokol kesehatan;
9. Peningkatan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak daerah bagi pembangunan; dan

10. Relaksasi pajak.

Adapun kebijakan belanja daerah tahun 2021-2023 diarahkan pada :

1. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dalam rangka penanganan pandemi Covid-19;
2. Optimalisasi PPKM Mikro dalam pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19 hingga tingkat desa;
3. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan, terutama yang mendukung upaya penanganan pandemi Covid-19;
4. Peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19;
3. Pelaksanaan percepatan pemulihan ekonomi terintegrasi skala daerah;
4. Penciptaan iklim kondusif dalam berinvestasi;
5. Optimalisasi sektor-sektor pendukung pariwisata dengan tetap memperhatikan kondisi pandemi Covid-19;
6. Penguatan mitigasi bencana;
7. Pelaksanaan program-program prioritas daerah dalam rangka mencapai target kinerja daerah;
8. Pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN;
9. Pemenuhan kebutuhan operasional rutin perangkat daerah; dan
10. Penguatan peran desa, masyarakat, dan lembaga yang mendukung pencapaian kinerja daerah melalui bantuan keuangan, hibah, dan bantuan sosial.

Selain itu, untuk memedomani pelaksanaan prioritas nasional dan provinsi Jawa Barat dalam wadah kewenangan kabupaten/kota, belanja belanja langsung daerah Kabupaten Bogor tahun 2021-2023 diarahkan pada :

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
   - mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD Kabupaten Bogor, termasuk belanja pegawai;
   - menerapkan merdeka belajar;
   - optimalisasi pencapaian SPM di bidang pendidikan, baik PAUD, pendidikan dasar, dan kesetaraan;
   - pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

- penyediaan pendidikan berkualitas dan merata;
- penyediaan afirmasi pendidikan;
- penguatan kelembagaan satuan pendidikan;
- serta peningkatan kualitas pembelajaran dan akademik melalui pengembangan SDM pendidikan;
- mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen di luar belanja pegawai;
- meningkatkan kualitas tata kelola rumah sakit rujukan;
- memenuhi standar SPM kesehatan;
- Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
- menyelenggarakan pelayanan jaminan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit;
- meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan;
- mengembangkan kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga medis;
- meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan hidup sehat di kalangan masyarakat, baik remaja, pemuda, dan lansia;
- meningkatkan pengawasan perijinan berusaha di bidang kesehatan;
- membangun dan merehabilitasi infrastruktur sumberdaya air;
- menyediakan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman;
- meningkatkan konektivitas jalan;
- mewujudkan kepatuhan pemanfaatan ruang pada sawah yang terlindungi;
- meningkatkan pemenuhan pelayanan infrastruktur dan sarana penunjang lainnya;
- meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang;
- meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau;
- meningkatkan pengelolaan pemakaman;
- meningkatkan pengelolaan dan penertiban reklame;
- meningkatkan penataan dan pelayanan pemukiman, PSU perumahan dan kawasan permukiman, termasuk kawasan kumuh;

- meningkatkan perbaikan rumah tidak layak huni;
- meningkatkan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar;
- meningkatkan pengawasan dan penegakan PERDA;
- membina, mengembangkan SDM di lingkungan masyarakat dalam meningkatkan upaya perlindungan masyarakat;
- meningkatkan pelayanan tanggap kebakaran sesuai standar;
- mengembangkan SDM masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana kebakaran;
- meningkatkan manajemen bencana terintegrasi antara pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana;
- meningkatkan kesiapsiagaan bencana dan penanggulangan bencana;
- meningkatkan peran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana;
- memperkuat basis data fakir miskin;
- meningkatkan perlindungan sosial;
- meningkatkan upaya penanganan dan tindak lanjut penanganan masalah sosial dan kasus-kasus sosial;
- meningkatkan upaya pembinaan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

2. Urusan wajib non pelayanan dasar
   - meningkatkan kualitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
   - meningkatkan harmonisasi hubungan industrial dan kualitas jaminan sosial tenaga kerja;
   - meningkatkan daya saing tenaga kerja;
   - mendorong perluasan kesempatan kerja;
   - memfasilitasi kegiatan transmigrasi;
   - meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan;
   - meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
   - menggalakkan program keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
   - mengembangkan SDM kader pangan;

- meningkatkan upaya ketersediaan pangan strategis melalui pengendalian distribusi pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- meningkatkan jaminan keamanan dan mutu pangan daerah strategis;
- mengembangkan konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- meningkatkan pengelolaan dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan serta pemanfaatan tanah;
- menyediakan tanah untuk kepentingan umum;
- perlindungan lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran, perusakan lingkungan, dan pengelolaan persampahan;
- meningkatkan pelayanan pemenuhan administrasi kependudukan;
- meningkatkan pembinaan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- meningkatkan status pembangunan desa;
- revitalisasi bumdes;
- meningkatkan ketertiban dan keselamatan bertransportasi;
- meningkatkan pelayanan kebutuhan informasi masyarakat;
- meningkatkan kompetensi masyarakat dibidang digital;
- mengembangkan penyelenggaraan teknologi informatika digital di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor;
- mengembangkan infrastruktur digital;
- menguatkan tata kelola informasi dan komunikasi publik di daerah;
- mewujudkan koperasi modern dan mampu bersaing di pasar domestik dan global;
- mengembangkan kapasitas SDM penyelenggara koperasi dan UKM;
- meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat pelaku koperasi dan UKM;
- meningkatkan realisasi investasi;
- meningkatkan upaya promosi dan minat investasi;

- meningkatkan kualitas layanan perijinan bagi pelaku ekonomi;
- meningkatkan pembinaan SDM pemuda dan insan olahraga;
- meningkatkan jumlah pemuda yang berwirausaha;
- meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana olahraga masyarakat;
- memfasilitasi pembinaan insan olahraga agar berprestasi nasional dan internasional;
- memperkuat ketersediaan data statistik untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan;
- memperkuat keamanan siber daerah;
- mengembangkan budaya dan potensi pariwisata daerah;
- melestarikan cagar budaya;
- meningkatkan literasi/membaca masyarakat dan gemar literasi/membaca;
- meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah;
- meningkatkan layanan dan pengembangan SDM melalui fasilitasi perpustakaan.

3. Urusan Pilihan
   - meningkatkan produksi hasil perikanan dan peternakan;
   - mendorong pengembangan ekspor produk perikanan dan peternakan;
   - meningkatkan kompetensi SDM pelaku perikanan dan peternakan;
   - meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
   - mengembangkan teknologi pertanian, hortikultura dan perkebunan;
   - mengurangi risiko bencana pertanian;
   - meningkatkan kompetensi SDM pelaku pertanian, hortikultura dan perkebunan;
   - menyiapkan sarana distribusi barang/jasa (pasar rakyat);
   - meningkatkan kompetensi SDM pelaku IKM;
   - meningkatkan pengendalian perdagangan, tata niaga dan pelaku PKL;

- meningkatkan upaya perlindungan konsumen;
- menyiapkan sentra-sentra usaha perdagangan/produksi;
- memfasilitasi dan mengendalikan pengembangan ekspor pelaku usaha.

4. Urusan Pendukung
   - meningkatkan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah;
   - meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD.
5. Unsur Penunjang
   - meningkatkan kualitas perencanaan daerah;
   - meningkatkan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah melalui perluasan jaringan penelitian;
   - meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
   - meningkatkan upaya penerimaan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah dan penerimaan lainnya dari sumber non APBD Kabupaten Bogor;
   - meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian;
   - mengembangkan SDM aparatur dan meningkatkan disiplin aparatur.
6. Unsur Pengawasan
   - meningkatkan kualitas pengawasan daerah.
7. Urusan Kewilayahan
   - memfasilitasi pengembangan kinerja desa/kelurahan;
   - meningkatkan pelayanan administrasi yang mendukung perijinan;
   - meningkatkan koordinasi pembangunan kewilayahan.
8. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
   - mengembangkan wawasan kebangsaan masyarakat;
   - meningkatkan pembinaan politik masyarakat;
   - memfasilitasi pelaksanaan Pilpres dan Pilkades;
   - meningkatkan pengawasan organisasi masyarakat/ kemasyarakatan.

Secara umum, belanja daerah dialokasikan untuk mengawal pencapaian target kinerja utama daerah dan perangkat daerah, target kinerja kunci perangkat daerah, dukungan terhadap prioritas strategis nasional dan Jawa Barat, serta pencapaian prioritas pembangunan daerah.

3.3.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah ditujukan untuk menutupi defisit belanja daerah yang melampaui pendapatan daerah. Pembiayaan daerah yang berasal dari penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan diperoleh dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Adapun pembiayaan daerah yang berasal dari pengeluaran pembiayaan akan dialokasikan untuk dana cadangan pemilihan kepala daerah periode selanjutnya, dimana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pilkada akan diselenggarakan pada Bulan November 2024.

Selanjutnya, pengeluaran pembiayaan daerah juga akan dialokasikan untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Adapun proyeksi penyertaan modal tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 disajikan sebagaimana tabel 3.9.

Tabel 3.9
Proyeksi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2021-2023

NO	BUMD	PROYEKSI PENYERTAAN MODAL (Juta Rupiah)		
		2021	2022	2023
1	Perumda Air Minum Tirta Kahuripan	-	-	-
		50.000	50.000	50.000
2	Perumda Pasar Tohaga	-	45.000	69.462
3	PT. Prayoga Pertambangan Dan Energi	-	35.375	-
4	PT. Sayaga Wisata Bogor	-	-	-
		-	-	-

NO	BUMD	PROYEKSI PENYERTAAN MODAL (Juta Rupiah)		
		2021	2022	2023
5	PT. BPRS Bogor Tegar Beriman	-	72.000	-
6	PT. LKM Bogor	-	-	-
7	PD. BPR LPK Parungpanjang	-	5.881	5.000
JUMLAH		**50.000**	**208.256**	**124.462**

Sumber : Sekretariat Daerah, 2021

3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kapasitas penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bogor selama tahun 2018-2023. Tahapan awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan sumber penerimaan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Berikut ini realisasi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020.

Tabel 3.10

Realisasi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Daerah	5.973.280.685.746,00	6.975.053.078.040,35	7.300.485.379.647,18	8.137.989.873.806,00	7.687.179.717.004,00
2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.349.935.661.274,33	692.814.027.451,33	685.197.397.350,79	846.364.143.134,97	1.105.295.799.163,97
3	Pencarian Dana Cadangan	-	-	218.000.000.000,00	-	-
4	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	20.664.814.429,00	-	-
5	Penerimaan Hasil Investasi Daerah	-	3.773.102.576,38	-	-	-
Total Penerimaan		**7.323.216.347.020,33**	**7.671.640.208.068,06**	**8.224.347.591.426,97**	**8.984.354.016.940,97**	**9.150.155.739.592,97**
Dikurangi :						
1	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	165.100.000.000,00	110.700.000.000,00	72.923.815.400,00	107.840.038.000,00	-
2	Belanja Tidak Langsung	3.083.375.228.502,00	3.135.997.525.254,00	3.672.650.462.819,00	3.541.262.768.829,00	3.894.967.635.559,00
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah		**4.074.741.118.517,67**	**4.424.942.682.814,06**	**4.478.773.313.207,97**	**5.335.251.210.111,97**	**4.897.507.880.608,97**

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020, diolah

Tabel 3.11
Realisasi dan Rencana Penggunaan
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023

No.	Jenis Data	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	P-I	4.118.593.945.722	3.495.285.667.341	4.414.140.582.343	3.924.766.168.047	3.671.715.737.422
2	P-II	3.181.666.675.653	2.767.558.045.978	948.762.316.847	1.076.683.712.952	734.343.147.484
3	P-III	3.153.493.489.579	2.620.061.502.989	3.566.681.451.653	3.141.489.130.370	2.937.372.589.937
Total		**10.453.754.110.954**	**8.882.905.216.308**	**8.929.584.350.843**	**8.142.939.011.369**	**7.343.431.474.843**

Sumber : Hasil analisis, 2021

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dialokasikan untuk mendanai prioritas pembangunan sebagai berikut :

- Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai program-program strategis yang mendukung tercapainya target kinerja utama daerah dan indikator-indikator Pancakarsa, sebagai komitmen perwujudan janji politis kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- Prioritas II, dialokasikan untuk mendanai program-program yang mendukung pelaksanaan kewenangan daerah melalui belanja prioritas utama perangkat daerah untuk mencapai target kinerja kunci perangkat daerah.
- Prioritas III, dialokasikan untuk mendanai program penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Perubahan RPJMD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor didasari oleh 2 (dua) faktor penting, yaitu adanya perubahan kebijakan nasional berupa pemberlakuan sejumlah peraturan perundang-undangan serta dampak terjadinya bencana alam dan non alam, yang dalam hal ini adalah pandemi Covid-19. Pandemi ini berdampak cukup besar, baik secara sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat, maupun dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan target capaian kinerja daerah, serta memunculkan permasalahan-permasalahan krusial yang perlu segera diselesaikan hingga akhir periode.

Permasalahan dan isu strategis daerah perlu ditelaah dengan seksama dalam rangka menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam sisa periode RPJMD Tahun 2018-2023. Dalam hal perubahan RPJMD, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor masih dianggap relevan dengan permasalahan dan isu strategis kekinian yang terjadi, namun dalam rangka menyusun perencanaan yang berkualitas dan tepat sasaran, serta sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini, hal mendasar yang wajib diidentifikasi, dirumuskan dan dianalisis oleh Pemerintah Kabupaten Bogor adalah permasalahan-permasalahan dan isu strategis yang mengemuka dan prioritas untuk segera diselesaikan di sisa periode tahun 2018-2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, **permasalahan pembangunan** didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Adapun **isu strategis** adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak,

berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Permasalahan yang dirumuskan terutama mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu : 1) aspek kesejahteraan masyarakat; 2) aspek daya saing daerah; dan 3) aspek pelayanan umum. Pandemi Covid-19 yang terjadi mulai awal tahun 2020 menyebabkan permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bogor, terutama dalam aspek kesejahteraan masyarakat.

4.1 Permasalahan Pembangunan

4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan aspek makro daerah yang merepresentasikan kondisi daerah secara nasional. Berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat, permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan adalah :

1. Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas sumberdaya manusia merepresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara makro, indikator yang digunakan untuk merepresentasikan kondisi kualitas SDM adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Bogor menunjukkan angka capaian 70,40 poin. Kondisi ini mengalami penurunan sebesar 0,25 poin dari capaian tahun 2019. Hal ini diakibatkan oleh melemahnya capaian komponen pembentuk IPM, dengan rincian sebagai berikut :

- Komponen kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) tercapai sebesar 71,17 poin. Capaian ini hanya mengalami kenaikan sebesar 0,16 poin dari tahun sebelumnya.
- Komponen pendidikan yang terdiri dari Harapan Lama Sekolah (HLS), tercapai sebesar 12,48 tahun, sedikit mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 0,01 tahun; dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tercapai sebesar 8,30 tahun, hanya meningkat 0,01 tahun dari tahun 2019.
- Komponen pengeluaran per kapita per tahun, mengalami penurunan paling tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 10.317 ribu rupiah.

Secara umum, penurunan kualitas sumber daya manusia dilihat dari IPM dominan disebabkan oleh penurunan pengeluaran perkapita masyarakat per tahun.

2. Menurunnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro daerah yang merepresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Akibat pandemi Covid-19, LPE Kabupaten Bogor tahun 2020 mengalami kontraksi yang sangat tajam, sehingga mencapai -1,77 persen. Kondisi ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan LPE tahun 2019 yang mencapai 5,85 persen.

Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi secara makro dapat menyebabkan multi dampak bagi masyarakat, terutama terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

3. Meningkatnya Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro daerah yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Akibat pandemi Covid-19, kemiskinan di Kabupaten Bogor tahun 2020 mencapai 7,69 persen. Kondisi ini meningkat tajam dari tahun 2019 yang mencapai 6,66 persen.

4. Meningkatnya Pengangguran

Pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 berdampak besar terhadap aktivitas perekonomian daerah, terutama di sektor sekunder dan tersier yang menyerap banyak tenaga kerja. Pada tahun 2020, tidak sedikit pelaku usaha yang berhenti permanen atau menghentikan sementara usahanya akibat pandemi. Kondisi ini menyebabkan banyak tenaga kerja yang diberhentikan atau dirumahkan sementara, sehingga menyebabkan angka pengangguran di Kabupaten Bogor mencapai 14,29 persen. Kondisi ini meningkat tajam dari kondisi pengangguran tahun 2019 yang mencapai angka 9,06 persen.

5. Menurunnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara khusus ditinjau dari besarnya kemampuan daya beli masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dipengaruhi dari besarnya kemampuan daya beli masyarakat. Kemampuan daya beli masyarakat tahun 2020 tercatat sebesar Rp 10.317.000 per kapita per tahun. Kondisi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp 10.683.000 per tahun. Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat diindikasikan dengan upah rata-rata di Kabupaten Bogor yang masih di berada di bawah target minimal, yaitu sebesar

Rp 19.601,00/ jam dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 20.000,00/ jam.

6. **Meningkatnya Ketimpangan Pembangunan**

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah tingkat ketimpangan pembangunan. Berdasarkan capaian tahun 2020, Indeks Ketimpangan Williamson Kabupaten Bogor tercatat sebesar 0,99 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Bogor sangat tidak merata, dan semakin timpang jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 yang tercatat sebesar 0,93 poin.

Ketimpangan pembangunan ini menjadi permasalahan di Kabupaten Bogor yang perlu ditindaklanjuti dan ditangani hingga akhir periode tahun 2023.

7. **Rendahnya Mitigasi Bencana Alam dan Non Alam**

Letak geografis Kabupaten Bogor yang terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah memungkinkan terjadinya bencana alam. Disamping itu, banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Bogor juga berpotensi memunculkan bencana non alam. Salah satu permasalahan yang muncul adalah rendahnya mitigasi terhadap bencana alam maupun non alam yang ditandai dengan masih tingginya kelompok masyarakat yang terdampak bencana, baik bencana alam maupun non alam. Di sisi lain, rendahnya mitigasi juga terlihat dari luas wilayah yang terdampak bencana terutama di daerah pinggiran sungai dan perbukitan.

8. **Tingginya Tingkat Kerawanan Sosial**

Kerawanan sosial merupakan salah satu dampak yang muncul akibat kurangnya aksesibilitas terhadap sumber-sumber yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Kerawanan sosial di Kabupaten Bogor cenderung meningkat sejak awal terjadinya Pandemi Covid-19 hingga saat ini.

4.1.2. Aspek Daya Saing Daerah

Permasalahan yang mengemuka dari aspek daya saing daerah diuraikan sebagai berikut :

1. Kabupaten Bogor memiliki 416 desa yang tersebar di 39 kecamatan, namun desa yang berstatus mandiri hingga tahun 2020 baru sebanyak 29 desa. Untuk meningkatkan daya saing daerah, perlu dilaksanakan program-program strategis yang dapat mendorong desa menuju desa mandiri.

2. Masih rendahnya kontribusi nilai ekspor bersih barang dan jasa terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Berdasarkan data BPS tahun 2019, kontribusi ekspor bersih barang dan jasa baru mencapai Rp 9,96 triliun atau 4,20 persen dari total PDRB Kabupaten Bogor, sehingga Pemerintah Kabupaten Bogor perlu melakukan langkah-langkah melalui pelaksanaan program yang tepat untuk meningkatkan nilai ekspor bersih tersebut.
3. Cukup tingginya angka ketergantungan penduduk di luar usia kerja terhadap penduduk usia kerja. Hal ini ditunjukkan dengan rasio ketergantungan di Kabupaten Bogor pada tahun 2020 sebesar 41,56 persen. Hal ini menunjukkan bahwa 100 (seratus) orang penduduk usia produktif menanggung hampir 42 orang yang tidak produktif. Semakin besar rasio ketergantungan berarti semakin besar beban tanggungan bagi kelompok usia produktif dan semakin besar pula tanggungan Kabupaten Bogor terhadap produktivitas penduduknya.
4. Besarnya pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga terhadap barang-barang akhir dan jasa-jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan lainnya serta berbagai jenis pelayanan menunjukkan tingkat pengeluaran konsumsi masyarakat. Kondisi tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pengeluaran tercatat sebesar 66,96 persen. Kondisi ini mengalami penurunan dari tahun 2019 yang tercapai sebesar 68,52 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat permasalahan terhadap rendahnya tingkat konsumsi masyarakat, yang mungkin diakibatkan oleh rendahnya penghasilan, terutama sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Berdasarkan data tahun 2020, upah rata-rata yang diterima masyarakat masih mencapai Rp 19.601,00/jam, dimana kondisi tersebut berada di bawah target minimal yang ditetapkan sebesar Rp 20.000,-/jam.

4.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan dalam aspek pelayanan umum dijabarkan berdasarkan urusan, bidang urusan dan unsur yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor. Permasalahan yang perlu diselesaikan dapat berupa permasalahan yang menjadi dampak langsung perubahan kebijakan atau akibat pandemi Covid-19, maupun permasalahan dalam pelaksanaan

kewenangan bidang urusan/unsur. Adapun uraian permasalahan untuk masing-masing bidang urusan/unsur adalah sebagai berikut :

1. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

1.1 Pendidikan

Permasalahan lingkup pelayanan umum bidang urusan pendidikan adalah belum optimalnya pelayanan pendidikan, terutama dalam hal :

a. Belum tercapainya Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar/sederajat, karena hingga tahun 2020 baru mencapai 88,75 persen;
b. Belum tercapainya Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama/sederajat, karena hingga tahun 2020 baru mencapai 83,21 persen;
c. Belum seluruh guru memenuhi kualifikasi akademik S1/D4, yang ditandai dengan persentase guru berkualifikasi pendidikan S1/D4 baru mencapai 79,00 persen;
d. Masih terdapat penduduk usia sekolah yang putus sekolah, yang ditandai dengan 0,30 persen pada jenjang SD dan 0,27 persen pada jenjang SMP;
e. Terkait dengan dampak pandemi Covid-19 yang berkonsekuensi pada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ), masih terdapat wilayah (hingga tingkat desa) di Kabupaten Bogor yang sulit mengakses jaringan telekomunikasi internet, serta masih banyak peserta didik yang tidak bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh karena tidak memiliki peralatan yang dibutuhkan, tidak memiliki kuota internet, serta tidak memiliki akses internet.

1.2 Kesehatan

Permasalahan lingkup pelayanan umum bidang urusan kesehatan adalah belum optimalnya pelayanan kesehatan, terutama dalam hal :

a. Pencegahan, penanganan, dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat. Hal ini menjadi permasalahan, karena belum tertanamnya budaya masyarakat dalam menaati protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah;
b. Masih perlunya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, baik sarana maupun prasarana kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

c. Masih perlunya intervensi pemerintah dalam meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin, terutama dalam cakupan kepesertaan jaminan kesehatan;

d. Masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan dan tenaga medis;

e. Masih belum optimalnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, dan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ini bergerak secara fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tercatat pada tahun 2018 realisasi indikator ini mencapai 87,73 persen, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 88,87 persen. Namun pada tahun 2020 capaian indikator ini kembali mengalami penurunan menjadi 85,00 persen;

f. Masih belum optimalnya indikator cakupan desa/kelurahan UCI, diketahui bahwa selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 capaian indikator ini mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 2019 realisasinya mencapai 0,900 persen namun pada tahun 2020 capaiannya menurun sebesar 0,651 persen. Penurunan capaian indikator ini diakibatkan oleh penyebaran virus Covid-19 yang menyebabkan terhentinya manajemen program imunisasi berupa *defaulter tracking* (pencarian anak-anak yang telah mendapat imunisasi dosis pertama atau dapat layanan/akses tetapi tidak datang lagi untuk imunisasi selanjutnya);

g. Masih rendahnya persentase *Open Defecation Free (ODF)* atau bebas buang air sembarang pada tahun 2020 baik tingkat masyarakat (61,36 persen) maupun tingkat desa (11,03 persen), sementara kondisi ideal adalah 80 persen untuk tingkat masyarakat dan desa.

1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan lingkup pelayanan umum bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya tingkat pelayanan pemenuhan infrastruktur jalan dan irigasi yang berkualitas, yakni baru mencapai 75,53 persen di tahun 2020. Hal ini terlihat dari persentase kondisi jalan baik yang baru mencapai 82,12 persen, serta luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi baru mencapai 68,94 persen;

b. Belum optimalnya tingkat pelayanan pemenuhan infrastruktur wilayah, yakni baru sebesar 72,12 persen. Hal ini terlihat dari tingkat pelayanan aksesibilitas air minum berdasarkan SPAM baru sebesar 72,94 persen, dan tingkat pelayanan pengolahan air limbah domestik baru mencapai 71,30 persen;
c. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung pergerakan orang dan barang serta aktivitas perekonomian;
d. Belum optimalnya penanganan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian;
e. Belum optimalnya dukungan infrastruktur terhadap pengembangan potensi pariwisata daerah.

1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pelayanan umum dalam bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah :

a. Belum terpenuhinya penyediaan hunian tetap bagi korban bencana, dimana pada tahun 2020 baru dibangun hunian sementara sebanyak 1.713 unit;
b. Belum terselesaikannya target penuntasan kawasan kumuh perkotaan, dimana pada tahun 2020 target tersebut hanya mampu terealisasi sebesar 56,53 persen, atau 129,81 Ha dari total luas kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Bogor yang mencapai 229,65 Ha;
c. Belum optimalnya upaya rehabilitasi rumah tidak layak huni;
d. Belum optimalnya penyediaan pelayanan kebutuhan fasilitas prasarana dan sarana umum permukiman;
e. Belum optimalnya penyediaan ruang terbuka publik di seluruh kecamatan.

1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Permasalahan pelayanan umum di bidang ketenteraman, ketertiban umum, pelindungan masyarakat adalah :

a. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum. Terkait dengan penanganan trantibum di masa pandemi Covid-19, masih belum optimalnya penanganan trantibum terhadap masyarakat yang tidak tertib melaksanakan protokol kesehatan di tempat umum;

b. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana penegakan peraturan daerah dan patroli ketentraman dan ketertiban umum;
c. Masih rendahnya tingkat pelayanan mitigasi bencana, dimana tahun 2020 baru mencapai 21,05 persen;
d. Belum optimalnya penanganan pasca bencana terutama berkaitan dengan layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Penyediaan hunian tetap bagi para korban bencana alam di wilayah Bogor Barat awal tahun 2020 membutuhkan prioritas perhatian agar dapat segera tertangani;
e. Masih rendahnya jangkauan pelayanan pemadam kebakaran yang diakibatkan oleh terbatasnya jumlah posko damkar karena wilayah Kabupaten Bogor yang cukup luas sementara masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemadam kebakaran yang cukup tinggi.

1.6 Sosial

Permasalahan pelayanan umum di lingkup bidang urusan sosial adalah :

a. Belum optimalnya penanganan dan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
b. Belum optimalnya penanganan sosial bagi korban bencana.

2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1. Tenaga Kerja

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan tenaga kerja adalah :

a. Belum optimalnya upaya fasilitasi dan informasi kerja bagi pencari kerja;
b. Belum optimalnya upaya perluasan kerjasama dengan pihak-pihak pemberi kerja;
c. Belum optimalnya fasilitasi sertifikasi kompetensi kerja bagi pekerja dan pencari kerja;
d. Belum optimalnya fasilitasi pelatihan kompetensi bagi calon tenaga kerja.

2.2 Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang belum terselesaikan adalah :

a. Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja perempuan;

b. Masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif yang belum mencapai 30 persen;
c. Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak, yang ditandai dengan masih tingginya angka KDRT, kekerasan terhadap anak, dan pekerja anak.

2.3 Pangan

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan pangan adalah :

a. Masih terdapatnya desa rawan pangan;
b. Belum optimalnya pengawasan terhadap keamanan pangan;
c. Belum optimalnya penyediaan cadangan pangan daerah;
d. Belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur pendukung ketahanan dan kemandirian pangan.

2.4 Pertanahan

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan pertanahan adalah :

a. Masih banyaknya aset Pemerintah Kabupaten Bogor yang belum bersertifikat;
b. Belum optimalnya pengelolaan administrasi pertanahan yang menjadi kewenangan daerah;
c. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan tanah kosong;
d. Belum optimalnya penatagunaan tanah.

2.5 Lingkungan hidup

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan lingkungan hidup adalah :

a. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bogor. Hal ini terlihat dari capaian indeks kualitas lingkungan hidup yang baru mencapai angka 55,95 persen pada tahun 2022;
b. Masih rendahnya tingkat pengelolaan limbah beracun dan berbahaya, karena pada tahun 2020, masih terdapat lebih dari 80 persen pelaku usaha tidak melakukan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun;
c. Masih rendahnya tingkat pengawasan terhadap lingkungan hidup. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan yang masih kurang dari 40 persen;
d. Masih rendahnya kualitas tutupan lahan di Kabupaten Bogor;
e. Belum optimalnya penanganan persampahan. Pada tahun 2020, tingkat pengelolaan persampahan masih berada dibawah 64,73

persen. Salah satu faktor yang mempengaruhi optimalisasi penanganan persampahan adalah belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana persampahan.

2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah :

a. Belum optimalnya pelayanan pemenuhan kebutuhan administrasi kependudukan, seperti :
   - tingkat penerbitan kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) yang berumur di bawah 17 tahun tahun 2020 belum mencapai 20 persen;
   - tingkat penerbitan akta kelahiran pada tahun 2020 masih berada di bawah 85,18 persen.

b. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh unsur-unsur perangkat daerah dalam pelaksanaan kewenangannya. Hal ini ditandai dengan tingkat pemanfaatan data kependudukan yang masih berada di bawah 27,78 persen.

2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah :

a. Belum optimalnya pembinaan terhadap desa yang ditandai dengan masih rendahnya desa yang mencapai status mandiri, dan masih terdapat desa yang berstatus tertinggal. Tercatat pada tahun 2020, desa berstatus mandiri baru sebanyak 29 desa, atau sebesar 6,97 persen; desa berstatus maju sebanyak 131 desa, atau sebesar 31,49 persen; desa berstatus berkembang sebanyak 252 desa, atau sebesar 60,58 persen, dan desa berstatus tertinggal sebanyak 4 desa, atau sebesar 0,96 persen;

b. Belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur desa, terutama jalan dan jembatan yang dapat meningkatkan akses orang dan barang, serta menghubungkan sumber-sumber produksi di desa dengan pasar;

c. Belum optimalnya penataan administrasi pemerintahan desa, yang ditandai oleh :
   - belum terintegrasinya perencanaan program pembangunan di desa dengan program pembangunan daerah;

- belum optimalnya penataan data dan informasi desa;
- belum optimalnya penatausahaan pelaporan keuangan desa.

d. Belum optimalnya upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat desa yang ditandai dengan :
   - masih rendahnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa;
   - masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program pembangunan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Bogor.

f. Belum optimalnya sinergi antar perangkat daerah dalam melakukan pembinaan terhadap desa, serta belum optimalnya sinergi pelaksanaan pembangunan pada satu lokus desa yang sama;

g. Belum optimalnya kinerja kelembagaan masyarakat dalam mendukung kinerja pembangunan desa;

h. Kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan;

i. Masih kurangnya kelembagaan keuangan di desa yang dapat menyediakan modal usaha;

j. Belum bersinerginya hubungan antar kelembagaan yang ada di perdesaan;

k. Masih rendahnya kapasitas kader pembangunan desa dan anggota kelembagaan masyarakat;

l. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa;

m. Masih rendahnya kinerja kelembagaan pemerintah desa;

n. Belum tertibnya administrasi desa.

2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang belum terselesaikan adalah :

a. Belum optimalnya upaya pengendalian penduduk;

b. Belum optimalnya pelaksanaan program keluarga berencana dan penyuluhan terhadap masyarakat;

c. Jumlah pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 12,50 persen masih di bawah target yaitu sebesar 23,50 persen.

2.9 Perhubungan

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan perhubungan yang belum terselesaikan adalah :

a. Tingkat kinerja pelayanan lalu lintas (v/c ratio) pada tahun 2019 belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 0,82 dari 0,80. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pelaksanaan kegiatan di jalan kabupaten seperti pemasangan fasilitas LLAJ, pengembangan sarana prasarana, pengawasan, dan pengendalian sarana prasarana, dikarenakan adanya *refocusing* anggaran untuk penanggulangan Covid-19;

b. Persentase layanan angkutan darat pada tahun 2019 sudah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 65,00 persen dari 60,00 persen. Kemudian pada tahun 2020 realisasinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 0,65 persen, namun tidak ada peningkatan capaian dari tahun 2019-2020 dikarenakan pada tahun 2019 ada beberapa kegiatan dari pusat untuk penambahan pelayanan angkutan umum seperti DAMRI di jalur perintis barat, pengembangan Jabodetabek *Regency* dan Jabodetabek *Airport Connection* sehingga menambah jumlah persentase target dari pelayanan trayek yang ditetapkan, pada tahun 2019-2020 mengajukan kegiatan *rerouting* untuk merubah target dan pelayanan trayek angkatan umum di Kabupaten Bogor untuk mencapai 80 persen layanan angkutan umum, apabila *rerouting* tidak dilaksanakan dan pengembangan angkutan umum massal tidak terealisasi, maka target sampai dengan tahun 2023 tetap di 65 persen dan tidak akan mencapai target di 80 persen.

2.10 Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan komunikasi dan informatika adalah terjadi penurunan pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terjadi pada tahun 2019 dari target 3,00 (poin), terealisasi 2,58 (poin) dikarenakan masih belum maksimalnya penilaian pada domain tatakelola (kelembagaan, strategi dan perencanaan, TIK). Akan tetapi pada tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika telah berhasil menaikan nilai Indeks SPBE yang semula target 3,00 (poin), berdasarkan hasil verifikasi Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nilai Indeks SPBE Kabupaten Bogor sebesar 3,27 (poin) dengan predikat baik.

2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah persentase koperasi aktif dan sehat yang terjadi penurunan yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. Tercatat pada tahun 2019 mencapai 35,68 persen. Namun pada tahun 2020 capaian indikator ini kembali mengalami penurunan menjadi 35,44 persen. Hal ini disebabkan di masa pandemi Covid-19 kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tidak diperkenankan pelaksanaannya secara tatap muka, namun dapat dilaksanakan secara virtual, sedangkan para pengurus koperasi banyak yang belum siap untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan secara virtual, yang pada akhirnya banyak juga koperasi yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Kemudian jumlah usaha mikro yang dikembangkan menjadi usaha kecil juga mengalami penurunan dari tahun 2019-2020 sebesar 88 unit menjadi 20 unit. Penurunan jumlah Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil sangat dirasakan oleh para pelaku UMKM, khususnya pada saat memasarkan produknya, hal ini disebabkan pelaku UMKM belum menguasai teknologi pemasaran melalui media sosial.

2.12 Penanaman Modal

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan penanaman modal yang belum terselesaikan adalah :

a. Pandemi Covid-19 yang berdampak pada turunnya jumlah nilai investasi di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2018, jumlah nilai investasi 8,69 triliun rupiah, mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 9,18 triliun rupiah. Namun pada tahun 2020, realisasi menurun dan tidak mencapai target yaitu sebesar 9,15 triliun rupiah;
b. Realisasi jumlah investor berskala nasional PMA/PMDN mengalami fluktuasi. Terjadi penurunan realisasi di tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu dari 331 perusahaan menjadi 328 perusahaan. Namun mengalami kenaikan dan melebihi target di tahun 2020 yaitu sebanyak 357 perusahaan;

c. Realisasi rasio daya serap tenaga kerja mengalami fluktuasi sejak tahun 2018. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan dari sebelumnya yaitu dari 20 orang/perusahaan menjadi 29 orang/perusahaan. Pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 10-11 orang/perusahaan. Hal tersebut bisa jadi merupakan pengaruh dari pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada kemampuan perusahaan untuk menyerap tenaga kerja baru;
d. Kenaikan/penurunan nilai realisasi investasi PMDN mengalami fluktuasi, walaupun selalu melebihi target yang ditetapkan. Di tahun 2019 mengalami penurunan namun melebihi target yaitu 21,10 persen dari target 4,7 persen. Di tahun 2020 juga mengalami peningkatan dan melebihi target yaitu 42,86 persen dari target 5,5 persen. Hal tersebut berbanding lurus dengan realisasi investasi secara keseluruhan yang mengalami penurunan karena realisasi PMA mengalami penurunan dibanding dengan PMDN;
e. Rata-rata waktu penyelesaian izin melalui aplikasi Online Perizinan Transparan Informatif dan Sistematis (OPTIMIS) berhasil mencapai target setiap tahunnya. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus berusaha meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat sehingga pelayanan dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.
f. Realisasi Perizinan non OSS berstandar ISO mengalami perubahan indikator. Pada tahun 2018 yang menjadi target indikator Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah perizinan berstandar ISO sejumlah 77 izin, namun sejak diberlakukannya sistem OSS pada tahun 2019, targetnya diturunkan pada tahun 2019 menjadi 20 izin dan 2020 menjadi 40 izin, dikarenakan target yang di ISO kan hanya perizinan non OSS. Realisasi pada tahun 2019 dan 2020 sebanyak 43 izin.

2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan kepemudaan dan olahraga yang belum terselesaikan adalah :

a. Indikator persentase pemuda binaan Dinas Pemuda dan Olahraga yang berwirausaha mengalami penurunan menjadi 0,98 persen karena adanya pandemi Covid-19;

b. Tidak ada realisasi pada jumlah atlet berpretasi tahun 2020, dikarenakan terjadinya pembatalan di berbagai acara Dispora yang disebabkan adanya pandemi Covid-19;
c. Jumlah sarana prasarana olahraga (GOM, Stadion, *Venue* cabang olahraga dan *Sport Center* Karadenan) yang dibangun pada tahun 2020 tidak terealisasi dikarenakan adanya *refocusing* anggaran untuk penanggulangan Covid-19.

2.14 Statistik

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan statistik yang belum terselesaikan adalah masih kurangnya koordinasi antar pemangku kewenangan dalam mengintegrasikan sumber data dan informasi.

2.15 Persandian

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan persandian yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan persandian daerah.

2.16 Kebudayaan

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan kebudayaan yang masih terjadi adalah jumlah warisan budaya yang dilestarikan terbatas dan tidak bertambah. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Sehingga terbatasnya jumlah anggaran untuk meningkatkan jumlah warisan budaya yang dilestarikan.

2.17 Perpustakaan

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan perpustakaan yang belum terselesaikan adalah :

a. Belum optimalnya pemanfaatan digitalisasi perpustakaan dan penyebarluasan informasi perpustakaan;
b. Belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan digital dalam pembelajaran jarak jauh;
c. Masih kurangnya jumlah perpustakaan dan koleksi perpustakaan yang dapat diakses oleh masyarakat.

2.18 Kearsipan

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan kearsipan yang belum terselesaikan adalah :

a. Persentase pengunjung perpustakaan menurun pada tahun 2019 sebesar 1,31 persen, menjadi 0,68 persen di tahun 2020 dikarenakan adanya Covid-19;

b. Belum tercapainya target pada pengelolaan arsip secara baku berbasis TIK pada tahun 2020.

3 Urusan Pilihan

3.1 Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan kelautan dan perikanan yang belum terselesaikan adalah :

a. Produksi ikan konsumsi menurun dibandingkan tahun 2019 karena turunnya permintaan ikan sehingga banyak pembudidaya ikan menunda kegiatan budidayanya (dampak pandemi Covid-19);
b. Produksi olahan ikan menurun dibandingkan tahun 2019 karena berkurangnya impor dan turunnya daya beli masyarakat sehingga banyak pengolah ikan yang mengurangi jumlah produksinya (dampak pandemi Covid-19);
c. Produksi benih ikan konsumsi menurun dibandingkan tahun 2019 karena turunnya permintaan ikan sehingga banyak pembudidaya ikan menunda kegiatan budidayanya (dampak pandemi Covid-19);
d. Produksi daging menurun dibandingkan tahun 2019 karena dibatasinya operasional hotel, restoran dan catering yang memengaruhi permintaan daging terutama ayam ras pedaging sebagai kontributor utama produksi daging di Kabupaten Bogor. Selain itu, jumlah pemotongan qurban juga mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada produksi daging ruminansia (dampak pandemi Covid-19).

3.2 Pariwisata

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan pariwisata yang belum terselesaikan adalah terjadinya penurunan angka kunjungan wisatawan di Kabupaten Bogor yang sangat signifikan karena adanya pandemi Covid-19 sebesar 54,02 persen atau menjadi 4.469.286 wisatawan.

3.3 Pertanian

Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Bogor tahun 2020 cenderung mengalami penurunan di beberapa unit produksi, namun capaian tersebut telah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, kecuali untuk produksi palawija dan tanaman hias bunga. Selain itu, penurunan realisasi untuk produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan secara umum terjadi karena perubahan perhitungan yang semula dihitung berdasarkan statistik

pertanian (Rumus Kementerian Pertanian) menjadi KSA (Kerangka Sample Area) yang dihitung bersama BPS (Badan Pusat Statistik).

3.4 Kehutanan

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan kehutanan adalah belum optimalnya pemanfaatan taman hutan rakyat skala kabupaten.

3.5 Energi dan Sumberdaya Mineral

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan energi dan sumberdaya mineral adalah belum terpetakannya kewenangan pengelolaan panas bumi dan pemanfaatannya di Kabupaten Bogor akibat belum jelasnya tata aturan dan sinergi pengelolaan dengan pemerintah provinsi.

3.6 Perdagangan

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan perdagangan yang belum terselesaikan adalah :

a. Produk daerah belum berdaya saing dan berkelanjutan;
b. Kualitas pelaku usaha belum meningkat;
c. Pelayanan rekomendasi izin perdagangan terhadap masyarakat belum optimal.

3.7 Perindustrian

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan perindustrian yang belum terselesaikan adalah :

a. Industri kecil menengah belum berdaya saing;
b. Kualitas SDM industri belum meningkat;
c. Pelayanan rekomendasi izin industri terhadap masyarakat belum optimal.

3.8 Transmigrasi

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan transmigrasi adalah belum optimalnya pengelolaan transmigrasi.

4 Unsur Pendukung

4.1 Sekretariat Daerah

Permasalahan yang belum terselesaikan adalah :

a. Belum optimalnya pelaksanaan pengoordinasian antar perangkat daerah;
b. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi administrasi dan kebijakan pemerintah daerah;

c. Belum optimalnya fungsi pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait upaya peningkatan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah.

4.2 Sekretariat DPRD

Permasalahan yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi terhadap DPRD. Hal ini ditunjukkan oleh persentase tingkat kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD adalah sebesar 85,45 persen dari target 86,00 persen pada tahun 2020, dengan tingkat capaian 99,36 persen.

5 Unsur Penunjang

5.1 Perencanaan

Permasalahan lingkup bidang urusan perencanaan yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya perencanaan yang integratif antar pemangku kepentingan, adanya keterlambatan pengiriman data menyebabkan keterlambatan dalam proses perencanaan.

5.2 Keuangan

Permasalahan lingkup bidang urusan keuangan yang belum terselesaikan adalah kapasitas pengelola keuangan dan barang daerah yang belum optimal dalam mengimplementasikan peraturan pengelolaan keuangan dan barang daerah. Kemudian permasalahan lainnya yaitu belum terciptanya tata kelola pendapatan daerah yang bersih, efektif dan akuntabel.

5.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan lingkup kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang belum terselesaikan adalah :

a. Belum terpenuhinya kebutuhan ASN untuk melaksanakan kewenangan daerah, serta belum terpetakan dengan baik penempatan ASN sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi. Di tahun 2020 persentase penataan ASN sesuai formasi dan kebutuhan sebesar 71,55 persen;
b. Belum terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi ASN berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kewenangan daerah. Di tahun 2020 persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebesar 9,32 persen.

5.4 Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan yang belum terselesaikan adalah masih rendahnya implementasi inovasi serta hasil penelitian dan pengembangan untuk masyarakat.

6 Unsur Pengawasan

Permasalahan yang belum terselesaikan adalah belum terpenuhinya tenaga auditor dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan di seluruh perangkat daerah.

7 Unsur Kewilayahan

Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki 40 kecamatan yang mengelola kewilayahan. Dalam hal ini, permasalahan bidang urusan kewilayahan adalah belum optimalnya fungsi pengoordinasian kecamatan dan pembinaan terhadap desa.

8 Unsur Kesatuan Bangsa dan politik

Permasalahan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik adalah belum optimalnya pembinaan masyarakat, terutama untuk penguatan ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan, revolusi mental, kewaspadaan nasional, penanganan konflik dan pendidikan politik dalam negeri.

4.2 Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi akumulatif dari sekian banyak permasalahan pembangunan daerah yang menjadi fokus dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kewenangan daerah. Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bogor tidak terlepas dari perencanaan pembangunan nasional dan Jawa Barat. Oleh karena itu, isu strategis nasional dan provinsi Jawa Barat merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipedomani sebagai bentuk sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor.

Di sisi lain, sebagai bentuk tindak lanjut dari agenda internasional yang disepakati secara internasional, perencanaan pembangunan wajib memperhatikan poin-poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau

Sustainable Development Goals (SDG's) sebagai bagian dari substansi perencanaan jangka panjang. Adapun keterkaitan perencanaan pembangunan dengan isu-isu strategis nasional dan provinsi Jawa Barat serta SDG's diuraikan sebagai berikut :

4.2.1 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 maka visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah :

"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi"

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu :

Misi Satu : **Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa** melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban.

Konsep Jabar Juara secara "batin" sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Secara umum misi pertama memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Jawa Barat sebagai manusia dengan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan peran rumah ibadah sebagai pusat pembangunan peradaban di Jawa Barat. Melalui misi ini peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban diperkuat untuk melahirkan manusia Jawa Barat yang berakhlak baik dan berjiwa besar. Selain masjid, pembangunan manusia di Jawa Barat yang bertaqwa juga dilakukan dengan pengembangan pesantren sebagai ujung tombak membangun lingkungan masyarakat yang damai, tentram, dan bahagia.

Misi Dua : **Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif** melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.

Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Jawa Barat; agar rakyat Jawa Barat dapat menikmati pendidikan dan kesehatan; perempuan Jawa Barat mampu mengekspresikan potensi kebaikannya dengan optimal, dan para pemuda

menyadari panggilan jiwanya dan dapat berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat mendukung lahirnya masyarakat yang bahagia. Kebahagiaan diperoleh dari terjaminnya kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial juga mendorong lahirnya masyarakat yang berkualitas dan produktif. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya.

Misi Tiga : **Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan** melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

Misi 3 dalam penjawaban visi Jabar Juara Lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan. Infrastruktur adalah investasi pembangunan yang akan mendorong lahirnya pusat pertumbuhan baru, mengurangi beban logistik yang mampu menjaga stabilitas harga, serta mempercepat perpindahan manusia dan barang antar kota dan kabupaten. Berbagai aktivitas pembangunan dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak terlampaui dan kelestarian ekosistem tetap terjaga.

Misi Empat : **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil** melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.

Misi 4 membawa amanah yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Barat. Ekonomi umat yang adil dan sejahtera yang dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi Jawa Barat.

Penggunaan teknologi untuk optimalisasi proses dan menghubungkan antar pelaku ekonomi secara cepat dapat

mengatasi ketimpangan antar kawasan perdesaan dan perkotaan, juga dapat mengurangi angka pengangguran melalui terbukanya peluang kerja baru.

Misi Lima : **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

Dalam tata kelola pemerintahan, *'Good Governance'* atau 'Tata Kelola yang Baik' harus diimplementasikan di berbagai skala, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan dengan delapan pilarnya yaitu konsensus, partisipasi, ketaatan pada hukum, efektivitas dan efisiensi, setara dan inklusif, responsif, transparan dan akuntabel.

Di Jawa Barat, *Good Governance* direpresentasikan melalui penerapan provinsi cerdas (*smart province*) untuk menjamin kinerja birokrasi yang kompetitif, transparan, efektif, efisien, dan handal.

Isu strategis Provinsi Jawa Barat diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu : (1) Permasalahan pembangunan Provinsi Jawa Barat; (2) Dinamika internasional, nasional dan regional yang memengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang memengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat; (4) Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Provinsi Jawa Barat; dan (5) KLHS RPJMD, maka ditetapkan 5 (lima) isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat yaitu :

1. **Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**

   Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, hal ini menunjukan adanya potensi yang besar dalam pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Jawa Barat mampu bersaing secara global. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan sumber daya manusia antara lain masih rendahnya pelayanan pendidikan di Jawa Barat yang ditunjukkan oleh capaian APK dan APM untuk pendidikan menengah yang belum mencapai seratus persen. Selain peningkatan pelayanan pendidikan hal lain yang harus dituntaskan adalah pemerataan distribusi guru antar daerah.

Selain hal tersebut diatas, masalah tata kelola juga terjadi seperti masih banyaknya sekolah yang terakreditasi C dan masih banyak sekolah yang belum terakreditasi, masih rendahnya mutu dan relevansi Pendidikan, tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing, masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, dan belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi.

Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Jawa Barat pada saat ini menunjukan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan Indeks Kesehatan belum optimal dan masih perlu ditingkatkan, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan rasio balita per satuan posyandu yang cenderung menurun. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukkan dengan 1 dari 4 anak usia 0-59 bulan di Provinsi Jawa Barat mengalami stunting.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Barat pada saat ini masih perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan masih terjadinya diskriminasi pengupahan sektor informal terhadap perempuan, kualitas tenaga kerja perempuan masih rendah, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang masih rendah, paradigma pembangunan anak masih bersifat parsial, segmentatif, dan sektoral serta partisipasi perempuan di lembaga pemerintah.

2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, dan menjadi salah satu perhatian pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk

menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada periode tahun 2015-2019 penduduk miskin Jawa Barat menunjukkan penurunan dan mencapai 6,82 persen pada tahun 2019. Namun memasuki tahun 2020, kondisi memburuk dengan adanya pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada Maret 2020 mencapai 3,92 juta jiwa (7,88 persen). Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sekitar 544,3 ribu jiwa dibandingkan keadaan September 2019. Kemiskinan lebih banyak terjadi di desa dibandingkan dengan perkotaan, diindikasikan dari angka kemiskinan perdesaan dan kemiskinan perkotaan. Kemiskinan di pedesaan disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat.

Pengangguran merupakan salah satu masalah penting yang harus segera dituntaskan, dimana jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat pada Agustus 2020 sebanyak 2,15 juta jiwa. Dibandingkan dengan kondisi pada Agustus 2019 pengangguran meningkat 25 ribu orang, yaitu dari 1,90 juta orang menjadi 2,15 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2020 sebesar 10,46 persen, yang berarti meningkat dibanding tahun lalu pada periode yang sama yaitu 7,99 persen. Dibandingkan dengan TPT nasional sebesar 7,07 persen, TPT Jawa Barat masih lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 serta keterbatasan kesempatan kerja baru serta tidak adanya *link and match* antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, banyak PHK, kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri menjadi faktor-faktor pemicu angka pengangguran tinggi di Jawa Barat.

Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Jawa Barat mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan karena masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, belum optimalnya penanganan bencana sosial, masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasaan anak, perempuan dan *human trafficking*, belum optimalnya penanganan PPKS melalui

rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan masih rentan terhadap konflik sosial dan kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Lebih lanjut, permasalahan sosial lainnya yang potensial dapat terjadi yaitu Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan, pemahaman idiologi serta kerukunan beragama. Untuk itu, perlu langkah-langkah preventif dan advokasi yang intens demi terciptanya kerukunan umat beragama.

3. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Pemerataan pembangunan dan kesesuaian daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi perhatian utama dalam perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat. Pemerataan pembangunan dituangkan dalam rencana wilayah pengembangan, daya dukung lingkungan dituangkan dalam penetapan kawasan lindung 45 persen, sedangkan daya tampung lingkungan dituangkan dalam rencana pola ruang kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, serta kawasan budidaya lainnya. Namun disisi lain, dinamika pembangunan dipengaruhi faktor internal maupun eksternal yang lebih mengutamakan kepentingan investasi dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi, sehingga berkembang tanpa prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, serta tidak menciptakan keseimbangan ekonomi sosial dan lingkungan. pembangunan lebih terkonsentrasi di perkotaan yang sudah berkembang, dan sebagian lainnya berlokasi di kawasan yang berfungsi lindung atau di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya. Sehingga pemerataan pembangunan belum tercapai, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak diutamakan.

Pemerataan pembangunan perlu mendapat dukungan dalam penetapan sistem perkotaan dan jaringan prasarana yang mampu meningkatkan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan unggulan pertanian, pariwisata dan industri. Konektivitas perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi pergerakan orang, barang dan jasa di seluruh wilayah Jawa Barat.

Pemerataan pembangunan berbasis komunitas diwujudkan melalui pemenuhan sarana prasarana permukiman seperti penyediaan perumahan, peningkatan cakupan pelayanan air bersih dan air baku, pengolahan persampahan dan limbah. Pelaksanaan pembangunan yang berbasis tata ruang dan lingkungan menjadi dasar peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga menjadi penting untuk diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan wilayah dan sektoral.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan diwujudkan pula melalui antisipasi dampak perubahan iklim dan mitigasi bencana, sehingga meminimalisir kerugian ekonomi, memberi kenyamanan, dan berkelanjutan. Antisipasi dampak perubahan iklim melalui peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, diharapkan dapat meminimalkan kerusakan lingkungan, risiko bencana, dan kerugian ekonomi, serta mampu mempertahankan kesehatan masyarakat.

Pengolahan sampah terpadu lintas daerah, pembangunan sanitasi baik individual maupun komunal/terpusat, pelayanan air minum, air bersih dan air baku harus dioptimalkan terutama peningkatan cakupan pelayanan dan distribusi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan air limbah domestik dan industri dalam rangka mengendalikan pencemaran sungai dan pengelolaan terpadu.

Salah satu hal penting dalam isu ini adalah penataan ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Jawa Barat masih belum sepenuhnya memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Upaya konkret mewujudkan pemerataan pembangunan di Jawa Barat adalah melalui pengembangan Kawasan Segitiga Emas Cirebon-Patimban-Kertajati (REBANA). Secara makro ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto Jawa Barat tahun 2019 adalah yang terbesar ke-3 dengan PMA dan PMDN tertinggi di Indonesia. PMA Jawa Barat mencapai $5.9 Miliar dan PMDN Jawa Barat pada tahun 2019 mencapai 49,3 triliun rupiah. Selama ini pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Barat bertumpu di bagian barat dan tengah, sedangkan bagian timur dan utara belum dioptimalkan. Upaya untuk mengakselerasi pembangunan di utara dan timur Jawa Barat diwujudkan melalui pengembangan Kawasan Segitiga Emas REBANA yang meliputi

Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Sumedang.

Isu strategis lain dalam pengembangan Kawasan Segitiga Emas REBANA, yakni melambatnya kontribusi PDB atas dasar harga konstan sektor industri terhadap PDB Nasional. Pada tahun 2014 Kontribusi PDB Industri mencapai 21,65 persen, namun mengalami penurunan sebesar 0,11 persen sehingga hanya mencapai 21,04 persen pada tahun 2018. Kemudian kebijakan pemerintah mengembangkan industri 4.0 berdampak pada revitalisasi industri manufaktur dan mempercepat implementasi 4IR. Inisiatif *Making Indonesia* 4.0 ini memberikan potensi besar untuk melipatgandakan produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan daya saing global dan mengangkat pangsa pasar ekspor global. Ekspor yang lebih tinggi akan membuka lebih banyak kesempatan kerja, sehingga konsumsi domestik menjadi lebih kuat dan Indonesia dapat menjadi salah satu dari 10 besar ekonomi dunia. Peluang ini yang akan ditangkap oleh Kawasan Segitiga Emas REBANA sehingga kawasan tersebut menjadi *engine of economic growth* baru di Jawa Barat.

Pengembangan Kawasan Segitiga Emas REBANA juga direncanakan untuk dapat mengatasi permasalahan tingginya kepadatan industri di Kabupaten Bekasi dan Karawang. Berdasarkan Sensus Ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2016, terdapat 2.952 Usaha Menengah Besar (UMB) di Kabupaten Karawang, 5.198 UMB di Kabupaten Bekasi, dan 9.437 UMB di Kota Bekasi. Daya dukung lingkungan untuk area Bodebekkarpur diindikasikan sudah melampaui ambang batas, sehingga dengan adanya Kawasan Segitiga Emas REBANA kepadatan di Bodebekkarpur dapat berkurang sebab arah investasi dan pengembangan industri terdistribusi ke timur Jawa Barat.

Pengembangan Kawasan Segitiga Emas REBANA diharapkan dapat meningkatkan kondisi sosial-ekonomi di Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Cirebon yang saat ini beberapa capaian indikator kesejahteraan masyarakatnya masih di bawah rata-rata Jawa Barat. Salah satunya dengan kolaborasi bersama industri yang nantinya berbisnis di Kawasan Segitiga Emas REBANA untuk meningkatkan IPM Daerah melalui SMK Juara. SMK Juara adalah inovasi layanan

pendidikan menengah di Jawa Barat yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat di Jawa Barat dalam mengakses layanan pendidikan. Beberapa strategi program ini adalah penguatan kemitraan sekolah (SMK) dengan industri serta pengembangan kompetensi yang relevan kebutuhan dunia kerja dan industri. Kegiatan strategis lainnya adalah memaksimalkan peran Balai Latihan Kerja menjadi pusat pelatihan masyarakat lokal Kawasan Segitiga Emas REBANA agar dapat terserap industri atau menjadi wirausaha yang mampu memanfaatkan peluang.

Adapun peluang dalam pengembangan Kawasan Segitiga Emas REBANA adalah keunggulan konektivitas wilayah. Terdapat beberapa pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang dapat menunjang aktivitas di Kawasan Segitiga Emas REBANA, diantaranya adalah Bandara Internasional Jawa Barat beserta *Aerocity*, Pelabuhan Patimban, Tol Cipali, Tol Cisumdawu, Rencana Tol Patimban, Rencana Jalur KA Tanjungsari – BIJB – Aryawinangun, dan Rencana Jalur KA Patimban.

Keunggulan komparatif dari sisi upah tenaga kerja adalah upah yang lebih rendah dibanding daerah industri lain di Jawa Barat. Pada tahun 2020, rata-rata UMK di Jawa Barat mencapai Rp 2.963.497,40. Sementara itu, UMK Kabupaten Indramayu mencapai Rp 2.297.931,11; Kabupaten Majalengka Rp 1.944.166,36; Kabupaten Cirebon Rp 2.196.416,09; Kabupaten Sumedang Rp 3.139.275,37; dan Kabupaten Subang Rp 2.965.468,00.

4. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalami perlambatan selama beberapa tahun terakhir. Dengan adanya pandemi Covid-19, maka semakin berdampak buruk terhadap perekonomian Jawa Barat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2020 terhadap Triwulan I-2020 mengalami kontraksi sebesar 5,98 persen (y-on-y), berarti menurun dibanding capaian Triwulan II-2019 sebesar 5,67 persen.

Sebelum terjadinya pandemi, perekonomian Jawa Barat telah dihadapkan dengan beberapa hal diantaranya belum berkembangnya koperasi dan usaha kecil dan menengah, khususnya pada akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim, belum optimalnya

fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal, belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil dan belum optimalnya kapasitas *digital literacy* bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam memasarkan produknya sehingga UKM bisa tetap bertahan di masa pandemi Covid-19.

Terjadinya penurunan realisasi penanaman modal asing yang disebabkan oleh realisasi investasi di kabupaten/kota belum merata, ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata, dinamika sosial memengaruhi kepastian dan keamanan berusaha, belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN. Dampak pandemi Covid-19 dan pembatasan sosial di berbagai negara dan wilayah di Indonesia menyebabkan terjadinya dinamika ekonomi yang cukup tinggi dan meningkatkan ketidakpastian dalam berusaha sehingga menyebabkan keragu-raguan pasar dalam berinvestasi.

Permasalahan lain yang penting adalah belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut disebabkan oleh belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta dukungan amenitas pariwisata, belum terintegrasinya promosi pariwisata yang dilakukan antara provinsi dan kabupaten/kota, serta kelembagaan dan sumber daya pengelola destinasi wisata kurang profesional, terlihat dari masih adanya pungli atau pungutan liar di destinasi wisata pandemi Covid-19 yang menyebabkan dikeluarkannya kebijakan *lockdown* di berbagai negara, PSBB di berbagai wilayah di Indonesia, *social distancing* di tempat umum, dan pembatasan mobilitas penduduk menyebabkan banyak destinasi wisata, pelaku usaha maupun pelaku seni yang tutup atau tidak melakukan aktivitasnya. Kondisi ini menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisata secara drastis baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Bahkan setelah tidak diberlakukannnya lagi PSBB dan mulainya Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) belum mampu mendorong hidupnya kembali industri pariwisata.

Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian, hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, serta rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian, rendahnya regenerasi petani dan rendahnya akses permodalan, petani kesulitan dalam akses pasar; SDM petani masih terbatas, regenerasi petani masih rendah dan usia petani Jawa Barat berada di atas usia produktif; teknologi digital belum banyak digunakan di sektor pertanian Jawa Barat; jumlah gudang penyimpanan hasil panen masih terlalu minim.

Pada sektor perikanan dan kelautan terdapat permasalahan yang ditandai oleh turunnya Nilai Tukar Nelayan, hal tersebut disebabkan oleh eksploitasi ruang laut yang berlebihan dan tingginya tingkat pencemaran mengakibatkan penurunan laju tangkapan *(fish landing)* dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir, pelabuhan perikanan Jawa Barat belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terbatasnya pemenuhan sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap (lahan, kapal, dll), pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematik antara hulu dan hilir, masih rendahnya tingkat pengguasaan teknologi oleh nelayan.

Pada sektor pangan masih terdapat beberapa masalah yang ditandai oleh Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Jawa Barat yang masih berada dibawah rata-rata nasional dan ketidakstabilan harga. Hal ini menyebabkan masalah antara lain masih tingginya jumlah masyarakat miskin rawan pangan, ketersediaan pangan di Jawa Barat masih mengalami ketimpangan, masih rendahnya keragaman konsumsi pangan, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang berpengaruh terhadap gizi.

Pada sektor kehutanan masih terdapat permasalahan yang ditandai oleh degradasi lahan masih tinggi di Daerah Aliran Sungai (DAS), pengelolaan hutan belum optimal dan rendahnya produksi hasil hutan kayu dan non kayu. Hal ini disebabkan oleh tingginya aktivitas ekonomi secara berlebihan di kawasan hulu DAS, meningkatnya

gangguan ekosistem, dan rendahnya teknologi pemanfaatan sumberdaya hutan.

Sementara pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh menurunnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB, hal tersebut disebabkan oleh dominasi barang impor, kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, promosi produk industri lokal (asal Jawa Barat) masih dirasa kurang, dan belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

Lebih lanjut, pada sektor industri ditemui masalah pokok yaitu menurunnya pertumbuhan sektor industri. Hal tersebut disebabkan oleh produk industri memiliki daya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi). Kondisi ini dipicu oleh infrastruktur pendukung kawasan industri belum terintegrasi yang mengakibatkan tingginya biaya logistik dan ketimpangan pengembangan kawasan industri di Jawa Barat bagian Barat dengan Jawa Barat bagian Timur, bahan baku industri mayoritas impor, peranan industri kecil dan menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi.

5. Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Barat masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu bagaimana mengambil kebijakan yang tepat dan cepat untuk penanganan dampak dari pandemi Covid-19. Sejak kemunculannya di Indonesia, pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak hanya terkait kesehatan dan kematian, namun telah merambat pada timbulnya permasalahan lain antara lain sosial, ekonomi, keuangan daerah, dan tidak terlaksananya rencana-rencana pembangunan tahun 2020 akibat

pengalihan sebagian besar sumberdaya untuk penanganan Covid-19. Hal ini tentu membutuhkan koordinasi dan kerjasamanya seluruh aktor pembangunan dan inovasi yang tepat.

4.2.2 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Sekitar

Maksud adanya penelaahan RPJMD daerah sekitar adalah agar tercipta keterpaduan pembangunaan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya, dilakukan penyelarasan strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah dengan daerah lainnya. Adapun strategi dan arah kebijakan RPJMD daerah sekitar dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1

Strategi dan Kebijakan RPJMD Daerah Sekitar

KAB/KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
KABUPATEN BEKASI	**Misi 1: Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	
	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan tata kelola, pemanfaatan IT dan pengembangan SDM	Peningkatan tata kelola pemerintahan meliputi penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana
		Pengembangan Layanan Publik Berbasis IT
		Pengembangan layanan cepat tanggap terhadap penanganan sampah,limbah, air minum, jalan, saluran, PJU dan kemacatan berbasis IT
	Mengembangkan inovasi dalam meningkatkan kinerja pembangunan	Pengembangan kelitbangan dan inovasi daerah
	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	Peningkatan kompetensi dan integritas Aparatur Sipil Negara
	Peningkatan tata kelola kearsipan melalui perlindungan, penyelamatan, data dan informasi arsip serta pemanfaatan IT	Meningkatkan kapasitas dan ketersediaan SDM, prasarana dan sarana serta pengembangan informasi kearsipan

KAB/KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatkan kemitraan dan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif bagi ketua RT RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid dan Kelompok penggerak lainnya
	Peningkatan akuntabilitas melalui sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan dan pelaporan kinerja
	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan daerah	Mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan daerah
	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan asli daerah
		Penerapan *smart parking* di pusat perbelanjaan
	Peningkatan kinerja BUMD Peningkatan Tata Kelola Perusahaan	
	Meningkatkan keterbukaan informasi dan pelayanan	Peningkatan pelayanan perizinan dan Non Perizinan
		Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan melalui mall pelayanan publik
		Peningkatan Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah
		Peningkatan layanan penerbitan akte kelahiran dan layanan administrasi kependudukan lainnya Berbasis IT
	MISI 2 : Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai	
	Menyediakan infrastruktur (jalan/jembatan) yang terintegrasi dan aksesibel	Pemantapan dan pengembangan jaringan jalan yang meliputi jaringan jalan arteri, jalan kolektor, jalan dan jembatan
		Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dan lansia Kota Bekasi
		Pengembangan kawasan ramah bersepeda (Bekasi *City Bike*) dan penataan serta pengembangan pedestrian yang ramah pejalan kaki
	Mengembangkan transportasi perkotaan	Penyediaan angkutan massal yang terintegrasi
		Pengembangan Transportasi massal melalui BUMD
		Pembangunan sarana transportasi *City Tourism**
		Pembangunan gedung *comuter transit parking* (stasiun KA dan LRT)
	Mengembangkan *smart parking*	Penerapan *smart parking*
	Memelihara prasarana dan sarana LLAJ	Pemeliharaan prasarana dan sarana LLAJ

KAB/KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Mengembangkan kawasan TOD	Cakupan kawasan TOD terbangun
	Menyediakan infrastruktur (drainase) terintegrasi dengan drainase perkotaan	Pengembangan jaringan drainase dan pengendali banjir yang terintegrasi
		Penerapan *eco drainage* dalam Penanggulangan banjir
	Mengembangkan pengelolaan air limbah	Penyediaan sanitasi yang aman melalui pengelolaan rumah tangga
	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah	Peningkatan perilaku pemilahan sampah rumah tangga, revitalisasi "*Smart Waste Management*", dan konversi "*Waste to Energy*"
	Meningkatkan prasarana pengelolaan persampahan	Peningkatan kapasitas TPA Sumur Batu melalui ekstensifikasi teknologi dan kerjasama TPA Bantargebang untuk memastikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan di kota
	Mengembangkan jaringan air minum	Penyediaan air bersih
	Meningkatkan Kesigapan pemadam kebakaran	Pengembangan rencana pemadam kebakaran yang efektif dan efisien
	Menyediakan tempat Pendidikan	Penyediaan sarana tempat pendidikan 1
	Menyediakan layanan kesehatan	Penyediaan sarana tempat layanan kesehatan
	Menyediakan layanan perdagangan	Penyediaan sarana tempat perdagangan
	Mengembangkan fasos dan fasum	Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di lingkungan RT/RW untuk kepentingan prasarana dan sarana
		Penyediaan prasarana sarana olahraga dalam rangka pemasalan olah raga masyarakat yang dapat diakses oleh lapisan masyarakat di tingkat kota dan lingkungan masyarakat
	Menyediakan sarana pemakaman	Pengelolaan TPU dengan standar pemakaman untuk menjamin ketersediaan dan keasrian sehingga dapat berfungsi sebagai RTH
	Menyelenggarakan penataan ruang daerah dalam rangka mengembangkan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi kota bekasi sebagai pusat kegiatan nasional	Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah
	Menyediakan ruang terbuka hijau	Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu (tematis: budaya Bekasi, patriotis, kreatif, dll.)
	Penyediaan gedung kantor	Penyediaan sarana gedung kantor
	Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman	Pembangunan Rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah
	Pembebasan tanah untuk kepentingan umum	Penyediaan tanah untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan PSU

KAB/KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Menyediakan jaringan listrik dan telepon	Penyediaan PSU terpadu (*ducting*) yang terbangun
		Penyediaan PSU Hemat Energi, Estetis dan ramah lingkungan
	Menyediakan jaringan gas Kota	Penyediaan jaringan gas Kota
	MISI 3 : Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing	
	Meningkatkan Investasi Daerah	Menciptakan Iklim Usaha Yang Berdaya Saing
	Meningkatkan keunggulan, daya dan promosi wisata	Pengembangan "*Urban Tourism*" untuk meningkatkan daya wisata Kota Bekasi
		Pengembangan *creative society* melalui penyelenggaraan event "BEKASI *CREATIVE*" di tingkat kota dan kecamatan
	Meningkatkan daya saing kreatif	Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan "Bekasi *City Techno Park*"
		Pengembangan wirausaha kreatif berbasis komunitas
	Meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro dan kecil	Pembentukan "BEKASI CITY START-UP", melalui kerjasama pengembangan bisnis, untuk melahirkan wirausaha baru
		Revitalisasi dan aktivasi 65% kelembagaan koperasi di Kota Bekasi
	Meningkatkan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	Pengelolaan rantai pasok sembako melalui teknologi digital untuk stabilisasi pasokan dan harga sembako
		Meningkatkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri
	Menjaga stabilitas Harga Komoditas	Penguatan Stok Ketersediaan Cadangan Pangan
		Pengendalian Inflasi
	Harmonisasi tingkat upah	Harmonisasi UMK
		Insentif dan bantuan peningkatan pendapatan
	Penciptaan lapangan pekerjaan	Pelatihan dan Penyiapan Tenaga Kerja Terdidik
	MISI 4 : Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif.	
	Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas Layanan Pendidikan	Peningkatan efektivitas skema pendidikan dasar 9 tahun gratis dan subsidi peserta didik keluarga miskin

KAB/KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan yang menghasilkan lulusan yang tersertifikasi
		Peningkatan layanan pendidikan bagi peserta didik, orang tua, dan masyarakat berbasis teknologi informasi (*Smart School*)
		Pemberian beasiswa bagi peserta didik berbasis prestasi akademik, minat/bakat, dan tahfidz Al-Quran
	Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap perpustakaan	Meningkatkan Layanan Perpustakaan dan Pengembangan Literasi
	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat melalui optimalisasi germas dan PHBS*	Peningkatan gizi masyarakat
		Pemberian makanan tambahan/pendamping bagi anak usia sekolah
		Peningkatan kapasitas layanan informasi Kesehatan
		Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan, bayi dan balita
	Pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular serta jiwa	Meningkatkan pengendalian terhadap penularan penyakit menular dan tidak menular serta jiwa
	Meningkatkan kualitas akses dan standar layanan kesehatan dasar dan rujukan	Peningkatan kapasitas layanan kesehatan
		Penguatan tata kelola layanan kartu sehat berbasis NIK yang selaras dengan jaminan Kesehatan masyarakat
	Menurunkan kesenjangan antar penduduk miskin melalui peningkatan pendapatan dan penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin	Pengembangan layanan terpadu (pendidikan, kesehatan dan penyandang masalah kesejahteraan)
		Pembangunan Panti Rehabilitasi PPKS
		Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
		Peningkatan upaya pengendalian penduduk
		Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan
	Pemerataan kesempatan kerja dan terciptanya perluasan fasilitasi kerja, hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja	Peluang 150.000 tenaga kerja baru, melalui peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru, dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja
	Peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pencari kerja dan meningkatkan kerjasama dengan unsur terkait	Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi tenaga kerja dan peningkatan kerja sama dengan unsur terkait
	Mewujudkan pemuda yang berdaya saing	Pemberian kesempatan dan dukungan sumber daya dalam bentuk aktivitas peningkatan kemampuan pemuda

KAB/KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatkan prestasi olahraga dan kualitas olahragawan	Peningkatan pembinaan olah raga pendidikan
		Peningkatan pembinaan organisasi olahraga
	Peningkatan kualitas hidup dan hak serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya pemenuhan kualitas hidup dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta korban tindak kekerasan
		Pengarusutamaan gender
	Meningkatkan toleransi, kesetaraan dan kerjasama, ekonomi, budaya dan keagamaan	Penguatan keshalehan spiritual, ketahanan dan kearifan budaya dalam membentuk kehidupan budaya multikultur dan kehidupan masyarakat yang ikhsan
	MISI 5 : Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman	
	Meningkatkan kemitraan dan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan	Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di lingkungan RT/RW untuk kepentingan prasarana dan sarana
		Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif ketua RT, RW, LINMAS, KADER Posyandu, Marbod Masjid dan kelompok penggerak lainnya
	Meningkatkan keterbukaan informasi dan pelayanan	Peningkatan pelayanan perijinan dan non perijinan
	Pencegahan konflik	Pencegahan konflik dengan mengembangkan kehidupan masyarakat yang rukun, toleran dan demokratis
	Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana melalui mitigasi bencana	Pengembangan informasi kebencanaan kepada masyarakat secara *online*, tepat dan cepat;
		Pelatihan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan.
		Integrasi penanggulangan resiko bencana (PRB) dalam perencanaan pembangunan;
	Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Penanggulangan pencemaran dan pemulihan lingkungan
	Meningkatkan perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatkan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
	Penegakan lingkungan	Meningkatkan pengawasan, penanganan dan penegakan terhadap pelanggaran peraturan lingkungan
	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat/kelompok masyarakat peduli lingkungan	Pengelolaan event "*Car Free Day*" yang berkontribusi terhadap promosi ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan

KAB/KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
KOTA DEPOK	**MISI I Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan**	
	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
	Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
	Meningkatkan kualitas penyelenggaran pemerintahan	Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan penyelenggaraan pemerintahan
	MISI II Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif, dan Berdaya Saing	
	Meningkatkan rata-rata lama sekolah	Perluasan dan pemerataan layanan pendidikan diarahkan pada pemenuhan daya satuan pendidikan dan peningkatan akses kepada peserta didik masyarakat tidak mampu
	Meningkatkan pendidikan non formal	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD), PKBM dan kelompok belajar/kursus masyarakat lainnya.
		Peningkatan kesetaraan pendidikan masyarakat
		Penyelenggaraan penuntasan buta aksara latin dan Al-Quran
	Meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan	Penguatan tata kelola pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)
		Peningkatan kapabilitas tenaga pendidik
	Meningkatkan pengetahuan masyarakat	Peningkatan minat baca masyarakat
	Mewujudkan pelayanan yang berkualitas menuju *smart healthy city*	Peningkatan upaya pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan
		Peningkatan pemerataan dan mutu layanan kesehatan
		Pengembangan program kota sehat
		Pengembangan manajemen kesehatan berbasis TI
	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Peningkatan penanganan/pengendalian mortalitas, morbiditas
		Meningkatkan upaya perbaikan gizi masyarakat
		Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan masyarakat
	Meningkatkan kualitas fungsi keluarga	Penguatan keluarga harmonis yang dimulai sejak pra nikah
		Peningkatan kualitas hidup anak dan pemenuhan hak-hak anak.
		Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga
		Peningkatan fungsi keluarga dalam pengendalian kependudukan

KAB/KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatkan peran kelembagaan ketahanan keluarga	Penguatan kelembagaan ketahanan keluarga
	Meningkatkan ekonomi keluarga	Penguatan ekonomi keluarga khususnya bagi keluarga miskin dan rentan
	Meningkatkan kualitas kesejahteraan	Pencegahan dan penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat
		Peningkatan kualitas hidup lansia dari aspek, ekonomi, mental keagamaan, aktualisasi dan kualitas diri
	Meningkatkan seni, budaya dan kreatifitas masyarakat	Peningkatan kreatifitas pelaku seni budaya dan pembinaan seni budaya masyarakat
		Peningkatan fasilitas, sarana seni budaya daerah
	Meningkatkan kreatifitas pemuda melalui organisasi dan komunitas pemuda	Pengembangan kreatifitas pemuda melalui organisasi dan komunitas pemuda
	Meningkatkan ruang kreatifitas dan prestasi olahraga masyarakat	Peningkatan/pemenuhan fasilitas/sarana prasarana olah raga masyarakat
		Peningkatan kualitas/mutu atlet
	Misi III Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan	
	Meningkatkan tingkat kemudahan investasi dan usaha	Perbaikan iklim investasi dan usaha
	Menciptakan Industri Kecil Menengah, Usaha Mikro Mandiri dan wirausaha baru	Menciptakan IKM, UM mandiri dan wirausaha baru
	Memperkuat kelembagaan dan usaha koperasi	Penguatan kelembagaan dan usaha koperasi
	Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif	Pembangunan sentra ekonomi kreatif
	Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan usaha mikro	Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan usaha mikro
	Pengembangan destinasi dan promosi pariwisata	Pengembangan destinasi dan promosi pariwisata
	Meningkatkan kapasitas daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Meningkatkan kompetensi dan produktifitas usia kerja	Peningkatan kompetensi dan produktivitas usia kerja
	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin	Peningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
	Meningkatkan pengelolaan informasi dan pengendalian ekspektasi bahan pangan	Peningkatkan pengelolaan informasi dan pengendalian ekspektasi bahan pangan
	Meningkatkan produksi dan distribusi bahan pangan	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan
		Peningkatan distribusi bahan pangan

KAB/KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Misi IV Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan, dan Ramah Keluarga	
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana transportasi	Pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan akses masyarakat terutama jalur Depok *Outer Ring Road*, dan jalan yang mendukung pengembangan kawasan ekonomi dan wisata serta optimalisasi pemanfaatan TIK;
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi
		Pengembangan keterpaduan layanan antar dan intra moda yang berbasis *Transit Oriented Development* (TOD)
	Mengembangkan angkutan massal yang didukung oleh angkutan umum yang handal	Pembangunan simpul-simpul transportasi
	Meningkatkan kualitas layanan transportasi umum	Peningkatan kualitas layanan transportasi umum
	Meningkatkan proses perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang kota yang efisien, konsisten, dan berkelanjutan	Penyusunan perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Kota
	Penyediaan infrastruktur permukiman yang berkualitas	Penyediaan infrastruktur permukiman yang berkualitas dan ruang yang ramah keluarga
	Meningkatkan jumlah rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Peningkatan kuantitas dan kualitas rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
	Meningkatkan layanan penyediaan air bersih	Peningkatan layanan penyediaan air bersih
	Meningkatkan ketersediaan air untuk air baku	Peningkatan kualitas layanan jaringan irigasi
	Meningkatkan pengendalian banjir	Pengembangan drainase mikro dan makro yang terpadu;
		Penanganan banjir melalui pemanfaatan jaringan pengendali banjir alami dan pengendalian *run-off*
	Meningkatkan layanan pengelolaan air limbah	Peningkatan cakupan layanan dan sarana prasarana air limbah
	Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui penerapan berbagai pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Mendorong peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pembinaan dan penerapan berbagai pengendalian
	Menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan hidup	Meningkatkan upaya rehabilitasi sumber daya alam agar tetap lestari dan berfungsi dengan baik

KAB/KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Mendorong pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan menghasilkan nilai tambah ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan dan pengelolaan sampah;
	Pengelolaan sampah melalui pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan	Peningkatan cakupan layanan melalui revitalisasi dan optimalisasi TPA Cipayung, keikutsertaan dalam TPPAS Nambo, dan Pengelolaan sampah yang berbasis teknologi ramah lingkungan
	Meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau	Penyediaan lahan RTH melalui pengendalian pemanfaatan ruang, pengadaan lahan dan kerjasama dengan pihak ketiga
	Misi V Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Melaksanakan Nilai-Nilai Agama dan Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama serta Meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara	
	Meningkatkan kohesi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui dialog-dialog, pembauran dan resolusi konflik	Melakukan dialogis, pembauran antar pelaku dan etnis pada semua level
	Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pendidikan bela negara, penanaman nilai-nilai luhur Pancasila	Melaksanakan pendidikan bela negara dan sosialisasi dan pembinaan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 kepada pelajar dan pemuda dan masyarakat
	Meningkatkan cakupan layanan organisasi politik dalam kehidupan demokrasi melalui pendidikan politik, pemberdayaan organisasi dan politik, peningkatan partisipasi politik	layanan organisasi politik dalam kehidupan demokrasi melalui pendidikan politik, pemberdayaan organisasi dan politik, peningkatan partisipasi politik
		Meningkatkan partisipasi politik bagi pelajar dan masyarakat.
		Melaksanakan pemberdayaan organisasi (ormas dan LSM) dan politik (parpol) dalam bentuk sosialisasi dan fasilitasi.
	Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Penguatan dan pengembangan potensi masyarakat
	Meningkatkan pemahaman kehidupan beragama	Peningkatan pemahaman agama dalam rumah tangga, sekolah, keluarga dan masyarakat
	Mengoptimalkan peran dari lembaga-lembaga keagamaan	Peningkatan kinerja lembaga kemasyarakatan, keagamaan (seperti lembaga zakat dan wakaf) dalam kegiatan masyarakat

KAB/KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
KABUPATEN CIANJUR	**Misi 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan**	
	Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan mantap	Peningkatan jalan strategis Kabupaten
	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang pusat kegiatan dan kawasan strategis	
	Meningkatkan prasarana pendukung jalan dan sarana transportasi darat	
	Meningkatkan ketersediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian	Pengembangan dan pemeliharaan sumber air baku untuk penyediaan air bersih dalam rangka pemenuhan akses air minum
	Meningkatkan sarana prasarana sanitasi lingkungan	Mengembangkan dan memelihara prasarana dan sarana sanitasi lingkungan
	Meningkatkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni, penataan kawasan permukiman kumuh serta penyediaan PSU	Peningkatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni, penataan kawasan permukiman kumuh serta penyediaan prasarana dan sarana utilitas umum
	Meningkatkan perbaikan dan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas air dan udara serta peningkatan ruang terbuka hijau
		Peningkatan penanganan timbulan sampah perkotaan dan perdesaan
	Misi 2 : Meningkatkan pembangunan keagamaan	
	Mempertahankan nilai-nilai akhlak mulia dan toleransi umat manusia	Menanamkan nilai akhlak mulia melalui gerakan shalat subuh dan ashar berjamaah, penghafalan dan pengkajian al-quran serta pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan al – quran
		Pemantapan kerukunan hidup beragama, rasa saling percaya, toleransi dan tenggang rasa
	Misi 3 : Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi	
	Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata serta meningkatkan peran serta aktivitas pemuda, olah raga dan budaya	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
	Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan merata serta meningkatkan peran serta aktivitas pemuda, olah raga dan budaya	Peningkatan manajemen pendidikan melalui standarisasi dan penjaminan mutu

KAB/KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
		Peningkatan sikap, perilaku dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat
		Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengarusutamaan gender serta meningkatkan ketahanan keluarga, partisipasi masyarakat dalam ber KB dan perlindungan anak	
	Meningkatkan kualitas iklim usaha dan daya investasi	Penciptaan iklim usaha yang kondusif serta peningkatan investasi dan realisasi investasi
		Peningkatan Produksi dan komoditas unggulan Pertanian, Perikanan dan Peternakan
		Mengoptimalkan kolaborasi peran pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha koperasi dan UMKM dengan inovasi produk dan kelembagaan, ketersediaan pendanaan
		Pembangunan kelembagaan usaha dan pasar berbasis potensi dan keunggulan dan perlindungan konsumen Peningkatan keberdayaan lembaga perekonomian masyarakat desa
	Meningkatkan pengelolaan agribisnis dan pengembangan pariwisata secara terpadu dan profesional	Penguatan kapasitas pelaku agribisnis, kemitraan usaha dan jaringan pemasaran
		Percepatan pembangunan pariwisata daerah serta peningkatan pemasaran pariwisata
	Meningkatkan daya beli masyarakat	
	Meningkatkan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan	Peningkatan produksi, keanekaragaman dan keamanan pangan daerah
	Mempercepat penanggulangan kemiskinan	
	Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja serta perlindungan tenaga kerja	Peningkatan kesempatan kerja
		Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PPKS
		Peningkatan strategi mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu
	Meningkatkan keberdayaan dan kualitas masyarakat perdesaan	Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Desa yang akuntanbel dan transparan
	Menerapkan reformasi birokrasi	Peningkatan kualitas pelayanan yang transparan, akuntabel

KAB/KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatkan kualitas bangunan gedung pemerintahan dan non gedung yang representatif	
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan Pengawasan internal serta Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah
KABUPATEN SUKABUMI	Peningkatan fasilitasi penguatan lembaga keagamaan serta penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan tokoh agama.	Meningkatkan pembinaan kepada lembaga, kesehatan dan keagamaan
		Mengembangkan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik penduduk
	Peningkatan wawasan kebangsaan dengan cara meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat.	Revitalisasi peran rumah ibadah yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat
	Meningkatkan disiplin masyarakat melalui peningkatan penegakan Perda dan penanganan pelanggaran peraturan Perda	Meningkatkan penegakan peraturan daerah
		Meningkatkan pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
	Menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan kondusif melalui peningkatan antisipasi terhadap potensi timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban didukung pendidikan politik yang berkualitas	
	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular yang bermutu, merata dan terjangkau, penguatan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, pemenuhan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat, peningkatan kualitas layanan kesehatan primer dan rujukan, Pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, keterjangkauan, pemerataan farmasi dan alat kesehatan berkualitas	Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat
		Meningkatkan Keselamatan ibu melahirkan dan anak
		Meningkatkan pelayanan keselamatan anak balita
		Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat
		Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di masyarakat
		Mengembangkan lingkungan sehat
		Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
	Meningkatkan kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan
	Meningkatkan kesadaran individu, keluarga, dan masyarakat melalui promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan perilaku hidup sehat dan kesehatan lingkungan	Meningkatkan dan mengembangkan PPk-BLUD UPT
		Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak/hewan
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan/kecamatan
		Meningkatkan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya
		Meningkatkan kemitraan pelayanan kesehatan

KAB/KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan melalui perluasan dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), perluasan pendidikan formal dan non-formal serta pemberian bantuan bagi peserta didik miskin	Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini dan wajib belajar pendidikan dasar tahun
		Meningkatkan kualitas pendidikan non formal dan mengembangkan pendidikan luar sekolah berbasiskan ekonomi kreatif
	Peningkatan kualitas dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan meliputi pembangunan sarana dan prasarana sesuai standar nasional, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), pembangunan perpustakaan dan peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT)	Meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
		Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan Pendidikan
		Meningkatkan penanggulangan kenakalan remaja dan pelaksanaan *Student Camp*
	Peningkatan kompetensi dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelaksanaan Pendidikan, pelatihan, peningkatan kualifikasi pendidikan para pendidik dan tenaga kependidikan serta optimalisasi penggunaan IT	Meningkatkan budaya literasi berbasis komunitas dan wilayah
	Peningkatan tata kelola pendidikan yang berkualitas melalui pelaksanaan akreditasi bagi jenjang pendidikan dasar dan lembaga pendidikan nonformal serta pelaksanaan sertifikasi kompetensi	
	Menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur dalam masyarakat serta melestarikan warisan budaya melalui sosialisasi dan penanaman budaya sejak dini dengan cara memasukkannya dalam muatan di sekolah dan pengembangan kesenian khas Kota Sukabumi didukung dengan penguatan kapasitas kelompok masyarakat komunitas dan kelompok agama	Mengembangkan nilai-nilai budaya
		Meningkatkan pengelolaan keragaman budaya
	Meningkatkan pemberdayaan pemuda melalui pembinaan organisasi kepemudaan dan pengembangan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif	Meningkatkan peran serta kepemudaan
		Meningkatkan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
		Membentuk pusat pendidikan dan latihan pelajar daerah (PPLPD) di sekolah
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga prestasi serta partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Meningkatkan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
		Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga
		Meningkatkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

KAB/KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatkan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pengendalian fertilitas	Meningkatkan KB dan kesehatan reproduksi remaja
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri
	Peningkatan ketahanan keluarga dan penguatan kapasitas lembaga pengarusutamaan gender serta jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Menguatkan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
	Mengembangkan perlindungan yang komprehensif melalui optimalisasi penggunaan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) untuk menentukan individu dan rumah tangga sasaran serta perluasan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan	Meningkatkan pemberdayaan komunitas perumahan dan kelembagaan
		Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial
		Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
	Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan melalui pemberdayaan forum dan kelembagaan serta peningkatan jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan pembinaan para penyandang cacat dan trauma serta pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PPKS lainnya
	Meningkatkan pelayanan dasar serta mengembangkan penghidupan bagi penduduk miskin dan rentan miskin melalui pembangunan dan pemerataan pelayanan dasar di kantung-kantung kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan penduduk miskin serta pelatihan dan pendampingan usaha bagi masyarakat miskin	
	Meningkatkan kesempatan kerja melalui penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja serta *link and match* pendidikan dan lapangan kerja	Meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja
	Meningkatkan kualitas dan produktivitas pencari kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan pencari kerja serta sertifikasi keahlian/kompetensi	Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
	Meningkatkan ketahanan keluarga dan penguatan peran keluarga melalui pendidikan pra nikah, pelatihan *parenting* dan pemberdayaan tenaga pembinaan keluarga	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
		Mengembangkan model operasional BKB/Posyandu Padu
		Menyiapkan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
	Meningkatkan kemandirian keluarga melalui pengembangan ekonomi berbasis keluarga	Meningkatkan penataan administrasi kependudukan
	Meningkatkan keselamatan, kenyamanan, aksesibilitas dan efisiensi prasarana perhubungan melalui peningkatan pelayanan jalan, peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana transportasi dan perlengkapan jalan	Pembangunan jalan, jembatan dan saluran drainase/gorong-gorong
		Peningkatan rehabilitasi jalan dan jembatan serta pedestrian dan lahan parkir
		Meningkatkan dan mengamankan lalu lintas

KAB/KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Mendorong pusat pertumbuhan wilayah yang baru melalui pembangunan sarana dan prasarana di kawasan pusat pemerintahan	Meningkatkan fasilitas penerangan jalan umum
		Membangun sarana dan prasarana perhubungan
		Mengembangkan dan mengelola jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan
		Meningkatkan pembangunan turap/talud/bronjong
		Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
	Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien melalui penyusunan,pengawasan dan pengendalian yang mengacu pada RTRW, sinkronisasi RTRW dan penyempurnaan tatacara perizinan penataan ruang	Meningkatkan perencanaan strategis untuk percepatan pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh
		Meningkatkan perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan/Kecamatan
	Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan dalam perencanaan penataan ruang melalui penyelenggaraan forum konsultasi	Meningkatkan pengelolaan RTH
		Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan areal pemakaman umum
		Meningkatkan penataan ruang budaya
	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Kawasan Rawan Bencana (KRB) melalui peringatan dan pencegahan dini, perencanaan pengelolaan risiko bencana, peningkatan sarana dan prasarana serta infrastruktur penyelenggaraan penanggulangan bencana serta penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan penanggulangan bencana	Meningkatkan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
		Pemetaan derah rawan bencana dan penetapan lokasi evakuasi korban bencana
	Meningkatkan kesiagaan, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran melalui penyebarluasan informasi terkait norma, standar, pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
	Mewujudkan transportasi yang berkualitas, handal dan ramah lingkungan, mengembangkan layanan angkutan umum/trayek yang efisien serta pengembangan sarana dan prasarana perhubungan yang mendukung kereta api *double track* dan Tol Bocimi	Meningkatkan pelayanan angkutan
		Meningkatkan pelaksanaan uji kelayakan
	Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan hidup, pengembangan produk ramah lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim,	Meningkatkan pengendalian polusi
		Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
		Mengembangkan produk ramah lingkungan
		Meningkatkan perlindungan konservasi Sumber Daya Alam

KAB/KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	pengendalian dan pengawasan SDA, pengembangan data dan informasi LH serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan LH	Meningkatkan data dan informasi serta akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup
	Meningkatkan pengelolaan persampahan melalui kerjasama pengelolaan persampahan, peningkatan sarana dan prasarana persampahan serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.	Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan
	Meningkatkan kualitas perumahan melalui penyedian sarana dan prasarana serta distribusi air minum, pengelolaan air limbah, pemberdayaan komunitas perumahan untuk percepatan penanganan kawasan kumuh perkotaan dan pengembangan lingkungan sehat.	Mengembangkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
		Membangun infrastruktur kelurahan
		Mengembangkan perumahan sehat sederhana dan pemberdayaan komunitas perumahan
		Membangun saluran drainase dan gorong-gorong
		Mengembangkan lingkungan sehat
	Meningkatkan investasi melalui promosi dan kerjasama investasi yang didukung peningkatan pelayanan sektor perizinan melalui simplisasi prosedur dan percepatan pelayanan berbasis IT	Mengembangkan pendukung usaha bagi UMKM
		Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
		Meningkatkan penataan PKL dan asongan
		Meningkatkan pembinaan UKM
		Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi
	Mengembangkan kewirausahaan dan meningkatkan daya saing Usaha Kecil Menengah dan Koperasi melalui penguatan pemodalan, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan	Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
		Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi
		Menyiapkan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
	Mengembangkan sektor unggulan daerah yang didukung sarana distribusi perdagangan berkualitas baik melalui revitalisasi tata kelola pasar rakyat maupun pembangunan pusat perdagangan baru	Meningkatkan efisiensi perdagangan (distribusi barang)
		Membangun dan mengembangkan sarana distribusi perdagangan
		Meningkatkan pembinaan dan penataan PKL dan asongan
	Mengembangkan ekonomi kreatif melalui pendampingan para pelaku, pemberian bantuan modal, pemanfaatan sumber daya, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kerjasama pelaku ekonomi kreatif baik dalam daerah maupun antar daerah didukung optimalisasi penggunaan IPTEK	Meningkatkan perencanaan dan pembangunan fasilitas penunjang ekonomi kreatif
		Meningkatkan kerjasama antar pelaku ekonomi kreatif
		Meningkatkan kemampuan teknologi dan kapasitas IPTEK dalam proses produksi
		Mengembangkan IKM dan sentra-sentra potensial
		Meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah

KAB/KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatkan promosi pariwisata unggulan Kota Sukabumi berbasis wisata kuliner dan warisan budaya melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi	Mengembangkan pemasaran pariwisata melalui promosi di dalam dan luar negeri
		Mengelola kekayaan budaya untuk mengembangkan pariwisata
	Mengembangkan disain Kota Sukabumi sebagai objek wisata heritage melalui pembangunan sarana dan prasarana pendukung objek wisata heritage serta pembuatan pengelolaan gedung bersejarah	Mengembangkan pariwisata berbasis kuliner dan sejarah
	Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman (B2SA) melalui peningkatan ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, distribusi pangan, keamanan pangan dan penguatan cadangan pangan	Memanfaatkan pekarangan dan penggunaan sumber bahan pangan alternatif
		Meningkatkan pengawasan keamanan pangan
		Meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner
	Meningkatkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berlanjutan melalui perluasan lahan LP2B milik pemerintah	Meningkatkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
	Meningkatkan kerjasama pembangunan melalui koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan pihak swasta/BUMN/BUMD maupun kemitraan dengan lembaga pendidikan.	Meningkatkan sinergitas pengelolaan CSR
	Meningkatkan proses perencanaan yang berkualitas, pengelolaan keuangan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informatika didukung peningkatan profesionalisme serta kompetensi pegawai	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
		Meningkatkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan
		Meningkatkan pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah
		Meningkatkan penataan pelaksanaan reformasi birokrasi
		Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Meningkatkan dan mengembangkan pelaporan capaian kinerja serta keuangan
		Meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur
		Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur
		Meningkatkan penataan peraturan perundang-undangan
		Meningkatkan koordinasi ketatalaksanaan dan kelembagaan antar pemerintah dan pemerintah daerah

KAB/KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan dan pajak daerah berbasis IT
		Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pajak daerah serta bagi hasil pajak dan bukan pajak
		Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan daerah
	Meningkatkan kualitas pelayanan yang berdasarkan pada Standar Pelayanan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap Perangkat Daerah dengan didukung keterbukaan informasi, transparansi, partisipasi, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi	Meningkatkan penataan administrasi kependudukan
		Meningkatkan kualitas dan profesionalitas SDM pelayanan
		Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat
	Optimalisasi penggunaan Informasi Teknologi melalui sarana aplikasi yang terintegrasi baik dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan didukung pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.	Mengembangkan informasi pengadaan barang dan jasa
		Mengintegrasikan aplikasi yang digunakan dalam perencanaan, penganggaran, akuntasi dan pengelolaan pengaduan publik
		Memberdayakan kelompok informasi masyarakat
		Meningkatkan respon terhadap pengaduan masyarakat
	Meningkatkan Penelitian, pengkajian dan pengembangan inovasi daerah melalui fasilitasi dan pendampingan inovasi daerah didukung pengembangan jejaring di daerah, regional dan nasional, pemberdayaan masyarakat serta kerjasama dengan akademisi.	Meningkatkan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan inovasi daerah
		Meningkatkan pembinaan terhadap pos pelayanan teknologi pedesaan
KOTA BOGOR	**Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Yang Sehat**	
	Mendorong upaya pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, merata, terjangkau, berjenjang, profesional dan bermutu	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada fasilitas Kesehatan dasar dan rujukan;
		Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
		Standarisasi Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
		Menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan
		Peningkatan ketersediaan sumberdaya kesehatan yang berkualitas dalam aspek SDM kesehatan, aspek pembiayaan, aspek perbekalan kesehatan dan farmasi serta aspek pemenuhan sarana prasarana fasilitas kesehatan sesuai dengan standar

KAB/KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Kolaborasi pembiayaan kesehatan masyarakat
		Penyediaan pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi
	Menurunkan Angka Kelahiran	Penurunan angka kelahiran pada usia remaja
		Peningkatan kepesertaan Ber-KB terutama untuk kepesertaan KB MKJP pada Pasangan Usia Subur
	Menjamin kualitas konsumsi pangan dan Gizi masyarakat	Peningkatan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan pangan yang beragam
		Peningkatan kecukupan konsumsi energi dan protein pada asupan pangan masyarakat
		Pengendalian cemaran pada bahan pangan dan produk produk olahan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat
		Menjamin kualitas konsumsi pangan dan gizi ibu hamil, bayi dan balita
	Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan dan preventif serta penyehatan lingkungan	Advokasi pembangunan berwawasan kesehatan
		Kemitraan dengan Kelompok Kesehatan Masyarakat
		Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Keluarga serta keterlibatan para pemangku kepentingan dalam menggiatkan perilaku hidup bersih dan sehat
		Mendorong tumbuh kembangnya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), dan peningkatan upaya penyehatan lingkungan
	Meningkatkan kebugaran masyarakat melalui pembudayaan olahraga pada masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga
		Menjamin ketersediaan sarana prasarana olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan terjangkau
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga prestasi secara berkelanjutan
	Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyediaan pelayanan air minum yang aman	Menyediakan sumber air minum yang aman bagi masyarakat di Kawasan yang tidak terjangkau oleh pelayanan air minum perpipaan
		Meningkatkan ketersediaan sumber air minum yang berkualitas
		Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan air minum yang aman bagi masyarakat

KAB/KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyediaan pelayanan air limbah yang layak	Menyediakan sistem air limbah yang layak bagi masyarakat secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan terjangkau oleh masyarakat
		Menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan air limbah
	Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Penanganan kawasan kumuh secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan
		Pencegahan terhadap menurunnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman sehingga berpotensi menjadi kumuh
		Standarisasi kualitas prasarana sarana perumahan dan permukiman
		Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang terjangkau oleh masyarakat
		Pembangunan dan Peningkatan kualitas sarana prasarana perumahan permukiman yang menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan
		Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang berorientasi pada mitigasi resiko bencana
		Akselerasi Pemulihan Infrastruktur Pasca Bencana
	Reduksi timbulan sampah	Pengurangan penggunaan plastik di Toko Modern dan Pasar Tradisional
		Penerapan dan Pengelolaan 3R dan Bank Sampah berbasis pemberdayaan masyarakat
		Kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan Swasta dalam pengelolaan sampah
		Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan standar
	Meningkatkan pengelolaan DAS dan konservasi sumber daya air	Naturalisasi Sungai Ciliwung dan Cisadane
		Konservasi sumberdaya air secara berkelanjutan
		Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS dan konservasi SDA
		Kemitraan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota Bogor, swasta dan masyarakat dalam pengelolan DAS dan Konservasi Sumberdaya Air
	Mengendalikan kegiatan/usaha manusia yang berpotensi sebagai sumber-sumber pencemar air	Pengendalian dan pengawasan melekat pada setiap kegiatan/ usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar air

KAB/KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Penegakan sanksi yang tegas terhadap kegiatan/usaha yang mencemari badan air
		Kemitraan dengan berbagai s*takeholder* dalam pengendalian pencemaran sumberdaya air
	Mengendalikan kegiatan/usaha manusia yang berpotensi sebagai sumber-sumber pencemar udara	Pengembangan transportasi berkelanjutan dalam rangka meminimalisir potensi sumber pencemar udara
		Pengendalian dan pengawasan melekat pada setiap kegiatan/usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar udara
		Kemitraan dengan berbagai *stakeholder* dalam pengendalian pencemaran udara
	Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Penurunan emisi gas rumah kaca pada transportasi, dan pengelolaan limbah, serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim
		Kemitraan dengan berbagai *stakeholder* dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
	Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang berkualitas	Penyediaan RTH Publik yang berkualitas, ramah keluarga dan ramah disabilitas
		Pelestarian dan Konservasi Kawasan Lindung yang meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana serta kawasan yang diterapkan sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati sesuai dengan amanat RTRW
		Pengelolaan area pemakaman umum yang berorientasi pada Tempat Pemakaman Umum Hijau
	Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Yang Cerdas	
	Mempercepat pemerataan kualitas pendidikan Dasar 9 Tahun	Peningkatan kualitas pendidikan yang berdaya saing dan mendorong penguatan muatan lokal sebagai salah satu wahana untuk pendidikan karakter dan *entrepreneurship*.
		Standarisasi dan pemerataan Mutu Pendidikan Dasar
		Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar
		Pengembangan dan mekanisme rekruitmen dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata secara geografis, tepat jumlah, tepat kualifikasi/keahlian, dan gender dalam rangka pemerataan mutu pendidikan dasar 9 tahun

KAB/KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan dasar, menjamin layanan akses bagi peserta didik, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, dan untuk menghilangkan diskriminasi di sekolah
		Penguatan karakter, kreatifitas, inovasi, dan prestasi peserta didik untuk menguatkan daya saing peserta didik pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi
		Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar 9 tahun sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan
		Menjamin pendidikan inklusif yang berkualitas
		Memberikan bantuan beasiswa peserta didik kepada peserta didik miskin dan mencanangkan program orang tua asuh untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih tinggi kepada peserta didik miskin
	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan non formal	Pengembangan kerja sama dengan lembaga/organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi lain yang dapat menjangkau masyarakat, dalam rangka pemberantasan buta aksara
		Meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan yang diarahkan untuk mendukung suksesnya wajib belajar 12 Tahun (setara SMA/SMK)
		Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan yang berorientasi pada pasar kerja
		Meningkatkan pembinaan kursus dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat di berbagai bidang keterampilan yang berorientasi pada penumbuhkembangan jiwa kewirausahaan/entrepreneurship dalam rangka percepatan penurunan tingkat pengangguran terbuka
		Penguatan kelembagaan PKBM melalui penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan non formal secara berkelanjutan dengan prinsip-prinsip manajemen yang lebih jelas

KAB/KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penguatan karakter, prestasi, kreatifitas dan Inovasi generasi muda	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
		Penguatan daya saing generasi muda melalui pemupukan ajang prestasi di segala bidang
		Aktualisasi nilai budaya bangsa pada generasi muda
		Membangun wawasan kebangsaan pada generasi muda
		Mendorong pengembangan museum sebagai pusat pengetahuan dan sejarah peradaban di Kota Bogor
		Memerangi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan minuman keras pada generasi muda
		Peningkatan peran serta pemuda dalam mengisi pembangunan
		Melakukan pembinaan terhadap anak-anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial secara berkelanjutan sehingga menjadi lebih berdaya
		Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Karakter Pemuda yang Mandiri dan Kreatif
		Pengembangan budaya dan minat baca pada generasi muda untuk mendorong/memacu kreatifitas dan inovasi generasi muda
		Revitalisasi Perpustakaan Kota dan pengembangan taman taman bacaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat
		Memperkuat karakter generasi muda dengan pembekalan pendidikan agama dan budi pekerti
	Menumbuhkembangkan kreatifitas dan inovasi masyarakat	Menggali kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola potensi wilayahnya sehingga berdayaguna dan bernilai ekonomis
		Menguatkan jejaring kerjasama dengan lembaga masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga penelitian untuk mendorong terciptanya kreatifitas dan inovasi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
		Berupaya selalu menciptakan budaya kreatif dan inovatif dalam setiap pemecahan permasalahan pembangunan sehingga tidak terjebak pada rutinitas *"Bussiness As Usual"*

KAB/KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan infrastruktur untuk mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi (internet, pendidikan kreatif, peningkatan seni dan budaya, dll)
	Membangun dan menguatkan budaya partisipatif dalam setiap proses pembangunan daerah	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses bisnis pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya
	Mendorong pemberdayaan masyarakat terutama yang berorientasi pada pemberdayaan gender	Pemberdayaan Masyarakat yang berorientasi pada penguatan/pengarusutamaan gender
	Mengembangkan pemerintahan yang integratif melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi dalam seluruh proses bisnis di semua level pemerintahan	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasiskan *e-government* dan mendorong pemerintahan yang terbuka *(open government)*
		Memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja dan berbasis pada data dan informasi yang berkualitas
		Menjamin sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
		Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja
		Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien
		Penguatan kapasitas aparatur dalam melakukan inovasi yang berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi setiap aparatur
		Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang profesional dan *smart*
		Membangun standarisasi kualitas pelayanan publik dan memastikan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor tercapai
		Penguatan pengendalian intern pemerintah (SPIP)
		Penataan peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih
	Melakukan Akselerasi pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi	Mendorong percepatan pembangunan kota Bogor yang Cerdas (Bogor *Smart City*) melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap proses bisnis pelayanan masyarakat
		Mengoptimalkan pemanfaatan terbarukan

KAB/KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Yang Sejahtera	
	Menciptakan 20 ribu kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan	Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berorientasi pada penguasaan ketrampilan berbasis teknologi digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar
		Mengembangkan inkubator bisnis
		memperkuat program magang serta program pelatihan dan kejuruan bagi pemuda yang mempunyai keterampilan rendah Meningkatkan produktivitas tenaga kerja
		Kerjasama hubungan industrial dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja
		Memastikan adanya jaminan perlindungan tenaga kerja
		Menjamin adanya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin
		Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin
		Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat miskin
	Meningkatkan landasan legalitas dan keutuhan keluarga	Peningkatan layanan administrasi kependudukan yang menjamin seluruh warga masyarakat terlayani administrasi legalitas perkawinan dan legalitas kelahirannya
		Memastikan adanya kemitraan gender dalam kehidupan berkeluarga
	Meningkatkan ketahanan fisik keluarga	Menjamin kecukupan pangan dalam setiap keluarga
		Memastikan kecukupan gizi seluruh anggota keluarga mulai bayi, balita, remaja, ibu, dan lansia
		Peningkatan kualitas kesehatan keluarga
		Peningkatan kualitas rumah tinggal dan lingkungannya yang layak huni bagi keluarga
	Meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga	Peningkatan pendapatan per kapita keluarga melalui pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri
		Peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi pembiayaan pendidikan anak sampai ke jenjang wajib belajar 12 tahun

KAB/KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan jamkesmas berbasis keluarga dan pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera
		Pengembangan program/kegiatan dalam upaya mengurangi kemisinan bagi keluarga pra sejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga
	Meningkatkan ketahanan Sosial Psikologis Keluarga	Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
		Meningkatkan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan serta perkembangan anak
		Peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga Peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga
	Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya dalam keluarga	Meningkatkan partisipasi seluruh anggota keluarga dalam pembangunan daerah
		Peningkatan kualitas lingkungan keluarga dan perlindungan keluarga agar tidak terpapar promosi dan perilaku sosial dan seksual menyimpang
	Meningkatkan keunggulan dan daya saing potensi ekonomi daerah	Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata berbasis potensi lokal
		Penguatan basis ekonomi kreatif yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis teknologi, inovasi dan kreativitas
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai pelaku ekonomi kreatif, terutama untuk peningkatan ide, kreativitas, inovasi, dan penguasaan teknologi
		Mengembangkan klaster, kemitraan dan pemanfaatan teknologi industri terutama bagi industri kecil dan menengah
		Memperkuat jaringan distribusi barang/produk olahan, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional
		Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM melalui peningkatan kualitas kelembagaan, dukungan pembiayaan usaha dan

KAB/KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		peningkatan akses pasar (*Off Taker* & Promosi)
		Meningkatkan dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen
		Revitalisasi pasar tradisional
		Mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui pengembangan tematik sebagai salah satu destinasi wisata di setiap wilayah
	Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing	Menyediakan layanan perijinan yang responsif, murah, mudah, dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik dan mal pelayanan
	Mengendalikan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan	Pengendalian pemanfaatan Ruang melalui Pelaksanaan Perijinan, Penegakan Sanksi dan Penerapan Insentif dan Disinsentif dalam pemanfaatan Ruang sesuai dengan amanat Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan aturan turunannya
	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan memastikan interkonektivitasnya secara baik dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah	Pembangunan jalan-jalan alternatif/jalan tembus untuk mengurangi beban kapasitas jalan di pusat-pusat kota dan dalam rangka menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru di wilayah pinggiran
		Pembangunan Persimpangan Tidak Sebidang (*Flyover/underpass*) untuk mengatasi kemacetan lalu lintas
		Memastikan tersedianya kondisi jalan yang mantap guna menunjang aktivitas perekenomian masyarakat
	Menyediakan jaringan transportasi yang berkualitas dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Mendorong percepatan tersedianya jaringan transportasi massal perkotaan berbasis jalan dan rel yang aman, nyaman dan terjangkau
		Mengintegrasikan jaringan transportasi perkotaan antar moda
		Melaksanakan percepatan penataan kawasan seputar Stasiun Kereta Api dan simpul-simpul transportasi lainnya dengan pengembangan sistem *Transit Oriented Development (TOD).*
		Membangun sarana prasarana simpul transportasi seperti penyediaan gedung parkir di pusat-pusat kegiatan dalam rangka mengatasi kemacetan lalu lintas.
		Penuntasan Sarana Terminal Baranangsiang dan Stasiun LRT

Sumber : RPJMD Kabupaten Bekasi, RPJMD Kota Depok, RPJMD Kabupaten Cianjur, RPJMD Kabupaten Sukabumi, RPJMD Kota Bogor

4.2.3 Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan kesepakatan internasional terkait pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030, terdapat 17 (tujuh belas) tujuan yang wajib diselesaikan sebagai bagian dari penyelesaian 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu : lingkungan, sosial dan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Keseluruhan tujuan global tersebut dan implementasinya di Kabupaten Bogor adalah :

1. Tanpa kemiskinan, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
2. Tanpa kelaparan, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Kehidupan sehat dan sejahtera, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Pendidikan berkualitas, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

   Wajib belajar sembilan tahun merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan dua dalam MDGs. Secara keseluruhan, pencapaian tujuan dua hampir mencapai target yang ditetapkan oleh MDGs yaitu angka partisipasi murni sekolah dasar sebesar 100 persen, akan tetapi Kabupaten Bogor baru mencapai 96,22 persen untuk tahun 2013/2014. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian secara nasional yang hanya sebesar 93,30 persen.
5. Kesetaraan gender, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Air bersih dan sanitasi layak, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Energi bersih dan terjangkau, yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

9. Industri, inovasi dan infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Berkurangnya kesenjangan, yaitu mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.
11. Kota dan komunitas berkelanjutan, yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Penanganan perubahan iklim, yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Ekosistem laut, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Ekosistem daratan, yaitu melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan, yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Kemudian dalam rangka pencapaian keseluruhan tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, dilakukan proses penelaahan melalui dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, yang untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 sebagaimana yang diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Matriks Integrasi KLHS dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

Rekomendasi KLHS			Integrasi dalam RPJMD					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan	**Indikator**	**Rekomendasi**	**Kondisi**	**Permasalahan**	**Isu Strategis**	**Tujuan dan Sasaran**	**Strategi dan Kebijakan**	
TPB 1 : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	• Program perlindungan dan jaminan sosial • Program pemberdayaan sosial • Program rehabilitasi sosial • Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah penduduk miskin tahun 2020 sebesar 7,69%. (II-83)	Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor menjadi 7,69% (IV-3)	Penurunan kemiskinan. (IV-73)	Tujuan : Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas. (V-7) Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. (V-7)	Strategi : • Peningkatan pemberdayaan sosial masyarakat. (VI-5) • Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial serta pemberian perlindungan dan jaminan sosial (VI-5) Kebijakan : • Membangun Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam penanganan PPKS (Graha Pancakarsa). (VI-5) • Memberikan kartu sehat (pembayaran JKM miskin). (VI-5)	1. Dinas Sosial; 2. Dinas Kesehatan

Rekomendasi KLHS			Integrasi dalam RPJMD					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan	**Indikator**	**Rekomendasi**	**Kondisi**	**Permasalahan**	**Isu Strategis**	**Tujuan dan Sasaran**	**Strategi dan Kebijakan**	
TPB 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan	2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh : • Skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan • Tingkat konsumsi ikan.	• Program pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan • Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat • Program penanganan kerawanan pangan • Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian • Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian • Program penyuluhan pertanian	Skor Pola pangan harapan dengan nilai sebesar 84,70 persen pada tahun 2020 masih dibawah target nasional sebesar 92,5 persen Untuk target di Kabupaten Bogor sebesar 81,29 persen pada tahun 2023. (V-7) Produksi perikanan pada tahun 2020 sebesar 118.711,83 ton/tahun. (II-132) Produksi peternakan pada tahun 2020 354.694 ton/tahun (II-132)	Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Bogor tahun 2020 cenderung mengalami penurunan di beberapa unit produksi (IV-17)	Peningkatan kesejahteraan masyarakat (IV-73)	Tujuan : Terwujudnya masyarakat Bogor sehat. (V-7) Sasaran : Meningkatnya ketahanan pangan daerah (V-7)	Strategi : Peningkatan ketersediaan dan diversifikasi konsumsi pangan yang aman. (VI-4) Kebijakan : • Meningkatkan penguatan cadangan pangan dan penganeka-ragaman pola konsumsi pangan. (VI-4)	1. Dinas Ketahanan Pangan; 2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; 3. Dinas Perikanan dan Peternakan.

Rekomendasi KLHS			Integrasi dalam RPJMD					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan	**Indikator**	**Rekomendasi**	**Kondisi**	**Permasalahan**	**Isu Strategis**	**Tujuan dan Sasaran**	**Strategi dan Kebijakan**	
		• Program pengelolaan perikanan tangkap • Program pengelolaan perikanan budidaya • Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan • Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan • Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. • Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian						

Rekomendasi KLHS			Integrasi dalam RPJMD					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan	**Indikator**	**Rekomendasi**	**Kondisi**	**Permasalahan**	**Isu Strategis**	**Tujuan dan Sasaran**	**Strategi dan Kebijakan**	
TPB 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	3.7.1 (b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	• Program pembinaan keluarga berencana • Program pengendalian penduduk • Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Jumlah pengguna metode MKJP sebesar 12,50 persen masih di bawah target 23,50 persen (IV-12)	• Belum optimalnya upaya pengendalian penduduk. (IV-12) • Belum optimalnya pelaksanaan program keluarga berencana dan penyuluhan terhadap masyarakat. (IV-12)	Peningkatan pelayanan Kesehatan. (IV-72)	Tujuan : Terwujudnya masyarakat Bogor sehat. (V-7) Sasaran : Menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk alami. (V-7)	Strategi : • Pengendalian pertumbuhan penduduk alami. (VI-5) Kebijakan : • Meningkatkan kepesertaan KB. (VI-5)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TPB 4: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	• 1.4.1 (g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. • 1.4.1 (h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	• APM SD/MI dan sederajat 88,75 persen (IV-6) • APM SMP/MTs/ sederajat 83,21 persen (IV-6) Keduanya masih di bawah target yaitu 94,78 persen	• Masih terdapat penduduk usia sekolah yang putus sekolah. (IV-6)	Peningkatan pelayanan pendidikan. (IV-72)	Tujuan : Terwujudnya masyarakat Bogor cerdas. (V-7) Sasaran : Meningkatnya pelayanan pendidikan yang berkualitas. (V-7)	Strategi • Peningkatan pengelolaan pendidikan. (VI-3) Kebijakan : • Membangun, merehabilitasi dan merevitalisasi sekolah. (VI-3) • Menuntaskan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP	Dinas Pendidikan

Rekomendasi KLHS			Integrasi dalam RPJMD					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan	**Indikator**	**Rekomendasi**	**Kondisi**	**Permasalahan**	**Isu Strategis**	**Tujuan dan Sasaran**	**Strategi dan Kebijakan**	
							(VI-3) • Memberikan penunjang pendidikan melalui penerbitan dan pemanfaatan Kartu Bodas untuk siswa SD dan SMP (VI-3) • Meningkatkan layanan pendidikan multi metode berbasis kompetensi (VI-3) • Meningkatkan cakupan sekolah terakreditasi A dan B. (VI-3) • Memberikan beasiswa terhadap putra/i daerah berprestasi (S1) (VI-3) • Meningkatkan pelayanan PKBM bagi pesantren salafiyah (VI-3) • Mengembangkan sekolah inklusif di setiap kecamatan (VI-3)	

Rekomendasi KLHS			Integrasi dalam RPJMD					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan	**Indikator**	**Rekomendasi**	**Kondisi**	**Permasalahan**	**Isu Strategis**	**Tujuan dan Sasaran**	**Strategi dan Kebijakan**	
							Mengalakkan Forkopimda *Goes to School.* (VI-3)	
TPB 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	6.1.1 (a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	• Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.	• Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak pada Tahun 2020 sebesar 72,94 persen (IV-8)	• Belum optimalnya tingkat pelayanan pemenuhan infrastruktur air minum berdasarkan SPAM. (IV-8)	Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan (IV-74)	Tujuan : Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan. (V-8) Sasaran : Meningkatnya kualitas permukiman. (V-8)	Strategi • Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman (VI-10) Kebijakan • Meningkatkan cakupan layanan air minum. (VI-10)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TPB 8: Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	• 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita. • 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. • 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja.	• Program Perencanaan Tenaga Kerja • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Hubungan Industrial • Program	• Pertumbuhan PDRB per kapita (AHK) Kabupaten Bogor Tahun 2020 sebesar 28,39 persen (II-80) • Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bogor Tahun 2020 sebesar 14,29 persen	• Pada tahun 2020, Laju Pertumbuhan Ekonomi mengalami kontraksi yang terjadi secara nasional akibat dari pandemi Covid-19. Adapun capaian LPE Kabupaten	• Peningkatan pemulihan ekonomi daerah. (IV-72) • Peningkatan investasi daerah. (IV-72) • Penurunan Pengangguran (IV-73)	Tujuan : Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas. (V-7) Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. (V-7)	Strategi : • Peningkatan kapasitas dan peluang ketenagakerjaan. (VI-5) Kebijakan : • Meningkatkan kapasitas dan peluang kerja. (VI-5) • Membangun *Career Center.* (VI-5)	Dinas Tenaga Kerja

Rekomendasi KLHS			Integrasi dalam RPJMD					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan	**Indikator**	**Rekomendasi**	**Kondisi**	**Permasalahan**	**Isu Strategis**	**Tujuan dan Sasaran**	**Strategi dan Kebijakan**	
		pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	(II-93) • Upah rata-rata per jam pekerja Rp 19.601/jam, masih belum memenuhi target minimal Rp20.000/ jam (IV-3)	Bogor tahun 2020 tercatat sebesar -1,77 persen. (IV-3) • Pada akhir tahun 2020, pembangun-an antar kecamatan masih masih timpang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Indeks Williamson sebesar 0,99 poin (IV-4) • Pada tahun 2020 indeks gini yang menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat, semakin membesar dari 0,42 poin menjadi 0,47			• Membangun Lembaga Sertifikasi Profesi Ketenagakerjaan (LSP). (VI-5) • Meningkatkan kemitraan ketenagakerjaan (VI-5)	

Rekomendasi KLHS			Integrasi dalam RPJMD					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan	**Indikator**	**Rekomendasi**	**Kondisi**	**Permasalahan**	**Isu Strategis**	**Tujuan dan Sasaran**	**Strategi dan Kebijakan**	
				poin.(II-81) • Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bogor tahun 2020 bertambah menjadi 14,29 persen dari 9,06 persen pada tahun 2019. (II-93) • Upah rata-rata masih di bawah target minimal. (IV-3)				
TPB 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.6.1 (a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	• Program peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat • Program penghargaan lingkungan hidup untuk	• Tingkat pengelolaan persampahan tahun 2020 masih berada di bawah 64,73 persen. (IV-10)	• Belum optimalnya penanganan persampahan yang disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah.	Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. (IV-74)	Tujuan : Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan. (V-8) Sasaran : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup (V-8)	Strategi : • Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan. (VI-10) Kebijakan : • Menyediakan sarana prasarana persampahan. (VI-10)	Dinas Lingkungan Hidup

Rekomendasi KLHS			Integrasi dalam RPJMD					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan	**Indikator**	**Rekomendasi**	**Kondisi**	**Permasalahan**	**Isu Strategis**	**Tujuan dan Sasaran**	**Strategi dan Kebijakan**	
		masyarakat • Program pengelolaan persampahan		(IV-11)			• Mewujudkan Bogor Antik "*Asri Tanpa Plastik*". (VI-10) • Menangani sampah berbasis Zonasi. (VI-10)	

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

4.2.4 Isu-Isu Strategis Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap permasalahan pembangunan Kabupaten Bogor, penelaahan RTRW Kabupaten Bogor, penelaahan KLHS RPJMD Kabupaten Bogor, penelaahan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, RPJMD daerah sekitar, dan penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka ditetapkan 13 (tiga belas) rancangan perubahan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Bogor yaitu :

1. **Peningkatan Pelayanan Pendidikan**

   Pendidikan masih merupakan isu strategis yang perlu ditangani hingga akhir periode RPJMD, karena pendidikan menjadi salah satu komponen penentu pencapaian Indeks Pembangunan Manusia.

2. **Peningkatan Pelayanan Kesehatan**

   Pelayanan kesehatan pasca pandemi covid-19 merupakan isu strategis daerah yang harus dijadikan prioritas penanganan. Peningkatan pelayanan terutama berorientasi pada peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan penanganan layanan di puskesmas dan rumah sakit.

3. **Peningkatan Pemulihan Ekonomi Daerah**

   Dampak pandemi covid-19 menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor tahun 2020 turun secara drastis hingga mencapai 1,19 persen. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, sulit mengakses pekerjaan, serta sulit mengakses pasar akibat lesunya perekonomian daerah. Pemulihan ekonomi daerah merupakan isu penting yang harus menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengalokasikan anggaran daerah sebagai bentuk intervensi kebijakan atau pelaksanaan program-program strategis. Perlu dikaji variabel-variabel yang berpengaruh secara cepat dalam pemulihan ekonomi, sehingga dapat ditentukan Langkah-langkah yang tepat sasaran dalam rangka membangkitkan ekonomi.

4. **Peningkatan Investasi Daerah**

   Investasi daerah merupakan salah satu tumpuan untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Dengan demikian, investasi daerah menjadi isu strategis yang akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan program-program daerah.

5. Peningkatan Konektivitas Infrastruktur Wilayah

Konektivitas infrastruktur daerah menjadi isu strategis dalam rangka mendukung peningkatan pemulihan ekonomi daerah, karena konektivitas infrastruktur wilayah akan membangkitkan kelancaran pergerakan orang dan barang.

6. Penurunan kemiskinan

Kemiskinan di Kabupaten Bogor meningkat tajam akibat dampak pandemi covid-19. Penurunan kemiskinan menjadi isu strategis yang harus diprioritaskan melalui pelaksanaan program-program prioritas.

Meningkatnya angka kemiskinan tahun 2020 menjadi 7,69 persen dari capaian tahun 2019 yang hanya 6,66 persen merupakan dampak dari pandemi covid-19 serta bencana yang melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Bogor. Kemiskinan menjadi isu strategis yang harus segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, meskipun kemiskinan merupakan variabel kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan APBD Kabupaten Bogor. Perlu dipetakan program-program lintas sektoral yang koordinatif, kebijakan yang konstruktif dan pemberdayaan masyarakat yang produktif.

7. Penurunan Pengangguran

Pengangguran Kabupaten Bogor meningkat cukup tajam akibat pandemi covid-19. Untuk itu, penurunan pengangguran menjadi isu strategis yang harus dijabarkan dalam program-program perangkat daerah.

Angka pengangguran Kabupaten Bogor akibat pandemi covid-19 meningkat tajam, yaitu dari 9,06 persen tahun 2019 menjadi 14,29 persen pada tahun 2020. Tingginya lonjakan jumlah warga yang menganggur menjadi isu penting yang harus segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, karena pengangguran dapat menyebabkan berbagai dampak sosial dan ekonomi serta memicu kerawanan sosial di tengah masyarakat.

8. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan isu yang selalu menjadi fokus penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah capaian angka IPM, terutama tingkat daya beli masyarakat. Meskipun daya beli masyarakat Kabupaten Bogor tetap meningkat walaupun terjadi pandemi covid-19, namun hal ini tetap menjadi isu penting yang harus dijadikan fokus pemilihan

program-program pembangunan daerah yang digunakan untuk mengintervensi variabel-variabel pendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

9. **Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan**

   Isu pemerataan pembangunan yang berkelanjutan merupakan isu yang belum terselesaikan hingga tahun 2020. Hal ini terlihat dari capaian indikator ketimpangan pembangunan kewilayahan yang direpresentasikan oleh indeks ketimpangan Williamson, dimana tahun 2020 capaian indeks ini sebesar 0,99 poin, yang berarti pembangunan wilayah di Kabupaten Bogor sangat senjang. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui perangkat daerah perlu melakukan pemetaan terkait intervensi wilayah yang dilakukan secara kewenangan sejak awal tahapan perencanaan, agar isu pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dapat diselesaikan hingga tahun 2023.

10. **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

    Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu faktor penting yang harus dijaga keseimbangannya agar masyarakat yang tinggal di dalamnya dapat memiliki kualitas kehidupan yang baik.

    Kualitas lingkungan hidup menjadi bagian dari isu strategis yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor mengingat dampak yang ditimbulkannya dapat berakibat pada semua sektor. Isu utama lingkungan hidup di Kabupaten Bogor terutama pencemaran (air, udara, dan tanah), banjir dan longsor, ketersediaan air, persampahan, dan ruang terbuka hijau.

11. **Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana**

    Kondisi alam dan geografis Kabupaten Bogor sangat berpeluang untuk terjadinya bencana alam. Kurangnya mitigasi berdampak pada lemahnya penanganan pra bencana, sehingga dari tahun ke tahun, masyarakat yang terdampak bencana tetap tinggi. Untuk itu, perlu menjadi perhatian penting terkait adanya reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana.

12. **Menekan Kerawanan Sosial**

    Kerawanan sosial merupakan dampak hilir dari tidak berfungsi normalnya variabel-variabel sosial dan ekonomi daerah. Permasalahan pengangguran, kemiskinan serta ketimpangan wilayah dianggap sebagai

pemicu kerawanan sosial. Isu ini diangkat agar dapat ditindaklanjuti melalui program-program yang tepat sasaran.

13. Peningkatan pelayanan publik

Kondisi pandemi covid-19 menyebabkan perlunya peningkatan pelayanan publik yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor. Untuk itu, peningkatan pelayanan publik menjadi isu strategis yang perlu diprioritaskan hingga akhir periode sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi.

Selanjutnya pada Tabel 4.3 berikut ini diuraikan keterkaitan antara isu strategis Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Bogor dimana Provinsi Jawa Barat memiliki 5 (lima) isu strategis, sedangkan Kabupaten Bogor menetapkan 13 (tiga belas) isu strategis.

Tabel 4.3
Keterkaitan Isu-Isu Strategis Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Bogor

No	Isu-Isu Strategis	
	Provinsi Jawa Barat	**Kabupaten Bogor**
1	Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia	1. Peningkatan pelayanan Pendidikan 2. Peningkatan pelayanan kesehatan
2	Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial	1. Penurunan kemiskinan 2. Penurunan pengangguran 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat 4. Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana 5. Menekan kerawanan sosial
3	Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	1. Peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah 2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
4	Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan	1. Peningkatan pemulihan ekonomi daerah 2. Peningkatan investasi daerah 3. Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan
5	Reformasi birokrasi	1. Peningkatan pelayanan publik

Sumber : Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, disandingkan

Adapun, keterkaitan isu strategis nasional dengan Kabupaten Bogor disajikan pada Tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Keterkaitan Isu-Isu Strategis Nasional dengan Kabupaten Bogor

No	Isu-Isu Strategis	
	Nasional	**Kabupaten Bogor**
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dengan isu strategis : a. keberlanjutan sumberdaya alam b. efektivitas tata kelola sumberdaya ekonomi yang kurang efisien c. transformasi struktural berjalan lambat d. Revolusi industri 4.0 dan Ekonomi digital	1. Peningkatan pemulihan ekonomi daerah 2. Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan 3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 4. Peningkatan pelayanan publik
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan isu strategis : a. Masih adanya Ketimpangan antar wilayah	1. Peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah
3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, dengan isu strategis : a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola Kependudukan b. Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk c. Pemenuhan layanan dasar d. Peningkatan kualitas anak, Perempuan, dan pemuda e. Pengentasan kemiskinan f. Peningkatan produktivitas dan daya saing	1. Peningkatan pelayanan Pendidikan 2. Peningkatan pelayanan kesehatan 3. Penurunan kemiskinan 4. Penurunan pengangguran 5. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat 6. Menekan kerawanan sosial 7. Peningkatan pemulihan ekonomi daerah 8. Menekan kerawanan sosial
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan isu strategis : a. Melemahnya ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa b. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia c. Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti d. Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai	1. Peningkatan pelayanan pendidikan 2. Menekan kerawanan sosial

No	Isu-Isu Strategis	
	Nasional	**Kabupaten Bogor**
	ajaran agama e. Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan f. Belum optimalnya peran keluarga g. Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas	
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan isu strategis : a. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau b. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman c. Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan d. Keselamatan dan keamanan transportasi e. Ketahanan kebencanaan infrastruktur f. Waduk multiguna dan modernisasi irigasi g. Konektivitas jalan h. Konektivitas kereta api i. Konektivitas laut j. Konektivitas darat k. Transportasi perkotaan l. Energi dan ketenagalistrikan perkotaan m. Infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan n. Penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman di perkotaan o. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau di perkotaan p. Keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan q. Akses serta keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan r. Kecukupan penyediaan energi dan ketenagalistrikan s. Penuntasan infrastruktur TIK t. Pemanfaatan infrastruktur TIK u. Fasilitas pendukung transformasi digital	1. Peningkatan investasi daerah 2. Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana 3. Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan 4. Peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dengan isu strategis : a. Peningkatan kualitas	1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

No	Isu-Isu Strategis	
	Nasional	**Kabupaten Bogor**
	lingkungan hidup b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim c. Pembangunan rendah karbon	
7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, dengan isu strategis : a. Konsolidasi Demokrasi b. Optimalisasi kebijakan luar negeri c. Penegakan hukum nasional d. Reformasi birokrasi dan tata kelola e. Menjaga stabilitas keamanan nasional	1. Peningkatan pelayanan publik

Sumber : RPJMN Tahun 2020-2024

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 merupakan tahapan keempat dari keseluruhan tahapan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD tahap ketiga, RPJMD tahap keempat ini ditujukan untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah melalui optimalisasi seluruh urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

Berdasarkan kronologis, rumusan visi dan misi Kabupaten Bogor pada awalnya diusung oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi dan misi yang diusung tersebut terlahir dari penelaahan terhadap substansi RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, untuk selanjutnya disampaikan oleh calon Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye. Setelah terpilih, visi dan misi tersebut disinergikan dengan konsep perencanaan teknokratik, karena jarak waktu antara penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan pelantikan melebihi 6 (enam) bulan. Pasca pelantikan tanggal 30 Desember 2018, visi dan misi kepala daerah dijadikan sebagai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor melalui serangkaian tahapan, yaitu dibahas dalam forum konsultasi publik maupun dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

5.1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Dengan kata lain, visi Pemerintah Kabupaten Bogor merupakan bentuk ungkapan kondisi yang ingin diwujudkan hingga tahun 2023.

Beberapa hal yang melatarbelakangi penetapan visi Pemerintah Kabupaten Bogor, diantaranya adalah :

1. Merupakan visi yang diusung dalam kampanye Bupati dan Wakil Bupati Bogor saat menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

2. Adanya keinginan untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan daerah yang belum terselesaikan pada periode RPJMD tahun 2013-2018, baik dari aspek kesejahteraan rakyat, daya saing, maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bermuara pada pelayanan publik.
3. Adanya keinginan untuk menyelesaikan isu strategis daerah yang terkait dengan isu nasional, Provinsi Jawa Barat, serta isu-isu kewilayahan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah : **"Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban".**

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor dimaksud adalah :

1. **Kabupaten Bogor** adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia yang secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di sebelah utara; Kabupaten Karawang di sebelah timur, Kabupaten Cianjur di sebelah tenggara, Kabupaten Sukabumi di sebelah selatan, serta Kabupaten Lebak Provinsi Banten di sebelah barat yang di dalamnya berkumpul sejumlah manusia atau masyarakat dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama**.**
2. **Termaju,** yaitu perolehan pembangunan Kabupaten Bogor memiliki laju yang massif, dan dapat menandingi laju pencapaian pembangunan di tingkat Jawa Barat maupun nasional.
3. **Nyaman,** yaitu Kabupaten Bogor dapat menjadi Kabupaten yang nyaman untuk beraktivitas, nyaman sebagai tempat hunian dan ramah untuk berinvestasi.
4. **Berkeadaban,** yaitu masyarakat Kabupaten Bogor senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan melestarikan budaya, menjadi parameter di Indonesia sebagai wilayah yang mampu menjadi simbol masyarakat Indonesia yang ramah, toleran dan berakhlakul karimah.

5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka pencapaian visi dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
4. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan kesalehan sosial.

Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut di atas serta keselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. **Misi Pertama**, yaitu mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Misi ini terkait dengan Misi Pertama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban serta Misi Kedua, yaitu Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif.
2. **Misi Kedua,** yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan. Misi ini terkait dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang

yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah dan Misi Keempat, yaitu Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan

3. **Misi Ketiga,** yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjaga cita-cita dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Misi ini terkait dengan Misi Kelima Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. **Misi Keempat,** yaitu mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan pembangunan yang merata diwilayah Kabupaten Bogor. Misi ini terkait dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah dan Misi Keempat, yaitu Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan.
5. **Misi Kelima,** yaitu mewujudkan kesalehan sosial. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam rangka membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Misi ini terkait dengan Misi Pertama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran memiliki indikator yang dapat menggambarkan ketercapaian visi dan misi pada skala dampak/*impact*.

Visi dan misi yang telah ditetapkan dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran agar pencapaian masing-masing misi dapat terukur secara tahunan maupun lima tahunan. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan konkuren pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Penentuan tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 mengacu pada perubahan isu strategis, sebagai berikut :

Tabel 5.1
Keterkaitan Isu-Isu Strategis Kabupaten Bogor dengan Tujuan dan Sasaran dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN
1. Peningkatan pelayanan Pendidikan	1.1 Terwujudnya masyarakat Bogor cerdas	1.1.1 Meningkatnya pelayanan pendidikan yang berkualitas
		1.1.2 Meningkatnya budaya literasi
2. Peningkatan pelayanan kesehatan	1.2 Terwujudnya masyarakat Bogor sehat	1.2.1 Meningkatnya kualitas kesehatan
		1.2.2 Meningkatnya ketahanan pangan daerah
		1.2.3 Menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk alami

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN
3. Peningkatan pemulihan ekonomi daerah	2.1 Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	2.1.1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
4. Penurunan kemiskinan		
5. Penurunan pengangguran		
6. Peningkatan kesejahteraan masyarakat		
7. Menekan kerawanan sosial		
8. Peningkatan investasi daerah		2.1.2 Meningkatnya daya saing daerah
9. Peningkatan pelayanan publik	3.1 Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	3.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		3.1.2 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif
10. Peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah	4.1 Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan	4.1.1 Meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi
11. Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan		4.1.2 Meningkatnya kualitas sarana prasarana desa
		4.1.3 Meningkatnya kualitas permukiman
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup		4.1.4 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
13. Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana		4.1.5 Mengurangi risiko bencana
	5.1 Terwujudnya masyarakat Bogor berkeadaban	5.1.1 Kehidupan masyarakat agamis, harmonis, nyaman, tertib dan tidak diskriminatif
		5.1.2 Meningkatnya peranan wanita dalam pembangunan
		5.1.3 Terwujudnya pelestarian kebudayaan

Sumber : Hasil Analisa, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021

Kemudian mengenai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 disajikan secara rinci melalui tabel berikut ini :

Tabel 5.2
Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL KONDISI AWAL	CAPAIAN DAN TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN					KONDISI AKHIR
						REALISASI		TARGET			
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban											
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berkualitas											
1.1	Terwujudnya masyarakat Bogor cerdas			a. Indeks Pendidikan (poin)	60,82	62,27	62,33	63,01	63,74	64,53	64,53
		1.1.1	Meningkatnya pelayanan pendidikan yang berkualitas	a. Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,88	8,29	8,30	8,39	8,50	8,61	8,61
				b. Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,44	12,47	12,48	12,61	12,75	12,90	12,90
		1.1.2	Meningkatnya budaya literasi	a. Indeks Membaca (poin)	52,69	52,81	60,97	61,16	61,35	61,54	61,54
1.2	Terwujudnya masyarakat Bogor sehat			a. Indeks Kesehatan (poin)	78,25	78,48	78,72	78,88	79,05	79,23	79,23
				b. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,20	2,13	1,29	1,66	1,63	1,58	1,58
		1.2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan	a. Angka Harapan Hidup (tahun)	70,86	71,01	71,17	71,27	71,39	71,50	71,50
		1.2.2	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	a. Skor Pola Pangan Harapan (poin)	86,18	83,40	84,70	80,96	81,12	81,29	81,29
		1.2.3	Menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk alami	a. *Crude Birth Rate* (CBR) (%)	25,59	24,80	19,55	19,10	18,65	18,21	18,21
Misi 2 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan											
2.1	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas			a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,19	5,85	-1,77	3,48	4,31	5,15	5,15
		2.1.1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	a. PDRB Perkapita (Juta Rp.)	37,93	40,53	43,51	38,58	38,80	39,41	39,41
				b. Tingkat kemiskinan (%)	7,14	6,66	7,69	7,54	7,38	7,14	7,14
				c. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,75	9,06	14,29	12,22	11,64	11,05	11,05

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL KONDISI AWAL	CAPAIAN DAN TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN					KONDISI AKHIR
				REALISASI		TARGET			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	2.1.2 Meningkatnya daya saing daerah	a. PDRB atas dasar harga berlaku (triliun Rp.)	219,24	237,20	236,15	238,81	244,05	251,80	251,80
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik									
3.1 Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas		a. Indeks reformasi birokrasi (poin)	61,37	64,90	67,03	69,00	72,00	75,00	75,00
	3.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	a. Indeks kepuasan masyarakat (poin)	78,57	79,05	86,11	86,50	87,00	87,50	87,50
	3.1.2 Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	a. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		b. Nilai AKIP (predikat/poin)	B	B	67,94	69,00	72,00	75,00	75,00
		c. Indeks Inovasi Daerah (poin)	4.280	6.420	13.144	60	65	70	70
Misi 4 : Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan									
4.1 Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan		a. Indeks Ketimpangan Wilayah (Williamson) (poin)	0,96	0,93	0,99	0,98	0,96	0,93	0,93
	4.1.1 Meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	a. Indeks Konektivitas Infrastruktur (poin)	N/A	N/A	N/A	1,42	1,47	1,53	1,53
	4.1.2 Meningkatnya kualitas sarana prasarana desa	a. Indeks Desa Membangun (poin)	N/A	N/A	0,7001	0,7301	0,7362	0,7524	0,7524
	4.1.3 Meningkatnya kualitas permukiman	a. Persentase Kawasan Permukiman Layak (%)	99,54	99,60	99,65	99,72	99,86	100,00	100,00
	4.1.4 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	49,46	50,89	54,08	56,05	56,15	56,25	56,25
	4.1.5 Mengurangi risiko bencana	a. Indeks Risiko Bencana (poin)	152	150	133,75	136	134	132	132

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL KONDISI AWAL	CAPAIAN DAN TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN					KONDISI AKHIR
				REALISASI		TARGET			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Misi 5 : Mewujudkan kesalehan sosial									
5.1 Terwujudnya masyarakat Bogor berkeadaban		a. Indeks Kebahagiaan (poin)	67,94	67,95	74,73	74,73-74,75	74,72-74,76	74,72-74,78	74,72-74,78
		b. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	88,69	88,87	89,39**	89,63	90,09	90,56	90,56
	5.1.1 Kehidupan masyarakat agamis, harmonis, nyaman, tertib dan tidak diskriminatif	a. Indeks Kerukunan Hidup Beragama (poin)	67,75	67,92	82,10	82,09-82,12	82,09-82,15	82,09-82,17	82,09-82,17
		b. Tingkat Kepatuhan Perda dan Perkada Ketertiban Umum (%)	N/A	N/A	N/A	74,36	82,05	92,31	92,31
	5.1.2 Meningkatnya peranan wanita dalam pembangunan	a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	57,1	57,57	55,90	58,50	58,90	59,00	59,00
	5.1.3 Terwujudnya pelestarian kebudayaan	a. Persentase kebudayaan yang dilestarikan (%)	N/A	65,00	65,00	57,01	57,94	58,88	58,88

Sumber : Hasil Analisa, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021

5.4 Keterkaitan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

RPJPD Kabupaten Bogor merupakan dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) yang berlaku sejak tahun 2005-2025. RPJPD ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025. Hingga perjalanan tahap ketiga RPJPD, yaitu periode tahun 2013-2018, tepatnya tahun 2017, terjadi perubahan tata aturan dalam penyusunan dan sistematika dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menyesuaikan dokumen perencanaan pembangunan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dilakukanlah Perubahan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025.

RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, dimana RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan tahapan keempat dari perencanaan jangka panjang Kabupaten Bogor. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Bogor wajib memedomani substansi Perubahan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025. Adapun keterkaitan antara RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 yang telah diubah, dengan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 yang telah diubah adalah :

a. Keterkaitan Visi :

RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 mengemban visi : **"Kabupaten Bogor Maju dan Sejahtera berlandaskan Iman dan Takwa"**

Makna yang terkandung dalam slogan visi tersebut, serta ingin diwujudkan hingga akhir periode, diuraikan sebagai berikut :

Termaju :

Kabupaten Bogor ***Termaju*** bermakna bahwa di akhir periode diharapkan akan menjadi lebih baik dalam hal pengembangan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kewenangan yang diampu. Wujud termaju ditunjukkan dalam hal :

1. mampu beradaptasi dan cepat tanggap terhadap adanya perubahan kebijakan, baik pusat maupun Jawa Barat, responsif terhadap ide-ide baru dan tanggap terhadap perkembangan teknologi.
2. senantiasa progresif dalam kinerja pelaksanaan program pembangunan.
3. selektif dalam penetapan prioritas dan fokus pembangunan dengan senantiasa memperhatikan pembangunan berkelanjutan.
4. mengutamakan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. senantiasa menjadi sumber inspirasi dan alternatif informasi bagi pemerintah dan pemerintah daerah lainnya.
6. inovatif
7. mampu memberikan tingkat kepuasan yang tinggi kepada masyarakat dalam pelayanan publik.
8. Hasil pembangunan yang ramah lingkungan.

Sejahtera :

Kabupaten Bogor ***Sejahtera*** bermakna bahwa pada kondisi akhir periode, diharapkan masyarakat Kabupaten Bogor dapat merasakan peningkatan kesejahteraan dalam wujud :

1. menurunnya kemiskinan dan pengangguran.

2. adanya jaminan kepastian dalam memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesempatan berusaha.
3. meningkatnya kesejahteraan, ketenteraman dan kebahagiaan keluarga.
4. adanya jaminan pemerataan pembangunan baik fisik maupun non fisik.

Iman dan Takwa :

Kabupaten Bogor beriman dan bertakwa bermakna bahwa pada kondisi akhir periode, diharapkan akan terwujud masyarakat yang berkeadaban dalam bentuk:

1. terjaminnya pelaksanaan peribadatan dan aktivitas sosial masyarakat.
2. terpeliharanya kearifan lokal dan budaya daerah.
3. terpeliharanya suasana aman, tenteram, tertib, damai, saling bekerjasama, dan kerukunan hidup di tengah masyarakat.

Dengan demikian, keterkaitan visi antara RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 dengan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, dapat dirinci sebagai berikut:

Termaju :

Dalam RPJMD, termaju diartikan sebagai perolehan pembangunan Kabupaten Bogor memiliki laju yang massif, dan dapat menandingi laju pencapaian pembangunan di tingkat Jawa Barat maupun nasional. Keterkaitan dengan visi termaju dalam RPJPD adalah bahwa *kesembilan* harapan yang ingin diwujudkan dalam jangka panjang, pada periode tahun 2018-2023 akan diejawantahkan dalam bentuk ketercapaian perolehan target yang melebihi target nasional dan Jawa Barat.

Nyaman :

Dalam RPJMD, nyaman diartikan bahwa Kabupaten Bogor dapat menjadi kabupaten yang nyaman untuk beraktivitas, nyaman sebagai tempat hunian dan ramah untuk berinvestasi. Keterkaitan dengan visi dalam RPJPD, secara implisit merupakan penjabaran

dari harapan tercapainya kepastian jaminan kenyamanan dalam upaya mencapai kesejahteraan serta iman dan takwa.

Berkeadaban :

Dalam RPJMD, Berkeadaban diartikan sebagai masyarakat Kabupaten Bogor senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan melestarikan budaya, menjadi parameter di Indonesia sebagai wilayah yang mampu menjadi simbol masyarakat Indonesia yang ramah, toleran dan berakhlakul karimah. Keterkaitan dengan RPJPD, berkeadaban merupakan penjabaran dari harapan ingin terwujudnya suasana keimanan dan ketakwaan jangka panjang, baik dalam jaminan pelaksanaan peribadatan, terpeliharanya kebudayaan, serta terwujudnya ketenteraman dan ketertiban daerah.

b. Keterkaitan Misi

RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 memiliki misi :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dengan meningkatkan nilai tambah produk dengan inovasi teknologi informasi.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah dan konektivitas antar-wilayah.
4. Mewujudkan Kabupaten Bogor yang TEGAR BERIMAN (Tertib, Segar, Bersih, Indah, Mandiri, Aman dan Nyaman) dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Keterkaitan antara misi dalam RPJPD dengan misi dalam RPJMD diuraikan sebagai berikut :

- Misi 1 dalam RPJMD yaitu mewujudkan masyarakat yang berkualitas merupakan penjabaran dari Misi 1 RPJPD yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.
- Misi 2 dalam RPJMD yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, merupakan penjabaran dari Misi 2 RPJPD yaitu mewujudkan perekonomian daerah

yang berdaya saing dengan meningkatkan nilai tambah produk dengan inovasi teknologi informasi.

- Misi 3 dalam RPJMD yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, merupakan penjabaran dari Misi 5 RPJPD yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
- Misi 4 dalam RPJMD yaitu mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan, merupakan penjabaran dari misi 3 RPJPD yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah dan konektivitas antar-wilayah.
- Misi 5 dalam RPJMD yaitu mewujudkan kesalehan sosial, merupakan penjabaran dari Misi 4 RPJPD yaitu mewujudkan Kabupaten Bogor yang TEGAR BERIMAN (Tertib, Segar, Bersih, Indah, Mandiri, Aman dan Nyaman) dan berkelanjutan.

c. Keterkaitan Arah Kebijakan

RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 telah menetapkan arah kebijakan untuk periode tahun 2018-2023 yaitu : optimalisasi seluruh pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas, ketenteraman dan ketertiban umum, pemerataan pembangunan wilayah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam bingkai kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah, serta sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan Jawa Barat. Dalam tahapan keempat ini, seluruh unsur potensi sumberdaya wilayah dan budaya dimanfaatkan sebagai sarana mengintervensi dan menstimulasi keberdayaan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang berkualitas.

Secara umum, arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Bogor tahun 2005-2025 ditetapkan berdasarkan kewenangan bidang urusan, dan telah diacu dalam dokumen RPJMD dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalam hal penetapan arah kebijakan dalam RPJPD tidak sesuai dengan kebijakan nasional yang berlaku, maka RPJMD akan melakukan penyesuaian terhadap arah kebijakan yang tercantum dalam RPJPD berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.

d. Keterkaitan Sasaran Pokok

Sasaran pokok yang ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Bogor menjadi dasar dalam penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018-2023. Adapun keterkaitan antara sasaran pokok dalam RPJPD dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3
Keterkaitan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

RPJPD		RPJMD		Keterangan
Sasaran Pokok	**Indikator**	**Tujuan dan Sasaran Pembangunan**	**Indikator**	
Penurunan angka kemiskinan	Angka kemiskinan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat kemiskinan	
Pengurangan angka pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka		Tingkat Pengangguran Terbuka	
Penurunan ketimpangan pendapatan	Indeks Gini			Indikator Makro
Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	IPM			Indikator Makro
Peningkatan produksi daerah	PDRB atas dasar harga berlaku	Meningkatnya daya saing daerah	PDRB atas dasar harga berlaku	
Peningkatan investasi daerah	Nilai investasi Daerah			Dalam Renstra
Peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah	Indeks ketimpangan Williamson	Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan	Indeks Ketimpangan Wilayah (Williamson)	

RPJPD		RPJMD		Keterangan
Sasaran Pokok	**Indikator**	**Tujuan dan Sasaran Pembangunan**	**Indikator**	
Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana permukiman	Cakupan Penataan Perumahan dan Permukiman Kumuh	Meningkatnya kualitas permukiman	Cakupan penataan kawasan permukiman kumuh	
Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
Peningkatan upaya perwujudan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum	Kehidupan masyarakat agamis, harmonis, nyaman, tertib dan tidak diskriminatif	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	
Penurunan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Mengurangi risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	
Peningkatan kualitas dan kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti diklat formal dan struktural			Dalam Renstra
Peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan daerah	Nilai AKIP	Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP	
Peningkatan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kualitas pelayanan publik meningkat	Indeks Kepuasan Masyarakat	
Peningkatan infrastruktur dan teknologi pendukung pelayanan publik (IT Governance)	Indeks SPBE			Dalam Renstra

Sumber : Hasil analisa, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021

5.5 Keterkaitan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat serta Visi dan Misi RPJMN

Penyusunan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 serta visi dan misi RPJMN Tahun 2020-2024. Secara rinci, keterkaitan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

5.5.1 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bogor dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 tidak melakukan perubahan visi, sehingga tetap pada visi awal yaitu : ***"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi"***

Pernyataan Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

Jawa Barat Juara Lahir Batin: Pembangunan Provinsi Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.

Inovasi: Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi: Perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Visi ini dijabarkan ke dalam misi dengan keterkaitan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.4
Keterkaitan Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 dengan Perubahan RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023

Visi dan Misi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023	Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023
Visi : *"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi"*	**Visi : *"Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban"***
Misi	
Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa	Mewujudkan kesalehan sosial
Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif	Mewujudkan masyarakat yang berkualitas
Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan	Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan
Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Kerakyatan yang Sejahtera dan Adil	Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik

Sumber : Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023

5.5.2 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bogor dengan Visi dan Misi RPJMN

Visi RPJMN Tahun 2020-2024 adalah :

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

Visi tersebut dijabarkan ke dalam 9 Misi yang dikenal sebagai ***Nawa Cita kedua***, yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa, dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun keterkaitan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024 dengan misi RPJMD tahun 2018-2023 dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.5
Keterkaitan Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024	Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023
Visi : "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"	**Visi : *"Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban"***
Misi	
Peningkatan kualitas manusia Indonesia	Mewujudkan masyarakat yang berkualitas
Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing	Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
Pembangunan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan
Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan
Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	Mewujudkan kesalehan sosial
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik
Perlindungan bagi segenap bangsa, dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik
Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

5.6 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program strategis daerah merupakan penjabaran dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan daerah. Program strategis daerah dapat dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah hingga tahun 2023, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik;
4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan;
5. Meningkatkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang berkeadaban.

Seluruh program strategis tersebut diimplementasikan ke dalam tahapan perencanaan pembangunan tahunan dengan tema sebagai berikut :

1. Tahun 2019 **"Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor dengan Pancakarsa"**;
2. Tahun 2020, **"Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor dengan Pancakarsa"**;
3. Tahun 2021, **"Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor dengan Pancakarsa dalam Rangka Reformasi Sosial dan Pemulihan Ekonomi Daerah"**;
4. Tahun 2022, **"Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor dengan Pancakarsa dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah"**;
5. Tahun 2023, **Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor dengan Pancakarsa dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Termaju, Nyaman dan Berkeadaban"**.

Di samping itu, program strategis daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mengimplementasikan program-program unggulan yang menjadi janji-janji politis kepala daerah. Adapun janji politis kepala daerah periode tahun 2018-2023 tertuang dalam slogan **"PANCAKARSA"** yang terdiri dari :

1. **Karsa Bogor Cerdas :**

Karsa ini merupakan tekad untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing di kancah lokal, nasional, dan global, dimana pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan Indonesia Emas, pada tahun 2045.

Sesuai dengan pelaksanaan kewenangan daerah, bidang urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, dimana Kabupaten Bogor memiliki kewenangan konkuren untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar (jenjang SD dan SMP) serta pendidikan non formal. Salah satu target terselenggaranya standar pelayanan minimal bidang pendidikan adalah ketuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.

Bahwa dalam rangka mempersiapkan sumberdaya manusia Kabupaten Bogor yang berkualitas, PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan non formal menjadi fokus dalam pelaksanaan karsa Bogor Cerdas. Beberapa arah kebijakan yang ditempuh adalah :

a. **Penuntasan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP**

Penduduk usia SD dan SMP (7-15 tahun) menjadi aset penting sumber daya manusia di Kabupaten Bogor pada masa yang akan datang. Untuk memberikan pendidikan yang berkualitas, salah satu kebijakan yang dilakukan adalah melalui penciptaan kenyamanan suasana belajar mengajar di sekolah, melalui berfungsi baiknya ruang-ruang kelas yang ada. Dengan demikian, melalui Bogor Cerdas, seluruh sekolah ditargetkan memiliki ruang kelas yang berkondisi baik melalui upaya rehabilitasi tuntas semua ruang kelas yang rusak, terutama yang berkondisi rusak parah.

b. Pemberian penunjang pendidikan melalui penerbitan dan pemanfaatan Kartu Bodas untuk siswa jenjang SD dan SMP

Kartu Bodas adalah singkatan dari Kartu Bogor Cerdas. Kartu ini merupakan salah satu implementasi kebijakan daerah untuk mewujudkan masyarakat Bogor Cerdas dalam bentuk membantu kelancaran belajar para siswa SD dan SMP yang kurang mampu. Kartu ini sekaligus menjadi penanda bahwa pemegangnya merupakan siswa yang tercatat menempuh pendidikan jenjang SD maupun SMP di wilayah Kabupaten Bogor.

Kartu Bodas diberikan dalam bentuk non tunai melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli seragam dan alat tulis sekolah di pedagang/*e*-warong (UMKM) yang bekerjasama dengan bank yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Bogor. Diharapkan bantuan tersebut dapat meringankan beban orangtua dalam memenuhi kebutuhan seragam dan alat tulis sekolah untuk anaknya.

c. Pemberian bantuan beasiswa terhadap putra/i daerah berprestasi

Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki atensi yang tinggi kepada putra-putri Kabupaten Bogor yang akan melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana (S1). Atensi yang tinggi ini didasarkan pada keinginan untuk meningkatkan capaian rata-rata lama sekolah (RLS) yang hingga tahun 2020 ini masih tercatat sebesar 8,3 tahun, atau masih berada pada jenjang kelas 8 SMP.

Pemberian beasiswa diharapkan bisa menjadi penyemangat keinginan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi, mengingat faktor pendorong naiknya RLS adalah banyaknya penduduk yang bersekolah pada jenjang SMA hingga perguruan tinggi.

Disamping itu, pemberian beasiswa juga ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada putra/putri Kabupaten Bogor yang berprestasi dalam rangka meningkatkan mutu lulusan, dengan ketentuan memiliki KTP dan KK Kabupaten Bogor. Untuk

merealisasikan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Bogor memberikan syarat yang cukup ketat untuk mendapatkan beasiswa, yaitu:

a. Mahasiswa pada seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia atau perguruan tinggi swasta di Kabupaten Bogor/Kota Bogor, dengan nilai Indeks Prestasi minimal 3,5 skala 4,0.
b. Calon mahasiswa lulusan SMA di Kabupaten Bogor yang berprestasi, baik akademik maupun non akademik sesuai dengan ketentuan.

Pemberian beasiswa ini berlaku hingga putra/putri lulus dari perguruan tinggi dan tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

d. Pelayanan PKBM bagi Pesantren Salafiyyah

Kabupaten Bogor memiliki potensi pendidikan berbasis keagamaan (Islam) yang cukup besar. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah pesantren yang ikut berpartisipasi dalam upaya mewujudkan generasi islami. Namun, tidak semua pesantren tersebut memberikan pelajaran kepada para santrinya yang mendukung langsung program pemerintah secara formal, yaitu jalur pendidikan umum, karena yang diajarkan di pesantren-pesantren tersebut adalah murni pendidikan Islam, sehingga banyak santri yang tidak memiliki status kelulusan/ ijazah SD, SMP atau SMA. Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bogor, karena salah satu faktor penyebab masih rendahnya capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bogor adalah adanya pendidikan yang dilaksanakan oleh pesantren yang lulusannya tidak memiliki ijazah sekolah formal.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan upaya pemberian ijazah lulusan setara SD, SMP dan SMA bagi santri, melalui Kejar (Kelompok Belajar) Paket A, B, C. Artinya, disamping para santri mempelajari dan mendalami ilmu agama, mereka juga diberikan substansi pendidikan umum yang setara dengan pendidikan formal. Adapun secara teknis, pelaksanaan Kejar Paket A,B,C dilakukan melalui

kerjasama antara Pondok Pesantren Salafiyah dengan pengelola PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di wilayah Kabupaten Bogor.

e. Pengembangan Sekolah Inklusif di Setiap Kecamatan

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Hal ini tercantum dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mendukung tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan, serta sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan konkuren tingkat kabupaten/kota, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan untuk mendukung sepenuhnya upaya pencerdasan anak bangsa pada jenjang SD dan SMP.

Namun demikian, pelaksanaan pendidikan tersebut tidak hanya milik anak usia sekolah yang normal secara fisik, melainkan juga menjadi hak anak-anak yang berkebutuhan khusus (disabilitas). Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan pengembangan sekolah inklusif secara nasional, maka Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung kebijakan tersebut dengan mengupayakan agar pada jenjang SD dan SMP di setiap kecamatan, terdapat sekolah yang melayani kebutuhan pendidikan bagi semua anak, tanpa memandang kondisi fisik mereka.

f. Forkopimda *Goes To School*

Pemberian motivasi kepada peserta didik, terutama pada jenjang SD dan SMP merupakan salah satu hal penting yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan semangat anak untuk giat belajar demi mencapai cita-cita yang didambakan. Hal ini menjadi perhatian penting Bupati Bogor, mengingat jumlah penduduk usia sekolah SD dan SMP di kabupaten Bogor cukup besar.

Salah satu upaya pemberian motivasi adalah melalui tokoh-tokoh dan pimpinan lembaga/instansi vertikal yang ada di Kabupaten Bogor. Melalui pemberian motivasi oleh para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, diharapkan para peserta didik dapat melihat dan menggugu secara langsung pengalaman

tokoh-tokoh penting daerah dalam meniti karir, sebagai bagian dari bentuk teladan motivasi belajar mereka.

g. Peningkatan kualitas Pendidikan melalui Bantuan Sekolah dan Guru Madrasah

Kebijakan peningkatan kualitas pendidikan melalui bantuan sekolah dan guru madrasah merupakan kebijakan daerah yang diambil dengan perspektif bahwa pendidikan di Kabupaten Bogor dikontribusi oleh pihak negeri dan swasta, dengan bentuk penyelenggaraannya bersifat umum atau keagamaan. Jumlah penduduk usia sekolah di Kabupaten Bogor cukup besar, sehingga meskipun Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyiapkan 1.543 SD Negeri dan 103 SMP Negeri, namun jumlah itu belum dapat menampung jumlah penduduk usia sekolah di Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam berpartisipasi meningkatkan indeks pendidikan yang tinggi sangat diapresiasi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

Salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan adalah dengan membangun sekolah formal berbasis agama yaitu madrasah, baik ibtidaiyyah (setara SD) maupun tsanawiyah (setara SMP). Secara pertanggungjawaban penyelenggaraan proses pendidikan, madrasah berada di bawah kewenangan Kementerian Agama, sedangkan SD dan SMP berada di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia. Namun, tanpa melihat hal tersebut, seluruhnya merupakan satu kesatuan yang mendukung proses pendidikan di Kabupaten Bogor.

Dalam rangka mengapresiasi bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan madrasah di Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan untuk memberikan bantuan bagi sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan madrasah berupa bantuan hibah stimulan yang dapat digunakan untuk merehabilitasi fasilitas yang ada di sekolah madrasah penerima bantuan. Disamping itu, sebagai wujud penghargaan terhadap

bhakti para guru yang telah memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Kabupaten Bogor, juga diberikan bantuan berupa insentif bagi guru-guru madrasah untuk meningkatkan kualitas dan motivasi dalam mengajar, sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan APBD Kabupaten Bogor.

h. Penambahan 4 (empat) Jam Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Sebagai salah satu implementasi dari visi Kabupaten Bogor yaitu Termaju, Nyaman dan Berkeadaban, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan arah kebijakan terkait upaya nyata perwujudan keberadaban di tengah masyarakat melalui dunia pendidikan. Hal ini penting mengingat adanya kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas keberadaban generasi muda, agar tumbuh menjadi generasi yang berkeadaban, menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas beragama, dan memiliki akhlakul karimah.

Salah satu upaya perwujudan visi berkeadaban adalah dengan memberikan tambahan jam pelajaran agama di setiap jenjang SD dan SMP sebanyak 4 (empat) jam pelajaran, dengan teknis pelaksanaannya diatur dalam peraturan Bupati Bogor dan termuat dalam kurikulum muatan lokal pendidikan dasar di Kabupaten Bogor.

2. Karsa Bogor Sehat

Karsa ini merupakan keinginan dan tekad Bupati Bogor untuk menjadikan warga Kabupaten Bogor sehat, baik jasmani maupun rohani. Arah kebijakan yang ditetapkan untuk merealisasikan karsa Bogor Cerdas ini melalui :

a. Pemberian Kartu Sehat (Pembayaran JKN Miskin)

Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Namun, dari jumlah penduduk yang banyak tersebut, tercatat 7,69 persen penduduknya berada pada tingkat kemiskinan, sehingga sulit untuk mengakses secara normal pemenuhan kebutuhan dasarnya, terutama kesehatan. Kesehatan

merupakan salah satu faktor penentu kesejahteraan dan kualitas sumberdaya manusia. Jika masyarakat tidak sehat, maka akan berpengaruh pada kualitas bangsa.

Salah satu upaya untuk memberikan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bogor menerbitkan kartu sehat. Kartu ini berfungsi sebagai jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang akan memanfaatkan pelayanan kesehatan daerah di fasilitas kesehatan, baik dasar maupun rujukan. Dengan kartu sehat ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang baik ketika mereka membutuhkan penanganan kesehatan.

b. Pelayanan Bogor Siaga

Kabupaten Bogor memiliki wilayah dengan rentang kendali yang luas. Dalam hal penanganan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bogor berusaha untuk memberikan kemudahan pelayanan dan akses bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit dengan informasi yang cepat.

Untuk itulah, pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan pelayanan Bogor siaga 24 jam kepada seluruh masyarakat melalui penyediaan layanan informasi ketersediaan tempat perawatan di fasilitas kesehatan yang telah terkoneksi. Diharapkan dengan adanya pelayanan Bogor Siaga ini, masyarakat dapat dengan cepat mengetahui lokasi fasilitas kesehatan yang dapat menerima dan melakukan pelayanan dengan cepat.

c. Pembangunan Rumah Sakit Parung

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan merupakan salah satu kewajiban daerah dalam mengupayakan terwujudnya kesehatan masyarakat. Dengan luas wilayah yang terbagi ke dalam 40 kecamatan, 416 desa dan 19 kelurahan, Kabupaten Bogor telah memiliki 4 RSUD di yang meliputi cakupan area pelayanan wilayah Bogor Tengah, Bogor Barat, Bogor Selatan dan Bogor Timur.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat di wilayah Bogor Utara, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan untuk membangun Rumah Sakit Parung, sehingga diharapkan jangkauan pelayanan masyarakat di sekitar wilayah tersebut dapat dioptimalkan.

d. Gerakan Bogor bebas Stunting

Upaya memberikan pelayanan wajib dasar kepada masyarakat merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bogor dalam rangka mewujudkan masyarakat sehat demi tercapainya SDM berkualitas. Penduduk yang sehat adalah penduduk yang telah dipersiapkan kesehatannya sejak awal kehamilan, kelahiran, masa balita dan kanak-kanak, serta remaja. Kondisi generasi muda ini harus sehat dengan terpenuhi kebutuhan gizi sesuai standar kesehatan.

Stunting merupakan suatu kondisi dimana terjadi masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Kasus stunting ini cukup memprihatinkan sehingga menjadi agenda nasional untuk pencegahan dan penangannya.

Dalam rangka mendukung dan bersinergi dengan program nasional, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan gerakan Bogor bebas stunting untuk mewujudkan generasi muda kabupaten Bogor sehat dan berkualitas.

3. Karsa Bogor Maju

Karsa ini merupakan tekad dan keinginan Bupati Bogor untuk menjadikan Kabupaten Bogor maju dalam hal perekonomian daerah serta tata kelola pemerintahan yang baik, melalui optimalisasi layanan publik, penciptaan iklim investasi yang nyaman, perluasan lapangan kerja, penanggulangan masalah pengangguran dan kemiskinan, pengembangan permodalan dan pemasaran bagi wirausaha baru, UMKM, pengembangan industri

pariwisata berbasis masyarakat, serta pemberdayaan pelaku usaha. Arah kebijakan pelaksanaan Karsa Bogor Maju ini ditempuh melalui:

a. Pembangunan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam penanganan PPKS (Graha Pancakarsa)

Pemerintah memiliki kewajiban dasar dalam menangani masalah sosial, terutama kelompok PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk sistem layanan dan rujukan terpadu berbasis data yang ditujukan untuk menangani PPKS sampai ke tingkat desa. Hal ini penting dilaksanakan agar pelayanan terhadap PPKS dapat ditangani mulai dari tingkat desa.

b. Pembangunan *Career Center*

Terjadinya pandemi covid-19 yang berdampak besar pada perekonomian daerah, menjadi salah satu penyebab tingginya angka pengangguran di Kabupaten Bogor. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bogor wajib menyiapkan kesempatan kerja bagi masyarakat, diantaranya dengan memberikan fasilitasi kerjasama yang akan mempertemukan antara pencari kerja dengan lapangan kerjan yang tersedia, baik di Kabupaten Bogor maupun di luar Kabupaten Bogor.

Kebijakan membangun *career center* merupakan implementasi dari bentuk pelayanan kepada masyarakat. *Career center* merupakan suatu wadah pelayanan berbasis teknologi yang dibuat untuk memberikan informasi seputar ketenagakerjaan yang dapat diakses secara online oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Pelayanan-pelayanan di *career center* ini ditargetkan untuk memberikan:

- informasi pengadaan pelatihan keterampilan dan kompetensi
- informasi dan pelayanan kartu bagi pencari kerja
- informasi lapangan kerja dan bursa kerja
- fasilitasi penempatan kerja

Diharapkan adanya *career center* ini dapat memudahkan penduduk Kabupaten Bogor untuk mendapatkan pelayanan seputar informasi pekerjaan, konsultasi dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

c. Pembangunan Lembaga Sertifikasi Profesi Ketenagakerjaan (LSP)

Persaingan untuk memasuki dunia kerja cukup tinggi. Tidak hanya sekadar ijazah, tenaga para pencari kerja maupun yang sudah bekerja juga membutuhkan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki berupa sertifikat profesi. Untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan sertifikasi profesi ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan membangun lembaga sertifikasi profesi ketenagakerjaan, dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga sertifikasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

d. Gerakan Beli Beras Petani Bogor

Beras masih merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Bogor dan memiliki jumlah produksi yang cukup besar. Kualitas produksi beras pun tidak kalah bersaing dengan produksi beras di wilayah sekitar Kabupaten Bogor. Untuk mendukung pemanfaatan produksi beras di Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan gerakan beli beras petani Bogor, dengan harapan terwujudnya jaminan pasar rutin bagi para petani. Gerakan ini dimulai dengan pembelian secara rutin beras petani Bogor oleh ASN dan diharapkan meluas hingga ke seluruh masyarakat Kabupaten Bogor.

e. Produksi Kopi Robusta Terbesar di Jawa Barat

Kopi saat ini merupakan salah satu komoditas yang digandrungi oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Aroma dan cita rasa kopi yang kuat memikat penggemarnya untuk selalu menghadirkan kopi di sela-sela aktivitas rutin harian masyarakat. Kabupaten Bogor yang memiliki wilayah dengan ketinggian yang cocok untuk budidaya kopi robusta, memiliki potensi besar untuk

mengembangkan produksi kopi robusta. Untuk itu, Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan untuk menjadikan kopi robusta menjadi kopi dengan produksi terbesar di Jawa Barat dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang berkualitas.

f. Pemberian Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih menjadi tumpuan masyarakat di Kabupaten Bogor, terutama di wilayah barat dan timur Kabupaten Bogor. Pertanian juga merupakan sektor yang memiliki resiko tinggi, terutama dalam hal kegagalan panen.

Dalam rangka mendukung dan memberikan keamanan kepada para petani, terutama petani padi, maka lahan persawahan yang ada di Kabupaten Bogor harus dipastikan keamanannya dari ancaman gagal panen, baik akibat bencana, hama tanaman atau hal-hal yang berada di luar kendali manusia. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan pemberian kartu asuransi bagi petani untuk memberikan jaminan terhadap areal persawahan yang dimilikinya dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan.

g. Penyelenggaraan *Event* Pariwisata Tingkat Nasional dan Internasional

Kabupaten Bogor memiliki wilayah yang strategis, sejuk dan nyaman dengan potensi pariwisata yang sangat besar. Untuk memperkuat kondisi tersebut, Kabupaten Bogor dicanangkan sebagai *The City of Sport and Tourism*. Dalam rangka menarik minat wisatawan baik asing maupun domestik untuk berkunjung di Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor membuat berbagai kebijakan diantaranya adalah menyelenggarakan event-event pariwisata yang berskala nasional maupun internasional. Diharapkan dengan banyaknya *event* yang dilaksanakan, akan menambah ketertarikan pengunjung untuk bertandang ke Kabupaten Bogor.

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Di sisi lain, pariwisata merupakan sektor potensial yang dapat menyerap banyak tenaga kerja, baik yang terlatih maupun yang tidak terlatih. Pariwisata pun menjadi sektor yang dapat memicu bangkitan sektor lainnya. Lesunya sektor pariwisata turut menekan penerimaan daerah serta meningkatkan pengangguran. Dengan adanya *event-event* pariwisata, diharapkan mampu mengembalikan geliat perekonomian daerah, merangsang munculnya sektor usaha kecil menengah, dan menyerap kembali tenaga kerja.

h. Festival Wisata Desa

Kabupaten Bogor memiliki jumlah desa yang cukup banyak, yaitu 416 desa yang tersebar di 40 kecamatan. Masing-masing desa memiliki kekhasan dan keunggulan tersendiri yang potensial dijadikan sebagai tujuan wisata, baik pertanian, alam, maupun keunggulan lokal lainnya yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi.

Dalam rangka mendorong desa agar dapat menggali potensi pariwisata masing-masing, Pemerintah kabupaten Bogor menetapkan kebijakan pelaksanaan festival wisata desa, dengan harapan setiap desa dapat berpartisipasi menawarkan konsep wisata wilayah yang dapat menjadi bagian dari promosi dan destinasi pariwisata Kabupaten Bogor.

i. Pengembangan Geopark Pongkor

Kabupaten Bogor kaya akan warisan kekayaan alam, budaya dan tambang, terutama di belahan Bogor bagian barat. Sebanyak 15 kecamatan di wilayah Bogor bagian barat merupakan satu kesatuan Geopark, yang secara nasional telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional Pongkor. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan karsa Bogor maju, pengembangan Geopark Pongkor menjadi salah satu fokus pembangunan daerah hingga tahun 2023. Diharapkan, pengembangan yang terencana dan tepat

sasaran dapat membawa Geopark Pongkor menjadi salah satu tujuan pariwisata daerah yang mendukung kemajuan ekonomi Kabupaten Bogor.

j. Petani Milenial di Kabupaten Bogor

Produk-produk hasil pertanian di Kabupaten Bogor perlu dikembangkan dan ditingkatkan kualitas serta produktivitasnya. Upaya untuk meningkatkan mutu pertanian di Kabupaten Bogor tidak terlepas dari peran generasi muda millenial yang terjun di bidang tersebut.

Dalam rangka meningkatkan kualitas petani milenial, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan untuk membantu dan memberi ruang bagi para petani milenial untuk mengembangkan karyanya di bidang pertanian.

k. Optimalisasi dan Pengembangan Bumdes

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk membangun wilayah secara mandiri, meski desa bukan daerah otonom. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada desa adalah dapat membentuk badan usaha milik desa atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bumdes.

Usaha desa melalui Bumdes menjadi salah satu cara untuk memperoleh pendapatan desa sekaligus menyejahterakan masyarakat desa. Hal-hal yang dapat dikelola oleh Bumdes telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, mulai dari usaha yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, hingga usaha yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan tersier.

Salah satu cara untuk mendorong perkembangan Bumdes, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan optimalisasi dan pengembangan Bumdes, dengan memberikan fasilitasi dan pendampingan agar dapat meningkatkan strata Bumdes untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

l. Gerakan Bela Beli Produk UMKM/IKM

Sektor usaha mikro, kecil dan menengah serta industri kecil menengah merupakan sektor yang tumbuh berbasis masyarakat. Sektor ini juga lahir dari usaha masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja/wirausaha baru yang mudah tumbuh dan tidak membutuhkan modal besar. Namun, tidak jarang sektor ini lekat dengan *image* produk tidak berstandar atau tidak berkualitas.

Untuk membantu berkembangnya UMKM dan IKM, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan untuk mempromosikan gerakan bela beli produk UMKM/IKM melalui pemberian fasilitas-fasilitas yang dapat merangsang berkembangnya sektor ini, mulai dari fasilitasi hulu hingga hilir.

m. Pembangunan GOM di Kecamatan

Olahraga merupakan faktor penting untuk mendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Bogor termaju, baik dari aspek kesehatan maupun dari aspek daya saing daerah. Dalam rangka menumbuhkan budaya olahraga, meningkatkan sportivitas, dan daya saing positif di kalangan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan untuk membangun GOM di setiap kecamatan.

n. Peningkatan Kualitas Pelaku Pembangunan melalui Pemberian Insentif bagi Ketua RT, Ketua RW, Linmas, Guru Ngaji, Amil, dan Kader Posyandu

Peran pelaku pembangunan di tingkat desa dan kelurahan sangat penting, karena keberadaannya dapat menjadi garda terdepan yang membantu Pemerintah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka mengapresiasi peran dan dukungan para pelaku pembangunan di tingkat desa dan kelurahan, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan untuk memberikan insentif bagi ketua RT/RW, anggota linmas, para guru ngaji, amil dan kader posyandu.

o. Boling (Bogor Keliling)/ Saba Desa

Boling (Bogor keliling)/ Saba Desa dilaksanakan dalam rangka mengetahui perkembangan pembangunan di Kabupaten Bogor terutama di tingkat desa.

p. Penyelenggaraan Sekolah Pemerintah Desa

Desa memiliki struktur pemerintahan tersendiri yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat serta aparatur desa yang diangkat oleh kepala desa dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik serta dapat melayani masyarakat secara berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan penyelenggaraan sekolah bagi pemerintah desa. Sekolah ini diperlukan sebagai bagian penting dari kewajiban pembinaan daerah kepada desa.

4. Karsa Bogor Membangun

Karsa Bogor Membangun merupakan tekad Bupati untuk menjadikan Kabupaten Bogor maju secara infrastruktur yang mendukung kelancaran roda perekonomian daerah. Implementasi Karsa Bogor Membangun dilaksanakan melalui:

a. Penataan Jalur Pedestrian dan Ruas Jalan Kandang Roda-Sentul, Tegar Beriman dan Kawasan GOR Pakansari

Penataan jalur pedestrian dan ruas jalan ini merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menata pusat pemerintahan Kabupaten Bogor, sekaligus menjadi wajah Cibinong sebagai ibukota Kabupaten Bogor.

b. Pembangunan Jalan

Pembangunan jalan merupakan hal penting yang dapat mendorong peningkatan perputaran roda perekonomian daerah. Beberapa pembangunan jalan yang menjadi kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Bogor adalah pembangunan:

- jalan Poros Tengah Timur; jalan ini ditujukan untuk menjadi jalur alternatif Puncak Bogor untuk menuju ke wilayah timur Bogor.
- jalan Bojonggede-Kemang; jalan ini ditujukan untuk membuka akses pergerakan orang dan barang menuju bagian utara Bogor.
- jalan lingkar Kebun Raya Cibinong; jalan ini ditujukan untuk menguraikan kemacetan arus pusat kota Cibinong sekaligus membuka akses menuju Kebun raya Cibinong.
- akses lingkar jalan tambang; jalan ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan pengangkutan pertambangan di wilayah barat Bogor.
- jalan lingkar Gunungsindur; jalan ini ditujukan untuk membuka akses pergerakan orang dan barang di wilayah utara Bogor.
- jalan Galuga-Rancabungur; jalan ini ditujukan untuk mempermudah akses transportasi dan pergerakan orang serta barang dari wilayah barat Bogor menuju wilayah utara Bogor.
- jalan lingkar Dramaga 2; jalan ini merupakan pengembangan dari jalan lingkar Dramaga yang telah dibangun sebelumnya untuk mengurai kemacetan yang menuju wilayah Bogor Barat. Pesatnya pembangunan di wilayah Bogor Barat, mulai dari Kecamatan Dramaga hingga Kecamatan Leuwiliang membutuhkan jalan-jalan alternatif sehingga tidak terkonsentrasi pada satu jalan utama saja.

c. Revitalisasi jembatan rawayan/jembatan gantung

Salah satu akses penghubung antar wilayah adalah jembatan. Sebagian akses orang dan barang yang berada di wilayah perdesaan dilaksanakan dengan menggunakan jembatan gantung (rawayan). Dalam rangka mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan revitalisasi jembatan rawayan, agar dapat kembali berfungsi dengan baik.

d. Penataan Kawasan Simpang Parung

Salah satu manifestasi dari penataan wilayah adalah melakukan penataan kawasan. Penataan Simpang Parung merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mewujudkan wilayah yang tertata.

e. Pembangunan fasilitas parkir yang terintegrasi

Pembangunan fasilitas parkir yang terintegrasi merupakan salah satu solusi penataan kota yang efektif dan efisien. Kebutuhan akan fasilitas parkir yang terintegrasi di wilayah Cibinong Raya merupakan hal yang harus segera terealisasi hingga akhir periode tahun 2023.

f. Betonisasi jalan desa

Pemenuhan infrastruktur desa diharapkan dapat memberikan aksesibilitas pergerakan orang dan barang, dari pusat produksi menuju pasar dan wilayah konsumsi. Bahwa sumber-sumber produksi berlokus di desa, maka Pemerintah kabupaten Bogor menetapkan kebijakan bantuan kepada desa untuk betonisasi jalan desa. Kebijakan ini juga dikenal dengan nama samisade (satu milyar satu desa).

Disamping itu, dalam rangka menyeimbangkan pembangunan desa dengan kelurahan, maka Pemerintah Pusat juga mengamanahkan alokasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan terhadap masyarakat kelurahan melalui anggaran kelurahan minimal setara dengan dana desa terkecil yang diterima desa.

Diharapkan dengan adanya betonisasi desa, kondisi infrastruktur desa dapat menjadi pendukung penggerak bangkitan ekonomi desa.

g. Peningkatan Kualitas Desa melalui Bedah Kampung

Dalam rangka menata permukiman agar terhindar dari kesan kekumuhan, maka Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan untuk melaksanakan bedah kampung agar terwujud desa berkualitas.

h. Penyediaan ruang terbuka publik

Salah satu fasilitas yang wajib disediakan untuk masyarakat adalah ruang terbuka publik. Ruang ini sekaligus menjadi wadah untuk membangun hubungan sosial yang harmonis antar masyarakat.

i. Mewujudkan Bogor Asri Tanpa Plastik *"Antik"*

Plastik merupakan salah satu produk yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, karena memiliki kepraktisan dalam pemanfaatannya. Namun, opini pengurangan penggunaan plastik telah menjadi opini internasional karena berdampak pada kerusakan lingkungan. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan untuk mewujudkan Bogor Asri Tanpa Plastik "Antik", baik melalui pembentukan regulasi, maupun bentuk-bentuk implementasi lainnya.

j. Penanganan Sampah Berbasis Zonasi

Sampah juga merupakan produk akhir dari konsumsi manusia. Dengan jumlah penduduk yang besar, total produksi sampah rumah tangga maupun industri tentu sangat tinggi. Untuk itu, dalam rangka menangani sampah secara profesional, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan penanganan sampah berbasis zonasi dengan harapan agar penyelesaian masalah persampahan dapat diselesaikan di lingkup area yang lebih kecil untuk mengurangi luasan cakupan pengangkutan, pengelolaan dan penanganan sampah.

5. Karsa Bogor Berkeadaban

Karsa ini merupakan wujud tekad Bupati Bogor untuk menjadikan Kabupaten Bogor memiliki masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan melestarikan budaya. Dengan terwujudnya Kabupaten Bogor berkeadaban, diharapkan Kabupaten Bogor menjadi parameter di Indonesia sebagai wilayah yang mampu menjadi simbol

masyarakat Indonesia yang ramah, toleran dan berakhlakul karimah.

Implementasi Karsa Bogor Berkeadaban dilaksanakan melalui:

a. Jumling

Salah satu upaya Kepala Daerah dalam memantau dan membina pelaksanaan Bogor Berkeadaban adalah dengan melakukan kegiatan Jumat Keliling (Jumling) dan Majelis Keliling (Majling) di wilayah kecamatan.

b. Gerakan Bogor *Ngaos*

Gerakan Bogor *Ngaos* merupakan salah satu upaya untuk membumikan ayat-ayat suci Al-Qur'an di Kabupaten Bogor. Kebijakan pelaksanaan gerakan Bogor *Ngaos* ini dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama di lingkungan pendidikan dan pemerintahan.

c. Bedah pesantren

Pesantren merupakan simbol keberadaban dan keagamaan. Keberadaan pesantren yang tumbuh subur di wilayah Kabupaten Bogor mencirikan bahwa penduduk Kabupaten Bogor mayoritas beragama Islam dan memiliki kontribusi yang besar dalam mewujudkan kondisi keberadaban di Kabupaten Bogor.

Dalam rangka mengapresiasi peran pesantren bagi tumbuhnya nilai-nilai keagamaan dalam mewujudkan keberadaban di Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan pemberian bantuan kepada pesantren-pesantren yang perlu direhabilitasi, sehingga dapat berfungsi kembali dengan baik, dan memberikan rasa nyaman bagi para santri yang ada di dalamnya.

d. Bantuan legalitas bagi pondok pesantren

Selain memberikan bantuan rehabilitasi bagi pesantren-pesantren, Pemerintah Kabupaten Bogor juga memberikan bantuan dan fasilitasi pengurusan legalitas pesantren kepada

pesantren yang belum memiliki aspek legal kepemilikan agar pesantren dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.

e. Revitalisasi *Islamic Center*

Islamic Center merupakan pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan keislaman di Kabupaten Bogor. Kebijakan membangun dan merevitalisasi serta menjadikan *Islamic Center* sebagai pusat keagamaan dan pengkajian keagamaan merupakan salah satu bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap peningkatan kehidupan beragama masyarakat.

f. Peningkatan kualitas keagamaan melalui program Hafizd Quran

Salah satu upaya meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat khususnya umat Islam di Kabupaten Bogor adalah melalui program Hafidz Al-Qur'an. Dalam rangka mendukung program tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan memberikan bantuan beasiswa kepada generasi muda Kabupaten Bogor untuk menjadi penghafal Al-Qur'an.

g. Aksi Nobat *"Nongol Babat"*

Salah satu pelayanan dasar yang harus dipenuhi adalah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) di wilayah Kabupaten Bogor. Potensi pelanggaran trantibum dapat terjadi di wilayah Kabupaten Bogor, maka Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan untuk menggalakkan aksi *Nongol Babat* (Nobat). Kegiatan ini diharapkan dapat menekan munculnya gangguan trantibum yang lebih besar di tengah masyarakat.

h. Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Salah satu aspek keberadaban yang diharapkan dalam implementasi pembangunan jangka menengah tahun 2018-2023 adalah pelestarian seni dan budaya daerah. Untuk melestarikannya, Pemerintah Kabupaten Bogor menyelenggarakan festival seni dan budaya.

i. Pengembangan dan pelestarian budaya Cimande

Budaya Cimande merupakan salah satu bentuk keberadaban daerah yang perlu dilestarikan. Dengan demikian, pengembangan budaya Cimande merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan daerah untuk mendukung terlestarikannya unsur budaya daerah.

j. Pelestarian bahasa Sunda melalui program *Kemis Nyunda*

Bahasa Sunda merupakan kekayaan budaya Jawa Barat yang perlu dilestarikan dan merupakan salah satu representasi keberadaban daerah. Dalam rangka melestarikan budaya Sunda, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan untuk menggunakan bahasa Sunda pada setiap hari kamis, atau disebut *Kemis Nyunda*.

k. Pelestarian budaya melalui program Bogor *Culture Night*

Bogor *Culture Night* adalah salah satu bentuk ungkapan keberadaban masyarakat serta pengejawantahan nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Bogor. Pelaksanaan Bogor *Culture Night* merupakan salah satu kebijakan daerah untuk melestarikan budaya Sunda Bogor melalui pergelaran-pergelaran seni yang dilaksanakan pada malam hari.

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah yang dijabarkan dalam capaian target indikator tujuan dan sasaran perlu dilakukan dengan strategi yang tepat serta dilandasi dengan arah kebijakan yang jelas. Di samping itu, dalam rangka menjabarkan program strategis daerah yang menjadi target politis, perlu disusun program-program pembangunan daerah yang dapat memayungi pelaksanaan setiap kegiatan yang secara langsung menjadi target pencapaian keseluruhan indikator kinerja daerah.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik dan Integratif

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah atau tahapan untuk mencapai tujuan. Pengelolaan pembangunan daerah mengharuskan adanya penerapan manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi yang ditetapkan akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang melahirkan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan

perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, Prioritas utama, tema atau fokus pembangunan pada periode 2018-2023 adalah **"optimalisasi seluruh pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan daerah**". Tema ini menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 dan akan dijabarkan setiap tahunnya bagi penentuan tema pembangunan dalam RKPD. Pentahapan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 disajikan pada Gambar 6.1.

Gambar 6.1

Posisi RPJMD Tahun 2018-2023 dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan Penjabarannya ke RKPD

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam visi dan misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan hingga tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.1.
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban			
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berkualitas			
1.1 Terwujudnya masyarakat Bogor cerdas	1.1.1 Meningkatnya pelayanan pendidikan yang berkualitas	1.1.1.1 Peningkatan pengelolaan pendidikan	a. Membangun, merehabilitasi dan merevitalisasi sekolah
			b. ***Menuntaskan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP***
			c. ***Memberikan penunjang pendidikan melalui penerbitan dan pemanfaatan Kartu Bodas untuk siswa SD dan SMP***
			d. Meningkatkan layanan pendidikan multi metode berbasis kompetensi
			e. Meningkatkan cakupan sekolah terakreditasi A dan B
			f. ***Memberikan beasiswa terhadap putra/i daerah berprestasi***
			g. ***Meningkatkan pelayanan PKBM bagi pesantren salafiyyah***
			h. ***Mengembangkan sekolah inklusif di setiap kecamatan***
			i. ***Menggalakkan Forkopimda Goes to School***
			j. ***Meningkatkan kualitas pendidikan melalui Bantuan Sekolah dan Guru Madrasah***

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			k. ***Menambahkan 4 (empat) jam pendidikan agama dan pendidikan keagamaan***
		1.1.1.2 Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	a. Meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan
			b. Meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
	1.1.2 Meningkatnya budaya literasi	1.1.2.1 Peningkatan budaya membaca	a. Mengembangkan layanan perpustakaan
			b. Mengembangkan sarana dan multi media literasi/baca
1.2 Terwujudnya masyarakat Bogor sehat	1.2.1 Meningkatnya kualitas kesehatan	1.2.1.1 Peningkatan upaya kesehatan masyarakat	a. Menyediakan alat kesehatan, vaksinasi dan peningkatan pelayanan dalam rangka penanggulangan Covid-19
			b. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan
			c. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pencegahan, pengendalian dan penanganan permasalahan kesehatan
			d. Meningkatkan kapasitas tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam upaya peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan
			e. ***Memberikan kartu sehat (pembayaran JKN Miskin)***
			f. ***Memberikan pelayanan Bogor Siaga***
			g. ***Membangun Rumah Sakit Parung***

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			h. ***Menggalakkan Gerakan Bogor Bebas Stunting***
	1.2.2 Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1.2.2.1 Peningkatan ketersediaan dan diversifikasi konsumsi pangan yang aman	a. Meningkatkan penguatan cadangan pangan dan penganekaragaman pola konsumsi pangan
	1.2.3 Menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk alami	1.2.3.1 Pengendalian pertumbuhan penduduk alami	a. Meningkatkan kepesertaan KB
Misi 2 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan			
2.1 Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	2.1.1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	2.1.1.1 Peningkatan kualitas keluarga	a. Meningkatkan ekonomi keluarga sejahtera
			b. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dalam keluarga
		2.1.1.2 Peningkatan pemberdayaan sosial masyarakat	a. ***Membangun Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam penanganan PPKS (Graha Pancakarsa)***
		2.1.1.3 Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial serta pemberian perlindungan dan jaminan sosial	a. Meningkatkan fasilitasi bagi masyarakat beresiko sosial
		2.1.1.4 Peningkatan kapasitas dan peluang ketenagakerjaan	a. Meningkatkan kapasitas dan peluang kerja
			b. ***Membangun Career Center***
			c. ***Membangun Lembaga Sertifikasi Profesi Ketenagakerjaan (LSP)***
			d. Meningkatkan kemitraan ketenagakerjaan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	2.1.2 Meningkatnya daya saing daerah	2.1.2.1 Peningkatan produk daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	a. Fasilitasi sarana dan prasarana infrastruktur pertanian
			b. Fasilitasi sarana dan prasarana infrastruktur perikanan
			c. Mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian
			d. Mengendalikan penyakit hewan dan zoonosis
			e. ***Menggalakkan gerakan beli beras petani Bogor***
			f. ***Meningkatkan produksi kopi Robusta terbesar di Jawa Barat***
			g. ***Memberikan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)***
			h. Meningkatkan stabilisasi harga bahan pokok dan barang penting
			i. Membangun dan merehabilitasi pasar
			j. Mengembangkan destinasi pariwisata bertaraf nasional dan internasional
			k. Meningkatkan upaya pemasaran dan promosi pariwisata melalui **penyelenggaraan *event*** tingkat lokal, regional, ***nasional*** dan ***internasional*** berbasis teknologi informasi
			l. ***Menyelenggarakan festival wisata desa***
			m. ***Pengembangan Geopark Pongkor***

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
		2.1.2.2	Peningkatan kualitas pelaku usaha	a.	Sertifikasi pelaku usaha
				b.	Meningkatkan jumlah koperasi aktif
				c.	Optimalisasi kemitraan UMKM dengan dunia usaha
				d.	Meningkatkan kualitas metrologi legal
				e.	Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan petani
				f.	***Fasilitasi Petani Millenial di Kabupaten Bogor***
				g.	***Optimalisasi dan Pengembangan BUMDes*** melalui peningkatan manajemen kelembagaan dan unit usaha BUMDes
				h.	Pengembangan Ekosistem Usaha Ekonomi Kreatif
		2.1.2.3	Peningkatan peluang investasi	a	Mengembangkan penanaman modal dan peta investasi
				b.	Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus
		2.1.2.4	Optimalisasi promosi investasi dan pemasaran produk	a.	Menyelenggarakan promosi investasi
				b.	Fasilitasi pemasaran produk
				c.	***Menggalakkan gerakan bela beli produk UMKM/IKM***
		2.1.2.5	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	a.	Meningkatkan kualitas pemuda

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		2.1.2.6 Peningkatan prestasi olahraga	a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas insan olahraga
			b. ***Membangun GOM kecamatan***
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik			
3.1 Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	3.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3.1.1.1 Optimalisasi pelayanan prima terhadap masyarakat	a. Mengembangkan pelayanan administrasi kependudukan
			b. Fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan
			c. Menerbitkan rekomendasi teknis bahan perizinan
			d. Fasilitasi penerbitan izin usaha koperasi
			e. ***Meningkatkan kualitas pelaku pembangunan melalui pemberian insentif bagi Ketua RT, Ketua RW, Linmas, Guru Ngaji, Amil, dan Kader Posyandu***
			f. Mengoptimalkan pelayanan perijinan
			g. Fasilitasi dan Koordinasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	3.1.2 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	3.1.2.1 Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran terintegrasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			b. Optimalisasi pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah
			c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
			d. Meningkatkan kapasitas kinerja ASN
			e. Menerapkan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu
			f. Meningkatkan kualitas pengawasan
			g. Mengembangkan inovasi dan teknologi perangkat daerah dan masyarakat
			h. ***Menggiatkan Boling (Bogor Keliling) / Saba Desa***
			i. ***Menyelenggarakan Sekolah Pemerintah Desa***
			j. Meningkatkan pelayanan informasi publik terintegrasi
Misi 4 : Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan			
4.1 Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan	4.1.1 Meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	4.1.1.1 Peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi berkualitas	a. Membangun, merekonstruksi, melebarkan, merehabilitasi dan memelihara jalan
			b. Mengendalikan kinerja lalu lintas
			c. ***Menata jalur pedestrian dan ruas jalan Kandang Roda-Sentul, Tegar beriman dan kawasan GOR Pakansari***

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			d. ***Membangun jalan Poros Tengah Timur***
			e. ***Membangun jalan Bojonggede-Kemang***
			f. ***Membangun jalan lingkar Kebun Raya Cibinong***
			g. ***Membuka akses lingkar jalan tambang***
			h. ***Membangun jalan lingkar Gunungsindur***
			i ***Membangun Jalan Galuga-Rancabungur***
			j. ***Membangun jalan lingkar Dramaga 2***
			k. ***Merevitalisasi jembatan rawayan/jembatan gantung***
			l. ***Menata kawasan simpang Parung***
			m. ***Membangun fasilitas parkir yang terintegrasi***
	4.1.2 Meningkatnya kualitas sarana prasana desa	4.1.2.1 Peningkatan kualitas infrastruktur desa	a. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas
			b. ***Betonisasi jalan desa***
		4.1.2.2 Pengembangan kehidupan sosial masyarakat desa	a. Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan
	4.1.3 Meningkatnya kualitas permukiman	4.1.3.1 Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. Menyediakan rumah layak huni
			b. Menata kawasan permukiman kumuh
			c. Meningkatkan cakupan layanan air minum
			d. Meningkatkan cakupan layanan air limbah
			e. Menyelenggarakan Penataan Bangunan dan Lingkungan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			f. ***Meningkatkan kualitas desa melalui Bedah Kampung***
			g. ***Menyediakan ruang terbuka publik***
	4.1.4 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	4.1.4.1 Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan	a. Menyediakan sarana prasarana persampahan
			b. ***Mewujudkan Bogor Antik "Asri Tanpa Plastik"***
			c. ***Menangani sampah berbasis zonasi***
		4.1.4.2 Pengelolaan lingkungan hidup	a. Mengendalikan pencemaran lingkungan
			b. Melestarikan keanekaragaman hayati
	4.1.5 Mengurangnya risiko bencana	4.1.5.1 Peningkatan penanggulangan bencana	a. Meningkatkan pelayanan kedaruratan bencana
			b. Meningkatkan layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
			c. Meningkatkan cakupan pelayanan kebakaran dan non kebakaran
		4.1.5.2 Peningkatan mitigasi bencana	a. Meningkatkan kewaspadaan dini bencana
Misi 5 : Mewujudkan kesalehan sosial			
5.1 Terwujudnya masyarakat Bogor berkeadaban	5.1.1 Mewujudkan kehidupan masyarakat agamis, harmonis, nyaman, tertib dan tidak diskriminatif	5.1.1.1 Peningkatan keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial politik di masyarakat	a. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan pembinaan politik
			b. ***Menggiatkan Jumling***
		5.1.1.2 Pembinaan kerukunan umat beragama	a. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi di bidang keagamaan
			b. ***Menggalakkan Gerakan Bogor Ngaos***
			c. ***Menyelenggarakan bedah pesantren***

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			d. ***Memberikan bantuan legalitas bagi pondok pesantren***
			e. ***Revitalisasi Islamic Center***
			f. ***Meningkatkan kualitas keagamaan melalui Program Hafizd Quran***
		5.1.1.3 Pengendalian ketentraman dan ketertiban umum	a. Menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
			b. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			c. ***Menggalakkan aksi Nobat "Nongol Babat"***
	5.1.2 Meningkatnya peranan wanita dalam pembangunan	5.1.2.1 Peningkatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	a Meningkatkan kompetensi perempuan dan pemenuhan hak anak
	5.1.3 Terwujudnya pelestarian Kebudayaan	5.1.3.1 Perlindungan dan pembinaan seni dan budaya daerah	a ***Menyelenggarakan festival seni dan budaya***
			b. ***Mengembangkan dan melestarikan budaya Cimande***
			c. Mengelola cagar budaya daerah
			d. ***Melestarikan Bahasa Sunda melalui Kemis Nyunda***
			e. ***Melestarikan budaya melalui Bogor Culture Night***

Sumber : Hasil Analisa, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021
Keterangan : Cetak tebal dan miring merupakan Program Pancakarsa

Strategi dan arah kebijakan pada tabel di atas secara implementatif diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang terkandung dalam visi misi pembangunan daerah sampai dengan tahun 2023. Adapun mengenai penjabarannya akan dijelaskan secara rinci melalui uraian sebagai berikut :

6.1.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Kesatu

Dalam rangka mencapai misi kesatu yaitu **"Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas"** dirumuskan 2 (dua) tujuan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Masyarakat Bogor Cerdas

Dalam tujuan ini dirancang 2 (dua) sasaran yang terdiri dari : (1) Meningkatnya pelayanan pendidikan yang berkualitas; dan (2) Meningkatnya budaya literasi. Adapun sasaran yang pertama difokuskan pada 2 (dua) strategi, yaitu : (1) Peningkatan pengelolaan pendidikan; serta (2) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan untuk sasaran yang kedua difokuskan pada strategi peningkatan budaya membaca.

Kemudian dalam implementasinya ketiga strategi tersebut dijabarkan melalui beberapa arah kebijakan sebagai berikut :

- **Strategi : Peningkatan pengelolaan pendidikan**

  a. Membangun, merehabilitasi dan merevitalisasi sekolah;
  b. Menuntaskan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP;
  c. Memberikan penunjang pendidikan melalui penerbitan dan pemanfaatan Kartu Bodas untuk siswa SD dan SMP;
  d. Meningkatkan layanan pendidikan multi metode berbasis kompetensi;
  e. Meningkatkan cakupan sekolah terakreditasi A dan B;
  f. Memberikan bantuan beasiswa terhadap putra/i daerah berprestasi (S1);
  g. Meningkatkan pelayanan PKBM bagi pesantren salafiyyah;
  h. Mengembangkan sekolah inklusif di setiap kecamatan;
  i. Menggalakkan Forkopimda *Goes to School*;

j. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui Bantuan Sekolah dan Guru Madrasah;

k. Menambahkan 4 (empat) jam pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

- **Strategi : Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan**

a. Meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan;

b. Meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

- **Strategi : Peningkatan budaya membaca**

a. Mengembangkan layanan perpustakaan;

b. Mengembangkan sarana dan multi media literasi/baca.

2. Terwujudnya Masyarakat Bogor Sehat

Dalam tujuan ini dirancang 3 (tiga) sasaran yang terdiri : (1) meningkatnya kualitas kesehatan yang difokuskan pada strategi peningkatan upaya kesehatan masyarakat; (2) meningkatnya ketahanan pangan daerah yang difokuskan pada strategi peningkatan ketersediaan dan diversifikasi konsumsi pangan yang aman; serta (3) menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk alami yang difokuskan pada strategi pengendalian pertumbuhan penduduk alami.

Kemudian dalam implementasinya ketiga strategi tersebut dijabarkan melalui beberapa arah kebijakan sebagai berikut :

- **Strategi : Peningkatan upaya kesehatan masyarakat**

a. Menyediakan alat kesehatan, vaksinasi dan peningkatan pelayanan dalam rangka penanggulangan Covid-19;

b. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan;

c. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pencegahan, pengendalian dan penanganan permasalahan kesehatan;

d. Meningkatkan kapasitas tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam upaya peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan;

e. Memberikan kartu sehat (pembayaran JKN miskin).

f. Memberikan pelayanan Bogor Siaga;

g. Membangun Rumah Sakit Parung;

h. Menggalakkan Gerakan Bogor Bebas Stunting.

- **Strategi : Peningkatan ketersediaan dan diversifikasi konsumsi pangan yang aman**

  a. Meningkatkan penguatan cadangan pangan dan penganekaragaman pola konsumsi pangan.

- **Strategi : Pengendalian pertumbuhan penduduk alami**

  a. Meningkatkan kepesertaan KB.

6.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Kedua

Misi kedua adalah **"Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan"**. Dalam rangka mencapai misi ini dirumuskan 1 (satu) tujuan yaitu **"Terwujudnya Masyarakat Bogor Maju dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas"**, dengan 2 (dua) sasaran yang terdiri dari : (1) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat; dan (2) Meningkatnya daya saing daerah. Adapun sasaran yang pertama difokuskan pada 4 (empat) strategi yang terdiri dari : (1) Peningkatan kualitas keluarga; (2) Peningkatan pemberdayaan sosial masyarakat; (3) Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial serta pemberian perlindungan dan jaminan sosial; dan (4) Peningkatan kapasitas dan peluang ketenagakerjaan.

Dalam implementasinya, keempat strategi tersebut dijabarkan melalui beberapa arah kebijakan yang terdiri dari :

- **Strategi : Peningkatan kualitas keluarga**

  a. Meningkatkan ekonomi keluarga sejahtera;

  b. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dalam keluarga.

- **Strategi : Peningkatan pemberdayaan sosial masyarakat**

  a. Membangun Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam penanganan PPKS (Graha Pancakarsa).

- **Strategi : Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Serta Pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial**

  a. Meningkatkan fasilitasi bagi masyarakat beresiko sosial.

- **Strategi : Peningkatan kapasitas dan peluang ketenagakerjaan**

  a. Meningkatkan kapasitas dan peluang kerja;
  b. Membangun *Career Center*;
  c. Membangun Lembaga Sertifikasi Profesi Ketenagakerjaan (LSP);
  d. Meningkatkan kemitraan ketenagakerjaan.

Kemudian untuk sasaran yang kedua difokuskan pada 6 (enam) strategi yang terdiri dari : (1) Peningkatan produk daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan; (2) Peningkatan kualitas pelaku usaha; (3) Peningkatan peluang investasi; (4) Optimalisasi promosi investasi dan pemasaran produk; (5) Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan; dan (6) Peningkatan prestasi olahraga.

Dalam implementasinya, keenam strategi tersebut dijabarkan melalui beberapa arah kebijakan yang terdiri dari :

- **Strategi : Peningkatan produk daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan**

  a. Fasilitasi sarana dan prasarana infrastruktur pertanian;
  b. Fasilitasi sarana dan prasarana infrastruktur perikanan;
  c. Mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian;
  d. Mengendalikan penyakit hewan dan zoonosis;
  e. Menggalakkan gerakan beli beras petani Bogor;
  f. Meningkatkan produksi kopi Robusta terbesar di Jawa Barat;
  g. Memberikan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP);
  h. Meningkatkan stabilisasi harga bahan pokok dan barang penting;
  i. Membangun dan merehabilitasi pasar;
  j. Mengembangkan destinasi pariwisata bertaraf nasional dan internasional;
  k. Meningkatkan upaya pemasaran dan promosi pariwisata melalui penyelenggaraan event tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional berbasis teknologi informasi;

l. Menyelenggarakan festival wisata desa;

m. Pengembangan Geopark Pongkor.

- **Strategi : Peningkatan kualitas pelaku usaha**

a. Sertifikasi pelaku usaha;

b. Meningkatkan jumlah koperasi aktif;

c. Optimalisasi kemitraan UMKM dengan dunia usaha;

d. Meningkatkan kualitas metrologi legal;

e. Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan petani;

f. Fasilitasi Petani Millenial di Kabupaten Bogor;

g. Meningkatkan manajemen kelembagaan dan unit usaha BUMDes;

h. Pengembangan Ekosistem Usaha Ekonomi Kreatif.

- **Strategi : Peningkatan peluang investasi**

a. Mengembangkan penanaman modal dan peta investasi;

b. Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus.

- **Strategi : Optimalisasi promosi investasi dan pemasaran produk**

a. Menyelenggarakan promosi investasi;

b. Fasilitasi pemasaran produk;

c. Menggalakkan gerakan bela beli produk UMKM/IKM.

- **Strategi : Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan**

a. Meningkatkan kualitas pemuda.

- **Strategi : Peningkatan prestasi olahraga**

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas insan olahraga;

b. Membangun GOM kecamatan.

6.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga

Misi ketiga adalah **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik"**. Misi ini memiliki tujuan yang sama dengan misi kedua yaitu **"Terwujudnya Masyarakat Bogor Maju dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas"**. Namun tujuan tersebut lebih diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Sehubungan dengan arah pada tujuan tersebut, maka dirumuskan 2 (dua) sasaran yang terdiri dari : (1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan (2) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif. Adapun sasaran yang pertama difokuskan pada strategi optimalisasi pelayanan prima terhadap masyarakat. Sedangkan untuk sasaran yang kedua difokuskan pada strategi peningkatan penerapan reformasi birokrasi.

Dalam implementasinya, kedua strategi tersebut dijabarkan melalui beberapa arah kebijakan yang terdiri dari :

- **Strategi : Optimalisasi pelayanan prima terhadap masyarakat**
  a. Mengembangkan pelayanan administrasi kependudukan;
  b. Fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan;
  c. Menerbitkan rekomendasi teknis bahan perizinan;
  d. Fasilitasi penerbitan izin usaha koperasi;
  e. Meningkatkan kualitas pelaku pembangunan melalui pemberian insentif bagi Ketua RT, Ketua RW, Linmas, Guru Ngaji, Amil, dan Kader Posyandu;
  f. Mengoptimalkan pelayanan perijinan;
  g. Fasilitasi dan koordinasi kinerja penyelenggaran pelayanan publik.
- **Strategi : Peningkatan penerapan reformasi birokrasi**
  a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran terintegrasi;
  b. Optimalisasi pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah;
  c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  d. Meningkatkan kapasitas kinerja ASN;
  e. Menerapkan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu;
  f. Meningkatkan kualitas pengawasan;
  g. Mengembangkan inovasi dan teknologi perangkat daerah dan masyarakat;
  h. Menggiatkan Boling (Bogor keliling)/ Saba Desa;
  i. Menyelenggarakan sekolah pemerintah desa;
  j. Meningkatkan pelayanan informasi publik terintegrasi.

6.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Keempat

Misi keempat adalah **"Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan"**. Misi ini memiliki tujuan yaitu **"Terwujudnya Pembangunan Bogor yang berkelanjutan"**, yang diarahkan pada 5 (lima) sasaran sebagai berikut : (1) Meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi, dengan strategi yang difokuskan pada peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi berkualitas; (2) Meningkatnya kualitas sarana prasarana desa, dengan strategi yang difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur desa dan strategi pengembangan kehidupan sosial masyarakat desa; (3) Meningkatkan kualitas permukiman dengan strategi yang difokuskan pada peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman; (4) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan strategi yang difokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan (5) Mengurangi risiko bencana, dengan strategi yang difokuskan pada peningkatan penanggulangan bencana dan peningkatan mitigasi bencana.

Kemudian dalam implementasinya, ketujuh strategi yang dirumuskan dari sasaran tersebut dijabarkan kembali melalui beberapa arah kebijakan sebagai berikut :

- **Strategi : Peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi berkualitas**

  a. Membangun, merekonstruksi, melebarkan, merehabilitasi dan memelihara jalan;
  b. Mengendalikan kinerja lalu lintas;
  c. Menata jalur pedestrian dan ruas jalan Kandang Roda-Sentul, Tegar beriman dan kawasan GOR Pakansari;
  d. Membangun jalan Poros Tengah Timur;
  e. Membangun jalan Bojonggede-Kemang;
  f. Membangun jalan lingkar Kebun Raya Cibinong;
  g. Membuka akses lingkar jalan tambang;
  h. Membangun jalan lingkar Gunungsindur;
  i. Membangun Jalan Galuga-Rancabungur;

j. Membangun jalan lingkar Dramaga 2;
k. Merevitalisasi jembatan rawayan/jembatan gantung;
l. Menata kawasan simpang Parung;
m. Menyediakan fasilitas parkir yang terintegrasi.

- **Strategi : Peningkatan kualitas infrastruktur desa**

a. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas;
b. Betonisasi jalan desa.

- **Strategi : Pengembangan kehidupan sosial masyarakat desa**

a. Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan.

- **Strategi : Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

a. Menyediakan rumah layak huni;
b. Menata kawasan permukiman kumuh;
c. Meningkatkan cakupan layanan air minum;
d. Meningkatkan cakupan layanan air limbah;
e. Menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan;
f. Meningkatkan kualitas desa melalui Bedah Kampung;
g. Menyediakan ruang terbuka publik.

- **Strategi : Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan**

a. Menyediakan sarana prasarana persampahan;
b. Mewujudkan Bogor Antik *"Asri Tanpa Plastik"*;
c. Menangani sampah berbasis zonasi.

- **Strategi : Pengelolaan lingkungan hidup**

a. Mengendalikan pencemaran lingkungan;
b. Melestarikan keanekaragaman hayati.

- **Strategi : Peningkatan penanggulangan bencana**

a. Meningkatkan pelayanan kedaruratan bencana;
b. Meningkatkan layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
c. Meningkatkan cakupan pelayanan kebakaran dan non kebakaran.

- **Strategi : Peningkatan mitigasi bencana**

a. Meningkatkan kewaspadaan dini bencana.

6.1.5. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Kelima

Misi kelima adalah **"Mewujudkan Kesalehan Sosial"**. Misi ini memiliki tujuan yaitu **"Terwujudnya Masyarakat Bogor Berkeadaban"**, yang diarahkan pada 3 (tiga) sasaran yang terdiri dari : (1) Mewujudkan kehidupan masyarakat agamis, harmonis, nyaman, tertib dan tidak diskriminatif; (2) Meningkatnya peranan wanita dalam pembangunan; serta (3) Terwujudnya pelestarian kebudayaan.

Adapun sasaran pertama difokuskan pada 3 (tiga) strategi sebagai berikut : (1) Peningkatan keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial politik di masyarakat; (2) Pembinaan kerukunan umat beragama; dan (3) Pengendalian ketentraman dan ketertiban umum. Kemudian untuk sasaran yang kedua difokuskan pada strategi peningkatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak. Sedangkan untuk sasaran yang ketiga difokuskan pada strategi perlindungan dan pembinaan seni dan budaya daerah.

Sehubungan dengan implementasinya, maka dirumuskan beberapa arah kebijakan yang merupakan penjabaran dari kelima strategi tersebut yaitu :

- **Strategi : Peningkatan keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial politik di masyarakat**
  a. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan pembinaan politik;
  b. Menggiatkan Jumling
- **Strategi : Pembinaan kerukunan umat beragama**
  a. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi di bidang keagamaan;
  b. Menggalakkan Gerakan Bogor *Ngaos*;
  c. Menyelenggarakan bedah pesantren;
  d. Memberikan bantuan legalitas bagi pondok pesantren;
  e. Revitalisasi *Islamic Center;*
  f. Meningkatkan kualitas keagamaan melalui Program Hafizd Quran.
- **Strategi : Pengendalian ketentraman dan ketertiban umum**
  a. Menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;

b. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
c. Menggalakkan aksi Nobat *"Nongol Babat"*.

- **Strategi : Peningkatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak**

a. Meningkatkan kompetensi perempuan dan pemenuhan hak anak.

- **Strategi : Perlindungan dan pembinaan seni dan budaya daerah**

a. Menyelenggarakan festival seni dan budaya;
b. Mengembangkan dan melestarikan budaya Cimande;
c. Mengelola cagar budaya daerah;
d. Melestarikan Bahasa Sunda melalui *Kemis Nyunda*;
e. Melestarikan Budaya melalui Bogor *Culture Night*.

Kemudian dalam rangka mengimplementasikan seluruh arah kebijakan di atas, perlu dirancang program-program pembangunan daerah yang dapat memayungi pelaksanaan setiap kegiatan yang secara langsung menjadi target pencapaian keseluruhan indikator kinerja daerah. Adapun program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud didalamnya memuat kegiatan dan sub kegiatan yang secara keseluruhan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan hal itu, maka dibutuhkan gambaran terkait program-program pembangunan daerah yang disusun berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah pada tabel 6.2 berikut ini.

Tabel 6.2

Keterkaitan Program Pembangunan Daerah terhadap Visi dan Misi berdasarkan Sasaran dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Pengampu
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Visi : Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban												
Misi kesatu : Mewujudkan masyarakat yang berkualitas												
	Tujuan kesatu :											
1.1	**Terwujudnya masyarakat Bogor cerdas**	**Indeks Pendidikan**	**poin**	**63,01**		**63,74**		**64,53**		**64,53**		
	Sasaran kesatu :											
1.1.1	**Meningkatnya pelayanan pendidikan yang berkualitas**	**RLS (Rata-rata Lama Sekolah)**	**tahun**	**8,39**		**8,50**		**8,61**		**8,61**		
		HLS (Harapan Lama Sekolah)	**tahun**	**12,61**		**12,75**		**12,90**		**12,90**		
	Program :											
	Strategi Peningkatan pengelolaan pendidikan											
	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka kelulusan jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat	%	100,00	550.953.221.638	100,00	619.883.609.797	100,00	536.261.342.521	100,00	1.707.098.173.956	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	%	43,14		43,65		44,17		44,17		DINAS PENDIDIKAN
		Persentase sekolah jenjang SD yang terakreditasi minimal B	%	98,21		99,12		100,00		100,00		DINAS PENDIDIKAN
		Persentase sekolah jenjang SMP yang terakreditasi minimal B	%	89,79		90,59		91,38		91,38		DINAS PENDIDIKAN
	Strategi Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan											
	Sasaran kedua :											
1.1.2	**Meningkatnya budaya literasi**	**Indeks membaca**	**poin**	**61,16**		**61,35**		**61,54**		**61,54**		
	Program :											
	Strategi Peningkatan budaya membaca											
	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	poin	53,20	653.151.076	53,39	1.939.327.999	53,58	1.997.277.084	53,58	4.589.756.159	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	Tujuan kedua :											
1.2	**Terwujudnya masyarakat Bogor sehat**	**Indeks Kesehatan**	**poin**	**78,88**		**79,05**		**79,23**		**79,23**		
		Laju Pertumbuhan Penduduk	**%**	**1,66**		**1,63**		**1,58**		**1,58**		
	Sasaran kesatu :											
1.2.1	**Meningkatnya kualitas kesehatan**	**Angka Harapan Hidup**	**tahun**	**71,27**		**71,39**		**71,50**		**71,50**		

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Pengampu
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Program :											
	Strategi Peningkatan upaya kesehatan masyarakat											
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi	%	100,00	1.053.615.078.903	100,00	1.161.613.930.824	100,00	790.843.514.495	100,00	3.006.072.524.222	DINAS KESEHATAN
		Persentase pemanfaatan layanan kesehatan	%	68,00		70,00		72,00				DINAS KESEHATAN
	Sasaran kedua :											
1.2.2	**Meningkatnya ketahanan pangan daerah**	**Skor Pola Pangan Harapan**	**poin**	**80,96**		**81,12**		**81,29**		**81,29**		
	Program :											
	Strategi Peningkatan ketersediaan dan diversifikasi konsumsi pangan yang aman											
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase infrastruktur kemandirian pangan yang terbangun	%	11,25	1.787.564.676	18,75	2.191.922.039	26,25	1.896.231.867	26,25	5.875.718.582	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras sesuai Kebutuhan)	%	20,00	2.803.539.766	25,00	3.627.820.894	30,00	3.038.813.099	30,00	9.470.173.759	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa Rawan Pangan yang ditangani	%	8,30	715.593.193	16,60	2.033.806.109	25,00	1.759.445.768	25,00	4.508.845.070	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Sasaran ketiga :											
1.2.3	**Meningkatnya Kepesertaan Pasangan Usia Subur Untuk Ber-KB**	**Crude Birth Rate (CBR)**	**%**	**19,10**		**18,65**		**18,21**		**18,21**		
	Program :											
	Strategi Pengendalian pertumbuhan penduduk alami											
	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Kebijakan yang disinergikan	%	25,00	403.630.486	75,00	462.705.536	100,00	421.184.287	100,00	1.287.520.309	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	%	16,39	11.146.854.041	16,30	4.265.148.531	16,21	1.782.596.566	16,21	17.194.599.138	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Pengampu
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Pasangan Usia Subur Anggota Kelompok Ketahanan dan Keluarga sejahtera yang Ber- KB	%	77,08	2.041.396.386	77,20	1.003.601.178	77,37	2.916.382.636	77,37	5.961.380.200	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase Terbentuknya kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	%	85,00		92,50		100,00		100,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Misi 2 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan												
	Tujuan kesatu :											
2.1	**Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**	**%**	**3,48**		**4,31**		**5,15**		**3,17**		
	Sasaran kesatu :											
2.1.1	**Meningkatnya kesejahteraan masyarakat**	**PDRB Perkapita**	**Juta Rp.**	**38,58**		**38,80**		**39,41**		**39,41**		
		Tingkat Kemiskinan	**%**	**7,54**		**7,38**		**7,14**		**7,14**		
		Tingkat pengangguran terbuka	**%**	**12,22**		**11,64**		**11,05**		**11,05**		
	Program :											
	Strategi Peningkatan pemberdayaan sosial masyarakat											
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Terlatih dan Aktif dalam Penanganan PPKS	%	30,38	9.827.145.684	65,19	9.628.954.036	100,00	9.581.151.172	100,00	29.037.250.892	DINAS SOSIAL
	Strategi Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial serta Pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial											
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat Miskin yang Tertangani	%	27,45	4.094.248.248	58,82	4.411.401.762	100,00	4.607.215.028	100,00	13.112.865.038	DINAS SOSIAL

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Pengampu
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)	%	31,37	2.187.373.822	65,69	4.862.913.998	100,00	4.756.582.059	100,00	11.806.869.879	DINAS SOSIAL
	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota	%	31,02	955.424.386	68,98	4.349.932.947	100,00	3.760.979.823	100,00	9.066.337.156	DINAS SOSIAL
	Strategi Peningkatan kapasitas dan peluang ketenagakerjaan											
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan bersertifikat kompetensi	%	95,63	1.355.042.848	96,15	16.625.348.108	97,00	3.478.469.261	97,00	21.458.860.217	DINAS TENAGA KERJA
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	64,11		65,36		65,88		65,88		DINAS TENAGA KERJA
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang Bekerja	%	20,73	1.475.312.658	20,85	1.503.747.983	21,98	1.985.207.704	21,98	4.964.268.345	DINAS TENAGA KERJA
	Sasaran kedua :											
2.1.2	**Meningkatnya daya saing daerah**	**PDRB atas dasar harga berlaku**	**triliun**	**238,81**		**244,05**		**251,80**		**251,80**		
	Program :											
	Strategi Peningkatan produk daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan											
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Pertanian Pangan per Hektar per Tahun	ton/ha	6,78	9.216.184.440	6,80	8.360.326.927	6,82	7.576.924.931	6,82	25.153.436.298	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Keterpenuhan Sarana Peternakan (Bibit Ternak)	%	22,25	1.998.504.690	33,33	3.945.169.376	44,42	1.626.873.451	100,00	7.570.547.517	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Keterpenuhan Prasarana (Infrastruktur) Peternakan	%	27,78	5.627.117.810	33,33	10.089.322.573	38,89	2.639.622.241	38,89	18.356.062.624	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Total hasil tangkapan ikan di perairan umum	Ton	95	549.096.744	104,50	1.047.228.234	110	445.203.659	110,00	2.041.528.637	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kontribusi produksi benih Ikan terhadap target total	%	33,00	3.574.872.446	33,33	11.119.448.064	33,67	2.008.335.257	33,67	16.702.655.767	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Total Produksi Olahan Perikanan	Ton	16.359	1.504.961.952	16.850	2.634.707.824	17.524	1.333.783.373	17.524	5.473.453.149	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Pengampu
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	55,00	1.822.446.518	60,00	3.302.335.172	70,00	1.915.848.372	70,00	7.040.630.062	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan	%	33,33	32.955.387.829	33,33	23.671.377.323	33,34	14.366.840.135	100,00	70.993.605.287	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Strategi Peningkatan kualitas pelaku usaha											
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Tingkat Produktivitas Koperasi	%	85,17	1.500.815.486	85,56	5.143.213.001	85,62	1.812.590.583	85,62	8.456.619.070	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang kapabel (yang berizin dan bermitra)	%	0,41	3.272.511.490	0,49	4.915.193.143	0,56	2.986.654.938	0,56	11.174.359.571	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	Strategi Peningkatan peluang investasi											
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi	%	1,10	1.682.068.344	1,60	943.504.824	2,60	1.056.921.287	2,60	3.682.494.455	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Strategi Optimalisasi promosi investasi dan pemasaran produk											
	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang dikembangkan menjadi wirausaha	%	0,114	991.372.176	0,118	2.478.495.039	0,123	4.284.305.015	0,123	7.754.172.230	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor	Perusahaan	360	1.106.186.624	370	1.391.556.770	380	3.876.184.464	380	6.373.927.858	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor (Berdasarkan Registrasi SKA)	USD	1.490.000.000	104.060.350	1.500.000.000	1.515.270.055	1.510.000.000	2.234.629.231	1.510.000.000	3.853.959.636	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah jenis produk dalam negeri yang dipasarkan	Jenis	-	13.460.550	5	2.474.998.813	5	844.502.431	5	3.332.961.794	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	10,00	5.987.505.548	10,00	6.190.593.497	10,00	5.098.707.475	10,00	17.276.806.520	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Tingkat Hunian Akomodasi	%	50,00		60,00		70,00		70,00		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Pengampu
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan yang datang ke Kabupaten Bogor	%	11,68	2.644.533.390	60,00	3.085.469.444	25,00	2.534.412.303	25,00	8.264.415.137	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Bogor	%	11,68		60,00		25,00		25,00		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik												
	Tujuan :											
3.1	**Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**poin**	**69,00**		**72,00**		**75,00**		**75,00**		
	Sasaran kesatu :											
3.1.1	**Kualitas pelayanan publik meningkat**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**poin**	**86,50**		**87,00**		**87,50**		**87,50**		
	Program :											
	Strategi Optimalisasi pelayanan prima terhadap masyarakat											
	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan KTP	%	99,89	5.694.666.730	99,91	8.802.053.548	100,00	15.706.181.442	100,00	30.202.901.720	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Cakupan perekaman data Biometrik	%	99,91		99,92		100,00		100,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Program Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akta kelahiran anak	%	85,18	3.436.198.852	89,33	4.452.476.151	93,36	6.715.476.574	93,36	14.604.151.577	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Sasaran kedua :											
3.1.2	**Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif**	**Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah**	**predikat**	**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		
		Nilai AKIP	**poin**	**69,00**		**72,00**		**75,00**		**75,00**		
		Indeks Inovasi Daerah	**%**	**60**		**65**		**70**		**70**		
	Program :											
	Strategi Peningkatan penerapan reformasi birokrasi											

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Pengampu
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	2.268.590.968	100,00	2.276.509.471	100,00	2.063.189.815	100,00	6.608.290.254	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	%	-7,00	1.525.313.480.985	-6,00	1.027.114.251.929	-5,00	1.336.502.746.851	-5,00	3.888.930.479.765	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	Rasio	76,91		67,77		70,53		70,53		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Rasio	11,66		13,77		13,35		13,35		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Rasio	10,00		8,00		6,00		6,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Manajemen Aset	Ya/Tidak	Ya	2.417.938.979	Ya	2.261.817.969	Ya	2.125.674.411	Ya	6.805.431.359	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dapat diselesaikan	%	100,00	416.934.450	100,00	470.451.550	100,00	445.748.390	100,00	1.333.134.390	INSPEKTORAT DAERAH
		Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di bidang pengawasan	Dokumen	2		2		2		6		INSPEKTORAT DAERAH
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Raperdes tentang APBDes yang Diklarifikasi	%	100,00	14.883.942.782	100,00	17.277.859.477	100,00	15.901.362.844	100,00	48.063.165.103	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Persentase Raperdes tentang RKPDes yang Diklarifikasi	%	100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Persentase Peningkatan Status BUMDes Mandiri	%	50,00		33,33		37,50		37,50		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Persentase aparatur desa yang mendapatkan fasilitasi sekolah pemerintahan desa	%	9,62		13,22		14,42		37,26		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Pengampu
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, rnengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pernerintah daerah kabupaten/kota	%	77,93	7.843.059.926	79,00	8.187.073.933	81,00	8.094.443.518	81,00	24.124.577.377	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah	PD	72	94.974.221.000	72	97.629.846.632	72	99.582.443.565	72	292.186.511.197	SEKRETARIAT DAERAH
Misi 4 : Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan												
	Tujuan kesatu :											
4.1	**Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan**	**Indeks ketimpangan wilayah williamson**	**poin**	**0,98**		**0,96**		**0,93**		**0,93**		
	Sasaran kesatu :											
4.1.1	**Meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi**	**Indeks Konektivitas Infrastruktur**	**Poin**	**1,42**		**1,47**		**1,53**		**1,53**		
	Program :											
	Strategi Peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi berkualitas											
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten yang ditangani	**%**	55,00	791.774.075.910	56,00	504.516.876.994	57,00	690.339.762.826	57,00	1.986.630.715.730	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Kinerja Jaringan Jalan	v/c ratio	0,58	69.446.368.614	0,56	85.161.755.364	0,54	187.877.179.180	0,54	342.485.303.158	DINAS PERHUBUNGAN
	Sasaran kedua :											
4.1.2	**Meningkatnya kualitas sarana prasana desa**	**Indeks Desa Membangun**	**poin**	**0,7301**		**0,7362**		**0,7524**		**0,7524**		
	Program :											
	Strategi Pengembangan kehidupan sosial masyarakat desa											
	Program Penataan Desa	Persentase Desa Tertata melalui Program Samisade	%	99,28	4.164.964.062	100,00	1.299.344.265	100,00	1.647.809.621	100,00	7.112.117.948	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Sasaran ketiga :											
4.1.3	**Meningkatnya kualitas permukiman**	**Persentase kawasan permukiman layak**	**%**	**99,72**		**99,86**		**100,00**		**100,00**		
	Program :											
	Strategi Peningkatan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman											

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Pengampu
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Telah Direhabilitasi	%	17,82	35.584.246.457	25,81	74.969.589.554	33,80	40.083.554.582	33,80	150.637.390.593	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	%	56,89		78,45		100,00		100,00		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Sasaran keempat :											
4.1.4	**Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Poin**	**56,05**		**56,15**		**56,25**		**56,25**		
	Program :											
	Strategi Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan											
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Volume Sampah yang Dikelola	%	36,54	111.306.966.201	44,58	153.495.127.258	55,71	73.318.116.924	55,71	338.120.210.383	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Strategi Pengelolaan lingkungan hidup											
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengelolaan B3 dan Limbah B3	%	20,00	343.341.572	40,00	1.514.907.750	40,00	1.275.074.413	100,00	3.133.323.735	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Persetujuan Teknis yang diterbitkan	%	50,00	4.575.634.682	75,00	5.527.780.217	100,00	2.521.396.264	100,00	12.624.811.163	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Luas Hutan Kota yang Terbangun	%	48,45	686.286.350	62,59	15.964.047.100	100,00	7.203.989.326	100,00	23.854.322.776	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Sasaran kelima :											
4.1.5	**Mengurangi Risiko bencana**	**Indeks Risiko Bencana**	**poin**	**136**		**134**		**132**		**132**		
	Program :											
	Strategi Peningkatan penanggulangan bencana											
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni di Lokasi Bencana	%	37,19	36.284.572.500	67,28	31.431.909.737	100,00	24.028.868.983	100,00	91.745.351.220	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	60,00	38.270.732.460	80,00	8.603.895.399	100,00	8.152.109.430	100,00	55.026.737.289	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran	%	100,00	16.331.756.348	100,00	17.715.712.781	100,00	12.026.172.529	100,00	46.073.641.658	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Pengampu
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Layanan Pemadaman yang Dilakukan oleh Relawan Kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau Komunitas Masyarakat Lainnya)	%	100,00		100,00		100,00		100,00	-	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran)	%	100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	Strategi Peningkatan mitigasi bencana											
	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100,00		100,00		100,00		100,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Kelompok Masyarakat yang Memahami Pengurangan Risiko Bencana	%	20,00		40,00		60,00		60,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Misi 5 : Mewujudkan kesalehan sosial												
	Tujuan kesatu :											
5.1	**terwujudnya masyarakat Bogor berkeadaban**	**Indeks kebahagiaan**	**poin**	**74,73-74,75**		**74,72-74,76**		**74,72-74,78**		**74,72-74,78**		
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	**poin**	**89,63**		**90,09**		**90,56**		**90,56**		
	Sasaran kesatu :											
5.1.1	**Kehidupan masyarakat agamis, harmonis, nyaman, tertib dan tidak diskriminatif**	**Indeks kerukunan hidup beragama**	**poin**	**82,09-82,12**		**82,09-82,15**		**82,09-82,17**		**82,09-82,17**		
		Tingkat Kepatuhan Perda dan Perkada Ketertiban Umum	**%**	**74,36**		**82,05**		**92,31**		**92,31**		
	Program :											
	Strategi Pengendalian ketentraman dan ketertiban umum											
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00	21.887.981.575	100,00	22.902.972.480	100,00	22.850.767.873	100,00	67.641.721.928	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase Pemberdayaan Linmas	%	100,00		100,00		100,00		100,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Sasaran kedua :											
5.1.2	**Meningkatnya peranan wanita dalam pembangunan**	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**poin**	**58,50**		**58,90**		**59,00**		**59,00**		
	Program :											
	Strategi Peningkatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak											

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Pengampu
				2021		2022		2023				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Daerah	%	30,00	1.512.373.654,00	32,50	316.555.346,00	35,00	1.132.418.829	35,00	2.961.347.829	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Sasaran ketiga :											
5.1.3	**Terwujudnya pelestarian kebudayaan**	**Persentase kebudayaan yang dilestarikan**	**%**	**57,01**		**57,94**		**58,88**		**58,88**		
	Program :											
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Kesenian tradisional yang dilestarikan	Kesenian	44	564.821.900	46	562.615.600	48	482.516.039	48	1.609.953.539	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Situs dan Cagar Budaya yang terlestarikan	%	47,22	1.332.358.750	48,61	1.339.427.286	50,00	1.125.762.197	50,00	3.797.548.233	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Program Pengembangan Kebudayaan	Kegiatan budaya yang diselenggarakan	Upacara/ Penampilan	10	488.591.600	10	630.788.940	10	462.139.967	30	1.581.520.507	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pendekatan Spasial

Pendekatan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bogor 2018-2023. Penerapan pendekatan ruang dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036. Hal ini dimaksudkan agar terwujud keselarasan antara RTRW dan RPJMD Kabupaten Bogor.

RTRW Kabupaten Bogor disusun berdasarkan asas pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, berbudaya, dan berkelanjutan; asas kebersamaan, kemitraan, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum; asas keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan dengan pendekatan sektoral, holistik, tematik, dan integratif, selanjutnya diselaraskan dengan rencana pemanfaatan ruang sebagai pendekatan spasial.

Tujuan penataan ruang wilayah di daerah adalah untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bertumpu pada kegiatan pariwisata, permukiman, industri dan pertanian dalam rangka mendorong perkembangan wilayah yang merata dan berdaya saing menuju Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban. Adapun Kebijakan penataan ruang di daerah meliputi :

a. perwujudan kawasan lindung dalam rangka optimalisasi fungsi perlindungan regional, dengan strategi meliputi:
    1. menetapkan kawasan lindung sesuai dengan fisik lahan, daya dukung dan daya tampung lingkungan;
    2. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
    3. menerapkan prinsip *zero delta Q policy* pada daerah resapan air;

4. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
5. membatasi perkembangan kawasan terbangun pada *enclave* yang berada di dalam kawasan hutan ataupun yang berbatasan dengan kawasan hutan;
6. membatasi perkembangan kawasan terbangun pada daerah sempadan sungai, situ dan mata air; dan
7. membatasi pengembangan prasarana wilayah di dalam dan di sekitar kawasan lindung.

b. pengembangan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan sesuai dengan potensi alam dan budaya setempat yang memiliki daya tarik wisatawan mancanegara dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dengan strategi meliputi:
   1. mengembangkan kawasan wisata alam dengan memanfaatkan potensi alam yang ada tanpa mengurangi fungsi dan daya dukung lingkungan alam;
   2. mengembangkan kawasan wisata budaya dengan tetap menjaga kelestarian budaya setempat dan menyesuaikan dengan kultur yang ada;
   3. mengembangkan kawasan wisata buatan yang berorientasi pasar domestik dan mancanegara secara selektif dengan tetap menjaga fungsi pelestarian alam yang berkelanjutan; dan
   4. penyediaan prasarana pendukung pariwisata sesuai kebutuhan kegiatan pariwisata dengan tetap memperhatikan kemampuan lingkungan setempat.

c. penyediaan lingkungan permukiman perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di wilayah Jabodetabek, dengan strategi meliputi:
   1. menyediakan fasilitas permukiman yang lengkap dan berkualitas serta berdaya saing terhadap daerah sekitar;
   2. mengembangkan permukiman perkotaan secara intensif dengan mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien melalui pembangunan perumahan secara vertikal pada wilayah perkotaan yang cepat tumbuh;

3. mengembangkan permukiman diprioritaskan kepada hunian yang terintegrasi dengan sistem angkutan massal;
4. memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan dan efisiensi energi di kawasan permukiman perkotaan;
5. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
6. mengendalikan jumlah pergerakan transportasi melalui pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan wilayah di sekitar daerah;
7. mengendalikan tata air melalui pengembangan sistem drainase dan peningkatan fungsi resapan air; dan
8. mengendalikan dan penataan pertumbuhan kawasan permukiman di daerah rawan bencana dan berfungsi lindung.

d. pengembangan kawasan peruntukan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang mampu menghasilkan produk bernilai jual internasional dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan, dengan strategi meliputi:
   1. mendorong penyediaan kawasan industri yang dikelola secara terpadu, lengkap dan ramah lingkungan;
   2. mengembangkan dan menata industri rumah tangga melalui pemberian dukungan infrastruktur yang memadai sesuai dengan pola ruang yang dikembangkan;
   3. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri yang berteknologi tinggi dengan tetap menjaga kualitas lingkungan setempat;
   4. optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat;
   5. pengembangan tematik industri berdasarkan ketersediaan potensi sumber daya yang tersedia;
   6. menyediakan sistem transportasi regional yang handal, cepat dan mudah diakses;
   7. mengendalikan perkembangan kegiatan industri yang memberikan dampak pencemaran lingkungan dan menganggu fungsi resapan air; dan
   8. membatasi pertumbuhan industri di luar kawasan industri.

e. perwujudan areal pertanian tanaman pangan dan penataan pusat permukiman pedesaan sebagai simpul distribusi hasil pertanian dalam rangka mendukung upaya ketahanan pangan berkelanjutan, dengan strategi meliputi:
   1. menetapkan kawasan pertanian pangan yang berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan di Daerah;
   2. mempertahankan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
   3. mengembangkan jaringan irigasi teknis dan non teknis untuk menunjang keberlanjutan lahan pertanian pangan;
   4. meningkatkan akses jalan dari sentra produksi pertanian ke pusat pemasaran;
   5. memberlakukan insentif dan disinsentif yang mampu mendukung perkembangan usaha kegiatan pertanian;
   6. mengembangkan kawasan agrobisnis berorientasi agropolitan;
   7. mengembangkan kawasan minapolitan;
   8. mengembangkan fasilitas dan infrastruktur serta permukiman perdesaan yang dapat menunjang budidaya perdesaan dalam rangka mempertahankan luas lahan pertanian dan peningkatan produksi pertanian;
   9. meningkatkan aksesibilitas kawasan permukiman pedesaan terhadap kawasan perkotaan sebagai upaya peningkatan distribusi hasil produksi pertanian;
   10. mengembangkan pusat-pusat jasa, koleksi, dan distribusi produk-produk perdesaan yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi setempat; dan
   11. mengendalikan pertumbuhan permukiman pedesaan yang berada di kawasan lindung.

f. penataan sistem pusat kegiatan dan pelayanan sarana prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis, dengan strategi meliputi :
   1. memantapkan pengembangan 3 (tiga) WP dan 12 (dua belas) SWP dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah;
   2. menetapkan sistem pusat kegiatan PKWp, PKLp, PPK, dan PPLk dan PPLd sesuai standar pelayanan minimal;

3. menata dan mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah;
4. memantapkan keterkaitan fungsional antar pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan secara sinergis;
5. mengembangkan sistem jaringan jalan tol, jalan arteri primer, dan kolektor primer serta mengintegrasikan pusat kegiatan nasional, dan pusat-pusat pertumbuhan;
6. mengembangkan sistem transportasi, melalui pengembangan terminal angkutan pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah perkotaan, pengembangan terminal angkutan barang pada kawasan industri dan perdagangan, pengembangan terminal agro pada kawasan sentra produksi pertanian serta keterpaduan moda terhadap moda angkutan massal;
7. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi;
8. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
9. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
10. mempertahankan kelangsungan ketersediaan dan pendistribusian sumber air pertanian dan air bersih perkotaan;
11. meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, serta mewujudkan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi yang optimal;
12. mengembangkan sistem penanganan persampahan melalui penyebaran lokasi pengelolaan sampah di seluruh wilayah secara merata dan memiliki keterkaitan erat dengan sistem transportasi;
13. mengembangkan sarana pemakaman untuk memenuhi kebutuhan tanah kuburan yang diarahkan pada pemanfaatan lahan cadangan tanah pemakaman dan terintegrasi dengan tanah pemakaman masyarakat melalui pengembangan area Tempat Pemakaman Umum (TPU) regional dan lokal di setiap wilayah kecamatan, serta pengembangan Tempat Pemakaman

Bukan Umum (TPBU) pada kawasan yang dinyatakan memungkinkan secara teknis dan fisik lingkungan, serta tidak berdampak sosial pada lingkungan sekitarnya;

14. pengembangan sarana pendidikan dan olahraga secara merata dan berhirarki sesuai kebutuhan masyarakat; dan
15. pengembangan sarana peribadatan untuk memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat dengan memperhatikan keharmonisan kehidupan beragama dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat melalui pengembangan prasarana peribadatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

g. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sesuai dengan kepentingan wilayah dan berdaya saing, dengan strategi meliputi:
    1. menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten yang memiliki nilai strategis pertahanan dan keamanan, nilai strategis ekonomi, nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan, serta nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
    2. mewujudkan nilai strategis kawasan melalui penyediaan infrastruktur wilayah yang memadai dan sesuai dengan kemampuan lahan yang mampu mewujudkan fungsi kawasan;
    3. mengendalikan pertumbuhan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan nilai strategis kawasan dan/atau yang dapat mengganggu nilai strategis kawasan;
    4. optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan buatan sesuai dengan kemampuan dan fungsi kawasan; dan
    5. mengarahkan pengembangan dan pengendalian kawasan strategis sesuai nilai strategis kawasan melalui penyusunan rencana tata ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

Adapun mengenai harmonisasi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan sasaran pembangunan kabupaten yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.3.
Harmonisasi Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Strategi dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bogor

KOMPONEN HARMONISASI	RTRW (2016 - 2036)	PERUBAHAN RPJMD (2018 - 2023)	
VISI PEMBANGUNAN			
	Terwujudnya tata ruang wilayah yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban	
MISI PEMBANGUNAN			
	Tidak Tercantum	1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas	
		2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	
		3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	
		4. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan	
		5. Mewujudkan kesalehan sosial	
TUJUAN			
	Mewujudkan Keseimbangan pembangunan yang bertumpu pada kegiatan pariwisata, permukiman, industri dan pertanian dalam rangka mendorong perkembangan wilayah yang merata dan berdaya saing menuju kabupaten Bogor termaju dan sejahtera	1. Terwujudnya masyarakat Bogor cerdas	
		2. Terwujudnya masyarakat Bogor sehat	
		3. Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	
		4. Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan	
		5. Terwujudnya masyarakat Bogor berkeadaban	
KEBIJAKAN DAN STRATEGI		**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
	1. Perwujudan kawasan lindung dalam rangka optimalisasi fungsi perlindungan regional, meliputi :	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Mengendalikan pencemaran lingkungan
	a. Menetapkan kawasan lindung sesuai dengan fisik lahan, daya dukung dan daya tampung lingkungan		Melestarikan keanekaragaman hayati
	b. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah		
	c. Menerapkan prinsip *zero delta Q policy* pada daerah resapan air		
	d. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana dan potensi kerugian akibat bencana	Peningkatan Penanggulangan Bencana	Meningkatkan pelayanan kedaruratan bencana
			Meningkatkan layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

KOMPONEN HARMONISASI	RTRW (2016 - 2036)	PERUBAHAN RPJMD (2018 - 2023)	
			Meningkatkan cakupan pelayanan kebakaran dan non kebakaran
	e. Membatasi perkembangan kawasan terbangun pada enclave yang berada di dalam kawasan hutan ataupun yang berbatasan dengan kawasan hutan	Peningkatan Mitigasi Bencana	Meningkatkan kewaspadaan dini bencana
	f. Membatasi perkembangan kawasan terbangun pada daerah sempadan sungai, situ dan mata air		
	g. Membatasi pengembangan prasarana wilayah di dalam dan di sekitar kawasan lindung		
KEBIJAKAN DAN STRATEGI		**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
	2. Pengembangan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan sesuai dengan potensi alam dan budaya setempat yang memiliki daya tarik wisatawan mancanegara dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, meliputi :	Peningkatan produk daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Mengembangkan destinasi pariwisata bertaraf nasional dan internasional
			Meningkatkan upaya pemasaran dan promosi pariwisata melalui penyelenggaraan event tingkat lokal, regional, nasional dan internasional berbasis teknologi informasi
	a. Mengembangkan kawasan wisata alam dengan memanfaatkan potensi alam yang ada tanpa mengurangi fungsi dan daya dukung lingkungan alam		Menyelenggarakan festival wisata desa
			Pengembangan Geopark Pongkor
	b. Mengembangkan kawasan wisata budaya dengan tetap menjaga kelestarian budaya setempat dan menyesuaikan dengan kultur yang ada	Perlindungan dan pembinaan seni dan budaya daerah	Menyelenggarakan festival seni dan budaya
	c. Mengembangkan kawasan wisata buatan yang berorientasi pada domestik dan mancanegara secara selektif dengan tetap menjaga fungsi pelestarian alam yang berkelanjutan		Mengembangkan dan melestarikan budaya Cimande
	d. Penyediaan prasarana pendukung pariwisata sesuai dengan tetap memperhatikan kemampuan lingkungan setempat		Mengelola cagar budaya daerah
			Melestarikan Bahasa Sunda melalui Kemis Nyunda
			Melestarikan Budaya melalui Bogor *Culture Night*

KOMPONEN HARMONISASI	RTRW (2016 - 2036)	PERUBAHAN RPJMD (2018 - 2023)	
KEBIJAKAN DAN STRATEGI		**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
	3. Penyediaan lingkungan permukiman perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di wilayah Jabodetabek, meliputi :	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Menyediakan rumah layak huni
	a. Menyediakan fasilitas permukiman yang lengkap dan berkualitas serta berdaya saing terhadap daerah sekitar		Menata kawasan permukiman kumuh
			Meningkatkan cakupan layanan air limbah
			Meningkatkan cakupan layanan air minum
			Meningkatkan kualitas desa melalui Bedah Kampung
	b. Mengembangkan permukiman perkotaan secara insentif dengan mendorong penggunaan perumahan secara vertikal pada wilayah perkotaan yang cepat tumbuh		Menyelenggarakan Penataan Bangunan dan Lingkungan
	c. Mengembangkan permukiman diprioritaskan kepada hunian yang terintegrasi dengan sistem angkutan massal		
	d. Memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan dan efisien energi dikawasan permukiman perkotaan		
	e. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh presen) dari luas kawasan perkotaan		Menyediakan ruang terbuka publik
	f. Mengendalikan jumlah pergerakan transportasi melalui pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan wilayah di sekitar daerah	Peningkatan Infrastruktur jalan dan transportasi berkualitas	Mengendalikan kinerja lalu lintas
	g. Mengendalikan tata air melalui pengembangan sistem drainase dan peningkatan fungsi resapan air		
	h. Mengendalikan dan penataan pertumbuhan kawasan permukiman di daerah rawan bencana dan berfungsi lindung	Pengendalian ketentraman dan ketertiban umum	Menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
			Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
			Menggalakkan aksi Nobat *"Nongol Babat"*

KOMPONEN HARMONISASI	RTRW (2016 - 2036)	PERUBAHAN RPJMD (2018 - 2023)	
KEBIJAKAN DAN STRATEGI		**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
	4. Pengembangan kawasan peruntukan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang mampu menghasilkan produk bernilai jual internasional dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan meliputi :	Optimalisasi pelayanan prima terhadap masyarakat	Fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan
	a. Mendorong penyediaan kawasan industri yang dikelola secara terpadu, lengkap dan ramah lingkungan		
	b. Mengembangkan dan menata industri rumah tangga melalui pemberian dukungan infrastruktur yang memadai sesuai dengan pola ruang yang dikembangkan	Peningkatan produk daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Meningkatkan produksi kopi Robusta terbesar di Jawa Barat
	c. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri yang berteknologi tinggi dengan tetap menjaga kualitas lingkungan setempat	Peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi berkualitas	Mengendalikan kinerja lalu lintas
	d. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat	Peningkatan Kualitas Pelaku Usaha	Sertifikasi Pelaku Usaha
	e. Pengembangan tematik industri berdasarkan ketersediaan potensi sumber daya yang tersedia		Meningkatkan jumlah koperasi aktif
	f. Menyediakan sistem transportasi regional yang handal, cepat dan mudah diakses		Optimalisasi Kemitraan UMKM dengan dunia usaha
	g. Mengendalikan perkembangan kegiatan industri yang memberikan dampak pencemaran lingkungan dan mengganggu fungsi resapan air		Meningkatkan kualitas metrologi legal
	h. Membatasi pertumbuhan industri di luar kawasan industri		Meningkatkan manajemen kelembagaan dan unit usaha BUMDes
KEBIJAKAN DAN STRATEGI		**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
	5. Perwujudan areal pertanian tanaman pangan dan penataan pusat permukiman pedesaan sebagai titik simpul distibusi hasil pertanian dalam rangka mendukung upaya ketahanan pangan berkelanjutan, meliputi :	Peningkatan ketersediaan dan diversifikasi konsumsi pangan yang aman	Meningkatkan penguatan cadangan pangan dan penganekaragaman pola konsumsi pangan

KOMPONEN HARMONISASI	RTRW (2016 - 2036)	PERUBAHAN RPJMD (2018 - 2023)	
	a. Menetapkan kawasan pertanian pangan yang berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan di Daerah	Peningkatan produk daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Fasilitasi sarana dan prasarana infrastruktur pertanian
	b. Mempertahankan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)		Fasilitasi sarana dan prasarana infrastruktur perikanan
	c. Mengembangkan jaringan irigasi teknis dan non teknis untuk menunjang keberlanjutan lahan pertanian pangan		Mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian
			Memberikan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
	d. Meningkatkan akses jalan dari sentra produksi pertanian ke pusat pemasaran		Mengendalikan penyakit hewan dan zoonosis
			Menggalakkan gerakan beli beras petani Bogor
	e. Memberikan insentif dan diinsentif yang mampu mendukung perkembangan usaha kegiatan pertanian		Meningkatkan stabilisasi harga bahan pokok dan bahan penting
			Membangun dan merehabilitasi pasar
	f. Mengembangkan kawasan minapolitan	Peningkatan kualitas pelaku usaha	Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan petani
			Fasilitasi Petani Millenial di Kabupaten Bogor
	g. Mengembangkan fasilitas dan infrastruktur serta permukiman perdesaan yang dapat menunjang budidaya perdesaan dalam rangka mempertahankan luas lahan pertanian dan peningkatan produksi pertanian	Peningkatan kualitas infrastruktur desa	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas
	h. Meningkatkan aksesibilitas kawasan permukiman pedesaan terhadap kawasan perkotaan sebagai upaya peningkatan distribusi hasil produksi pertanian		Betonisasi jalan desa
	i. Mengembangkan pusat-pusat jasa, koleksi, dan dengan kondisi dan potensi setempat	Optimalisasi promosi investasi dan pemasaran produk	Fasilitasi pemasaran produk
	j. Mengendalilkan pertumbuhan permukiman pedesaan yang berada di kawasan lindung		
KEBIJAKAN DAN STRATEGI		**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
	6. Penataan sistem pusat kegiatan dan pelayanan sarana prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis, meliputi :	Peningkatan pengelolaan pendidikan	Membangun, merehabilitasi dan merevitalisasi sekolah
	a. Memantapkan pengembangan 3 (tiga) WP dan 12 (dua belas) SWP dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah		Menuntaskan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP
			Mengembangkan sekolah inklusif di setiap kecamatan

KOMPONEN HARMONISASI	RTRW (2016 - 2036)	PERUBAHAN RPJMD (2018 - 2023)	
	b. Menetapkan sitem pusat kegiatan PKWp, PKLp, PPK, dan PPLk dan PPLd sesuai standar pelayanan minimal	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat	Menyediakan alat kesehatan, vaksinasi dan peningkatan pelayanan dalam rangka penanggulangan Covid-19
	c. Menata dan mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah		Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan
			Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pencegahan, pengendalian dan penanganan permasalahan kesehatan
			Meningkatkan kapasitas tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam upaya peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan
			Memberikan pelayanan Bogor Siaga
			Membangun Rumah Sakit Parung
	d. Memantapkan keterkaitan fungsional antar pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan secara sinergis	Peningkatan pemberdayaan sosial masyarakat	Membangun Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam Penanganan PPKS (Graha Pancakarsa)
	e. Mengembangkan sistem transportasi, melalui pengembangan terminal angkutan pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah perkotaan, pengembangan terminal angkutan barang pada kawasan industri dan perdagangan, pengembangan terminal agro pada kawasan sentra produksi pertanian serta keterpaduan moda terhadap moda angkutan massal	Peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi berkualitas	Membangun, merekonstruksi, melebarkan, merehabilitasi dan memelihara jalan
			Mengendalikan kinerja lalu lintas
		Peningkatan produk daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Membangun dan merehabilitasi pasar
	f. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi	Peningkatan Prestasi Olahraga	Pembangunan GOM Kecamatan
	g. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik		
	h. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air	Peningkatan kualitas infrastruktur desa	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas
	i. Mempertahankan kelangsungan ketersediaan dan pendistribusian sumber air pertanian dan air bersih perkotaan		

KOMPONEN HARMONISASI	RTRW (2016 - 2036)	PERUBAHAN RPJMD (2018 - 2023)	
	j. Meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, serta mewujudkan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi yang optimal		Betonisasi jalan desa
	k. Mengembangkan sistem penanganan persampahan melalui penyebaran lokasi pengelolaan sampah di seluruh wilayah secara merata dan memiliki keterkaitan erat dengan sistem transportasi	Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan	Menyediakan sarana prasarana persampahan
	l. Mengembangkan sarana pemakaman untuk memenuhi kebutuhan tanah kuburan yang diarahkan pada pemanfaatan lahan cadangan tanah pemakaman dan terintegrasi dengan tanah pemakaman dan terintegrasi dengan tanah pemakaman masyarakat melalui pengembangan area Tempat Pemakan Umum (TPU) regional dan lokal di setiap wilayah kecamatan, serta pengembangan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) pada kawasan yang dinyatakan memunkingkan secara teknis dan fisik lingkungan, serta tidak berdampak sosial pada lingkungan sekitarnya		Mewujudkan Bogor Antik *"Asri Tanpa Plastik"*
	m. Pengembangan sarana pendidikan dan olahraga secara merata dan berhirarki sesuai kebutuhan masyarakat		Menangani sampah berbasis Zonasi
	n. Pengembangan sarana peribadatan untuk memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat dengan memperhatikan keharmonisan kehidupan beragama dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat memalui pengembangan prasarana peribadatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat	Pembinaan kerukunan umat beragama	Menyelenggarakan bedah pesantren
			Revitalisasi Islamic Center
KEBIJAKAN DAN STRATEGI		**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
	7. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sesuai dengan kepentingan wilayah dan berdaya saing, meliputi :	Peningkatan Peluang Investasi	Mengembangkan penanaman modal dan peta investasi

KOMPONEN HARMONISASI	RTRW (2016 - 2036)	PERUBAHAN RPJMD (2018 - 2023)	
	a. Menetapkan Kawasan strategis kabupaten yang memiliki nilai strategis pertahanan dan keamanan, nilai strategis ekonomi, nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan, serta nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi		Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus
	b. Mewujudkan nilai strategis kawasan melalui penyediaan infrastruktur wilayah yang memadai dan sesuai dengan kemampuan lahan yang mampu mewujudkan fungsi Kawasan	Optimalisasi promosi investasi dan pemasaran produk	Menyelenggarakan promosi investasi
			Fasilitasi Pemasaran Produk
			Menggalakkan gerakan bela beli produk UKM/IKM
	c. Mengendalikan pertumbuhan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan nilai strategis kawasan dan/atau yang dapat mengganggu nilai strategis Kawasan	Peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi berkualitas	Membangun, merekonstruksi, melebarkan, merehabilitasi dan memelihara jalan
	Optimalisasi pemanfaaatan sumber daya alam dan buatan sesuai dengan kemampuan dan fungsi Kawasan		Mengendalikan kinerja lalu lintas
	d. Mengarahkan pengembangan dan pengendalian kawasan strategis sesuai nilai strategis kawasan melalui penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten		Menata jalur pedestrian pada ruas jalan Kandang Roda-Sentul, Tegar beriman dan kawasan GOR Pakansari
			Membangun jalan Poros Tengah Timur
			Membangun jalan Bojonggede-Kemang
			Membangun jalan lingkar Kebun Raya Cibinong
			Membuka akses lingkar jalan tambang
			Membangun jalan lingkar Gunungsindur
			Membangun Jalan Galuga-Rancabungur
			Membangun jalan lingkar Dramaga 2
			Merevitalisasi jembatan rawayan/jembatan gantung
			Menata kawasan simpang Parung
			Menyediakan fasilitas parkir yang terintegrasi
		Pengelolaan lingkungan hidup	Mengendalikan pencemaran lingkungan

Sumber : RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036, diolah 2021

Kebijakan dan strategi pengembangan penataan ruang daerah kabupaten bogor di implementasikan dalam kebijakan pengembangan wilayah yang menjadi dasar orientasi penmbangunan berbasis kewilayahan.

Pengembangan wilayah di Kabupaten Bogor dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah pengembangan yaitu WP Barat, WP Tengah dan WP Timur dengan cakupan wilayah setiap WP tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.4.
Pembagian Wilayah Pengembangan

Wilayah Pengembangan	Arahan Fungsi Wilayah Pengembangan	Sub Wilayah Pengembangan
1. WP Barat	WP Barat sebagai pengembangan kawasan perkotaan di wilayah barat dengan kesetaraan fungsi dan peran sebagai pusat pengembangan Permukiman, Perdagangan dan Jasa, Industri, Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan, Pertambangan dan Energi, Pariwisata dan Budaya, Pendidikan dan Penelitian;	1. SWP Cigudeg meliputi Kecamatan Cigudeg, Nanggung, dan Leuwisadeng
		2. SWP Parung Panjang meliputi Kecamatan Parung Panjang, Tenjo dan Rumpin
		3. SWP Leuwiliang meliputi Kecamatan Leuwiliang, Cibungbulang dan Pamijahan
		4. SWP Jasinga meliputi Kecamatan Jasinga dan Sukajaya
		5. SWP Ciampea meliputi Kecamatan Ciampea, Tenjolaya dan Dramaga
2. WP Tengah	WP Tengah sebagai pengembangan kawasan perkotaan di wilayah tengah dengan kesetaraan fungsi dan peran sebagai pusat Pemerintahan dan Penelitian, Permukiman Perkotaan, Perdagangan dan Jasa, Pelayanan Umum dan Sosial, Industri Ramah Lingkungan, Perikanan, Pariwisata dan Budaya, Konservasi Wilayah Hulu	1. SWP Cibinong meliputi Kecamatan Cibinong, Citeureup, Sukaraja, Bojonggede, Babakan Madang dan Tajurhalang
		2. SWP Parung meliputi Kecamatan Parung, Gunung Sindur, Kemang, Ciseeng dan Rancabungur
		3. SWP Cigombong meliputi Kecamatan Cigombong, Caringin dan Cijeruk
		4. SWP Ciawi meliputi Kecamatan Ciawi, Cisarua dan Megamendung
		5. SWP Ciomas meliputi Kecamatan Ciomas dan Tamansari
2. WP Timur	WP Timur sebagai pengembangan kawasan perkotaan di wilayah timur dengan kesetaraan fungsi dan peran sebagai pusat Permukiman, Perdagangan dan Jasa, Industri, Pertanian dan Peternakan, Pertambangan, Pariwisata.	1. SWP Cileungsi meliputi Kecamatan Cileungsi, Gunung Putri dan Klapanunggal
		2. SWP Jonggol meliputi Kecamatan Jonggol, Cariu, Sukamakmur dan Tanjungsari

Sumber : RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036

Peta pembagian wilayah pengembangan sebagaimana di bawah ini :

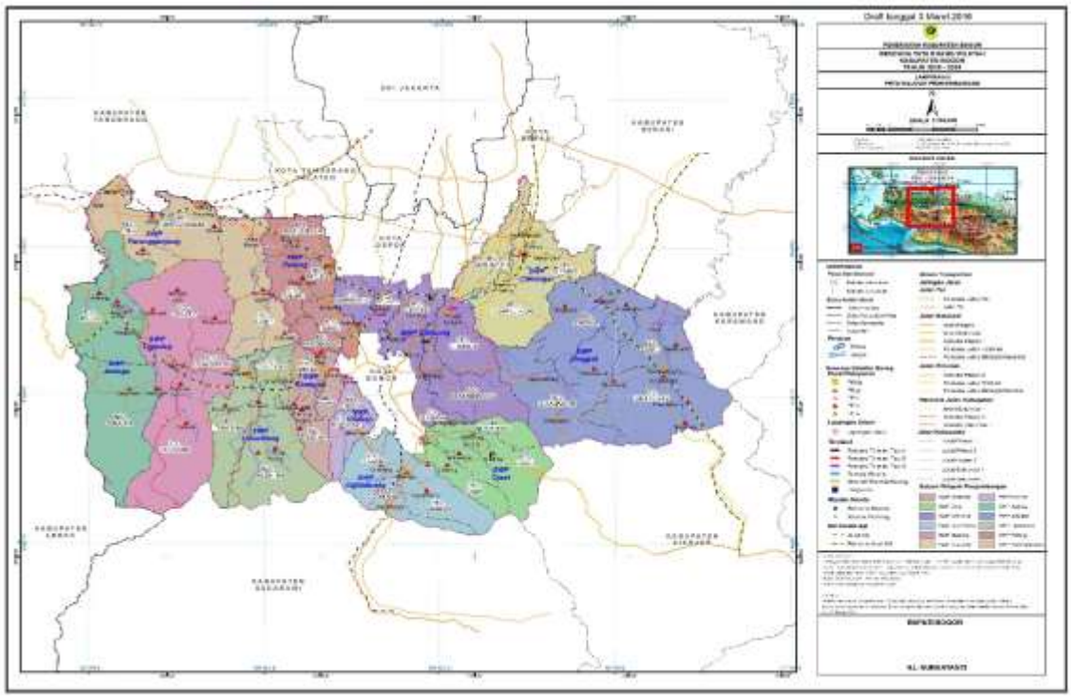

Sumber : RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036

Gambar 6.2

Peta Wilayah Pengembangan

Kebijakan dan strategi penataan ruang yang diatur dalam RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 diintegrasikan lebih detail dengan substansi Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 sebagai berikut.

Tabel 6.5.
Keselarasan Program Prioritas Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 dengan Program Perwujudan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036

No	Rencana Tata Ruang Wilayah	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
A.	**PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG**	
I	**Perwujudan Pusat Kegiatan**	
1	Perwujudan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Program Promosi Penanaman Modal; Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Program Pengelolaan Pendidikan; Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ); Program Aplikasi Informatika; Program Pengembangan UMKM; Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;

No	Rencana Tata Ruang Wilayah	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
		Program Pengelolaan Persampahan; Program Pengembangan Perumahan; Program Pengembangan Permukiman; Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; Program Penyelenggaraan Jalan
2	Perwujudan PKWp Cibinong	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Program Promosi Penanaman Modal; Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Program Pengelolaan Pendidikan; Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ); Program Aplikasi Informatika; Program Pengembangan UMKM; Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; Program Perencanaan dan Pembangunan Industri; Program Pengelolaan Persampahan; Program Pengembangan Perumahan; Program Pengembangan Permukiman; Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; Program Penyelenggaraan Jalan
3	Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Program Promosi Penanaman Modal; Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Program Pengelolaan Pendidikan; Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ); Program Aplikasi Informatika; Program Pengembangan UMKM; Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; Program Perencanaan dan Pembangunan Industri; Program Pengelolaan Persampahan; Program Pengembangan Perumahan; Program Pengembangan Permukiman; Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; Program Penyelenggaraan Jalan

No	Rencana Tata Ruang Wilayah	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
4	Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Program Promosi Penanaman Modal; Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Program Pengelolaan Pendidikan; Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ); Program Aplikasi Informatika; Program Pengembangan UMKM; Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; Program Perencanaan dan Pembangunan Industri; Program Pengelolaan Persampahan; Program Pengembangan Perumahan; Program Pengembangan Permukiman; Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; Program Penyelenggaraan Jalan
5	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Kota	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Program Pengelolaan Pendidikan; Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ); Program Aplikasi Informatika; Program Pengembangan UMKM; Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; Program Perencanaan dan Pembangunan Industri; Program Pengelolaan Persampahan; Program Pengembangan Perumahan; Program Pengembangan Permukiman; Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; Program Penyelenggaraan Jalan
6	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Desa	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Program Pengelolaan Pendidikan; Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ); Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Program Aplikasi Informatika; Program Pengembangan UMKM; Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; Program Pengelolaan Persampahan; Program Kawasan Permukiman; Program Penataan Desa; Program Peningkatan Kerjasama Desa; Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; Program Penyelenggaraan Jalan; Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

No	Rencana Tata Ruang Wilayah	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
II	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah**	
1	Jaringan Transportasi Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ); Program Penyelenggaraan Jalan; Program Pengelolaan Perkeretaapian
2	Transportsi Udara	-
III	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Energi**	
1	Peningkatan sarana pembangkit tenaga listrik	Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota
2	Jaringan transmisi tenaga listrik:	Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota
3	Jaringan pipa minyak dan gas bumi:	Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota
IV	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi**	
1	Sistem Jaringan Kabel	Program Aplikasi Informatika
2	Sistem Nirkabel	Program Aplikasi Informatika
V	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air**	
1	Wilayah Sungai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2	Daerah Irigasi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3	Cekungan Air Tanah dan Wilayah Bukan Cekungan Air Tanah	-
4	Prasarana Air Baku untuk Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
5	Pengendalian Banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
VI	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan**	
1	Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan
2	Jaringan Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
3	Jaringan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4	Jaringan Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
5	Jalur Evakuasi Bencana	Program Penanggulangan Bencana; Program Penanganan Bencana
B.	**PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG**	
I	**Perwujudan Kawasan Lindung**	
1	Perwujudan Kawasan Hutan Konservasi	Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota
2	Perwujudan Kawasan Hutan Lindung	Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota
3	Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota
4	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat	Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota
5	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; Program Pengembangan Kebudayaan
6	Kawasan Rawan Bencana Alam	Program Penanggulangan Bencana; Program Penanganan Bencana
7	Kawasan Lindung Geologi	Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota
8	Kawasan Lindung Lainnya	Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Rencana Tata Ruang Wilayah	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
II	**Perwujudan Kawasan Budidaya**	
1	Perwujudan Kawasan Peruntukkan Hutan Produksi	Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota
2	Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Perizinan Usaha; Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Pertanian
3	Perwujudan Kawasan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4	Perwujudan Kawasan Pertambangan	Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota
5	Perwujudan Kawasan Peruntukkan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri; Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
6	Perwujudan Kawasan Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi pariwisata; Program Pengembangan Kemitraan; Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7	Perwujudan Kawasan Peruntukkan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan; Program Pengembangan Permukiman; Program Kawasan Permukiman; Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
8	Perwujudan Kawasan Lainnya	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
C.	**PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA KAWASAN STRATEGIS DAERAH**	
1	Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan	Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota
2	Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi	Program Perekonomian dan Pembangunan
3	Kawasan Srategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Program Pembinaan, Pengendalian dan Pemantauan Kualitas Lingkungan
4	Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
5	Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sumber : RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036, diolah 2021

6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Terkait Pembentukan Daerah

Luasnya wilayah Kabupaten Bogor yaitu 2.986,20 Km² dengan jumlah penduduk yang sedemikian banyak 5,4 Juta jiwa (Sumber Data KBDA 2021) tentunya sangat membebani penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang harus diemban oleh satu orang

Bupati. Perbandingan Jumlah penduduk Kabupaten Bogor sekalipun disandingkan dengan jumlah penduduk 34 provinsi se-Indonesia berada diposisi 12 teratas. Hal ini yang menunjukan pemekaran daerah di wilayah Kabupaten Bogor bukan didasari atas keinginan melainkan suatu kebutuhan dengan tujuan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahetaraan masyarakat.

Untuk mewujudkan kedua usulan pemekaran di wilayah Kabupaten Bogor yaitu usulan pembentukan Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor telah telah memberikan persetujuannya. Kedua usulan pemekaran tersebut telah dituangkan dalam RPJMD 2018 – 2023 yang saat ini sedang dalam tahap revisi. Kendatipun moratorium masih diberlakukan akan tetapi Pemerintah Pusat masih memberikan ruang kepada daerah untuk mengusulkan rencana pembentukan daerah baru dengan tata cara dan persyaratan sesuai dengan UU/23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. berbeda dengan Pemerintahan Daerah sebelumnya UU/23 Tahun 2014 mensyaratkan pembentukan daerah baru melalui pembentukan daerah persiapan terlebih dahulu selama 3 s.d 5 tahun. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin berjalannya penyelenggaraan pemerintahan pada daerah baru. Berikut hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyerahan aset Induk ke daerah pemekaran;
2. Rencana penyerahan personel/pegawai daerah induk ke daerah pemekaran;
3. Persiapan pendanaan dan kemampuan keuangan daerah induk dan daerah pemekaran dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sampai dengan tanggal 15 April 2021 proses pembentukan Kabupaten Bogor Timur diagendakan rapat paripurna di hari Jumat, 16 April 2021 di DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan persetujuan antara DPRD Provinsi Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat, sedangkan untuk proses pembentukan Kabupaten Bogor Barat sudah berada di Pemerintah Pusat/Kemendagri. Dengan demikian proses di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sudah selesai sambil menunggu adanya kemungkinan perubahan data sehubungan dengan dua Peraturan Pemerintah yang dipersyaratkan UU/23 Tahun 2014

belum kunjung terbit yaitu PP Penataan Daerah dan PP Desain Penataan Daerah. Untuk memenuhi revisi RPJMD 2018-2023, berikut rencana kegiatan pemekaran daerah Kabupaten Bogor.

Tabel 6.6.
Rencana Pemekaran Daerah Kabupaten Bogor

No.	URAIAN	TAHUN		KETERANGAN
		2022	2023	
1.	Rencana Pembentukan CDP Kabupaten Bogor Barat	Kegiatan Penyesuaian/ udpdating data	Kegiatan Penyesuaian/ udpdating data	Penyesuaian/updating data berkenaan perubahan persyaratan administrasi, kewilayahan, dan kapasitas daerah sesuai dg PP yang akan diterbitkan nanti dan penyesuaian terhadap kondisi data terkini.
2.	Rencana Pembentukan CDP Kabupaten Bogor Timur	Kegiatan Penyesuaian/ udpadating data	Kegiatan Penyesuaian/ udpadating data	

Sumber : Sekretariat Daerah, 2021

6.4 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Keberadaan BUMD di Kabupaten Bogor selama periode tahun 2018-2023 diarahkan untuk mendukung tercapainya target Pancakarsa lingkup karsa Bogor Maju. Oleh karena itu, strategi daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui peningkatan kinerja BUMD. Arah kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kinerja BUMD sebagai berikut :

1. Optimalisasi peran BUMD dalam mendukung tercapainya visi dan misi daerah;
2. Pembinaan terhadap manajemen BUMD untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pencapaian target kinerja utama daerah;
3. Melaksanakan kewajiban daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah.

Adapun nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah diberikan maupun akan direncanakan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dijelaskan melalui tabel berikut ini.

Tabel 6.7.
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2019-2023

NO	BUMD	NILAI PENYERTAAN MODAL (Juta Rp)				
		REALISASI		TARGET		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	PERUMDA AIR MINUM TIRTA KAHURIPAN	40.000	-	-	-	-
		-	-	50.000	50.000	50.000
2	PERUMDA PASAR TOHAGA	-	-	-	45.000	69.462
3	PT. PRAYOGA PERTAMBANGAN DAN ENERGI	-	-	-	35.375	-
4	PT. SAYAGA WISATA BOGOR	67.840	-	-	-	-
		41.787	-	-	-	-
5	PT. BPRS BOGOR TEGAR BERIMAN	-	-	-	72.000	-
6	PT. LKM BOGOR	-	-	-	-	-
7	PD.BPR LPK PARUNGPANJANG	-	-	-	5.881	5.000
JUMLAH		**149.627**	**-**	**50.000**	**208.256**	**124.462**

Sumber : Sekretariat Daerah, 2021

6.5 Proyek Strategis Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023

Selanjutnya proyek strategis daerah yang direncanakan di wilayah Kabupaten Bogor, baik yang didanai APBN, APBD Provinsi Jawa Barat serta APBD Provinsi DKI Jakarta, digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6.8.
Rencana Proyek Strategis Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023

No	Kegiatan	Sumber Anggaran				Target
		APBN	APBD Prov. Jabar	APBD Prov. DKI Jakarta	Swasta	
1	Jalan Tol Ciawi – Sukabumi (54km)	√				2019
2	Jl. Tol Cinere – Jagorawi (14,64km)				√	2019
3	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Situ Pemda Cibinong		√			2019
4	TPPAS Regional Nambo	√	√			2022
5	Food Hubs, Kabupaten Bogor		√		√	2020
6	Pembangunan terminal parung Tipe B		√			2020

No	Kegiatan	Sumber Anggaran				Target
		APBN	APBD Prov. Jabar	APBD Prov. DKI Jakarta	Swasta	
7	Kampung Keluarga Bahagia		√			2020
8	Sekolah Perempuan Raih Cita-cita		√			2020
9	Kampung Kabagjaan		√			2020
10	Penataan Alun-Alun Kabupaten Bogor		√			2019 dan 2021
11	Revitalisasi Pasar Cisarua		√			2019 dan 2021
12	Bendungan Sukamahi	√	√			2021
13	Jalan Puncak II (67,65km)	√	√			2021
14	Fly over Bojonggede – Kemang		√			2021
15	Reaktivasi Jalur KA Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari	√	√			2021
16	KEK Lido, Kabupaten Bogor	√			√	2021
17	*Pembangunan fasilitas parkir yang terintegrasi*				√	2022
18	Bendungan Ciawi	√	√			2022
19	Jalan khusus Tambang Parung (15 km)				√	2022
20	Pembangunan Destinasi Wisata Tipe 1		√			2022
21	*Command Center* Kabupaten Bogor		√			2022
22	Pembangunan Desa Wisata Malasari		√			2023
23	Pembangunan Pusat Budaya		√			2023

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2020 diolah

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan tahun 2019-2023 yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 mengalami penyesuaian dalam perubahan, dengan pertimbangan adanya pemberlakuan kebijakan-kebijakan nasional yang tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan serta akibat terjadinya pandemi Covid-19 yang dimulai pada tahun 2020 atau di tahun ke dua pelaksanaan periode RPJMD. Penyesuaian tersebut berkonsekuensi pada pencapaian target pelaksanaan visi dan misi yang dijabarkan dalam indikator-indikator tujuan dan sasaran, serta bermuara pada penetapan program-program pembangunan daerah yang strategis serta mencakup seluruh program perangkat daerah.

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menginformasikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan seluruh program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bogor hingga akhir periode tahun 2023. Hal mendasar yang perlu dipetakan adalah kemampuan dan kekuatan pendapatan daerah untuk dibelanjakan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Kemampuan keuangan daerah tergambar dari kondisi pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah yang dibutuhkan untuk menutupi defisit belanja. Gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah sebelum dan sesudah perubahan hingga tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1a
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2019-2020

NO	URAIAN	JUMLAH REALISASI	
		2019	2020
1	2	3	4
1	**PENDAPATAN DAERAH**		
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**3.161.165.915.498,00**	**2.810.155.352.282,00**
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	2.243.429.745.163,00	1.857.411.776.716,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	141.468.140.179,00	128.914.969.533,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	57.537.749.304,00	67.102.677.276,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	718.730.280.852,00	756.725.928.757,00
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	**3.094.445.817.299,00**	**2.825.931.289.983,00**
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	315.087.463.197,00	248.356.815.110,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	2.034.853.421.000,00	1.849.796.843.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	744.504.933.102,00	727.777.631.873,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**1.882.378.141.009,00**	**2.051.093.074.739,00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	459.978.600.000,00	585.034.080.000,00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	773.953.465.729,00	726.326.745.171,00
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	513.482.851.602,00	574.120.558.252,00
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	114.790.561.426,00	153.891.135.003,00
1.3.5	Bonus Produksi	20.172.662.252,00	11.720.556.313,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**8.137.989.873.806,00**	**7.687.179.717.004,00**
2	**BELANJA DAERAH**		
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**3.541.262.768.829,00**	**3.894.967.635.559,00**
2.1.1	Belanja Pegawai	2.253.964.864.653,00	2.142.688.581.700,00
2.1.2	Belanja Hibah	240.010.963.536,00	257.143.590.699,00
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	18.933.500.000,00	52.356.765.000,00
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	165.801.722.652,00	197.781.683.786,00
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	852.673.765.914,00	850.963.209.687,00
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	9.877.952.074,00	394.033.804.687,00
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	**4.229.955.410.948,00**	**4.510.525.745.020,00**
2.2.1	Belanja Pegawai	429.357.951.915,00	300.748.722.122,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.232.903.738.362,00	2.720.826.752.985,40
2.2.3	Belanja Modal	1.567.693.720.671,00	1.488.950.269.912,60
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**7.771.218.179.777,00**	**8.405.493.380.579,00**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**366.771.694.029,00**	**(718.313.663.575,00)**
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**		
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**846.364.143.134,97**	**1.105.295.799.163,97**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	846.364.143.134,97	1.105.295.799.163,97
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**107.840.038.000,00**	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	107.840.038.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**738.524.105.134,97**	**1.105.295.799.163,97**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**1.105.295.799.163,97**	**386.982.135.588,97**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, 2021

Tabel 7.1b
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023

NO	URAIAN	TARGET (RP)		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
1	**PENDAPATAN**	**8.081.129.282.297,00**	**6.144.172.122.804,00**	**7.008.103.596.265,00**
1.1	Pendapatan Asli Daerah	3.297.695.323.957,00	3.054.110.055.899,00	3.394.647.764.271,00
1.2	Pendapatan Transfer	4.753.203.669.906,00	3.090.062.066.905,00	3.613.455.831.994,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	30.230.288.434,00	-	-
2	**BELANJA**	**8.929.584.350.843,00**	**8.142.939.011.369,00**	**7.343.431.474.843,00**
2.1	Belanja Operasi	5.467.786.152.026,00	5.019.341.906.657,00	3.586.704.344.900,00
2.2	Belanja Modal	1.947.616.004.807,00	2.106.204.852.853,00	2.391.136.229.933,00
2.3	Belanja Tak Terduga	99.546.052.393,00	90.000.000.768,00	75.000.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	1.414.636.141.617,00	927.392.251.091,00	1.290.590.900.010,00
	Surplus / (Defisit)	-848.455.068.546,00	-1.998.766.888.565,00	-335.327.878.578,00
3	**PEMBIAYAAN**	**386.982.135.600,00**	**180.959.640.000,00**	**335.327.878.578,00**
3.1	Penerimaan Pembiayaan	386.982.135.600,00	300.000.000.000,00	485.327.878.578,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	119.040.360.000,00	150.000.000.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan	-461.472.932.946,00	-1.817.807.248.565,00	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, 2021

Berdasarkan target pendapatan tahun 2022-2023, diharapkan pendapatan tetap optimis mengalami peningkatan, meskipun tidak dalam jumlah yang besar. Hal ini mengingat belum pulihnya kondisi perekonomian daerah yang hingga saat ini masih dipengaruhi oleh pandemi Covid-19.

Di sisi lain, belanja tetap diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan wajib pelayanan dasar, pencapaian target kinerja daerah, serta pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan kewenangan daerah, baik bersifat operasional rutin maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Pembiayaan daerah akan dialokasikan untuk penyertaan modal BUMD serta pemanfaatan dana cadangan dalam rangka mempersiapkan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Adapun SiLPA diharapkan dapat ditekan secara maksimal, dengan mengupayakan pelaksanaan kegiatan tepat waktu dan tepat kelola.

Dengan demikian, diharapkan pembiayaan dapat menutup defisit belanja secara logis, sesuai kemampuan pengelolaan keuangan daerah.

Adanya penurunan kemampuan pendanaan baik pusat maupun daerah berimplikasi pada turunnya serapan dana dari pos non APBD Kabupaten Bogor. Namun, di luar kerangka pendanaan yang telah direncanakan, Pemerintah Kabupaten Bogor akan tetap mengupayakan pengajuan pengusulan dana dari berbagai sumber, yaitu :

1. Pengusulan pendanaan bersumber dana APBN;
2. Pengusulan pendanaan bersumber dana APBD Provinsi (Jawa Barat, DKI Jakarta, atau provinsi/kabupaten/kota lainnya);
3. Pengusulan pendanaan bersumber dana kerjasama dengan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pendanaan pembangunan melalui penggiatan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan dengan mekanisme yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Sumber-sumber pendanaan lainnya yang berkembang seiring dengan penerapan dan arahan kebijakan nasional.

7.2 Program Perangkat Daerah

Penamaan program perangkat daerah telah disesuaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program perangkat daerah secara umum menggambarkan keseluruhan program, baik yang secara strategis mendukung pencapaian target kinerja daerah, maupun program yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam rangka mendukung ketercapaian target kinerja perangkat daerah. Penerapan program perangkat daerah telah mengacu pada konsep penerapan kinerja *outcome*, atau dengan kata lain berorientasi pada hasil yang diharapkan dengan pertimbangan jumlah program yang efektif dan efisien sesuai pembakuan yang dilakukan secara nasional.

Pemilihan program perangkat daerah secara nasional dilakukan dengan mempertimbangkan :

1. Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, serta strategi dan arah kebijakan;
2. Pencapaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan untuk menunjang optimalnya pelaksanaan kinerja perangkat daerah;
3. Upaya penyelesaian permasalahan dan isu strategis daerah, terutama yang menjadi prioritas pembangunan hingga tahun 2023;
4. Upaya pencapaian target pelayanan sesuai ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
5. Upaya pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDG's);
6. Upaya tanggap terhadap penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi daerah.

Mengacu pada prioritas pembangunan khususnya tahun 2022 dan 2023 yang diarahkan pada pemulihan ekonomi, maka program-program pembangunan diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19. Upaya tanggap terhadap pemulihan ekonomi daerah dilakukan secara bertahap melalui fase penyelamatan yang dimulai sejak tahun 2020 sampai tahun 2021, fase pemulihan tahun 2022 dan fase normalisasi diharapkan mulai berjalan di tahun 2023. Fase penyelamatan adalah upaya penyelamatan terhadap tenaga kerja dan usaha ekonomi di berbagai sektor yang terdampak Covid-19. Fase pemulihan adalah upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi berbagai sektor serta penyerapan tenaga kerja. Sedangkan fase normalisasi adalah upaya melanjutkan program pemulihan sektor ekonomi secara normal.

Program perangkat daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah diarahkan pada 4 fokus, yaitu : (a) Peningkatan daya beli, (b) Peningkatan kesempatan kerja, (c) Peningkatan produksi dan pemasaran, serta (d) Penguatan dunia usaha.

Program perangkat daerah Kabupaten Bogor disajikan berdasarkan urusan/fungsi penunjang seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7.2

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2019

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
I.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
I.1	PENDIDIKAN									
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	43,28	1.236.820.354	43,71	2.465.197.500	68,58	3.126.937.305	DINAS PENDIDIKAN
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,76	334.812.391.646	100,00	36.744.005.800	99,21	487.001.152.920	DINAS PENDIDIKAN
		Nilai Rata-Rata UN SD	Point	74,60		77,98		71,06		DINAS PENDIDIKAN
3	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Utama SD	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	88,95		91,39	85.810.423.000	89,45	86.234.492.570	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	88,75		89,03		124,48		DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	97,45		97,46		138,53		DINAS PENDIDIKAN
		% SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa	%	48,11		53,39		46,26		DINAS PENDIDIKAN
		% SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel	%	45,26		50,73		46,91		DINAS PENDIDIKAN
		Rasio ketersediaan SD-MI terhadap penduduk usia 7-12 tahun	Sekolah	36,71		36,21		52,00		DINAS PENDIDIKAN
		% SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap	%	93,91		95,50		94,63		DINAS PENDIDIKAN
4	Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Utama SD	Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik	%	88,95		91,39	120.355.226.900	89,45	144.073.856.741	DINAS PENDIDIKAN
5	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang SD	Angka Putus Sekolah SD-MI	%	0,10		0,09	7.400.700.000	0,06	16.332.497.478	DINAS PENDIDIKAN
6	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang SD	Persentase sekolah jenjang SD yang terakreditasi minimal B	%	78,17		82,53	10.980.000.000	97,40	14.479.021.025	DINAS PENDIDIKAN
7	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Utama SMP	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	83,21		83,54	21.411.454.600	165,76	26.283.678.504	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/PB	%	92,69		92,70		227,22		DINAS PENDIDIKAN
		% SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa	%	73,00		75,74		62,67		DINAS PENDIDIKAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
		% SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel	%	45,26		50,73		72,56		DINAS PENDIDIKAN
		Rasio ketersediaan SMP-MTs terhadap penduduk usia 13 - 15 tahun	Sekolah	31,15		31,01		77,00		DINAS PENDIDIKAN
		% SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk setiap orang	%	92,02		93,51		91,23		DINAS PENDIDIKAN
		% SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan dilengkapi meja kursi	%	77,79		82,23		76,60		DINAS PENDIDIKAN
8	Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Utama SMP	Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik	%	92,13		93,08	14.039.000.000	92,05	18.950.644.086	DINAS PENDIDIKAN
9	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang SMP	Angka Putus Sekolah SMP-MTs	%	0,27		0,26	5.281.000.000	0,20	10.625.276.336	DINAS PENDIDIKAN
10	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang SMP	Persentase sekolah jenjang SMP yang terakreditasi minimal B	%		-		80.000.000.000	85,10	96.703.551.600	DINAS PENDIDIKAN
11	Program Pendidikan Non-Formal	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	88,75	19.497.239.510	89,03	34.943.107.000	124,48	33.270.955.604	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	83,21		83,54		165,76		DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	97,45		97,46		138,53		DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/PB	%	92,69		92,70		227,22		DINAS PENDIDIKAN
12	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	82,97	119.593.470.850	85,39	147.189.299.050	76,90	142.144.429.515	DINAS PENDIDIKAN
		% SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik	%	77,84		82,26		79,18		DINAS PENDIDIKAN
		% SD yang memiliki 6 orang guru	%	96,76		97,40		96,26		DINAS PENDIDIKAN
		% SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran	%	31,20		36,11		32,73		DINAS PENDIDIKAN
		% SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4	%	99,84		99,89		99,78		DINAS PENDIDIKAN
		% SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	88,86		91,10		87,09		DINAS PENDIDIKAN
		% SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70%	%	87,23		89,84		86,91		DINAS PENDIDIKAN
		% guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35%	%	26,56		31,59		26,32		DINAS PENDIDIKAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
		% Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik	%	84,31		87,47		85,36		DINAS PENDIDIKAN
		% Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik	%	39,33		43,58		39,55		DINAS PENDIDIKAN
		Rasio Guru SD-MI / Murid	Orang	412,56		393,78		406,00		DINAS PENDIDIKAN
		Rasio Guru SMP-MTs / Murid	Orang	512,21		502,31		527,00		DINAS PENDIDIKAN
		Rasio guru SD-MI/rombel	Point	1,15		1,10		1,20		DINAS PENDIDIKAN
13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang dilayani	%	95,11	5.114.648.569	95,11	5.647.756.600	100,00	5.903.433.902	DINAS PENDIDIKAN
14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang ditingkatkan	%	91,46	718.453.985	91,46	30.773.216.700	99,99	4.367.673.400	DINAS PENDIDIKAN
15	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	%			100,00		100,00	2.947.913.100	DINAS PENDIDIKAN
16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang ditingkatkan	%	97,75	9.580.000	97,75	58.800.000	100,00	43.919.000	DINAS PENDIDIKAN
17	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang ditingkatkan	%	94,87	1.822.296.100	94,87	2.444.913.400	100,00	2.642.050.700	DINAS PENDIDIKAN
18	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase pelayanan manajemen pendidikan	%	94,90	2.137.367.950	94,90	1.195.426.450	100,00	1.139.928.000	DINAS PENDIDIKAN
I.2	**KESEHATAN**									
1	Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia serta Gizi Masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	angka				3.806.205.000			DINAS KESEHATAN
		Jumlah Kematian bayi	jiwa	109,00		95,00		104,00	23.598.947.065	DINAS KESEHATAN
		Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	angka							DINAS KESEHATAN
		Jumlah kematian ibu	jiwa	55,00		55,00		72,00		DINAS KESEHATAN
		Persentase balita gizi buruk	%	0,0138						DINAS KESEHATAN
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	77.6		80,25		78,10		DINAS KESEHATAN
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	88,93		90,00		89,89		DINAS KESEHATAN
		Cakupan kunjungan bayi	%	94,16		95,00		96,40		DINAS KESEHATAN
2	Program Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat	Cakupan rumah bebas jentik	%	85,79		95,00	555.061.000	91,06	4.148.369.600	DINAS KESEHATAN
		Persentase TTU memenuhi syarat	%	32,75		79,72		80,00		DINAS KESEHATAN
		Persentase TPM memenuhi syarat	%	51,65		90,96		91,40		DINAS KESEHATAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
		Cakupan JAGA	%	65,85		72,63		74,08		DINAS KESEHATAN
		Cakupan SAB	%	77,44		72,57		73,60		DINAS KESEHATAN
3	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga yang Menerapkan PHBS	%	48,35	1.975.349.209	70,00	1.726.957.000	50,55	4.530.657.145	DINAS KESEHATAN
4	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan	%	80,70	147.595.026.936	85	128.724.788.000	76,81	179.527.697.206	DINAS KESEHATAN
5	Program Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	%			75,00	108.930.841.981	106,99	174.114.526.727	DINAS KESEHATAN
6	Program Dukungan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	78,22		80,89	19.962.341.000	78,82	22.868.504.064	DINAS KESEHATAN
7	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	%	96,47		85,00	2.013.886.000	115,79	11.229.954.742	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	16,45		100,00		44,67		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Desa/Kelurahan UCI	%	83,00		87,00		90,11		DINAS KESEHATAN
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	82,00		83,00		63,00		DINAS KESEHATAN
		Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	91,95		0,87		92,30		DINAS KESEHATAN
		Angka Penemuan Kasus Baru Kusta (CDR)	%	5,6		5,00		5,70		DINAS KESEHATAN
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	8,27		100,00		63,24		DINAS KESEHATAN
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	11,70		100,00		74,27		DINAS KESEHATAN
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	0,84		100,00		80,55		DINAS KESEHATAN
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	100,00		100,00		80,10		DINAS KESEHATAN
8	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Pengadaan Obat Essensial	%	100,00	10.289.079.760	100,00	9.465.268.000	86,14	10.274.940.876	DINAS KESEHATAN
9	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Ratio	1:13.808	48.264.073.415	1 : 9,110	30.335.688.841	52,85	35.574.379.810	DINAS KESEHATAN
10	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang diakomodir	%			100,00		100,00	55.665.000	DINAS KESEHATAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP	Score	B	83.963.928.716	B	29.840.401.000	B	30.996.357.244	DINAS KESEHATAN
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase aset dalam kondisi baik		0,85	3.939.874.571	0,85	627.846.000	100,00	706.329.410	DINAS KESEHATAN
13	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	%			100,00		100,00	197.115.000	DINAS KESEHATAN
14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Temuan materiil	temuan	2	3.969.259.995	2	143.875.000	2,00	131.075.000	DINAS KESEHATAN
15	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100,00	1.360.854.089	100,00	1.168.922.000	100,00	1.131.410.500	DINAS KESEHATAN
16	Program Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas	Terwujudnya Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%			100,00	53.929.666.000	100,00	52.537.755.854	DINAS KESEHATAN
17	Program Upaya Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Pelayanan Kesehatan Kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	%			80,00	3.358.871.000	78,72	1.516.218.978	DINAS KESEHATAN
18	Program Pengelolaan Administrasi, Sarana Prasarana dan Sumberdaya Rumah Sakit Cibinong	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%			70,00	17.991.970.000	77,00	17.583.603.734	DINAS KESEHATAN
19	Program Pengelolaan Administrasi, Sarana Prasarana dan Sumberdaya Rumah Sakit Ciawi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%			70,00	15.051.557.500	78,00	14.875.096.732	DINAS KESEHATAN
20	Program Pengelolaan Administrasi, Sarana Prasarana dan Sumberdaya Rumah Sakit Leuwiliang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%			70,00	9.873.158.000	78,00	8.612.092.673	DINAS KESEHATAN
21	Program Pengelolaan Administrasi, Sarana Prasarana dan Sumberdaya Rumah Sakit Cileungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%			70,00	15.275.612.000	80,00	14.014.040.345	DINAS KESEHATAN
22	Program Penatausahaan Keuangan Rumah Sakit Cibinong	Current Rasio (CR)	%			85,00	220.000.000	93,25	213.987.275	DINAS KESEHATAN
23	Program Penatausahaan Keuangan Rumah Sakit Ciawi	Current Rasio (CR)	%			85,00	385.000.000	243,00	350.508.986	DINAS KESEHATAN
24	Program Penatausahaan Keuangan Rumah Sakit Leuwiliang	Current Rasio (CR)	%			85,00	16.927.000	710,87	16.769.775	DINAS KESEHATAN
25	Program Penatausahaan Keuangan Rumah Sakit Cileungsi	Current Rasio (CR)	%			85,00	310.000.000	116,00	273.221.600	DINAS KESEHATAN
26	Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Cibinong	Akreditasi Rumah Sakit	%			1,00	750.000.000	100,00	682.224.645	DINAS KESEHATAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
27	Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Ciawi	Akreditasi Rumah Sakit	%			1,00	100.000.000	100,00	160.870.944	DINAS KESEHATAN
28	Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Leuwiliang	Akreditasi Rumah Sakit	%			1,00	266.662.000	100,00	257.752.995	DINAS KESEHATAN
29	Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Cileungsi	Akreditasi Rumah Sakit	%			1,00	300.000.000	100,00	256.235.731	DINAS KESEHATAN
30	Program Pelayanan Medik RSUD Cibinong	Indeks Mutu Pelayanan Medik	%			75,00	52.042.000.000	75,00	72.699.287.028	DINAS KESEHATAN
31	Program Pelayanan Medik RSUD Ciawi	Indeks Mutu Pelayanan Medik	%			75,00	37.177.312.000	89,00	52.283.665.510	DINAS KESEHATAN
32	Program Pelayanan Medik RSUD Leuwiliang	Indeks Mutu Pelayanan Medik	%			75,00	34.631.994.000	93,00	44.060.491.064	DINAS KESEHATAN
33	Program Pelayanan Medik RSUD Cileungsi	Indeks Mutu Pelayanan Medik	%			75,00	33.840.975.000	81,00	36.097.510.018	DINAS KESEHATAN
34	Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Cibinong	Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan	%			75,00	5.562.500.000	63,22	6.860.712.673	DINAS KESEHATAN
35	Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Ciawi	Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan	%			75,00	6.781.023.000	92,92	6.338.811.303	DINAS KESEHATAN
36	Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Leuwiliang	Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan	%			75,00	4.321.568.000	90,83	4.006.164.204	DINAS KESEHATAN
37	Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Cileungsi	Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan	%			75,00	5.192.329.000	83,10	4.652.844.379	DINAS KESEHATAN
38	Program Promosi Kesehatan RSUD Ciawi	Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR)	%	69,38		65,00	192.900.000	72,91	183.806.536	DINAS KESEHATAN
39	Program Promosi Kesehatan RSUD Leuwiliang	Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR)	%	94,38		65,00	195.860.000	87,90	194.132.000	DINAS KESEHATAN
40	Program Promosi Kesehatan RSUD Cileungsi	Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR)	%	62,46		65,00	150.000.000	71,11	136.340.500	DINAS KESEHATAN
41	Program Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Cibinong	Tingkat Kepuasan Pasien	%			70,00	141.000.000.000	75,00	142.484.892.407	DINAS KESEHATAN
42	Program Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Ciawi	Tingkat Kepuasan Pasien	%			70,00	129.401.136.000	79,17	149.074.691.568	DINAS KESEHATAN
43	Program Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Leuwiliang	Tingkat Kepuasan Pasien	%			70,00	79.644.488.000	77,87	83.649.948.848	DINAS KESEHATAN
44	Program Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Cileungsi	Tingkat Kepuasan Pasien	%			70,00	37.258.284.000	79,10	31.254.152.995	DINAS KESEHATAN
I.3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Persentase realisasi penyelesaian pembangunan jalan baru	KM	-	236.104.186.451	2,00	376.757.323.000	1,17	421.146.581.837	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			%	-		16,67		9,75		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase capaian peningkatan jalan kabupaten	%	7,67		9,59		9,39		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase capaian peningkatan jembatan kabupaten	%	3,78		1,98		1,44		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Program Pembangunan Jalur Pedestrian	Peningkatan persentase capaian penyediaan pembangunan jalur pedestrian	%	2,08	1.538.940.000	2,08	7.075.316.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Panjang Jalan yang memiliki jalur pedestrian yang berkualitas	meter	632,00						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	Program Penyediaan drainase dan pengamanan jalan	Persentase jalan yang memiliki saluran drainase/saluran pembuangan air	%	31,02	2.816.690.400	31,07	31.374.361.000	28,66	10.914.383.800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung rawan longsor	%	11,19		30,60		34,54	16.604.165.350	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang direhabilitasi	%	1,55	56.278.813.713	0,59	107.181.019.000	0,72	152.204.915.895	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase jembatan yang direhabilitasi	%	0,36		0,18		0,18		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase capaian jalan yang dipelihara	%	57,03		55,74		71,78		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase jembatan yang dipelihara	%	100,00		100,00		100,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase penyediaan kebutuhan penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan	%			100,00		100,00	274.049.900	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
5	Program Pengelolaan Laboratorium dan Bahan Konstruksi	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan bahan laboratorium dan bahan konstruksi	%		15.695.619.000	100,00	33.086.800.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	Program Pengelolan Peralatan dan Perbengkelan	Persentase ketersediaan dan terpeliharanya sarana peralatan kebinamargaan	%		499.378.500	100,00	2.165.325.000		2.856.264.978	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	Program Pengawasan dan Pengendalian Kondisi Jalan dan Jembatan	Persentase penyediaan data dan informasi kondisi dan pemanfaatan jalan dan jembatan	%		795.103.900	100,00	3.520.458.000	100,00	1.092.743.500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Persentase daerah irigasi yang ditingkatkan	%	3,84	75.653.386.919	1,62	75.237.649.000	2,22	75.833.715.375	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase daerah irigasi yang direhabilitasi	%	4,85		2,63		4,85		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase daerah irigasi kabupaten yang dipelihara	%	23,74		23,64		23,64		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9	Program Pengendalian Daya Rusak Air	Persentase pembuatan TPT saluran dan TPT di wilayah aliran sungai rawan longsor	%		15.792.483.955	15,54	39.840.649.000	19,59	35.316.796.465	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10	Program Pengelolaan Penataan Situ	Persentase penataan situ	%			12,50	435.000.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11	Program Pengawasan Jaringan Irigasi	Persentase penyediaan data dan informasi kondisi jaringan irigasi	%	100,00	738.089.000	100,00	1.059.396.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
12	Program Pembangunan Drainase Lingkungan	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali setahun	%		10.820.415.600	23,78	9.906.690.000	19,26	10.914.383.800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	Program Pengembangan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	%	70,07	43.444.229.382	70,54	54.816.371.000	70,84	58.107.602.369	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	12,68		16,70		13,61		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	68,53		68,94		59,43		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	68,53		68,94		59,43		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
14	Program Pelayanan Air Limbah	Persentase capaian pelayanan air limbah domestik	%		1.579.593.600	100,00	4.100.000.000	55,79		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
15	Program Pengelolaan Jasa Konstruksi	Persentase fasilitasi bantuan teknis bangunan gedung pemerintahan	%		21.382.632.473	75,00	4.592.478.000	100,00	44.350.929.690	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase rekomendasi pemanfaatan sarana dan prasarana ke-PU-an yang diberikan	%			91,00		100,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase tenaga terampil konstruksi yang dilatih untuk mendapat sertifikat	%			33,33		35,33		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
16	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%		1.683.877.350	100,00	1.200.000.000	100,00	315.093.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
17	Program Pemanfaatan Ruang	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Rasio	0,05	455.045.250	0,05	1.694.160.000	0,05	1.081.808.700	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
18	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	81,40	557.938.100	81,50	1.760.766.000	78,50	535.993.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
19	Program Pengadaan Tanah	Persentase realisasi pengadaan tanah	%		52.604.090.600	8,90	35.586.052.000			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah kegiatan	kegiatan			16,00	6.980.948.000	16,00	6.929.639.636	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah kegiatan	kegiatan			6,00	4.780.525.000	7,00	7.681.004.201	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
22	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah kegiatan	kegiatan			1,00		1,00	200.571.650	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
23	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatan	kegiatan			2,00	537.995.000	2,00	392.300.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
24	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah kegiatan	kegiatan			9,00	1.252.022.000	9,00	1.256.515.500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
I.4	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**									
1	Program Penataan Lingkungan Permukiman	Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	0,23	1.437.513.477	0,067	3.283.533.000	0,066	2.964.976.184	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Luas area kawasan permukiman yang tertata	M2			1.049.377,78		1.049.377,78		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Rasio permukiman layak huni	rasio			0,997		0,998		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota, Taman perkantoran dan Taman jalur	Lokasi	42,00	3.776.832.200		4.178.300.500		18.194.217.464	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Jumlah taman/ruang publik terbangun	lokasi			149		149		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
3	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	‰	33,37	4.017.844.600	35,18	4.549.162.500	35,18	4.453.355.496	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Persentase TPU yang tertata	%			47,55		47,55		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4	Program Pengendalian dan Penataan Reklame	Jumlah jalur jalan strategis reklame yang tertata	Jalur	15,00	1.770.347.393		1.562.740.000		2.141.198.171	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Persentase jalur strategis reklame yang tertata	%			50,00		50,00		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5	Program Penataan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase PSU perumahan yang tertata	%			21,22	348.120.000	21,22	423.806.550	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
6	Program Pengembangan Perumahan	persentase perumahan yang tertata	%			93,58	2.928.983.000	93,58	2.398.908.050	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Rasio rumah layak huni	rasio			0,24		0,24		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kegiatan	kegiatan	16	4.099.941.727	15	4.502.654.800	15	4.718.734.700	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kegiatan	kegiatan	8	2.065.064.748	4	1.055.460.000	5	1.452.641.400	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
9	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Kegiatan	kegiatan	1	76.990.000	1	198.000.000	1	102.625.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
10	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Kegiatan	kegiatan	2	199.050.000	2	629.782.000	2	365.443.900	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Kegiatan	kegiatan	8	255.027.238	9	369.966.400	9	356.966.400	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
I.5	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**									
1	Program Penegakan Perda	Persentase Penegakan PERDA	%	100,00	592.503.000	100,00	300.000.000	100,00	317.055.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	Program Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100,00	7.052.082.000	100,00	7.710.693.000	100,00	7.476.169.200	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3	Program Perlindungan Masayarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,28	11.040.952.000	108,75	608.387.000	100,00	2.200.791.750	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
4	Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat dalam Penanganan Tramtibum	Jumlah Pembinaan Penegakan Perda dan Tramtibum Kepada Aparatur dan Masyarakat dalam satu tahun	orang			35,00	878.000.000	35,00	840.859.800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	1.877.417.000	100,00	1.887.202.000	100,00	1.862.656.187	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	805.300.000	100,00	493.450.000	100,00	1.057.544.107	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	157.514.000	100,00	100.000.000	100,00	91.515.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	326.760.000	100,00	280.460.000	100,00	900.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	164.097.000	100,00	280.460.000	100,00	277.158.800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Alam	Persentase Mitigasi Bencana yang berhasil dilaksanakan	%	N/A	N/A	10,00	680.250.000	20,00	1.373.702.250	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	Program Penanggulangan Desa Rawan Bencana Alam	Persentase Desa Siaga Bencana	%	N/A	N/A	5,00	574.740.000	14,00	765.725.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3	Program Peningkatan Penanggulangan Bencana Alam	Rata-rata waktu penanganan bencana alam (24 jam)	%	N/A	N/A	100,00	2.973.831.000	115,16	3.134.825.408	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4	Program Pemulihan Pasca Bencana Alam	Persentase pelaksanaan pemulihan di daerah terkena bencana alam	%	N/A	N/A	20,00	625.000.000	100,00	601.728.500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	1.533.331.762	100,00	1.260.000.000	98,17	1.661.608.703	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
6	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	6.497.189.498	100,00	645.000.000	100,00	742.552.200	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	99.945.800	100,00	100.000.000	100,00	217.745.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaa Aparatur	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	190.700.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	499.697.400	100,00	598.855.000	100,00	760.000.174	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	Program Penanganan Kebakaran	Cakupan Pelayanan bencana kebakaran	%	N/A	N/A	27,98	11.560.454.200	51,56	9.808.035.100	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
2	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Kebakaran	Persentase kapasitas masyarakat dan petugas pemadam kebakaran	%	N/A	N/A	11,67	592.400.000	9,08	293.944.340	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
3	Program Pengawasan dan Proteksi Kebakaran	Persentase inspeksi pengawasan dan proteksi kebakaran	%	N/A	N/A	10,00	500.600.000	10,00	823.907.970	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	1.093.453.072,00	100,00	1.067.990.000	73,33	2.066.975.905	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	34.260.708.425	57,14	26.864.900.000	100,00	2.363.543.450	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	392.676.000	100,00	45.825.000	100,00	133.889.700	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	8.750.000	100,00	25.000.000	100,00	12.900.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	116.628.250	100,00	540.622.000	100,00	492.113.600	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
I.6	**SOSIAL**									
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	0,47	14.908.960.835	0,49	5.007.013.000	0,49	3.916.567.120	DINAS SOSIAL
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang Tertangani	%	2,00	2.605.358.524	2,11	2.603.532.000	2,11	2.708.437.250	DINAS SOSIAL

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
3	Program Pembinaan para Penyandang Disabilitas dan Trauma	Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	40,00	328.994.800	20,00	1.200.000.000	3,47	955.312.050	DINAS SOSIAL
4	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang Dilatih	%	37,26	4.469.563.250	37,26	7.184.516.000	14,75	6.875.705.740	DINAS SOSIAL
5	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	8.623.953.779	100,00	1.740.117.200	100,00	1.754.519.251	DINAS SOSIAL
6	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	42,86	4.656.476.631	87,50	9.407.867.000	79,00	7.860.193.244	DINAS SOSIAL
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	50,00	294.956.000	100,00		100,00	45.055.000	DINAS SOSIAL
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	67.810.000	100,00	113.000.000	50,00	97.020.800	DINAS SOSIAL
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	3.445.498.509	100,00	441.163.700	88,89	433.009.300	DINAS SOSIAL
II	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**									
II.1	**TENAGA KERJA**									
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Org	420,00	3.940.997.280		2.860.765.000		2.820.779.450	DINAS TENAGA KERJA
		Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kualitasnya	Org			180,00		180,00		DINAS TENAGA KERJA
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%			66,44		68,22		DINAS TENAGA KERJA
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja	%	62,71	701.481.400		2.310.683.000		2.253.923.800	DINAS TENAGA KERJA
		Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%			11,94		16,37		DINAS TENAGA KERJA
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%			40,00		66,67		DINAS TENAGA KERJA
3	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah Kasus yang masuk	Kasus	153,00	674.894.775		1.288.418.000		1.207.319.700	DINAS TENAGA KERJA
		Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%			54,13		54,47		DINAS TENAGA KERJA
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%			35,00		21,74		DINAS TENAGA KERJA
4	Program peningkatan kompetensi tenaga kerja	Besaran tenaga kerja yang lulus uji kompetensi	%			92,86	1.033.731.000	98,93	993.224.700	DINAS TENAGA KERJA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Keg	14,00	1.863.935.614	14,00	2.264.896.000	14,00	2.148.482.958	DINAS TENAGA KERJA
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Keg	10,00	843.877.460	7,00	1.721.775.000	9,00	1.672.505.946	DINAS TENAGA KERJA
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Peningkatan Disiplin Aparatur	Keg			1,00	42.875.000	1,00	40.515.000	DINAS TENAGA KERJA
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Keg	1,00	44.910.000	1,00	46.250.000	1,00	46.250.000	DINAS TENAGA KERJA
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Keg	8,00	431.042.700	9,00	637.122.000	9,00	613.899.200	DINAS TENAGA KERJA
II.2	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
1	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	12,78	511.321.000	27,80	1.210.397.665	12,78	1.162.412.015	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	Program Perlindungan Hak Perempuan	Rasio KDRT	%	0,00		0,00	495.175.410	0,00	760.243.850	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
3	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase PD yang memiliki data anak	%			20,00	757.597.158	13,00	1.510.919.950	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4	Program Perlindungan Anak	Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	%			13,00	281.793.000	13,00	349.769.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
II.3	PANGAN									
1	Program pengembangan konsumsi dan penganekaragaman pangan	Skor Angka Kecukupan Energi	%	105,80		105,60	4.992.250.000	107,10	1.857.042.902	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Skor Angka Kecukupan Energi	%	110,90		111,10		115,40		DINAS KETAHANAN PANGAN
2	Program pengembangan ketersediaan dan kemandirian pangan	Ketersediaan Energi per Kapita	%	102,26		102,50	1.671.368.000	104,11	834.209.177	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Ketersediaan Protein per Kapita	%	143,68		144,00		141,70		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Ketersediaan Pangan Utama	%	63,00		38,33		43,88		DINAS KETAHANAN PANGAN
3	Program Mitigasi dan Penanganan Rawan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	NA		4,37	2.298.421.260	19,00	554.198.700	DINAS KETAHANAN PANGAN
4	Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	%	91,00		91,50	2.682.933.000	85,71	1.822.374.655	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	%	95,02		100,00		95,70		DINAS KETAHANAN PANGAN
5	Program Pengembangan Pengawasan, Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	91,00		91,50	3.863.113.600	81,13	2.119.271.439	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	3.095.439.496	100,00	2.417.660.250	100,00	1.823.419.254	DINAS KETAHANAN PANGAN
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya kecepatan, kenyamanan, dan keamanan kerja aparatur	%	100,00	1.374.300.000	100,00	3.757.240.000	100,00	3.157.406.059	DINAS KETAHANAN PANGAN
8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	%			100,00	137.500.000	100,00	50.950.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur	%	100,00	552.520.000	100,00	561.703.000	100,00	236.425.050	DINAS KETAHANAN PANGAN
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya perencanaan dan pelaporan yang akuntabel	%	100,00	906.900.000	100,00	488.229.752	100,00	574.670.279	DINAS KETAHANAN PANGAN
II.4	**PERTANAHAN**									
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Sertifikasi kepemikikan tanah aset Pemda	Bidang	75	762.748.088		1.452.725.000		1.298.419.025	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Sertifikasi kepemikikan tanah masyarakat Pemda melalui Program PTSL	Bidang	80.000						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Jumlah aset pemda yang terdaftar	Bidang			80		80	1.298.048.585	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Jumlah Tanah Masyarakat yang terdaftar melalui Program Pemerintah	Bidang			75.000		75.000		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
II.5	**LINGKUNGAN HIDUP**									
1	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Pembuatan Lubang Biopori	Persen	50,00	439.764.000	50,00	424.108.550		578.839.450	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
2	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Peningkatan Pemulihan Lahan	Lokasi	6,00	666.089.000	7,00	840.000.000	7,00	765.355.400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Sekolah yang berbudaya lingkungan dan Kampung Ramah Lingkungan	point	220,00	2.066.057.000	341,00	2.110.927.000	200,00	3.105.491.500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah Perusahaan yang telah memenuhi persyaratan administrasi teknis dalam pengendalian pencemaran udara	Persen	91,00	80.708.000	72,92	205.900.000	70,00	205.900.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Perusahaan yang telah melakukan Pelaporan Dokumen Lingkungan	Persen	73,00	4.148.244.000		3.802.729.968		4.454.045.958	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah Perusahaan yang telah memenuhi persyaratan administrasi teknis dalam pengendalian pencemaran air	Persen	93,00		48,05				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pelayanan pengelolaan sampah	Persen	60,00	45.517.580.000	80,00	42.284.356.355		48.329.884.243	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan	Persen	100,00	5.488.616.000	100,00	4.249.676.327	100,00	4.606.181.459	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yg berkualitas untuk seluruh pegawai	Persen	100,00	32.225.210.000	100,00	44.142.561.000	100,00	46.346.188.051	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	%			100,00		100,00	107.070.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas SDM	Persen	100,00	104.500.000	100,00	104.500.000	100,00	128.400.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	Persen	100,00	452.861.000	100,00	734.191.800	100,00	764.872.650	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
II.6	**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang Melakukan Pemanfaatan Data dan Kerjasama Pelayanan kependudukan	unit	5	13.482.117.903	6	570.688.000	5	557.347.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	Angka Rasio	1,08	2.300.255.000	1,00	4.066.699.000	1,05	11.992.291.119	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Rasio bayi berakte kelahiran	Angka Rasio	1,00	737.510.000	1,00	1.212.619.000	1,00	1.179.186.900	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengolahan NIK dan Biodata penduduk dalam SIAK	%	-	-	100,00	3.100.457.000	100,00	2.764.841.590	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan	%	100,00	3.056.152.711	100,00	4.099.192.000	100,00	5.577.317.067	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan	%	100,00	9.401.303.747	100,00	9.706.274.000	88,89	9.814.386.702	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan	%			100,00		100,00	42.075.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan	%	100,00	79.375.000	100,00	67.325.000	100,00	66.625.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan	%	100,00	205.572.000	100,00	452.209.000	100,00	468.885.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
II.7	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1	Program Pembinaan Dan Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	Jumlah desa yang dibina dalam pengelolaan keuangan dan aset desa	desa			416,00	2.017.577.000	416,00	810.227.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	Program Penataan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dalam penataan administrasi pemerintahan desa	desa			416,00	4.899.669.000	-	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3	Program Pembinaan Penataan Desa	Tingkat Perkembangan Desa					3.524.781.000		879.702.100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Jumlah desa cepat berkembang	desa			16,00		105,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Jumlah desa berkembang	desa			140,00		299,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Jumlah desa kurang berkembang	desa			260,00		12,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	orang			416,00	4.088.298.000	416,00	354.746.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5	Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Perdesaan	LPM Berprestasi	lembaga			4,00	7.350.000.000	4,00	775.343.200	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		PKK aktf	%			100,00		100,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
		Posyandu aktif	%			100,00		100,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Jumlah pengurus lembaga masyarakat yang dibina	orang			416,00		416,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
6	Program Pembinaan Dan Pengembangan Kerjasama Desa	Jumlah lembaga ekonomi desa yang sehat/aktif	lembaga			5,00	2.231.884.000	5,00	675.829.875	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
7	Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%			0,96	4.378.097.000	0,96	1.118.239.172	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%			100,00		100,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	kegiatan	13,00	1.405.053.618	15,00	1.363.872.000	13,00	1.740.803.747	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	kegiatan	5,00	4.716.715.000	7,00	1.478.600.000	5,00	772.865.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya disiplin aparatur yang berkualitas	kegiatan			1,00	75.500.000	1,00	44.475.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
11	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkualitas	kegiatan	1,00	40.800.000	2,00	155.200.000	2,00	35.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
12	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujunya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD	kegiatan	8,00	756.105.975	9,00	1.564.469.000	9,00	639.707.150	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
II.8	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									
1	Program Keluarga Berencana	Cakupan Pelayanan KB Terhadap Pasangan Usia Subur	%			10,75	685.515.500	10,83	1.310.610.400	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	Program Pembinaan Keluarga Sejahtera	Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Yang Ber-KB	%	42,02	1.972.504.600	77,84	1.093.572.377	81,90	1.917.517.600	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Yang Ber-KB	%			76,05		78,50		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
		Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Yang Ber-KB	%			76,12		80,24		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	%			77,08		86,20		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Jumlah Kelompok Yang Terbentuk PIK Remaja	%		569.609.000	60,00	884.000.000	60,00	1.256.334.880	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%			77,60	4.384.954.640	78,87	11.114.075.750	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
		Rasio Petugas Pembantu Pembina KB (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	%			100,00		100,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	1.654.902.700	100,00	1.771.176.781	100,00	2.977.577.215	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	%	100,00	732.455.000	100,00	641.659.500	100,00	1.317.728.215	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	%			100,00		100,00	40.590.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur	%	100,00	21.000.000	100,00	29.700.000	100,00	27.800.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
9	Program Peningkatan 'Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya pertanggungjawaban SKPD	%	100,00	653.267.000	100,00	675.370.969	100,00	1.024.774.410	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
II.9	**PERHUBUNGAN**									
1	Program Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas	Pemasangan Rambu-rambu	%	0,14		0,14	50.831.731.000	16,00	49.019.854.858	DINAS PERHUBUNGAN
2	Program Pengelolaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Kecamatan	40,00		40,00	9.215.000.000	40,00	7.833.425.418	DINAS PERHUBUNGAN
3	Program Peningkatan Keselamatan LLAJ	Jumlah uji kir angkutan umum	Kendaraan	25.598,00		45.000,00	2.037.180.000	6,00	1.835.669.800	DINAS PERHUBUNGAN
4	Program Pengawasan Sarana Prasarana LLAJ	Tingkat pengawasan lalu lintas	Prosentase			1,14	6.604.047.000	6,00	7.540.531.600	DINAS PERHUBUNGAN
5	Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	jumlah arus penumpang angkutan umum	penumpang	59.549.461,00		60.144.955,00	907.858.000	59.996.081,96	1.196.860.100	DINAS PERHUBUNGAN
		rasio ijin trayek	prosentase	0,00		0,00		0,00		DINAS PERHUBUNGAN
		jumlah pelabuhan laut/udara/terminal/bus	jumlah terminal	5,00		3,00		3,00		DINAS PERHUBUNGAN
		presentase layanan angkutan darat	Prosentase	0,04		0,04		0,04		DINAS PERHUBUNGAN
		rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	0,00		0,00		0,00		DINAS PERHUBUNGAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
		jumlah orang/brang yang terangkut angkutan umum	jumlah orang	17.864.838,00		18.043.486,38		17.998.824,00		DINAS PERHUBUNGAN
		jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	jumlah orang	586.937,00		592.806,00		591.339,00		DINAS PERHUBUNGAN
		Integrasi moda angkutan umum	jumlah moda	2,00		6,00		6,00		DINAS PERHUBUNGAN
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kegiatan	15,00	3.478.091.000	15,00	3.135.236.000	15,00	3.357.572.689	DINAS PERHUBUNGAN
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan	9,00	4.843.100.000	4,00	1.121.200.000	7,00	2.839.212.108	DINAS PERHUBUNGAN
8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	160.685.000	DINAS PERHUBUNGAN
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan	2,00	539.300.000	2,00	200.000.000	1,00	106.900.000	DINAS PERHUBUNGAN
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya perencanaan dan laporan yang akuntabel	Kegiatan	8,00	528.860.000	9,00	753.100.000	9,00	773.176.800	DINAS PERHUBUNGAN
II.10	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
1	Program Penyebaran Informasi dan Komunikasi	Persentase Penyebaran Informasi melalui Media Elektronik dan Non Elektronik	%	77.78	2.546.378.073	86,00	1.774.604.000	86,00	2.026.934.850	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Informasi dan Komunikasi	Jumlah Sapras Diseminasi Informasi yang Terbangun	Buah	-	-	3,00	730.334.000	3,00	683.837.858	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Medaia Massa	Jumlah Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Buku	-	-	13,00	201.581.000	13,00	319.600.050	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4	Program Optimalisasi Pelayanan Informasi Publik	Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi	%	-	-	90,00	171.594.000	100,00	294.046.050	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
5	Program Optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat secara Online yang ditindaklanjuti SKPD	%			80,00	50.738.000	90,28	60.675.691	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6	Program Peningkatan Kerjasama Informasi dan Komunikasi	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%			100,00	1.304.888.000	100,00	3.142.890.950	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
7	Program Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika	Persentase Aplikasi Layanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yg Terkoneksi	%	75,00	1.621.174.260	19,00	3.501.189.000	15,00	4.758.450.387	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
8	Program Pengembangan Aplikasi	Jumlah Aplikasi yang Terbangun	Aplikasi	-	-	4,00	794.579.000	6,00	933.834.300	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
9	Program Penyelenggaraan Persandian	Tersedianya Sistem Keamanan Informasi Perangkat Daerah	PD			32,00	100.317.000	32,00	214.208.800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
10	Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Tingkat Layanan Sistem Informasi	Level			4,00	4.293.650.000	3,10	5.016.144.150	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	100,00	5.019.894.559	100,00	4.977.605.000	100,00	5.592.354.026	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
12	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Parasarana Apaartur	%	100,00	1.083.683.497	100,00	873.127.000	100,00	1.908.643.990	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
13	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Disiplin Aparatur	%		-	100,00	6.000.000	100,00	26.129.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Berkualitas	%	100,00	327.859.000	100,00	276.800.000	100,00	127.900.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	%	100,00	285.339.910	100,00	350.546.000	100,00	326.329.710	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
II.11	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**									
1	Program Penataan Koperasi	Jumlah koperasi	Unit	1.750,00	1.155.774.500	1.603,00	500.350.000	1.651,00	473.697.900	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		Jumlah Koperasi Aktif	Unit	1.250,00		542,00		589,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		Persentase koperasi aktif	%	31,61		33,81		35,67		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		Jumlah kantor cabang dan cabang pembantu koperasi simpan pinjam	Unit	4,00		5,00		0		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		Jumlah Izin pembukaan kantor cabang dan cabang pembantu koperasi simpan pinjam baru	Unit	3,00		4,00		0		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		Jumlah Anggota, Karyawan, Modal Sendiri, Modal Luar, Volume Usaha, SHU koperasi								DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		- Anggota	orang	290.656,55		296.469,68		91.555,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
		-Karyawan	orang	4.357,20		4.444,34		787,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		-Modal Sendiri	Rp.	428.894.843.592,44		437.472.740.464,29		248.598.778.560,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		-Modal Luar	Rp.	638.986.261.291,12		651.765.986.516,94		107.549.168.854,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		-Volume Usaha	Rp.	1.209.166.788.765,31		1.233.350.124.540,61		550.099.401.555,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		-SHU	Rp.	60.656.875.496,84		61.870.013.006,77		42.667.005.523,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		Jumlah software koperasi	Unit	1,00		1,00		1,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		Jumlah koperasi syariah yang memenuhi persayatan (Permen 13)	Unit	40,00		50,00		28,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		Persentase koperasi syariah	%	4,41						DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi (unit)			235.804.200		1.094.107.000		1.136.148.700	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		- sangat berkualitas	Unit	3,00		4,00		0		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		- berkualitas	Unit	4,00		5,00		13,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		- cukup berkualitas	Unit	28,00		29,00		37,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		- tidak berkuaitas	Unit	15,00		13,00		-		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
		Jumlah perintisan koperasi syariah baru	Unit	5,00						DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dilakukan pembinaan	unit	100,00	338.780.000	200,00	361.500.000	210,00	358.230.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		Jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	unit	1.750,00		1.603,00		1.651,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		Persentase Lembaga Koperasi yang diawasi	%	11,52		11,85		12,73		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
4	Program Peningkatan SDM Koperasi	Jumlah pengelola koperasi yang dilatih	Orang	40,00	2.419.409.000	40,00	1.555.000.000	20,00	1.672.060.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		Jumlah pengawas koperasi yang dilatih	Orang	40,00		40,00		30,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		Jumlah manajer koperasi yang dilatih	Orang	20,00		20,00		20,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		Jenis pelatihan koperasi	Jenis	5,00		5,00		7,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
5	Program Pemberdayaan Koperasi	Jumlah pembinaan koperasi	Unit	100,00	1.856.091.650	120,00	1.845.000.000	120,00	2.289.184.500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		Prosentase Usaha koperasi yang diberdayakan dan dikembangkan	%	4,99		4,99		7,28		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
6	Program Peningkatan Kelembagaan, Legalitas Usaha dan Pengembangan Usaha	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terdata	Unit	4.000,00	604.290.000	4.000,00	1.315.570.000	3.000,00	1.223.118.800	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		Jumlah UMKM keseluruhan (BPS)	Unit	682.579,00		682.579,00		769.230,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		Presentasi Usaha mikro dan kecil	%	0,99		98,97		99,01		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
		Jumlah sosialisasi kebijakan	kali	4,00		4,00		4,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		Jumlah IUMK	Unit	1.000,00		1.000,00		2.381,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		Jumlah UMK berprestasi	Unit	10,00		100,00		220,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	64,00		67,04		72,40		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
7	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Manajemen Usaha Mikro Kecil	Jumlah pelatihan kewirausahaan	Orang	300,00		400,00	3.767.205.000	260,00	4.072.536.500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		Jumlah desa wirausaha	desa	3,00		2,00		2,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		Jumlah wirausaha baru	Orang	400,00		280,00		560,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
8	Program Peningkatan dan Pengembangan Modal Usaha	Jumlah kemitraan UMK	Unit	6,00		10,00	475.000.000	6,00	396.300.500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		Jumlah UMK terfasilitasi akses permodalan (unit)	Unit	120,00		140,00		100,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		Jumlah ukm yang mendapat pelatihan dan Pemantauan dana lainnya	UMKM	100,00		20,00		105,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	%	0,63		0,73		0,41		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran Produk UMKM	Jumlah pameran UMKM (ukm/kali)	kali	0,63		10,00	2.865.468.000	6,00	2.153.054.469	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		Kontribusi sektor UKM terhadap PDRB (%)	%	28.45		28,50		28,91		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	98,97		98,97		99,01		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	15,00	1.079.560.595	16,00	2.637.109.000	15,00	2.150.272.533	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan	11,00	827.448.612	7,00	459.451.000	7,00	1.414.421.350	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
12	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	78.552.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
13	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan	2,00	41.400.000	2,00	97.200.000	2,00	66.350.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
14	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Kapasitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kegiatan	9,00	400.000.000	9,00	550.900.000	9,00	554.806.400	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
II.12	**PENANAMAN MODAL**									
1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Laju Pertumbuhan Investasi PMA-PMDN	Persen	-	118.316.000	4,70	1.504.247.000	4,80	1.745.995.000	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Jumlah Nilai investasi PMA - PMDN	Trilyun Rp	8,69		9,10		9,17		DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PMA		5,05		5,29		4,76		DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
		PMDN		3,64		3,81		4,41		DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Rasio daya serap tenaga kerja	Orang	20,00		30,00		29,00		DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	98,40		4,70		4,80		DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	331,00	1.415.226.020	340,00	1.951.490.000	328,00	2.343.787.000	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PMA		173,00		177,00		196,00		DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PMDN		158,00		163,00		132,00		DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
3	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen Potensi Investasi Daerah	Dokumen	-	514.019.000	3,00	535.248.000	3,00	561.321.000	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	Program Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan	Jumlah Dokumen Kebijakan Penanaman Modal	Dokumen	-	248.783.000	2,00	393.000.000	2,00	444.650.500	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	Program Pelayanan Perizinan	Jumlah izin Terbit (Bidang Pemanfaatan Ruang)	Berkas Izin	31.190,00	5.197.289.200	25.000,00	4.637.811.000	40.310,00	4.727.005.950	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Jumlah izin Terbit (Bidang Operasional)	Berkas Izin	13.000,00		8.000,00		8.867,00		DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6	Program Pengembangan Pelayanan Perizinan	Jumlah izin Terbit (Bidang Pemanfaatan Ruang)	Berkas Izin	31.190,00	602.728.300	25.000,00	630.357.000	40.310,00	644.438.225	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Jumlah izin Terbit (Bidang Operasional)	Berkas Izin	13.000,00		8.000,00		8.867,00		DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
7	Program Pengendalian Kinerja Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang diawasi	Perusahaan	50,00	569.382.000	100,00	1.367.000.000	100,00	1.159.047.300	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Perizinan Non OSS Berstandar ISO	Izin	77,00		20,00		43,00		DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
8	Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi Perizinan	Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Sistem	1,00	1.107.429.420	1,00	1.145.251.000	1,00	1.150.302.630	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan		-	2.774.511.936	70,00	2.892.708.700	70,00	3.089.094.330	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas untuk seluruh Pegawai	Persen	-	7.563.771.648	90,00	2.447.670.100	90,00	3.816.117.938	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
11	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen			100,00		90,00	445.850.400	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
12	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Pelayanan Kepegawaian	Persen	-	387.798.000	90,00	450.000.000	90,00	47.058.000	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
13	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase perencanaan sesuai target	Persen	-	387.225.900	90,00	523.816.200	90,00	564.170.845	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Presentase Kinerja Keuangan Daerah sesuai Target	Persen	-		90,00		97,60		DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
II.13	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									
1	Program Peningkatan Kompetensi Pemuda	Persentase pemuda binaan Dispora yang berwirausaha	%	-	-	200	30.688.420.000	2,00	27.158.425.320	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Jumlah Pemuda Berpretasi Tk Provinsi & Tk Nasional (Pemuda Pelopor dan Paskibraka dll)	Orang	-	-	3,00		3,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	Program Peningkatan Organisasi Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang berperan aktif dalam kegiatan pembangunan	%			2857	10.540.100.000	28,57	10.367.488.057	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Peringkat PORDA	Peringkat	1,00	95.370.512.975		3.011.208.000	22,00	5.634.527.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Jumlah atlit yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional	Orang	850						DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Jumlah atlit pelajar yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional	Orang	150,00		165,00		84,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Persentase pelatih yang bersertifikasi	%	44,64		25,00		25,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
4	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Peringkat Kabupaten Bogor pada multievent Tk Provinsi Jawa Barat :	Peringkat				19.680.720.000		16.209.870.285	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
		Jumlah Penerima penghargaan bagi insan dan penggiat olahraga	Orang			53		22,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase pembangunan stadion olahraga berskala internasional	%	100,00	105.240.872.455		22.165.892.000		20.660.257.198	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Persentase kecamatan yang mempunyai sarana olahraga dan pemuda untuk umum	%	5,00						DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Jumlah Sarana Prasarana Olahraga (GOM, Stadion, Vennue cabang olahraga dan Sport Center Karadenan) yang dibangun	Gedung/ Lapangan			1,00		1,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kegiatan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	15,00	5.499.010.504	15,00	8.321.757.000	15,00	6.282.285.266	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kegiatan Sarana Aparatur	Kegiatan	9,00	5.622.468.957	5,00	1.302.500.000	7,00	2.332.141.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	192.236.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan	2,00	42.344.000	2,00	70.000.000	2,00	106.000.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kegiatan	8,00	750.901.700	9,00	1.140.200.000	9,00	999.148.400	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
II.14	**STATISTIK**									
II.15	**PERSANDIAN**									
II.16	**KEBUDAYAAN**									
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	N/A	613.059.500	25,00	1.847.250.000	25,00	1.791.730.996	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	35,00	630.063.000	40,00	1.118.050.000	40,00	1.072.845.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	Warisan	N/A		58,00		65,00		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya	N/A	1.534.073.486	44,00	2.076.800.000	45,00	1.965.307.101	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	14,00	1.688.496.954	15,00	2.257.401.000	15,00	2.097.831.348	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	10,00	710.208.148	4,00	419.900.000	5,00	3.350.547.544	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	36.500.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Berkualitas	Kegiatan	3,00	216.125.000	2,00	48.150.000	2,00	47.500.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	8,00	270.111.000	8,00	269.962.000	8,00	263.982.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
II.17	**PERPUSTAKAAN**									
1	Program Penyelenggaraan pengembangan pengelolaan perpustakaan umum/khusus dan sekolah	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan	%			41,18	886.730.000	34,90	761.125.240	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	Program Peningkatan Kualitas dan kuantitas pengelola perpustakaan umum/khusus dan sekolah	Rasio Pengelola Perpustakaan	%			3,69	317.903.000	3,69	416.945.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
3	Program Pengembangan minat dan budaya baca masyarakat	Persentase pengunjung perpustakaan yang meminjam buku	%			1,80	761.081.000	1,31	281.675.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
II.18	**KEARSIPAN**									
1	Program Peningkatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%			20,83	1.159.321.000	100,00	297.741.800	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	Program Penyelenggaraan pengelolaan pengembangan sistem dan layanan informasi kearsipan daerah	Persentase Perangkat Daerah non Kecamatan yang mengelola arsip berbasis Teknologi	%			15,63	541.260.000	15,63	230.282.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
3	Program Penyelenggaraan kegiatan pengembangan SDM pegelola kearsipan	Rasio peningkatan SDM pengelola kearsipan	%			22,62	731.155.000	3,00	457.350.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
4	Program Penyelenggaraan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan kearsipan	Persentase pengelolaan kerasipan yang baik pada unit kearsipan	%			70,00	287.180.000	102,00	112.320.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
5	Program pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	kegiatan	14,00	1.351.771.897	14,00	1.589.447.000	13,00	459.552.874	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
6	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	kegiatan	7,00	1.948.088.287	6,00	1.197.322.000	1,00	1.238.793.700	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	27.070.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
8	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas	kegiatan	1,00	20.000.000	2,00	113.000.000	2,00	16.850.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
9	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya pertanggung jawaban kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	kegiatan	8,00	303.920.000	9,00	249.644.000	8,00	88.866.500	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
III	**URUSAN PILIHAN**									
III.1	**PARIWISATA**									
1	Program Pengembangan Pemasaran	Kunjungan Wisatawan Domestik	Wisatawan	7.173.278,00	4.211.672.500	7.584.000,00	4.446.987.000	9.397.067,00	4.933.916.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Wisatawan	339.931,00		316.000,00		323.518,00		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Jumlah event pariwisata	event	9,00		10,00		11,00		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	Program Pengembangan Destinasi	Jumlah usaha pariwisata berstandar nasional	Usaha	N/A	1.076.498.310	10,00	3.439.837.000	22,00	1.402.249.275	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	Program Pengembangan Kemitraan	Lama Kunjungan Wisata	Hari	1,56	2.545.873.500	2,00	2.047.078.000	1,56	2.169.669.500	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
III.2	**PERTANIAN**									
1	Program peningkatan produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan					8.467.041.000	659.236,00	7.830.243.719	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		- Produksi padi	Tom GKG	545.418,00		417.839,00		509.119,00		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
		- Produksi palawija	Ton	162.190,00		151.715,00		150.076,00		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		- Produksi benih padi unggul bersertifikat	Ton	1.158,00						DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		- Produktivitas padi sawah	ku/ha	63,25		55,20		62,70		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		- Produktivitas padi gogo	ku/ha	32,58		33,62		33,90		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		- Produktivitas palawija	ku/ha	172,02		171,83		171,98		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2	Program peningkatan produksi hortikultura	- Produksi sayuran	Ton	95.252,00		92.487,00	4.950.276.700	248.775,00	5.640.117.500	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		- Produksi buah-buahan	Ton	131.369,00		59.972,00		123.135,00		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		- Produksi tanaman hias bunga	tangkai	4.389.308,00		4.150.786,00		5.358.377,00		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		- Produksi tanaman hias daun indah	pohon	527.119,00		411.380,00		860.198,00		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
		- Produksi tanaman obat	Ton	11.228,00		4.409,00		10.447,00		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		- Produktivitas sayuran	ku/ha	116,05		116,11		134,39		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	Program peningkatan produksi tanaman perkebunan	Produksi tanaman perkebunan	Ton	7.939,00		7.993,34	3.896.687.000	7.617,61	3.803.177.922	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
4	Program penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	Cakupan aplikasi teknologi lahan pangan utama	%	1,52		2,18	1.562.149.000	1,54	1.510.892.655	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
5	Program Pengembangan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah kaji terap pengembangan teknologi	unit	-		16,00	5.860.032.800	1,00	5.700.406.676	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
6	Program Pengembangan dan Pengolahan Hasil Produk Tanaman Pangan	Persentase nilai tambah dari padi menjadi beras	%	0,80		0,81	1.059.629.200	1,95	736.690.200	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Persentase nilai tambah dari ubi kayu menjadi tepung	%	2,00		2,00		2,00		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Persentase nilai tambah dari ubi jalar menjadi tepung	%	3,00		3,00		3,00		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
7	Program Pengembangan dan Pengolahan Hasil Produk Tanaman Hortikultura	Persentase nilai tambah dari buah-buahan menjadi bahan olahan	%	-		50,00	186.040.000	8,00	169.825.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
8	Program Pengembangan dan Pengolahan Hasil Produk Tanaman Perkebunan	Persentase nilai tambah dari pala menjadi minyak atsiri	%	10,00		10,00	1.081.193.000	6,00	1.108.578.037	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Persentase nilai tambah dari karet mentah menjadi sheet kering	%	5,00		5,00		5,00		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Persentase nilai tambah dari kopi gelondongan menjadi berasan	%	5,60		6,00		6,00		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
9	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan bina penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha (kelompok)					1.392.106.300	1,86	1.373.643.550	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		- Kelompok Pemula	klpk	377,00		378,00		378,00		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		- Kelompok Lanjut	klpk	1.183,00		1.187,00		1.187,00		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		- Kelompok Madya	klpk	278,00		279,00		279,00		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		- Kelompok Utama	klpk	20,00		21,00		21,00		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
10	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Cakupan bina wilayah penyelenggaraan penyuluhan pelaku utama dan pelaku usaha	%	69,39		69,39	2.511.260.000	69,39	2.389.453.500	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	kegiatan	15,00	2.495.896.748	15,00	3.087.026.000	15,00	2.970.180.175	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	kegiatan	7,00	947.639.372	12,00	14.394.013.000	14,00	3.315.097.669	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
13	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	1.550.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas	kegiatan	3,00	384.809.500	3,00	448.572.000	3,00	335.380.500	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
15	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya laporan capaian kinerja Dinas	kegiatan	6,00	387.835.610	7,00	494.156.000	7,00	482.345.400	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
III.3	**PERDAGANGAN**									
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah Eksportir (berdasarkan registrasi SKA)	Eksportir			318	694.312.000	258	1.124.188.225	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Terwujudnya sistem distribusi barang yang lancar dan informasi harga	Unit			7		7		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2	Program Promosi dan Pencitraan Produk Ekspor Daerah	Jumlah IKM yang dipromosikan dan dicitrakan produknya	IKM			17	800.000.000	25	613.457.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	Program Pembangunan, Pengelolaan dan Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan sarana prasarana pasar rakyat	Pasar			3	12.784.000.000	3	11.903.176.400	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku	Rp. Juta			31.998.175	3.770.000.000	30.482.601	2.450.854.500	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5	Program Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan	Jumlah cakupan perusahaan yang dikendalikan, diawasi bidang perdagangan	perusahaan			100	220.000.000	100	217.737.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
6	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Persentase kecamatan yang mempunyai pasar	%			100,00	15.000.000.000	100,00		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
7	Program Kemetrologian	Persentase UTTP bertanda tera sah dan berlaku	%			78,73	3.885.255.000	78,73	3.449.334.490	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
8	Program Pengawasan dan Perlindungan Konsumen	Jumlah sengketa konsumen yang tertangani	kasus			20	874.700.000	20	745.632.500	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
9	Program Bina Tata Niaga	Jumlah bina tata niaga terhadap pelaku usaha	pelaku usaha			200	874.913.000	715	840.157.250	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kegiatan		2.650.798.000	15	4.032.991.000	15	3.842.319.215	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	Kegiatan		2.285.483.000	8	2.586.543.000	8	4.436.311.813	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
12	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan			1	272.750.000	1	270.109.600	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
13	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas	Kegiatan		283.534.000	2	375.000.000	2	354.500.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
14	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya laporan capaian kinerja Dinas	Kegiatan		522.122.000	9	772.394.000	9	787.944.170	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
III.4	**PERINDUSTRIAN**									
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah komoditi Unggulan IKM	Jenis			5	9.614.679.000	5	9.390.881.730	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Jumlah kebijakan fasilitasi sarana dan prasarana IKM	IKM			500		1.154		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga berlaku	Rp. Juta			132.566.000,00	172.722.000	128.122.215,60	631.867.600	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pertumbuhan industri	%			0,55	1.075.000.000	0,68	962.321.100	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4	Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan industri				0,55	91.616.000	0,68	76.907.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
III.5	**TRANSMIGRASI**									
1	Program Transmigrasi Regional	Laju pengiriman transmigrasi regional	KK	N/A	N/A	100,00	209.947.000	-	85.484.400	DINAS TENAGA KERJA
III.6	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
1	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Terkendalinya wabah PHMS/penyakit ikan			5.450.461.700		4.215.749.000		4.218.034.378	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
		- Rabies (kecamatan)	Kec	40,00		40,00		40,00		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		- Anthrax (kecamatan)	Kec	40,00		40,00		40,00		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		- Brucellosis (kecamatan)	Kec	40,00		40,00		40,00		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		- SE (kecamatan)	Kec	40,00		40,00		40,00		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		- AI (kecamatan)	Kec	40,00		40,00		40,00		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		peningkatan Keamanan Produk Hewan yang ASUH	Kec	40,00		40,00		40,00		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi Daging (kg)	ton	182.180,54	9.444.019.392	187.645,40	7.719.571.000	191.773,62	7.410.614.342	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		Produksi Telur (kg)	ton	47.405,81		47.519,77		61.246,54		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		Produksi Susu (liter)	ton	18.591,32		19.334,64		20.525,34		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Sentra agribisnis peternakan	Lokasi	2,00	470.905.960	2,00	1.028.334.000	2,00	844.821.199	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
4	Program Pembinaan SDM dan Kelembagaan Peternakan	Persentase Peningkatan Status Kelas Kelompok Peternakan	%	2,52	475.292.600	2,06	480.000.000	2,06	353.578.500	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
5	Program Penerapan Teknologi Peternakan	Cakupan Aplikasi Teknologi Peternakan (%)	%	3,51	97.108.500	3,56	108.000.000	3,51	86.388.000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ikan	Terwujudnya keamanan masyarakat dalam mengkonsumsi dan membudidayakan ikan	%			100,00	630.701.000	40,00	616.889.706	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
7	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi ikan konsumsi (ton)	ton	122.131,00	6.372.176.391	123.962,97	5.209.229.000	125.228,12	5.800.096.420	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		Produksi Benih Ikan (RE)	RE	5.545.493,52		5.628.676,41		290.440,09		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		Produksi Ikan Hias (RE)	RE	283.469,46		287.721,04		5.677.500,00		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		Konsumsi ikan (kg/kap/th)	kg/kap/tahun	29,53		29,77		29,81		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
8	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Sentra agribisnis perikanan (lokasi)	Lokasi	2,00	738.592.933	2,00	3.916.880.000	1,00	3.746.235.258	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		Produksi olahan produk perikanan (ton)	ton	21.325,00		22.718,00		22.728,48		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
9	Program Pembinaan SDM dan Kelembagaan Perikanan	Jumlah Kelompok yang dibina	Kelompok	-	619.862.477	648,00	1.051.696.000	630,00	1.041.957.500	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		Jumlah Kelompok yang dibina	Kelompok	-		648,00	1.051.696.000	630,00		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
10	Program Penerapan Teknologi Perikanan	Cakupan Aplikasi Teknologi Perikanan (%)	%	2,09	193.161.500	2,12	200.000.000	2,09	316.194.050	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kegiatan	15,00	2.229.218.000	15,00	2.252.187.000	15,00	2.166.275.964	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	Kegiatan	11,00	1.295.850.000	5,00	757.798.000	7,00	1.081.756.571	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
13	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	100.895.500	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
14	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya sumberdaya aparatur yg berkualitas	Kegiatan	1,00	28.400.000	1,00	30.672.000	1,00	30.600.000	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
15	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD	Kegiatan	8,00	294.125.000	9,00	475.750.000	9,00	354.358.700	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
IV.	**PENUNJANG URUSAN**									
IV.1	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**									
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi program RKPD Terhadap RPJMD	%	4,00	11.614.914.000	100,00	2.234.094.844	100,00	2.685.067.300	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan Provinsi	%			85,00		100,00		BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan Nasional	%			80,00		80,00		BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
2	Program Pengembangan Data/Informasi;	Persentase Ketersediaan data dan Informasi Berbasis SIPD	Dok	5,00	5.281.323.600	23,39	1.107.540.760	100,00	1.088.607.500	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3	Program Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Daerah	Dok	11,00	3.416.990.220	9,00	393.344.274	9,00	597.061.300	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
4	Program Perencanaan Pembangunan ekonomi dan Sumberdaya Daya Alam	Konsistensi program Renstra terhadap RPJMD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Daya Alam	%			100,00	1.428.913.243	100,00	1.395.747.999	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Konsistensi program Renja terhadap RKPD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Daya Alam	%			100,00		100,00		BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Konsistensi program Renstra terhadap RPJMD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%			100,00	1.948.614.000	100,00	1.948.673.750	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Konsistensi program Renja terhadap RKPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%			100,00		100,00		BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
6	Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Konsistensi program Renstra terhadap RPJMD Lingkup Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	%			100,00	1.904.898.553	100,00	1.800.752.085	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Konsistensi program Renja terhadap RKPD Lingkup Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	%			100,00		100,00		BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Kesesuaian rencana pembangunan terhadap rencana struktur ruang RTRW	%			70,00		70,00		BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
7	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Difusi Hasil Penelitian di Kabupaten Bogor	%	19,00	3.234.137.000	20,00	1.629.509.000	20,00	1.926.172.000	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
8	Program Pengembangan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Kabupaten Bogor	%	12,00	3.464.892.000	20,00	683.747.000	20,00	681.576.750	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah	Tersedianya data dan informasi Pendukung Perencanaan Kelembagaan	Dok	20,00	2.148.917.000	5,00	590.489.424	5,00	596.940.500	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	14,00	10.630.382.700	14,00	4.505.711.806	14,00	4.942.553.724	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan	9,00	5.023.800.000	5,00	785.250.000	7,00	1.953.456.000	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
12	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Disiplin Aparatur	Kegiatan	1,00	220.000.000	2,00	54.000.000	1,00	95.475.000	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
13	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Berkualitas	Kegiatan	2,00	1.094.520.000	2,00	220.500.000	2,00	207.875.000	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
14	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	9,00	3.303.367.200	9,00	688.976.001	9,00	702.483.500	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
IV.2	**KEUANGAN**									
1	Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Persentase Ketepatan Penggunaan Kode Rekening pada Perangkat Daerah	%	91,67	2.898.662.307	83,33	2.527.096.000	90,28	2.934.030.900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
		Persentase Kesesuaian Kegiatan pada Penyusunan Anggaran di Perangkat Daerah dengan RKPD	%	100,00		100,00		100,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase Ketepatan Perangkat Daerah dalam Pengajuan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan	%	86,11		86,11		94,44		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran	Ada/Tidak Ada			Ada		Ada		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2	Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Penerbitan SP2D yang Diajukan oleh Perangkat Daerah	%		1.708.681.350	99,90	993.522.000	99,98	1.238.140.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang Terbit	Dokumen			690		717		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase Pengajuan SPP/SPM Belanja Tidak Langsung yang Lengkap	%			93,08		99,94		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	Program Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Daerah	Waktu		2.504.994.675	Tepat	2.525.746.000	Tepat	2.280.254.617	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase Ketepatan Perhitungan Saldo Kas Akhir Tahun Perangkat Daerah	%	83,33		86,11		90,28		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4	Program Pengelolaan Barang Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Penyusunan RKA sesuai dengan RDKBMD/RDKPBMD	%	86,11	3.006.661.431	86,11	1.970.061.000	90,28	1.958.447.262	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
		Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tertib di Perangkat Daerah	%	83,33		86,11		87,50		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase BMD yang dimanfaatkan	%			47,75		40,97		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase BMD yang memiliki Hak Kepemilikan	%			32,00		34,57		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah kegiatan	Kegiatan	16	3.243.563.413	14	3.951.976.000	14	3.711.991.413	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah kegiatan	Kegiatan	12	2.535.743.250	13	2.035.277.000	11	3.331.547.386	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah kegiatan	Kegiatan	1	179.775.000	2	68.825.000	1	69.545.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatan	Kegiatan	3	467.445.000	3	465.162.000	2	273.877.900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah kegiatan	Kegiatan	9	521.866.130	9	621.640.000	9	594.996.671	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1	Program Perencanaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah	Rp (dalam milyar)			7.471,00	786.335.000	8.137,97	701.128.650	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
2	Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer	Persentase Dana Transfer Terhadap Pendapatan Daerah	%			65,81	259.114.000	61,16	2.089.419.189	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
3	Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp (dalam milyar)			2.554,36	1.985.601.000	3.161,15	2.089.419.189	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
4	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Dan Pajak Air Tanah	Jumlah Penerimaan 8 Jenis Pajak Daerah	Rp (dalam milyar)			727,02	2.836.932.000	865,72	2.590.932.780	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Wajib Pajak 8 Jenis Pajak Daerah	WP			4.863,00		4.352,00		BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Piutang 8 Pajak Daerah Berbayar	Rp (dalam milyar)			29,00		2.184.695.616,00		BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
5	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan	Jumlah Penerimaan PBB P2	Rp (dalam Milyar)			470,00	16.023.708.000	572,27	16.198.459.792	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		Colection Ratio	%			57,70		49,87		BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Piutang PBB P2 Berbayar	Rp (dalam Milyar)			94,12		40,78		BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
6	Program Optimalisasi Pengelolaan BPHTB	Jumlah Penerimaan BPHTB	Rp (dalam milyar)			547,45	2.319.624.000	805,44	1.869.342.800	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kegiatan	Keg	16,00	10.433.763.765	16,00	10.966.257.000	16,00	12.056.287.529	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kegiatan	Keg	10,00	6.717.183.259	7,00	6.664.026.000	7,00	9.093.625.069	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
9	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Kegiatan	Keg			1,00		1,00	256.750.000	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Kegiatan	Keg	2,00	365.560.000	2,00	310.619.000	2,00	1.103.500.000	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Kegiatan	Keg	8,00	2.017.551.678	9,00	1.978.362.000	9,00	2.018.494.150	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
IV.3	**KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**									
1	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	15,00		20,00	18.292.126.000	20,00	16.160.393.770	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,63		1,56		1,63		BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	5,50		34,16		33,79		BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2	Program Analisa Kebutuhan dan Formasi Pegawai	Persentase pemenuhan ASN sesuai dengan formasi kebutuhan	%			90,65	755.861.000	75,00	1.146.740.300	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
3	Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase akurasi data kepegawaian	%			88,22	228.380.000	91,44	226.223.700	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
4	Program Pembinaan Aparatur	ASN yang mencapai nilai SKP "Baik	%			80,00	1.947.321.000	81,66	3.159.683.575	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin	%			80,00		86,05		BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5	Program Penataan Mutasi dan Kepangkatan	Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi	%			72,04	1.510.953.000	63,34	1.548.710.420	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	15,00	2.289.363.546	16,00	1.829.623.000	16,00	2.265.325.256	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan	8,00	1.843.428.337	7,00	1.644.896.000	7,00	2.014.966.464	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
8	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan	1,00	112.425.000	1,00		1,00	150.710.000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Sumber daya Aparatur yang berkualitas	Kegiatan	2,00	29.050.000	2,00	301.000.000	2,00	34.480.000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	8,00	256.254.500	10,00	747.770.000	10,00	698.099.500	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
IV.4	PENGAWASAN									
1	Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan	temuan	100,00	1.706.146.000	100,00	1.071.804.000	100,00	1.071.804.000	INSPEKTORAT
2	Program Fasilitasi Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat yang ditangani	%	N/A	N/A	100,00	319.704.000	100,00	319.704.000	INSPEKTORAT
3	Program peningkatan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai AKIP Minimal "B"	Predikat	B	N/A	B	26.560.000	B	26.560.000	INSPEKTORAT
		Tindak Lanjut temuan BPK	%							INSPEKTORAT
4	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level	3	522.216.000	3	525.142.000	3	525.142.000	INSPEKTORAT
5	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Meningkatnya Maturitas Level Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan	Level	3	79.290.000	3	29.468.000	3	29.468.000	INSPEKTORAT
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang dilayani	%	100,00	1.718.762.000	100,00	1.838.013.000	100,00	2.008.206.981	INSPEKTORAT
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang ditingkatkan	%	100,00	962.305.000	100,00	1.111.325.000	100,00	961.116.300	INSPEKTORAT
8	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	%	N/A	N/A	100,00	56.500.000	100,00	55.845.000	INSPEKTORAT
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang ditingkatkan	%	100,00	101.739.000	100,00	251.842.000	100,00	250.997.750	INSPEKTORAT
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang ditingkatkan	%	100,00	273.935.000	100,00	1.019.487.000	100,00	1.129.661.800	INSPEKTORAT
IV.5	SEKRETARIAT DPRD									
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah workshop yang difasilitasi	kali	7,00		7,00	4.200.000.000	7,00	4.483.376.700	SEKRETARIAT DPRD
2	Program Penyelenggaraan Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Ada/Tidak	ada		ada	9.282.387.000	Ada	9.225.304.056	SEKRETARIAT DPRD
3	Program Penyelenggaraan Fasilitasi Penganggaran Dan Pengawasan	Tersedianya dokumen fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD	Ada/Tidak			ada	14.650.871.000	ada	15.502.004.491	SEKRETARIAT DPRD
4	Program Penyelenggaraan Kehumasan Dan Keprotokolan	Jumlah fasilitasi kehumasan dan keptrokolan DPRD	kali			156,00	2.116.470.000	463,00	2.392.596.481	SEKRETARIAT DPRD
5	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	6.020.183.000	100,00	7.601.761.000	94,12	7.212.479.310	SEKRETARIAT DPRD
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	23.744.084.000	100,00	15.689.550.000	100,00	18.777.618.532	SEKRETARIAT DPRD

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	512.700.000	100,00	544.680.000	100,00	530.606.200	SEKRETARIAT DPRD
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	2.107.475.000	100,00	340.872.000	100,00	513.495.000	SEKRETARIAT DPRD
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	640.771.000	100,00	628.220.000	100,00	554.882.570	SEKRETARIAT DPRD
IV.6	**SEKRETARIAT DAERAH**									
1	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kualitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	3,06		3,40	855.367.000	3,26	347.971.000	SEKRETARIAT DAERAH
2	Program Peningkatan Pembinaan Wilayah	Persentase Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Diatas 75	%	76,00		80,00	432.316.000	65,00	402.106.000	SEKRETARIAT DAERAH
3	Program Penataan Wilayah	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah	%	70,00		70,25	510.364.000	70,25	493.052.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	Program Penataan Daeran Otonomi Baru	Jumlah Daerah Otonomi Baru	DOB			2,00	50.000.000	-	36.875.000	SEKRETARIAT DAERAH
5	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	Produk Hukum	100,00	8.382.308.722	100,00	1.408.380.000	100,00	1.111.429.599	SEKRETARIAT DAERAH
6	Program Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah	Persentase permasalahan hukum yang ditangani	Perkara		7.551.385.250	100,00	307.816.000	19,00	242.191.500	SEKRETARIAT DAERAH
7	Program Penyuluhan Hukum	Persentase tingkat pemahaman hukum masyarakat				100,00	696.735.000	100,00	635.407.300	SEKRETARIAT DAERAH
8	Program Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keagamaan	Indeks Kerukunan Beragama		92,31		96,92	12.766.436.000	100,00	8.072.556.100	SEKRETARIAT DAERAH
9	Program Peringatan Hari-Hari Bersejarah	Persentase PHBN dan PHBD				100,00	2.292.005.000	100,00	2.129.325.000	SEKRETARIAT DAERAH
10	Program Pengendalian Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat				100,00	863.227.000	100,00	726.600.000	SEKRETARIAT DAERAH
11	Program Pengkoordinasian Bidang Ekonomi	Persentase BUMD yang sehat		25,00	4.728.028.906	25,00	1.516.055.000	25,00	852.267.320	SEKRETARIAT DAERAH
12	Program Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan	Persentase evaluasi capaian kinerja yang ditindaklajuti		100,00	6.899.774.023	100,00	918.324.000	100,00	877.935.200	SEKRETARIAT DAERAH
13	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Persentase kerjasama yang di implementasikan		100,00		4,00	414.910.000	114,29	375.199.500	SEKRETARIAT DAERAH
14	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Indeks kualitas pelayanan pimpinan				4,00	5.843.031.000	4,00	3.347.804.032	SEKRETARIAT DAERAH

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
15	Program Pengelolaan Administrasi Aparatur	Persentase implementasi hasil ANJAB dan ABK		100,00		100,00	339.864.000	100,00	370.164.250	SEKRETARIAT DAERAH
16	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang implementatif				39,39	1.543.386.000	63,63	609.835.000	SEKRETARIAT DAERAH
17	Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa	Persentase Pengadaan barang/ jasa yang selesai sesuai permohonan dari Perangkat Daerah				98,00	6.874.865.000	100,00	6.777.817.813	SEKRETARIAT DAERAH
18	Program Administrasi Perkantoran	Temuan Materiil	Temuan	27,00	46.897.120.885	27,00	13.764.918.000	19,00	13.481.398.938	SEKRETARIAT DAERAH
19	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Temuan Materiil	Temuan	27,00	39.596.852.132	27,00	24.888.693.000	19,00	38.837.192.084	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Aset dalam Kondisi Baik	%	97,00		97,00		92,21		SEKRETARIAT DAERAH
20	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Temuan Materiil	Temuan	27,00	1.610.006.000	27,00	287.950.000	19,00	707.120.000	SEKRETARIAT DAERAH
21	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Temuan Materiil	Temuan	27,00	2.468.578.400	27,00	920.386.000	19,00	792.635.400	SEKRETARIAT DAERAH
22	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja Dan Keuangan	Temuan Materiil	Temuan	27,00	8.712.474.527	27,00	1.033.218.000	19,00	1.352.349.800	SEKRETARIAT DAERAH
		Nilai Akip	70 (B)	70 (B)		70 (B)		B		SEKRETARIAT DAERAH
V.	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**									
V.1	**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**									
1	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Menurunnya kasus SARA	%	50,00	634.602.000	95,00	1.558.435.000	95,00	1.179.491.900	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah	%	76,00	2.766.739.000		1.243.675.000			KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase LSM atau Ormas yang yang aktif	%	86,11	623.096.000					KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
		Persentase penyelenggaraan pendidikan politik bagi elemen masyarakat	%			60,00		60,00	1.164.773.200	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	Program Penanganan Konflik	Persentase potensi konflik yang tidak menjadi konflik	%			80,00	792.805.000	80,00	900.516.850	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	Program Pendampingan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden/WakilPresiden	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden/WakilPresiden	%			70,14	235.236.000	70,14	211.546.300	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	Program Pendampingan Pemilihan Kepala Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkades	%			65,10	234.854.000	65,10	206.633.200	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Orkemas yang aktif	%			34,44	213.732.000	34,44	154.794.100	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan administrasi perkantoran	Kegiatan	14,00	694.326.000	15,00	1.094.053.000	15,00	900.872.434	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana	Kegiatan	5,00	264.804.000	3,00	5.092.867.000	4,00	4.467.701.640	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
9	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Peningkatan Disiplin Aparatur	kegiatan			1,00		1,00	20.326.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur	Kegiatan			1,00	46.653.000	1,00	30.853.900	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
11	Program pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	8,00	59.343.000	15,00	178.028.000	9,00	207.780.978	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
VI.	**KEWILAYAHAN**									
VI.1	**KECAMATAN CIBINONG**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7,00	109.153.000	8,00	507.213.000	8,00	373.033.000	KECAMATAN CIBINONG
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3,00	23.858.000	4,00	524.008.000	4,00	385.062.000	KECAMATAN CIBINONG
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	24,00	669.412.000	19,00	1.643.195.000	18,00	1.592.269.500	KECAMATAN CIBINONG
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	11,00	3.231.432.700	251,00	10.765.600.000	251,00	14.917.149.000	KECAMATAN CIBINONG
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	11,00	1.368.797.124	11,00	1.863.253.000	11,00	1.400.343.450	KECAMATAN CIBINONG
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	10,00	2.898.166.000	14,00	324.500.000	5,00	36.300.000	KECAMATAN CIBINONG
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	70.858.000	KECAMATAN CIBINONG
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	8,00	63.909.000	8,00	210.000.000	8,00	84.877.000	KECAMATAN CIBINONG
VI.2	**KECAMATAN GUNUNG PUTRI**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	5,00	108.727.000	5,00	131.388.000	5,00	130.637.000	KECAMATAN GUNUNGPUTRI
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3,00	39.147.000	3,00	100.000.000	3,00	98.171.000	KECAMATAN GUNUNGPUTRI
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	17,00	419.256.000	14,00	526.537.000	14,00	519.561.000	KECAMATAN GUNUNGPUTRI
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan			3,00	29.290.000	3,00	118.181.800	KECAMATAN GUNUNGPUTRI
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	10,00	444.279.970	11,00	519.851.000	11,00	470.329.216	KECAMATAN GUNUNGPUTRI
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	8,00	721.943.900	2,00	115.000.000	2,00	101.175.000	KECAMATAN GUNUNGPUTRI

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan			1,00	10.000.000	2,00	23.115.000	KECAMATAN GUNUNGPUTRI
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7,00	82.324.000	8,00	94.680.000	8,00	94.152.000	KECAMATAN GUNUNGPUTRI
VI.3	**KECAMATAN CITEUREUP**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	6,00	88.092.000	6,00	270.000.000	5,00	193.348.000	KECAMATAN CITEUREUP
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3,00	24.692.000	4,00	219.197.000	4,00	156.797.500	KECAMATAN CITEUREUP
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	19,00	550.226.000	16,00	802.303.400	14,00	653.486.410	KECAMATAN CITEUREUP
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan			31,00	1.722.285.000	35,00	2.539.100.798	KECAMATAN CITEUREUP
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	13,00	389.578.670	14,00	757.694.000	14,00	535.986.277	KECAMATAN CITEUREUP
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	3,00	50.902.000	10,00	120.000.000	3,00	74.133.025	KECAMATAN CITEUREUP
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7,00	137.908.000	8,00	217.042.600	8,00	136.388.380	KECAMATAN CITEUREUP
8	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD	Kegiatan			1,00	56.000.000	1,00	34.800.000	KECAMATAN CITEUREUP
VI.4	**KECAMATAN SUKARAJA**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7,00	179.355.000	8,00	237.962.000	8,00	237.682.000	KECAMATAN SUKARAJA
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3,00	75.000.000	4,00	131.626.000	4,00	130.908.000	KECAMATAN SUKARAJA
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	14,00	525.988.000	16,00	542.247.000	16,00	532.002.250	KECAMATAN SUKARAJA
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan			5,00	92.738.000	5,00	190.000.000	KECAMATAN SUKARAJA
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	11,00	256.756.001	11,00	334.555.000	11,00	303.026.173	KECAMATAN SUKARAJA
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	9,00	235.913.000	10,00	312.653.000	10,00	309.488.000	KECAMATAN SUKARAJA
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	14.302.800	KECAMATAN SUKARAJA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7,00	88.100.000	8,00	111.442.000	8,00	111.442.000	KECAMATAN SUKARAJA
VI.5	**KECAMATAN BABAKAN MADANG**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7,00	255.175.000	7,00	251.900.000	7,00	251.855.000	KECAMATAN BABAKAN MADANG
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3,00	95.942.500	3,00	150.980.000	3,00	150.960.000	KECAMATAN BABAKAN MADANG
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	15,00	814.549.750	18,00	847.434.000	18,00	846.947.000	KECAMATAN BABAKAN MADANG
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	2,00	36.800.000	4,00	89.790.000	4,00	164.750.000	KECAMATAN BABAKAN MADANG
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	13,00	340.914.395	13,00	390.928.000	13,00	383.203.359	KECAMATAN BABAKAN MADANG
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	5,00	128.431.000	2,00	30.000.000	2,00	30.000.000	KECAMATAN BABAKAN MADANG
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	12.770.000	KECAMATAN BABAKAN MADANG
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7,00	127.297.000	8,00	140.790.000	8,00	140.790.000	KECAMATAN BABAKAN MADANG
VI.6	**KECAMATAN JONGGOL**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	4,00	148.604.000	4,00	145.585.000	4,00	145.485.000	KECAMATAN JONGGOL
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3,00	38.857.000	3,00	143.989.000	3,00	143.989.000	KECAMATAN JONGGOL
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	8,00	437.486.000	14,00	499.067.000	14,00	498.678.050	KECAMATAN JONGGOL
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	2,00	7.567.300	1,00	15.302.000	1,00	294.151.000	KECAMATAN JONGGOL
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	8,00	443.203.667	10,00	533.377.000	10,00	540.613.264	KECAMATAN JONGGOL
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	2,00	43.560.324	2,00	19.000.000	1,00	18.999.895	KECAMATAN JONGGOL
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	13.000.000	KECAMATAN JONGGOL

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	6,00	204.173.000	7,00	218.536.000	7,00	209.969.600	KECAMATAN JONGGOL
VI.7	**KECAMATAN CILEUNGSI**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	2,00	174.830.000	6,00	310.522.000	6,00	351.654.000	KECAMATAN CILEUNGSI
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	2,00	121.879.000	2,00	174.125.000	2,00	173.655.000	KECAMATAN CILEUNGSI
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	8,00	721.274.500	14,00	603.678.000	14,00	668.896.000	KECAMATAN CILEUNGSI
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	1,00	33.521.500	2,00	53.350.000	2,00	229.965.000	KECAMATAN CILEUNGSI
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	11,00	439.333.260	12,00	481.083.800	11,00	507.998.844	KECAMATAN CILEUNGSI
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	2,00	52.145.750	4,00	63.246.000	4,00	71.630.000	KECAMATAN CILEUNGSI
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	14.500.000	KECAMATAN CILEUNGSI
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7,00	129.652.000	7,00	147.228.200	7,00	150.862.200	KECAMATAN CILEUNGSI
VI.8	**KECAMATAN CARIU**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	5,00	381.117.000	6,00	158.928.000	5,00	158.928.000	KECAMATAN CARIU
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	2,00	51.130.000	2,00	62.250.000	2,00	61.751.600	KECAMATAN CARIU
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	15,00	566.302.000	14,00	522.448.000	12,00	521.848.000	KECAMATAN CARIU
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	1,00	41.100.000	1,00	65.800.000	1,00	170.800.000	KECAMATAN CARIU
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	11,00	362.964.000	12,00	468.196.000	12,00	452.340.442	KECAMATAN CARIU
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	3,00	139.870.000	2,00	73.820.000	2,00	73.820.000	KECAMATAN CARIU
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	11.760.000	KECAMATAN CARIU

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7,00	1.830.447.000	7,00	243.174.000	6,00	266.951.450	KECAMATAN CARIU
VI.9	**KECAMATAN SUKAMAKMUR**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	6,00	118.325.000	3,00	139.707.000	3,00	147.487.000	KECAMATAN SUKAMAKMUR
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3,00	43.150.000	3,00	157.020.000	2,00	70.300.000	KECAMATAN SUKAMAKMUR
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	20,00	505.093.000	10,00	436.000.000	8,00	431.490.000	KECAMATAN SUKAMAKMUR
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	2,00	16.599.000	2,00	19.000.000	1,00	118.000.000	KECAMATAN SUKAMAKMUR
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	12,00	440.657.193	13,00	542.236.000	13,00	575.803.308	KECAMATAN SUKAMAKMUR
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	5,00	139.367.000	2,00	25.000.000	1,00	45.000.000	KECAMATAN SUKAMAKMUR
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	10.290.000	KECAMATAN SUKAMAKMUR
8	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD	Kegiatan			1,00	6.000.000	1,00	6.000.000	KECAMATAN SUKAMAKMUR
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7,00	257.530.000	9,00	189.520.000	7,00	153.860.000	KECAMATAN SUKAMAKMUR
VI.10	**KECAMATAN PARUNG**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7,00	142.893.500	6,00	206.300.000	6,00	164.655.000	KECAMATAN PARUNG
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3,00	48.093.500	3,00	104.500.000	3,00	82.130.000	KECAMATAN PARUNG
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	17,00	531.807.500	15,00	582.300.000	14,00	529.839.000	KECAMATAN PARUNG
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	2,00	11.263.000	2,00	12.000.000	2,00	117.000.000	KECAMATAN PARUNG
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	12,00	180.352.589	11,00	265.700.000	11,00	210.186.858	KECAMATAN PARUNG
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	6,00	181.646.000	7,00	18.000.000	4,00	18.000.000	KECAMATAN PARUNG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	11.343.600	KECAMATAN PARUNG
8	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD	Kegiatan	1,00	3.850.000	1,00	10.000.000	1,00	10.000.000	KECAMATAN PARUNG
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7,00	84.489.000	8,00	110.200.000	8,00	110.200.000	KECAMATAN PARUNG
VI.11	**KECAMATAN GUNUNG SINDUR**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	6,00	151.905.500	8,00	200.000.000	8,00	198.644.000	KECAMATAN GUNUNG SINDUR
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3,00	104.396.000	4,00	134.000.000	4,00	86.046.200	KECAMATAN GUNUNG SINDUR
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	24,00	419.517.500	18,00	449.013.000	10,00	420.443.800	KECAMATAN GUNUNG SINDUR
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	2,00	12.038.000	1,00	10.000.000	1,00	80.000.000	KECAMATAN GUNUNG SINDUR
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	13,00	252.854.100	14,00	506.240.000	13,00	345.961.750	KECAMATAN GUNUNG SINDUR
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	7,00	250.505.000	9,00	87.500.000	4,00	87.500.000	KECAMATAN GUNUNG SINDUR
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan			1,00	5.000.000	1,00	16.760.000	KECAMATAN GUNUNG SINDUR
8	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD	Kegiatan			1,00	12.000.000	1,00	12.000.000	KECAMATAN GUNUNG SINDUR
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7,00	108.819.000	8,00	177.000.000	7,00	175.840.000	KECAMATAN GUNUNG SINDUR
VI.12	**KECAMATAN KEMANG**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	4,00	116.580.000	7,00	187.200.000	7,00	178.920.000	KECAMATAN KEMANG
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	1,00	26.760.000	3,00	142.361.000	3,00	157.331.000	KECAMATAN KEMANG
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	12,00	521.049.000	14,00	592.367.000	14,00	572.414.000	KECAMATAN KEMANG
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	6,00	116.200.000	15,00	504.696.000	16,00	552.652.600	KECAMATAN KEMANG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	11,00	481.131.101	14,00	758.462.000	14,00	702.740.285	KECAMATAN KEMANG
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	4,00	56.990.000	11,00	96.750.000	8,00	92.750.000	KECAMATAN KEMANG
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	18.876.000	KECAMATAN KEMANG
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	5,00	89.259.000	8,00	111.754.000	8,00	109.054.000	KECAMATAN KEMANG
VI.13	**KECAMATAN BOJONGGEDE**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7,00	139.375.000	6,00	265.000.000	6,00	265.000.000	KECAMATAN BOJONGGEDE
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3,00	24.496.000	4,00	138.620.000	4,00	138.620.000	KECAMATAN BOJONGGEDE
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	22,00	462.180.000	16,00	708.434.000	16,00	706.314.000	KECAMATAN BOJONGGEDE
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	4,00	17.425.000	17,00	1.005.734.000	23,00	1.435.833.000	KECAMATAN BOJONGGEDE
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	13,00	526.760.921	13,00	820.101.000	14,00	744.789.050	KECAMATAN BOJONGGEDE
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	8,00	403.671.734	6,00	621.500.000	6,00	587.413.000	KECAMATAN BOJONGGEDE
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	18.000.000	KECAMATAN BOJONGGEDE
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7,00	28.620.000	8,00	136.500.000	8,00	136.400.000	KECAMATAN BOJONGGEDE
VI.14	**KECAMATAN LEUWILIANG**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7,00	239.139.500	8,00	169.250.000	8,00	205.334.800	KECAMATAN LEUWILIANG
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	2,00	75.344.000	3,00	117.165.000	3,00	104.435.000	KECAMATAN LEUWILIANG
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	25,00	510.334.000	17,00	575.926.000	16,00	537.326.000	KECAMATAN LEUWILIANG
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	4,00	79.216.000	4,00	38.071.000	4,00	171.470.000	KECAMATAN LEUWILIANG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	12,00	165.043.323	12,00	240.290.000	10,00	188.530.000	KECAMATAN LEUWILIANG
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	8,00	210.850.000	5,00	7.050.000.000	4,00	6.808.111.279	KECAMATAN LEUWILIANG
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	15.963.000	KECAMATAN LEUWILIANG
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7,00	99.962.000	8,00	115.800.000	7,00	101.484.000	KECAMATAN LEUWILIANG
VI.15	**KECAMATAN CIAMPEA**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	6,00	235.346.050	6,00	277.270.000	6,00	262.170.000	KECAMATAN CIAMPEA
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3,00	92.959.625	3,00	138.000.000	3,00	137.451.700	KECAMATAN CIAMPEA
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	14,00	686.720.174	15,00	770.739.000	15,00	771.052.800	KECAMATAN CIAMPEA
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	3,00	39.648.650	3,00	52.000.000	3,00	187.000.000	KECAMATAN CIAMPEA
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	12,00	316.238.802	12,00	352.408.000	12,00	351.855.801	KECAMATAN CIAMPEA
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	4,00	167.441.000	5,00	206.600.000	3,00	198.929.254	KECAMATAN CIAMPEA
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	13.804.000	KECAMATAN CIAMPEA
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7,00	248.287.425	8,00	238.417.000	8,00	244.054.750	KECAMATAN CIAMPEA
VI.16	**KECAMATAN CIBUNGBULANG**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	6,00	288.416.380	6,00	274.630.000	5,00	258.685.500	KECAMATAN CIBUNGBULANG
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3,00	118.025.000	3,00	116.399.000	3,00	102.279.000	KECAMATAN CIBUNGBULANG
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	16,00	578.013.000	14,00	456.633.500	13,00	448.288.500	KECAMATAN CIBUNGBULANG
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	3,00	123.140.000	3,00	30.608.500	3,00	163.614.500	KECAMATAN CIBUNGBULANG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	14,00	331.036.547	14,00	376.503.000	14,00	339.024.683	KECAMATAN CIBUNGBULANG
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	5,00	213.140.716	2,00	6.963.210.000	2,00	6.540.859.000	KECAMATAN CIBUNGBULANG
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1,00	2.500.000	2,00	16.742.000	KECAMATAN CIBUNGBULANG
8	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD	Kegiatan							KECAMATAN CIBUNGBULANG
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7,00	143.481.000	8,00	111.503.000	8,00	110.003.000	KECAMATAN CIBUNGBULANG
VI.17	**KECAMATAN PAMIJAHAN**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7,00	316.637.000	7,00	223.259.000	6,00	184.203.500	KECAMATAN PAMIJAHAN
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3,00	94.906.000	3,00	209.958.000	3,00	130.398.000	KECAMATAN PAMIJAHAN
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	26,00	755.619.400	16,00	777.235.000	16,00	777.243.000	KECAMATAN PAMIJAHAN
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	2,00	36.000.000	1,00	47.968.000	1,00	192.135.000	KECAMATAN PAMIJAHAN
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	11,00	394.281.800	12,00	366.081.000	9,00	332.958.100	KECAMATAN PAMIJAHAN
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	1,00	84.000.000	1,00	18.000.000	1,00	18.000.000	KECAMATAN PAMIJAHAN
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	12.300.000	KECAMATAN PAMIJAHAN
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7,00	40.032.000	8,00	17.549.000	8,00	17.549.000	KECAMATAN PAMIJAHAN
VI.18	**KECAMATAN RUMPIN**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	8,00	278.600.800	7,00	192.611.500	6,00	192.611.500	KECAMATAN RUMPIN
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3,00	57.550.000	3,00	131.773.000	2,00	80.043.000	KECAMATAN RUMPIN
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	23,00	417.207.600	6,00	415.121.000	10,00	415.121.000	KECAMATAN RUMPIN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	3,00	20.500.000	1,00	4.209.000	1,00	184.209.000	KECAMATAN RUMPIN
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	13,00	261.908.162	11,00	300.251.000	14,00	269.586.609	KECAMATAN RUMPIN
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	7,00	47.240.000	2,00	28.700.000	2,00	42.200.000	KECAMATAN RUMPIN
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan	7,00	7.700.000			1,00	12500000	KECAMATAN RUMPIN
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	1,00	133.156.400	8,00	166.790.500	8,00	166.769.500	KECAMATAN RUMPIN
VI.19	**KECAMATAN JASINGA**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	6,00	198.073.000	8,00	195.620.000	4,00	150.100.000	KECAMATAN JASINGA
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3,00	57.845.000	3,00	199.000.000	3,00	198.530.000	KECAMATAN JASINGA
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	16,00	491.699.000	16,00	618.164.000	15,00	583.527.000	KECAMATAN JASINGA
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	2,00	55.074.000	2,00	56.610.000	2,00	260.230.000	KECAMATAN JASINGA
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	12,00	253.562.000	12,00	282.916.000	10,00	267.512.787	KECAMATAN JASINGA
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	4,00	344.222.000	2,00	202.000.000	3,00	265.711.000	KECAMATAN JASINGA
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	13.284.000	KECAMATAN JASINGA
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7,00	93.579.000	8,00	89.599.000	8,00	88.969.000	KECAMATAN JASINGA
VI.20	**KECAMATAN PARUNG PANJANG**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7,00	90.075.000	8,00	104.000.000	7,00	96.000.000	KECAMATAN PARUNG PANJANG
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3,00	43.675.000	3,00	95.000.000	3,00	38.000.000	KECAMATAN PARUNG PANJANG
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	22,00	558.887.500	18,00	651.000.000	18,00	599.310.000	KECAMATAN PARUNG PANJANG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	1,00	12.200.000	3,00	40.000.000	4,00	166.320.000	KECAMATAN PARUNG PANJANG
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	11,00	180.631.293	12,00	297.410.000	11,00	220.147.860	KECAMATAN PARUNG PANJANG
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	5,00	71.850.000	3,00	76.000.000	3,00	66.000.000	KECAMATAN PARUNG PANJANG
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan			1,00	500.000	2,00	14.297.000	KECAMATAN PARUNG PANJANG
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	6,00	81.272.000	8,00	165.000.000	8,00	134.630.000	KECAMATAN PARUNG PANJANG
VI.21	**KECAMATAN NANGGUNG**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7,00	175.775.000	7,00	185.500.000	7,00	179.500.000	KECAMATAN NANGGUNG
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	2,00	34.838.000	3,00	104.992.000	3,00	51.844.000	KECAMATAN NANGGUNG
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	20,00	513.312.500	14,00	486.700.000	14,00	470.050.000	KECAMATAN NANGGUNG
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	4,00	32.740.000	3,00	27.500.000	3,00	115.020.000	KECAMATAN NANGGUNG
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	12,00	266.555.618	13,00	330.000.000	14,00	352.029.807	KECAMATAN NANGGUNG
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	4,00	63.490.000	4,00	7.038.000.000	4,00	6.473.200.090	KECAMATAN NANGGUNG
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	10.290.000	KECAMATAN NANGGUNG
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7,00	146.052.000	8,00	149.500.000	8,00	157.500.000	KECAMATAN NANGGUNG
VI.22	**KECAMATAN CIGUDEG**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	5,00	175.269.000	3,00	154.000.000	3,00	153.072.000	KECAMATAN CIGUDEG
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3,00	81.300.000	3,00	190.000.000	3,00	189.200.000	KECAMATAN CIGUDEG
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	15,00	616.660.520	16,00	605.975.000	16,00	609.350.564	KECAMATAN CIGUDEG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	2,00	41.240.000	3,00	36.100.000	3,00	215.420.000	KECAMATAN CIGUDEG
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	10,00	286.651.114	11,00	318.565.000	11,00	305.269.387	KECAMATAN CIGUDEG
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	8,00	286.335.334	6,00	20.280.000	6,00	20.213.000	KECAMATAN CIGUDEG
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan			1,00	3.000.000	1,00	16.720.000	KECAMATAN CIGUDEG
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7,00	116.043.500	8,00	193.000.000	8,00	192.850.000	KECAMATAN CIGUDEG
VI.23	**KECAMATAN TENJO**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	8,00	127.917.000	10,00	151.950.000	10,00	149.001.000	KECAMATAN TENJO
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	2,00	22.000.000	3,00	91.000.000	3,00	72.340.000	KECAMATAN TENJO
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	23,00	602.763.200	18,00	570.000.000	18,00	565.442.700	KECAMATAN TENJO
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	4,00	39.887.000	4,00	20.000.000	4,00	108.525.900	KECAMATAN TENJO
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	14,00	257.037.400	13,00	382.113.000	12,00	347.180.978	KECAMATAN TENJO
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	6,00	125.460.000	5,00	14.600.000	3,00	20.655.000	KECAMATAN TENJO
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	4.000.000	KECAMATAN TENJO
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	8,00	95.236.000	9,00	114.900.000	9,00	114.900.000	KECAMATAN TENJO
VI.24	**KECAMATAN CIAWI**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	6,00	167.601.000	6,00	145.526.500	6,00	155.326.500	KECAMATAN CIAWI
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3,00	52.831.000	3,00	119.882.500	3,00	118.412.500	KECAMATAN CIAWI
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	18,00	459.457.750	16,00	464.627.500	14,00	474.501.500	KECAMATAN CIAWI

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	3,00	35.111.000	2,00	17.095.000	2,00	107.095.000	KECAMATAN CIAWI
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	11,00	307.644.810	10,00	397.508.000	10,00	358.630.671	KECAMATAN CIAWI
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	5,00	151.654.122	4,00	60.727.500	3,00	52.639.258	KECAMATAN CIAWI
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	14.940.000	KECAMATAN CIAWI
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7,00	171.497.950	8,00	140.483.000	8,00	142.022.000	KECAMATAN CIAWI
VI.25	**KECAMATAN CISARUA**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	6,00	141.599.000	6,00	187.316.000	6,00	190.967.900	KECAMATAN CISARUA
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3,00	41.977.000	3,00	120.278.000	3,00	100.824.500	KECAMATAN CISARUA
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	21,00	621.714.350	17,00	738.501.000	17,00	743.593.550	KECAMATAN CISARUA
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	12,00	278.778.000	17,00	582.654.000	9,00	951.872.500	KECAMATAN CISARUA
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	13,00	375.932.439	13,00	457.704.000	13,00	461.590.476	KECAMATAN CISARUA
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	13,00	557.263.259	8,00	81.575.000	6,00	104.700.690	KECAMATAN CISARUA
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan							
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	8,00	85.651.500	8,00	135.341.000	8,00	119.037.500	KECAMATAN CISARUA
VI.26	**KECAMATAN MEGAMENDUNG**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	5,00	185.825.040	6,00	178.412.000	6,00	172.142.000	KECAMATAN MEGAMENDUNG
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	1,00	30.440.000	3,00	121.185.000	3,00	81.431.800	KECAMATAN MEGAMENDUNG
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	8,00	575.391.000	18,00	643.199.000	17,00	611.721.750	KECAMATAN MEGAMENDUNG
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	1,00	14.850.000	5,00	47.702.000	5,00	105.612.000	KECAMATAN MEGAMENDUNG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	10,00	465.354.000	13,00	538.870.000	13,00	479.945.521	KECAMATAN MEGAMENDUNG
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	5,00	187.118.744	8,00	50.625.000	5,00	89.744.717	KECAMATAN MEGAMENDUNG
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	9.900.000	KECAMATAN MEGAMENDUNG
8	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD	Kegiatan			1,00	15.000.000	1,00	15.000.000	KECAMATAN MEGAMENDUNG
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7,00	122.137.000	8,00	151.160.000	8,00	117.479.000	KECAMATAN MEGAMENDUNG
VI.27	**KECAMATAN CARINGIN**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7,00	125.591.000	7,00	187.000.000	7,00	171.270.000	KECAMATAN CARINGIN
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	2,00	37.071.000	3,00	117.000.000	3,00	102.000.000	KECAMATAN CARINGIN
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	23,00	519.610.000	18,00	554.525.000	18,00	548.245.000	KECAMATAN CARINGIN
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	3,00	13.291.300	4,00	26.000.000	5,00	123.502.000	KECAMATAN CARINGIN
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	13,00	169.399.317	12,00	245.024.000	12,00	201.425.332	KECAMATAN CARINGIN
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	5,00	36.643.000	5,00	44.500.000	6,00	59.600.000	KECAMATAN CARINGIN
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1,00		5,00	13.700.000	KECAMATAN CARINGIN
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	8,00	132.027.500	8,00	129.000.000	8,00	98.100.000	KECAMATAN CARINGIN
VI.28	**KECAMATAN CIJERUK**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	5,00	206.486.000	8,00	141.410.000	8,00	141.410.000	KECAMATAN CIJERUK
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3,00	56.330.500	3,00	200.987.000	3,00	187.176.500	KECAMATAN CIJERUK
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	21,00	639.672.000	18,00	570.004.000	18,00	583.460.000	KECAMATAN CIJERUK

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	2,00	37.935.500	5,00	75.000.000	5,00	160.000.000	KECAMATAN CIJERUK
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	11,00	408.504.989	11,00	454.241.000	11,00	406.550.497	KECAMATAN CIJERUK
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	7,00	518.132.789	8,00	111.991.000	6,00	95.441.000	KECAMATAN CIJERUK
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	9.950.000	KECAMATAN CIJERUK
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7,00	112.929.000	8,00	120.281.000	8,00	118.443.000	KECAMATAN CIJERUK
VI.29	**KECAMATAN CIOMAS**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	6,00	254.001.600	9,00	262.370.000	8,00	245.650.000	KECAMATAN CIOMAS
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3,00	31.402.000	4,00	125.000.000	4,00	164.790.800	KECAMATAN CIOMAS
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	17,00	431.169.000	17,00	566.041.000	16,00	559.828.500	KECAMATAN CIOMAS
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	6,00	67.578.000	16,00	648.674.000	17,00	1.085.355.000	KECAMATAN CIOMAS
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	13,00	714.022.763	12,00	680.779.000	12,00	644.024.523	KECAMATAN CIOMAS
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	5,00	5.970.507.422	4,00	202.000.000	4,00	201.276.000	KECAMATAN CIOMAS
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	15.936.000	KECAMATAN CIOMAS
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7,00	95.625.000	8,00	145.223.000	8,00	118.684.000	KECAMATAN CIOMAS
VI.30	**KECAMATAN DRAMAGA**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	8,00	210.026.500	9,00	185.000.000	9,00	174.200.000	KECAMATAN DRAMAGA
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3,00	98.086.000	3,00	125.311.000	3,00	109.181.000	KECAMATAN DRAMAGA
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	20,00	701.702.500	17,00	562.462.000	17,00	562.199.900	KECAMATAN DRAMAGA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	2,00	39.147.000	2,00	30.000.000	2,00	89.989.000	KECAMATAN DRAMAGA
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	13,00	227.626.575	13,00	292.176.000	13,00	262.512.362	KECAMATAN DRAMAGA
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	6,00	240.655.337	3,00	30.000.000	3,00	28.110.000	KECAMATAN DRAMAGA
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	15.438.000	KECAMATAN DRAMAGA
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7,00	113.607.800	8,00	115.800.000	8,00	115.327.400	KECAMATAN DRAMAGA
VI.31	**KECAMATAN TAMANSARI**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	6,00	187.268.000	9,00	193.978.000	9,00	168.978.000	KECAMATAN TAMANSARI
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3,00	84.677.000	3,00	125.259.300	3,00	105.925.000	KECAMATAN TAMANSARI
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	25,00	329.944.000	18,00	394.347.200	18,00	388.881.700	KECAMATAN TAMANSARI
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	2,00	27.253.000	4,00	41.783.000	4,00	104.758.000	KECAMATAN TAMANSARI
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	11,00	311.070.017	12,00	480.143.000	14,00	634.237.072	KECAMATAN TAMANSARI
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	10,00	6.226.090.500	7,00	192.000.000	-	-	KECAMATAN TAMANSARI
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan			1,00	3.000.000	2,00	17.850.000	KECAMATAN TAMANSARI
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7,00	51.531.100	8,00	58.793.500	9,00	58.293.500	KECAMATAN TAMANSARI
VI.32	**KECAMATAN KLAPANUNGGAL**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7,00	156.007.500	7,00	214.749.500	6,00	177.249.500	KECAMATAN KLAPANUNGGAL
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	2,00	29.615.000	3,00	96.391.000	3,00	74.841.000	KECAMATAN KLAPANUNGGAL
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	15,00	627.541.000	16,00	520.760.200	9,00	457.460.200	KECAMATAN KLAPANUNGGAL

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	2,00	13.783.000	4,00	28.000.000	2,00	103.000.000	KECAMATAN KLAPANUNGGAL
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	14,00	427.244.927	14,00	606.079.800	14,00	569.541.845	KECAMATAN KLAPANUNGGAL
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	6,00	6.515.006.000	2,00	166.963.000	2,00	163.730.000	KECAMATAN KLAPANUNGGAL
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	12.870.000	KECAMATAN KLAPANUNGGAL
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7,00	116.278.000	8,00	86.523.500	7,00	91.523.500	KECAMATAN KLAPANUNGGAL
	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD	Kegiatan	1,00	32.385.000	1,00	27.360.000	1,00	27.360.000	KECAMATAN KLAPANUNGGAL
VI.33	**KECAMATAN CISEENG**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7,00	179.130.000	7,00	235.347.000	7,00	234.847.000	KECAMATAN CISEENG
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	4,00	66.415.000	3,00	105.600.000	3,00	37.800.000	KECAMATAN CISEENG
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	25,00	768.888.000	17,00	591.147.000	17,00	592.467.000	KECAMATAN CISEENG
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	1,00	7.400.000	1,00	15.000.000	1,00	149.757.000	KECAMATAN CISEENG
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	7,00	194.524.926	7,00	233.248.000	7,00	224.848.615	KECAMATAN CISEENG
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	6,00	322.990.880	1,00	15.500.000	1,00	15.500.000	KECAMATAN CISEENG
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	9.000.000	KECAMATAN CISEENG
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	6,00	152.564.500	7,00	217.019.000	7,00	211.353.500	KECAMATAN CISEENG
VI.34	**KECAMATAN RANCABUNGUR**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7,00	233.945.000	7,00	206.550.000	7,00	244.050.000	KECAMATAN RANCABUNGUR
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3,00	108.600.000	3,00	117.070.000	3,00	136.510.000	KECAMATAN RANCABUNGUR

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	16,00	558.585.000	17,00	489.247.000	17,00	494.247.000	KECAMATAN RANCABUNGUR
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	1,00	59.880.000	2,00	35.600.000	2,00	110.600.000	KECAMATAN RANCABUNGUR
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	11,00	216.574.306	11,00	235.120.800	11,00	256.968.921	KECAMATAN RANCABUNGUR
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	5,00	61.175.000	4,00	16.400.000	4,00	31.106.200	KECAMATAN RANCABUNGUR
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	10.458.000	KECAMATAN RANCABUNGUR
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7,00	123.187.000	8,00	123.091.200	8,00	131.591.200	KECAMATAN RANCABUNGUR
VI.35	**KECAMATAN SUKAJAYA**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	6,00	125.287.000	5,00	118.600.000	5,00	126.082.000	KECAMATAN SUKAJAYA
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3,00	59.616.000	3,00	117.344.000	3,00	83.018.000	KECAMATAN SUKAJAYA
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	20,00	385.263.375	14,00	326.485.000	14,00	346.059.500	KECAMATAN SUKAJAYA
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	3,00	79.882.000	3,00	84.560.000	3,00	174.560.000	KECAMATAN SUKAJAYA
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	12,00	212.173.699	13,00	262.380.000	13,00	215.608.747	KECAMATAN SUKAJAYA
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	4,00	306.675.000	5,00	430.000.000	1,00	9.900.000	KECAMATAN SUKAJAYA
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	11.454.000	KECAMATAN SUKAJAYA
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7,00	169.992.325	8,00	189.124.000	8,00	190.853.000	KECAMATAN SUKAJAYA
VI.36	**KECAMATAN TANJUNGSARI**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7,00	248.340.000	6,00	228.001.000	6,00	226.552.600	KECAMATAN TANJUNGSARI
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3,00	72.695.000	3,00	123.740.000	3,00	122.980.000	KECAMATAN TANJUNGSARI

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	21,00	668.460.000	12,00	530.740.000	10,00	529.558.000	KECAMATAN TANJUNGSARI
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	1,00	96.560.000	1,00	89.860.000	1,00	209.860.000	KECAMATAN TANJUNGSARI
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	10,00	153.004.062	8,00	111.739.000	8,00	104.592.494	KECAMATAN TANJUNGSARI
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	2,00	106.588.500	1,00	16.150.000	1,00	55.936.000	KECAMATAN TANJUNGSARI
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	10.780.000	KECAMATAN TANJUNGSARI
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7,00	69.955.000	8,00	60.960.000	8,00	60.954.000	KECAMATAN TANJUNGSARI
VI.37	**KECAMATAN TAJURHALANG**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	4,00	198.854.000	5,00	215.854.000	5,00	223.715.000	KECAMATAN TAJURHALANG
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3,00	59.375.000	3,00	122.750.000	3,00	122.390.000	KECAMATAN TAJURHALANG
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	14,00	595.405.700	15,00	652.441.000	15,00	654.897.000	KECAMATAN TAJURHALANG
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	2,00	30.942.000	2,00	28.485.000	2,00	99.485.000	KECAMATAN TAJURHALANG
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	7,00	283.083.124	8,00	347.322.000	8,00	333.388.632	KECAMATAN TAJURHALANG
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	4,00	97.910.000	3,00	22.900.000	3,00	53.800.000	KECAMATAN TAJURHALANG
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	9.500.000	KECAMATAN TAJURHALANG
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7,00	122.710.300	8,00	152.009.000	8,00	160.009.000	KECAMATAN TAJURHALANG
VI.38	**KECAMATAN CIGOMBONG**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7,00	111.480.000	8,00	176.310.000	8,00	176.310.000	KECAMATAN CIGOMBONG
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	2,00	38.920.000	4,00	116.490.000	4,00	108.162.000	KECAMATAN CIGOMBONG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	23,00	570.447.000	19,00	667.158.500	19,00	642.977.000	KECAMATAN CIGOMBONG
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	2,00	28.300.000	3,00	51.350.000	3,00	156.350.000	KECAMATAN CIGOMBONG
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	12,00	323.147.000	12,00	449.439.500	12,00	448.130.000	KECAMATAN CIGOMBONG
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	2,00	34.211.000	2,00	45.000.000	2,00	49.000.000	KECAMATAN CIGOMBONG
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	10.500.000	KECAMATAN CIGOMBONG
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7,00	136.954.000	9,00	225.308.000	9,00	244.437.000	KECAMATAN CIGOMBONG
VI.39	**KECAMATAN LEUWISADENG**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	7,00	147.384.500	8,00	169.655.000	8,00	150.125.000	KECAMATAN LEUWISADENG
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3,00	45.255.000	3,00	124.006.000	2,00	217.023.800	KECAMATAN LEUWISADENG
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	21,00	596.621.672	18,00	649.813.000	17,00	603.288.974	KECAMATAN LEUWISADENG
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	1,00	17.094.000	3,00	16.964.000	2,00	81.499.000	KECAMATAN LEUWISADENG
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	11,00	264.767.823	12,00	311.174.000	10,00	238.458.862	KECAMATAN LEUWISADENG
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	4,00	119.867.500	5,00	27.250.000	1,00	27.250.000	KECAMATAN LEUWISADENG
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	7.500.000	KECAMATAN LEUWISADENG
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7,00	141.951.000	9,00	142.378.000	5,00	131.561.000	KECAMATAN LEUWISADENG
VI.40	**KECAMATAN TENJOLAYA**									
1	Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan	8,00	156.187.000	8,00	196.032.000	8,00	189.163.600	KECAMATAN TENJOLAYA
2	Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan	3,00	36.965.200	3,00	101.956.000	3,00	146.394.000	KECAMATAN TENJOLAYA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI AWAL 2018		KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Realisasi	Rp.	TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
3	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kegiatan	*21,00*	463.042.700	*16,00*	*504.592.000*	*16,00*	*498.585.700*	KECAMATAN TENJOLAYA
4	Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan	Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan	Kegiatan	3,00	54.659.800	2,00	45.549.000	2,00	98.073.700	KECAMATAN TENJOLAYA
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	12,00	191.974.176	12,00	255.370.000	12,00	260.175.022	KECAMATAN TENJOLAYA
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	Kegiatan	6,00	325.196.191	3,00	50.036.000	3,00	45.354.975	KECAMATAN TENJOLAYA
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Kegiatan			1,00		1,00	7.500.000	KECAMATAN TENJOLAYA
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Kegiatan	7,00	107.934.000	8,00	113.444.000	8,00	114.491.400	KECAMATAN TENJOLAYA

Tabel 7.3
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
I.1	PENDIDIKAN							
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	47,75	7.161.600.000	42,62	2.330.666.983	DINAS PENDIDIKAN
2	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Utama SD	Presentase Sarana dan Prasarana Utama SD yang di bangun	%	5,60	113.081.400.000	96,44	49.057.087.391	DINAS PENDIDIKAN
		% SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa	%	58,67		41,92		DINAS PENDIDIKAN
3	Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Utama SD	Presentase Sarana dan Prasarana Utama SD yang di rehab	%	9,30	163.922.540.000	98,31	153.733.611.257	DINAS PENDIDIKAN
		Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik	%	95,75		99,54		DINAS PENDIDIKAN
4	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang SD	Presentase Sarana dan Prasarana Penunjang SD yang di bangun	%	2,00	386.000.000	96,75	14.647.019.286	DINAS PENDIDIKAN
5	Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penunjang SD	Presentase Sarana dan Prasarana Penunjang SD yang di rehab	%	5,00		100,00	8.832.420.000	DINAS PENDIDIKAN
6	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang SD	Presentase Penyediaan Sarana dan Prasana Penunjang SD	%	3,00	10.240.000.000	100,00	18.062.003.126	DINAS PENDIDIKAN
7	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Jenjang SD	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100,00	27.826.400.000	63,08	473.856.611.623	DINAS PENDIDIKAN
		Nilai Rata-Rata UN SD	Point	81,36		N/a		DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	89,26		87,84		DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	97,47		95,87		DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Sekolah terhadap penduduk usia 7-12 tahun	Orang	940,06		950,00		DINAS PENDIDIKAN
		Persentase sekolah jenjang SD yang terakreditasi minimal B	%	86,90		97,25		DINAS PENDIDIKAN
		Rasio ketersediaan SD-MI terhadap penduduk usia 7-12 tahun	Sekolah	35,72		36,00		DINAS PENDIDIKAN
		Angka Putus Sekolah SD-MI	%	0,09		0,30		DINAS PENDIDIKAN
8	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Utama SMP	Presentase Sarana dan Prasarna Utama yang dibangun	%	5,60	4.412.400.000	94,44	11.528.230.300	DINAS PENDIDIKAN
		% SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa	%	92,72		41,92		DINAS PENDIDIKAN
9	Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Utama SMP	Presentase Sarana dan Prasarna Utama yang direhab	%	9,30	5.150.200.000	92,85	8.209.902.695	DINAS PENDIDIKAN
		Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik	%	97,19				DINAS PENDIDIKAN
10	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang SMP	Presentase Sarana dan Prasarna Penunjang yang dibangun	%	0,25	1.870.000.000	98,63	6.532.228.117	DINAS PENDIDIKAN
11	Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penunjang SMP	Presentase Sarana dan Prasarna Penunjang yang direhab	%	3,00				DINAS PENDIDIKAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
12	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang SMP	Presentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang SMP	%	3,00	1.320.000.000	100,00	43.190.906.000	DINAS PENDIDIKAN
13	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Jenjang SMP	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100,00	32.940.477.500	100,00	124.843.240.682	DINAS PENDIDIKAN
		Nilai Rata-rata UN SMP	Point	60,19		N/a		DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	83,80		71,31		DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	92,72		94,51		DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Sekolah terhadap penduduk usia 13 - 15 tahun	Orang	892,15		736,00		DINAS PENDIDIKAN
		Persentase sekolah jenjang SMP yang terakreditasi minimal B	%	74,21		88,37		DINAS PENDIDIKAN
		Rasio ketersediaan SMP-MTs terhadap penduduk usia 13 - 15 tahun	Sekolah	30,87		31,00		DINAS PENDIDIKAN
		Angka Putus Sekolah SMP-MTs	%	0,253		0,27		DINAS PENDIDIKAN
14	Program Pendidikan Non-Formal	Angka Partisipasi Murni (APM) Paket A	%	89,26	31.681.680.540	0,14	15.862.292.167	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Murni (APM) Paket B	%	83,80		0,95		DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket A	%	97,47		0,69		DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket B	%	92,72		4,61		DINAS PENDIDIKAN
15	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	87,83	115.151.760.000	79,05	148.656.683.813	DINAS PENDIDIKAN
		% SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik	%	86,69		74,34		DINAS PENDIDIKAN
		% SD yang memiliki 6 orang guru	%	98,01		96,06		DINAS PENDIDIKAN
		% SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran	%	40,88		29,81		DINAS PENDIDIKAN
		% SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4	%	99,95		99,57		DINAS PENDIDIKAN
		% SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	93,34		85,63		DINAS PENDIDIKAN
		% SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70%	%	92,32		86,21		DINAS PENDIDIKAN
		% guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35%	%	36,35		28,69		DINAS PENDIDIKAN
		% Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik	%	90,55		83,20		DINAS PENDIDIKAN
		% Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik	%	45,95		40,39		DINAS PENDIDIKAN
		Rasio Guru SD-MI / Murid	Orang	383,92		404,00		DINAS PENDIDIKAN
		Rasio Guru SMP-MTs / Murid	Orang	492,44		513,00		DINAS PENDIDIKAN
		Rasio guru SD-MI/rombel	Point	1,08		1,54		DINAS PENDIDIKAN
16	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	94,00	12.737.800.000	95,19	10.216.116.280	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	88,75		97,14		DINAS PENDIDIKAN
		Persentase perencanaan sesuai target	%	100,00		97,48		DINAS PENDIDIKAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	96,61		96,30		DINAS PENDIDIKAN
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	92,50		100,00		DINAS PENDIDIKAN
I.2	KESEHATAN							
1	Program Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100,00	6.522.141.000	86,18	79.458.545.010	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	100,00		85,26		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100,00		91,62		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	%	100,00		84,21		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	%	100,00		73,73		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	%	88,00		76,11		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	92,50		86,02		DINAS KESEHATAN
		Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,0115		0,0098		DINAS KESEHATAN
		Presentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI ekslusif	%	46,00		51,06		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	%	100,00		42,27		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	100,00		60,16		DINAS KESEHATAN
		Persentase Rumah Tangga Yang Menerapkan PHBS	%	62,50		52,10		DINAS KESEHATAN
		Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan kelompok oleh petugas di masyarakat	%	100,00		100,00		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Desa yang melaksanakan STBM	%	42,00		57,50		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Desa ODF (Open Defection Free)	%	15,00		11,00		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Sarana Air Bersih (SAB)	%	80,08		76,76		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Sanitasi Layak	%	80,36		60,30		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang Memenuhi Syarat	%	65,00		72,60		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Tempat Tempat Umum (TTU) yang Memenuhi Syarat	%	65,00		54,80		DINAS KESEHATAN
2	Program Pelayanan Kesehatan	Akreditasi FKTP	%	0,70	122.372.648.417	12,71	247.208.028.440	DINAS KESEHATAN
		Peningkatan Status Akreditasi Puskesmas Re- Akreditasi	%	28,70		27,50		DINAS KESEHATAN
		Akreditasi puskesmas	%	100,00		80,10		DINAS KESEHATAN
		Peningkatan Cakupan kepesertaan JKN	%	82,00		76,21		DINAS KESEHATAN
3	Program Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	%	76,00	63.594.764.100	40,00	57.577.629.608	DINAS KESEHATAN
4	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	88,00	2.391.834.000	72,70	15.605.541.800	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Keberhasilan pengobatan penderita TBC	%	90,00		71,45		DINAS KESEHATAN
		Cakupan pengobatan semua kasus TB (case detection rate/CDR) yang diobati	%	70,00		63,84		DINAS KESEHATAN
		Cakupan screening HIV pada orang dengan risiko HIV	%	55,00		45,40		DINAS KESEHATAN
		Cakupan kasus cacat kusta tingkat 2	%	5,00		9,00		DINAS KESEHATAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Cakupan Ibu Hamil diperiksa Hepatitis	%	70,00		37,32		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Balita Pneumonia mendapatkan tatalaksana sesuai standar	%	85,00		16,48		DINAS KESEHATAN
		Cakupan keberhasilan POPM Kecacingan	%	75,00		82,75		DINAS KESEHATAN
		Angka Kesakitan/ Incidence Rate (IR) Penderita DBD	%	49,50		21,63		DINAS KESEHATAN
		Cakupan pelayanan penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar	%	100		60,02		DINAS KESEHATAN
		Cakupan pelayanan penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan sesuai standar		100		92,19		DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		100		80,24		DINAS KESEHATAN
5	Program Sumber Daya Kesehatan	Cakupan tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensi nya	%	38,90	92.499.042.300	38,90	105.293.853.427	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Puskesmas yang memenuhi sarana dan prasana sesuai standar	%	73,27		71,38		DINAS KESEHATAN
		Persentase Ketersediaan Obat dan vaksin di Puskesmas	%	90,00		90,00		DINAS KESEHATAN
		Ketersediaan Perbekalan Kesehatan dan Indikator Penialain Pengelolaan Obat di GFK	%	80,00		80,00		DINAS KESEHATAN
6	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk	%	1: 205.833	1.650.000.000	106,07	1.343.539.862	DINAS KESEHATAN
7	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	65,00	53.607.811.000	60,00	50.532.230.468	DINAS KESEHATAN
		Persentase pemenuhan saran dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	100,00		95,00		DINAS KESEHATAN
		Persentase perencanaan sesuai target	%	100,00		92,71		DINAS KESEHATAN
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	100,00		100,00		DINAS KESEHATAN
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	100,00		96,00		DINAS KESEHATAN
8	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Jasinga	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	3.598.057.000	79,69	3.287.043.821	DINAS KESEHATAN
9	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cibungbulang	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	3.858.382.000	77,13	3.102.266.185	DINAS KESEHATAN
10	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Leuwiliang	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	6.278.822.000	84,75	3.990.517.969	DINAS KESEHATAN
11	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Nanggung	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	2.893.740.000	81,25	2.774.514.845	DINAS KESEHATAN
12	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Ciampea	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	3.176.761.000	82,14	3.259.402.759	DINAS KESEHATAN
13	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Ciawi	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	3.400.000.000	78,75	2.456.690.566	DINAS KESEHATAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
14	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cigombong	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	3.066.418.000	78,45	2.987.754.379	DINAS KESEHATAN
15	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cijeruk	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	3.620.256.000	77,23	2.651.900.191	DINAS KESEHATAN
16	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Bojonggede	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	4.579.233.000	78,01	2.627.766.943	DINAS KESEHATAN
17	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Parung	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	3.928.508.000	77,98	3.544.959.939	DINAS KESEHATAN
18	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Sirnagalih	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	2.121.740.000	81,25	1.797.638.566	DINAS KESEHATAN
19	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Tajurhalang	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	3.855.013.000	84,23	2.896.047.742	DINAS KESEHATAN
20	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cigudeg	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	3.648.358.000	77,45	3.005.541.555	DINAS KESEHATAN
21	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cimandala	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	3.668.839.000	89,20	1.671.808.640	DINAS KESEHATAN
22	Program Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Cirimekar	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	1.598.312.000	81,06	1.088.846.424	DINAS KESEHATAN
23	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Citeureup	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	2.441.158.000	81,58	1.738.271.530	DINAS KESEHATAN
24	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Jonggol	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	3.223.609.000	78,01	2.466.949.932	DINAS KESEHATAN
25	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Sentul	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	1.610.631.000	83,50	553.431.309	DINAS KESEHATAN
26	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Tanjung sari	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	2.281.000.000	76,12	2.233.059.717	DINAS KESEHATAN
27	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Bantarjaya	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	1.789.449.000	76,67	1.722.943.528	DINAS KESEHATAN
28	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Tenjo	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	1.808.868.000	80,48	1.627.998.726	DINAS KESEHATAN
29	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Sukajaya	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	1.894.578.000	91,97	1.665.993.256	DINAS KESEHATAN
30	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Parung Panjang	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	3.443.795.200	80,36	2.861.161.094	DINAS KESEHATAN
31	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Tenjolaya	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	3.672.440.000	78,03	3.211.737.948	DINAS KESEHATAN
32	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Rumpin	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	1.681.299.000	79,01	2.309.134.654	DINAS KESEHATAN
33	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Pamijahan	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	3.417.656.000	78,87	2.687.285.337	DINAS KESEHATAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
34	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Leuwisadeng	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	1.666.144.000	77,39	1.560.488.486	DINAS KESEHATAN
35	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Dramaga	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	1.667.863.000	80,34	1.415.127.697	DINAS KESEHATAN
36	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Ciomas	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	1.841.112.000	87,60	1.741.528.547	DINAS KESEHATAN
37	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Caringin	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	4.223.800.000	78,24	3.133.919.849	DINAS KESEHATAN
38	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cisarua	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	1.420.208.000	77,20	1.385.644.648	DINAS KESEHATAN
39	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Megamendung	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	2.195.276.000	77,05	2.071.424.933	DINAS KESEHATAN
40	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Gunung sindur	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	2.055.249.000	76,62	2.126.573.387	DINAS KESEHATAN
41	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Ciseeng	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	3.240.000.000	77,76	3.752.817.851	DINAS KESEHATAN
42	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Kemang	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	2.436.292.000	82,22	2.229.483.432	DINAS KESEHATAN
43	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Gunung Putri	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	1.300.000.000	77,48	1.113.709.175	DINAS KESEHATAN
44	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cileungsi	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	1.747.184.000	74,50	1.653.732.701	DINAS KESEHATAN
45	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Sukamakmur	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	2.837.818.000	78,09	2.153.868.916	DINAS KESEHATAN
46	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cariu	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	1.750.700.000	80,13	1.227.980.300	DINAS KESEHATAN
47	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Klapanunggal	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00	1.461.407.000	77,56	1.388.708.311	DINAS KESEHATAN
48	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Lebakwangi	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		-	-	DINAS KESEHATAN
49	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Puraseda	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		-	-	DINAS KESEHATAN
50	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cijujung	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		-	-	DINAS KESEHATAN
51	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Situ Udik	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		-	-	DINAS KESEHATAN
52	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Banjarsari	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		-	-	DINAS KESEHATAN
53	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Rancabungur	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		-	-	DINAS KESEHATAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
54	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Kemuning	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		-	-	DINAS KESEHATAN
55	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Sukaraja	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		-	-	DINAS KESEHATAN
56	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cilebut	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		-	-	DINAS KESEHATAN
57	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cibinong	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		-	-	DINAS KESEHATAN
58	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Pabuaran Indah	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		-	-	DINAS KESEHATAN
59	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Karadenan	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		-	-	DINAS KESEHATAN
60	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Babakan Madang	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		-	-	DINAS KESEHATAN
61	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Leuwinutug	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		-	-	DINAS KESEHATAN
62	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Tajur	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		-	-	DINAS KESEHATAN
63	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cicangkal	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		-	-	DINAS KESEHATAN
64	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Ciasmara	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		-	-	DINAS KESEHATAN
65	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cinagara	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		-	-	DINAS KESEHATAN
66	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cibulan	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		-	-	DINAS KESEHATAN
67	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Sukamanah	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		-	-	DINAS KESEHATAN
68	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Suliwer	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		-	-	DINAS KESEHATAN
69	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cibeuteung Udik	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		-	-	DINAS KESEHATAN
70	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Jampang	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00			-	DINAS KESEHATAN
71	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Sukadamai	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		-	-	DINAS KESEHATAN
72	Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Ciderum	Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah	%	70,00		-	-	DINAS KESEHATAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
	RSUD CIBINONG							DINAS KESEHATAN
73	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	34.806.655.000	81,82	20.223.935.827	DINAS KESEHATAN
74	Program Pelayanan Keuangan, perencanaan dan pelaporan Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong	Cost Recovery Rate (CRR)	%	40,00	280.000.000	105,88	211.995.000	DINAS KESEHATAN
75	Program Pelayanan Medik RSUD Cibinong	Indeks Mutu Pelayanan Medik	%	75,00	18.550.000.000	99,50	109.300.327.465	DINAS KESEHATAN
76	Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Cibinong	Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan	%	75,00	7.140.000.000	89,84	15.699.840.387	DINAS KESEHATAN
77	Program Peningkatan Pelayanan PPK - BLUD RSUD Cibinong	Tingkat Kepuasan Pasien	%	70,00	141.500.000.000	82,03	167.209.757.534	DINAS KESEHATAN
	RSUD CIAWI							DINAS KESEHATAN
78	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	65,00	21.123.906.000	100,00	22.073.021.842	DINAS KESEHATAN
79	Program Pelayanan Keuangan, perencanaan dan pelaporan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi	Cost Recovery Rate (CRR)	%	100,00	400.280.100	83,20	240.361.490	DINAS KESEHATAN
80	Program Pelayanan Medik RSUD Ciawi	Indeks Mutu Pelayanan Medik	%	75,00	13.733.505.600	79,17	98.559.643.226	DINAS KESEHATAN
81	Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Ciawi	Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan	%	75,00	51.368.074.400	85,42	39.049.055.182	DINAS KESEHATAN
82	Program Peningkatan Pelayanan PPK - BLUD RSUD Ciawi	Tingkat Kepuasan Pasien	%	70,00	139.214.155.000	77,80	168.241.681.023	DINAS KESEHATAN
	RSUD LEUWILIANG							DINAS KESEHATAN
83	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	100,00	15.518.120.463	83,33	8.252.240.145	DINAS KESEHATAN
84	Program Pelayanan Keuangan, perencanaan dan pelaporan Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang	Cost Recovery Rate (CRR)	%	40,00	150.280.555	108,75	75.335.550	DINAS KESEHATAN
85	Program Pelayanan Medik RSUD Leuwiliang	Indeks Mutu Pelayanan Medik	%	75,00	14.660.561.482	97,92	32.528.150.546	DINAS KESEHATAN
86	Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Leuwiliang	Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan	%	75,00	51.190.971.045	95,00	93.590.216.184	DINAS KESEHATAN
87	Program Peningkatan Pelayanan PPK - BLUD RSUD Leuwiliang	Tingkat Kepuasan Pasien	%	70,00	92.082.415.000	78,09	93.838.003.878	DINAS KESEHATAN
	RSUD CILEUNGSI							DINAS KESEHATAN
88	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	%	65,00	17.031.783.800	86,67	13.656.054.482	DINAS KESEHATAN
89	Program Pelayanan Keuangan, perencanaan dan pelaporan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi	Cost Recovery Rate (CRR)	%	100,00	288.700.000		146.324.750	DINAS KESEHATAN
90	Program Pelayanan Medik RSUD Cileungsi	Indeks Mutu Pelayanan Medik	%	75,00	51.851.344.000	76,50	41.333.583.708	DINAS KESEHATAN
91	Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Cileungsi	Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan	%	75,00	8.287.363.000	77,50	5.985.115.765	DINAS KESEHATAN
92	Program Peningkatan Pelayanan PPK - BLUD RSUD Cileungsi	Tingkat Kepuasan Pasien	%	70,00	40.896.381.000	80,05	34.478.852.547	DINAS KESEHATAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
I.3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Persentase realisasi penyelesaian pembangunan jalan baru	Km	4,00	330.037.909.000	4,80		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			%	33,33		34,75		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase realisasi penyelesaian pembangunan jembatan baru	%					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase peningkatan jalan kabupaten	%	45,21		20,11		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase peningkatan jembatan kabupaten	%	17,95		19,17		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Program Pembangunan Jalur Pedestrian	Peningkatan persentase capaian penyediaan pembangunan jalur pedestrian	%	5,09	5.000.000.000	2,08		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Panjang Jalan yang memiliki jalur pedestrian yang berkualitas	meter	1.547,00				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	Program Penyediaan drainase dan pengamanan jalan	Persentase jalan yang memiliki saluran drainase/saluran pembuangan air	%	31,12	29.278.000.000	28,26		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung rawan longsor	%	49,25		35,98		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang direhabilitasi	%	0,59	81.647.400.000	0,26		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase jembatan yang direhabilitasi	%	0,36				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase jalan yang dipelihara	%	58,07		48,26		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase jembatan yang dipelihara	%	100		100		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Persentase penyediaan kebutuhan penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan	%	100		100		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	Program Pengelolaan Laboratorium dan Bahan Konstruksi	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan bahan laboratorium dan bahan konstruksi	%	100	23.220.000.000	100		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	Program Pengelolan Peralatan dan Perbengkelan	Persentase ketersediaan dan terpeliharanya sarana peralatan kebinamargaan	%	100	550.000.000	100		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	Program Pengawasan dan Pengendalian Kondisi Jalan dan Jembatan	Persentase penyediaan data dan informasi kondisi dan pemanfaatan jalan dan jembatan	%	100	2.702.000.000	100		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Persentase daerah irigasi yang ditingkatkan	%	2,19	138.376.472.000	1,82		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase daerah irigasi yang direhabilitasi	%	4,38		6,16		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase daerah irigasi kabupaten yang dipelihara	%	23,64		24,34		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9	Program Pengendalian Daya Rusak Air	Persentase pembuatan TPT saluran dan TPT di wilayah aliran sungai rawan longsor	%	39,19	31.600.480.000	35,81		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10	Program Pengelolaan Penataan Situ	Persentase penataan situ	%	25,00	200.000.000	25,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11	Program Pengawasan Jaringan Irigasi	Persentase penyediaan data dan informasi kondisi jaringan irigasi	%	100	1.275.000.000	100		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
12	Program Pembangunan Drainase Lingkungan	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali setahun	% Penduduk	25,10	18.950.000.000	28,42		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	Program Pengembangan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	%	71,01	35.103.050.000	72,94		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	17,17				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	69,23		42,89		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	69,23		42,89		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
14	Program Pelayanan Air Limbah	Persentase capaian pelayanan air limbah domestik	%	100,00	1.000.000.000	59,87		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
15	Program Pengelolaan Jasa Konstruksi	Persentase fasilitasi bantuan teknis bangunan gedung pemerintahan	%	75,00	8.344.000.000	75,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase rekomendasi pemanfaatan sarana dan prasarana ke-PU-an yang diberikan	%	92,00		100,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase tenaga terampil konstruksi yang dilatih untuk mendapat sertifikat	%	50,00		87,17		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
16	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	100,00	1.150.000.000	100,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
17	Program Pemanfaatan Ruang	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Rasio	0,05	1.700.000.000	0,04		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
18	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	82,00	465.000.000	75,56		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
19	Program Pengadaan Tanah	Persentase realisasi pengadaan tanah	%	25,74	13.858.750.000	11,23		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
20	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	80,00	12.817.000.000	64,85		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	100,00		100,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase perencanaan sesuai target	%	100,00		100,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	100,00		100,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	100,00		100,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
I.4	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**							
1	Program Penataan Perumahan	persentase perumahan yang tertata	%	93,90	2.526.061.000	99,41	25.492.424.550	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Rasio rumah layak huni	rasio	0,2469		0,2695		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	%	100,00		59,00		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		cakupan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	%	100,00		-		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	Program Pengelolaan Rusunawa	Persentase Rusunawa yang dikelola	%	100,00	694.985.500	39,29	586.362.500	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3	Program Penataan Kawasan permukiman	Luas area kawasan permukiman yang tertata	M2	1.101.846,67	3.152.182.000	545.600,00		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Rasio permukiman layak huni	rasio	0,9980		0,9979		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
4	Program Penataan Bangunan	Persentase dokumen teknis yang diterbitkan	%	95,00	938.057.678	105,74		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5	Program Penataan Fasilitas Perumahan dan Permukiman	Persentase PSU perumahan yang tertata	%	26,22	10.312.880.000	25,33		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Jumlah taman/ruang publik terbangun	lokasi	159,00		159,00		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Persentase TPU yang tertata	%	57,21		8,00		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	‰	36,65		148,86		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
6	Program Pengelolaan reklame	Persentase jalur strategis reklame yang tertata	%	62,50	3.705.610.144	33,00		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
7	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	84,00	8.833.165.345	96,29		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	84,00		70,58		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Persentase perencanaan sesuai target	%	95,00		100,00		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	95,00		94,70		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	100,00		100,00		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
I.5	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**							
1	Program Penegakan Perda	Persentase Penegakan PERDA	%	100,00	1.119.734.400	100,00	736.040.500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	Program Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100,00	16.243.464.331	100,00	19.954.068.275	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Cakupan layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	100,00				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3	Program Perlindungan Masayarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	108,75	701.200.000	108,80	669.029.400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
4	Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat dalam Penanganan Tramtibum	Jumlah Pembinaan Penegakan Perda dan Tramtibum Kepada Aparatur dan Masyarakat dalam satu tahun	orang	70,00	1.096.040.000	70,00	767.771.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
5	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	80,00	2.948.484.000	80,00	9.208.186.652	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	80,00		100,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase perencanaan sesuai target	%	98,00		95,83		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	98,00		97,09		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	85,00		100,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	Program Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam	Persentase mitigasi yang dilaksanakan	%	35,00	1.156.159.000	21,05	4.355.359.400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Cakupan layanan informasi rawan bencana	%	100,00		100,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00		100,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00		100,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
2	Program Tanggap Darurat Bencana Alam	Persentase jumlah korban bencana yang ditangani	%	100,00	2.905.679.000	99,98	4.874.823.763	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3	Program Pemulihan Pasca Bencana Alam	Persentase pemulihan di daerah terkena bencana	%	100,00	700.000.000	59,23	1.095.312.350	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4	Program Pelayanan Adm Umum,Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasaan Layanan Kesekretariatan	%	80,00	2.552.376.837	80,00	3.474.654.471	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	80,00		80,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Persentase Perencanaan Sesuai dengan target	%	80,00		97,19		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Persentase Kinerja keuangan PD sesuai target	%	100,00		96,26		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Persentase pelayanan Kepegawaian	%	100,00		100,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan Kebakaran	Persentase kapasitas masyarakat dan petugas pemadam kebakaran	%	16,67	721.078.000	15,58	1.407.905.843	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
2	Program Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	%	28,26	8.488.217.625	26,78	35.584.405.478	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00		101,67		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
3	Program Pengelolaan Data informasi dan Pengawasan Proteksi Kebakaran	Persentase inspeksi pengawasan dan proteksi kebakaran	%	15,00	320.445.375	14,70	1.155.891.830	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	55,00	3.644.405.944	80,00	8.735.386.719	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	2,68		80,00		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Persetase perencanaan sesuai target	%	28,30		80,00		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Persentase kinera keuangan perangkat daerah sesuai target	%	97,00		80,00		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	60,08		80,00		DINAS PEMADAM KEBAKARAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
I.6	**SOSIAL**							
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase keluarga Miskin yang Mendapat Bantuan	%	50,00	8.004.000.000	-	5.969.730.600	DINAS SOSIAL
		Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat bencana kabupaten	%	100,00		22,52		DINAS SOSIAL
		Persentase PMKS yang diberikan jaminan sosial	%	100,00		57,64		DINAS SOSIAL
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial serta Pembinaan para Penyandang Disabilitas dan Trauma	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	45,00	5.196.282.906	2,09	3.309.492.600	DINAS SOSIAL
3	Program Pemberdayaan PSKS dan Kepedulian Sosial Masyarakat	Persentase PSKS yang terlatih dan aktif dalam penanganan PMKS	%	66,10	7.349.940.969	5,75	6.387.178.400	DINAS SOSIAL
4	Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PMKS di BKS	Persentase Pelayanan PMKS yang dilaksanakan	%	65,00	950.000.000	100,00	691.605.650	DINAS SOSIAL
5	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	65,00	3.751.400.000	83,97	4.951.159.876	DINAS SOSIAL
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	2,50		81,50		DINAS SOSIAL
		Persentase perencanaan sesuai target	%	27,27		97,27		DINAS SOSIAL
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	97,01		97,01		DINAS SOSIAL
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	60,08		60,08		DINAS SOSIAL
II	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**							
II.1	**TENAGA KERJA**							
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kualitasnya	orang	220,00	1.561.214.000	210,00	666.684.600	DINAS TENAGA KERJA
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	12,38	2.632.034.000	11,66	1.171.730.550	DINAS TENAGA KERJA
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	41,18		50,00		DINAS TENAGA KERJA
3	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	50,74	1.184.773.000	65,63	576.532.700	DINAS TENAGA KERJA
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	35,33		14,95		DINAS TENAGA KERJA
4	Program Uji kompetensi angkatan kerja	Besaran tenaga kerja yang lulus uji kompetensi	%	93,75	1.034.762.000	86,25	307.252.800	DINAS TENAGA KERJA
5	Program peningkatan kompetensi pencari kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	67,57	2.003.410.000	72,64	606.485.400	DINAS TENAGA KERJA
6	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	85,00	3.553.933.000	85,00	3.749.630.424	DINAS TENAGA KERJA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	70,00		70,00		DINAS TENAGA KERJA
		Persentase perencanaan sesuai target	%	92,00		92,00		DINAS TENAGA KERJA
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	96,22		96,22		DINAS TENAGA KERJA
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	91,15		91,15		DINAS TENAGA KERJA
II.2	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							
1	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Kepala Keluarga Perempuan Yang Memperoleh Keterampilan	%	10,00	1.665.222.450	0,87	2.150.623.800	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Data Terpi;ah	%	32,05		34,72		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Rasio KDRT	%	0,0036		0,0044		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
2	Program Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase terbentuknya forum anak tingkat kecamatan	%	13,00	1.199.786.966	11,54	1.196.701.600	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Data Terpi;ah	%	20,00		33,33	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3	Program Pengelolaan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Pendampingan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	%	100,00	370.038.152	100,00	446.417.250	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Laayanan Kesekretariatan '	%	100,00	5.434.339.981	100,00	6.638.515.515	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	100,00		100,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase Perencanaan Sesuai Taerget	%	100,00		100,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase Kinerja Keuanggan Perangkat Daerah Sesuai Target	%	100,00		100,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	100,00		100,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
II.3	**PANGAN**							
1	Program Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	Skor Angka Kecukupan Energi	%	105,00	1.662.250.000	108,60	2.138.832.773	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Skor Angka Kecukupan Protein	%	111,30		119,51		DINAS KETAHANAN PANGAN
2	Program Pengembangan Pengawasan, Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	92,00	917.568.000	74,21	837.643.175	DINAS KETAHANAN PANGAN
3	Program Pengawasan dan Pengujian Pangan Segar	Keamanan Pangan Segar yang Diuji	%	88,00	300.000.000	89,93	226.521.275	DINAS KETAHANAN PANGAN
4	Program Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Ketersediaan Energi per Kapita	%	102,80	2.375.918.000	103,90	1.293.090.250	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Ketersediaan Protein per Kapita:	%	144,30		127,95		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Ketersediaan Pangan Utama	%	37,63		58,00		DINAS KETAHANAN PANGAN
5	Program Distribusi dan Cadangan Pangan	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	%	92,00	1.611.500.000	92,86	5.749.098.050	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	%	100,00		100,00		DINAS KETAHANAN PANGAN
6	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan	%	85,00	4.706.781.933	85,00	3.825.801.629	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75,00		75,00		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Persentase perencanaan sesuai target	%	85,00		85,00		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	90,00		97,17		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	85,00		85,00		DINAS KETAHANAN PANGAN
II.4	**PERTANAHAN**							
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah aset pemda yang terdaftar	Bidang	80,00	1.544.824.125	30,00		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Jumlah Tanah Masyarakat yang terdaftar melalui Program Pemerintah	Bidang	80.000,00		41.000,00		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
II.5	**LINGKUNGAN HIDUP**							
1	Program Pengelolaan Sampah	Peningkatan penanganan sampah	%	41,03	88.325.176.220	22,83	37.872.720.885	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Peningkatan Pengurangan sampah	%	11,57		5,90		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	Program Pelayanan Pengelolaan Sampah	Persentase Operasionalisasi Pelayanan Angkutan Sampah	%	100,00	15.491.356.500	100,00	47.950.751.068	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	Program Penataan Lingkungan	Persentase area konservasi dalam bentuk hutan kota dan taman kehati	%	40,00	1.485.000.000	10,00	1.495.127.988	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	Program Pembinaan, Pengendalian dan Pemantauan Kualitas Lingkungan	Tingkat capaian penaatan sumber penghasil emisi terhadap baku mutu udara	%	80,00	4.050.000.000	80,00	2.228.263.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase peningkatan pelaku usaha yang melakukan pengelolaan B3 dan limbah B3	%	16,89		25,30		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	Program Peningkatan Kerjasama Kemitraan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan Sekolah yang berbudaya lingkungan dan Kampung Ramah Lingkungan	sekolah	465,00	3.538.000.000	450,00	1.742.535.823	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah satgas lingkungan hidup	orang	82,00		82,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	Program Penataan Hukum dan Pemulihan Lingkungan	Persentase Pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	91,67	1.500.000.000	102,00	1.027.669.750	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	Program Pelayanan Pengujian UPT Laboratorium	Persentase layanan uji laboratorium lingkungan	%	100,00	1.663.170.000	100,00	887.925.420	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8	Program Pelayana Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan layanan kesekreariatan	%	75,00	56.775.383.800	95,84	22.348.711.467	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yg berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75,00		75,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase perencanaan sesuai target	%	100,00		100,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	100,00		100,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	100,00		100,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
II.6	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang Melakukan Pemanfaatan Data dan Kerjasama Pelayanan kependudukan	unit	8	730.612.000	5	760.155.800	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	Angka Rasio	1,00	3.000.074.000	1,00	2.812.008.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
3	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Rasio bayi berakte kelahiran	Angka Rasio	1,00	1.245.540.000	0,8535	717.383.300	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengolahan NIK dan Biodata penduduk dalam SIAK	%	100,00	3.974.092.000	100,00	15.773.376.757	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	Program Pelayanan Ke UPT an	Cakupan Jumlah Penduduk Pemohon Adminduk yang Terlayani	%	100,00	314.720.000	100,00	106.287.700	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6	Program Pelayanan Administrasi umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	100,00	13.213.042.000	83,00	8.692.105.185	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	100,00		100,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase perencanaan sesuai target	%	100,00		100,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	94,28		94,28		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	100,00		100,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
II.7	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							
1	Program Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa	Strata BUMDes :			1.650.000.000		1.192.257.150	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Mandiri		4,00		4,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Maju		15,00		15,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Berkembang		25,00		25,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Dasar		372,00		372,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		persentase raperdes tentang APBDes yang diklarifikasi	%	100,00		100,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		persentase desa yang dibina dalam pengelolaan keuangan dan aset desa	%	100,00		100,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	Program Pemerintahan Desa	Tingkat perkembangan desa :			1.800.000.000		2.722.867.406	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Jumlah Cepat Berkembang	desa	20,00		20,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Jumlah Berkembang	desa	175,00		175,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Jumlah Kurang Berkembang	desa	221,00		221,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Prosentase raperdes tentang RKPDes yang dievaluasi dan diklarifikasi	%	100,00		100,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Sekolah Desa/Kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Lainnya	MoU	2,00		2,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	aplikasi	1,00		1,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Posyandu aktif	%	100,00	1.430.000.000	100,00	486.124.500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Strata posyandu :						DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Jumlah Mandiri	posyandu	1339		1.339,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Jumlah Purnama	posyandu	1.618,00		1.618,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Jumlah Madya	posyandu	1.917,00		1.917,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Jumlah Pratama	posyandu	53,00		53,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Persentase PKK aktif	%	100,00		100,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Persentase LPM Berprestasi	%	4,80		4,80		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4	Program Sarana Prasarana dan Kewilayahan	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	4,80	1.450.000.000	4,80	586.021.775	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5	Program Pelayanan Administrasi umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	50,00	4.000.000.000	46,50	4.857.167.065	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pegawai	%	50,00		50,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Persentase perencanaan sesuai target	%	100,00		100,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	100,00		100,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	50,00		50,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
II.8	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							
1	Program Penyuluhan Dan Advokasi Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%	83,09	1.969.785.040	84,51	7.201.974.045	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Rasio Petugas Pembantu Pembina KB (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	%	100,00		100,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	Program Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	Persentase Pelayanan KB Terhadap Pasangan Usia Subur	%	11,08	2.554.245.877	11,13	3.181.647.850	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Yang Ber-KB	%	77,97		83,60	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Yang Ber-KB	%	76,07		79,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Yang Ber-KB	%	76,14		84,16		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	%	77,14		87,31		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Jumlah Kelompok Yang Terbentuk PIK Remaja	%	70,00		75,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
II.9	**PERHUBUNGAN**							
1	Program Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase Pemasangan Rambu -rambu	%	45,36	20.440.069.999	0,36	680.772.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	Program Pengelolaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	jumlah Rambu-rambu yang terpelihara	Kecamatan	40,00	9.215.000.000	4,00	7.519.341.302	DINAS PERHUBUNGAN
3	Program Peningkatan Keselamatan LLAJ	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	kendaraan	45.000,00	6.088.100.000	40.050,00	3.586.549.500	DINAS PERHUBUNGAN
4	Program Pengendalian Ketetiban Lalu Lintas Sarana dan Prasarana LLAJ	Tingkat Kinerja Pelayanan Lalu Lintas (V/C rasio)	rasio	0,80	9.212.000.000	0,82	11.537.219.920	DINAS PERHUBUNGAN
5	Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Persentase layanan angkutan darat	%	60,00	13.519.692.972	65,00	1.159.872.500	DINAS PERHUBUNGAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
6	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	80,00	54.948.838.128	70,00	45.356.414.402	DINAS PERHUBUNGAN
		presentase pemenuhnan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	80,00		75,00		DINAS PERHUBUNGAN
		persentase perencanaan sesuai target	%	80,00		92,00		DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	80,00		92,00		DINAS PERHUBUNGAN
		Presentase pelayanan kepegawaian	%	80,00		100,00		DINAS PERHUBUNGAN
II.10	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							
1	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat secara Online yang ditindaklanjuti	%	82,00	3.390.792.000	82,00	2.250.161.164	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase Penyebaran Informasi melalui Media Komunikasi	%	88,00		88,89	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	Program Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat Layanan Sistem Informasi	%	4,00	4.948.491.000	3,27	6.807.737.351	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3	Program Layanan Komunikasi dan Informatika	Cakupan Layanan Komunikasi dan Informatika	%	85,00	4.938.080.000	85,00	6.737.415.400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	100		100		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	79,79		80,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	%	90,00	6.159.080.000	90,00	6.225.010.605	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk pegawai	%	90,00		90,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase Perencanaan sesuai Target	%	98,00		98,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai Target	%	97,50		97,50		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	90,00		90,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
II.11	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**							
1	Program Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	98,97	9.891.739.019	98,97	8.064.185.200	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	69,89		72,32		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	%	0,69		0,39		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	Program Kelembagaan dan Pengawasan	Persentase koperasi aktif	%	36,34	4.171.184.000	35,44	1.700.715.400	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Persentase Lembaga Koperasi yang diawasi	%	11,87		8,49		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	persentase Usaha koperasi yang diberdayakan dan dikembangkan	%	5,48	5.300.745.000	7,03	2.654.859.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4	Program Pelayanan Administrasi Umum Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan , dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	95,00	3.805.178.000	90,65	3.971.254.687	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yg berkualitas utk seluruh pegawai	%	100,00		91,32		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Persentase perencanaan sesuai target	%	100,00		100,00		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	97,00		94,34		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	94,00		90,65		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
II.12	**PENANAMAN MODAL**							
1	Program Peningkatan Iklim Investasi	Laju Pertumbuhan Investasi PMA-PMDN	%	5,50	1.373.248.000	(0,22)	2.889.357.706	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Jumlah Nilai investasi PMA-PMDN meningkat	Trilyun Rp	9,60		9,16		DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		PMA		5,58		2,86		DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PMDN		4,02		6,30		DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Rasio daya serap tenaga kerja	Orang/Perusahaan	30,00		10,80		DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	5,50		42,86		DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	350,00	3.000.000.000	357,00		DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PMA		181,00		150,00		DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PMDN		169,00		207,00		DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	Program Pengembangan Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Izin Terbit (Bidang Pemanfaatan Ruang)	Berkas Izin	30.000,00	2.605.000.000	52.702,00	2.011.789.350	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	Program Pengembangan Pelayanan Perizinan Operasional	Jumlah Izin Terbit (Bidang Operasional))	Berkas Izin	8.000,00	2.765.683.438	7.700,00	2.045.061.975	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	Program Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang diawasi	Perusahaan	100,00	919.000.000	81,00	1.655.129.600	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Perizinan Non OSS Berstandar ISO	Izin	40,00				DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6	Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan	Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Sistem	1,00	1.300.000.000	1,00		DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
7	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	%	70,00	6.113.625.000	70,00	7.807.859.405	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas untuk seluruh Pegawai	%	90,00		90,00		DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Presentase Perencanaan sesuai Target	%	90,00		90,00		DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Presentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai Target	%	90,00		90,00		DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Presentase Pelayanan Kepegawaian	%	90,00		90,00		DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
II.13	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							
1	Program Layanan Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti Pelatihan	Orang	3.500,00	12.000.000.000		4.611.950.110	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	Program Pembudayaan Olahraga	Jumlah Kegiatan Olahraga yang diikuti/dilaksanakan	Kegiatan	12,00	8.336.340.000	-	860.254.250	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Jumlah Penerima penghargaan bagi insan dan penggiat olahraga	Orang	50,00		-		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Peringkat Kabupaten Bogor pada multievent Tk Provinsi Jawa Barat :	Peringkat		10.300.000.000	-	8.027.191.500	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	Gedung/Lapangan	4,00	27.600.000.000	-	9.743.705.283	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
5	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga Wilayah	Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga Wilayah	Gom/Gor/Stadion/Stadion Mini	23,00	14.250.000.000	18,00	16.148.722.470	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
6	Program Pendidikan, Pelatihan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa (PPOPM)	Cakupan pembinaan atlet muda	Orang	165,00	12.000.000.000	155,00	7.109.294.420	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
7	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75,00	4.127.856.557	75,00	4.407.620.767	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75,00		75,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Persentase perencanaan sesuai target	%	95,00		95,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	95,00		95,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	95,00		95,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
II.14	**STATISTIK**							
1	Program Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data staistik sektoral	%	100	500.000.000	-	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
II.15	**PERSANDIAN**							
1	Program Pengelolaan Persandiaan	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100	988.307.000	100	1.341.338.300	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
II.16	**KEBUDAYAAN**							
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	25,00	2.204.050.000	2,00	403.647.500	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	45,00	1.204.550.000	40,00	984.703.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	Warisan	66,00		65,00		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya	46,00	2.268.350.000	45,00	838.731.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	51,00	3.572.498.727	51,10	6.403.128.069	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	51,00		51,10		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Persentase perencanaan sesuai target	%	90,00		105,35		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	95,00		92,86		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	51,00		51,10		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
II.17	**PERPUSTAKAAN**							
1	Program Penyelenggaraan pengembangan pengelolaan perpustakaan	Jumlah perpustakaan diwilayah	Perpust	225,00	931.000.000	226,00	283.556.900	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
		Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Persen	0,04		0,04		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
		Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	36,62		34,13		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan	Persen	1,84	1.133.000.000	0,68	447.046.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
		Rasio Pengelola Perpustakaan	Persen	3,69		3,69		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
		Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	Persen	1,00		1,00		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
3	Program pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	nilai	65,55	3.148.275.000	65,55	2.444.157.909	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
		Pesentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas seluruh pegawai	Persen	80,00		80,00		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
		Persentase perencaanaan sesuai target	Persen	95,00		95,00		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	Persen	95,25		95,25		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
		Persentase pelayanan kepegawaian	Persen	96,00		96,00		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
II.18	**KEARSIPAN**							
1	Program Peningkatan pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian dan layanan informasi dokumen/arsip daerah	Persentase arsip yang terkelola	Persen	49,02	1.751.500.000	52,01	1.397.573.800	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
		Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	100,00		100,00		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	Program pembinaan penyelenggaraan kearsipan	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	kegiatan	3,00	700.000.000	3,00	1.397.573.800	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
		Persentase pengelolaan kerasipan yang berpredikat baik pada unit kearsipan	Persen	76,67		76,67		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
III	**URUSAN PILIHAN**							
III.1	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**							
1	Peningkatan Budidaya Perikanan	Produksi ikan konsumsi	ton	125.822,41	3.342.319.000	118.711,84	3.451.665.175	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		Produksi Benih Ikan	RE	5.713.106,56		5.308.175,98		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		Produksi Ikan Hias	RE	292.036,85		315.882,64		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		Konsumsi Ikan	kg/kap/thn	30,06		29,99		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	Program Peningkatan Daya Saing, Pengelolaan, Pemasaran dan Kelembagaan Produksi Perikanan	Produksi olahan produk perikanan	ton	23.163,00	2.521.600.000	16.038,37	2.068.081.084	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		Peningkatan status kelas Kelompok perikanan	%	2,00		2,00		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Petencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan	%	100,00	4.683.993.053	100,00	4.050.032.372	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		Presentasi Pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh Pegawai	%	100,00		100,00		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		Persentase Perencanaan sesuai Target		100,00		100,00		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		Persentasi Kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	100,00		100,00		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		Persentase pelayanan Kesekretariatan	%	100,00		100,00		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	100,00		100,00		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
III.2	**PARIWISATA**							
1	Program Pengembangan Pemasaran	Kunjungan Wisatawan Domestik	Wisatawan	8.064.000	5.030.342.000	4.408.734	6.689.809.359	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Wisatawan	336.000		60.552		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Jumlah event pariwisata	event	12		11		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	Program Pengembangan Destinasi Priwisata	Jumlah usaha pariwisata berstandar nasional	Usaha	20	1.434.826.000	20	1.082.727.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	Program Pengembangan Kemitraan	Lama Kunjungan Wisata	Hari	2	3.094.862.000	2	3.055.773.500	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
III.3	PERTANIAN							
1	Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Pangan	Produksi padi dan palawija	Ton	570.750	8.597.899.404	621.679	7.444.103.555	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Padi	Ton GKG	418.884		477.255		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Palawija	Ton	151.867		144.424		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Produktivitas tanaman pangan:						DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Produktivitas Padi	ku/ha	55,78		62,53		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Produktivitas Padi Sawah	ku/ha	33,64		34,36		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Produktivitas Palawija	ku/ha	171,92		172,91		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Persentase nilai tambah tanaman pangan	%	1,95		2,52		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
2	Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan	Produksi Tanaman Perkebunan:	Ton	8.032	6.567.180.500,00	8.602	3.992.691.303,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Persentase nilai tambah tanaman perkebunan	%	7,00		8,00		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura	Produksi Tanaman Hortikultura:			8.675.947.000		2.802.797.909	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Produksi Buah-buahan	Ton	60.572		106.555		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Produksi Sayuran	Ton	92.950		112.493		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Produksi Tanaman Hias	Tangkai	4.192.294		4.060.663		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Pohon	415.494		750.257		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Produksi tanaman obat	Ton	4.453		9.539		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Produktivitas sayuran	ku/ha	116,17		131,02		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Persentase nilai tambah tanaman hortikultura	%	8,00		10,00		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
4	Program Pengembangan Teknologi Pertanian	Persentase pelayanan teknis pertanian	%	80,00	6.374.558.000	80,00	5.852.997.284	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Jumlah benih/bibit unggul yang dihasilkan	Ton	90,00		88,00		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Jumlah data dan Informasi pertanian	dok	2,00		2,00		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
5	Program pengembangan SDM Pertanian dan kelembagaan petani	Persentase penyuluh pertanian yang meningkat kompetensinya	%	100,00	6.168.184.000	100,00	3.557.453.750	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Jumlah kelompok tani yang meningkat kelas kemampuannya	klpk	5,00		5,00		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Jumlah metode teknologi pertanian	unit	12,00		12,00		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
6	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	85,00	5.624.482.000	85,00	4.823.389.246	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75,00		75,00		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Persetase perencanaan sesuai target	%	85,00		85,00		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		Persentase kinera keuangan perangkat daerah sesuai target	%	90,00		90,00		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	85,00		85,00		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
1	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan, Perikanan dan Peternakan	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan, perikanan dan perikanan	%	100,00	8.534.697.000	100,00	7.581.594.178	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan	Produksi Daging	ton	193.274,76	5.985.088.000	189.322,00	2.402.291.750	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		Produksi Telur	ton	47.633,82		144.052,00		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		Produksi Susu	ton	20.108,00		21.320,00		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		Produksi Olahan Ternak	ton	73.260,90		115.112,61		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		Peningkatan status kelas Kelompok peternakan	%	2,11		6.089.447,00		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		Produksi DOC (Day Out Chick/Bibit) Ayam Lokal Unggul termasuk Terbanyak di Indonesia	Ekor	6.390.151		2		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	Program Pencegahan, penanggulangan penyakit hewan dan pengamanan kesehatan Produk Hewan	Penanggulangan Penyakit Hewan:			2.289.816.000		1.125.921.241	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		- Rabies	Kecamatan	40		40		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		- Anthrax	Kecamatan	40		40		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		- SE	Kecamatan	40		40		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		- AI	Kecamatan	40		40		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		- Brucellosis	Kecamatan	40		40		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		peningkatan Keamanan Produk Hewan yang ASUH	Kecamatan	40		40		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
III.4	**PERDAGANGAN**							
1	Program Pengembangan Perdagangan	Jumlah Eksportir (berdasarkan registrasi SKA)	Eksportir	328	19.425.813.897	322	3.507.105.265	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Jumlah sistem distribusi barang yang lancar dan informasi harga	Unit	5		5		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
2	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha	Persentase UTTP bertanda tera sah dan berlaku	%	60,56	5.732.376.800	60,90	3.009.790.970	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan Dan delaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	95,00	7.452.169.000	95,00	8.090.184.697	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yg berkualitas utk seluruh pegawai	%	100,00		100,00		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Persentase perencanaan sesuai target	%	100,00		100,00		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	97,00		97,00		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	94,00		94,00		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
III.5	**PERINDUSTRIAN**							
	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Jumlah komoditi unggulan IKM	Jenis	5	12.341.433.000	5	8.653.192.401	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana IKM	IKM	500		500		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
III.6	**TRANSMIGRASI**							
	Program Transmigrasi Regional	Laju pengiriman transmigrasi regional	%	100,00	183.245.000	-	21.098.000	DINAS TENAGA KERJA
IV	**PENUNJANG URUSAN**							
IV.1	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**							
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah	Konsistensi program RKPD Terhadap RPJMD	%	100,00	2.854.796.000	100,00	1.395.536.250	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan Provinsi	%	100,00		100,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan Nasional	%	80,00		80,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Persentase Ketersediaan data dan Informasi Berbasis SIPD	%	25,72		25,72		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Daya Alam	Konsistensi program RKPD terhadap RPJMD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Daya Alam	%	100,00	2.250.000.000	100,00	616.239.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Konsistensi program Renstra terhadap RPJMD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Daya Alam	%	100,00		100,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Konsistensi program Renstra terhadap RPJMD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100,00	2.661.384.000	100,00	985.348.380	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Konsistensi program Renja terhadap RKPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100,00		100,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Konsistensi program Renstra terhadap RPJMD Lingkup Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	%	100,00	3.520.004.000	100,00	1.256.215.600	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Konsistensi program Renja terhadap RKPD Lingkup Bidang Inprastruktur Dan Pengembangan Wilayah	%	100,00		100,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Kesesuaian rencana pembangunan terhadap rencana struktur ruang RTRW	%	70,00		70,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	Program Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	Prosentase Hasil Kajian /Penelitian yang Inovatif yang disosilisasikan ke Pemerintah Daerah dan Masyarakat Oleh Perangkat Daerah dan Perguruan Tinggi/Lembaga Peneliti	%	100,00	3.230.000.000	20,00	736.986.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
6	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indek Kepuasan Layanan Kesekretariatan	%	80,00	9.339.244.000	80,00	8.252.955.518	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh Pegawai	%	80,00		80,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Persentase Perencanaan Sesuai Target	%	100,00		100,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Sesuai	%	95,00		95,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Sesuai	%	95,00		95,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Persentase Pelayanan Kepegawaian		100,00		100,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
IV.2	KEUANGAN							
1	Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Persentase Ketepatan Penggunaan Kode Rekening pada Perangkat Daerah	%	83,33	3.017.617.000	100,00	3.262.930.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase Kesesuaian Kegiatan pada Penyusunan Anggaran di Perangkat Daerah dengan RKPD	%	100,00		100,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase Ketepatan Perangkat Daerah dalam Pengajuan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan	%	88,89		97,22		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran	Ada/Tidak Ada	Ada		100,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2	Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Penerbitan SP2D yang Diajukan oleh Perangkat Daerah dalam 2 Hari	%	99,91	2.428.594.000	99,94	4.273.689.825	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang Terbit	Dokumen	931,00		978		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase Pengajuan SPP/SPM Belanja Tidak Langsung yang Lengkap	%	93,14		99,94		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	Program Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Daerah	Waktu	Tepat	2.883.510.000	100,00	2.305.452.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Persentase Ketepatan Perhitungan Saldo Kas Akhir Tahun Perangkat Daerah	%	88,89		94,44		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Penyusunan RKA sesuai dengan RDKBMD/RDKPBMD	%	86,12	2.615.479.000	97,22	2.471.986.441	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tertib di Perangkat Daerah	%	86,12		100,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase BMD yang dimanfaatkan	%	48,01		30,26		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase BMD yang memiliki Hak Kepemilikan	%	33,03		33,09		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	%	75,00	7.213.245.000	75,00	11.959.548.503	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas untuk seluruh Pegawai	%	85,00		85,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase Perencanaan sesuai Target	%	85,00		85,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai Target	%	85,00		79,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	85,00		85,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
1	Program Perencanaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah	Rp (dalam milyar)	7.709,00	844.926.745	7.702,60	468.931.350	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
2	Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer	Persentase Dana Transfer Terhadap Pendapatan Daerah	%	63,78	335.045.050	63,28	221.793.993	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
3	Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp (dalam milyar)	2.792,00	2.355.883.275	2.828,15	1.977.098.030	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
4	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Dan Pajak Air Tanah	Jumlah Penerimaan 8 Pajak Daerah Lainnya	Rp (dalam milyar)	785,00	3.051.025.292	699,32	1.768.683.300	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Wajib Pajak 8 Jenis Pajak Daerah	WP	4.990,00		33.775.911.204,00		BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Piutang 8 Pajak Dearah Berbayar	Rp (dalam milyar)	28,00		3.078,00		BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
5	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2)	Jumlah Penerimaan PBB P2	Rp (dalam Milyar)	508,00	16.104.636.050	526,07	7.928.654.380	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		Colection Ratio	%	59,27		97,46		BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Piutang PBB P2 Berbayar	Rp (dalam Milyar)	97,00		116,56		BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
6	Program Optimalisasi Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Penerimaan BPHTB	Rp (dalam milyar)	591,00	2.619.624.000	632,02	1.768.161.200	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
7	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah di Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A	Persentase Realisasi Target Pajak Daerah pada Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A	%	100,00	600.000.000	129,20	6.572.726.869	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
8	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	%	80,00	16.502.746.402	80,00	28.185.743.609	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	80,00		80,00		BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		Persentase Perencanaan sesuai Target	%	100,00		98,85		BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai		100,00		76,93		BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	100,00		99,30		BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
IV.3	**KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							
1	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	20	17.114.821.000	2	8.779.984.701	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	1,59		1,30		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	10,02		7,26		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2	Program Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin, Penilaian Kinerja serta Kesejahteraan ASN	Persentase pegawai ASN Pemkab Bogor yang mempunyai nilai SKP Minimal Baik	%	85,01	2.754.196.000	91,77	3.664.965.800	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Persentase pemberian penghargaan tanda jasa bagi pegawai ASN yang memenuhi persyaratan	%	100,00		95,00		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penetapan pemberian penghargaan kinerja pegawai yang objektif, transparan dan akuntabel	%	100,00		100,00		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
3	Program Penataan Mutasi dan Kepangkatan	Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi	%	72,04	1.679.056.000	71,55	1.659.253.750	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Persentase Kenaikan pangkat tepat waktu	%	100,00		98,34		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	orang	37,00		32,00		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	orang	246,00		251,00		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	10.656,00		9.819,00		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
4	Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi data	persentase pemenuhan ASN sesuai dengan formasi kebutuhan	%	90,65	1.186.568.000	95,35	1.690.063.700	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		persentase akurasi data kepegawaian	%	83,72		83,02		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	90,00	3.655.921.000	24,00	4.195.956.131	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	100,00		100,00		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Persentase perencanaan sesuai target	%	100,00		100,00		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	97,25		80,02		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	100,00		100,00		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
V	**URUSAN PENDUKUNG**							
V.1	**PENGAWASAN**							
1	Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan	temuan	100	1.564.396.000	85,66	1.421.092.140	INSPEKTORAT
2	Program peningkatan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai AKIP Minimal "B"	Predikat	B	858.290.000	B	271.736.700	INSPEKTORAT
		Tindak Lanjut temuan BPK	%	80		80		INSPEKTORAT
3	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75,00	3.566.819.000	75,00	2.914.945.731	INSPEKTORAT
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	100,00		100,00		INSPEKTORAT
		Persentase perencanaan sesuai target	%	100,00		100,00		INSPEKTORAT
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	85,00		100,00		INSPEKTORAT
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	100,00		100,00		INSPEKTORAT

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
V.2	**SEKRETARIAT DPRD**							
1	Program Penyelenggaraan Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Presentase Raperda yang difasilitasi	%	70,00	24.142.260.000	100,00	18.591.313.772	SEKRETARIAT DPRD
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Ada/Tidak	ada		Ada		SEKRETARIAT DPRD
2	Program Penyelenggaraan Fasilitasi Penganggaran Dan Pengawasan	Tersedianya dokumen fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD	Ada/Tidak	ada	16.626.091.000	Ada	17.033.223.281	SEKRETARIAT DPRD
3	Program Pengelolaan Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	%	65,00	10.938.589.000	65,00	13.476.265.989	SEKRETARIAT DPRD
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	100		100		SEKRETARIAT DPRD
		persentase pelayanan kepegawaian	%	90,00		90,00		SEKRETARIAT DPRD
4	Program Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD	Persentase Perencanaan sesuai target	%	100	2.484.595.000	82	1.435.768.258	SEKRETARIAT DPRD
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	90,00		67,92		SEKRETARIAT DPRD
V.3	**SEKRETARIAT DAERAH**							
1	Program Koordinasi Lingkup Perekonomian	Jumlah BUMD Sehat	BUMD	3,00	1.183.000.000	3,00	569.743.194	SEKRETARIAT DAERAH
		Rumusan Kebijakan Lingkup Perekonomian	Rumusan Kebijakan	6,00		6,00		SEKRETARIAT DAERAH
2	Program Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keagamaan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan di Bidang Keagamaan	Kegiatan	15,00	11.745.349.000	10,00	3.203.743.000	SEKRETARIAT DAERAH
3	Program Koordinasi Lingkup Administrasi Pemerintahan	Rumusan Kebijakan lingkup Administrasi Pemerintahan	Rumusan Kebijakan	4,00	43.229.234.000	4,00	1.674.332.335	SEKRETARIAT DAERAH
4	Program Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Produk hukum daerah yang diterbitkan	Produk Hukum Daerah	438,00	1.372.331.000	487,00	465.159.723	SEKRETARIAT DAERAH
5	Program Koordinasi Lingkup Bantuan dan Penyuluhan Hukum	Persentase cakupan bantuan hukum yang tertangani	%	100,00	1.085.000.000	100,00	781.636.100	SEKRETARIAT DAERAH
6	Program Koordinasi Lingkup Kesejahteraan Rakyat	Rumusan Kebijakan Lingkup Kesejahteraan Rakyat	Rumusan Kebijakan	14,00	2.876.384.000	14,00	429.740.000	SEKRETARIAT DAERAH
7	Program Koordinasi Lingkup Program dan Pengendalian Pembangunan	Rumusan Kebijakan lingkup Program dan Pengendalian Pembangunan	Rumusan Kebijakan	2,00	1.167.961.000	2,00	1.641.881.640	SEKRETARIAT DAERAH
8	Program Penyusunan Kerjasama Pemerintah	Kerjasama daerah	Kerjasama Daerah	50,00	448.025.000	35,00	340.770.941	SEKRETARIAT DAERAH
9	Program Koordinasi Pengadaan Barang/ Jasa	Persentase Pengadaan barang/ jasa yang selesai sesuai permohonan dari Perangkat Daerah	%	98,00	16.229.757.000	97,26	11.038.094.840	SEKRETARIAT DAERAH
10	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rumusan Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Rumusan Kebijakan	34,00	649.175.000	34,00	425.724.176	SEKRETARIAT DAERAH

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
11	Program Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Rumusan Akuntabilitas Kinerja	Rumusan Kebijakan	4,00	2.425.000.000	4,00	1.414.249.482	SEKRETARIAT DAERAH
12	Program Kajian Strategis	Rumusan Kajian Strategis	Kajian	60,00	150.000.000	60,00	406.938.742	SEKRETARIAT DAERAH
13	Program Pengelolaan Ketatausahaan Sekretariat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	70,00	4.095.393.000	100,00	3.176.758.610	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	100,00		100,00		SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase perencanaan sesuai target	%	100,00		93,33		SEKRETARIAT DAERAH
14	Program Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang terlayani	%	100,00	2.329.210.000	100,00	2.950.675.096	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	92,00		92,72		SEKRETARIAT DAERAH
15	Program Pengelolaan Rumah Tangga dan Protokol Sekretariat Daerah	Index kepuasaan pelayanan kesekretariatan	%	70,00	44.098.031.000	100,00	48.301.919.770	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	100,00		100,00		SEKRETARIAT DAERAH
VI	**URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							
VI.1	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							
1	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan Politik	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan di masyarakat	Kegiatan	9,00	8.822.538.429	3,00	505.119.600	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Pembinaan Politik	Kegiatan	10,00		1,00		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase peran aktif, penguatan dan pemberdayaan orkesmas	%	37,41		37,41		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan,Perencanaan dan Pelaporan Perangkat	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	96,55	1.736.101.420	100,00	3.451.831.665	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	96,55		96,55		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase perencanaan sesuai target	%	96,55		96,55		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	%	96,55		100,00		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase pelayanan kepegawaian	%	96,55		100,00		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
VII	**KEWILAYAHAN**							
VII.1	**KECAMATAN CIBINONG**							
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	48.000.000	100	14.684.000	KEC. CIBINONG
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	1.451.835.022	100	378.378.000	KEC. CIBINONG
3	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan	Presentase Pembinaan Oleh Kelurahan	%	100	4.976.410.000	100	3.976.138.000	KEC. CIBINONG
4	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	1.603.907.000	100	1.215.614.029	KEC. CIBINONG
5	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong	%	75	1.336.671.925	75	1.329.270.000	KEC. CIBINONG
6	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong	%	75	1.360.860.000	75	1.216.176.000	KEC. CIBINONG
7	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong	%	75	1.159.066.000	75	1.121.493.650	KEC. CIBINONG
8	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nanggewer Mekar Kecamatan Cibinong	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Nanggewer Mekar Kecamatan Cibinong	%	75	1.284.009.000	75	1.187.718.000	KEC. CIBINONG
9	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong	%	75	1.192.443.000	75	1.100.445.700	KEC. CIBINONG
10	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong	%	75	1.194.678.000	75	1.050.714.500	KEC. CIBINONG
11	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Harapan Jay Kecamatan Cibinong	%	75	1.151.287.000	75	985.921.600	KEC. CIBINONG
12	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong	%	75	1.213.401.000	75	1.072.887.000	KEC. CIBINONG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
13	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong	%	75	1.218.918.000	75	950.500.680	KEC. CIBINONG
14	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong	%	75	1.153.470.000	75	1.060.355.000	KEC. CIBINONG
15	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong	%	75	1.281.325.000	75	953.771.000	KEC. CIBINONG
16	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong	%	75	1.233.470.000	75	651.068.900	KEC. CIBINONG
17	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong	%	75	1.224.518.000	75	1.201.744.600	KEC. CIBINONG
18	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	6.060.133.000	75	1.711.878.529	KEC. CIBINONG
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		75		KEC. CIBINONG
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		75		KEC. CIBINONG
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		75		KEC. CIBINONG
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		75		KEC. CIBINONG
VII.2	**KECAMATAN GUNUNG PUTRI**						**2.689.454.000**	
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	30.000.000	100	12.400.000	KEC. GUNUNGPUTRI
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	684.519.500	100	442.298.000	KEC. GUNUNGPUTRI
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	604.967.000	60	1.183.286.000	KEC. GUNUNGPUTRI
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.072.365.000	75	1.051.470.000	KEC. GUNUNGPUTRI
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		75		KEC. GUNUNGPUTRI
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		75		KEC. GUNUNGPUTRI
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		75		KEC. GUNUNGPUTRI

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		75		KEC. GUNUNGPUTRI
VII.3	**KECAMATAN CITEUREUP**						**4.930.455.272**	
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	15.840.000	-	-	KEC. CITEUREUP
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	277.607.000	100	205.321.500	KEC. CITEUREUP
3	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan	Presentase Pembinaan Oleh Kelurahan	%	100	861.379.200	100	707.193.000	KEC. CITEUREUP
4	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	734.500.000	100	575.862.162	KEC. CITEUREUP
5	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Puspanegara Kecamatan Citeureup	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Puspanegara Kecamatan Citeureup	%	75	1.346.428.000	100	940.072.950	KEC. CITEUREUP
6	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup	%	75	1.302.034.000	100	833.155.500	KEC. CITEUREUP
7	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	2.685.626.600		1.668.850.160	KEC. CITEUREUP
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75				KEC. CITEUREUP
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75				KEC. CITEUREUP
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75				KEC. CITEUREUP
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75				KEC. CITEUREUP
VII.4	**KECAMATAN SUKARAJA**							
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	24.852.000			KEC. SUKARAJA
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	660.000.000			KEC. SUKARAJA
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	700.000.000			KEC. SUKARAJA
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.751.182.000			KEC. SUKARAJA
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75				KEC. SUKARAJA
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75				KEC. SUKARAJA
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75				KEC. SUKARAJA
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75				KEC. SUKARAJA
VII.5	**KECAMATAN BABAKAN MADANG**							
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	30.932.000	100	4.533.000	KEC. BABAKAN MADANG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	702.472.000	100	495.052.500	KEC. BABAKAN MADANG
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	562.746.000	100	506.022.500	KEC. BABAKAN MADANG
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	800.000.000	80	586.185.000	KEC. BABAKAN MADANG
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		80		KEC. BABAKAN MADANG
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		KEC. BABAKAN MADANG
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		80		KEC. BABAKAN MADANG
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		80		KEC. BABAKAN MADANG
VII.6	**KECAMATAN JONGGOL**						**1.883.290.311**	
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	55.000.000	100	45.614.000	KEC. JONGGOL
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	350.820.000	100	275.866.800	KEC. JONGGOL
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	532.808.000	100	389.610.250	KEC. JONGGOL
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	2.262.830.000	75	1.172.199.261	KEC. JONGGOL
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		75		KEC. JONGGOL
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		75		KEC. JONGGOL
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		75		KEC. JONGGOL
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		75		KEC. JONGGOL
VII.7	**KECAMATAN CILEUNGSI**							
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	66.420.000			KEC. CILEUNGSI
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	1.124.133.000			KEC. CILEUNGSI
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	829.272.000			KEC. CILEUNGSI
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.071.899.000			KEC. CILEUNGSI
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75				KEC. CILEUNGSI
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75				KEC. CILEUNGSI
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75				KEC. CILEUNGSI

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75				KEC. CILEUNGSI
VII.8	**KECAMATAN CARIU**						**1.630.549.347**	
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	22.548.229	100	6.400.000	KEC. CARIU
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	789.188.028	100	426.123.400	KEC. CARIU
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	338.223.441	100	411.035.672	KEC. CARIU
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.478.143.750	90	786.990.275	KEC. CARIU
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		90		KEC. CARIU
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		90		KEC. CARIU
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		90		KEC. CARIU
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		90		KEC. CARIU
VII.9	**KECAMATAN SUKAMAKMUR**							
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	53.000.000	100	13.508.000	KEC. SUKAMAKMUR
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	352.103.448	100	223.005.000	KEC. SUKAMAKMUR
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	356.200.000	100	409.784.000	KEC. SUKAMAKMUR
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	7.739.000.000	100	732.535.532	KEC. SUKAMAKMUR
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75				KEC. SUKAMAKMUR
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75				KEC. SUKAMAKMUR
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75				KEC. SUKAMAKMUR
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75				KEC. SUKAMAKMUR
VII.10	**KECAMATAN PARUNG**						**1.407.114.712**	
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	18.198.000	100	17.012.000	KEC. PARUNG
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	866.213.000	98	429.442.000	KEC. PARUNG
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	473.610.000	100	402.397.000	KEC. PARUNG
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	800.000.000	93	558.263.712	KEC. PARUNG
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75				KEC. PARUNG
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75				KEC. PARUNG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75				KEC. PARUNG
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75				KEC. PARUNG
VII.11	**KECAMATAN GUNUNG SINDUR**						**1.488.429.684**	
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	50.000.000	100	17.485.000	KEC. GUNUNG SINDUR
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	536.440.000	100	143.499.000	KEC. GUNUNG SINDUR
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	497.940.000	80	395.063.000	KEC. GUNUNG SINDUR
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.312.960.000	100	932.382.684	KEC. GUNUNG SINDUR
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		100		KEC. GUNUNG SINDUR
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		100		KEC. GUNUNG SINDUR
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		100		KEC. GUNUNG SINDUR
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		100		KEC. GUNUNG SINDUR
VII.12	**KECAMATAN KEMANG**							
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	67.253.000	72	32.033.000	KEC. KEMANG
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	1.060.262.000	60	186.780.800	KEC. KEMANG
3	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan	Presentase Pembinaan Oleh Kelurahan	%	100	211.670.000	59	111.684.400	KEC. KEMANG
4	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	497.939.000	54	255.714.400	KEC. KEMANG
5	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Atang Sanjaya Kecamatan Kemang	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Atang Sanjaya Kecamatan Kemang	%	75	1.007.487.000	48	259.234.000	KEC. KEMANG
6	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.244.424.000	33	412.246.826	KEC. KEMANG
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		dihitung akhir tahun		KEC. KEMANG
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		dihitung akhir tahun		KEC. KEMANG
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		dihitung akhir tahun		KEC. KEMANG
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		dihitung akhir tahun		KEC. KEMANG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
VII.13	KECAMATAN BOJONGGEDE							
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	15.480.000	100	6.320.000	KEC. BOJONGGEDE
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	671.975.000	100	265.846.000	KEC. BOJONGGEDE
3	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan	Presentase Pembinaan Oleh Kelurahan	%	100	439.345.000	100	355.053.000	KEC. BOJONGGEDE
4	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	518.422.000	100	69.755.000	KEC. BOJONGGEDE
5	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede	%	75	1.143.822.000	100	339.527.000	KEC. BOJONGGEDE
6	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.424.356.000	76	588.629.175	KEC. BOJONGGEDE
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		0		KEC. BOJONGGEDE
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		96		KEC. BOJONGGEDE
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		77		KEC. BOJONGGEDE
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		100		KEC. BOJONGGEDE
VII.14	KECAMATAN LEUWILIANG							
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	16.875.000		0	KEC. LEUWILIANG
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	542.085.000	5	103.075.000	KEC. LEUWILIANG
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	421.650.000	50	80.393.000	KEC. LEUWILIANG
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.652.408.000	50	403.175.182	KEC. LEUWILIANG
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		50		KEC. LEUWILIANG
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		33		KEC. LEUWILIANG
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		33		KEC. LEUWILIANG
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		33		KEC. LEUWILIANG
VII.15	KECAMATAN CIAMPEA							
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	30.400.000	100	14.786.000	KEC. CIAMPEA
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	393.622.498	100	337.846.980	KEC. CIAMPEA
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	1.095.596.500	100	272.902.000	KEC. CIAMPEA
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.121.766.000	100	519.791.965	KEC. CIAMPEA
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		100		KEC. CIAMPEA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		100		KEC. CIAMPEA
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		100		KEC. CIAMPEA
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		100		KEC. CIAMPEA
VII.16	**KECAMATAN CIBUNGBULANG**							
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	25.000.000	100	30.875.000	KEC. CIBUNGBULANG
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	1.004.435.000	100	456.775.000	KEC. CIBUNGBULANG
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	765.426.000	100	154.404.000	KEC. CIBUNGBULANG
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.312.388.000	-	1.048.522.078	KEC. CIBUNGBULANG
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		-		KEC. CIBUNGBULANG
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		-		KEC. CIBUNGBULANG
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		-		KEC. CIBUNGBULANG
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		-		KEC. CIBUNGBULANG
VII.17	**KECAMATAN PAMIJAHAN**							
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	111.456.000	100	6.698.000	KEC. PAMIJAHAN
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	1.634.522.500	100	17.218.000	KEC. PAMIJAHAN
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	947.611.000	60	177.645.000	KEC. PAMIJAHAN
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	9.696.065.500	75	2.115.856.683	KEC. PAMIJAHAN
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		43		KEC. PAMIJAHAN
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		76		KEC. PAMIJAHAN
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		24		KEC. PAMIJAHAN
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		100		KEC. PAMIJAHAN
VII.18	**KECAMATAN RUMPIN**					97.72	**951.808.650**	
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	11.129.000	100	1.853.500	KEC. RUMPIN
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	139.429.000	99.84	189.137.637	KEC. RUMPIN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	398.758.513	99.43	188.301.375	KEC. RUMPIN
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	2.761.235.165	96.49	572.516.138	KEC. RUMPIN
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		-		KEC. RUMPIN
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		89		KEC. RUMPIN
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		41		KEC. RUMPIN
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		100		KEC. RUMPIN
VII.19	**KECAMATAN JASINGA**						**1.355.019.640**	
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	39.100.000	0	0	KEC. JASINGA
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	982.752.000	100	233.185.000	KEC. JASINGA
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	740.848.000	100	303.873.900	KEC. JASINGA
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	7.800.125.000	100	817.960.740	KEC. JASINGA
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		100		KEC. JASINGA
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		88		KEC. JASINGA
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		95		KEC. JASINGA
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		100		KEC. JASINGA
VII.20	**KECAMATAN PARUNG PANJANG**							
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	25.000.000	100	55.000.000	KEC. PARUNG PANJANG
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	852.000.000	100	372.970.000	KEC. PARUNG PANJANG
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	617.000.000	100	282.397.000	KEC. PARUNG PANJANG
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.148.391.000	75	842.193.000	KEC. PARUNG PANJANG
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		0		KEC. PARUNG PANJANG
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		72		KEC. PARUNG PANJANG
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		0		KEC. PARUNG PANJANG
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		100		KEC. PARUNG PANJANG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
VII.21	**KECAMATAN NANGGUNG**						**1.778.075.825**	
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	17.800.000	100	7.375.000	KEC. NANGGUNG
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	740.550.000	100	553.441.100	KEC. NANGGUNG
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	436.365.000	60	100.040.280	KEC. NANGGUNG
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.141.618.000	-	1.117.219.445	KEC. NANGGUNG
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		100		KEC. NANGGUNG
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		76		KEC. NANGGUNG
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		84		KEC. NANGGUNG
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		100		KEC. NANGGUNG
VII.22	**KECAMATAN CIGUDEG**					1.394.796.000		
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	44.500.000	21.127.000	21.127.000	KEC. CIGUDEG
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	1.891.555.000	394.856.000	393.116.500	KEC. CIGUDEG
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	453.600.000	335.854.000	321.583.400	KEC. CIGUDEG
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.174.565.276	642.959.000	640.515.484	KEC. CIGUDEG
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75				KEC. CIGUDEG
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75				KEC. CIGUDEG
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75				KEC. CIGUDEG
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75				KEC. CIGUDEG
VII.23	**KECAMATAN TENJO**						**1.143.134.410**	
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	30.000.000	100	19.630.000	KEC. TENJO
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	593.340.000	100	234.513.500	KEC. TENJO
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	607.727.000	100	235.514.900	KEC. TENJO
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	935.700.000	100	653.476.010	KEC. TENJO
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75				KEC. TENJO
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75				KEC. TENJO
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75				KEC. TENJO

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75				KEC. TENJO
VII.24	**KECAMATAN CIAWI**							
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	16.130.000	100	16.750.000	KEC. CIAWI
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	1.022.243.000	100	318.345.400	KEC. CIAWI
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	579.682.000	100	236.658.000	KEC. CIAWI
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.576.732.500	-	436.043.181	KEC. CIAWI
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		-		KEC. CIAWI
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		94		KEC. CIAWI
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		83		KEC. CIAWI
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		100		KEC. CIAWI
VII.25	**KECAMATAN CISARUA**							
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	20.663.000	100	11.062.500	KEC. CISARUA
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	1.129.155.000	100	436.297.500	KEC. CISARUA
3	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan	Presentase Pembinaan Oleh Kelurahan	%	100	229.058.000	100	378.081.000	KEC. CISARUA
4	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	593.607.000	83	360.098.000	KEC. CISARUA
5	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua	%	75	1.545.925.000	100	921.498.500	KEC. CISARUA
6	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	899.910.000	84	621.861.982	KEC. CISARUA
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		84		KEC. CISARUA
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		94		KEC. CISARUA
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		98		KEC. CISARUA
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		100		KEC. CISARUA
VII.26	**KECAMATAN MEGAMENDUNG**							
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	49.620.000	82	30.300.000	KEC. MEGAMENDUNG
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	605.068.500	99	242.491.500	KEC. MEGAMENDUNG
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	492.465.000	98	313.179.900	KEC. MEGAMENDUNG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.972.373.638	94	744.910.480	KEC. MEGAMENDUNG
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		-		KEC. MEGAMENDUNG
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		87		KEC. MEGAMENDUNG
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		74		KEC. MEGAMENDUNG
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		100		KEC. MEGAMENDUNG
VII.27	**KECAMATAN CARINGIN**						**1.106.775.082**	
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	17.784.000	12	6.851.000	KEC. CARINGIN
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	813.131.000	5	157.070.000	KEC. CARINGIN
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	410.800.000	5	348.810.000	KEC. CARINGIN
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.650.009.100	22	594.044.082	KEC. CARINGIN
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		0		KEC. CARINGIN
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		0		KEC. CARINGIN
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		0		KEC. CARINGIN
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		0		KEC. CARINGIN
VII.28	**KECAMATAN CIJERUK**							
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	10.684.421	100	24.997.500	KEC. CIJERUK
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	442.676.750	80	208.704.750	KEC. CIJERUK
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	317.967.827	100	398.236.500	KEC. CIJERUK
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.472.302.500	96	590.502.845	KEC. CIJERUK
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		100		KEC. CIJERUK
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		86		KEC. CIJERUK
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		99		KEC. CIJERUK
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		100		KEC. CIJERUK

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
VII.29	**KECAMATAN CIOMAS**						**2.939.349.823**	
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	22.572.000	100	3.372.000	KEC. CIOMAS
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	414.845.000	100	408.691.100	KEC. CIOMAS
3	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan	Presentase Pembinaan Oleh Kelurahan	%	100	272.830.000	100	283.630.000	KEC. CIOMAS
4	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	491.987.000	40	150.196.500	KEC. CIOMAS
5	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas	Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas	%	75	1.417.392.000	100	1.174.249.600	KEC. CIOMAS
6	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.891.267.000	0	919.210.623	KEC. CIOMAS
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		75		KEC. CIOMAS
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		83		KEC. CIOMAS
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		46		KEC. CIOMAS
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		100		KEC. CIOMAS
VII.30	**KECAMATAN DRAMAGA**						**1.202.858.000**	
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	15.000.000	-	-	KEC. DRAMAGA
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	751.273.500	5	269.360.500	KEC. DRAMAGA
3	Program Fasilitasi Kegiatan SKPD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	704.241.500	5	503.922.500	KEC. DRAMAGA
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.006.950.000	20	429.575.000	KEC. DRAMAGA
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75				KEC. DRAMAGA
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75				KEC. DRAMAGA
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75				KEC. DRAMAGA
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75				KEC. DRAMAGA
VII.31	**KECAMATAN TAMANSARI**							
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	15.000.000	99	14.933.500	KEC. TAMANSARI
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	762.820.000	99	432.640.900	KEC. TAMANSARI
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	328.680.000	99	184.550.500	KEC. TAMANSARI
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.041.266.000	99	695.864.137	KEC. TAMANSARI
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		100		KEC. TAMANSARI

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		97		KEC. TAMANSARI
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		99		KEC. TAMANSARI
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		100		KEC. TAMANSARI
VII.32	**KECAMATAN KLAPANUNGGAL**							
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	75	17.662.000	100	25.309.000	KEC. KLAPANUNGGAL
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	75	509.626.000	100	198.533.000	KEC. KLAPANUNGGAL
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi Kegiatan PD	%	75	536.160.000	75	295.187.000	KEC. KLAPANUNGGAL
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.175.067.103	83	919.310.225	KEC. KLAPANUNGGAL
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		100		KEC. KLAPANUNGGAL
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		94		KEC. KLAPANUNGGAL
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		98		KEC. KLAPANUNGGAL
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		100		KEC. KLAPANUNGGAL
VII.33	**KECAMATAN CISEENG**							
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	50.000.000	-	-	KEC. CISEENG
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	202.000.000	100	226.851.200	KEC. CISEENG
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	451.238.000	100	283.649.400	KEC. CISEENG
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.792.932.800	70	604.736.817	KEC. CISEENG
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		-		KEC. CISEENG
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		-		KEC. CISEENG
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		-		KEC. CISEENG
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		-		KEC. CISEENG
VII.34	**KECAMATAN RANCABUNGUR**							
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	16.810.000	-	-	KEC. RANCABUNGUR

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	482.821.214	80	340.128.054	KEC. RANCABUNGUR
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	446.541.200	60	82.561.000	KEC. RANCABUNGUR
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	705.000.000	91	655.450.449	KEC. RANCABUNGUR
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		-		KEC. RANCABUNGUR
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		80		KEC. RANCABUNGUR
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		99		KEC. RANCABUNGUR
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		100		KEC. RANCABUNGUR
VII.35	**KECAMATAN SUKAJAYA**						**2.455.528.469**	
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	38.325.000	100	38.325.000	KEC. SUKAJAYA
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	542.537.100	99	528.665.400	KEC. SUKAJAYA
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	631.829.200	99	608.424.400	KEC. SUKAJAYA
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.279.691.600	96	1.280.113.669	KEC. SUKAJAYA
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75				KEC. SUKAJAYA
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75				KEC. SUKAJAYA
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75				KEC. SUKAJAYA
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75				KEC. SUKAJAYA
VII.36	**KECAMATAN TANJUNGSARI**							
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	42.909.794	100	20.666.000	KEC. TANJUNGSARI
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	792.281.265	100	262.828.000	KEC. TANJUNGSARI
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	785.458.500	100	130.666.000	KEC. TANJUNGSARI
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	680.808.121	87	218.339.938	KEC. TANJUNGSARI
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		100		KEC. TANJUNGSARI
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		87		KEC. TANJUNGSARI
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		69		KEC. TANJUNGSARI

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		100		KEC. TANJUNGSARI
VII.37	**KECAMATAN TAJURHALANG**							
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	38.880.000			KEC. TAJURHALANG
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	503.570.000	100	17.280.000	KEC. TAJURHALANG
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	349.386.000	100	332.058.000	KEC. TAJURHALANG
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	790.237.000	60	109.508.000	KEC. TAJURHALANG
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		94	673.294.100	KEC. TAJURHALANG
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		-		KEC. TAJURHALANG
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		91		KEC. TAJURHALANG
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		98		KEC. TAJURHALANG
						100		
VII.38	**KECAMATAN CIGOMBONG**							
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	8.800.000	-	-	KEC. CIGOMBONG
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	962.315.370	100	288.905.694	KEC. CIGOMBONG
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	520.099.750	80	194.444.000	KEC. CIGOMBONG
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	922.577.983	-	584.309.664	KEC. CIGOMBONG
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		-		KEC. CIGOMBONG
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		92		KEC. CIGOMBONG
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		82		KEC. CIGOMBONG
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		100		KEC. CIGOMBONG
VII.39	**KECAMATAN LEUWISADENG**							
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	14.113.000			KEC. LEUWISADENG
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	125.000.000	80	29.377.200	KEC. LEUWISADENG
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	534.868.600	100	374.323.700	KEC. LEUWISADENG
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.268.992.700	-	415.583.696	KEC. LEUWISADENG
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		-		KEC. LEUWISADENG
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		73		KEC. LEUWISADENG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		110		KEC. LEUWISADENG
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		100		KEC. LEUWISADENG
VII.40	**KECAMATAN TENJOLAYA**						**1.951.158.086**	
1	Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	14.527.000	100	8.527.000	KEC. TENJOLAYA
2	Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%	100	235.500.000	100	354.888.536	KEC. TENJOLAYA
3	Program Fasilitasi Kegiatan PD	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%	100	408.320.000	100	427.601.726	KEC. TENJOLAYA
4	Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%	75	1.130.464.996	75	1.160.140.824	KEC. TENJOLAYA
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%	75		75		KEC. TENJOLAYA
		Persentase perencanaan sesuai target	%	75		75		KEC. TENJOLAYA
		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target	%	75		75		KEC. TENJOLAYA
		Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	75		75		KEC. TENJOLAYA

Tabel 7.4

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021-2023

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR (2023)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
I.1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**1.800.821.491.959**		**1.517.032.009.856**		**1.618.528.717.900**		**4.936.382.219.715**	
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka kelulusan jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat	%	100,00	550.953.221.638	100,00	619.883.609.797	100,00	536.261.342.521	100,00	1.707.098.173.956	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	%	43,14		43,65		44,17		44,17		DINAS PENDIDIKAN
		Persentase sekolah jenjang SD yang terakreditasi minimal B	%	98,21		99,12		100,00		100,00		DINAS PENDIDIKAN
		Persentase sekolah jenjang SMP yang terakreditasi minimal B	%	89,79		90,59		91,38		91,38		DINAS PENDIDIKAN
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio/10.000	442,32	130.587.877.974	446,73	131.685.000.000	451,15	113.920.700.231	451,15	376.193.578.205	DINAS PENDIDIKAN
3	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Sekolah Pendidikan Dasar yang Melaksanakan Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	%	100,00	144.697.100	100,00	210.759.420	100,00	182.327.985	100,00	537.784.505	DINAS PENDIDIKAN
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	1.119.135.695.247	100,00	765.252.640.639	100,00	968.164.347.163	100,00	2.852.552.683.049	DINAS PENDIDIKAN
I.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2.209.941.390.248**		**2.042.614.876.248**		**1.236.477.428.526**		**5.489.033.695.022**	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi	%	100,00	1.053.615.078.903	100,00	1.161.613.930.824	100,00	790.843.514.495	100,00	3.006.072.524.222	DINAS KESEHATAN
		Persentase pemanfaatan layanan kesehatan	%	68,00		70,00		72,00		72,00		DINAS KESEHATAN
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kelompok potensial yang berperan serta dalam bidang kesehatan	%	100,00	1.079.735.086	100,00	1.189.950.650	100,00	638.753.720	100,00	2.908.439.456	DINAS KESEHATAN
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase jumlah SDM kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	100,00	8.444.053.756	100,00	1.535.894.600	100,00	1.007.896.739	100,00	10.987.845.095	DINAS KESEHATAN
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase fasyankes kefarmasian yang memenuhi persyaratan standar	%	100,00	20.550.000	100,00	20.550.000	100,00	9.893.479	100,00	50.993.479	DINAS KESEHATAN
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	1.146.781.972.503	100,00	878.254.550.174	100,00	443.977.370.093	100,00	2.469.013.892.770	DINAS KESEHATAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR (2023)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**1.237.620.948.385**		**892.036.127.612**		**1.013.512.423.234**		**3.143.169.499.231**	
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas daerah irigasi yang ditangani	%	36,00	118.705.405.534	38,00	91.185.000.000	40,00	100.303.500.000	40,00	310.193.905.534	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	%	71,36	34.702.569.470	73,77	16.360.000.000	77,23	32.173.016.328	77,23	83.235.585.798	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	70,70	26.493.479.424	71,70	18.559.999.988	72,70	21.725.238.702	72,70	66.778.718.114	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	%	20,00	26.691.219.916	25,00	16.360.000.000	30,00	20.886.811.095	30,00	63.938.031.011	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten yang ditangani	%	55,00	791.774.075.910	56,00	504.516.876.994	57,00	690.339.762.826	57,00	1.986.630.715.730	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Tertata	%	100,00	45.386.071.160	100,00	72.077.123.884	100,00	22.332.366.909	100,00	139.795.561.953	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
7	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Infrastuktur Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara	%	22,50	81.008.265.667	35,00	58.588.276.668	50,00	48.271.162.991	50,00	187.867.705.326	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Dikendalikan dan Ditata	%	30,19	3.221.010.639	63,37	11.700.666.858	100,00	2.074.554.397	100,00	16.996.231.894	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analis/yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	20,83	19.093.745.357	41,67	7.082.480.200	54,17	4.860.291.465	54,17	31.036.517.022	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Pengawasan Pemanfaatan Ruang	%	100,00	3.681.443.070	100,00	3.159.999.158	100,00	2.387.161.930	100,00	9.228.604.158	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	86.863.662.238	100,00	92.445.703.862	100,00	68.158.556.590	100,00	247.467.922.690	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
I.4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**108.048.595.750**		**143.310.015.786**		**85.667.213.642**		**337.025.825.178**	
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni di Lokasi Bencana	%	37,19	36.284.572.500	67,28	31.431.909.737	100,00	24.028.868.983	100,00	91.745.351.220	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Telah Direhabilitasi	%	17,82	35.584.246.457	25,81	74.969.589.554	33,80	40.083.554.582	33,80	150.637.390.593	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	%	56,89		78,45		100,00		100,00		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang telah menjadi aset Pemda	%	74,17	520.829.750	79,13	702.109.585	81,10	2.225.613.506	81,10	3.448.552.841	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	35.658.947.043	100,00	36.206.406.910	100,00	19.329.176.572	100,00	91.194.530.525	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR (2023)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**122.876.027.430**		**95.502.602.799**		**81.282.308.772**		**299.660.939.001**	
					45.639.274.239		**48.285.339.774**		**41.963.936.586**		**135.888.550.599**	
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00	21.887.981.575	100,00	22.902.972.480	100,00	22.850.767.873	100,00	67.641.721.928	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase Pemberdayaan Linmas	%	100,00		100,00		100,00		100,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	23.751.292.664	100,00	25.382.367.294	100,00	19.113.168.713	100,00	68.246.828.671	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					49.164.072.745		**19.361.960.485**		**18.345.274.244**		**86.871.307.474**	
1	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	60,00	38.270.732.460	80,00	8.603.895.399	100,00	8.152.109.430	100,00	55.026.737.289	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Kelompok Masyarakat yang Memahami Pengurangan Risiko Bencana	%	20,00		40,00		60,00		60,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100,00		100,00		100,00		100,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	10.893.340.285	100,00	10.758.065.086	100,00	10.193.164.814	100,00	31.844.570.185	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					28.072.680.446		**27.855.302.540**		**20.973.097.942**		**76.901.080.928**	
1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran	%	100,00	16.331.756.348	100,00	17.715.712.781	100,00	12.026.172.529	100,00	46.073.641.658	
		Layanan Pemadaman yang Dilakukan oleh Relawan Kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau Komunitas Masyarakat Lainnya)	%	100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran)	%	100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	11.740.924.098	100,00	10.139.589.759	100,00	8.946.925.413	100,00	30.827.439.270	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
I.6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**33.743.636.266**		**38.815.619.563**		**36.348.594.383**		**108.907.850.212**	
1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Terlatih dan Aktif dalam Penanganan PPKS	%	30,38	9.827.145.684	65,19	9.628.954.036	100,00	9.581.151.172	100,00	29.037.250.892	DINAS SOSIAL
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat Miskin yang Tertangani	%	27,45	4.094.248.248	58,82	4.411.401.762	100,00	4.607.215.028	100,00	13.112.865.038	DINAS SOSIAL
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran yang Ditangani	%	33,33	88.385.000	66,67	116.977.175	100,00	96.378.057	100,00	301.740.232	DINAS SOSIAL
4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)	%	31,37	2.187.373.822	65,69	4.862.913.998	100,00	4.756.582.059	100,00	11.806.869.879	DINAS SOSIAL
5	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota	%	31,02	955.424.386	68,98	4.349.932.947	100,00	3.760.979.823	100,00	9.066.337.156	DINAS SOSIAL

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR (2023)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Berkondisi Baik	%	33,33	718.151.162	66,67	837.947.912	100,00	759.014.683	100,00	2.315.113.757	DINAS SOSIAL
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	15.872.907.964	100,00	14.607.491.733	100,00	12.787.273.560	100,00	43.267.673.257	DINAS SOSIAL
II.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
II.1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**17.296.972.504**		**32.343.208.712**		**19.315.668.046**		**68.955.849.262**	
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	%	4,90	133.543.100	5,10	157.929.875	5,30	162.657.759	5,30	454.130.734	DINAS TENAGA KERJA
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan bersertifikat kompetensi	%	95,63	1.355.042.848	96,15	16.625.348.108	97,00	3.478.469.261	97,00	21.458.860.217	DINAS TENAGA KERJA
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	64,11		65,36		65,88		65,88		DINAS TENAGA KERJA
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang Bekerja	%	20,73	1.475.312.658	20,85	1.503.747.983	21,98	1.985.207.704	21,98	4.964.268.345	DINAS TENAGA KERJA
4	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/ PKR, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	8,31	1.330.210.080	9,14	1.564.165.021	10,05	1.877.251.457	10,05	4.771.626.558	DINAS TENAGA KERJA
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	13.002.863.818	100,00	12.492.017.725	100,00	11.812.081.865	100,00	37.306.963.408	DINAS TENAGA KERJA
II.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**21.296.548.551**		**17.975.901.546**		**20.956.983.147**		**60.229.433.244**	
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Daerah	%	30,00	1.512.373.654	32,50	316.555.346	35,00	1.132.418.829	35,00	2.961.347.829	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Rasio	260 : 100.000	755.515.322,00	250 : 100.000	757.472.059	230 : 100.000	687.610.405	230 : 100.000	2.200.597.786	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Tingkat pemenuhan ekonomi keluarga yang dikontribusi oleh perempuan	%	2,53	222.112.500	2,78	239.023.475	3,06	221.429.464	3,06	682.565.439	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR (2023)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak	%	55,56	430.862.386	83,95	369.271.168	100,00	334.685.619	100,00	1.134.819.173	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Tingkat partisipasi lembaga pemenuhan hak anak	%	30,00	310.532.954	60,00	339.037.823	100,00	328.540.660	100,00	978.111.437	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani dan didampingi	%	0,000034	1.361.492.886	0,000061	1.463.453.433	0,000070	1.460.627.445	0,000070	4.285.573.764	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	16.703.658.849	100,00	14.491.088.242	100,00	16.791.670.725	100,00	47.986.417.816	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
II.3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**16.803.732.000**		**20.445.227.106**		**17.587.552.070**		**54.836.511.176**	
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase infrastruktur kemandirian pangan yang terbangun	%	11,25	1.787.564.676	18,75	2.191.922.039	26,25	1.896.231.867	26,25	5.875.718.582	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras sesuai Kebutuhan)	%	20,00	2.803.539.766	25,00	3.627.820.894	30,00	3.038.813.099	30,00	9.470.173.759	DINAS KETAHANAN PANGAN
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa Rawan Pangan yang ditangani	%	8,30	715.593.193	16,60	2.033.806.109	25,00	1.759.445.768	25,00	4.508.845.070	DINAS KETAHANAN PANGAN
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Tidak Terindikasi Cemaran Zat Berbahaya	%	65,00	1.062.195.005	70,00	1.678.481.498	75,00	1.452.054.429	75,00	4.192.730.932	DINAS KETAHANAN PANGAN
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	10.434.839.360	100,00	10.913.196.566	100,00	9.441.006.907	100,00	30.789.042.833	DINAS KETAHANAN PANGAN
II.4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**4.776.850.218**		**9.042.389.266**		**4.409.300.526**		**18.228.540.010**	
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Bidang Tanah Sengketa yang Terfasilitasi	%	20,00	2.442.619.940	60,00	427.986.505	100,00	120.066.489	100,00	2.990.672.934	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Lahan Kosong yang Akan Diredistribusi	%	-	-	60,00	164.297.230	100,00	120.066.489	100,00	284.363.719	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang Teridentifikasi	%	33,33	110.061.568	33,33	204.079.765	33,33	52.828.781	33,33	366.970.114	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR (2023)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	12,99	2.224.168.710	43,51	8.246.025.766	43,51	4.116.338.768	43,51	14.586.533.244	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
II.5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**155.742.168.743**		**215.534.074.410**		**103.829.498.166**		**475.105.741.319**	
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Persetujuan Teknis yang diterbitkan	%	50,00	4.575.634.682	75,00	5.527.780.217	100,00	2.521.396.264	100,00	12.624.811.163	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Luas Hutan Kota yang Terbangun	%	48,45	686.286.350	62,59	15.964.047.100	100,00	7.203.989.326	100,00	23.854.322.776	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengelolaan B3 dan Limbah B3	%	20,00	343.341.572	40,00	1.514.907.750	40,00	1.275.074.413	100,00	3.133.323.735	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tingkat keselarasan pengelolaan lingkungan hidup	%	100,00	967.492.884	100,00	1.347.801.716	100,00	480.265.955	100,00	2.795.560.555	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan	%	40,00	333.103.258	45,00	524.999.840,00	55,00	264.146.275	55,00	1.122.249.373	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Orang/Kelompok yang Berpartisipasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	31,03	1.325.249.212	34,36	1.489.085.126	34,61	754.017.549	100,00	3.568.351.887	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Cakupan Orang/Kelompok masyarakat yang mendapatkan apresiasi peduli lingkungan	%	20,95	545.000.000	23,50	567.152.336	26,05	301.987.718	26,05	1.414.140.054	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diselesaikan	%	55,00	318.865.722	60,00	724.999.848	65,00	168.093.084	65,00	1.211.958.654	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Volume Sampah yang Dikelola	%	36,54	111.306.966.201	44,58	153.495.127.258	55,71	73.318.116.924	55,71	338.120.210.383	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	35.340.228.862	100,00	34.378.173.219	100,00	17.542.410.658	100,00	87.260.812.739	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
II.6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**39.266.251.999**		**41.156.971.880**		**56.273.907.932**		**136.697.131.811**	
1	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan KTP	%	99,89	5.694.666.730	99,91	8.802.053.548	100,00	15.706.181.442	100,00	30.202.901.720	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Cakupan perekaman data Biometrik	%	99,91		99,92		100,00		100,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	Program Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akta kelahiran anak	%	85,18	3.436.198.852	89,33	4.452.476.151	93,36	6.715.476.574	93,36	14.604.151.577	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam satu tahun	%	100,00	2.191.260.756	100,00	2.628.220.005	100,00	3.691.374.421	100,00	8.510.855.182	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Ketersediaan profil perkembangan kependudukan	%	100,00	53.500.000	100,00	50.567.500	100,00	91.512.961	100,00	195.580.461	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	27.890.625.661	100,00	25.223.654.676	100,00	30.069.362.533	100,00	83.183.642.870	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR (2023)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.7	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**36.315.396.109**		**36.273.583.507**		**34.322.283.347**		**106.911.262.963**	
1	Program Penataan Desa	Persentase Desa Tertata melalui Program Samisade	%	99,28	4.164.964.062	100,00	1.299.344.265	100,00	1.647.809.621	100,00	7.112.117.948	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Raperdes tentang APBDes yang Diklarifikasi	%	100,00	14.883.942.782	100,00	17.277.859.477	100,00	15.901.362.844	100,00	48.063.165.103	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Persentase Raperdes tentang RKPDes yang Diklarifikasi	%	100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Persentase Peningkatan Status BUMDes Mandiri	%	50,00		33,33		37,50		37,50		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Persentase aparatur desa yang mendapatkan fasilitasi sekolah pemerintahan desa	%	9,62		13,22		14,42		37,26		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang melakukan kerjasama	%	33,33	225.764.650	66,67	412.964.870	100,00	494.342.886	100,00	1.133.072.406	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif	%	100,00	2.571.223.404	100,00	2.917.392.566	100,00	1.841.744.421	100,00	7.330.360.391	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	14.469.501.211	100,00	14.366.022.329	100,00	14.437.023.574	100,00	43.272.547.114	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
II.8	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**13.591.880.913**		**5.731.455.245**		**5.120.163.488**		**24.443.499.646**	
1	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Kebijakan yang disinergikan	%	25,00	403.630.486	75,00	462.705.536	100,00	421.184.287	100,00	1.287.520.309	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	%	16,39	11.146.854.041	16,30	4.265.148.531	16,21	1.782.596.566	16,21	17.194.599.138	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Pasangan Usia Subur Anggota Kelompok Ketahanan dan Keluarga sejahtera yang Ber- KB	%	77,08	2.041.396.386	77,20	1.003.601.178	77,37	2.916.382.636	77,37	5.961.380.200	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase Terbentuknya kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	%	85,00		92,50		100,00		100,00		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR (2023)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**107.173.236.508**		**136.797.367.190**		**214.399.990.896**		**458.370.594.594**	
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Kinerja Jaringan Jalan	v/c ratio	0,58	69.446.368.614	0,56	85.161.755.364	0,54	187.877.179.180	0,54	342.485.303.158	DINAS PERHUBUNGAN
2	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	%	-	-	50,00	299.999.710	100,00	411.952.405	100,00	711.952.115	DINAS PERHUBUNGAN
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	37.726.867.894	100,00	51.335.612.116	100,00	26.110.859.311	100,00	115.173.339.321	DINAS PERHUBUNGAN
II.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**37.785.101.927**		**39.588.271.892**		**38.461.409.030**		**115.834.782.849**	
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, rnengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pernerintah daerah kabupaten/kota	%	77,93	7.843.059.926	79,00	8.187.073.933	81,00	8.094.443.518	81,00	24.124.577.377	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	Program Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100,00	14.052.220.798	100,00	13.740.180.422	100,00	13.678.598.704	100,00	41.470.999.924	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	%	70,00		72,72		81,81		81,81		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	15.889.821.203	100,00	17.661.017.537	100,00	16.688.366.808	100,00	50.239.205.548	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
II.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**19.720.181.241**		**48.770.516.438**		**26.973.507.200**		**95.464.204.879**	
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang kapabel (yang berizin dan bermitra)	%	0,41	3.272.511.490	0,49	4.915.193.143	0,56	2.986.654.938	0,56	11.174.359.571	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang dikembangkan menjadi wirausaha	%	0,114	991.372.176	0,118	2.478.495.039	0,123	4.284.305.015	0,123	7.754.172.230	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
3	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang berizin	%	29,00	562.865.336	29,87	2.065.000.000	31,17	1.868.616.110	31,17	4.496.481.446	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
4	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	10,19	960.011.554	10,48	1.241.126.314	10,71	807.426.714	10,71	3.008.564.582	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Tingkat Produktivitas Koperasi	%	85,17	1.500.815.486	85,56	5.143.213.001	85,62	1.812.590.583	85,62	8.456.619.070	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
6	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang berpredikat Sehat	%	25,97	160.834.036	28,14	409.990.956	30,30	428.430.502	30,30	999.255.494	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
7	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Dilatih	%	4,16	931.414.948	4,32	627.832.213	4,49	700.319.089	4,49	2.259.566.250	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
8	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	11.340.356.215	100,00	31.889.665.772	100,00	14.085.164.248	100,00	57.315.186.235	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
II.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**28.948.545.033**		**60.613.605.321**		**20.528.610.185**		**110.090.760.539**	
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi	%	1,10	1.682.068.344	1,60	943.504.824	2,60	1.056.921.287	2,60	3.682.494.455	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR (2023)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Izin dan Non Izin yang Diterbitkan	%	57,45	3.477.161.262	20,42	2.984.300.674	22,12	2.136.962.540	22,12	8.598.424.476	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor	Perusahaan	360	1.106.186.624	370	1.391.556.770	380	3.876.184.464	380	6.373.927.858	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat pengendalian perizinan	%	25,00	1.132.025.823	33,33	1.132.023.458	41,67	984.545.208	100,00	3.248.594.489	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Permintaan Data yang Dipenuhi	%	100,00	314.996.572	100,00	815.631.121	100,00	204.113.031	100,00	1.334.740.724	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	21.236.106.408	100,00	53.346.588.474	100,00	12.269.883.655	100,00	86.852.578.537	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
II.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**139.246.936.383**		**208.761.106.229**		**243.584.781.207**		**591.592.823.819**	
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase peningkatan kapasitas daya saing pemuda	%	0,019	16.532.395.220	0,027	31.000.000.000	0,031	28.095.154.041	0,031	75.627.549.261	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	5,34		5,44		5,55		5,55		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	67	75.578.385.125	84	150.075.696.927	91	183.277.625.115	91	408.931.707.167	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan	%	22,22	3.793.317.050	33,33	3.324.558.879	44,44	3.542.790.686	44,44	10.660.666.615	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	43.342.838.988	100,00	24.360.850.423	100,00	28.669.211.366	100,00	96.372.900.777	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
II.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**328.411.664**		**759.996.708**		**751.397.933**		**1.839.806.305**	
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	%	100,00	328.411.664	100,00	759.996.708	100,00	751.397.933	100,00	1.839.806.305	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
II.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**441.418.704**		**528.461.554**		**522.482.420**		**1.492.362.678**	
1	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	46,51	441.418.704	62,00	528.461.554	70,70	522.482.420	70,70	1.492.362.678	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
II.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**15.848.049.504**		**14.817.097.716**		**15.660.902.815**		**46.326.050.035**	
1	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Kesenian tradisional yang dilestarikan	Kesenian	44	564.821.900	46	562.615.600	48	482.516.039	48	1.609.953.539	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Situs dan Cagar Budaya yang terlestarikan	%	47,22	1.332.358.750	48,61	1.339.427.286	50,00	1.125.762.197	50,00	3.797.548.233	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	Program Pengembangan Kebudayaan	Kegiatan budaya yang diselenggarakan	Upacara/ Penampilan	10	488.591.600	10	630.788.940	10	462.139.967	30	1.581.520.507	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR (2023)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	13.462.277.254	100,00	12.284.265.890	100,00	13.590.484.613	100,00	39.337.027.757	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
II.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**11.169.239.996**		**12.256.313.712**		**11.481.410.281**		**34.906.963.989**	
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	poin	53,20	653.151.076	53,39	1.939.327.999	53,58	1.997.277.084	53,58	4.589.756.159	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Nusantara yang Dikelola dan Dilestarikan	%	100,00	19.997.200	100,00	49.589.000	100,00	25.745.481	100,00	95.331.681	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	10.496.091.720	100,00	10.267.396.713	100,00	9.458.387.717	100,00	30.221.876.150	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
II.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**1.605.664.310**		**2.537.427.152**		**2.235.586.202**		**6.378.677.664**	
1	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	%	82,77	1.386.559.610	88,00	1.955.077.802	90,00	1.818.716.501	90,00	5.160.353.913	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	%	80,88	219.104.700	82,00	532.349.350	83,00	334.479.220	83,00	1.085.933.270	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
3	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Cakupan layanan arsip bersifat tertutup	%	N/A	-	100,00	50.000.000	100,00	82.390.481	100,00	132.390.481	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
III.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**											
III.1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**29.151.494.897**		**41.636.325.730**		**21.246.221.454**		**92.034.042.081**	
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Total hasil tangkapan ikan di perairan umum	Ton	95	549.096.744	104,50	1.047.228.234	110	445.203.659	110	2.041.528.637	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kontribusi produksi benih Ikan terhadap target total	%	33,00	3.574.872.446	33,33	11.119.448.064	33,67	2.008.335.257	33,67	16.702.655.767	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Usaha Perikanan Budidaya dan Tangkap di Perairan Umum	%	22,22	271.178.208	33,33	498.123.008	44,44	349.535.401	44,44	1.118.836.617	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Total Produksi Olahan Perikanan	Ton	16.359	1.504.961.952	16.850	2.634.707.824	17.524	1.333.783.373	17.524	5.473.453.149	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	23.251.385.547	100,00	26.336.818.600	100,00	17.109.363.764	100,00	66.697.567.911	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
III.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**10.645.082.615**		**10.952.967.927**		**8.947.176.342**		**30.545.226.884**	
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	10,00	5.987.505.548	10,00	6.190.593.497	10,00	5.098.707.475	10,00	17.276.806.520	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Tingkat Hunian Akomodasi	%	50,00		60,00		70,00		70,00		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR (2023)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan yang datang ke Kabupaten Bogor	%	11,68	2.644.533.390	60,00	3.085.469.444	25,00	2.534.412.303	25,00	8.264.415.137	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Bogor	%	11,68		60,00		25,00		25,00		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Sub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan	Sub Sektor	11	485.528.990	13	446.716.218	17	278.061.722	17	1.210.306.930	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan ekraf yang Tersertifikasi	Orang	80	1.527.514.687	100	1.230.188.768	120	1.035.994.843	300	3.793.698.298	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
III.3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**70.804.031.101**		**83.947.664.430**		**69.838.833.923**		**224.590.529.454**	
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Pertanian Pangan per Hektar per Tahun	ton/ha	6,78	9.216.184.440	6,80	8.360.326.927	6,82	7.576.924.931	6,82	25.153.436.298	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Keterpenuhan Sarana Peternakan (Bibit Ternak)	%	22,25	1.998.504.690	33,33	3.945.169.376	44,42	1.626.873.451	100,00	7.570.547.517	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan prasarana pertanian	%	31,66	8.833.412.186	65,00	9.206.506.710	100,00	7.993.118.443	100,00	26.033.037.339	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Keterpenuhan Prasarana (Infrastruktur) Peternakan	%	27,78	5.627.117.810	33,33	10.089.322.573	38,89	2.639.622.241	38,89	18.356.062.624	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Tingkat pelayanan pemberian pertimbangan teknis ijin usaha pertanian	%	32,75	103.194.568	66,09	2.226.666.491	100,00	2.736.166.865	100,00	5.066.027.924	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
7	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Pembinaan dan pengawasan Perizinan Usaha Pertanian (Usaha Peternakan, Toko Obat Hewan di Tingkat Pengecer)	%	20,00	17.797.600	30,00	148.025.348	40,00	70.321.886	40,00	236.144.834	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
8	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kemampuan kelas kelompok berdasarkan skor penilaian	%	6,34	7.851.550.428	7,58	6.565.304.395	7,99	5.352.013.145	7,99	19.768.867.968	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
9	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok	%	15,00	651.029.016	20,00	1.600.240.015	25,00	913.614.537	25,00	3.164.883.568	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
10	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	55,00	1.822.446.518	60,00	3.302.335.172	70,00	1.915.848.372	70,00	7.040.630.062	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
10	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas lahan pertanian yang diasuransikan untuk meminimalkan resiko bencana pertanian	%	10,85	1.861.977.468	21,70	2.578.444.468	32,55	2.336.832.081	32,55	6.777.254.017	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
12	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah penyakit yang dikendalikan	Jenis	N/A	-	3	149.872.785	3	60.033.244	3	209.906.029	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
13	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	32.820.816.377	100,00	35.775.450.170	100,00	36.617.464.727	100,00	105.213.731.274	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
III.4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**49.701.377.355**		**67.156.310.240**		**46.859.734.919**		**163.717.422.514**	
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai dengan Ketentuan (IUPI/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	61,80	656.608.702	62,30	1.830.241.047	65,50	2.976.277.857	65,50	5.463.127.606	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR (2023)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan	%	33,33	32.955.387.829	33,33	23.671.377.323	33,34	14.366.840.135	100,00	70.993.605.287	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	%	70,00	406.781.050	80,00	10.200.868.469	90,00	11.785.340.387	90,00	22.392.989.906	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Indeks Harga Konsumen (IHK)	Point	106,20		106,30		106,50		106,50		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor (Berdasarkan Registrasi SKA)	USD	1.490.000.000	104.060.350	1.500.000.000	1.515.270.055	1.510.000.000	2.234.629.231	1.510.000.000	3.853.959.636	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	78,99	1.465.906.100	79,17	2.814.999.191	79,37	4.201.914.534	79,37	8.482.819.825	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah jenis produk dalam negeri yang dipasarkan	Jenis	-	13.460.550	5	2.474.998.813	5	844.502.431	5	3.332.961.794	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	14.099.172.774	100,00	24.648.555.342	100,00	10.450.230.344	100,00	49.197.958.460	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
III.5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**757.310.176**		**9.393.618.227**		**3.390.368.296**		**13.541.296.699**	
1	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	%	0,70	210.673.918	0,80	414.999.130	0,90	576.733.367	0,90	1.202.406.415	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Lndustri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	%	20,00		40,00		60,00		60,00		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	%	100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKT) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	%	100,00		100,00		100,00		100,00		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP	%	40,00	344.777.272	60,00	8.168.619.476	100,00	2.059.762.026	100,00	10.573.158.774	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	Dokumen Profil Industri	1	201.858.986	1	809.999.621	1	753.872.902	1	1.765.731.509	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
III.6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				**15.289.450**		**71.969.475**		**62.903.484**		**150.162.409**	
1	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Terfasilitasinya Peserta Transmigrasi yang Ditempatkan	%	100,00	15.289.450	100,00	71.969.475	100,00	62.903.484	100,00	150.162.409	DINAS TENAGA KERJA
IV.	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**											
IV.1	**SEKRETARIAT DAERAH**				**161.677.142.842**		**154.378.865.000**		**129.737.359.317**		**445.793.367.159**	
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi dan kerjasama daerah yang terlaksana	%	100,00	40.995.688.892	100,00	45.830.982.372	100,00	38.515.574.187	100,00	125.342.245.451	SEKRETARIAT DAERAH

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR (2023)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase kebijakan di bidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	%	100,00		100,00		100,00		100,00		SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana	%	100,00		100,00		100,00		100,00		SEKRETARIAT DAERAH
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan SDA yang terlaksana	%	100,00	12.551.759.392	100,00	10.918.035.996	100,00	9.175.330.827	100,00	32.645.126.215	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase kebijakan di bidang penyusunan program pengendalian program, dan evaluasi, pelaporan yang terlaksana	%	100,00		100,00		100,00		100,00		SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	%	100,00		100,00		100,00		100,00		SEKRETARIAT DAERAH
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Administrasi yang mencapai target	%	100,00	108.129.694.558	100,00	97.629.846.632	100,00	82.046.454.303	100,00	287.805.995.493	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Kebijakan di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana	%	100,00		10,00		12,00		12,00		SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase kebutuhan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	%	100,00		100,00		100,00		100,00		SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Fasilitasi keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi tugas pimpinan yang terlaksana	%	100,00		100,00		100,00		100,00		SEKRETARIAT DAERAH
		Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		SEKRETARIAT DAERAH
IV.2	**SEKRETARIAT DPRD**				**134.520.763.592**		**127.458.189.199**		**86.159.712.334**		**348.138.665.125**	
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100,00	49.575.340.611	100,00	46.066.633.690	100,00	32.865.673.562	100,00	128.507.647.863	SEKRETARIAT DPRD
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	84.945.422.981	100,00	81.391.555.509	100,00	53.294.038.772	100,00	219.631.017.262	SEKRETARIAT DPRD
V.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN**				**30.078.570.562**		**35.724.318.242**		**32.376.781.420**		**98.179.670.224**	
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan	%	100,00	2.644.805.094	100,00	4.281.174.639	100,00	3.880.008.418	100,00	10.805.988.151	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Kesuaian Substansi Dokumen Perencanaan pembangunan dengan Aturan	%	100,00	2.493.830.813	100,00	4.946.484.753	100,00	4.482.975.842	100,00	11.923.291.408	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	2.268.590.968	100,00	2.276.509.471	100,00	2.063.189.815	100,00	6.608.290.254	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR (2023)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	22.671.343.687	100,00	24.220.149.379	100,00	21.950.607.345	100,00	68.842.100.411	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
VI.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN**				**1.728.785.444.597**		**1.251.757.906.767**		**1.529.014.946.185**		**4.509.558.297.549**	
					1.559.453.145.126		**1.066.616.003.049**		**1.369.593.938.532**		**3.995.663.086.707**	
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	%	-7,00	1.525.313.480.985	-6,00	1.027.114.251.929	-5,00	1.336.502.746.851	-5,00	3.888.930.479.765	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	Rasio	76,91		67,77		70,53		70,53		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Rasio	11,66		13,77		13,35		13,35		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Rasio	10,00		8,00		6,00		6,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Manajemen Aset	Ya/Tidak	Ya	2.417.938.979	Ya	2.261.817.969	Ya	2.125.674.411	Ya	6.805.431.359	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	31.721.725.162	100,00	37.239.933.151	100,00	30.965.517.270	100,00	99.927.175.583	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					169.332.299.471		**185.141.903.718**		**159.421.007.653**		**513.895.210.842**	
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Target PAD	%	100,00	26.149.745.813	100,00	29.189.512.839	100,00	27.407.889.162	100,00	82.747.147.814	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	4,00		5,00		6,00		6,00		BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	143.182.553.658	100,00	155.952.390.879	100,00	132.013.118.491	100,00	431.148.063.028	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
VII.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN**				**130.197.418.676**		**167.756.045.714**		**148.581.139.049**		**446.534.603.439**	
1	Program Kepegawaian Daerah	Nilai sistem merit aspek kepegawaian	poin	197,50	12.986.993.025	244,00	14.675.262.795	285,00	12.997.846.084	285,00	40.660.101.904	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	190,93		201,58		212,83		212,83		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	9,28		9,98		10,65		10,65		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	117.210.425.651	100,00	153.080.782.919	100,00	135.583.292.964	100,00	405.874.501.534	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR (2023)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VIII.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**12.166.054.400**		**18.749.106.200**		**16.606.039.702**		**47.521.200.302**	
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai sistem merit aspek pengembangan SDM	poin	19,00	12.166.054.400	27,00	18.749.106.200	38,50	16.606.039.702	38,50	47.521.200.302	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	5,23		18,52		18,59		18,59		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		Persentase Pemenuhan pengembangan kompertensi 20JP/Orang/Tahun	%	16,16		18,91		21,45		21,45		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
IX.	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**34.138.230.363**		**34.314.048.000**		**35.768.434.156**		**104.220.712.519**	
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	**%**	100,00	2.468.864.350	100,00	3.756.203.950	100,00	3.558.967.522	100,00	9.784.035.822	INSPEKTORAT DAERAH
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dapat diselesaikan	**%**	100,00	416.934.450	100,00	470.451.550	100,00	445.748.390	100,00	1.333.134.390	INSPEKTORAT DAERAH
		Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di bidang pengawasan	Dokumen	2		2		2		6		INSPEKTORAT DAERAH
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	31.252.431.563	100,00	30.087.392.500	100,00	31.763.718.244	100,00	93.103.542.307	INSPEKTORAT DAERAH
X	**UNSUR KEWILAYAHAN**											
X.1	**KECAMATAN**				**287.345.804.421**		**396.374.362.100**		**202.363.869.679**		**886.084.036.209**	
					48.071.375.788		**62.970.700.000**		**7.078.485.915**		**118.120.561.703**	
1	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	150.000.000	100,00	136.304.775	100,00	79.423.982	100,00	365.728.757	KECAMATAN CIBINONG
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	820.834.554	55,00	729.786.171	60,00	462.809.203	60,00	2.013.429.928	KECAMATAN CIBINONG
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	21.108.123.342	85,00	26.884.295.651	90,00	230.737.258	90,00	48.223.156.251	KECAMATAN CIBINONG
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	803.719.500	100,00	853.997.131	100,00	423.446.049	100,00	2.081.162.680	KECAMATAN CIBINONG
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	1.454.718.434	90,00	459.104.047	95,00	263.157.558	95,00	2.176.980.039	KECAMATAN CIBINONG
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	23.733.979.958	100,00	33.907.212.225	100,00	5.618.911.864	100,00	63.260.104.047	KECAMATAN CIBINONG
					5.688.562.634		**6.012.761.000**		**4.582.575.736**		**16.283.899.370**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	67.034.000	55,00	258.264.579	60,00	15.844.454	60,00	341.143.033	KECAMATAN GUNUNGPUTRI
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	220.567.400	85,00	226.484.156	90,00	12.871.128	90,00	459.922.684	KECAMATAN GUNUNGPUTRI

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR (2023)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	72.000.000	100,00	46.130.550	100,00	34.579.149	100,00	152.709.699	KECAMATAN GUNUNGPUTRI
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	128.663.950	100,00	185.963.223	100,00	76.494.356	100,00	391.121.529	KECAMATAN GUNUNGPUTRI
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	225.540.050	90,00	540.145.933	95,00	120.546.755	95,00	886.232.738	KECAMATAN GUNUNGPUTRI
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	4.974.757.234	100,00	4.755.772.559	100,00	4.322.239.896	100,00	14.052.769.689	KECAMATAN GUNUNGPUTRI
					11.984.518.436		**21.796.033.000**		**8.194.108.148**		**41.974.659.584**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	303.783.750	55,00	400.483.841	60,00	176.541.143	60,00	880.808.734	KECAMATAN CITEUREUP
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	3.495.886.364	85,00	3.800.315.441	90,00	1.636.361.375	90,00	8.932.563.180	KECAMATAN CITEUREUP
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	53.999.350	100,00	105.687.923	100,00	31.380.200	100,00	191.067.473	KECAMATAN CITEUREUP
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	192.999.250	100,00	280.498.190	100,00	148.185.625	100,00	621.683.065	KECAMATAN CITEUREUP
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	228.448.650	90,00	410.160.438	95,00	150.503.952	95,00	789.113.040	KECAMATAN CITEUREUP
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	7.709.401.072	100,00	16.798.887.167	100,00	6.051.135.854	100,00	30.559.424.093	KECAMATAN CITEUREUP
					5.645.646.883		**6.522.000.000**		**5.961.881.411**		**18.129.528.294**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	155.092.750	55,00	257.927.795	60,00	99.541.952	60,00	512.562.497	KECAMATAN SUKARAJA
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	166.000.000	85,00	158.229.960	90,00	23.825.994	90,00	348.055.954	KECAMATAN SUKARAJA
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	43.000.000	100,00	83.793.240	100,00	18.363.449	100,00	145.156.689	KECAMATAN SUKARAJA
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	128.300.000	100,00	202.693.075	100,00	128.776.592	100,00	459.769.667	KECAMATAN SUKARAJA
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	124.692.550	90,00	205.757.850	95,00	72.461.560	95,00	402.911.960	KECAMATAN SUKARAJA
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	5.028.561.583	100,00	5.613.598.080	100,00	5.618.911.864	100,00	16.261.071.527	KECAMATAN SUKARAJA
					12.626.173.976		**5.021.534.000**		**4.178.608.325**		**21.826.316.301**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	136.387.800	55,00	239.862.801	60,00	65.498.428	60,00	441.749.029	KECAMATAN BABAKAN MADANG
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	114.245.350	85,00	136.581.515	90,00	18.655.931	90,00	269.482.796	KECAMATAN BABAKAN MADANG
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Gangguan Trantib	%	100,00	63.379.950	100,00	50.306.867	100,00	30.439.496	100,00	144.126.313	KECAMATAN BABAKAN MADANG
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	108.147.550	100,00	250.653.880	100,00	58.370.388	100,00	417.171.818	KECAMATAN BABAKAN MADANG
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	238.473.450	90,00	277.431.128	95,00	115.628.176	95,00	631.532.754	KECAMATAN BABAKAN MADANG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR (2023)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	11.965.539.876	100,00	4.066.697.809	100,00	3.890.015.906	100,00	19.922.253.591	KECAMATAN BABAKAN MADANG
					5.238.880.871		**5.434.122.000**		**6.647.411.307**		**17.320.414.178**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	104.247.518	55,00	161.527.000	60,00	108.372.071	60,00	374.146.589	KECAMATAN JONGGOL
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	234.519.568	85,00	182.460.631	90,00	162.769.186	90,00	579.749.385	KECAMATAN JONGGOL
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	92.247.268	100,00	37.202.785	100,00	48.810.359	100,00	178.260.412	KECAMATAN JONGGOL
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	383.999.686	100,00	346.803.240	100,00	124.823.643	100,00	855.626.569	KECAMATAN JONGGOL
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	274.767.118	90,00	438.809.833	95,00	151.500.194	95,00	865.077.145	KECAMATAN JONGGOL
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	4.149.099.713	100,00	4.267.318.511	100,00	6.051.135.854	100,00	14.467.554.078	KECAMATAN JONGGOL
					5.244.610.755		**6.098.140.500**		**5.761.914.748**		**17.104.666.003**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	380.027.500	55,00	218.081.780	60,00	168.969.370	60,00	767.078.650	KECAMATAN CILEUNGSI
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	107.903.850	85,00	268.815.900	90,00	134.917.887	90,00	511.637.637	KECAMATAN CILEUNGSI
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	57.119.000	100,00	82.231.500	100,00	42.162.711	100,00	181.513.211	KECAMATAN CILEUNGSI
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	105.967.300	100,00	119.674.150	100,00	86.103.343	100,00	311.744.793	KECAMATAN CILEUNGSI
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	189.269.898	90,00	252.770.323	95,00	143.073.561	95,00	585.113.782	KECAMATAN CILEUNGSI
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	4.404.323.207	100,00	5.156.566.847	100,00	5.186.687.875	100,00	14.747.577.929	KECAMATAN CILEUNGSI
					5.356.053.034		**5.578.454.000**		**4.723.316.479**		**15.657.823.513**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	276.175.316	55,00	289.079.872	60,00	76.068.844	60,00	641.324.032	KECAMATAN CARIU
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	269.487.179	85,00	145.208.464	90,00	113.081.516	90,00	527.777.159	KECAMATAN CARIU
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	20.449.300	100,00	30.459.600	100,00	11.883.534	100,00	62.792.434	KECAMATAN CARIU
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	96.348.950	100,00	111.311.850	100,00	55.990.476	100,00	263.651.276	KECAMATAN CARIU
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	246.813.908	90,00	338.892.612	95,00	144.052.213	95,00	729.758.733	KECAMATAN CARIU
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	4.446.778.381	100,00	4.663.501.602	100,00	4.322.239.896	100,00	13.432.519.879	KECAMATAN CARIU
					4.518.309.862		**4.996.705.200**		**4.726.977.631**		**14.241.992.693**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	245.999.970	55,00	187.626.255	60,00	16.561.739	60,00	450.187.964	KECAMATAN SUKAMAKMUR

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR (2023)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	170.067.700	85,00	158.912.155	90,00	57.524.099	90,00	386.503.954	KECAMATAN SUKAMAKMUR
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	27.926.150	100,00	30.799.840	100,00	16.228.495	100,00	74.954.485	KECAMATAN SUKAMAKMUR
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	155.497.050	100,00	55.148.175	100,00	38.933.447	100,00	249.578.672	KECAMATAN SUKAMAKMUR
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	468.110.723	90,00	277.761.595	95,00	275.489.957	95,00	1.021.362.275	KECAMATAN SUKAMAKMUR
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	3.450.708.269	100,00	4.286.457.180	100,00	4.322.239.896	100,00	12.059.405.345	KECAMATAN SUKAMAKMUR
					4.454.598.933		**4.940.359.100**		**4.148.030.682**		**13.542.988.715**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	174.460.273	55,00	198.739.150	60,00	22.336.172	60,00	395.535.595	KECAMATAN PARUNG
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	97.455.028	85,00	120.433.550	90,00	32.970.236	90,00	250.858.814	KECAMATAN PARUNG
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	20.413.250	100,00	35.716.000	100,00	13.615.974	100,00	69.745.224	KECAMATAN PARUNG
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	85.018.550	100,00	277.234.150	100,00	116.375.860	100,00	478.628.560	KECAMATAN PARUNG
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	137.014.012	90,00	150.828.400	95,00	72.716.534	95,00	360.558.946	KECAMATAN PARUNG
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	3.940.237.820	100,00	4.157.407.850	100,00	3.890.015.906	100,00	11.987.661.576	KECAMATAN PARUNG
					4.785.553.100		**13.485.666.000**		**4.705.917.461**		**22.977.136.561**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan		50,00	236.934.400	55,00	170.014.550	60,00	93.522.489	60,00	500.471.439	KECAMATAN GUNUNGSINDUR
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah		80,00	115.219.050	85,00	186.504.250	90,00	39.979.001	90,00	341.702.301	KECAMATAN GUNUNGSINDUR
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum		100,00	40.883.400	100,00	68.339.650	100,00	23.758.235	100,00	132.981.285	KECAMATAN GUNUNGSINDUR
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan		100,00	115.606.000	100,00	147.584.550	100,00	122.243.330	100,00	385.433.880	KECAMATAN GUNUNGSINDUR
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi		100,00	135.600.550	90,00	190.610.500	95,00	104.174.510	95,00	430.385.560	KECAMATAN GUNUNGSINDUR
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	4.141.309.700	100,00	12.722.612.500	100,00	4.322.239.896	100,00	21.186.162.096	KECAMATAN GUNUNGSINDUR
					7.446.367.962		**9.959.750.000**		**5.231.541.470**		**22.637.659.432**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	239.416.990	55,00	410.410.470	60,00	149.533.106	60,00	799.360.566	KECAMATAN KEMANG
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	1.129.190.643	85,00	1.658.537.293	90,00	59.928.048	90,00	2.847.655.984	KECAMATAN KEMANG
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	99.966.904	100,00	242.479.360	100,00	58.112.114	100,00	400.558.378	KECAMATAN KEMANG
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	114.023.336	100,00	303.420.555	100,00	87.162.270	100,00	504.606.161	KECAMATAN KEMANG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR (2023)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	72.825.368	90,00	304.281.860	95,00	48.133.977	95,00	425.241.205	KECAMATAN KEMANG
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	5.790.944.721	100,00	7.040.620.462	100,00	4.828.671.955	100,00	17.660.237.138	KECAMATAN KEMANG
					8.852.698.755		**8.860.893.000**		**5.206.436.919**		**22.920.028.674**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	297.985.040	55,00	339.050.059	60,00	164.882.349	60,00	801.917.448	KECAMATAN BOJONG GEDE
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	1.967.831.910	85,00	2.005.476.386	90,00	812.446.238	90,00	4.785.754.534	KECAMATAN BOJONG GEDE
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	64.684.000	100,00	90.999.850	100,00	37.589.283	100,00	193.273.133	KECAMATAN BOJONG GEDE
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	148.145.000	100,00	209.981.760	100,00	152.416.627	100,00	510.543.387	KECAMATAN BOJONG GEDE
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	270.463.618	90,00	274.206.686	95,00	149.086.516	95,00	693.756.820	KECAMATAN BOJONG GEDE
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	6.103.589.187	100,00	5.941.178.259	100,00	3.890.015.906	100,00	15.934.783.352	KECAMATAN BOJONG GEDE
					5.670.103.577		**5.659.742.000**		**4.997.231.038**		**16.327.076.615**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	45.256.800	55,00	250.391.100	60,00	22.394.878	60,00	318.042.778	KECAMATAN LEUWILIANG
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	82.708.200	85,00	79.831.850	90,00	74.127.415	90,00	236.667.465	KECAMATAN LEUWILIANG
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	137.056.250	100,00	84.794.000	100,00	40.399.619	100,00	262.249.869	KECAMATAN LEUWILIANG
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	71.556.250	100,00	99.619.250	100,00	35.291.570	100,00	206.467.070	KECAMATAN LEUWILIANG
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	111.081.600	90,00	103.894.600	95,00	70.553.670	95,00	285.529.870	KECAMATAN LEUWILIANG
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	5.222.444.477	100,00	5.041.211.200	100,00	4.754.463.885	100,00	15.018.119.562	KECAMATAN LEUWILIANG
					5.139.662.800		**13.700.000.300**		**6.060.155.710**		**24.899.818.810**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	230.658.104	55,00	447.552.164	60,00	131.920.453	60,00	810.130.721	KECAMATAN CIAMPEA
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	142.830.449	85,00	161.196.428	90,00	37.772.518	90,00	341.799.395	KECAMATAN CIAMPEA
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	69.877.100	100,00	99.235.680	100,00	24.693.929	100,00	193.806.709	KECAMATAN CIAMPEA
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	29.356.400	100,00	96.512.312	100,00	66.314.686	100,00	192.183.398	KECAMATAN CIAMPEA
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	323.241.618	90,00	316.903.766	95,00	180.542.261	95,00	820.687.645	KECAMATAN CIAMPEA
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	4.343.699.129	100,00	12.578.599.950	100,00	5.618.911.864	100,00	22.541.210.943	KECAMATAN CIAMPEA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR (2023)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					5.275.526.289		**5.477.129.000**		**6.903.728.661**		**17.656.383.950**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	94.700.000	55,00	183.350.000	60,00	69.231.538	60,00	347.281.538	KECAMATAN CIBUNGBULANG
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	130.000.000	85,00	103.175.000	90,00	25.406.069	90,00	258.581.069	KECAMATAN CIBUNGBULANG
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	75.000.000	100,00	77.668.500	100,00	63.515.173	100,00	216.183.673	KECAMATAN CIBUNGBULANG
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	77.360.000	100,00	72.007.000	100,00	130.841.255	100,00	280.208.255	KECAMATAN CIBUNGBULANG
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	151.899.800	90,00	176.600.000	95,00	131.374.783	95,00	459.874.583	KECAMATAN CIBUNGBULANG
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	4.746.566.489	100,00	4.864.328.500	100,00	6.483.359.843	100,00	16.094.254.832	KECAMATAN CIBUNGBULANG
					5.167.642.923		**5.376.655.000**		**7.041.754.505**		**17.586.052.428**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	333.285.304	55,00	299.569.000	60,00	277.238.985	60,00	910.093.289	KECAMATAN PAMIJAHAN
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	115.000.000	85,00	223.552.700	90,00	11.622.436	90,00	350.175.136	KECAMATAN PAMIJAHAN
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	4.875.800	100,00	9.650.300	100,00	11.622.436	100,00	26.148.536	KECAMATAN PAMIJAHAN
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	27.657.100	100,00	134.321.600	100,00	106.766.458	100,00	268.745.158	KECAMATAN PAMIJAHAN
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	299.660.272	90,00	355.113.800	95,00	151.144.346	95,00	805.918.418	KECAMATAN PAMIJAHAN
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	4.387.164.447	100,00	4.354.447.600	100,00	6.483.359.843	100,00	15.224.971.890	KECAMATAN PAMIJAHAN
					12.548.738.903		**5.870.507.000**		**6.488.833.108**		**24.908.079.011**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	245.157.185	55,00	258.532.655	60,00	107.413.044	60,00	611.102.884	KECAMATAN RUMPIN
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	126.478.400	85,00	79.326.105	90,00	36.757.930	90,00	242.562.435	KECAMATAN RUMPIN
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	6.560.000	100,00	42.260.000	100,00	5.404.433	100,00	54.224.433	KECAMATAN RUMPIN
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	134.655.300	100,00	253.879.740	100,00	222.254.277	100,00	610.789.317	KECAMATAN RUMPIN
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	113.314.769	90,00	205.585.230	95,00	65.867.571	95,00	384.767.570	KECAMATAN RUMPIN
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	11.922.573.249	100,00	5.030.923.270	100,00	6.051.135.854	100,00	23.004.632.373	KECAMATAN RUMPIN
					5.764.297.167		**13.844.680.000**		**7.321.959.910**		**26.930.937.077**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	159.438.823	55,00	355.638.461	60,00	97.493.989	60,00	612.571.273	KECAMATAN JASINGA
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	132.471.500	85,00	131.056.000	90,00	36.181.316	90,00	299.708.816	KECAMATAN JASINGA
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	18.000.000	100,00	24.391.000	100,00	8.644.787	100,00	51.035.787	KECAMATAN JASINGA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR (2023)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	189.852.000	100,00	186.024.000	100,00	33.378.484	100,00	409.254.484	KECAMATAN JASINGA
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	403.905.615	90,00	479.225.208	95,00	230.677.501	95,00	1.113.808.324	KECAMATAN JASINGA
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	4.860.629.229	100,00	12.668.345.331	100,00	6.915.583.833	100,00	24.444.558.393	KECAMATAN JASINGA
					4.762.578.200		**4.936.189.000**		**5.185.773.070**		**14.884.540.270**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	135.711.950	55,00	136.351.700	60,00	78.316.623	60,00	350.380.273	KECAMATAN PARUNG PANJANG
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	122.500.000	85,00	118.140.000	90,00	22.460.939	90,00	263.100.939	KECAMATAN PARUNG PANJANG
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	24.637.000	100,00	30.046.300	100,00	20.606.579	100,00	75.289.879	KECAMATAN PARUNG PANJANG
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	106.500.000	100,00	150.981.300	100,00	210.216.745	100,00	467.698.045	KECAMATAN PARUNG PANJANG
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	175.830.000	90,00	182.383.050	95,00	99.708.298	95,00	457.921.348	KECAMATAN PARUNG PANJANG
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	4.197.399.250	100,00	4.318.286.650	100,00	4.754.463.885	100,00	13.270.149.785	KECAMATAN PARUNG PANJANG
					4.871.746.139		**5.590.000.000**		**5.185.773.070**		**15.647.519.209**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	65.575.000	55,00	291.714.005	60,00	78.316.623	60,00	435.605.628	KECAMATAN NANGGUNG
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	178.400.500	85,00	139.696.555	90,00	22.460.939	90,00	340.557.994	KECAMATAN NANGGUNG
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	35.460.000	100,00	36.731.505	100,00	20.606.579	100,00	92.798.084	KECAMATAN NANGGUNG
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	192.983.000	100,00	228.086.020	100,00	210.216.745	100,00	631.285.765	KECAMATAN NANGGUNG
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	171.579.000	90,00	168.589.525	95,00	99.708.298	95,00	439.876.823	KECAMATAN NANGGUNG
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	4.227.748.639	100,00	4.725.182.390	100,00	4.754.463.885	100,00	13.707.394.914	KECAMATAN NANGGUNG
					5.280.546.963		**5.667.967.000**		**2.861.348.229**		**13.809.862.192**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	217.091.240	55,00	433.699.885	60,00	133.939.091	60,00	784.730.216	KECAMATAN CIGUDEG
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	88.508.830	85,00	150.784.587	90,00	50.427.925	90,00	289.721.342	KECAMATAN CIGUDEG
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	43.447.550	100,00	75.008.040	100,00	19.210.638	100,00	137.666.228	KECAMATAN CIGUDEG
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	278.249.100	100,00	213.773.330	100,00	160.448.787	100,00	652.471.217	KECAMATAN CIGUDEG
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	306.490.650	90,00	266.414.835	95,00	145.670.884	95,00	718.576.369	KECAMATAN CIGUDEG
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	4.346.759.593	100,00	4.528.286.323	100,00	2.351.650.904	100,00	11.226.696.820	KECAMATAN CIGUDEG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR (2023)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					4.155.367.324		**4.629.481.000**		**4.158.001.033**		**12.942.849.357**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	197.868.350	55,00	125.270.700	60,00	88.557.310	60,00	411.696.360	KECAMATAN TENJO
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	128.861.300	85,00	134.818.600	90,00	16.747.666	90,00	280.427.566	KECAMATAN TENJO
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	16.300.000	100,00	14.126.190	100,00	8.307.881	100,00	38.734.071	KECAMATAN TENJO
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	117.036.750	100,00	202.114.750	100,00	110.180.046	100,00	429.331.546	KECAMATAN TENJO
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	120.322.500	90,00	79.782.050	95,00	44.192.224	95,00	244.296.774	KECAMATAN TENJO
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	3.574.978.424	100,00	4.073.368.710	100,00	3.890.015.906	100,00	11.538.363.040	KECAMATAN TENJO
					5.539.112.750		**5.889.000.000**		**5.918.179.337**		**17.346.292.087**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan ditingkat Kecamatan	%	50,00	140.390.550	55,00	282.400.000	60,00	69.006.122	60,00	491.796.672	KECAMATAN CIAWI
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	139.813.450	85,00	96.968.700	90,00	26.102.539	90,00	262.884.689	KECAMATAN CIAWI
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	33.094.250	100,00	44.739.100	100,00	13.290.401	100,00	91.123.751	KECAMATAN CIAWI
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	131.090.450	100,00	125.799.600	100,00	109.457.459	100,00	366.347.509	KECAMATAN CIAWI
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	166.864.800	90,00	190.800.000	95,00	81.410.952	95,00	439.075.752	KECAMATAN CIAWI
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	4.927.859.250	100,00	5.148.292.600	100,00	5.618.911.864	100,00	15.695.063.714	KECAMATAN CIAWI
					8.499.542.169		**9.060.500.000**		**5.571.510.906**		**23.131.553.075**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan ditingkat Kecamatan	%	50,00	100.605.520	55,00	235.953.015	60,00	82.134.896	60,00	418.693.431	KECAMATAN CISARUA
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	1.651.117.913	85,00	1.860.452.359	90,00	858.580.804	90,00	4.370.151.076	KECAMATAN CISARUA
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	37.802.150	100,00	94.830.195	100,00	18.922.140	100,00	151.554.485	KECAMATAN CISARUA
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	103.835.000	100,00	203.730.890	100,00	169.424.929	100,00	476.990.819	KECAMATAN CISARUA
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	218.214.000	90,00	190.215.415	95,00	120.208.242	95,00	528.637.657	KECAMATAN CISARUA
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	6.387.967.586	100,00	6.475.318.126	100,00	4.322.239.896	100,00	17.185.525.608	KECAMATAN CISARUA
					4.828.241.231		**5.053.725.000**		**5.655.020.869**		**15.536.987.100**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	237.342.486	55,00	352.150.936	60,00	95.077.244	60,00	684.570.666	KECAMATAN MEGAMENDUNG
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	110.039.450	85,00	184.922.935	90,00	73.090.079	90,00	368.052.464	KECAMATAN MEGAMENDUNG
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	72.135.650	100,00	40.293.825	100,00	61.578.420	100,00	174.007.895	KECAMATAN MEGAMENDUNG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR (2023)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	107.179.650	100,00	105.471.345	100,00	118.393.730	100,00	331.044.725	KECAMATAN MEGAMENDUNG
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	70,00	231.707.204	70,00	312.332.324	75,00	120.193.522	75,00	664.233.050	KECAMATAN MEGAMENDUNG
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	4.069.836.791	100,00	4.058.553.635	100,00	5.186.687.875	100,00	13.315.078.301	KECAMATAN MEGAMENDUNG
					5.476.975.156		**19.827.274.000**		**5.530.538.315**		**30.834.787.471**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	171.011.704	55,00	442.530.989	60,00	38.950.909	60,00	652.493.602	KECAMATAN CARINGIN
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	161.472.050	85,00	175.245.525	90,00	26.192.351	90,00	362.909.926	KECAMATAN CARINGIN
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	66.640.050	100,00	235.929.055	100,00	15.326.390	100,00	317.895.495	KECAMATAN CARINGIN
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	108.540.950	100,00	281.643.525	100,00	89.524.684	100,00	479.709.159	KECAMATAN CARINGIN
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	227.174.418	90,00	377.596.253	95,00	173.856.106	95,00	778.626.777	KECAMATAN CARINGIN
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	4.742.135.984	100,00	18.314.328.653	100,00	5.186.687.875	100,00	28.243.152.512	KECAMATAN CARINGIN
					4.727.849.583		**5.315.200.000**		**4.324.914.498**		**14.367.964.081**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	198.050.500	55,00	291.500.755	60,00	190.375.504	60,00	679.926.759	KECAMATAN CIJERUK
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	134.712.500	85,00	160.000.935	90,00	62.761.155	90,00	357.474.590	KECAMATAN CIJERUK
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	46.000.000	100,00	60.000.815	100,00	15.440.550	100,00	121.441.365	KECAMATAN CIJERUK
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	75.000.000	100,00	155.125.575	100,00	83.739.652	100,00	313.865.227	KECAMATAN CIJERUK
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	176.450.000	90,00	235.239.085	95,00	82.581.731	95,00	494.270.816	KECAMATAN CIJERUK
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	4.097.636.583	100,00	4.413.332.835	100,00	3.890.015.906	100,00	12.400.985.324	KECAMATAN CIJERUK
					8.450.386.842		**9.381.034.000**		**5.141.472.906**		**22.972.893.748**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	173.449.200	55,00	291.886.785	60,00	118.652.462	60,00	583.988.447	KECAMATAN CIOMAS
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	1.993.389.546	85,00	2.122.201.850	90,00	45.666.556	90,00	4.161.257.952	KECAMATAN CIOMAS
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	15.387.000	100,00	94.456.250	100,00	27.378.275	100,00	137.221.525	KECAMATAN CIOMAS
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	31.115.550	100,00	177.339.585	100,00	125.180.785	100,00	333.635.920	KECAMATAN CIOMAS
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	104.131.700	90,00	131.019.940	95,00	70.130.942	95,00	305.282.582	KECAMATAN CIOMAS
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	6.132.913.846	100,00	6.564.129.590	100,00	4.754.463.885	100,00	17.451.507.321	KECAMATAN CIOMAS

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR (2023)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					4.839.936.362		**14.076.796.000**		**4.732.231.337**		**23.648.963.699**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	162.760.000	55,00	345.738.350	60,00	111.435.917	60,00	619.934.267	KECAMATAN DRAMAGA
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	168.499.835	85,00	245.000.000	90,00	54.334.889	90,00	467.834.724	KECAMATAN DRAMAGA
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	98.919.104	100,00	76.853.000	100,00	37.919.548	100,00	213.691.652	KECAMATAN DRAMAGA
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	122.059.300	100,00	154.000.000	100,00	91.468.986	100,00	367.528.286	KECAMATAN DRAMAGA
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	197.732.398	90,00	360.017.250	95,00	114.832.101	95,00	672.581.749	KECAMATAN DRAMAGA
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	4.089.965.725	100,00	12.895.187.400	100,00	4.322.239.896	100,00	21.307.393.021	KECAMATAN DRAMAGA
					5.751.726.700		**6.183.722.000**		**3.885.283.929**		**15.820.732.629**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	249.550.000	55,00	267.840.160	60,00	124.430.906	60,00	641.821.066	KECAMATAN TAMANSARI
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	172.709.800	85,00	228.265.840	90,00	71.481.584	90,00	472.457.224	KECAMATAN TAMANSARI
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	62.442.400	100,00	88.504.170	100,00	39.711.991	100,00	190.658.561	KECAMATAN TAMANSARI
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	118.024.900	100,00	214.538.620	100,00	125.680.880	100,00	458.244.400	KECAMATAN TAMANSARI
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	111.950.000	90,00	155.507.615	95,00	66.186.652	95,00	333.644.267	KECAMATAN TAMANSARI
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	5.037.049.600	100,00	5.229.065.595	100,00	3.457.791.916	100,00	13.723.907.111	KECAMATAN TAMANSARI
					5.523.428.503		**8.244.476.000**		**4.537.826.290**		**18.305.730.793**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	337.483.840	55,00	525.007.580	60,00	131.757.185	60,00	994.248.605	KECAMATAN KLAPANUNGGAL
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	129.007.250	85,00	288.374.130	90,00	104.353.250	90,00	521.734.630	KECAMATAN KLAPANUNGGAL
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	132.452.550	100,00	269.776.455	100,00	138.565.658	100,00	540.794.663	KECAMATAN KLAPANUNGGAL
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	91.323.350	100,00	523.638.510	100,00	107.179.934	100,00	722.141.794	KECAMATAN KLAPANUNGGAL
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	178.452.200	90,00	350.713.890	95,00	107.179.934	95,00	636.346.024	KECAMATAN KLAPANUNGGAL
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	4.654.709.313	100,00	6.286.965.435	100,00	3.948.790.328	100,00	14.890.465.076	KECAMATAN KLAPANUNGGAL
					4.487.617.789		**4.806.640.000**		**4.649.973.580**		**13.944.231.369**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	167.599.404	55,00	260.998.665	60,00	119.635.546	60,00	548.233.615	KECAMATAN CISEENG
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	179.799.700	85,00	120.974.618	90,00	11.622.436	90,00	312.396.754	KECAMATAN CISEENG
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	18.999.350	100,00	20.726.395	100,00	17.433.654	100,00	57.159.399	KECAMATAN CISEENG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR (2023)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	105.198.700	100,00	139.999.030	100,00	93.909.284	100,00	339.107.014	KECAMATAN CISEENG
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	123.496.800	90,00	159.030.960	95,00	85.132.764	95,00	367.660.524	KECAMATAN CISEENG
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	3.892.523.835	100,00	4.104.910.332	100,00	4.322.239.896	100,00	12.319.674.063	KECAMATAN CISEENG
					12.443.075.664		**6.166.358.000**		**3.346.637.841**		**21.956.071.505**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	186.582.400	55,00	250.000.000	60,00	108.427.101	60,00	545.009.501	KECAMATAN RANCABUNGUR
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	127.000.000	85,00	214.971.430	90,00	30.218.334	90,00	372.189.764	KECAMATAN RANCABUNGUR
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	34.266.000	100,00	134.632.620	100,00	19.912.720	100,00	188.811.340	KECAMATAN RANCABUNGUR
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	189.422.000	100,00	340.000.000	100,00	119.375.204	100,00	648.797.204	KECAMATAN RANCABUNGUR
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	74.229.800	90,00	208.733.960	95,00	43.136.555	95,00	326.100.315	KECAMATAN RANCABUNGUR
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	11.831.575.464	100,00	5.018.019.990	100,00	3.025.567.927	100,00	19.875.163.381	KECAMATAN RANCABUNGUR
					4.969.268.560		**6.904.503.000**		**5.302.659.282**		**17.176.430.842**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	274.331.950	55,00	516.562.527	60,00	123.471.908	60,00	914.366.385	KECAMATAN SUKAJAYA
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	174.799.400	85,00	169.690.438	90,00	62.134.099	90,00	406.623.937	KECAMATAN SUKAJAYA
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	142.194.700	100,00	121.552.391	100,00	99.016.153	100,00	362.763.244	KECAMATAN SUKAJAYA
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	155.123.150	100,00	320.622.597	100,00	131.792.808	100,00	607.538.555	KECAMATAN SUKAJAYA
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	186.243.712	90,00	357.447.451	95,00	131.780.430	95,00	675.471.593	KECAMATAN SUKAJAYA
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	4.036.575.648	100,00	5.418.627.596	100,00	4.754.463.885	100,00	14.209.667.129	KECAMATAN SUKAJAYA
					4.832.625.670		**5.242.914.000**		**2.614.534.776**		**12.690.074.446**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	170.628.218	55,00	245.892.158	60,00	87.984.041	60,00	504.504.417	KECAMATAN TANJUNGSARI
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	182.146.018	85,00	148.398.535	90,00	61.894.586	90,00	392.439.139	KECAMATAN TANJUNGSARI
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	75.731.550	100,00	100.588.115	100,00	40.099.342	100,00	216.419.007	KECAMATAN TANJUNGSARI
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	174.745.800	100,00	240.276.368	100,00	121.632.640	100,00	536.654.808	KECAMATAN TANJUNGSARI
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	192.061.504	90,00	211.928.443	95,00	101.593.432	95,00	505.583.379	KECAMATAN TANJUNGSARI
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	4.037.312.580	100,00	4.295.830.381	100,00	2.201.330.736	100,00	10.534.473.697	KECAMATAN TANJUNGSARI

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR (2023)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					4.583.453.703		**14.418.951.000**		**3.391.150.463**		**22.393.555.166**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	113.860.450	55,00	220.889.340	60,00	100.387.659	60,00	435.137.449	KECAMATAN TAJURHALANG
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	141.800.150	85,00	143.380.065	90,00	18.264.164	90,00	303.444.379	KECAMATAN TAJURHALANG
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	26.686.900	100,00	78.276.890	100,00	18.884.018	100,00	123.847.808	KECAMATAN TAJURHALANG
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	28.948.500	100,00	140.206.650	100,00	159.711.042	100,00	328.866.192	KECAMATAN TAJURHALANG
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	119.721.250	90,00	127.806.935	95,00	68.335.653	95,00	315.863.838	KECAMATAN TAJURHALANG
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	4.152.436.453	100,00	13.708.391.120	100,00	3.025.567.927	100,00	20.886.395.500	KECAMATAN TAJURHALANG
					5.151.798.920		**15.361.500.000**		**4.208.974.633**		**24.722.273.553**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	282.659.700	55,00	296.810.215	60,00	47.909.948	60,00	627.379.863	KECAMATAN CIGOMBONG
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	107.139.350	85,00	208.668.900	90,00	18.570.735	90,00	334.378.985	KECAMATAN CIGOMBONG
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	34.928.750	100,00	77.066.260	100,00	17.840.439	100,00	129.835.449	KECAMATAN CIGOMBONG
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	125.296.550	100,00	206.276.000	100,00	98.032.605	100,00	429.605.155	KECAMATAN CIGOMBONG
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	272.537.750	90,00	269.489.500	95,00	136.605.000	95,00	678.632.250	KECAMATAN CIGOMBONG
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	4.329.236.820	100,00	14.303.189.125	100,00	3.890.015.906	100,00	22.522.441.851	KECAMATAN CIGOMBONG
					4.059.055.829		**14.334.301.000**		**3.838.558.621**		**22.231.915.459**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	12.644.200	55,00	372.635.490	60,00	73.398.154	60,00	458.677.844	KECAMATAN LEUWISADENG
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	-	85,00	193.190.320	90,00	25.406.069	90,00	218.596.389	KECAMATAN LEUWISADENG
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	11.245.900	100,00	101.961.400	100,00	6.539.654	100,00	119.746.954	KECAMATAN LEUWISADENG
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	233.113.050	100,00	307.380.150	100,00	160.895.107	100,00	701.388.307	KECAMATAN LEUWISADENG
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	267.171.250	90,00	510.370.260	95,00	114.527.720	95,00	892.069.230	KECAMATAN LEUWISADENG
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	3.534.881.429	100,00	12.848.763.380	100,00	3.457.791.925	100,00	19.841.436.734	KECAMATAN LEUWISADENG
					4.632.147.716		**13.678.000.000**		**2.362.637.526**		**20.672.785.242**	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	%	50,00	160.956.920	55,00	227.435.200	60,00	102.050.617	60,00	490.442.737	KECAMATAN TENJOLAYA
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah	%	80,00	141.826.518	85,00	140.029.165	90,00	52.850.776	90,00	334.706.459	KECAMATAN TENJOLAYA
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	100,00	61.265.990	100,00	97.713.280	100,00	29.887.189	100,00	188.866.459	KECAMATAN TENJOLAYA

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR (2023)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100,00	84.787.100	100,00	124.198.145	100,00	72.200.886	100,00	281.186.131	KECAMATAN TENJOLAYA
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	%	100,00	253.318.238	90,00	199.366.350	95,00	139.396.817	95,00	592.081.405	KECAMATAN TENJOLAYA
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	3.929.992.950	100,00	12.889.257.860	100,00	1.966.251.241	100,00	18.785.502.051	KECAMATAN TENJOLAYA
XI.	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**											
XI.1	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**69.191.659.451**		**110.023.086.970**		**104.245.833.225**		**283.460.579.646**	
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (TBIWK)	%	0,31	1.772.429.872	0,44	5.465.532.612	0,57	5.178.540.664	0,57	12.416.503.148	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Bina Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (TBP2E)	%	0,21	54.402.766.334	0,22	74.127.373.375	0,23	70.234.984.448	0,23	198.765.124.157	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tingkat Bina Ormas (TBO)	%	0,05	1.612.506.786	0,08	10.794.391.169	0,12	10.227.583.433	0,12	22.634.481.388	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Tingkat Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama (TBKE)	%	0,07	285.896.204	0,08	2.518.643.620	0,09	2.386.390.984	0,09	5.190.930.808	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Tingkat Penanganan Potensi Konflik (TPPK)	%	60,00	853.759.897	66,67	5.019.909.372	83,33	4.756.316.602	83,33	10.629.985.871	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	10.264.300.358	100,00	12.097.236.822	100,00	11.462.017.094	100,00	33.823.554.274	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	JUMLAH				**8.929.584.350.843**		**8.142.939.011.669**		**7.343.431.474.834**		**24.415.954.837.355**	

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tercermin dari pencapaian kinerja yang diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Secara definisi, indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran *(output)*, hasil *(outcome)*, dan dampak *(impact)*. Hasil *(outcome)* adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak *(impact)* adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* beberapa program. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah Kabupaten Bogor periode 2018-2023.

Salah satu substansi yang disesuaikan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk tahun 2021-2023. Penyesuaian ini dilakukan dengan memedomani kebijakan nasional yang berkonsekuensi pada pertanggungjawabaan kinerja daerah, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan aturan dimaksud, kinerja daerah terbagi atas kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan, baik yang terkait dengan kinerja utama daerah, maupun kinerja utama perangkat daerah. Dengan demikian, terdapat perbedaan penyajian antara periode tahun tahapan yang telah dilalui yaitu tahun 2019-2020 dengan yang akan dilaksanakan, yaitu tahun 2021-2023.

Di sisi lain, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah telah disesuaikan dari aspek pencapaian target. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah serta penyesuaian-penyesuaian target program yang secara langsung diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah dan penanganan Covid-19. Oleh karena itu, penyesuaian penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode 2018-2023 secara terperinci adalah sebagaimana diuraikan pada subbab-subbab berikut.

8.1 Kinerja Makro Daerah

Pemerintah telah menetapkan capaian kinerja makro daerah berdasarkan variabel-variabel kinerja sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan dengan melihat sejauhmana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Semakin tinggi poin IPM, semakin menunjukkan tingkat keberhasilan dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat.

Baiknya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dari sejauhmana masyarakat dapat mencapai kualitas hidup yang baik, dengan capaian poin IPM yang tinggi.

Target pencapaian IPM Kabupaten Bogor tidah terlepas dari target pencapaian IPM Nasional dan Jawa Barat. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, ditargetkan IPM Nasional akan mencapai 75,54 poin pada tahun 2024. Adapun perbandingan target IPM komposit dijabarkan dalam Tabel 8.1 sebagai berikut :

Tabel 8.1
Perbandingan Target IPM Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023

URAIAN	SATUAN	2021	2022	2023
Nasional	Poin	72,78- 72,95	73,44-73,48	N/A
Jawa Barat		72,19	72,57	73,05
Kab. Bogor		70,48	71,43	72,09

Sumber : RPJMN Tahun 2020-2024
Perubahan RPJMD Prov Jawa Barat 2018-2023
PMDN No. 17 Tahun 2021
APBN 2021

Target pencapaian IPM Kabupaten Bogor tahun 2021-2023 lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan nasional dan Jawa Barat. Namun, jika ditinjau secara peningkatan capaian dari tahun ke tahun, jika dibandingkan terhadap Jawa Barat, target peningkatan IPM Kabupaten Bogor tahun 2022 terhadap tahun 2021 sebesar 0,95 poin, sedangkan Jawa Barat hanya menargetkan 0,38 poin. Adapun tahun 2023 terhadap 2022, target IPM Kabupaten Bogor meningkat sebesar 0,66 poin, sedangkan Jawa Barat hanya

meningkat sebesar 0,48 poin. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki optimisme yang lebih baik dibandingkan dengan Jawa Barat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia. Demikian pula jika dibandingkan dengan target nasional, target Kabupaten Bogor tahun 2022 terhadap tahun 2021 lebih tinggi daripada target nasional, yaitu 0,01 poin di atas target nasional yang ditetapkan sebesar 0,53 poin jika dihitung dari rentang target maksimal nasional.

2. Angka kemiskinan

Kemiskinan menunjukkan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan dan bukan makanan, yang ditinjau dari sisi ekonomi dengan pendekatan pengeluaran.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur dengan menggunakan indikator ini menunjukkan sejauhmana pemerintah Kabupaten Bogor dapat menurunkan angka kemiskinan, baik melalui regulasi, maupun belanja APBD.

Target penurunan kemiskinan tidak terlepas dari target nasional dan Provinsi Jawa Barat. Memedomani RPJMN Tahun 2020-2024, diharapkan kemiskinan akan mencapai angka 6,0-7,0 persen di tahun 2024. Adapun target pencapaian dijabarkan dalam tabel 8.2.

Tabel 8.2
Perbandingan Target Penurunan Angka Kemiskinan Nasional, Jawa Barat, dan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023

URAIAN	SATUAN	2021	2022	2023
Nasional	%	9,2-9,7	8,5-9,00	N/A
Jawa Barat		7,77	7,67	7,54
Kab. Bogor		7,54	7,38	7,14

Sumber : RPJMN Tahun 2020-2024
Perubahan RPJMD Prov Jawa Barat 2018-2023
PMDN No. 17 Tahun 2021

Target capaian angka kemiskinan di Kabupaten Bogor lebih tinggi di Kabupaten Bogor jika dibandingkan dengan Jawa Barat dan nasional. Hingga tahun 2023, jumlah penduduk miskin Kabupaten Bogor diharapkan akan lebih rendah dibandingkan dengan nasional dan Jawa Barat. Jika dibandingkan tahun 2022 terhadap 2021, targaet penurunan kemiskinan sebesar 0,16 persen dibandingkan Jawa Barat yang hanya menargetkan turun sebesar 0,1 persen. Selanjutnya, target tahun 2023 terhadap tahun 2022, Kabupaten

Bogor menargetkan penurunan yang lebih tinggi, yaitu 0,24 persen dibandingkan Jawa Barat yang menargetkan 0,13 persen. Namun, target penurunan Kabupaten Bogor masih lebih rendah dari target nasional yang mencapai 0,7 persen jika dihitung dari rentang target penurunan maksimal.

3. Angka pengangguran

Pengangguran merupakan kondisi dimana terjadi ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan, dimana tenaga kerja melampaui lapangan pekerjaan yang tersedia. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur dengan menggunakan indikator ini, akan menunjukkan sejauhmana Pemerintah Kabupaten Bogor dapat menekan angka pengangguran, baik secara regulasi maupun intervensi melalui belanja APBD.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, pengangguran secara nasional ditargetkan dapat ditekan pada angka 3,6-4,3 persen di tahun 2024. Adapun perbandingan target penurunan angka pengangguran nasional, Jawa Barat, dan Kabupaten Bogor, diuraikan pada tabel 8.3 sebagai berikut :

Tabel 8.3
Perbandingan Target Angka Pengangguran Nasional, Jawa Barat, dan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023

URAIAN	SATUAN	2021	2022	2023
Nasional	%	7,70-9,10	6,24-5,52	N/A
Jawa Barat		10,45	10,16	9,69
Kab. Bogor		12,22	11,64	11,05

Sumber : RPJMN Tahun 2020-2024
Perubahan RPJMD Prov Jawa Barat 2018-2023
PMDN No. 17 Tahun 2021
APBN 2021

Angka pengangguran di Kabupaten Bogor ditargetkan masih lebih tinggi dibandingkan dengan target nasional dan Jawa Barat. Jika dilihat dari penurunan pertahun, tingkat penurunan tahun 2022 terhadap tahun 2021 Kabupaten Bogor sebesar 0,58 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan target Jawa Barat yang hanya menurun sebesar 0,29 persen. Demikian pula dengan tingkat penurunan angka pengangguran Kabupaten Bogor masih lebih tinggi daripada Jawa Barat pada tahun 2023 terhadap 2022, yakni sebesar 0,59 persen, sedangkan Jawa Barat sebesar 0,47 persen. Adapun secara

nasional, tingkat penurunan pengangguran ditargetkan 2,18 persen, jauh di atas target daerah.

4. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perkembangan kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibandingkan dengan kurun waktu sebelumnya (tahun dasar).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terkait sejauhmana Pemerintah Kabupaten Bogor dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik melalui regulasi maupun intervensi pada belanja APBD.

Secara nasional, RPJMN tahun 2020-2024 telah menargetkan bahwa di akhir tahun 2024, kondisi pertumbuhan ekonomi berada pada angka 5,7-6,00 persen. Adapun perbandingan target pertumbuhan ekonomi nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor dijabarkan pada Tabel 8.4

Tabel 8.4
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Barat, dan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023

URAIAN	SATUAN	2021	2022	2023
Nasional	%	5,20-5,80	5,40-6,00	6,00-6,30
Jawa Barat		3,15	3,92	4,25
Kab. Bogor		3,48	4,31	5,15

Sumber : RPJMN Tahun 2020-2024
Perubahan RPJMD Prov Jawa Barat 2018-2023
PMDN No. 17 Tahun 2021
APBN 2021

Pertumbuhan ekonomi di era pandemi covid-19 merupakan pertumbuhan terberat, terutama di tingkat kabupaten/kota. Bahwa perekonomian tahun 2020 mengalami kontraksi di tiap level, baik nasional maupun daerah, namun upaya untuk kembali pada posisi sebelum pandemi akan lebih terasa berat di tingkat daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan laju pertumbuhan ekonomi yang moderat, namun tidak pesimis, mengingat target daerah tetap diupayakan untuk tidak negatif.

Jika dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 terhadap 2021, Kabupaten Bogor masih berada di atas Jawa Barat, yaitu mampu meningkatkan LPE sebesar 0,83 persen, sedangkan Jawa Barat menargetkan sebesar 0,77 persen. Kemudian, target

pada tahun 2023 terhadap 2022, dimana Kabupaten Bogor menargetkan kenaikan sebesar 0,84 persen, sedangkan Jawa Barat hanya sebesar 0,33 persen.

Adapun jika dibandingkan dengan target nasional, peningkatan LPE Kabupaten Bogor Tahun 2022 terhadap 2021 lebih besar daripada target nasional yang hanya sebesar 0,2 persen. Optimisme juga terjadi tahun 2023 terhadap 2022, dimana target nasional hanya sebesar 0,3 persen.

5. Pendapatan perkapita

Pendapatan perkapita merupakan hasil bagi pendapatan regional dengan penduduk pertengahan tahun. Pendapatan perkapitan menunjukkan besarnya rata-rata pendapatan per orang yang diterima selama jangka waktu satu tahun. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut dapat dikatakan bertambah baik.

Baiknya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ditunjukkan dari semakin meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. Secara nasional, pendapatan perkapita akan mengikuti besaran PDB terhadap jumlah penduduk. RPJMN tidak menentukan secara rinci pendapatan perkapita hingga akhir tahun 2024, karena hal tersebut menjadi representasi pemerintah daerah.

Adapun perbandingan target pendapatan perkapita nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor disajikan dalam Tabel 8.5

Tabel 8.5
Perbandingan Target Pendapatan Perkapita Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023

URAIAN	SATUAN	2021	2022	2023
Nasional	Juta Rp/Kapita/ Tahun, ADHB	n/a	n/a	n/a
Jawa Barat		44,02	46,48	49,29
Kab. Bogor		38,58	38,80	39,41

Sumber : RPJMN Tahun 2020-2024
Perubahan RPJMD Prov Jawa Barat 2018-2023
PMDN No. 17 Tahun 2021
APBN 2021

Pendapatan perkapita Kabupaten Bogor dibandingkan dengan Jawa Barat masih lebih rendah. Kondisi pertumbuhan ekonomi pasca terkontraksi di tahun 2020 menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat ikut menurun. Jika dibandingkan dengan target peningkatan tahun 2022 terhadap tahun 2021, Kabupaten

Bogor hanya mampu meningkatkan pendapatan perkapita sebesar 0,3 juta rupiah per tahun, sedangkan Jawa Barat mampu meningkat hingga 2,46 juta rupiah per tahun. Demikian halnya dengan target peningkatan tahun 2023 terhadap 2022, dimana Kabupaten Bogor hanya mampu menargetkan peningkatan sebesar 0,61 juta rupiah per tahun, sedangkan Jawa Barat bisa menargetkan hingga 2,91 juta rupiah per tahun.

6. Ketimpangan pendapatan (Indeks Gini)

Indeks gini merupakan ukuran kemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan di suatu wilayah, atau dengan kata lain, indeks gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Suatu wilayah dikatakan memiliki ketimpangan distribusi pendapatan yang rendah jika indeks gini bernilai < 0,4 poin, ketimpangan sedang jika bernilai 0,4-0,5 poin, dan ketimpangan tinggi jika bernilai >0,5 poin.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan bernilai baik dari sudut pandang indeks gini jika Pemerintah Kabupaten Bogor dapat menurunkan nilai indeks gini semakin mendekati angka nol.

Berdasarkan target RPJMN Tahun 2020-2024, ditargetkan secara nasional, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di akhir tahun 2024 mencapai 0,382 poin. Adapun perbandingan target pencapaian indeks gini nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023 dijabarkan dalam Tabel 8.6.

Tabel 8.6
Perbandingan Target Pencapaian Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023

URAIAN	SATUAN	2021	2022	2023
Nasional	poin	0,377-0,379	0,376-0,378	n/a
Jawa Barat		0,402	0,400	0,396
Kab. Bogor		0,40	0,38	0,37

Sumber : RPJMN Tahun 2020-2024
Perubahan RPJMD Prov Jawa Barat 2018-2023
PMDN No. 17 Tahun 2021
APBN 2021

Ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Bogor tahun 2021-2023 secara umum ditargetkan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jika ditinjau dari target penurunan ketimpangan tahun 2022 terhadap 2021, Kabupaten Bogor menargetkan sebesar 0,02 poin, sedangkan Jawa Barat hanya menargetkan penurunan

sebesar 0,002 poin dan nasional hanya 0,001 poin. Selanjutnya, untuk tahun 2023 terhadap 2022, Kabupaten Bogor menargetkan penurunan sebesar 0,01 poin, sedangkan Jawa Barat hanya menargetkan 0,004 poin.

Secara umum, proyeksi capaian kinerja makro diprediksi optimis dapat dicapai, baik dalam capaian tahunan maupun hingga akhir periode. Beberapa penekanan yang harus diimplementasikan dalam pelaksanaan program pembangunan adalah khususnya terkait upaya dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan yang meningkat cukup tinggi akibat pandemi Covid-19.

Kinerja makro daerah tahun 2018-2023 baik realisasi maupun target, disajikan dalam Tabel 8.7 sebagai berikut :

TABEL 8.7
INDIKATOR MAKRO KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018 - 2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2018)	Realisasi		Target			Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	**Indeks Pembangunan Manusia**	**poin**	**69,69**	**70,65**	**70,40**	**70,48**	**71,43**	**72,09**	**72,09**
-	Angka Harapan Hidup/AHH	tahun	70,86	71,01	71,17	71,32	71,39	71,50	71,50
-	Rata-rata lama sekolah/RLS	tahun	7,88	8,29	8,30	8,31	8,50	8,61	8,61
-	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,44	12,47	12,48	12,49	12,75	12,90	12,90
-	Kemampuan daya beli masyarakat/Konsumsi riil per kapita/per tahun	ribu Rp	10.323,00	10.683,00	10.317,00	10.315,00	10.746,42	11.087,55	11.087,55
2	**Angka Kemiskinan**	**%**	**7,14**	**6,66**	**7,69**	**7,54**	**7,38**	**7,14**	**7,14**
3	**Angka Pengangguran**	**%**	**9,75**	**9,06**	**14,29**	**12,22**	**11,64**	**11,05**	**11,05**
4	**Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**6,19**	**5,85**	**-1,77**	**3,48**	**4,31**	**5,15**	**5,15**
5	**Pendapatan perkapita**								
-	Atas dasar harga berlaku	Juta Rp/Kapita/ Tahun	**37,72**	**40,31**	**43,51**	**38,58**	**38,80**	**39,41**	**39,41**
-	Atas dasar harga konstan	Juta Rp/Kapita/ Tahun	**25,37**	**26,31**	**28,39**	**29,38**	**26,09**	**26,48**	**166,59**
6	**Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)**	**poin**	**0,42**	**0,40**	**0,38**	**0,40**	**0,38**	**0,37**	**0,37**

Sumber : Hasil analisis, Badan Pusat Statistik, 2020

8.2 Kinerja Utama Daerah

Kinerja utama daerah merupakan bagian dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi indikator terimplementasikannya visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Di samping itu, kinerja utama daerah merupakan manifestasi dari target tujuan dan sasaran yang diukur dengan indikator-indikator berskala daerah.

Perubahan RPJMD merupakan salah satu wadah untuk melakukan penyesuaian kinerja utama daerah, sehingga dapat menjadi representasi bagi pelaporan kinerja kepala daerah sebagaimana amanat Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Beberapa indikator kinerja utama beserta target untuk tahun 2021-2023 telah disesuaikan dengan beberapa pertimbangan :

1. Hasil evaluasi terhadap akuntabilitasi kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor mengamanatkan bahwa beberapa kinerja daerah perlu disesuaikan dengan level agregat skala kabupaten;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi hingga akhir tahun 2020 menunjukkan bahwa beberapa capaian target kinerja perlu disesuaikan dengan kondisi daerah;
3. Adanya kebijakan nasional yang memberlakukan penyeragaman program di tingkat kabupaten/kota sehingga berdampak pada penyesuaian indikator kinerja utama daerah.

Selanjutnya penjabaran capaian kinerja utama daerah dari tahun 2018-2020, serta target kinerja dari tahun 2021-2023 yang telah disesuaikan dengan beberapa pertimbangan sebagaimana dimaksud disajikan pada Tabel 8.8 sebagai berikut :

Tabel 8.8
Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bogor
Tahun 2018-2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2018	Realisasi		Target			Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	**Indeks Pendidikan**	**poin**	**60,82**	**62,27**	**62,33**	**63,01**	**63,74**	**64,53**	**64,53**
2	RLS (Rata-rata Lama Sekolah)	tahun	7,88	8,29	8,30	8,39	8,50	8,61	8,61
3	HLS (Harapan Lama Sekolah)	tahun	12,44	12,47	12,48	12,61	12,75	12,90	12,90
4	Indeks Membaca	poin	52,69	52,81	60,97	61,16	61,35	61,54	61,54
5	**Indeks Kesehatan**	**poin**	**78,25**	**78,48**	**78,72**	**78,88**	**79,05**	**79,23**	**79,23**
6	**Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)**	**%**	**2,20**	**2,13**	**1,29**	**1,66**	**1,63**	**1,58**	**1,58**
7	Angka Harapan Hidup (AHH)	tahun	70,86	71,01	71,17	71,27	71,39	71,50	71,50
8	Skor pola pangan harapan	poin	86,18	83,40	84,70	80,96	81,12	81,29	81,29
9	*Crude Birth Rate (CBR)*	%	25,59	24,80	19,55	19,10	18,65	18,21	18,21
10	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**	**%**	**6,19**	**5,85**	**-1,77**	**3,48**	**4,31**	**5,15**	**5,15**
11	PDRB Perkapita (AHB)	juta Rp	37,93	40,53	43,51	38,58	38,80	39,41	39,41
12	Tingkat kemiskinan	%	7,14	6,66	7,69	7,54	7,38	7,14	7,14
13	Tingkat pengangguran terbuka	%	9,75	9,06	14,29	12,22	11,64	11,05	11,05
14	PDRB atas dasar harga berlaku	triliun Rp	219,24	237,20	236,15	238,81	244,05	251,80	251,80
15	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**poin**	**61,37**	**64,90**	**67,03**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	78,57	79,05	86,11	86,50	87,00	87,50	87,50
17	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Nilai AKIP	predikat	B	B	67,94	69,00	72,00	75,00	75,00
		poin	65,14	66,17					
19	Indeks Inovasi Daerah	poin	4.280	6.420	13.144	60	65	70	70
20	**Indeks Ketimpangan Williamson**	**poin**	**0,96**	**0,93**	**0,99**	**0,98**	**0,96**	**0,93**	**0,93**
21	Indeks Konektivitas Infrastruktur	poin	N/A	N/A	N/A	1,42	1,47	1,53	1,53

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2018	Realisasi		Target			Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
22	Indeks Desa Membangun	poin	N/A	N/A	0,7001	0,7301	0,7362	0,7524	0,7524
23	Persentase kawasan permukiman layak	%	99,54	99,60	99,65	99,72	99,86	100,00	100,00
24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	49,46	50,89	54,08	56,05	56,15	56,25	56,25
25	Indeks Risiko Bencana	poin	152	150	133,75	136	134	132	132
26	**Indeks Kebahagiaan**	**poin**	**67,94**	**67,95**	**74,73**	**74,73-74,75**	**74,72-74,76**	**74,72-74,78**	**74,72-74,78**
27	**Indeks Pembangunan Gender**	**poin**	**88,69**	**88,87**	**89,39****	**89,63**	**90,09**	**90,56**	**90,56**
28	Indeks Kerukunan Hidup Beragama	poin	67,75	67,92	82,10	82,09-82,12	82,09-82,15	82,09-82,17	82,09-82,17
29	Tingkat Kepatuhan Perda dan Perkada Ketertiban Umum	%	N/A	N/A	N/A	74,36	82,05	92,31	92,31
30	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	poin	57,10	57,57	55,90	58,50	58,90	59,00	59,00
31	Persentase Kebudayaan yang dilestarikan	%	N/A	65,00	65,00	57,01	57,94	58,88	58,88

Sumber : Hasil analisis (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pusat Statistik dan Institut Pertanian Bogor), 2021

1. Indeks Pendidikan

Salah satu perwujudan misi pertama yaitu masyarakat yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan tujuan pembangunan daerah yaitu terwujudnya masyarakat Bogor Cerdas. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bogor adalah indeks pendidikan yang mencerminkan sejauh mana kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bogor ditinjau dari aspek pendidikan. Semakin tinggi indeks pendidikan menunjukkan semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bogor.

Hingga akhir periode, indeks pendidikan diharapkan bisa tercapai sebesar 64,53 poin, dengan target peningkatan sebesar 3,1 poin selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

2. Rata-rata Lama Sekolah

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Bogor cerdas, salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bogor adalah meningkatnya pelayanan pendidikan yang berkualitas, dimana salah satu indikator yang menunjukkan baik tidaknya kinerja penyelenggaran pemerintahan Kabupaten Bogor adalah rata-rata lama sekolah. Semakin tinggi capaian rata-rata lama sekolah, semakin meningkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rata-rata lama sekolah merupakan ukuran untuk melihat tingkat ketercapaian masyarakat dalam mengenyam pendidikan. Hingga akhir periode diharapkan rata-rata lama sekolah mencapai 8,61 tahun, dengan peningkatan sebesar 0,73 tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Bogor mengenyam pendidikan sampai pada jenjang pendidikan menengah pertama kelas delapan.

Jika dibandingkan dengan target nasional, dimana RPJMN menetapkan angka rata-rata lama sekolah sebesar 9,18 tahun dengan peningkatan sebesar 0,66 tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun, maka target peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bogor melebihi target peningkatan nasional.

3. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Semakin tinggi

capaian harapan lama sekolah menunjukkan semakin baiknya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bogor. Harapan Lama Sekolah menunjukkan besarnya peluang anak mengenyam pendidikan atau peluang bersekolah.

Target harapan lama sekolah di Kabupaten Bogor hingga akhir periode adalah sebesar 12,9 tahun, meningkat sebesar 0,46 tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa peluang anak mengenyam pendidikan di Kabupaten Bogor adalah selama lebih dari 12 tahun, atau dapat bersekolah hingga jenjang perguruan tinggi. Jika dibandingkan dengan target nasional yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, pemerintah pusat menetapkan harapan lama sekolah sebesar 13,89 tahun dengan peningkatan sebesar 0,97 poin dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, maka target peningkatan harapan lama sekolah di Kabupaten Bogor masih di bawah target peningkatan nasional.

4. Indeks Membaca

Salah satu cara untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas adalah melalui peningkatan budaya literasi. Sasaran ini merupakan bagian dari kinerja pemerintahan kabupaten Bogor yang dicanangkan untuk menjadi salah satu indikator kinerja utama daerah. Indeks membaca merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kemampuan membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan ketrampilan, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bogor akan meningkat jika nilai indeks membaca semakin meningkat.

Pada akhir periode, indeks membaca ditargetkan tercapai sebesar 61,64 poin, dengan target peningkatan sebesar 8,85 poin dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Jika dibandingkan dengan target Jawa Barat sebesar 64,00 poin, dimana Jawa Barat mengalami penurun target sebesar 4,5 poin, maka peningkatan indeks membaca di Kabupaten Bogor lebih baik dari Jawa Barat.

5. Indeks Kesehatan

Salah satu perwujudan misi Kabupaten Bogor yaitu mewujudkan masyarakat yang berkualitas terlihat dari terwujudnya masyarakat Bogor yang sehat. Indeks kesehatan merupakan indikator yang

digunakan untuk melihat kualitas kesehatan masyarakat. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bogor dinilai semakin baik jika indeks kesehatan semakin meningkat.

Pada akhir periode, indeks kesehatan ditarget tercapai sebesar 79,23 poin dengan peningkatan sebanyak 0,35 poin selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun target peningkatan tahun 2022 terhadap tahun 2021 diharapkan sebesar 0,17 poin, sedangkan untuk tahun 2023 terhadap tahun 2022 adalah sebesar 0,35 poin. Peningkatan tersebut ditargetkan lebih dari 100 persen.

6. Angka Harapan Hidup (AHH)

Peningkatan AHH merupakan sasaran dari upaya pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualitas kesehatan. Angka Harapan Hidup menunjukkan peluang hidup bayi baru lahir pada tahun tertentu. Semakin tinggi AHH, akan semakin menunjukkan peningkatan kinerja pelayanan pemerintahan Kabupaten Bogor.

Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan AHH berada pada 71,50 tahun. Artinya rata-rata bayi yang baru lahir di tahun 2023 diharapkan akan memiliki harapan hidup hingga 71,50 tahun. Target ini diharapkan meningkat sebesar 0,64 tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun peningkatan harapan hidup tahun 2022 terhadap tahun 2021 adalah sebesar 0,12 tahun, sedangkan antara tahun 2023 terhadap tahun 2022 sebesar 0,11 persen.

7. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Laju Pertumbuhan Penduduk merupakan salah satu bagian dari tujuan daerah untuk mewujudkan Bogor sehat. Laju penduduk yang rendah diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dinilai baik jika capaian LPP semakin rendah dengan kualitas kesehatan penduduk yang semakin meningkat.

Kabupaten Bogor menargetkan laju pertumbuhan penduduk hingga akhir tahun 2023 adalah sebesar 1,58 persen. Target ini masih cukup tinggi dibandingkan dengan target akhir periode Jawa Barat yang ditetapkan sebesar 1,12 persen. Jika dilihat dari penurunan tiap tahunnya, tahun 2022 terhadap tahun 2021 ditergetkan turun sebesar 0,03 persen, masih lebih rendah jika dibandingkan dengan target penurunan Jawa Barat untuk tahun yang sama yaitu sebesar 0,05 persen. Adapun untuk tahun 2023 terhadap tahun 2022, penurunan

LPP Kabupaten Bogor ditargetkan sebesar 0,05 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Barat yang menargetkan penurunan sebesar 0,04 persen.

8. Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan merupakan salah satu indikator yang merepresentasikan visi Kabupaten Bogor untuk mewujudkan masyarakat berkualitas dengan tujuan mewujudkan masyarakat Bogor sehat. Masyarakat sehat salah satunya dilihat dari keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga. Hal ini akan menentukan kualitas konsumsi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan gizi pada tingkat wilayah.

Semakin meningkat skor pola pangan harapan, menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum, target skor pola pangan harapan meningkat hingga akhir periode. Secara nasional, target pola pangan harapan ditetapkan sebesar 95,2 poin pada akhir tahun 2024, meningkat 8,8 poin selama 5 (lima) tahun periode 2020-2024. Kabupaten Bogor menargetkan skor pola pangan harapan hingga akhir periode sebesar 81,29 poin, dimana selama periode RPJMD diharapkan dapat meningkat 0,33 poin dari kondisi awal periode. Nilai ini lebih rendah dari target nasional juga target Jawa Barat yang menargetkan sebesar 85,6 poin pada akhir periode dengan peningkatan skor sebesar 1,6 poin selama 5 (lima) tahun.

Jika dibandingkan kenaikan tahun 2022 terhadap 2021, peningkatan skor pola pangan harapan ditargetkan sebesar 0,16 poin, masih lebih rendah dibandingkan dengan target peningkatan Jawa Barat yang ditetapkan sebesar 0,80 poin. Demikian halnya dengan peningkatan tahun 2023 terhadap tahun 2022, Kabupaten Bogor menargetkan sebesar 0,17 poin, sedangkan Jawa Barat sebesar 0,8 poin.

9. *Crude Birth Rate* (CBR)

Indikator *Crude Birth Rate* merupakan indikator sasaran yang merepresentasikan upaya untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk alami dalam rangka menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Semakin rendah nilai CBR, menunjukkan semakin baik kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bogor.

Target CBR hingga akhir periode ditetapkan sebesar 18,21 persen, dengan total penurunan selama 5 (lima) tahun sebesar 6,59 persen.

10. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju pertumbuhan ekonomi, selain menjadi indikator makro daerah, juga menjadi bagian dari indikator kinerja daerah yang merepresentasikan misi mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta menggambarkan target dari tujuan mewujudkan masyarakat Bogor Maju.

Semakin tinggi pencapaian laju pertumbuhan ekonomi, menunjukkan semakin baiknya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bogor. Dengan dijadikannya LPE sebagai indikator kinerja utama daerah, menunjukkan besarnya perhatian Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan perekonomian daerah, baik secara regulasi yang mendorong geliat produksi dan bangkitnya kembali industri maupun dalam aspek belanja pemerintah daerah yang ditujukan untuk menstimulan sendi-sendi ekonomi daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Akibat pandemi Covid-19, perekonomian Kabupaten Bogor mengalami kontraksi hingga mencapai angka laju pertumbuhan ekonomi yang negatif. Upaya untuk memperbaiki kondisi perekonmian daerah, tidak cukup optimis untuk mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi seperti sediakala, jika kondisi riil tidak menunjukkan arah perubahan yang positif. Oleh karena itu, penetapan target LPE pada kondisi akhir periode sebesar 5,15 persen membutuhkan keseriusan dan keberpihakan semua pihak dalam mendukung pulihnya ekonomi daerah. Di sisi lain, target akhir tahun tersebut dapat tercapai jika pandemi Covid-19 mengalami penurunan yang signifikan hingga berakhir.

11. PDRB Perkapita (AHB)

PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku merupakan salah satu Indikator Makro Daerah sekaligus sasaran daerah yang digunakan untuk merepresentasikan kesejahteraan masyarakat. PDRB perkapita merupakan indikator yang paling umum digunakan untuk menggambarkan ukuran standar hidup dan tingkat kemakmuran suatu daerah, karena semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Semakin tinggi PDRB perkapita, menunjukkan semakin baik kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Penetapan PDRB Perkapita pada target akhir periode sebesar 39,41 juta rupiah per orang per tahun dengan target peningkatan sebesar -1,12 persen dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ini merupakan konsekuensi dari menurunnya kondisi ekonomi daerah secara agregat. Dengan demikian, pulihnya ekonomi daerah tahun 2021-2023 memberikan harapan besar bagi meningkatnya target PDRB perkapita.

12. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator makro daerah yang juga digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai kinerja utama daerah. Sebagai upaya untuk melaksanakan misi perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, tingkat kemiskinan merupakan representasi dari sasaran daerah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bogor dinilai baik jika dapat menurunkan tingkat kemiskinan pada posisi yang rendah.

Pandemi covid-19 yang merebak di awal tahun 2020, menyebabkan peningkatan angka kemiskinan yang cukup tajam. Upaya untuk menurunkan angka kemiskinan hingga akhir periode ditargetkan sebesar 7,14 persen, masih belum mampu mengembalikan angka kemiskinan seperti saat belum terjadinya pandemi Covid-19. Dengan demikian, target penurunan angka kemiskinan sebesar 0,48 persen dalam jangka waktu 5 (lima) tahun membutuhkan pengendalian yang cukup intensif, baik secara regulasi maupun pelaksanaan program-program tepat sasaran untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

13. Tingkat pengangguran terbuka

Dalam rangka mewujudkan misi perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, tujuan mewujudkan masyarakat Bogor yang maju dan sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan sebagai ukuran kinerja utama daerah adalah tingkat pengangguran terbuka. Indikator ini juga dijadikan indikator makro yang diukur secara nasional maupun daerah serta menjadi barometer makro ekonomi.

Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan lapangan kerja bagi para

pencari kerja. Dengan demikian, agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bogor dinilai baik, tingkat pengangguran terbuka harus bisa ditekan pada angka yang rendah.

Target pengangguran daerah hingga akhir periode ditetapkan sebesar 11,05 persen, dengan target penurunan sebesar 1,99 poin selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Target penurunan ini cukup rendah mengingat dampak pandemi Covid-19 yang merebak di awal tahun 2020 menyebabkan angka pengangguran membengkak di tahun tersebut hingga mencapai 14,29 persen dari kondisi awal tahun 2018 sebesar 9,75 persen. Pengangguran dapat ditekan jika industri kembali berproduksi secara normal, sehingga penyediaan lapangan kerja dapat mengakomodir kebutuhan pasar kerja.

14. PDRB atas dasar harga berlaku

Selain menjadi indikator makro daerah yang ditetapkan secara nasional, PDRB atas dasar harga berlaku juga digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai salah satu indikator kinerja utama daerah untuk mendukung terimplementasikannya misi perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, dengan sasaran meningkatnya daya saing daerah.

PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bogor akan dinilai baik apabila dapat menstimulus fungsi-fungsi perekonomian yang dapat meningkatkan PDRB.

PDRB Kabupaten Bogor akhir periode ditargetkan sebesar 251,80 Triliun Rupiah, dengan total peningkatan sejak tahun 2019 sebesar 14,69 Triliun Rupiah. Jika dibandingkan peningkatan PDRB tahun 2021 terhadap tahun 2022, kenaikan PDRB ditargetkan mencapai 5,4 Triliun Rupiah, sedangkan jika dibandingkan antara tahun 2022-2023, terjadi

kenaikan sebesar 7,75 Triliun Rupiah. Peningkatan PDRB tahun 2021-2022 lebih rendah daripada tahun 2022-2023, karena tahun 2021 diprediksi geliat perekonomian belum menunjukkan perbaikan yang berarti setelah merebaknya pandemi Covid-19. Target lebih besar di tahun 2022-2023 ditetapkan dengan asumsi pemulihan ekonomi lebih membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

15. Indeks Reformasi Birokrasi

Salah satu misi yang diemban selama periode tahun 2018-2023 adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini ditandai dengan penggunaan indikator tujuan daerah yang berorientasi pada mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.

Indeks Reformasi Birokrasi adalah hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dan birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik. Indeks Reformasi Birokrasi yang semakin meningkat menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu tahun 2022-2023 telah menetapkan nilai IRB dengan mutu A, setelah di tahun 2021 menetapkan target IRB dengan mutu B. Jika dibandingkan dengan target pencapaian kondisi akhir periode, nilai IRB ditargetkan sebesar 75,0 atau dengan mutu B. Hal ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan target Jawa Barat. Namun, jika dilihat dari peningkatan pencapaian dari tahun ke tahun, tahun 2022 terhadap 2021, target IRB ditetapkan sebesar 1,97 poin, sedangkan tahun 2023 terhadap 2022, peningkatan poin ditargetkan sebesar 3,0 poin. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tahun 2022-2023 lebih besar daripada target peningkatan tahun 2021-2022, yang berarti bahwa kinerja per tahun ditargetkan semakin meningkat, yang tercermin dari terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik dan meningkat.

16. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu indikator sasaran daerah yang digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan

publik. Semakin tinggi perolehan IKM, semakin menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah.

Target IKM pada akhir periode ditetapkan sebesar 87,5 poin atau mutu pelayanan baik dengan peningkatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebesar 8,93 poin.

Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 terhadap 2021 ditargetkan meningkat sebesar 0,5 poin, sedangkan tahun 2023 terhadap 2022 ditargetkan meningkat sebesar 0,39 poin.

17. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini BPK merupakan salah satu indikator sasaran daerah berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif. Opini ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan *(adequate disclosures)*, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bogor yang baik dinilai dari perolehan opini BPK sebagai represntasi tata kelola yang baik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian atau *unqualified opinion.* Predikat ini menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Bogor telah menargetkan bahwa pada setiap tahun selama kurun waktu 2018-2023, status WTP harus diperoleh. Hal ini merupakan perwujudan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bogor yang terbaik dalam hal keuangan.

18. Nilai AKIP

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah hasil evaluasi atas tingkat akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka perwujudan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government)*, dengan komponen yang dinilai yaitu : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Nilai AKIP merupakan indikator yang dipergunakan untuk merepresentasikan sasaran yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif. Semakin tinggi nilai AKIP, menunjukkan semakin baik kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Target pencapaian nilai AKIP pada akhir periode ditetapkan sebesar 75,0 poin, naik sebesar 7,06 poin dari tahun 2020. Setiap tahun diharapkan nilai AKIP mengalami peningkatan 3 poin berturut-turut, mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2023.

19. Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah merupakan indikator yang dipergunakan untuk merepresentasikan sasaran yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif. Semakin inovatif suatu daerah, menunjukkan semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintahannya. Untuk itu, penting bagi kepala daerah melakukan inovasi yang mendorong efektivitas pelayanan publik, menciptakan nilai tambah, serta tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Suatu daerah dikatakan sangat inovatif apabila memiliki nilai indeks inovasi pada rentang 60,00-100,00 poin.

Target pencapaian inovasi daerah hingga akhir periode ditetapkan sebesar 75,00 poin. Secara keseluruhan, mulai tahun 2021, dengan menggunakan rentang yang baru, Kabupaten Bogor diharapkan dapat berada pada posisi sangat inovatif.

20. Indeks Ketimpangan Williamson

Salah satu perwujudan misi keempat yaitu pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan tujuan yang berorientasi pada terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bogor menggunakan Indeks ketimpangan Williamson sebagai indikator yang merepresentasikan kinerja utama dalam mencapai kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Indeks ini digunakan untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar kecamatan. Semakin besar nilai ini, semakin besar terjadi ketimpangan.

Pembangunan antar wilayah di Kabupaten Bogor memiliki ketimpangan yang sangat tinggi. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya beberapa kecamatan yang "*Hyper* PDRB perkapita", dimana nilai realisasi PDRB perkapitanya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai

realisasi Kabupaten Bogor dan kecamatan lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bogor harus berupaya menurunkan angka ketimpangan tersebut hingga mencapai 0,93 poin pada akhir periode, dengan target penurunan tahun 2022 terhadap tahun 2021 sebesar 0,02 poin, dan tahun 2023 terhadap tahun 2022 sebesar 0,03 poin. Target indikator ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Jawa Barat pada akhir periode, yaitu sebesar 0,650 poin, serta memiliki target penurunan per tahun yang lebih besar.

21. Indeks Konektivitas Infrastruktur

Indeks Konektivitas Infrastruktur merupakan salah satu indikator yang merepresentasikan sasaran yang ingin dicapai, yaitu meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi serta kulaitas sarana dan prasarana desa. Indikator kinerja ini merupakan koreksi atas indikator sebelumnya yang dinilai belum tepat untuk merepresentasikan kinerja utama daerah dalam mengukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur dengan mempertimbangkan pengembangan transportasi di suatu wilayah. Semakin besar poin indeks ini, menunjukkan semakin baiknya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bogor.

Target akhir periode yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 1,53 poin, dengan target peningkatan sebesar 0,11 poin selama kurun waktu 3 (tiga) tahun. Jika dibandingkan dengan target peningkatan pertahun, tahun 2022 terhadap tahun 2021 ditargetkan meningkat sebesar 0,05 poin, sedangkan target tahun 2023 terhadap tahun 2022 adalah sebesar 0,06 poin.

22. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun merupakan indikator baru dalam perubahan RPJMD yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor untuk merepresentasikan kesejahteraan masyarakat.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesejahteraan masyarakat desa tercermin dari kemampuan desa secara mandiri membangun dan mengembangkan unsur-unsur

yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan bersama diantara masyarakat.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari otonomi daerah, mendorong terwujudnya desa membangun merupakan tugas pemerintah Kabupaten Bogor. Semakin tinggi nilai IDM, menunjukkan semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bogor.

Target peningkatan IDM hingga akhir periode tahun 2023 ditetapkan sebesar 0,7524 poin, melebihi target Jawa Barat yang menetapkan sebesar 0,72 poin. Jika dilihat dari peningkatan tahun 2022 terhadap tahun 2021, IDM ditargetkan meningkat sebesar 0,0289 poin, lebih tinggi dari target paningkatan Jawa Barat tahun yang sama sebesdar 0,01 poin. Demikian halnya dengan target peningkatan IDM tahun 2023 terhadap 2022, dimana Kabupaten Bogor menetapkan target sebesar 0,0162 poin, lebih tinggi dari target Jawa Barat yang menetapkan sebesar 0,01 poin.

23. Persentase kawasan permukiman layak

Salah satu indikator yang merepresentasikan kinerja utama daerah dengan sasaran meningkatnya kualitas permukiman adalah persentase kawasan permukiman yang layak. Permukiman yang layak huni didefinisikan sebagai lingkungan tempat tinggal sekaligus tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Hal ini menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman.

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya penyediaan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat, terkait luasan kawasan permukiman yang telah ditangani kekumuhannya.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pengentasan kawasan kumuh mendukung pemenuhan penyediaan kawasan permukiman layak di Kabupaten Bogor.

Semakin besar persentase kawasan permukiman yang layak, semakin menunjukkan baiknya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bogor. Hingga tahun 2023, ditargetkan upaya pengentasan

kawasan kumuh dapat diselesaikan hingga 100 persen dari 154,4 Ha kawasan kumuh yang ada.

24. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Bogor menjadikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai indikator yang merepresentasikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nilai indeks ini ditargetkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan target akhir diharapkan mencapai 56,25 poin. Target ini lebih rendah dari target Jawa Barat yaitu 61,60 poin. Apabila dihitung peningkatan capaian per tahun, diharapkan secara konsisten akan meningkat sebesar 0,10 poin per tahun dalam kurun waktu tahun 2021-2023.

25. Indeks Risiko Bencana

Mengurangi risiko bencana merupakan salah satu sasaran pembangunan daerah. Indeks Risiko Bencana merupakan indikator yang merepresentasikan tingkat risiko bencana. Semakin kecil poinnya, semakin baik kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bogor.

Target akhir periode untuk penanganan bencana di Kabupaten Bogor adalah tercapainya Indeks Risiko Bencana sebesar 132 poin, dengan target penurunan sepanjang kurunwaktu 5 (lima) tahun sebesar 20 poin.

Provinsi Jawa Barat juga menggunakan indikator ini sebagai kinerja utama, dengan menetapkan target sebesar 144 poin pada akhir periode.

26. Indeks Kebahagiaan

Mewujudkan kesalehan sosial merupakan misi kelima dari penjabaran visi Kabupaten Bogor. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bogor berkeadaban sebagai tujuan, Pemerintah Kabupaten Bogor menjadikan Indeks Kebahagiaan sebagai indikator yang merepresentasikan kesejahteraan masyarakat berdasarkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Indeks kebahagiaan merupakan indeks komposit yang disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial, meliputi kepuasan terhadap : 1) kesehatan, 2) pendidikan, 3) pekerjaan, 4) pendapatan rumah tangga, 5) keharmonisan keluarga, 6) ketersediaan waktu luang, 7) hubungan sosial, 8) kondisi rumah dan aset, 9) keadaan lingkungan, dan

10) kondisi keamanan. Semakin tinggi nilai indeks kebahagiaan, menunjukkan semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Target akhir periode yang diharapkan akan dicapai berada pada rentang 74,72-74,78 poin.

27. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Bogor berkeadaban, indeks ini digunakan untuk merepresentasikan kinerja utama daerah yang diharapkan semakin lama semakin meningkat.

Target pencapaian IPG di Kabupaten Bogor cukup tinggi, dimana pada akhir periode diharapkan akan mencapai 90,56 poin. Target ini secara kumulatif selama 5 (lima) tahun diharapkan meningkat sebesar 1,87 poin. Jawa Barat juga menjadikan IPG sebagai salah satu indikator kinerja utama, dengan target akhir periode diharapkan mencapai 8,64 poin.

28. Indeks Kerukunan Hidup Beragama

Dalam rangka mewujudkan sasaran kehidupan masyarakat agamis, harmonis, nyaman, tertib dan tidak diskriminatif, Pemerintah Kabupaten Bogor menggunakan Indeks Kerukunan Hidup Beragama sebagai indikator yang menunjukkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kerukunan umat beragama di Kabupaten Bogor.

Target akhir periode yang diharapkan dicapai adalah 82,09-82,17 poin. Target ini lebih tinggi dibandingkan dengan target Jawa Barat yang ditetapkan sebesar 69,60 poin.

29. Tingkat Kepatuhan Perda dan Perkada Ketertiban Umum

Tingkat Kepatuhan Perda dan Perkada Ketertiban Umum merupakan indikator yang digunakan untuk merepresentasikan kinerja sasaran, yakni mewujudkan kehidupan masyarakat agamis, harmonis, nyaman, tertib dan tidak diskriminatif. Semakin besar Tingkat Kepatuhan Perda dan Perkada Ketertiban Umum, semakin baik kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bogor. Kinerja ini ditargetkan mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan target capaian sebesar 74,36 persen pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 82,05 persen dan 92,31 persen pada tahun 2023, dengan

harapan bahwa Kabupaten Bogor senantiasa berada dalam kondisi tenteram dan tertib.

30. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Meningkatnya peranan wanita dalam pembangunan merupakan perwujudan sasaran pembangunan daerah. Indikator yang digunakan untuk merepresentasikan hal tersebut adalah Indeks Pemberdayaan Gender. IPG menunjukan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan.

Target IDG hingga akhir periode diharapkan akan tarcapai sebesar 59 poin. Adapun jika disandingkan dengan target Jawa Barat, IDG ditargetkan tercapai diakhir periode sebesar 90 persen. Dalam hal ini, Kabupaten Bogor harus meningkatkan partisipasi wanita dalam DPRD untuk meningkatkan IDG.

31. Persentase Kebudayaan yang dilestarikan

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, karsa, rasa, dan hasil karya masyarakat. Termasuk di dalamnya benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi -generasi sebelumnya, dilestarikan untuk generasi yang akan datang. Kebudayaan yang dilestarikan terdiri dari penyelenggaraan festival seni budaya, karya budaya yang di revitalisasi dan diinventarisasi serta benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan.

Dalam upaya pelestarian seni dan budaya, Pemerintah Kabupaten Bogor menjadikan kebudayaan yang dilestarikan sebagai indikator yang menunjukkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Target akhir periode yang diharapkan tercapai adalah 58,88 persen, dengan target peningkatan warisan budaya yang dilestarikan sebesar 1,87 persen selama tahun 2021-2023.

8.3 Kinerja Utama Perangkat Daerah

Kinerja utama perangkat daerah menggambarkan kinerja yang diharapkan akan dicapai oleh perangkat daerah sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kinerja utama perangkat daerah beserta targetnya telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta penetapan indikator kinerja secara nasional sebagai bahan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun kinerja tahun 2018-2020 yang menggambarkan kondisi sebelum ditetapkannya

indikator penilaian kinerja daerah dalam Permendagri 18 Tahun 2020, disajikan dalam Tabel 8.9a, sedangkan indikator kinerja tahun 2021-2023 yang telah disesuaikan disajikan dalam Tabel 8.9b.

Tabel 8.9 a
Realisasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2019-2020

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018)	2019		2020		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	**PENDIDIKAN**								
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 13-15 Tahun	poin	867	880	1.724	892	736	736	DINAS PENDIDIKAN
2	Nilai rata-rata UN dari SD	poin	74,6	77,98	71,06	81,36	N/A	N/A	DINAS PENDIDIKAN
3	Nilai rata-rata UN dari SMP	poin	49,98	55,08	47,66	60,19	N/A	N/A	DINAS PENDIDIKAN
4	Persentase sekolah dasar (SD) yang terakreditasi minimal B	%	78,17	82,53	97,40	86,90	97,25	97,25	DINAS PENDIDIKAN
5	Persentase sekolah menengah pertama (SMP) yang terakreditasi minimal B	%	63,72	68,97	85,10	74,21	88,37	88,37	DINAS PENDIDIKAN
6	Guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4	%	82,97	85,39	76,90	87,83	79,05	79,05	DINAS PENDIDIKAN
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	poin	43,33	45,48	68,58	47,75	42,62	42,62	DINAS PENDIDIKAN
8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD-MI-Paket A	poin	97,45	97,46	138,53	97,47	95,87	95,87	DINAS PENDIDIKAN
9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP-MTs-Paket B	poin	92,69	92,7	227,22	92,72	94,51	94,51	DINAS PENDIDIKAN
10	Angka Putus Sekolah (DO) SD-MI	poin	0,098	0,094	0,06	0,09	0,30	0,30	DINAS PENDIDIKAN
11	Angka Putus Sekolah (DO) SMP-MTs	poin	0,273	0,263	0,200	0,253	0,268	0,268	DINAS PENDIDIKAN
B	**KESEHATAN**								
1	Cakupan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	87,73	92,8	88,87	92,80	85,56	85,56	DINAS KESEHATAN
2	Prevalensi stunting	%	0,329	0,329	19,08	0,296	12,86	12,86	DINAS KESEHATAN
3	Cakupan keluarga bebas rokok	%	50,08	52,5	50,37	55,00	52,10	52,10	DINAS KESEHATAN
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	78,22	70	78,72	78,00	78,76	78,76	DINAS KESEHATAN
5	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	%	0,8710	0,8700	0,9001	0,8800	0,6506	0,6506	DINAS KESEHATAN
C	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								
1	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	%	86,41	85,00	83,37	85,10	82,15	82,15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Persentase cakupan pelayanan infrastruktur penyehatan lingkungan infrastruktur penyehatan lingkungan	%	N/A	58,15	51,33	58,62	51,03	51,03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	67,74	68,20	66,81	68,65	68,94	68,94	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018)	2019		2020		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Persentase tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten pada sistem informasi pembina jasa konstruksi (SIPJAKI)	%	N/A	45,00	0,00	70,00	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	Persentase luasan RTH Publik sebesar 20% terhadap luas wilayah kawasan perkotaan	%	1,90	2,15	1,58	2,42	1,60	1,60	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
D	**PERUMAHAN RAKYAT / PERTANAHAN**								
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	93,61	94,15	94,64	94,79	94,99	94,99	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	0,042	0,067	0,06	0,055	0,059	0,059	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3	Persentase jumlah bidang tanah/lahan terdaftar menjadi tanah/lahan bersertifikat	%	71,95	75,00	75,00	78,00	78,55	78,55	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
E	**KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	76,52	85,00	76,44	85,00	76,45	76,45	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	Persentase jumlah korban bencana yang selamat	%	N/A	100,00	99,98	100,00	99,98	99,98	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	Persentase masyarakat yang mendapat Rehabilitasi Rekonstruksi	%	N/A	100,00	88,09	100,00	59,23	59,23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	Persentase kapasitas masyarakat Siap Siaga Kebakaran	%	N/A	11,67	9,08	16,67	11,49	11,49	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
2	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten dan Perbatasan	%	N/A	27,98	51,56	28,26	47,69	47,69	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
3	Persentase inspeksi pengawasan dan proteksi kebakaran	%	N/A	10,00	10,00	15,00	14,67	14,67	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018)	2019		2020		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F	**SOSIAL**								
1	Persentase PMKS yang ditangani	%	N/A	14,21	0,42	14,34	0,80	0,80	DINAS SOSIAL
2	Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas PSKS	%	16,73	28,00	14,75	18,00	6,33	6,33	DINAS SOSIAL
G	**TENAGA KERJA / TRANSMIGRASI**								
1	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	N/A	11,94	16,37	12,38	11,66	11,66	DINAS TENAGA KERJA
H	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	%	49,2	27,80	12,78	27,80	18,26	18,26	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	%	25,00	12,00	15,00	12,00	10,00	10,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	N/A	80,00	100,00	80,00	100,00	100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018)	2019		2020		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Cakupan Penyediaan data informasi data mikro keluarga di setiap desa	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5	Persentase pemakaian kontrasepsi KB/Contraception Prevelance Rate (CPR)	%	73,63	70,63	72,99	70,69	73,76	73,76	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin Ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	N/A	16,58	14,39	16,49	14,01	14,01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (DO)	%	N/A	12,13	11,47	12,05	11,83	11,83	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
I	**PANGAN**								
1	Penanganan Desa Rawan Pangan	desa	N/A	19	19	40	40	40	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	Ketersediaan Energi Per Kapita	%	102,26	102,50	104,11	102,80	103,90	103,90	DINAS KETAHANAN PANGAN
3	Ketersediaan Protein Per Kapita	%	143,68	144,00	141,70	144,30	127,95	127,95	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018)	2019		2020		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Ketersediaan Pangan Utama	%	63,00	38,33	43,88	37,63	58,00	58,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
5	Skor Angka Kecukupan Energi	%	105,80	105,60	107,10	105,00	108,60	108,60	DINAS KETAHANAN PANGAN
6	Skor Angka Kecukupan Protein	%	110,90	111,10	115,40	111,30	119,51	119,51	DINAS KETAHANAN PANGAN
7	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	91,00	91,50	81,13	92,00	74,21	74,21	DINAS KETAHANAN PANGAN
8	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	%	91,00	91,50	85,71	92,00	92,86	92,86	DINAS KETAHANAN PANGAN
9	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	%	95,02	100,00	95,70	100,00	100,00	100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
10	Keamanan Pangan Segar yang Diuji	%	N/A	87,00	74,30	88,00	89,93	89,93	DINAS KETAHANAN PANGAN
J	**LINGKUNGAN HIDUP**								
1	Capaian Penanganan Pengelolaan Sampah	%	28,21	36,18	19,00	52,60	28,73	28,73	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	Indeks Kualitas Udara	poin	72,42	72,92	68,40	73,42	71,92	71,92	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	Indeks Kualitas Air	poin	47,55	48,05	48,37	48,51	48,37	48,37	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	poin	58,66	59,16	39,65	59,66	44,97	44,97	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
K	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								
1	cakupan penerbitan KTP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	99,82	99,82	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	cakupan penerbitan akte kelahiran anak	%	92,23	92,77	94,89	92,90	80,27	80,27	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	persentase permohonan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil yang diterbitkan berbasis NIK	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018)	2019		2020		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								
1	Indek Desa Membangun (IDM)	poin	0,6336	0,6337	0,6337	0,6338	0,7001	0,7001	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan keuangannya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3	Persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan desa	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4	Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	%	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5	Persentase lembaga desa aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
6	Persentase program/kegiatan desa yang dilaksanakan melalui swadaya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
M	**PERHUBUNGAN**								
1	Tingkat kinerja pelayanan lalu lintas (V/C rasio)	%	0,82	0,80	0,82	0,78	0,82	0,82	DINAS PERHUBUNGAN
2	Persentase layanan angkutan darat	%	0,58	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	DINAS PERHUBUNGAN
N	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
1	Indeks SPBE	level	3,00	3,00	2,58	3,00	3,27	3,27	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	Diseminasi Informasi melalui Media	%	70,00	70,00	88,24	70,00	88,24	88,24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
O	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								
1	Persentase Koperasi Aktif dan sehat	%	31,61	34,70	35,68	37,92	35,44	35,44	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018)	2019		2020		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan menjadi Usaha Kecil	unit	N/A	100,00	88,00	120,00	20,00	20,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
P	**PENANAMAN MODAL**								
1	Jumlah Nilai Investasi PMA/ PMDN	Trilyun Rp.	8,69	9,10	9,18	9,60	9,16	9,16	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	PMA	Trilyun Rp.	5,05	5,29	4,76	5,58	2,86	2,86	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	PMDN	Trilyun Rp.	3,64	3,81	4,41	4,02	6,30	6,30	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN	perusahaan	331	340	328	350	357	357	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	PMA	perusahaan	173	177	196	181	150	150	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6	PMDN	perusahaan	158	163	132	169	207	207	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
7	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/Perusahaan)	rasio	20,00	30,00	29,00	35,00	10,80	10,80	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
8	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi PMDN	%	98,40	4,70	21,10	5,50	42,86	42,86	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
9	Rata-rata waktu penyelesaian perizinan melalui OPTIMIS (Hari Kerja)	hari	3-10	7	5	6	5	5	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
10	Perizinan Berstandar ISO	izin	77	-	-	-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
11	Perizinan Non OSS Berstandar ISO	izin	-	20	43	40	43	43	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018)	2019		2020		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								
1	Persentase pemuda binaan Dispora yang berwirausaha	%	N/A	2,00	2,00	2,00	0,98	0,98	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	Jumlah Atlet berpretasi	atlit	N/A	291	84	318	N/A	N/A	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga (GOM, Stadion, Vennue cabang olahraga dan Sport Center Karadenan) yang dibangun	unit	N/A	1	1	8	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
R	**KEBUDAYAAN / PARIWISATA**								
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	wisatawan	7.513.209	7.900.000	9.720.585	8.400.000	4.469.286	4.469.286	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	unit	N/A	58	65	66	65	65	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
S	**PERPUSTAKAAN / ARSIP**								
1	Persentase Pengunjung perpustakaan	%	1,30	1,81	1,31	1,84	0,68	0,68	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	Persentase Pengelolaan arsip secara baku berbasis TIK	%	3,13	15,63	15,63	31,25	18,75	18,75	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
T	**KELAUTAN DAN PERIKANAN / PETERNAKAN**								
1	Produksi Perikanan	ton	122.131,38	146.681	125.134,00	148.985	134.663,18	134.663,18	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2	Produksi Peternakan	ton	182.198,04	254.500	274.202,62	261.017	515.707,39	515.707,39	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
U	**PERTANIAN**								
1	Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan :								DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	- Produksi padi	Ton GKG	545.418	417.839	509.119	418.884	477.255	477.255	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018)	2019		2020		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Produksi Palawija	Ton	162.190	151.715	150.076	151.867	144.424	144.424	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	- Produksi sayuran	Ton	95.252	92.487	115.193	92.950	112.493	112.493	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	- Produksi buah-buahan	Ton	131.369	59.972	123.135	60.572	106.555	106.555	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	- Produksi tanaman hias bunga	Tangkai	4.389.308	4.150.786	5.358.377	4.192.294	4.060.663	4.060.663	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	- Produksi tanaman hias daun indah	Pohon	527.119	411.380	860.198	415.494	750.257	750.257	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	- Produksi tanaman obat	Ton	11.228	4.409	10.447	4.453	9.539	9.539	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	- Produksi tanaman perkebunan	Ton	7.939	7.993	7.618	8.032	8.602	8.602	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2	Produktivitas padi dan bahan pangan utama lainnya :								DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	- Produktivitas padi sawah	ku/ha	63,25	55,20	62,70	55,78	62,53	62,53	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	- Produktivitas padi gogo	ku/ha	32,58	33,62	33,90	33,64	34,36	34,36	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018)	2019		2020		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Produktivitas palawija	ku/ha	172,02	171,83	171,98	171,92	172,91	172,91	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	- Produktivitas sayuran	ku/ha	116,05	116,11	134,39	116,17	128,32	128,32	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	Persentase rata-rata nilai tambah tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	N/A	5,00	5,00	5,00	6,84	6,84	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
4	Jumlah kelembagaan kelompok tani yang terbentuk	kelompok	N/A	8	10	8	25	25	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
V	**PERDAGANGAN / PERINDUSTRIAN**								
1	Nilai Tambah Bruto (NTB) Perdagangan	Juta Rp.	29.721.902	32.000.000	30.482.601	34.000.000	29.562.426	29.562.426	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2	Nilai Tambah Bruto (NTB) Industri	Juta Rp.	117.985.635	126.000.000	128.122.216	135.000.000	127.407.557	127.407.557	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
W	**SEKRETARIAT DAERAH**								
1	Kontribusi BUMD terhadap penerimaan pembiayaan daerah	%	N/A	4,27	6,03	4,27	3,49	3,49	SEKRETARIAT DAERAH
2	Persentase rancangan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	%	N/A	15,38	15,38	23,08	23,08	23,08	SEKRETARIAT DAERAH
3	Kualitas penyusunan LPPD	Nilai	3,06	3,40	3,26	3,40	3,26	3,26	SEKRETARIAT DAERAH
4	Persentase penyelesaian kasus tanah	%	70,00	70,25	50,00	79,07	79,07	79,07	SEKRETARIAT DAERAH
5	Jumlah DOB	DOB	0	1	0	2	0	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
6	Persentase peraturan perundang-undangan daerah yang diterbitkan	%	119,17	100,00	100,00	100,00	111,19	111,19	SEKRETARIAT DAERAH
7	Persentase permasalahan hukum yang ditangani	%	13,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018)	2019		2020		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Persentase rancangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	rasio	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	SEKRETARIAT DAERAH
9	Persentase evaluasi capaian kinerja yang ditindaklanjuti	%	100,00	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	SEKRETARIAT DAERAH
10	Persentase kerjasama yang diimplementasikan	%	161,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	SEKRETARIAT DAERAH
11	Persentase pengadaan barang/ jasa yang selesai sesuai permohonan dari PD	%	97,49	98,00	99,22	98,00	97,26	97,26	SEKRETARIAT DAERAH
12	Rata-rata IKM perangkat daerah diatas 76,61	%	65,00	80,00	80,00	80,00	86,11	86,11	SEKRETARIAT DAERAH
13	Persentase implementasi hasil ANJAB dan ABK	%	100,00	100,00	100,00	100,00	80,00	80,00	SEKRETARIAT DAERAH
14	Rata-rata nilai AKIP perangkat daerah diatas 60	%	N/A	84,38	54,84	84,38	71,68	71,68	SEKRETARIAT DAERAH
15	Jumlah Kajian Strategis yang rekomendatif	%	N/A	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	SEKRETARIAT DAERAH
16	Persentase lembaga keagamaan yang dilayani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	90,63	90,63	SEKRETARIAT DAERAH
X	**SEKRETARIAT DPRD**								
1	Persentase tingkat kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	%	85,00	85,00	88,24	86,00	85,45	85,45	SEKRETARIAT DPRD
Y	**PERENCANAAN**								
1	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2	Persentase Difusi Hasil Penelitian di Kabupaten Bogor	%	N/A	20,00	20,00	20,00	16,00	16,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018)	2019		2020		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Persentase Inovasi di Kabupaten Bogor	%	N/A	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Z	**KEUANGAN**								
1	Ketepatan Penetapan APBD	Tepat/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2	Persentase PD yang Laporan Keuangannya sesuai SAP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		PD	72	72	72	72	72	72	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	Persentase PD yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		PD	72	72	72	72	72	72	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	38,28	34,19	38,89	36,22	36,72	36,72	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
2	Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	%	103,59	100	106,24	100,00	98,80	98,80	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
3	Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	%	70,47	68,32	70,97	67,50	65,68	65,68	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
AA	**KEPEGAWAIAN**								
1	Persentase Penataan ASN sesuai formasi dan kebutuhan	%	N/A	72,04	71,05	72,04	71,55	71,55	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	N/A	11,00	15,76	9,68	9,32	9,32	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
3	Persentase ASN yang mempunyai penilaian prestasi kerja minimal baik	%	N/A	85,01	92,16	85,01	91,77	91,77	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018)	2019		2020		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BB	**INSPEKTORAT DAERAH**								
1	Level Maturitas SPIP	level	2	3	3	3	3	3	INSPEKTORAT
2	Level Kapabiltas APIP	level	2	3	3	3	3	3	INSPEKTORAT
CC	**KEWILAYAHAN**								
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	77,32	75,00	87,63	87,63	KECAMATAN CIBINONG
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	85,72	75,00	80,00	80,00	KECAMATAN GUNUNGPUTRI
3	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	80,61	75,00	80,61	80,61	KECAMATAN CITEUREUP
4	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	80,43	75,00	95,26	95,26	KECAMATAN SUKARAJA
5	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	74,89	75,00	79,90	79,90	KECAMATAN BABAKANMADANG
6	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	85,06	75,00	85,66	85,66	KECAMATAN JONGGOL
7	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	80,06	75,00	90,00	90,00	KECAMATAN CILEUNGSI
8	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	80,42	75,00	84,50	84,50	KECAMATAN CARIU
9	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	84,24	75,00	90,26	90,26	KECAMATAN SUKAMAKMUR
10	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	80,43	75,00	89,06	89,06	KECAMATAN PARUNG
11	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	78,99	75,00	72,50	72,50	KECAMATAN GUNUNGSINDUR
12	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	76,67	75,00	75,00	75,00	KECAMATAN KEMANG
13	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	75,42	75,00	64,00	64,00	KECAMATAN BOJONGGEDE
14	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	77,00	75,00	82,50	82,50	KECAMATAN LEUWILIANG
15	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	72,73	75,00	80,81	80,81	KECAMATAN CIAMPEA
16	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	81,30	75,00	83,93	83,93	KECAMATAN CIBUNGBULANG
17	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	72,57	75,00	90,00	90,00	KECAMATAN PAMIJAHAN

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018)	2019		2020		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	78,39	75,00	82,00	82,00	KECAMATAN RUMPIN
19	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	79,78	75,00	80,81	80,81	KECAMATAN JASINGA
20	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	82,42	75,00	86,00	86,00	KECAMATAN PARUNGPANJANG
21	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	80,43	75,00	80,00	80,00	KECAMATAN NANGGUNG
22	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	77,12	75,00	75,00	75,00	KECAMATAN CIGUDEG
23	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	74,79	75,00	85,00	85,00	KECAMATAN TENJO
24	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	78,12	75,00	98,00	98,00	KECAMATAN CIAWI
25	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	85,11	75,00	82,30	82,30	KECAMATAN CISARUA
26	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	81,11	75,00	83,14	83,14	KECAMATAN MEGAMENDUNG
27	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	82,50	75,00	83,22	83,22	KECAMATAN CARINGIN
28	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	81,92	75,00	82,17	82,17	KECAMATAN CIJERUK
29	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	76,98	75,00	80,62	80,62	KECAMATAN CIOMAS
30	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	80,11	75,00	84,00	84,00	KECAMATAN DRAMAGA
31	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	78,47	75,00	80,52	80,52	KECAMATAN TAMAN SARI
32	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	77,96	75,00	83,00	83,00	KECAMATAN KLAPANUNGGAL
33	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	82,74	75,00	90,00	90,00	KECAMATAN CISEENG
34	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	80,74	75,00	82,31	82,31	KECAMATAN RANCABUNGUR
35	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	75,77	75,00	78,46	78,46	KECAMATAN SUKAJAYA
36	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	82,58	75,00	86,40	86,40	KECAMATAN TANJUNGSARI
37	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	78,71	75,00	82,03	82,03	KECAMATAN TAJURHALANG

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH)	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018)	2019		2020		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	82,50	75,00	83,00	83,00	KECAMATAN CIGOMBONG
39	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	82,47	75,00	82,97	82,97	KECAMATAN LEUWISADENG
40	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	%	N/A	72,00	80,37	75,00	78,56	78,56	KECAMATAN TENJOLAYA
DD	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								
1	Cakupan pembinaan kualitas kehidupan sosial	%	0,4373	0,4878	0,4930	0,5384	0,5182	0,5182	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tabel 8.9 b
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact
Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD PENGAMPU
			2021	2022	2023		
1	2	3	5	6	7	8	9
I	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						
1	**Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar**	**%**	**86,64**	**87,68**	**88,72**	**88,72**	**DINAS PENDIDIKAN**
a	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartispasi dalam Pendidikan Dasar	%	96,13	97,20	98,28	98,28	DINAS PENDIDIKAN
b	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	%	74,69	75,80	76,92	76,92	DINAS PENDIDIKAN
c	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	%	41,03	43,53	46,15	46,15	DINAS PENDIDIKAN
d	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartispasi dalam Pendidikan Kesetaraan	%	5,18	5,23	5,29	5,29	DINAS PENDIDIKAN
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						
1	**Indeks Keluarga Sehat**	**Poin**	**0,52**	**0,68**	**0,84**	**0,84**	**DINAS KESEHATAN**
a	Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat	%	68,00	70,00	72,00	72,00	DINAS KESEHATAN
b	Tingkat layanan rumah sakit	%	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS KESEHATAN
c	Cakupan Jaminan Kesehatan	%	80,00	83,00	86,00	86,00	DINAS KESEHATAN

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD PENGAMPU
			2021	2022	2023		
C	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						
1	**Persentase kualitas dan cakupan infrastruktur pekerjaan umum**	**%**	**61,44**	**63,51**	**65,72**	**65,72**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
a	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	82,22	82,32	82,42	82,42	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
b	Persentase daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	%	70,00	72,00	74,00	74,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
c	Persentase cakupan pelayanan infrastruktur sumber daya air	%	22,5	27	31,5	31,5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
d	Persentase cakupan pelayanan air minum dan air limbah	%	71,03	72,73	74,96	74,96	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
D	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						
1	**Persentase permukiman layak**	**%**	**99,72**	**99,86**	**100,00**	**100,00**	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**
a	Persentase penyediaan rumah layak huni	%	18,42	27,09	35,84	35,84	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
b	Persentase luas permukiman kumuh	%	0,13	0,07	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
c	Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD PENGAMPU
			2021	2022	2023		
E	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						
1	**Tingkat Penyelesaian Gangguan Trantibum**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
a	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	**Indeks Ketahanan Daerah**	**Poin**	**0,50**	**0,55**	**0,60**	**0,60**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
a	Persentase mitigasi yang dilaksanakan	%	35,00	40,00	45,00	45,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
b	persentase jumlah korban yang selamat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
c	Persentase Rekomendasi Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3	***Response Time* pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**	**Menit**	**15**	**15**	**15**	**15**	**DINAS PEMADAM KEBAKARAN**
a	Persentase pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
F	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						
1	**Persentase PPKS yang ditangani**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**DINAS SOSIAL**
a	Persentase PSKS yang Berkualitas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS SOSIAL
b	persentase layanan SLRT dan puskesos desa	%					
c	Persentase masyarakat miskin yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS SOSIAL
d	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapat penanganan PPKS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS SOSIAL
e	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan PPKS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS SOSIAL

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD PENGAMPU
			2021	2022	2023		
II	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						
1	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**	**%**	**0,41**	**0,43**	**0,45**	**0,45**	**DINAS TENAGA KERJA**
a	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	20,73	20,85	21,98	21,98	DINAS TENAGA KERJA
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						
1	**Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	**%**	**7,82**	**7,28**	**6,81**	**6,81**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
a	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	27,85	27,90	27,95	27,95	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
b	Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	**%**	72,50	85,00	100,00	100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD PENGAMPU
			2021	2022	2023		
C	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						
1	**Tingkat Kecukupan Energi per kapita**	**%**	**102,80**	**102,20**	**101,60**	**101,60**	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
a	Ketersediaan Energi per kapita	%	104,20	104,50	104,80	104,80	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	**Tingkat kecukupan protein per kapita**	**%**	**109,60**	**109,90**	**110,20**	**110,20**	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
a	Ketersediaan Protein per kapita	%	128,25	128,55	128,85	128,85	DINAS KETAHANAN PANGAN
D	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						
a	Tingkat pelayanan unsur pertanahan	%	54,02	77,01	100,00	100,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
E	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						
1	**Persentase peningkatan IKLH**	**%**	**0,18**	**0,18**	**0,18**	**6,88**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
a	Indeks Kualitas Air	poin	48,47	48,57	48,67	48,67	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
b	Indeks Kualitas Udara	poin	71,89	71,99	72,09	72,09	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
c	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	poin	39,75	39,85	39,95	39,95	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
d	Persentase Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Sampah	%	7,81	8,04	11,13	27,50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
F	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						
1	**Persentase kepemilikan dokumen kependudukan**	**%**	**68,39**	**73,11**	**79,45**	**79,45**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
a	Perekaman KTP elektronik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
b	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	20,00	30,00	45,00	45,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD PENGAMPU
			2021	2022	2023		
c	Kepemilikan akta kelahiran	%	85,18	89,33	93,36	93,36	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
d	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	27,78	41,67	55,56	55,56	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
G	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						
1	**Persentase peningkatan status desa mandiri**	**%**	**11,28**	**14,29**	**17,07**	**17,07**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
a	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
b	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
c	Persentase desa yang terfasilitasi melakukan kerjasama	%	2,40	4,81	7,21	7,21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
H	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						
1	**Rata-rata jumlah anak per keluarga**	**poin**	**2,44**	**2,42**	**2,40**	**2,40**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
a	Persentase pemakaian kontrasepsi KB/ *Contraception Prevelance Rate* (CPR)	%	70,75	70,82	70,88	70,88	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD PENGAMPU
			2021	2022	2023		
I	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						
1	**Persentase capaian kinerja jaringan jalan**	**%**	**33,00**	**67,00**	**100,00**	**100,00**	**DINAS PERHUBUNGAN**
a	Tingkat Ketersediaan Sarana dan prasarana	%	53,00	60,00	66,00	66,00	DINAS PERHUBUNGAN
J	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						
1	**Indeks Keterbukaan Informasi Publik**	**Persen**	**70,00**	**70,50**	**71,00**	**71,00**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
a	Persentase Diseminasi Informasi melalui Media	Persen	91,67	91,67	100,00	100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**Indeks SPBE**	**Poin**	**3,27**	**3,50**	**3,60**	**3,60**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
a	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persen	88,89	88,89	100,00	100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
K	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						
1	**Persentase Koperasi Aktif**	**%**	**35,74**	**36,03**	**36,32**	**36,32**	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**
a	Jumlah usaha koperasi yang melaksanakan RAT	Unit	174,00	180,00	185,00	185,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
b	Persentase KSP/USP Koperasi sehat	%	9,84	10,57	11,29	11,29	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2	**Laju Omset Usaha Mikro**	**%**	**9,09**	**10,00**	**10,61**	**10,61**	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**
a	Rata-rata Omset Usaha Mikro	Rp	60.000.000,00	66.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD PENGAMPU
			2021	2022	2023		
L	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						
1	**Persentase peningkatan investasi di Kabupaten**	**%**	**1,10**	**1,60**	**2,60**	**2,60**	**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
a	Jumlah nilai investasi PMA dan PMDN	Triliun Rp	9,20	9,35	9,60	385,15	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan**	**Poin**	**76,70**	**76,80**	**77**	**77**	**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
a	Presentase jumlah jenis perizinan yang telah didelegasikan ke DPMPTSP	%	100	100	100	100	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
M	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						
1	**Tingkat Partisipasi Pemuda**	**%**	**5,44**	**5,46**	**5,49**	**5,49**	**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**
a	Persentase organisasi pemuda aktif	%	17,44	23,26	29,07	29,07	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**Raihan Prestasi Olahraga**	**Prestasi**	**77**	**914**	**1.011**	**1.011**	**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**
a	Prestasi Atlet	%	4,74	25,03	35,18	35,18	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
N	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						
a	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD PENGAMPU
			2021	2022	2023		
O	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						
a	Indeks KAMI	Skor	300	400	456	456	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Level	II	II+	III	III	
P	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						
1	**Jumlah Kebudayaan yang dilestarikan**	**Kebudayaan**	**122**	**124**	**126**	**126**	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
a	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan (Festival Budaya + Karya Budaya)	Objek	54	56	58	58	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
b	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	68	70	72	72	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
Q	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						
1	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**	**poin**	**15,30**	**18,46**	**19,00**	**19,00**	**DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN**
a	Persentase pengunjung perpustakaan	%	1,86	1,89	1,93	1,93	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
R	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						
1	**Persentase digitalisasi arsip**	**%**	**54,47**	**59,39**	**64,72**	**64,72**	**DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN**
a	Persentase arsip vital yang dialihmediakan	%	29,33	65,14	100,00	100,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD PENGAMPU
			2021	2022	2023		
III	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						
1	**Total Produksi Perikanan**	**Ton**	**143.439**	**145.201,5**	**147.159**	**147.159**	**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**
a	Jumlah Benih Ikan Konsumsi	RE	5.770.238	5.827.940	5.886.220	5.886.220	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						
1	**Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB**	**%**	**4,98**	**5,03**	**5,08**	**5,08**	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
a	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Wisatawan	5.000.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
C	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						
1	**Produksi pertanian lokal yang berdaya saing**	**Ton**	**738.076**	**739.401**	**740.728**	**740.728**	**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**
a	Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Ton/Ha	6,95	6,96	6,97	6,97	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
b	Persentase SDM pertanian yang meningkat kompetensinya	%	1,51	1,62	1,73	1,73	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2	**Total Produksi Peternakan**	**Ton**	**368.609**	**380.945**	**393.830**	**393.830**	**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**
c	Jumlah Populasi Ternak	ekor	38.270.763	39.213.020	40.181.541	40.181.541	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD PENGAMPU
			2021	2022	2023		
D	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						
1	**Nilai Tambah Bruto (NTB) Perdagangan**	**Rp. (Juta)**	**30.156.631**	**30.458.197**	**30.458.197**	**30.458.197**	**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
a	Nilai ekspor	%	1,00	1,00	1,00	1,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
b	Cakupan wilayah tertib ukur	%	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
E	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						
1	**Nilai Tambah Bruto (NTB) Perindustrian**	**Rp. (Juta)**	**129.968.449**	**131.268.133**	**131.268.133**	**131.268.133**	**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**
a	Persentase pembangunan sentra industri yang sesuai dengan ketentuan	%	40,00	60,00	100,00	100,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
F	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						
a	Kebijakan transmigrasi pemerintah pusat yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS TENAGA KERJA
IV	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
A	**SEKRETARIAT DAERAH**						
1	**Perangkat daerah yang memiliki nilai AKIP minimal baik**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**SEKRETARIAT DAERAH**
a	Perangkat daerah yang memiliki nilai minimal IKM Kategori Baik	%	87,50	88,89	90,28	90,28	SEKRETARIAT DAERAH
b	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Poin	3,45	3,50	3,55	3,55	SEKRETARIAT DAERAH
c	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tepat waktu	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	SEKRETARIAT DAERAH

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD PENGAMPU
			2021	2022	2023		
B	**SEKRETARIAT DPRD**						
1	**Cakupan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**SEKRETARIAT DPRD**
a	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD selesai tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	SEKRETARIAT DPRD
V	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						
A	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN**						
1	**Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan provinsi dan nasional**	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
a	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
b	Persentase Rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan dalam kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diakomodir	%	100,00	100,00	100,00	100,00	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
c	Jumlah inovasi yang dihasilkan Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kabupaten Bogor	Inovasi	166	199	239	604	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD PENGAMPU
			2021	2022	2023		
B	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN**						
1	**Tingkat pemenuhan kriteria WTP**	**Kriteria**	**4**	**4**	**4**	**4**	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
a	Ketepatan Penetapan APBD	Tepat/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
b	Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
c	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1	**Rasio PAD**	**%**	**34,57**	**44,25**	**47,21**	**47,21**	**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**
a	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	36,50	49,67	47,37	47,37	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
b	Persentase Pajak Daerah tehadap Pendapatan Asli Daerah	%	66,26	69,67	69,59	69,59	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
C	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN DAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						
1	**Indeks Profesionalitas ASN**	**Poin**	**61**	**64**	**71**	**71**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**
a	Indeks Sistem Merit	Poin	216,50	271,00	323,50	323,50	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD PENGAMPU
			2021	2022	2023		
VI	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						
1	**Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP)**	Level	**3**	**3**	**3**	**3**	**INSPEKTORAT DAERAH**
a	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Instern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	INSPEKTORAT DAERAH
b	Level Maturitas Resiko	Level	1	1	2	2	INSPEKTORAT DAERAH
VII	**UNSUR KEWILAYAHAN**						
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN CIBINONG**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CIBINONG
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CIBINONG
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN GUNUNG PUTRI**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN GUNUNG PUTRI
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN GUNUNG PUTRI
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN CITEUREUP**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CITEUREUP
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CITEUREUP

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD PENGAMPU
			2021	2022	2023		
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN SUKARAJA**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN SUKARAJA
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN SUKARAJA
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN BABAKANMADANG**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BABAKANMADANG
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BABAKANMADANG
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN JONGGOL**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN JONGGOL
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN JONGGOL
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN CILEUNGSI**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CILEUNGSI
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CILEUNGSI
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN CARIU**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CARIU

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD PENGAMPU
			2021	2022	2023		
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CARIU
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN SUKAMAKMUR**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN SUKAMAKMUR
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN SUKAMAKMUR
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN PARUNG**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN PARUNG
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN PARUNG
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN GUNUNGSINDUR**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN GUNUNGSINDUR
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN GUNUNGSINDUR
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN KEMANG**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN KEMANG
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN KEMANG

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD PENGAMPU
			2021	2022	2023		
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN BOJONGGEDE**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BOJONGGEDE
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BOJONGGEDE
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN LEUWILIANG**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN LEUWILIANG
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN LEUWILIANG
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN CIAMPEA**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CIAMPEA
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CIAMPEA
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN CIBUNGBULANG**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CIBUNGBULANG
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CIBUNGBULANG
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN PAMIJAHAN**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN PAMIJAHAN

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD PENGAMPU
			2021	2022	2023		
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN PAMIJAHAN
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN RUMPIN**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN RUMPIN
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN RUMPIN
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN JASINGA**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN JASINGA
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN JASINGA
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN PARUNGPANJANG**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN PARUNGPANJANG
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN PARUNGPANJANG
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN NANGGUNG**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN NANGGUNG
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN NANGGUNG

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD PENGAMPU
			2021	2022	2023		
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN CIGUDEG**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CIGUDEG
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CIGUDEG
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN TENJO**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN TENJO
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN TENJO
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN CIAWI**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CIAWI
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CIAWI
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN CISARUA**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CISARUA
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CISARUA
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN MEGAMENDUNG**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN MEGAMENDUNG

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD PENGAMPU
			2021	2022	2023		
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN MEGAMENDUNG
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN CARINGIN**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CARINGIN
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CARINGIN
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN CIJERUK**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CIJERUK
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CIJERUK
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN CIOMAS**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CIOMAS
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CIOMAS
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN DRAMAGA**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN DRAMAGA
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN DRAMAGA

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD PENGAMPU
			2021	2022	2023		
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN TAMAN SARI**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN TAMAN SARI
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN TAMAN SARI
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN KLAPANUNGGAL**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN KLAPANUNGGAL
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN KLAPANUNGGAL
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN CISEENG**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CISEENG
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CISEENG
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN RANCABUNGUR**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN RANCABUNGUR
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN RANCABUNGUR
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN SUKAJAYA**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN SUKAJAYA

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD PENGAMPU
			2021	2022	2023		
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN SUKAJAYA
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN TANJUNGSARI**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN TANJUNGSARI
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN TANJUNGSARI
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN TAJURHALANG**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN TAJURHALANG
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN TAJURHALANG
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN CIGOMBONG**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CIGOMBONG
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN CIGOMBONG
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN LEUWISADENG**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN LEUWISADENG
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN LEUWISADENG

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PD PENGAMPU
			2021	2022	2023		
1	**Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)**	**Poin**	**69,00**	**72,00**	**75,00**	**75,00**	**KECAMATAN TENJOLAYA**
a	Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN TENJOLAYA
b	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN TENJOLAYA
VIII	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						
A	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						
1	**Cakupan pembinaan kualitas kehidupan sosial**	**%**	**0,65**	**0,85**	**1,12**	**1,12**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
a	Potensi Konflik Sosial yang teratasi di Kabupaten Bogor	Kasus	3	4	5	5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB IX

PENUTUP

Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 disusun sebagai tindak lanjut dari adanya perubahan-perubahan kebijakan nasional serta dampak perubahan mendasar akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Sebagai dokumen yang diacu dalam pencapaian target kinerja daerah, Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 memiliki peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan daerah yang tertuang dalam program-program pembangunan daerah, baik dalam bentuk program strategis/program prioritas pembangunan daerah maupun program pembangunan seluruh perangkat daerah hingga akhir tahun 2023 mendatang.

Dengan demikian, dokumen ini penting untuk dipedomani bersama oleh seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menyinergikan seluruh target-target lintas sektoral yang bermuara pada terwujudnya ***Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban***. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian seluruh indikator dan target daerah sangat ditentukan oleh tingkat ketaatan terhadap program-program yang telah ditentukan.

Untuk itu, merujuk pada tujuan penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 ini, kaidah yang perlu dipedomani bersama adalah :

1. Seluruh Perangkat Daerah menjadikan dokumen ini sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.
2. pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai dengan akhir periode RPJMD.
3. Dalam hal terdapat kekosongan pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 dan RKPD Tahun 2025, penyusunan program RKPD mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Demikian dokumen ini disusun untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab. Semoga bermanfaat.

BUPATI BOGOR,

ADE YASIN

TABEL CASCADING DINAS PENDIDIKAN DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan masyarakat yang berkualitas	Terwujudnya masyarakat Bogor cerdas	Indeks Pendidikan	$= \frac{Indeks\ HLS + Indeks\ RLS}{2}$	Meningkatnya pelayanan pendidikan yang berkualitas	RLS (Rata-rata Lama Sekolah)	Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dimana diasumsikan seseorang yang telah berumur 25 tahun, maka proses pendidikannya telah berakhir.	Peningkatan pengelolaan pendidikan	Membangun, merehabilitasi dan merevitalisasi sekolah	**Program Pengelolaan Pendidikan**	Peningkatan mutu dan kualitas pengelolaan pendidikan	Angka kelulusan jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat	$= \frac{jumlah\ siswa\ jenjang\ DIKDAS\ dan\ DIKMAS\ yang\ lulus}{jumlah\ siswa\ tingkat\ akhir\ DIKDAS\ dan\ DIKMAS} x\ 100$
					HLS (Harapan Lama Sekolah)	Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 7 tahun ke atas karena adanya kebijakan program wajib belajar untuk usia tersebut. Batas nilai harapan lama sekolah adalah minimum 0 dan maksimum 18 tahun.		Menuntaskan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP			Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	$= \frac{Jumlah\ siswa\ PAUD\ PNF, TK\ dan\ RA}{Jumlah\ penduduk\ usia\ 5-6\ tahun} x\ 100\%$
								Memberikan penunjang pendidikan melalui penerbitan dan pemanfaatan Kartu Bodas untuk siswa SD dan SMP			Persentase sekolah jenjang SD yang terakreditasi minimal B	$= \frac{jumlah\ sekolah\ jenjang\ SD\ terakreditasi\ minimal\ B}{jumlah\ Sekolah\ jenjang\ SD} x\ 100\%$
								Meningkatkan layanan pendidikan multi metode berbasis kompetensi			Persentase sekolah jenjang SMP yang terakreditasi minimal B	$= \frac{jumlah\ sekolah\ jenjang\ SMP\ terakreditasi\ minimal\ B}{jumlah\ sekolah\ jenjang\ SMP} x\ 100\%$
								Meningkatkan cakupan sekolah terakreditasi A dan B				
								Meningkatkan pelayanan PKBM bagi pesantren salafiyah				
								Mengembangkan sekolah inklusif di setiap kecamatan				
								Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Bantuan Sekolah dan Guru Madrasah				
								Menambahkan 4 (empat) Jam Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan				
							Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatkan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	Terpenuhinya jumlah Pendidik Satuan Pendidikan Dasar	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	$= \frac{\text{Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs)}}{\text{Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs)}} x\ 10000$

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
								Meningkatkan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan				
Mewujudkan kesalehan sosial	Terwujudnya masyarakat Bogor berkeadaban	Indeks Kebahagiaan		Pelestarian Kebudayaan	Persentase Kebudayaan yang dilestarikan	Jumlah Kebudayaan yang dilestarikan (Festival Budaya + BCB + Kesenian tradisional) / Jumlah Kebudayaan yang terdata x 100%	Perlindungan dan pembinaan seni dan budaya daerah	Melestarikan Bahasa Sunda melalui Kemis Nyunda	**Program Pengembangan Bahasa dan Sastra**	Terwujudnya wawasan pendidik dan peserta didik terhadap Bahasa dan Sastra	Presentase Sekolah Pendidikan Dasar yang Melaksanakan Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	$= \frac{jumlah\ Sekolah\ Pendidikan\ Dasar\ yang\ melaksanakan\ Program\ Bahasa\ \&\ Sastra}{Jumlah\ Sekolah\ Pendidikan\ Dasar} x\ 100\%$
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	

TABEL CASCADING DINAS KESEHATAN DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan masyarakat yang berkualitas	Terwujudnya masyarakat Bogor sehat	Indeks Kesehatan		Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Harapan Hidup		Peningkatan upaya kesehatan masyarakat	Menyediakan alat kesehatan, vaksinasi dan peningkatan pelayanan dalam rangka penanggulangan Covid-19	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi	Jumlah fasilitas yang direalisasikan/ jumlah fasilitas yang direncanakan x 100%
								Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan		Meningkatnya pengelolaan layanan kesehatan	Persentase pemanfaatan layanan kesehatan	Jumlah kunjungan/ ju mlah penduduk x 100%
								Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pencegahan, pengendalian dan penanganan permasalahan kesehatan				
								Meningkatkan kapasitas tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam upaya peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan				
								Memberikan kartu sehat (pembayaran JKN miskin)	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	Meningkatnya pengelolaan layanan kesehatan	Persentase pemanfaatan layanan kesehatan	Jumlah kunjungan/ ju mlah penduduk x 100%

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
								Memberikan pelayanan Bogor Siaga				
								Membangun Rumah Sakit Parung				
				Meningkatkan ketahanan pangan daerah			Peningkatan ketersediaan dan diversifikasi konsumsi pangan yang aman	Menggalakkan Gerakan Bogor Bebas Stunting				
									Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase jumlah SDM kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan/ Jumlah SDM kesehatan x 100%
									Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Tersedianya farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase fasyankes kefarmasian yang memenuhi persyaratan standar	Jumlah fasyankes kefarmasian yang memenuhi persyaratan standar/ Total fasyankes kefarmasian x 100%
									Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase kelompok potensial yang berperan serta dalam bidang kesehatan	Jumlah kelompok potensial yang berperan serta dalam bidang kesehatan/ Jumlah kelompok potensial yang ada x 100%

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	

TABEL CASCADING PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi		Meningkatnya Daya Saing Daerah	PDRB atas Dasar Harga Berlaku		Peningkatan Produk Daerah yang Berdaya Saing Berkelanjutan	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pertanian	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	meningkatnya luas daerah irigasi yang ditangani	persentase luas daerah irigasi yang ditangani	Luas irigasi kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan dipelihara (ha) / Luas daerah irigasi kewenangan kab/kota x 100%
Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan	Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan	Indeks ketimpangan wilayah (williamson)		Meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	Indeks Konektivitas Infrastruktur	Persentase Kondisi Jalan Mantap/ Persentase Kinerja Jaringan Jalan	Peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi berkualitas	Membangun, merekonstruksi, melebarkan, merehabilitasi dan memelihara jalan	**Program Penyelenggaraan Jalan**	meningkatnya jumlah panjang jalan yang ditangani	Persentase panjang jalan kabupaten yang ditangani	Jumlah panjang jalan kabupaten yang ditangani/panjang jalan kabupaten x 100%
								Menata jalur pedestrian pada ruas jalan Kandang Roda-Sentul, Tegar beriman dan kawasan GOR Pakansari				
								Membangun jalan Poros Tengah Timur				
								Membangun jalan Bojonggede-Kemang				
								Membangun jalan lingkar Kebun Raya Cibinong				
								Membuka akses lingkar jalan tambang				
								Membangun jalan lingkar Gunungsindur				
								Membangun Jalan Galuga-Rancabungur				

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
								Membangun jalan lingkar Dramaga 2				
								Menata kawasan simpang Parung				
									Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Operator/Teknisi/ Analis/yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	jumlah tenaga operator/ teknis/analisis/ya ng memiliki sertifikat kompetensi tahunan / rata-rata jumlah proyek PU pertahun (600) x 100%
				Meningkatnya kualitas permukiman	Persentase kawasan permukiman layak		Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Menata kawasan permukiman kumuh	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**	meningkatnya luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota (ha) -----x100% luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kab/kota (ha)
								Meningkatkan cakupan layanan air minum	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	Meningkatnya Cakupan Akses Pelayanan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten x 100%

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
								Meningkatkan cakupan layanan air limbah	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	Meningkatnya Cakupan Akses Pelayanan Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ---------- x 100 % Jumlah rumah di Kabupaten A
									Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terwujudnya Ketaatan tertib administrasi penataan ruang	Persentase pengawasan pemanfaatan ruang	jumlah objek pengawasan yang sudah ditindaklanjuti dibagi jumlah objek yang dilakukan pengawasan x 100%
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	

TABEL CASCADING DINAS PERUMAHAN, KAWASAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : **Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju,Nyaman dan Berkeadaban**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Optimalisasi pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	Tefasilitasinya sengketa tanah	persentase bidang tanah sengketa yang terfasilitasi	Jumlah bidang tanah sengketa yang terfasilitasi/target bidang tanah sengketa yang terfasilitasi x 100
									Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Terlaksananya redistribusi lahan kosong	Persentase Lahan Kosong yang Diredistribusi	Jumlah lahan kosong yang diredistribusi/Jumlah target lahan kosong yang akan diredistribusi sd tahun 2023
									Program Pengelolaan Tanah Kosong	Teridentifikasinya tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Teridentifikasi	Jumlah lahan kosong yang diidentifikasi/Jumlah target lahan kosong yang akan diidentifikasi sd tahun 2023
									Program Penatagunaan Tanah	Terlaksananya penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah bidang tanah Aset Pemda yang diproses pendaftaran hak pakainya/Jumlah target bidang tanah Aset Pemda yang diproses pendaftaran hak pakainya sd 2023
Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan	Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan	Indeks ketimpangan wilayah williamson		Meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	Indeks Konektivitas Infrastruktur		Peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi berkualitas	Merevitalisasi jembatan rawayan /jembatan gantung	**Program Pengembangan Permukiman**	Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur permukiman	Persentase infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara	Jumlah infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara / Target infrastruktur yang terbangun dan terpelihara sd 2023 x 100

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
				Meningkatnya kualitas permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Layak		Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Menyediakan rumah layak huni	**Program Kawasan Permukiman**	Terehabilitasinya rumah tidak layak huni	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Telah Direhabilitasi	Jumlah rumah tidak layak huni yang terehabilitasi/Jumlah rumah tidak layak huni x 100
								Meningkatkan kualitas desa melalui Bedah Kampung	**Program Kawasan Permukiman**	Tertatanya kawasan permukiman kumuh	Persentase Luas Kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani / Luas kawasan permukiman kumuh yang ditetapkan x 100
								Menata kawasan permukiman kumuh	**Program Kawasan Permukiman**	Tertatanya kawasan permukiman kumuh	Persentase Luas Kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani / Luas kawasan permukiman kumuh yang ditetapkan x 100
									Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya PSU perumahan yang menjadi aset Pemda	Persentase PSU perumahan yang telah menjadi aset Pemda	Jumlah PSU perumahan yang telah serah terima fisik dari pengembang ke Pemda/jumlah PSU perumahan yang telah serah terima administrasi dari pengembang ke Pemkab Bogor x 100
								Menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	Tertatanya bangunan dan lingkungan	Persentase bangunan dan lingkungan yang dikendalikan dan ditata	(Jumlah bangunan yang dikendalikan + jumlah jalur yang ditata)/(target bangunan yang dikendalikan+ target jalur yang ditata) x 100

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
									Program Penataan Bangunan Gedung	Terbangunnya gedung	Persentase bangunan gedung yang tertata	Jumlah Bangunan Gedung yang ditata /target bangunan gedung yang ditata pada tahun n x 100
								Menyediakan ruang terbuka publik	**Program Pengembangan Permukiman**	Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur permukiman	Persentase infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara	Jumlah infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara / Target infrastruktur yang terbangun dan terpelihara sd 2023 x 100
				Mengurangi risiko bencana	Indeks Risiko Bencana		Peningkatan penanggulangan bencana	Meningkatkan layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	**Program Pengembangan Perumahan**	Tersedianya rumah layak huni di lokasi bencana	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni di Lokasi Bencana	(Jumlah hunian tetap yang terbangun + Jumlah rumah yang direhabilitasi) / Jumlah hunian yang terdampak bencana x 100
Mewujudkan Kesalehan Sosial	Terwujudnya Masyarakat Bogor Berkeadaban	Indeks Kebahagian		Kehidupan Masyarakat Agamis, Harmonis, Nyaman, Tertib, dan Tidak Diskriminatif	Indeks Kerukunan Hidup Beragama		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Revitalisasi Islamic Center	**Program Penataan Bangunan Gedung**	Terbangunnya gedung	Persentase bangunan gedung yang tertata	Jumlah Bangunan Gedung yang ditata /target bangunan gedung yang ditata pada tahun n x 100
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	

TABEL CASCADING SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan Kesalehan sosial	Terwujudnya masyarakat Bogor berkeadaban	Indeks Kebahagiaan		Kehidupan masyarakat agamis, harmonis, nyaman, tertib dan tidak diskriminatif	Tingkat Kepatuhan Perda dan Perkada Ketertiban Umum	Jumlah Perda dan Perkada Tibum yang dipatuhi / Jumlah Perda dan Perkada Tibum yang memuat sanksi x 100%	Pengendalian ketentraman dan ketertiban umum	Menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	**Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	=(Jumlah pengaduan yang ditangani / Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk) x 100%
								Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Persentase Pemberdayaan Linmas	=(Jumlah anggota linmas yang memperoleh pembinaan tahun ke n + akumulasi tahun n - 1 / Jumlah keseluruhan anggota linmas) x 100%
								Menggalakkan aksi Nobat "Nongol Babat"				
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	

TABEL CASCADING BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju , Nyaman dan Berkeadaban

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan	Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan	Indeks ketimpangan wilayah williamson	$I_w = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 (\frac{f_i}{n})}}{\bar{y}}$ I_w = Nilai indeks Williamson y_i = PDRB per kapita Kecamatan-i $\bar{y}$ = PDRB per kapita Kabupaten f_i = Jumlah penduduk kecamatan-i n = Jumlah penduduk kabupaten i = 1,2,3 . . . .,x	Mengurangi Risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	$R_{isk} = H_{azard} \frac{V_{ulnerability}}{C_{apacity}}$	Peningkatan Penanggulangan Bencana	Meningkatkan pelayanan kedaruratan bencana	**Program Penanggulangan Bencana**	Cakupan layanan informasi di daerah rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	jumlah warga yang mendapat sosialisasi komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana (/) Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai bencana dikali 100%
								Meningkatkan Layanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jumlah warga yang mendapat layanan dan evakuasi (/) total korban bencana tahun berjalan dikali 100%
							Peningkatan mitigasi bencana	Meningkatkan kewaspadaan dini bencana		Cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Jumlah kelompok masyarakat yang memahami pengurangan risiko bencana	jumlah kelompok masyarakat yang memahami pengurangan risiko bencana (/) jumlah desa rawan bencana di Kabupaten Bogor
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota**	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi	

TABEL CASCADING DINAS PEMADAM KEBAKARAN DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju , Nyaman dan Berkeadaban

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan	Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan	Indeks ketimpangan (wilayah williamson)	$I_W = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 (\frac{f_i}{n})}}{\bar{y}}$ I_w = Nilai indeks Williamson y_i = PDRB per kapita Kecamatan-i $\bar{y}$ = PDRB per kapita Kabupaten f_i = Jumlah penduduk kecamatan-i n = Jumlah penduduk kabupaten i = 1,2,3 . . . .,x	Mengurangi risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	$R_{isk} = H_{azard} \frac{V_{ulnerability}}{C_{apacity}}$	Peningkatan Penanggulangan Bencana	Meningkatkan cakupan pelayanan kebakaran dan Non Kebakaran	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah ---------- Jumlah kejadian kebakaran di Kab/Kota pada Tahun X di Kali 100%
											Layanan Pemadaman yang Dilakukan oleh Relawan Kebakaran (Rekar, Satlakar, dan atau Komunitas Masyarakat Lainnya)	Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) Oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ---------- Jumlah kejadian kebakaran di Kab/Kota pada Tahun X dikali 100%
											Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran)	Jumlah dan Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota dalam tahun X
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota**	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi	

TABEL CASCADING DINAS SOSIAL DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju , Nyaman dan Berkeadaban

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan		Peningkatan pemberdayaan sosial masyarakat	***Membangun Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam Penanganan PPKS (Graha Pancakarsa)***	**Program Pemberdayaan Sosial**	Terwujudnya PSKS yang terlatih dan Aktif dalam Penanganan PPKS	Persentase PSKS yang Terlatih dan Aktif dalam Penanganan PPKS	Jumlah PSKS yang diberi pelatihan (254 Orang)/ Jumlah target PSKS yang diberi pelatihan dalam satu tahun anggaran (254 Orang) x 100%
							Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial serta pemberian perlindungan dan jaminan sosial	Meningkatkan fasilitasi bagi masyarakat beresiko sosial	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	Tertanganinya Maasyarakat Miskin	Persentase Masyarakat Miskin yang Tertangani	Jumlah masyarakat miskin yang tertangani (70 Orang)/ jumlah target masyarakat miskin yang ditangani dalam satu tahun anggaran (70 Orang) x 100%
									Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Tertanganinya Warga Negara Migran	Persentase Warga Negara Migran yang Ditangani	Jumlah target warga negara migran yang perlu ditangani (10 Orang) / jumlah warga negara migran yang ditangani (10 Orang) x 100%

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
									Program Rehabilitasi Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)	Jumlah target penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yang perlu dipenuhi kebutuhan dasarnya (1.303 Orang)/ jumlah penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yang dipenuhi kebutuhan dasarnya (1.303 Orang) x 100%
									Program Penanganan Bencana	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota	Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (1.124 Orang)/ jumlah target korban bencana dalam satu tahun anggaran (1.124 Orang) x 100 %
		Indeks Reformasi Birokrasi		Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Optimalisasi Pengelolaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	Terkelolanya taman makam pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Berkondisi Baik	Jumlah target taman makam pahlawan (7 Taman Makam Pahlawan) / jumlah taman makam pahlawan yang dikelola (7 Taman Makam Pahlawan) x 100%
								Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	

TABEL CASCADING DINAS TENAGA KERJA DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	PDRB Perkapita		Strategi Peningkatan kapasitas dan peluang ketenagakerjaan	Meningkatkan kapasitas dan peluang kerja	**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	Terwujudnya tata kelola tenaga kerja sesuai perencanaan	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD / Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/ kota x 100
					Tingkat Kemiskinan			Membangun Career Center	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	Terpenuhinya pencari kerja terdaftar yang Bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang Bekerja	(Jumlah pencari kerja terdaftar yang bekerja dibagi jumlah pencari kerja terdaftar) x100%
					Tingkat pengangguran terbuka			Membangun Lembaga Sertifikasi Profesi Ketenagakerjaan (LSP)	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	Meningkatnya cakupan Tenaga Kerja Bersertifikat	Persentase Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah peserta yang mendapatkan sertifikat kompetensi / Jumlah peserta pelatihan berdasarkan klaster kompetensi x 100
											Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) / Jumlah tenaga kerja x 100
									Program Hubungan Industrial	Diterapkannya Tata Kelola Kerja yang Layak bagi perusahaan (PP/ PKR, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/ PKR, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / Jumlah Perusahaan x 100

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
									Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Transmigran ditempatkan sesuai kebijakan pemerintah pusat	Terfasilitasinya Peserta Transmigrasi yang Ditempatkan	Jumlah peserta yang ditempatkan / Jumlah total kuota transmigrasi x 100 (Jika tidak ada kuota, capaian 100%)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota**	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi	

TABEL CASCADING DINAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan masyarakat yang berkualitas	Terwujudnya masyarakat Bogor sehat	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		Menurunnya Tingkat Pertumbuhan Penduduk Alami	Crude Birth Rate (CBR)		Pengendalian pertumbuhan penduduk Alami	Meningkatkan Kepesertaan KB	**Program Pengendalian Penduduk**	Terwujudnya Sinergi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan kebijakan Provinsi Jawa Barat	Persentase Kebijakan yang disinergikan	Jumlah Kebijakan yang disusun tahun ke-n/target kebijakan yang disinergikan dengan provinsi sampai akhir periode x 100%
									Program Pembinaan Keluarga Berencana	Menurunnya Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ber KB	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	Jumlah PUS yang tidak ber-KB / Jumlah PUS X 100 %
									Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Meningkatnya kepesertaan KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) Anggota Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pasangan Usia Subur Anggota Kelompok Ketahanan dan Keluarga sejahtera yang Ber-KB	Jumlah PUS Anggota Kelompok Ketahanan dan keluarga sejahtera yang ber-KB / Jumlah PUS Anggota Kelompok Ketahanan Keluarga X 100 %
										Tingkat Pemberdayaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga dalam Pendewasaan Usia Perkawinan	Persentase Terbentuknya kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	Jumlah Kelompok PIK Remaja yang terbentuk di Kecamatan/ Jumlah kecamatan X 100 %
Mewujudkan Kesalehan Sosial	Terwujudnya Masyarakat Bogor Berkeadaban	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Meningkatnya Peranan Wanita dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Peningkatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan kompetensi perempuan dan pemenuhan hak anak	**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan melalui PUG	Persentase Anggaran Responsif gender (ARG) pada Belanja Daerah	Jumlah ARG pada Belanja Daerah/ Jumlah total Belanja Daerah x 100 %

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
									Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya jumlah Perempuan yang mengalami tindak kekerasan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan / Jumlah penduduk perempuan x 100.000
									Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Terwujudnya kesetaraan gender	Tingkat pemenuhan ekonomi keluarga yang dikontribusi oleh perempuan	Jumlah perempuan kepala keluarga yang bekerja / jumlah kepala keluarga X 100%
									Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tersajinya informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak	Jumlah pihak yang memanfaatkan data tahun berkenaan / jumlah target pihak yang memanfaatkan data hingga akhir periode X 100%
									Program Pemenuhan Hak Anak	optimalnya peran lembaga pemenuhan hak anak	Tingkat partisipasi lembaga pemenuhan hak anak	Jumlah Lembaga pemenuhan hak anak yang berpartisipasi aktif / Jumlah Lembaga pemenuhan hak anak x 100 %
									Program Perlindungan Khusus Anak	Menurunnya jumlah kekerasan terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani dan didampingi	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani dan didampingi / Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) x 100 %
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	

TABEL CASCADING DINAS KETAHANAN PANGAN DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : **Mewujudkan Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan masyarakat yang berkualitas	Terwujudnya masyarakat Bogor Sehat	Indeks Kesehatan		Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan	Data Komposit : Skor PPH = skor PPH kelompok padi – padian + … + skor PPH kelompok lain	Peningkatan ketersediaan dan diversifikasi konsumsi pangan yang aman	Meningkatkan penguatan cadangan pangan dan penganekaragaman pola konsumsi pangan	**Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**	Pembangunan infrastruktur pendukung kemandirian pangan terlaksana dengan baik	Persentase infrastruktur kemandirian pangan yang terbangun	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dibangun / Jumlah target infrastruktur yang dibangun x 100%
									Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tersedianya cadangan pangan daerah	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras sesuai kebutuhan)	**Kemendagri 18/2020 (LPPD) :** Jumlah cadangan pangan / Jumlah kebutuhan pangan X 100% **Permentan 11 :** Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (beras) / Jumlah Cadangan beras Kab. Bogor x 100%
									Program Penanganan Kerawanan Pangan	Berkurangnya desa/kel rawan pangan	Persentase Desa Rawan Pangan yang ditangani	jumlah desa rawan pangan yang ditangani pada tahun ke-n / Jumlah desa rawan pangan x 100%
									Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman di masyarakat	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Tidak Terindikasi Cemaran Zat Berbahaya	jumlah PSAT yg tidak terindikasi zat berbahaya / jumlah PSAT yang diuji * 100%

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota**	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi	

TABEL CASCADING DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : **Mewujudkan Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan	Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan	Indeks ketimpangan wilayah williamson	$I_w = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 (\frac{f_i}{n})}}{\bar{y}}$	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKTL)	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Mengendalikan Pencemaran Lingkungan Hidup	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	Meningkatnya Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Persentase Pengelolaan B3 dan Limbah B3	B3 dan Limbah B3 yang dikelola / Jumlah Kegiatan atau/Usaha yang memliki persetujuan lingkungan (2021-2023) x 100%
									Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terkendalinya air limbah dan emisi sesuai dengan Baku Mutu	Persentase Persetujuan Teknis yang diterbitkan	Jumlah Persetujuan Teknis yang diterbitkan/Jumlah Kegiatan atau/Usaha yang memliki persetujuan lingkungan (2021-2023)
									Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat / Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi x 100%
									Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Terwujudnya keselarasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup	Tingkat keselarasan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun/jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup tahun rencana (2018-2023) x 100%
									Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Terselesaikannya permasalahan lingkungan hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diselesaikan	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan/Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang masuk x 100%

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
									Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup	Persentase Orang/Kelompok yang Berpartisipasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Orang/Kelompok masyarakat yang memahami lingkungan hidup / target Orang/Kelompok masyarakat tahun rencana (2021-2023) x 100%
									Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Terwujudnya apresiasi terhadap kinerja Orang/Kelompok masyarakat peduli lingkungan	Cakupan Orang/Kelompok masyarakat yang mendapatkan apresiasi peduli lingkungan	Jumlah Orang/Kelompok masyarakat yang mendapatkan apresiasi peduli lingkungan / Jumlah Orang/Kelompok yang Berpartisipasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
								Melestarikan keanekaragaman hayati	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	Berkurangnya tutupan lahan	Persentase Luas Hutan Kota yang Terbangun	Luas Hutan Kota yang Terbangun/ Target Luas Hutan Kota pada Periode Perencanaan (2018-2023)*100
							Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan	Menyediakan sarana prasarana persampahan	**Program Pengelolaan Persampahan**	Tertanganinya sampah	Persentase Volume Sampah yang Dikelola	Volume sampah yang dikelola/Volume timbulan sampah x 100%
								Mewujudkan Bogor Antik "Asri Tanpa Plastik"				
								Menangani sampah berbasis zonasi				
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	

TABEL CASCADING DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Nilai Unsur (Nilai rata-rata pelayanan)}}{\text{NRR per Unsur (Nilai Kuisioner yang terisi)}} \times 25$ NRR Tertimbang X 0,075 Penjelasan : Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Optimalisasi pelayanan prima terhadap masyarakat	Mengembangkan pelayanan administrasi kependudukan	**Program Pendaftaran Penduduk**	Terpenuhinya penerbitan KTP elektronik	Cakupan penerbitan KTP	Jumlah Kepemilikan KTP ---------- x 100% Jumlah Wajib KTP berdasarkan data konsolidasi bersih Kemendagri
											Cakupan perekaman data biometrik	Jumlah Penduduk Wajib KTP yang telah melakukan perekaman/ Jumlah Wajib KTP berdasarkan data konsolidasi bersih Kemendagri
									Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya cakupan penerbitan akta kelahiran anak	Cakupan penerbitan akta kelahiran anak	Jumlah anak yang memiliki akta kelahiran ---------- x 100% Jumlah anak 0 - 18 tahun
									Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersajinya data kependudukan skala Kabupaten dalam satu tahun	Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam satu tahun	Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten kota dalam satu tahun (1) ---------- x 100% (1)tahun

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
									Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Tersusunnya profil perkembangan kependudukan	Ketersediaan profil perkembangan kependudukan	Jumlah profil kependuudkan yang tersedia dalam satu tahun ---------- x 100% (1)tahun
				Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	

TABEL CASCADING DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : **Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi		Meningkatnya daya saing daerah	PDRB atas Dasar Harga Berlaku		Peningkatan kualitas pelaku usaha	Optimalisasi dan Pengembangan BUMDes Melalui Peningkatan Manajemen Kelembagaan dan Unit Usaha BUMDes	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang sesuai ketentuan	Persentase Peningkatan Status BUMDes Mandiri	Jumlah BUMDes maju yang meningkat menjadi mandiri / Total BUMDes maju x 100%
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Meningkatnya Kualitas Pelayan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		Optimalisasi pelayanan prima terhadap masyarakat	Meningkatkan kualitas pelaku pembangunan melalui pemberian insentif bagi Ketua RT, Ketua RW, Linmas, Guru Ngaji, Amil, dan Kader Posyandu	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa aktif / Jumlah lembaga kemasyarakatan desa di Kab. Bogor x 100%
				Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Menyelenggarakan Sekolah Pemerintah Desa	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang sesuai ketentuan	Persentase aparatur desa yang mendapatkan fasilitasi sekolah pemerintahan desa	jumlah aparatur desa yang mendapatkan fasilitasi sekolah pemerintahan desa pertahun / Total aparatur pemerintahan desa x 100%
								Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah			Persentase Raperdes tentang APBDes yang Diklarifikasi	Jumlah APBDes yang diklarifikasi / jumlah desa x 100%
											Persentase Raperdes tentang RKPDes yang Diklarifikasi	Jumlah Raperdes yang diklarifikasi / jumlah desa x 100%
									Program Peningkatan Kerjasama Desa	Meningkatnya desa yang melakukan kerjasama	Persentase desa yang melakukan kerjasama	jumlah desa yang melaksanakan kerja sama / jumlah desa yang ada di Kab. Bogor x 100%

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan	Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan	Indeks Ketimpangan wiliayah (Williamson)		Meningkatnya kualitas sarana prasana desa	Indeks Desa Membangun		Peningkatan kualitas infrastruktur desa	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas	**PROGRAM PENATAAN DESA**	Tertatanya desa	Persentase Desa Tertata melalui Program Samisade	Jumlah Desa yang terfasiltasi melalui Program Samisade / Total Jumlah Desa * 100
								Betonisasi jalan desa				
							Pengembangan Kehidupan Sosial Masyarakat Desa	Meningkatkan Partisipsi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa aktif / Jumlah lembaga kemasyarakatan desa di Kab. Bogor x 100%
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	

TABEL CASCADING DINAS PERHUBUNGAN DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : **TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU NYAMAN DAN BERKEADABAN**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan	Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan	Indeks ketimpangan wilayah (williamson)	$I_w = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 (\frac{f_i}{n})}}{\bar{y}}$	Meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	Indeks Konektivitas Infrastruktur	Persentase Kondisi Jalan Mantap/ Peresentase Kinerja Jaringan Jalan	Peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi berkualitas	Mengendalikan kinerja lalu lintas	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	Meningkatnya kinerja jaringan jalan	Rasio kinerja jaringan jalan	volume lalu lintas/ kapasitas luas jalan
								Membangun Fasilitas Parkir yang Terintegrasi				
									Program Pengelolaan Perkeretaapian	Meningkatnya kapasitas perencanaan penanganan perlintasan kereta api	Persentase pengelolaan perlintasan kereta api	jumlah perlintasan yang direncanakan penangananya / target perlintasan kereta yang akan ditangani
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	

TABEL CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : **TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU NYAMAN DAN BERKEADABAN**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Kualitas pelayanan publik meningkat	Indeks kepuasan masyarakat (poin)		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan pelayanan informasi publik terintegrasi	**Program Informasi dan Komunikasi Publik**	Meningkatnya Masyarakat yang mengetahui kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Kabupaten / Jumlah Penduduk x 100%
				Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP			Mengembangkan inovasi dan teknologi perangkat daerah dan masyarakat	**Program Aplikasi Informatika**	Tersedianya Infrastruktur Teknologi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh diskominfo / jumlah OPD x 100%
										Meningkatnya Layanan Publik yang diselenggarakan secara elektronik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi / Jumlah Layanan Publik x 100%
								Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	Tersedianya Data Statistik Sektoral Kabupaten Bogor	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	Jumlah data statistik sektoral PD yang tersedia/Jumlah PD*100%
									Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi / jumlah area penilaian x 100%

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
								Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Terselenggaranya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah dengan baik	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	

TABEL CASCADING DINAS KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH MENENGAH DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi		Meningkatnya daya saing daerah	PDRB atas dasar harga berlaku		Peningkatan kualitas pelaku usaha	Sertifikasi pelaku usaha	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)**	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Usaha Mikro dan Kecil	Persentase Usaha Mikro yang kapabel (yang berizin dan bermitra)	Jumlah usaha mikro yang berizin dan bermitra tahun ke-n / Jumlah seluruh usaha mikro x 100
								Optimalisasi Kemitraan UMKM dengan dunia usaha	**Program Pengembangan UMKM**	Terfasilitasinya Peningkatan Level Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Yang dikembangkan menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha / Jumlah usaha mikro keseluruhan x 100
							Optimalisasi Promosi Investasi dan Pemasaran Produk	Menggalakan Gerakan bela beli produk UMKM / IKM				
							Peningkatan peluang investasi	Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus				
							Peningkatan kualitas pelaku usaha	Meningkatan Jumlah koperasi aktif	**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Prosentase Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset/ Jumlah seluruh koperasi x 100
									Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Tingkat Produktivitas Koperasi	Jumlah Volume Usaha Tahun ke n / Jumlah Modal+asset Koperasi tahun ke-n x 100

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
									Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Tersedianya data Tingkat Kesehatan Koperasi	Persentase Koperasi yang berpredikat Sehat	Jumlah koperasi yang sehat tahun ke-n / Jumlah seluruh koperasi KSP/USP x 100
									Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya SDM Koperasi yang Dilatih	Persentase SDM koperasi yang dilatih	Jumlah SDM koperasi yang dilatih tahun ke-n / Jumlah seluruh anggota koperasi x 100
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Kualitas pelayanan publik meningkat	Indeks Kepuasan Masyarakat		Optimalisasi pelayanan prima terhadap masyarakat	Fasilitasi penerbitan izin usaha koperasi	**Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**	Tertib Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang berizin	Jumlah koperasi yang didorong mendapatkan izin usaha simpan pinjam tahun ke-n / Jumlah seluruh koperasi simpan pinjam x 100
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	

TABEL CASCADING DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : **Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi		Meningkatnya daya saing daerah	PDRB atas dasar harga berlaku		Peningkatan peluang investasi	Mengembangkan penanaman modal dan peta investasi	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	Terpenuhinya target peningkatan investasi di Kabupaten Bogor	Persentase peningkatan investasi	Jumlah nilai investasi tahun N - Jumlah nilai investasi tahun N-1/Jumlah nilai investasi tahun N-1*100
								Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus				
							Optimalisasi promosi investasi dan pemasaran produk	Menyelenggarakan promosi investasi	**Program Promosi Penanaman Modal**	Meningkatnya jumlah investor di Kabupaten Bogor	Jumlah investor	Penanam modal PMA + Penanam modal PMDN
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks reformasi birokrasi		Kualitas pelayanan publik meningkat	Indeks Kepuasan Masyarakat		Optimalisasi pelayanan prima terhadap masyarakat	Mengoptimalkan pelayanan perizinan	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	Terfasilitasinya permohonan untuk perizinan dan nonperizinan	Presentase izin dan non izin yang diterbitkan	Realisasi jumlah izin tahun N/Jumlah target keseluruhan*100
									Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terpenuhinya pengawasan terhadap perizinan	Tingkat pengendalian perizinan	Realisasi jumlah perusahaan yang diawasi di tahun N/Jumlah target keseluruhan *100
									Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase permintaan data yang dipenuhi	Jumlah permintaan data yang terpenuhi/Jumlah permintaan data*100
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah di perangkat daerah	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	

TABEL CASCADING DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU NYAMAN DAN BERKEADABAN

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Terwujudnya Masyarakat Bogor Maju dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi		Meningkatnya Daya Saing Daerah	PDRB atas dasar harga berlaku (triliun Rp.)		Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatkan Kualitas Pemuda	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	Terwujudnya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	Persentase peningkatan kapasitas daya saing pemuda	Jumlah pernuda (16-30 tahun) yang berwirausaha dibagi Jumlah pemuda (umur 16- 30 tahun) x 100%
											Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi. Sosial kemasyarakatan	organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dibagi jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) x 100%
									Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya kapasitas pemuda dalam bidang kepramukaan	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan	Jumlah kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan dibagi Jumlah kegiatan kepramukaan yang direncanakan x 100%
							Peningkatan Prestasi Olahraga	Meningkatkan kualitas dan kuantitas insan olahraga	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	Meningkatnya Kapasitas insan olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Perolehan Medali pada Event Olahraga Nasional dan Internasional
								Membangun GOM Kecamatan				

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
				Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	

TABEL CASCADING DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : **Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan kesalehan sosial	Terwujudnya masyarakat Bogor berkeadaban	Indeks Kebahagiaan		Pelestarian Kebudayaan	Persentase Kebudayaan yang dilestarikan	Jumlah Kebudayaan yang dilestarikan (Festival Budaya + BCB + Kesenian tradisional) /	Perlindungan dan pembinaan seni dan budaya daerah	Pengembangan dan pelestarian budaya Cimande	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Terseleneggranya kegiatan Budaya	Kegiatan budaya yang diselenggarakan	Jumlah Kegiatan budaya yang diselenggarakan
								Menyelenggarakan festival seni dan budaya				
								Melestarikan Bahasa Sunda melalui Kemis Nyunda				
								Pelestarian budaya melalui program Bogor Culture Night	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Pengembangan upaya pelestarian kesenian tradisional	Kesenian tradisional yang dilestarikan	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan
									PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Terseleneggranya kegiatan Budaya	Kegiatan budaya yang diselenggarakan	Jumlah Kegiatan budaya yang diselenggarakan
								Pengelolaan cagar budaya daerah	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persentase Situs dan Cagar Budaya yang terlestarikan	Jumlah Cagar Budaya yang Terlestarikan / Jumlah Cagar Budaya yg terdata x 100%
Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi		Meningkatnya daya saing daerah	PDRB atas dasar harga berlaku	PDRB Kab Bogor atas dasar harga berlaku	Peningkatan produk daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Mengembangkan destinasi pariwisata bertaraf nasional dan internasional	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	PAD Sektor Pariwisata tahun-n /PAD Kabupaten Bogor tahun ke-n x100%
								Pengembangan Geopark Pongkor		Bertambahnya Tingkat hunian akomodasi	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah Kamar terjual per Jumlah kamar tersedia x 100%
								Festival wisata desa				

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
								Meningkatkan upaya pemasaran dan promosi pariwisata melalui penyelenggaraan event tingkat lokal, regional, nasional dan internasional berbasis teknologi informasi	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan yang datang ke kabupaten Bogor	Jumlah wisatawan mancanegara Tahun n dikurang (n-1) / (n-1) x 100%
										Meningkatnya perjalanan wisatawan Nusantara	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten Bogor	Jumlah wisatawan nusantara Tahun n dikurang (n-1) / (n-1) x 100%
							Peningkatan kualitas pelaku usaha	Sertifikasi pelaku usaha	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Meningkatnya Daya Saing SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif Melalui Sertifikasi Nasional	Jumlah SDM Pariwisata dan ekraf yang Tersertifikasi	Jml SDM Pariwisata dan ekraf tersertifikasi
							Peningkatan kualitas pelaku usaha	Pengembangan ekosistem usaha ekonomi kreatif	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Sub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan	JumlahSub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan
							Peningkatan peluang investasi	Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	PAD Sektor Pariwisata/PAD Kabupaten Bogor
										Meningkatnya Tingkat hunian akomodasi	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah Kamar terjual per Jumlah kamar tersedia x 100%
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan yang datang ke Kabupaten Bogor	Jumlah wisatawan mancanegara Tahun n dikurang (n-1) / (n-1) x 100%

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
										Meningkatnya perjalanan wisatawan Nusantara	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten Bogor	Jumlah wisatawan nusantara Tahun n dikurang (n-1) / (n-1) x 100%
									PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Sub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan	JumlahSub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan
									PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Terseleneggranya kegiatan Budaya	Kegiatan budaya yang diselenggarakan	Jumlah Kegiatan budaya yang diselenggarakan
	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	

TABEL CASCADING DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : **Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Perpustakaan												
Mewujudkan masyarakat yang berkualitas	Terwujudnya masyarakat bogor cerdas	indeks pendidikan		Meningkatnya budaya literasi	indeks membaca	fasilitas membaca + indeks pemanfaatan bahan bacaan + indeks kebiasaan membaca masyarakat / 3	Peningkatan budaya membaca	Mengembangkan layanan perpustakaan	**Program Pembinaan Perpustakaan**	Meningkatnya minat membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat
								Mengembangkan sarana dan multi media literasi/baca				
									Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	terkelolanya koleksi naskah kuno dan koleksi muatan lokal daerah di kabupaten bogor	Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Nusantara yang Dikelola dan Dilestarikan	jumlah naskah kuno dan koleksi muatan lokal daerah yang dialihmediakan / jumlah naskah kuno dan koleksi muatan lokal daerah yang terkoleksi * 100%
Kearsipan												
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Menerapkan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu	**Program Pengelolaan Arsip**	Terkelolanya arsip sesuai dengan NSPK	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawab an nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip + persentase arsip in aktif yang telah dibuatkan daftar arsip + persentase arsip statis yang dibuatkan sarana temu balik + persentase jumlah arsip yang dimasukan dalam SIKN melalui JIKN / 4

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
									Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Terjaganya kondisi fisk arsip yang bernilai guna	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawab an setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK + tingakat kesesuaian perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK + tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah yang di gabung dan/atau dibubarkan dengan NSPK + tingkat kesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK + tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK + tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersipat tertutup dengan NSPK / 6
									Program Perizinan Penggunaan Arsip	Tersedianya informasi arsip yang bersifat tertutup	Cakupan layanan arsip bersifat tertutup	layanan arsip bersifat tertutup yang dilaksanakan / layanan arsip bersifat tertutup yang harus dilakukan * 100%
				Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	

TABEL CASCADING DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : Terwujudnya Kabupaten Bogor termaju nyaman dan berkeadaban

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		Meningkatnya daya saing daerah	PDRB atas dasar harga berlaku		Peningkatan produk daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Total hasil tangkapan ikan di perairan umum	Jumlah hasil tangkapan = ikan tangkapan sungai+ ikan tangkapan situ
									Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Kontribusi Produksi Benih Ikan terhadap target total	produksi benih ikan/jumlah total produksi ikan (th 2021-2023) x 100
									Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Terjaminnya usaha budidaya dan penangkapan di perairan umum yang berkelanjutan	Persentase Usaha Perikanan Budidaya dan Tangkap di Perairan Umum	Jumlah pelaku usaha perikanan budidaya+tangkap thn N / total pelaku usaha perikanan budidaya+tangkap
									Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	Jumlah Total Produksi Olahan Perikanan	Produk olahan = jumlah olahan A + B+ dst
								Fasilitasi Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pertanian	**Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian**	Terpenuhinya sarana Pertanian (Peternakan)	persentase Keterpenuhan sarana Peternakan (Bibit Ternak)	Rumus Jumlah Ternak = (Ternak Besar + Ternak Kecil+unggas)/total jumlah ternak

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Terpenuhinya infrastruktur pertanian (peternakan)	persentase Keterpenuhan prasarana (infrastruktur) Peternakan	= jumlah sarana yang tersedia/ jumlah sarana yang ditargetkan himgga akhir periode x 100
								Mengendalikan penyakit hewan dan zoonosis	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Pengendalian dan penanganan penyakit hewan menular	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	= (Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) − jumlah kejadian/ kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya)/(jml kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) x 100% sama dg LPPD
								Mengendalikan dan Menanggulangi Bencana Pertanian	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	Menurunnya risiko bencana akibat zoonosis	Jumlah penyakit yang dikendalikan	= jumlah jenis penyakit AI+Antrax+ Rabies
							Peningkatan Kualitas Pelaku Usaha	Sertifikasi Pelaku Usaha	**Program Perizinan usaha pertanian**	Pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pertanian (usaha peternakan, izin usaha obat hewan di tingkat pengecer)	Persentase Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pertanian (usaha peternakan, toko obat hewan di tingkat pengecer)	= jumlah usaha yang dibina(diawasi) / target pengawasan usaha selama 3 tahun x 100

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
								Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan petani	**Program Penyuluhan pertanian**	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok (penyuluhan) peternakan	persentasi kenaikan kelas kelompok	'= (Jumlah kelompok peternakan yg dibina/jumlah klp yg ada di kab bogor)*100%
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	

TABEL CASCADING DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi		Meningkatnya daya saing daerah	PDRB atas dasar harga berlaku		Peningkatan produk daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Fasilitasi sarana dan prasarana infrastruktur pertanian	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun (ton/ha)	Produktivitas pangan per ha per tahun= ((Total produksi (ton))/(Luas panen (ha))
								Meningkatkan produksi kopi Robusta terbesar di Jawa Barat				
								Menggalakkan gerakan beli beras petani Bogor				
								Mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian				
								Fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)				
									Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Terpenuhinya prasarana pertanian	Persentase pemenuhan prasarana pertanian	Rumus= (jumlah prasarana yang terpenuhi pada tahun berjalan/ target prasarana yang terpenuhi sampai akhir tahun 2023) x100%
									Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Menurunnya resiko bencana pertanian	Persentase luas lahan pertanian yang diasuransikan untuk meminimalkan resiko bencana pertanian	*Rumus = (Luas lahan pertanian yang diasuransikan/ dengan luas lahan pertanian di Kabupaten Bogor) x 100%*

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
									Program Perizinan Usaha Pertanian	Terkendalinya ijin usaha pertanian	Tingkat pelayanan pemberian pertimbangan teknis ijin usaha pertanian	Rumus = (jumlah usaha pertanian yang dibina pelayanan pertimbangan teknis ijin usahanya pada tahun berjalan (n)/ total jumlah usaha pertanian yang dibina sampai dengan akhir 2023)) x 100%
							Peningkatan kualitas pelaku usaha	Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan petani	**Program Penyuluhan Pertanian**	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian	Persentase peningkatan kemampuan kelas kelompok berdasarkan skor penilaian	*Rumus= (Jumlah kelompok yang meningkat skor penilaian kelas kemampuan kelompoknya/ total jumlah kelompok tani di Kab Bogor data simulhtan tahun n) x 100%*
								Fasilitasi Petani Millenial di Kabupaten Bogor				
				Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah terfasilitasi dengan baik	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	

TABEL CASCADING DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : **Terwujudnya Kabupaten Bogor yang Termaju, Nyaman, dan Berkeadaban**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		Meningkatnya daya saing daerah	PDRB atas dasar harga berlaku		Peningkatan produk daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Meningkatkan stabilisasi harga bahan pokok dan barang penting	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Terkendalinya distribusi pupuk	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi/ RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) x 100
										Terjaminnya stabilitas harga barang, barang penting dan kebutuhan pokok	Indeks Harga Konsumen (IHK)	IHK Bahan Makanan *(data BPS)*
								Membangun dan merehabilitasi pasar	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan	Persentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya / Total sarana dan prasarana distribusi perdagangan * 100
							Peningkatan kualitas pelaku usaha	Meningkatkan kualitas metrologi legal	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Meningkatnya jumlah UTTP yang bersertifikat	Presentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan ---------- x 100% Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang terdata
							Optimalisasi promosi investasi dan pemasaran produk	Fasilitasi pemasaran produk	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Meningkatnya omset penjualan produk daerah	Jumlah jenis dan nilai produk dalam negeri yang di pasarkan	Jumlah jenis dan nilai produk dalam negeri yang di pasarkan tahun ke-n
									PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya omset penjualan produk ekspor	Nilai Ekspor Daerah (berdasarkan registrasi SKA)	Nilai Ekspor Daerah (berdasarkan registrasi SKA) tahun ke-n

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		Optimalisasi pelayanan prima terhadap masyarakat	Fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Meningkatnya jumah pelaku usaha perdagangan yang memperoleh rekomendasi teknis	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPI /SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM /IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan ---------- x 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota
								Menerbitkan rekomendasi teknis bahan perizinan	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	Meningkatnya pelaku usaha industri yang berijin	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah yang berijin	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang telah memiliki izin sesuai ketentuan ---------- x 100% Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah di wilayah Kab/Kota
								Menggalakkan gerakan bela beli produk UKM/IKM			Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Lndustri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan ----------x 100% Jumlah Izin Usaha Lndustri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait
											Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan ----------x 100% Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
											Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKT) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan ----------x 100% Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKT) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota
							Peningkatan Peluang Investasi	Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Terwujudnya keselarasan antara perencanaan dengan implementasi pembangunan industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Capaian Sasaran Pembangunan Industri dalam RIPIKA tahun ke-n ---------- x 100% Total Sasaran Pembangunan Industri dalam RIPIKA

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan pelayanan informasi publik terintegrasi	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Tersedianya informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7- 12 bulan - Informasi produksi dan kapasitas produksi Informasi bahan baku dan bahan penolong - Informasi bahan bakar/ energi Informasi tenaga kerja
								Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	

TABEL CASCADING SEKRETARIAT DAERAH DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		Optimalisasi pelayanan prima terhadap masyarakat	Fasilitasi dan koordinasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	Optimalnya tata laksana kelembagaan perangkat daerah, serta kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dan reformasi birokrasi	Persentase Kebijakan di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang ditetapkan	Jumlah Kebijakan di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang ditetapkan / Total Kebijakan di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang direncanakan x 100
				Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah		Terfasilitasinya kebutuhan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase kebutuhan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	Jumlah kebutuhan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi / jumlah kebutuhan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang direncanakan x 100

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
										Optimalnya penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah lingkup Administrasi	Persentase Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Administrasi yang mencapai target	Jumlah penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Administrasi yang mencapai target / Jumlah seluruh penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Administrasi x 100
										Fasilitasi keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi tugas pimpinan	Persentase Fasilitasi keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi tugas pimpinan yang terlaksana	Jumlah Fasilitasi keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi tugas pimpinan yang terlaksana / Jumlah Fasilitasi keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi tugas pimpinan yang direncanakan x 100
					Nilai AKIP				**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana	Jumlah kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana / Jumlah kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang ditargetkan x 100

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
								Menggiatkan Boling (Bogor Keliling) /Saba Desa			Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi dan kerjasama daerah yang terlaksana	Jumlah kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi dan kerjasama daerah yang terlaksana / Jumlah kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi dan kerjasama daerah yang ditargetkan x 100
								Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan SDA yang terlaksana	Jumlah kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan SDA yang terlaksana / Jumlah kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan SDA yang ditargetkan x 100

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
											Persentase kebijakan di bidang penyusunan program pengendalian program, dan evaluasi, pelaporan yang terlaksana	Jumlah kebijakan di bidang penyusunan program pengendalian program, dan evaluasi, pelaporan yang terlaksana / Jumlah kebijakan di bidang penyusunan program pengendalian program, dan evaluasi, pelaporan yang ditargetkan x 100
											Persentase kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	Jumlah kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana / Jumlah kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan Kesalehan Sosial	Terwujudnya Masyarakat Bogor Berkeadaban	Indeks Kebahagiaan		Kehidupan Masyarakat Agamis, Harmonis, Nyaman, Tertib dan Tidak Diskriminatif	Indeks kerukunan hidup beragama		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi di bidang keagamaan	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan di bidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	Jumlah kebijakan di bidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana / Jumlah kebijakan di bidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang ditargetkan x 100
								Menggalakkan Gerakan Bogor Ngaos				
								Menyelenggarakan Bedah Pesantren				
								Memberikan Bantuan Legalitas Bagi Pondok Pesantren				
								Meningkatkan Kualitas Keagamaan Melalui Program Hafizd Qur'an				
							Peningkatan Keharmonisan dan Kualitas Kehidupan Sosial Politik di Masyarakat	Menggiatkan Jumling				
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	

TABEL CASCADING SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : **"Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban".**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks reformasi birokrasi (poin)		Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP (predikat/poin)		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	Meningkatnya cakupan dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Cakupan dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah dukungan yang dilaksanakan : (dibagi) layanan yang seharusnya dilaksanakan x (dikali) 100%
				Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	

TABEL CASCADING BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran terintegrasi	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	1. Produk dokumen perencanaan selesai tepat waktu dan sesuai aturan	Tingkat ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan pembangunan	jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang selesai tepat waktu/jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan X 100%
									Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya kesesuaian substansi dokumen perencanaan pembangunan	Tingkat Kesesuaian substansi dokumen perencanaan pembangunan dengan aturan	Program yang sesuai dengan sasaran pembangunan yang direncanakan dibagi Program yang sesuai dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan x 100
					Indeks Inovasi Daerah			Mengembangkan Inovasi dan Teknologi Perangkat Daerah dan Masyarakat	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung subtansi perencanaan dan pembangunan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dibagi hasil penelitian dan pengembangan yang di susun x 100%
				Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	

TABEL CASCADING BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : **Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik	Terwujudnya Masyarakat Bogor Maju dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Peningkatan Penerapan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran terintegrasi	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	Terkelolanya keuangan daerah dengan baik	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnva	Nilai realisasi SiLPA/ total belanja anggaran tahun sebelumnva x 100
											Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *transfer expenditures*)	Jumlah belanja urusan pemerintahan - *transfer expenditures* / jumlah belanja APBD x 100
											Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan/ Jumlah APBD x 100
											Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanj a dalam realisasi/ total belanja APBD dikurangi satu x 100

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
								Optimalisasi pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Terkelolanya barang milik daerah dengan baik	Manajemen Aset	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	

TABEL CASCADING BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : **Terwujudnya Kabupaten Bogor yang Termaju, Nyaman, dan Berkeadaban**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks reformasi birokrasi		Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP (predikat/poin)		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Target PAD	Realisasi PAD / Target PAD * 100
											Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	((Nilai absolut dari Total PAD dalam Realisasi/Total PAD dalam APBD)-1)*100
								Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	

TABEL CASCADING BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : **Terwujudnya Kabupaten Bogor yang Termaju, Nyaman, dan Berkeadaban**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan kapasitas kinerja ASN	**Program Kepegawaian Daerah**	Meningkatnya kinerja pengelolaan kepegawaian daerah	Nilai Sistem Merit aspek kepegawaian	Jml. Nilai Aspek (Perencanaan Kebutuhuan + Pengadaan + Pengembangan Karier + Promosi dan Mutasi/Rotasi + Manajemen Kinerja + Penggajian, Penghargaan dan Disiplin + Perlindungan dan Pelayanan + Sistem Informasi) - Jml nilai Sub Aspek (Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangkap peningkatan kapasitas ASN + Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan + Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai + pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching, counseling dan mentoring + Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan/ Pelatihan Dasar bagi CALON PNS)
											Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jml. PNS berpendidikan Tinggi (D1,D2,D3,S1,S2,S3) ---------- X 100% Jml. PNS berpendidikan (SD, SMP,SMA) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
											Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jml. PNS Fungsional ---------- X 100% Jml. PNS Kab.Bogor (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
									Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kompetensi pegawai	Nilai Sistem Merit aspek pengembangan sumber daya manusia	Jml Nilai (Aspek Aspek Pengadaan Sub Aspek (Pelaksanaan LPJ (Pelatihan Prajabatan/ Pelatihan Dasar bagi CALON PNS)) + Nilai Aspek Pengembangan Karier Sub Aspek (Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangkap peningkatan kapasitas ASN + Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan + Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai + pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching, counseling dan mentoring)
											Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jml. PNS Fungsional Bersertikat kompetensi ---------- X 100% Jml. PNS Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
											Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi 20 JP / Orang / Tahun ASN Kab. Bogor	Jml. ASN yang mengikuti PK >=20 Jp ---------- X 100% Jml. ASN Kab. Bogor

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
				Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	

TABEL CASCADING INSPEKTORAT DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : **Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks reformasi birokrasi (poin)		Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP (predikat/poin)		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas pengawasan	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Pengawasan	Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan ---------- x 100% Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
									Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Tersedianya Kebijakan teknis, dan fasilitasi Pendampingan dan Asistensi pengawasan	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dapat diselesaikan	Jumlah Pendampingan dan Asistensi Pengawasan yang dapat diselesaikan ---------- x 100% Jumlah total pendampingan dan asistensi
											Jumlah dokumen kebijakan Teknis di bidang pengawasan	Jumlah kebijakan Teknis di bidang pengawasan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	

TABEL CASCADING KECAMATAN DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : **Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman Dan Berkeadaban**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	Tercapaiannya Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Program pembangunan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan/ total Program pembangunan yang direncanakan pada tingkat kecamatan*100%
									Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Tertanganinya ganguan trantibum	Persentase penanganan ganguan trantibum	jumlah konflik sosial yang tertangani/ total laporan konflik sosial*100
									Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	Jumlah penyelenggaraan Tugas umum pemerintahan yang terfasilitasi/ Total penyelenggaraan tugas umum pemerintahan*100 %;
									Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tercakupnya keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan daerah	Cakupan keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan daerah	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam program pembangunan daerah/ total kelompok masyarakat yang terdata*100%;

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
									Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Tertibnya administrasi desa	persentase jumlah desa tertib administrasi	Jumlah desa tertib administrasi Jumlah desa tertib administrasi/ total desa * 100 %
									Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	

TABEL CASCADING BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

VISI : Mewujudkan Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan masyarakat yang berkualitas	Terwujudnya masyarakat Bogor cerdas	Indeks Pendidikan		Meningkatnya pelayanan pendidikan yang berkualitas	RLS (Rata-rata Lama Sekolah)		Peningkatan pengelolaan pendidikan	***Forkopimda Goes To School***	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	Meningkatnya Pemahaman tentang Politik serta Etika dan Budaya Politik	Tingkat Bina Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (TBP2E)	
					HLS (Harapan Lama Sekolah)							
Mewujudkan Kesalehan Sosial	Terwujudnya masyarakat Bogor berkeadaban	Indeks Kebahagiaan		Mewujudkan kehidupan masyarakat agamis, harmonis, nyaman, tertib dan tidak diskriminatif	Indeks Kerukunan Umat Beragama	TBKBP = $\frac{\text{Jumlah Peserta Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Produktif}}$ x 100%	Peningkatan keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial politik di masyarakat	Meningkatkan wawasan kebangsaan dan pembinaan politik	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Terciptanya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (TBIWK)	TBIWK = $\frac{\text{Jumlah Peserta Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Produktif}}$ x 100%
									Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Tingkat Penanganan Potensi Konflik (TPPK)	TPPK = $(1 - \frac{\text{Jumlah Konflik Sosial yang Terjadi}}{\text{Jumlah Potensi Konflik Sosial}})$ x 100%
									Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya Pemahaman tentang Politik serta Etika dan Budaya Politik	Tingkat Bina Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (TBP2E)	TBP2E = $\frac{\text{Jumlah Peserta Pembinaan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya politik}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Produktif}}$ x 100%
									Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya peran Organisasi Masyarakat dalam kehidupan demokrasi	Tingkat Bina Ormas (TBO)	TBO = $\frac{\text{Jumlah Peserta Pembinaan Ormas}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Produktif}}$ x 100%
									Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Mewujudkan Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budaya dan agama	Tingkat Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama (TBKE)	TBKE = $\frac{\text{Jumlah Peserta Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Produktif}}$ x 100%
									Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya pembinaan kewaspadaan dini masyarakat, koordinasi intelijen daerah dan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.	Tingkat Penanganan Potensi Konflik (TPPK)	TPPK = $(1 - \frac{\text{Jumlah Konflik Sosial yang Terjadi}}{\text{Jumlah Potensi Konflik Sosial}})$ x 100%

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP		Peningkatan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	